BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), setiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan, pengelompokan transaksi keuangan dan penyiapan laporan keuangan Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Pelaporan melakukan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi dalam periode tertentu, sebagai bentuk kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen
   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
c. Transparansi
   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
d. Keseimbangan Antargenerasi
   Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
e. Evaluasi Kinerja
   Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memuat pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai informasi untuk membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
   LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
   LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
c. Neraca
   Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
d. Laporan Operasional (LO)
   LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
e. Laporan Arus Kas (LAK)
   LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. CaLK juga penyajian informasi yang diharuskan atau dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian kewajaran laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BAB 2 EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2. Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
4.3. Kebijakan Akuntansi Beban
4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja
4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang
4.8. Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka
4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi
4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan
4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah
4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
4.16. Kebijakan Akuntansi Koreksi
BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas
5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
BAB 7 PENUTUP

BAB 2
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

1.1. Ekonomi Makro

1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2021 (c-to-c) tumbuh positif sebesar 3,32 persen membaik dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar minus 2,65 persen seiring dengan perluasan implementasi vaksin, menurunnya kasus Covid-19, dan meningkatnya permintaan global serta domestik. Kinerja positif ekspor dan investasi diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Membaiknya perekonomian negara tujuan ekspor Jawa Tengah seperti AS, Tiongkok, dan Eropa, berdampak positif terhadap industri di Jawa Tengah. Kinerja investasi membaik ditopang oleh investasi pemerintah dan swasta. Adapun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah seperti dalam Grafik 1.1.

Grafik 1.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (%) Jawa Tengah
Laporan Keuangan Pemerintah DaerahTahun 2017 – 2021

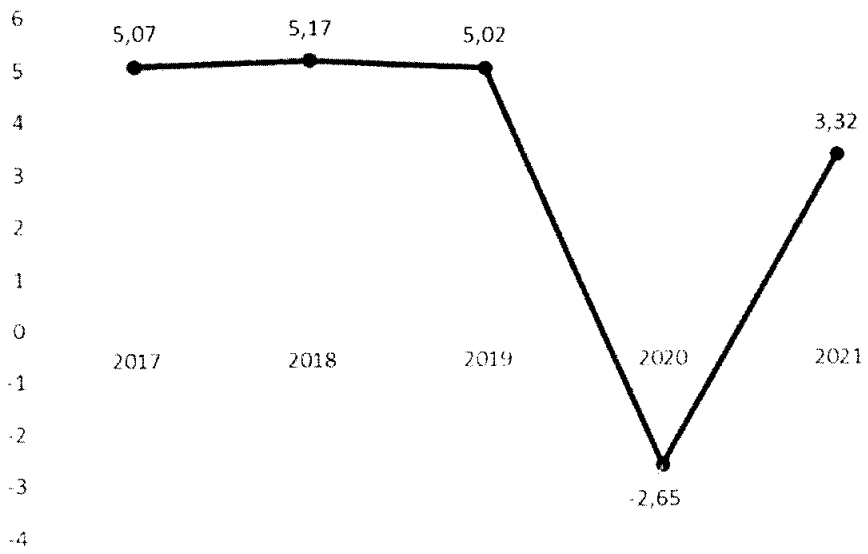

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Konstruksi sebesar 7,37 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 6,04 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,95 persen. Lapangan usaha Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan juga tumbuh positif masing-masing sebesar 2,32 persen; 0,81 persen; dan 5,80 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif di antaranya Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,92 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,87 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,40 persen. Hanya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib yang mencatatkan pertumbuhan negatif pada tahun 2021 yaitu sebesar -0,64 persen.

Data pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menurut lapangan usaha Tahun 2020 - 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020 – 2021

No	Lapangan Usaha	Prosentase (%) Pertumbuhan	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,48	0,81
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,80	4,40
3	Industri Pengolahan	-3,74	2,32
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,79	5,95
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,29	5,87
6	Konstruksi	-3,76	7,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,80	5,80
8	Transportasi dan Pergudangan	-33,15	3,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,98	5,92
10	Informasi dan Komunikasi	15,65	6,04
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,03	1,66
12	Real Estate	-0,28	2,15
13	Jasa Perusahaan	-7,19	3,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,31	-0,64
15	Jasa Pendidikan	-0,24	0,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,19	0,18
17	Jasa lainnya	-8,01	0,53
	PDRB	-2,65	3,32

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

Ekonomi Jawa Tengah juga tumbuh dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 15,97 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,86 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 1,82 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani

Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,25 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 0,83 persen. Sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 15,41 persen. Data Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2020 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran
Tahun 2020 – 2021

No	Komponen Pengeluaran	Prosentase (%)	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-1,42	1,82
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,98	1,25
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-4,30	0,83
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-6,98	6,86
5	Perubahan Inventori	-	-
6	Ekspor Barang dan Jasa	-13,84	15,97
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-14,82	15,41
	PDRB	-2,65	3,32

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

Sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2021 dari sisi lapangan usaha disumbang oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,84 persen disusul dengan Industri Pengolahan sebesar 0,78 persen serta Konstruksi sebesar 0,76 persen. Adapun sumber pertumbuhan menurut lapangan usaha seperti dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020 – 2021

Sumber Pertumbuhan Ekonomi		Persentase (%)	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,31	0,10
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,02	0,10
3	Industri Pengolahan	-1,27	0,78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,01
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00
6	Konstruksi	-0,39	0,76
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,55	0,84
8	Transportasi dan Pergudangan	-1,16	0,08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,27	0,19

Sumber Pertumbuhan Ekonomi		Persentase (%)	
		Tahun 2020	Tahun 2021
10	Informasi dan Komunikasi	0,80	0,37
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,05	0,05
12	Real Estate	-0,01	0,04
13	Jasa Perusahaan	-0,03	0,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,03	-0,02
15	Jasa Pendidikan	-0,01	0,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,07	0,00
17	Jasa lainnya	-0,14	0,01
	PDRB	-2,65	3,32

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

Dari sisi Pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari komponen ekspor barang dan jasa sebesar 5,58 persen, diikuti komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 1,98% dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesat 1,08 persen. Data lengkap Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2020 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran
Tahun 2020 - 2021

No	Komponen Pengeluaran	Persentase (%)	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,86	1,08
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-0,04	0,01
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,33	0,05
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-2,30	1,98
5	Perubahan Inventori		
6	Ekspor Barang dan Jasa	-5,88	5,58
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-6,72	4,93
	PDRB	-2,65	3,32

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

Struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2021 menurut Lapangan Usaha atas harga didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 34,31 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,86 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,75 persen; dan Konstruksi sebesar 11,12 persen. Data lengkap struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2020–2021 menurut lapangan usaha, dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020 – 2021

Kategori	Komponen (%)		
		Tahun 2020**	Tahun 2021**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,30	13,86
B	Pertambangan dan Penggalian	2,45	2,58
C	Industri Pengolahan	34,52	34,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06
F	Konstruksi	10,55	11,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,49	13,75
H	Transportasi dan Pergudangan	2,21	2,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,99	3,06
J	Informasi dan Komunikasi	4,26	4,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,98	3,02
L	Real Estate	1,71	1,67
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,70	2,52
P	Jasa Pendidikan	4,74	4,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,01	0,97
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,53	1,48
	PDRB	100,00	100,00

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)
*Keterangan: ** Angka Sangat Sementara*

Dari sisi pengeluaran, struktur PDRB Jawa Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 didominasi oleh Komponen PK-RT sebesar 60,14 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 40,23 persen; komponen PMTB sebesar 31,76 persen; Komponen PK-P sebesar 7,18 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,18 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,84 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 41,33 persen. Data lengkap seperti pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6.
Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020 – 2021

Komponen		Struktur (%)	
		Tahun 2020**	Tahun 2021**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,96	60,14
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,20	1,18
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,29	7,18
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,98	31,76
5	Perubahan Inventori	0,96	0,84
6	Ekspor Barang dan Jasa	36,91	40,23
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	38,30	41,33
	PDRB	100,00	100,00

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

1.1.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 sebesar Rp 38,67 juta meningkat dibanding PDRB per kapita Tahun 2020 yang sebesar Rp 36,98 juta. Data selengkapnya sebagaiamana Tabel berikut:

Tabel 1.7
PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2021

Komponen	2020*)	2021**)
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp)	1.347.922,69	1.420.799,91
Jumlah Penduduk (Jiwa)	36.446.115	36.742.501
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku :		
Nilai (Juta Rupiah)	36,98	38,67
Perkembangan (%)	-6,12	4,57

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)
Keterangan:
**) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*
Tahun 2020-2021 Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Tengah Interim BPS 2020-2023

1.1.3. Inflasi

Tingkat inflasi Jawa Tengah tahun kalender Desember 2021 sebesar 1,70 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 1,70 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar

indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,08 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,53 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,32 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,21 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,20 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14 persen; kelompok transportasi sebesar 0,12 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar -0,08 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,06 persen. Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks (relatif stabil). Adapun grafik inflasi Jawa Tengah dengan Nasional sebagai berikut:

Grafik 1.2
Perbandingan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional 2013 – 2019

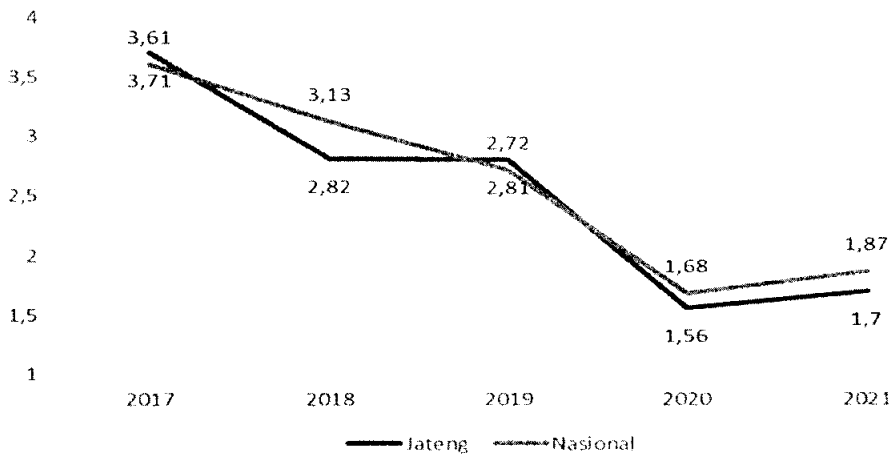

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

1.1.4. Indeks Gini

Indek Gini merupakan indikator yang mengukur ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar kelompok masyarakat. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi. Pada September 2021, Gini Ratio Jawa Tengah tercatat sebesar 0,368 menurun 0,004 poin dibandingkan dengan Maret 2021 yang sebesar 0,372 dan naik jika dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 0,359. Penurunan angka Gini Rasio dari Maret 2021 ke September 2021 mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk semakin merata atau ketimpangan pengeluaran semakin menurun. Bantuan sosial Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sangat membantu penduduk pada masa pandemi terutama pada lapisan bawah, hal ini bisa sedikit mengurangi ketimpangan penduduk.

Posisi Indeks Gini Jawa Tengah Tahun 2021 sebesar 0,368 masih lebih rendah daripada Nasional yaitu sebesar 0,381. Ini menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Jawa Tengah masih lebih baik daripada secara Nasional. Gini Rasio Jawa Tengah sebesar 0,368 pada tahun 2021 masuk dalam kategori tingkat ketimpangan sedang.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,393 menurun sebesar 0,005 poin dibandingkan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,398 dan naik sebesar 0,007 poin dibandingkan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,386. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2021 tercatat sebesar 0,324 menurun sebesar 0,001 poin dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,325 dan meningkat sebesar 0,006 poin jika dibanding Gini Ratio September 2020 sebesar 0,318. Di daerah perkotaan distribusi pengeluaran penduduk lebih timpang dibandingkan di daerah perdesaan. Adapun grafik Indek Gini seperti dalam Grafik 1.3.

Grafik 1.3
Gini Rasio Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

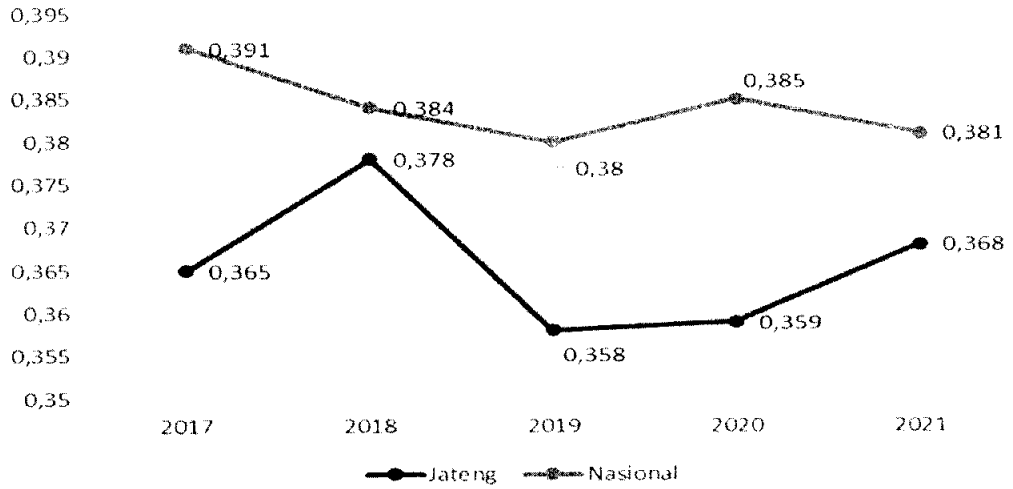

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

1.1.5. Indeks Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antara kabupaten/kota dengan rerata provinsi. Nilai Indeks Williamson yang tinggi di suatu daerah menunjukkan ketimpangan kesenjangan pembangunan yang tinggi antar wilayah di daerah tersebut. Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0-1. Jika nilai menjauhi 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin besar. Sedangkan jika nilai mendekati 0 (nol) menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin kecil. Tahun 2021, Indeks Wiliasmson Jawa Tengah tercatat sebesar 0,608 menurun dibandingkan Tahun 2019 yang sebesar 0,619. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah yang semakin mengecil. Adapun grafik Indek Williamson seperti dalam Grafik 1.4.

Grafik 1.4
Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

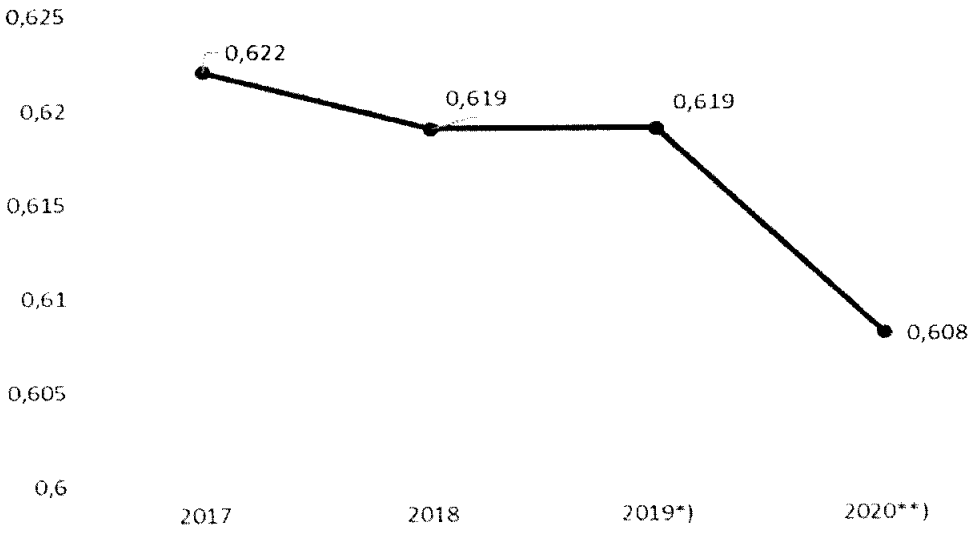

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)
*Keterangan: *) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

1.1.6. Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu indikator untuk menilai kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP juga menunjukan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar 103,18 lebih tinggi dibanding tahun 2020 sebesar 101,49.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 29 kabupaten di Jawa Tengah selama Desember 2021, NTP Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar 1,82 persen dibandingkan NTP November 2021, yaitu dari 101,34 menjadi 103,18. Kenaikan angka NTP pada Desember 2021 disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 2,61 persen lebih cepat dibanding indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang mengalami kenaikan sebesar 0,78 persen. Subsektor yang mengalami kenaikan NTP pada Desember 2021 yaitu Subsektor Tanaman Pangan 1,05 persen, Subsektor Hortikultura 7,34 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat 0,40 persen, Subsektor Peternakan 0,262 persen, dan Subsektor Perikanan 0,55 persen. Untuk grafik Nilai Tukar Petani tahun 2017- 2021 dalam Grafik 1.5.

Grafik 1.5
Nilai Tukar Petani Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

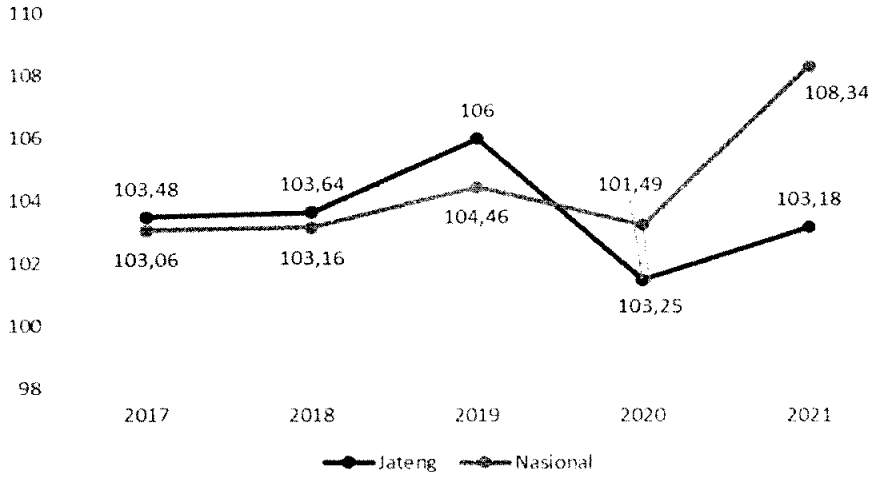

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

1.1.7. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah pada Agustus 2021 sebesar 5,95 persen atau sebanyak 1,13 juta orang, turun 0,53 persen point dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 6,48 persen. Dilihat menurut tempat tinggalnya, TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT di perdesaan. Pada Agustus 2021, TPT di perkotaan sebesar 7,06 persen, sedangkan TPT di perdesaan hanya 4,75 persen. Dibandingkan setahun yang lalu, kondisi tingkat pengangguran baik di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,67 dan 0,44 persen poin. Dilihat menurut tempat tinggalnya, TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT di perdesaan. Pada Agustus 2021, TPT di perkotaan sebesar 7,06 persen, sedangkan TPT di perdesaan hanya 4,75 persen. Dibandingkan setahun yang lalu, kondisi tingkat pengangguran baik di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,67 dan 0,44 persen poin.

Grafik 1.6.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

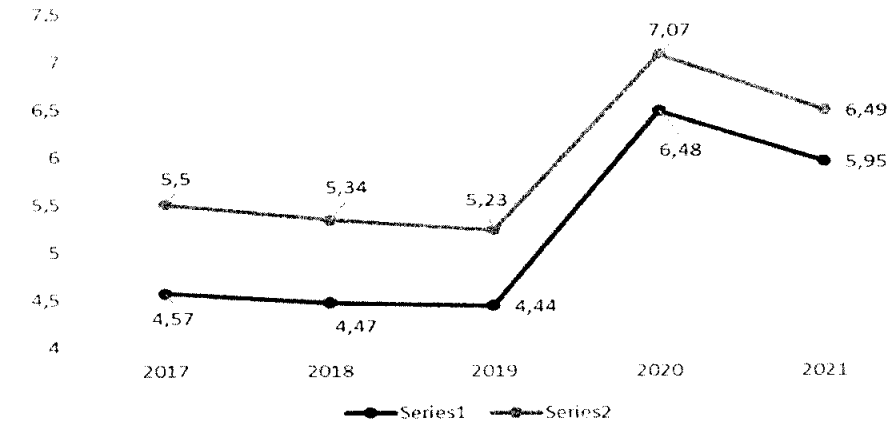

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

1.1.8. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Jawa Tengah bulan September 2021 sebesar 11,25 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan Maret 2021 sebesar 11,79 persen, dan secara absolut jumlahnya berkurang sebanyak 175,74 ribu orang yaitu dari 4,11 juta orang menjadi 3,93 juta orang. Selama periode Maret-September 2021 persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun menjadi 10,16 persen yang sebelumnya sebesar 10,58 persen, atau berkurang sebanyak 61,24 ribu orang. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 13,07 persen pada Maret 2021 menjadi 12,44 persen pada September 2021 atau berkurang sebanyak 114,51 ribu orang.

Grafik 1.7
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2021

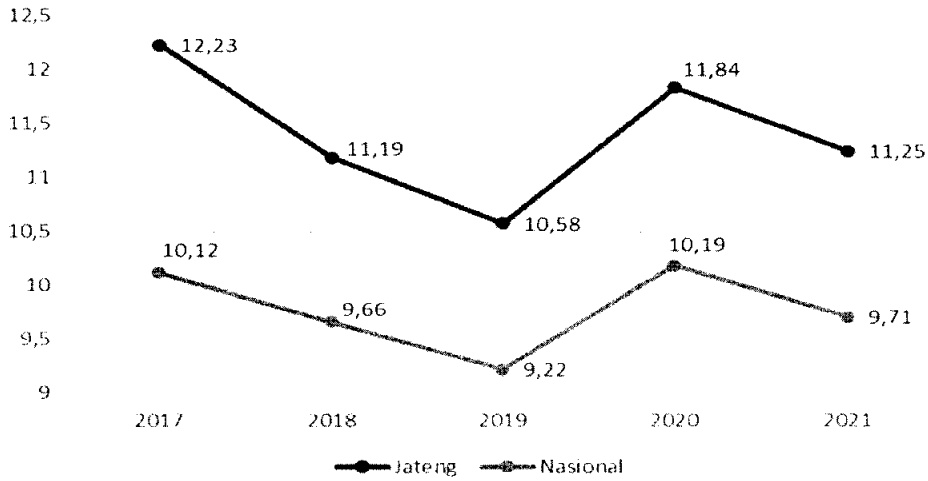

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

1.1.9. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Jawa Tengah tahun 2021 adalah sebesar 72,16 atau tumbuh 0,40 persen (meningkat 0,29 poin) dibandingkan capaian tahun 2020. Peningkatan IPM Jawa Tengah tahun 2021 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 0,95 persen dibanding tahun 2020.

Grafik 1.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhannya di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

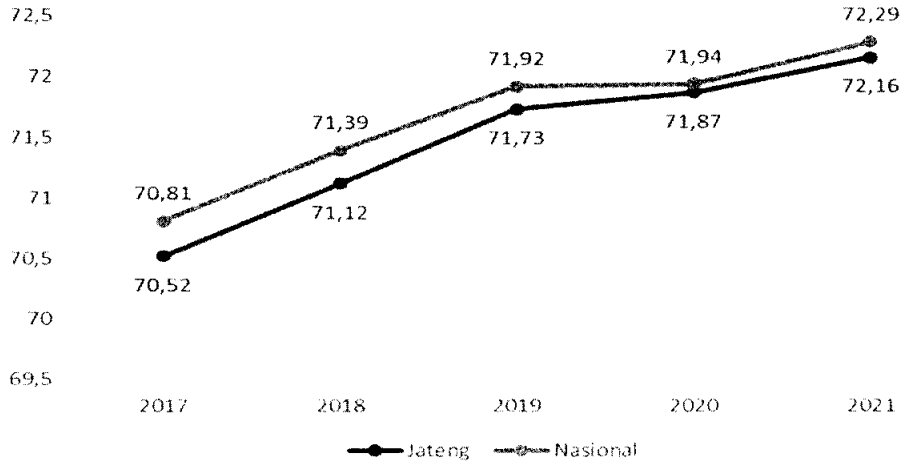

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

1.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mempedomani kebijakan yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

1.2.1. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Akan Dilaksanakan Di Daerah

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada proses pemulihan dampak Covid-19 dengan tetap melakukan antisipasi terhadap kemungkinan masih terjadinya kasus Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dimana kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada **"Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM"**. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2021 ini dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2021 yang juga telah dilakukan penyesuaian sebagai percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, difokuskan pada:

1) Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup

   Kebijakan pemulihan dan penguatan perekonomian daerah ini menjadi prioritas pembangunan di tahun 2021 terutama untuk memulihkan perekonomian daerah yang melambat akibat pandemi Covid-19. Kebijakan ini diarahkan pada strategi mendorong peningkatan produksi sektor-sektor yang menjadi unggulan Jawa Tengah seperti pertanian (sektor yang cukup tahan dari dampak pandemi), industri pengolahan, perdagangan, pariwisata. Selain itu juga diarahkan pada pemulihan iklim investasi untuk mendorong masuknya kembali investasi di Jawa Tengah. Upaya mendorong ekspor juga mulai dilakukan kembali, dan mendorong juga upaya substitusi

bahan baku impor guna menekan impor di Jawa Tengah. Inflasi juga terus dikendalikan untuk tetap menjaga harga barang di pasar sehingga konsumsi masyarakat tetap terjaga. Pemberdayaan UKM juga dilakukan dengan berbagai strategi antara lain pelatihan, fasilitasi modal dan pasar, dan lainnya. Roda perekonomian daerah akan bergerak kembali dengan didukung oleh infrastruktur sebagai instrumen distribusi barang dan jasa, seperti jalan, transportasi, air bersih, listrik, dan lainnya.

Kebijakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam upaya pemulihan perekonomian daerah tetap juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Dampak positif yang bisa dirasakan dalam masa pandemi Covid-19 antara lain adalah membaiknya kondisi lingkungan karena kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dan *work from home*. Untuk itu kebijakan penguatan keberlanjutan lingkungan hidup di tahun 2021 tetap diarahkan pada perbaikan kerusakan sumberdaya alam, pengurangan pencemaran lingkungan hidup, serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sejalan dengan masa pemulihan perekonomian daerah.

2) Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

Kebijakan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pemenuhan basic *life access* untuk mengurangi beban pengeluaran, dan *sustainable livelihood* untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sasaran kebijakan ini terutama adalah untuk penduduk miskin dan rentan miskin, serta penduduk terdampak Covid-19 secara sosial dan ekonomi. Sedangkan kebijakan penurunan pengangguran diarahkan pada perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yg terdampak pandemi Covid-19.

3) Pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan terutama adaptasi terhadap perubahan akibat pandemi Covid-19 dengan penyediaan atau pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual, dengan tetap melakukan pemerataan layanan pendidikan yang baik; penguatan *health security*, peningkatan pelayanan kesehatan, serta pemerataan layanan kesehatan.

4) Penguatan ketahanan bencana

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana alam dan non alam melalui penguatan mitigasi, tanggap darurat, pemulihan dampak bencana serta adaptasi transformatif. Ketahanan bencana dibangun dari dukungan berbagai sektor seperti kesehatan, pangan, transportasi, perdagangan, pariwisata, dan lain-lainnya.

5) Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Kebijakan tata kelola pemerintahan diarahkan pada penguatan kapasitas, pola kerja birokrasi, dan reformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap segala dinamika yang terjadi seperti saat terjadinya pandemi Covid-19. Kebijakan kondusivitas wilayah diarahkan pada penguatan kebersamaan, dan gotong royong dalam masa pemulihan Covid-19 untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat. Sedangkan kebijakan peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah dengan pemanfaatan aset agar lebih produktif, ditengah melambatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pajak.

1.2.2. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditempuh melalui berbagai tahaapan kebijakan, mulai dari: kebijakan perencanaan, target pendapatan dan upaya-upaya mencapai target.

1.2.2.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun 2021 direncanakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Adapun Dana Perimbangan bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari pendapatan hibah dan Dana Insentif Daerah.

1.2.2.2. Target Pendapatan Dearah

Pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Target PAD Tahun 2021 diproyeksikan meningkat sebesar 5,66 persen dibandingkan proyeksi pada rencana perubahan tahun 2020 dengan harapan pada tahun 2021 perekonomian bisa kembali membaik meskipun masih dalam masa pemulihan pandemi Covid-19. Proyeksi perhitungan penerimaan PBBKB mempertimbangkan pertumbuhan berdasarkan rata-rata perilaku 3 tahun sebesar 7,63 persen, sehingga perkiraan penerimaan PBBKB Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1,996 trilyun. Proyeksi perhitungan penerimaan PAP mempertimbangkan pertumbuhan berdasarkan rata-rata perilaku 3 tahun sebesar 14,74 persen sehingga penerimaan diperkirakan sebesar Rp15,22 milyar. Proyeksi perhitungan penerimaan Pajak Rokok menyesuaikan alokasi APBN tahun 2020 dikurangi iuran BPJS Tahun 2019 yang kurang alokasi. Pendapatan dana transfer dari Pemerintah Pusat diasumsikan sama dengan tahun 2020 dengan mendasarkan PMK Nomor 35/PMK.07/2020. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari pendapatan hibah badan/lembaga yang diasumsikan sama dengan tahun 2020.

1.2.2.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target

Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber pendapatan yang memungkinkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid 19 serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan *stakeholders* terkait, upaya mencapai target pendapatan daerah tahun 2021 akan ditempuh melalui antara lain:

1. Optimalisasi pungutan PAD tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19, melalui:
   a. Intensifikasi melalui penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah;
   b. Ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru;
   c. Kerjasama dengan *stakeholder* dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak;
   d. Peningkatan layanan pembayaran pajak dengan kemudahan berbasis teknologi informasi serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;
2. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;

3. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah dan mendukung prioritas pembangunan daerah (kemiskinan, pengangguran dan pangan);
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah.

1.2.3. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi kebijakan terkait: perencanaan belanja, kebijakan belanja terkait jenis belanja, kebijakan belanja terkait program pembangunan.

Untuk tahun 2021, struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Struktur belanja daerah tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1.2.4. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri dari:

1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, effisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol covid 19 dalam pelaksanaan *new normal*;
3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi tahun 2021 diarahkan untuk subsidi bunga bagi koperasi dan UKM serta subsidi kredit bagi petani sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi karena dampak Covid 19;
5) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2021 antara lain digunakan untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB swasta dan MA, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, hibah kepada partai politik, lembaga sosial kemasyarakatan; serta badan/lembaga resmi yang otoritasnya dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah meliputi (tidak terbatas pada): Komite Olahraga Nasional Indonesia, Palang Merah Indonesia, Pramuka, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Badan Kerjasama Organisasi Wanita, Majelis Ulama Indonesia, Komite

Nasional Pemuda Indonesia;

6) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan Sosial Tahun 2021 diantaranya Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif melalui Program Kartu Jateng Sejahtera.

1.2.4.1. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.

1.2.4.2. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
   a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau; dan
   d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

1.2.4.3. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun 2021 dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
2) Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan;

1.2.4.4. Kebijakan terkait Penanganan Dampak *Covid-19*

Kebijakan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dalam rangka penanganan dampak pamdemi *Covid-19* dibidang pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial dan kesehatan dilakukan secara simultan melalui program/kegiatan yang diamatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 maupun melalui Belanja Tidak Terduga, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemberdayaan Ekonomi

Dukungan pemberdayaan ekonomi dampak pandemi *Covid-19* dalam program/kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	14.117.550.000	13.319.815.620
2	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.682.773.000	2.573.902.590
3	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	4.485.676.000	4.401.206.000
4	Event Pariwisata	3.025.756.000	2.657.599.537
5	Pemasaran Karya ekonomi Kreatif dengan Virtual	286.465.000	222.845.000
6	Pemberdayaan Masyarakat (Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan/KMSK) untuk pemeliharaan /Mempertahankan Fungsi Sarpras dan atau Faskes Jalan	845.700.000	845.700.000
7	Pembangunan digester biogas bagi UMKM dan masyarakat terdampak Covid-19 untuk mengurangi beban pengeluaran LPG (padat karya)	4.102.921.000	3.995.613.388
8	Kewirausahaan Pemuda	1.643.862.000	931.335.000
9	Peningkatan Produktivitas Usaha Koperasi	1.401.420.000	1.398.567.673
10	Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan tata laksana Koperasi	1.797.142.000	1.761.577.314
11	Pemberdayaan Usaha Kecil	5.721.777.000	5.649.765.140
12	Pengembangan usaha Kecil menjadi Usaha Menengah	7.924.282.000	6.754.917.512
13	Peningkatan kualitas SDM KUMKM	4.758.400.000	4.683.521.960
14	Pelatihan entreprenership dan canaker	2.284.450.000	2.122.338.350
15	Penumbuhan WUB, peningkatan teknik produksi/sdm berbasis kompetensi industri dan pengembangan kapabilitas IKM, peningkatan SDM, peningkatan SDM konsumen /pelaku usaha; serta Pelatihan Ketrampilan SDM Industri Siap Kerja	3.118.346.000	3.047.396.041
16	Padat karya produktif	413.072.000	410.672.000
17	Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan sasaran terdampak Covid 19	3.998.155.000	3.987.630.448
18	Pemberdayaan ekonomi perempuan rentan	3.768.901.000	3.667.524.987
19	Bantuan Keuangan Pemdes Desa Wisata	30.700.000.000	29.200.000.000
	Jumlah	97.076.648.000	91.631.928.560

Sedangkan dukungan untuk pemberdayaan ekonomi dampak pandemi *Covid-19* melalui Belanja Tidak Terduga di tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.307.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.297.040.000,-.

2) Perlindungan Sosial

Dukungan perlindungan sosial dampak pandemi *Covid-19* dalam program/kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1	Bantuan sosial Pembangunan baru (PB) Backlog dan Bencana melalui Mekanisme Padat Karya	7.892.200.000	7.892.200.000
2	Bansos Peningkatan Kualitas Rumah (PK) Bencana melalui mekanisme Padat Karya	1.628.400.000	1.508.400.000
3	Bimbingan sosial calon KUBE fakir miskin yang terdampak Covid-19 untuk Pemulihan Ekonomi	483.865.000	460.966.000
	Jumlah	10.004.465.000	9.861.566.000

Belanja Tidak Terduga di tahun 2021 untuk dukungan perlindungan sosial penanganan dampak pandemi *Covid-19* melalui dianggarkan sebesar Rp72.524.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp66.676.836.000,-.

3) Dukungan Kesehatan

Dukungan belanja kesehatan penanganan dampak pandemi *Covid-19* dalam program/kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1	Penanganan Covid-19	148.412.689.000	91.531.374.779
2	Dukungan vaksinasi:		
	a. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi	38.626.950.000	31.194.085.451
	b. pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi	73.750.000	23.190.000
	c. distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin	380.350.000	208.521.600
	d. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi	1.370.000.000	927.744.050
3	Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	8.038.624.000	7.212.502.500
4	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19	81.533.916.000	81.262.004.258
5	Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat	5.289.000.000	4.733.973.900
	Jumlah	283.725.279.000	217.093.396.538

1.2.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2021 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2021 dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 masih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan pemberian stimulus untuk pemulihan perekonomian. Realisasi pendapatan daerah tahun ini mulai kembali *on the track* setelah tahun lalu mengalami tekanan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, diantaranya yang mengalami kenaikan pesat adalah realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu realisasi atas pelayanan pada rumah sakit (khususnya klaim pelayanan Covid 19) dan realisasi dana transfer pusat serta kembali naiknya animo masyarakat untuk membayar pajak daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek serta sub rincian objek. Perkembangan Capaian Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah digambarkan pada grafik dibawah ini:

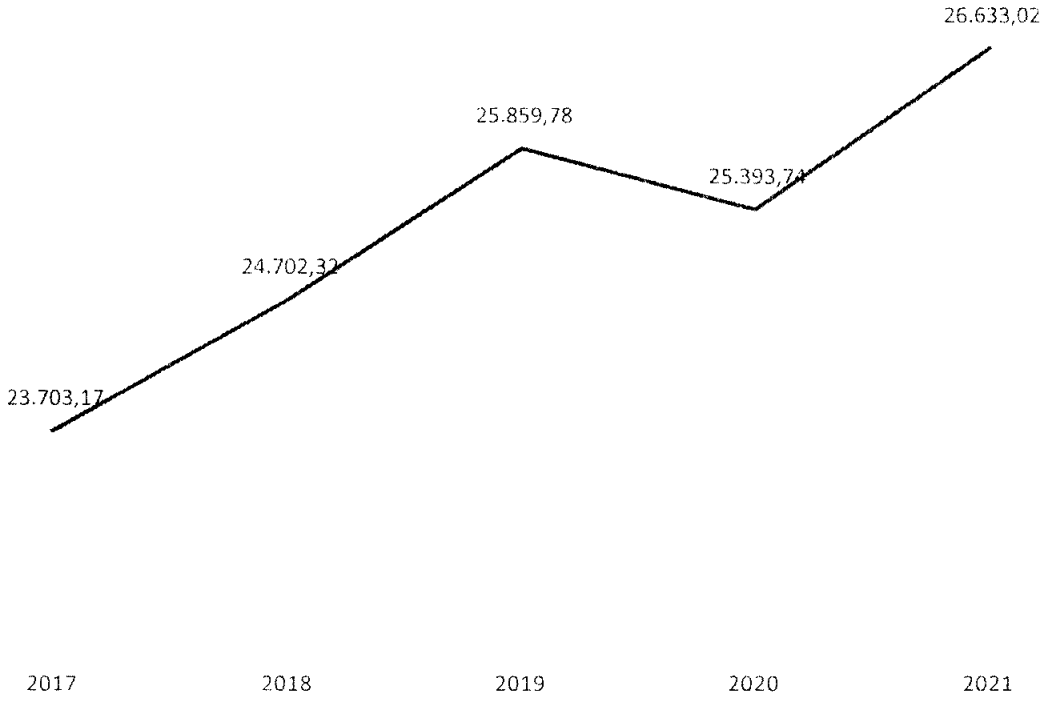

Gambar 3.1
Grafik tren capaian total pendapatan daerah 2017 – 2021 (dalam Milyar)

Meningkatnya realisasi PAD tahun 2021 berimbas juga pada membaiknya kemampuan fiskal daerah. Kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 memberikan kontribusi sebesar 55,18%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 53,83%;
b. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 memberikan kontribusi sebesar 44,58%, lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 46,08%; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2021 memberikan kontribusi sebesar 0,25%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 0,09%.

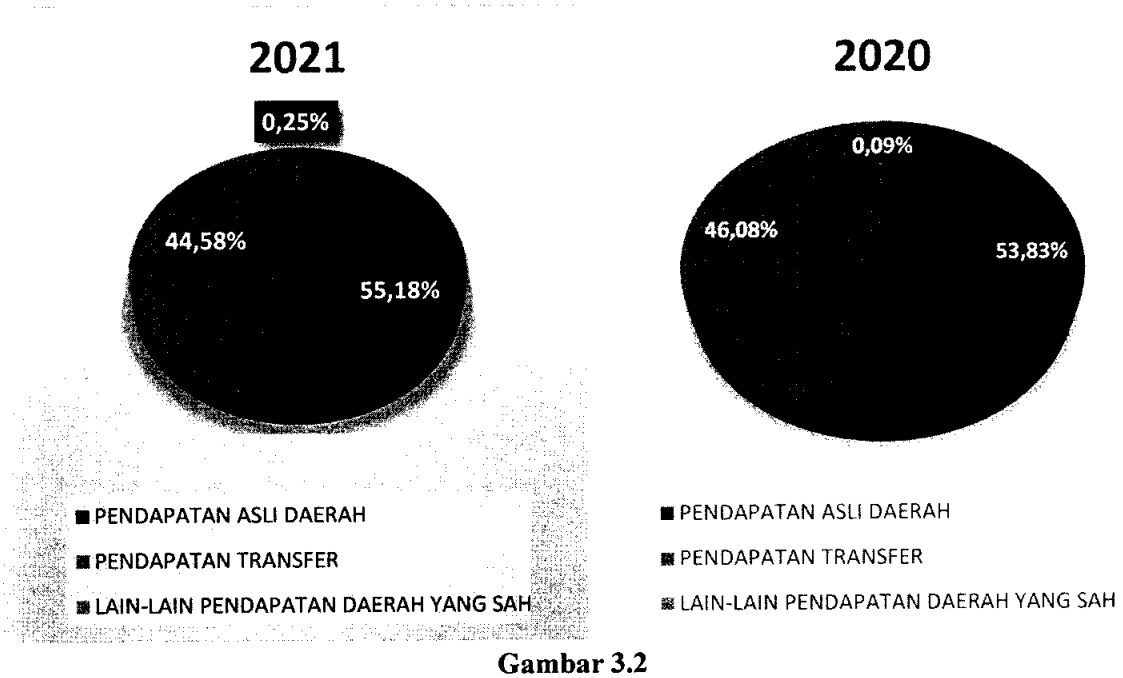

Gambar 3.2
Persandingan Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 2021 dengan 2020

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan sumber lain yang sah dengan target total sejumlah Rp26.798.308.421.000,00 terealisasi sejumlah Rp26.633.000.085.963,00 atau 99,38%, mengalami kenaikan sejumlah Rp1.239.264.151.815,00 atau 4,88% dibandingkan Tahun Anggaran 2020. Komponen pendapatan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp15.017.805.787.000,00 terealisasi sejumlah Rp14.695.474.898.162,00 atau 97,85%, mengalami kenaikan sejumlah Rp1.027.192.619.307,00 atau 7,52% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020, terdiri dari:

- Pajak Daerah ditargetkan sejumlah Rp12.656.260.599.000,00 terealisasi Rp11.718.378.320.505,00 atau 92,59%, mengalami kenaikan sejumlah Rp579.205.010.725,00 atau 5,20% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020;
- Retribusi Daerah ditargetkan sejumlah Rp90.105.999.000,00 terealisasi Rp91.634.269.205,00 atau 101,70%, mengalami mengalami penurunan sejumlah Rp1.644.852.494,00 atau 1,76% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sejumlah Rp521.612.161.000,00 terealisasi Rp508.263.876.971,00 atau 97,44%, mengalami penurunan sejumlah Rp21.827.152.166,00 atau 4,12% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020;
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sejumlah Rp1.749.827.028.000,00 terealisasi Rp2.377.198.431.481,00 atau 135,85%, mengalami kenaikan Rp471.459.613.242,00 atau 24,74% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

Gambar 3.3
Persandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2021

Berbagai upaya dalam menangani dampak pandemi Covid-19 mulai menunjukkan hasil yang baik, hal ini dapat dilihat dari kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2021 mulai berangsur membaik. Sumber utama PAD masih di dominasi oleh Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2021 mulai mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh guna meningkatkan PAD adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan vaksinasi massal covid 19 dan penerapan protokol kesehatan disemua lini berimplikasi pada mulai bergeliatnya sektor perekonomian masyarakat. Hal tersebut perlu disinergikan dengan kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat agar kembali pulih dan mengalami peningkatan yang signifikan. Sinergitas seluruh OPD menjadi kunci utama dalam merumuskan dan mengimplementasikan kegijakan yang pro dengan pertumbuham perekonomian masyarakat sehingga pada saat pertumbuhan perekonomian masyarakat meningkat maka kewajiban yang melekat pada masyarakat atas pajak daerah dapat dilaksanakan dengan baik,
2. Memberikan edukasi dan informasi bagi para wajib pajak akan tetap dilaksanakan melalui media sosial, media massa atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain agar kepatuhan wajib pajak tetap ke arah progres yang positif,
3. Menyusun usulan penyesuaian tarif retribusi pemanfaatan BMD dan melakukan identifikasi serta menyusun rencana pemanfaatan BMD atas aset-aset yang tidak dimanfaatkan/digunakan melalui promosi atau Kerjasama dengan pihak ketiga.

b. Pendapatan Transfer ditargetkan Rp11.713.752.634.000,00 terealisasi Rp11.871.796.336.054,00 atau 101,35%, mengalami kenaikan sejumlah Rp169.694.680.761,00 atau 1,45% apabila dibandingkan realisasi tahun 2020 terdiri dari:

- Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan ditargetkan sejumlah Rp11.645.042.029.000,00 terealisasi Rp11.803.085.731.054,00 atau 101,36%, mengalami kenaikan sejumlah Rp170.298.689.761,00 atau 1,46% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri atas:
  1 Dana Bagi Hasil dalam APBD Perubahan ditargetkan sejumlah Rp752.644.255.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil sejumlah Rp1.035.845.630.434,00 atau 137,63%, apabila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sejumlah Rp175.565.493.893,00 atau 20,41%.
  2 Dana Alokasi Umum dalam APBD Perubahan ditargetkan sejumlah Rp3.432.978.859.000,00. Realisasi Dana Alokasi Umum sejumlah

Rp3.432.978.859.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sejumlah Rp5.731.114.000,00 atau 0,17%.

3 Dana Alokasi Khusus (Fisik) dalam APBD Perubahan ditargetkan sejumlah Rp463.241.553.000,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus (Fisik) sejumlah Rp401.885.567.398,00 atau 86,76%, apabila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sejumlah Rp51.321.326.440,00 atau 14,64%.

4 Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) dalam APBD Perubahan ditargetkan sejumlah Rp6.996.177.362.000,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) sejumlah Rp6.932.375.674.222,00 atau 99,09%, apabila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sejumlah Rp50.857.016.572,00 atau 0,73%.

Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terbesar dari Dana Alokasi Khusus non Fisik yaitu sebesar 58,73% dari total Dana Perimbangan. Dana Alokasi Khusus non Fisik tersebut terdiri dari:

a. Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp5.821.239.240.000,00 (83,97%);
b. Dana Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp1.101.018.112.000,00 (15,88%);
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya Rp3.487.300.769,00 (0,05%);
d. Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM sebesar Rp3.281.743.678,00 (0,05%);
e. Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp2.271.473.316,00 (0,03%);
f. Bantuan Kepariwisataan sebesar Rp861.178.000 (0,01%);
g. Bantuan Operasional Kesehatan dan KB sebesar Rp233.096.459,00 (0,003%).

- Transfer Pemerintah Pusat Lainnya ditargetkan sejumlah Rp68.710.605.000,00 terealisasi Rp68.710.605.000,00 atau 100%, mengalami kenaikan sejumlah Rp498.150.000,00 atau 0,73% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Pendapatan ini berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan kriteria utama antara lain penyajian laporan keuangan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, penyampaian Perda APBD secara tepat waktu, penggunaan *e-budgeting & e-procurement.*

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp66.750.000.000,00 terealisasi Rp65.728.851.747,00 atau 98,47% dari target, mengalami kenaikan sejumlah Rp42.376.851.747,00 atau 181,47% apabila dibandingkan realisasi tahun 2020 terdiri dari:
   - Pendapatan Hibah ditargetkan sejumlah Rp66.750.000.000,00 terealisasi Rp64.882.003.502,00 atau 97,20% mengalami kenaikan sejumlah Rp41.530.003.502,00 atau 177,84% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020;
   - Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak ditargetkan terealisasi sebesar Rp846.848.245,00.

3.1.2. Belanja Daerah

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah digambarkan pada grafik dibawah ini:

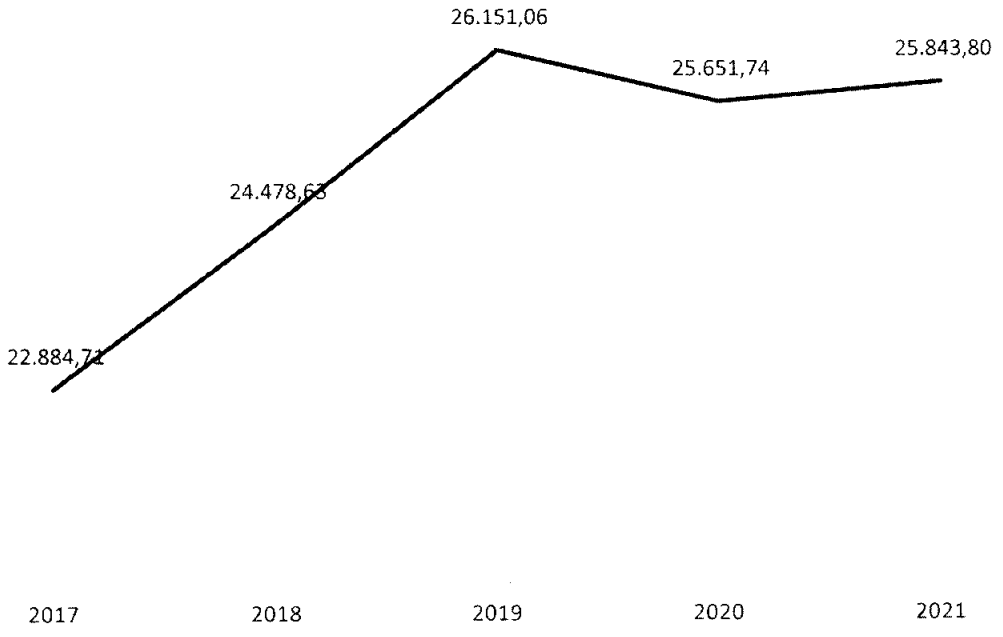

Gambar 3.4
Grafik tren realisasi total belanja daerah 2017 – 2021 (dalam Milyar)

Prioritas belanja daerah tahun 2021 masih diarahkan pada penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 disamping prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Kebijakan belanja daerah dilaksanakan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan prioritas dan program strategis pembangunan secara selektif, akuntabel dan

transparan serta mengacu pada RKPD. Namun demikian, dengan adanya kejadian pandemi Covid-19 maka kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan penyesuaian yang diarahkan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada:

1. Penanganan masalah sosial, kemiskinan dan pengangguran yang diantaranya sebagai dampak dari pandemi Covid-19;
2. Pemulihan dan perkuatan perekonomian utamanya pada sektor terdampak (UMKM dan IKM) serta pemulihan kembali daya beli masyarakat;
3. Peningkatan kualitas SDM pada aspek pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja;
4. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan/strategis pada perubahan RKPD Tahun 2021 serta dukungan terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang.

Beberapa penyesuaian dilakukan dengan memperhatikan perubahan peraturan yang berlaku, seperti kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan serta penyesuaian penggunaan dana transfer untuk dukungan program pemulihan ekonomi daerah dan dukungan pendanaan belanja kesehatan. Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Belanja Operasi tahun anggaran 2021 sebesar 64,74% dari total belanja daerah, persentase ini lebih tinggi apabila dibandingkan Anggaran 2020 sebesar 61,79%;
b. Belanja Modal tahun anggaran 2021 sebesar 5,62% dari total belanja daerah, persentase ini lebih tinggi apabila dibandingkan Anggaran 2020 sebesar 3,86%;
c. Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2021 sebesar 0,34% dari total belanja daerah, persentase ini lebih rendah apabila dibandingkan Anggaran 2020 sebesar 6,70%;
d. Belanja Transfer tahun anggaran 2021 sebesar 29,30% dari total belanja daerah, persentase ini lebih tinggi apabila dibandingkan Anggaran 2020 sebesar 27,65%.

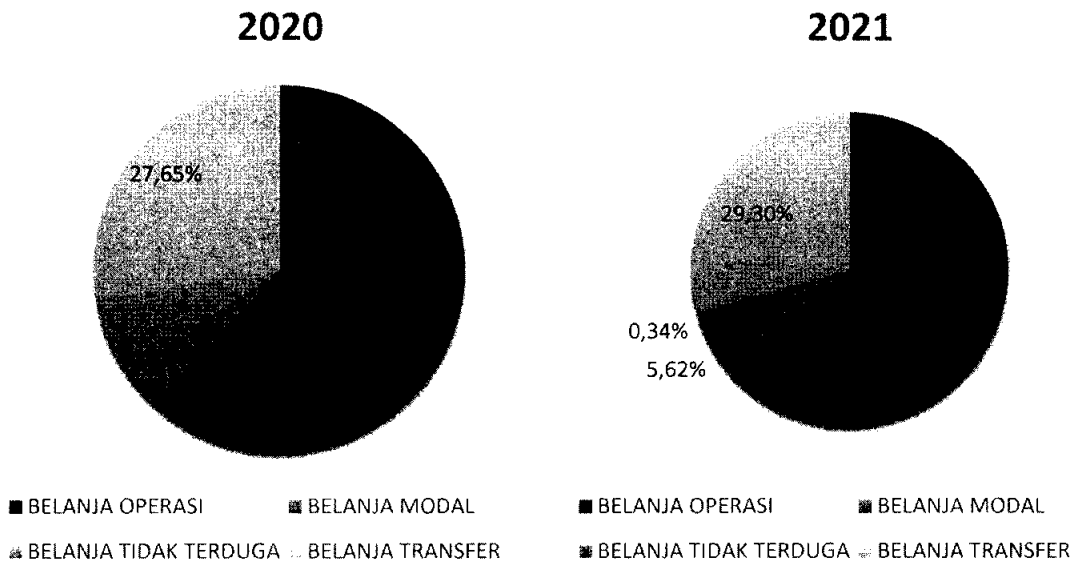

Gambar 3.5
Persandingan Persentase Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 dengan 2020

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sejumlah Rp27.444.652.233.000,00 terealisasi sejumlah Rp25.843.800.193.834,00 atau 94,17% mengalami kenaikan sejumlah Rp192.059.843.843,00 atau 0,75% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sejumlah Rp25.651.740.349.991,00. Komponen Belanja Daerah terdiri dari:

a. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sejumlah Rp17.767.668.233.000,00 terealisasi sejumlah Rp16.826.577.831.470,00 atau 94,70% mengalami kenaikan sejumlah Rp602.589.546.339,00 atau 3,71% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sejumlah Rp16.223.988.285.131,00 terdiri dari:
   - Belanja Pegawai dianggarkan Rp5.901.460.292.000,00 terealisasi sejumlah Rp5.685.925.255.020,00 atau 96,35%, mengalami penurunan sejumlah Rp797.836.368.774,00 atau 12,31% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020;
   - Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sejumlah Rp5.941.112.304.000,00. Terealisasi sejumlah Rp5.345.399.454.776,00 atau 89,97%, mengalami kenaikan sejumlah Rp1.240.761.666.548,00 atau 30,23% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020;
   - Belanja Subsidi dianggarkan sejumlah Rp4.000.000.000,00. Terealisasi sejumlah Rp90.482.166,00 atau 2,26%, yang sebelumnya belum ada realisasi pada Tahun Anggaran 2020 karena belum dianggarkan;

- Belanja Hibah dianggarkan sejumlah Rp5.845.121.847.000,00 terealisasi sejumlah Rp5.728.982.384.318,00 atau 98,01% mengalami kenaikan sejumlah Rp135.800.761.209,00 atau 2,43% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020;
- Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sejumlah Rp75.973.790.000,00, terealisasi sejumlah Rp66.180.255.190,00 atau 87,11%, mengalami kenaikan sejumlah Rp23.773.005.190,00 atau 56,06% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020.

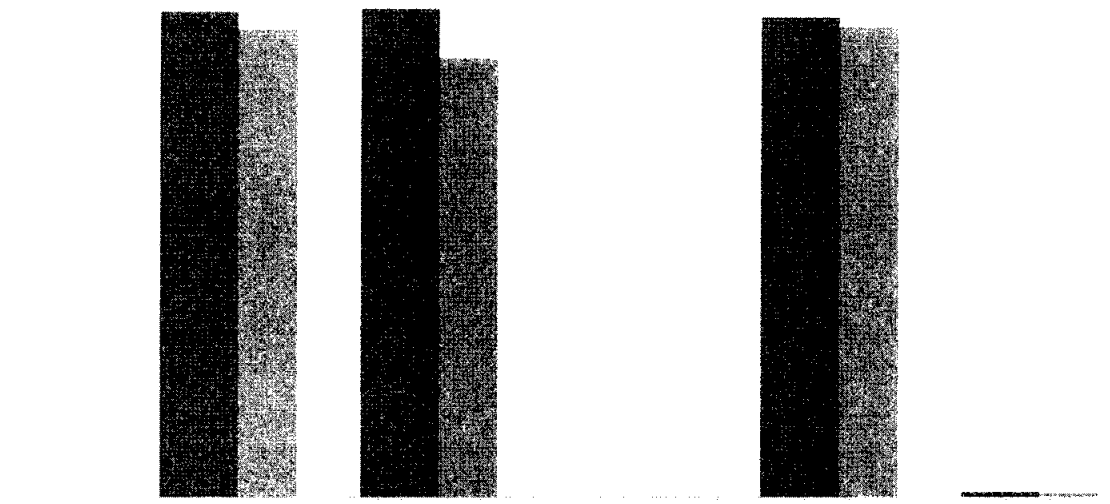

	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial
Anggaran	5.901.460.292.000	5.941.112.304.000	4.000.000.000	5.845.121.847.000	75.973.790.000
Realisasi	5.685.925.255.020	5.345.399.454.776	90.482.166	5.728.982.384.318	66.180.255.190

Gambar 3.6
Persandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2021

b. Anggaran belanja modal untuk tahun anggaran 2021 terdiri dari belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp80.927.672.000,00 atau 5,47%; belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp609.841.523.000,00 atau 39,95%; belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp373.053.994.000,00 atau 22,84%; belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp370.616.404.000,00 atau 24,27%; dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp108.990.562.000,00 atau 7,47%. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp1.447.620.411.245,00 atau 93,79%, mengalami kenaikan sejumlah Rp450.625.906.085,00 atau 45,20% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020

sebesar Rp996.994.505.160,00. Perbandingan realisasi belanja modal tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2020 yaitu:

a. Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2021 sebesar Rp79.135.275.975,00 atau 97,79% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp14.338.900.293,00 mengalami kenaikan sebesar Rp64.796.375.682,00 atau 451,89%;
b. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2021 sebesar Rp578.353.949.251,00 atau 94,84% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp494.933.371.196,00 mengalami kenaikan sebesar Rp83.420.578.055,00 atau 16,84%;
c. Realisasi belanja modal gedung bangunan tahun anggaran 2021 sebesar Rp330.679.148.402,00 atau 88,64% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp195.773.603.473,00 mengalami kenaikan sebesar Rp134.905.544.929,00 atau 68,91%;
d. Realisasi belanja modal jalan, irigasi, jaringan tahun anggaran 2021 sebesar Rp351.328.654.582,00 atau 94,80% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp177.713.123.124,00 mengalami kenaikan sebesar Rp173.615.531.458,00 atau 97,69%;
e. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2021 sebesar Rp108.123.383.035,00 atau 99,20% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp114.235.507.074,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.112.124.039,00 atau 5,35%.

c. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga dianggarkan sejumlah Rp92.820.000.000,00 terealisasi sejumlah Rp72.303.305.000,00 atau 77,90%, mengalami penurunan sejumlah Rp1.711.581.673.571,00 atau 95,95% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020. Perubahan Anggaran dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari APBD, sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 digunakan untuk:

(1) Perbaikan rumah rusak akibat bencana banjir, tanah longsor, tanah bergerak dan angin kencang serta kebakaran di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Brebes, Purbalingga, Banjarnegara, Demak dan banyumas sejumlah Rp4.329.429.000,00;

(2) Bantuan bahan baku industri kepada Industri Kecil Menengah (IKM) dianggarkan sejumlah Rp1.307.500.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.297.040.000,00 atau 99,20%;

(3) Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan jenis jaring pengaman sosial yang diberikan dalam bentuk uang tunai per penerima dengan kriteria:

(a) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata kepada pelaku pariwisata terdampak PPKM level 3 dan 4 pada 35 Kabupatan/Kota dianggarkan sejumlah Rp2.251.708.000,00 terealisasi sejumlah Rp2.151.556.000,00 atau 95,55%;

(b) Dinas Koperasi dan UKM kepada pelaku UMKM di objek wisata, fasilitas umum, pedagang tradisional dan pasar tiban terdampak level 3 dan 4 pada 35 Kabupaten/Kota dianggarkan sejumlah Rp11.303.480.000,00 terealisasi sejumlah Rp6.535.560.000,00 atau 57,82%;

(c) Dinas Perhubungan kepada supir, kondektur dan pekerja perusahaan bus angkutan umum sesuai kewenangan provinsi dan bus angkutan pariwisata domisili Jawa Tengah terdampak PPKM level 3 dan 4 pada 35 Kabupaten/Kota dianggarkan sejumlah Rp1.807.872.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.310.536.000,00 atau 72,49%;

(d) Dinas Sosial kepada masyarakat non DTKS dan masyarakat/keluarga/organisasi yang belum tertampung dalam usaulan Tahun 2020; pekerja dan pedagang informal yang kesulitan bekerja; buruh/karyawan yang di PHK; masyarakat/kelompok rentan lainnya yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat covid-19 dianggarkan sejumlah Rp57.161.540.000,00 terealisasi sejumlah Rp56.679.184.000,00 atau 99,16%.

d. Belanja Transfer dianggarkan sejumlah Rp8.040.733.845.000,00 terealisasi sejumlah Rp7.497.298.646.119,00 atau 93,24%, mengalami kenaikan sejumlah Rp850.426.064.990,00 atau 12,79% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020, terdiri dari:

- Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dianggarkan sejumlah Rp6.120.476.085.000,00 terealisasi sejumlah Rp5.735.553.033.353,00 atau 93,71%, mengalami kenaikan sejumlah Rp1.102.307.283.465,00 atau 23,79% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020;
- Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sejumlah Rp1.920.257.760.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.761.745.612.766,00 atau 91,75%, mengalami penurunan

sejumlah Rp251.881.218.475,00 atau 12,51% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020. Belanja ini terdiri dari:

a. Belanja bantuan keuangan kabupaten/kota dianggarkan Rp640.439.975.000,00 terealisasi 77,03% atau Rp493.309.827.766,00;
b. Belanja bantuan keuangan desa dianggarkan Rp1.279.817.785.000,00 terealisasi 99,11% atau Rp1.268.435.785.000,00.

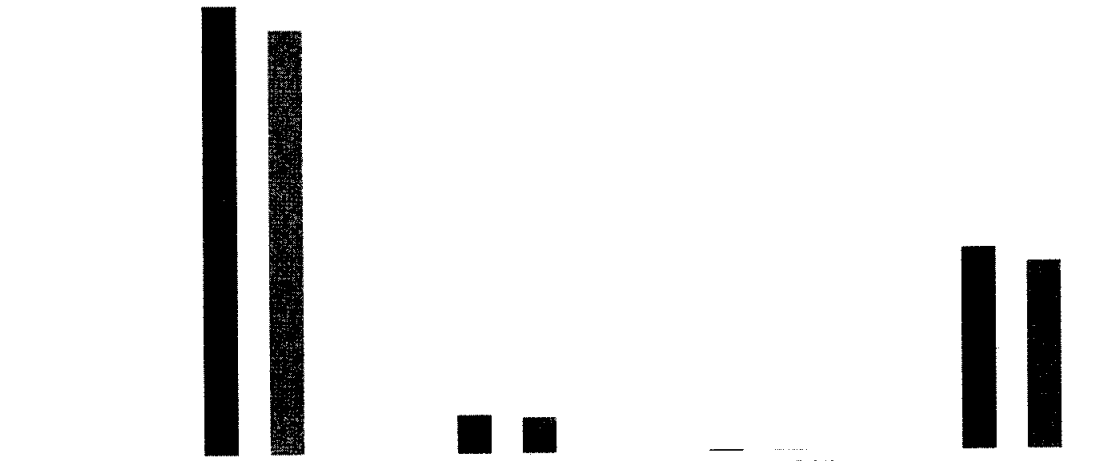

Gambar 3.7
Persandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021

Adapun permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam pengelolaan belanja antara lain sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Pengurangan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akibat adanya pengalihan dana pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi nasional.
2. Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan sekolah serta barang milik daerah di Satuan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) serta Satuan Pendidikan Khusus (SLB)

Solusi:

1. kegiatan-kegiatan OPD yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD.
2. Melakukan bimbingan teknis tentang pentingnya pengelolaan keuangan dan barang milik sekolah bagi bendahara dan pengurus barang sekolah serta melakukan desk penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan bendahara sekolah.

3.1.3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah. Pembiayaan daerah merupakan seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk menutup defisit anggaran yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020, sedangkan Pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan dalam rangka Pilkada Gubernur.

Target Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp861.343.812.000,00 terealisasi sejumlah Rp861.492.992.625,00 atau 100,02%, mengalami penurunan sejumlah Rp257.855.235.745,00 atau 23,04% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020, sedangkan Target Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan Rp215.000.000.000,00 dengan telah terealisasi Rp215.000.000.000,00 atau 100%.

SiLPA dikarenakan adanya tidak tercapainya PAD sejumlah Rp322.330.888.838,00; Pelampauan Pendapatan Transfer sejumlah Rp158.043.702.054,00; tidak tercapainya Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp1.021.148.253,00; penghematan belanja sejumlah Rp1.600.852.039.166,00; serta Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp149.180.625,00.

3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program pada SKPD

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program Kegiatan pada masing-masing SKPD tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN BIDANG KEBUDAYAAN

1.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dan Bidang Kebudayaan yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp11.550.369.481.000,00 realisasi sebesar Rp11.258.194.939.094,00 atau 97,47% yang terdiri dari 10 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.735.392.550.000,00**	**8.536.068.766.670,00**	**97,72**	**99,80**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.934.007.660.000,00	4.869.638.602.380,00	98,70	99,24
	Administrasi Keuangan	3.756.141.410.000,00	3.622.803.692.604,00	96,45	100
	Administrasi Umum	45.065.394.000,00	43.495.648.996,00	96,52	99,96
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	178.086.000,00	130.822.690,00	73,46	100
2	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**2.795.518.733.000,00**	**2.705.159.234.312,00**	**96,77**	**98,27**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.219.789.312.000,00	1.196.705.739.156,00	98,11	98,09
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.491.572.157.000,00	1.426.883.505.711,00	95,66	98,42
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	84.157.264.000,00	81.569.989.445,00	96,93	98,31
3	**Program Pengembangan Kurikulum**	**14.110.260.000,00**	**11.826.848.500,00**	**83,82**	**100**
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	99.027.000,00	76.475.500,00	77,23	100
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	9.994.000,00	9.994.000,00	100	100
4	**Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**	**2.675.944.000,00**	**2.577.039.500,00**	**96,3**	**100**
	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	2.675.944.000,00	2.577.039.500,00	96,3	100
5	**Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**	**259.361.000,00**	**200.351.800,00**	**77,25**	**77,84**
	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	104.225.000,00	60.336.800,00	57,89	93,88
	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	155.136.000,00	140.015.000,00	90,25	61,80
6	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**2.795.518.733.000,00**	**2.705.159.234.312,00**	**96,77**	**99,34**
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.219.789.312.000,00	1.196.705.739.156,00	98,11	100
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1.491.572.157.000,00	1.426.883.505.711,00	95,66	98,67
7	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**14.110.260.000,00**	**11.826.848.500,00**	**83,82**	**100**
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	13.112.878.000,00	11.137.381.000,00	84,93	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
8	**Program Pembinaan Sejarah**	**2.675.944.000,00**	**2.577.039.500,00**	**96,30**	**100**
	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	2.675.944.000,00	2.577.039.500,00	96,30	100
9	**Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**259.361.000,00**	**200.351.800,00**	**77,25**	**100**
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	259.361.000,00	200.351.800,00	77,25	100
10	**Program Pengelolaan Permuseuman**	**2.412.633.000,00**	**2.362.698.312,00**	**97,93**	**100**
	Pengelolaan Museum Provinsi	2.412.633.000,00	2.362.698.312,00	97,93	100
	JUMLAH	**11.550.369.481.000,00**	**11.258.194.939.094,00**	**97,47**	97,53

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Bidang Kesehatan sebesar Rp3.350.951.771.000,00 realisasi sebesar Rp2.921.296.520.213,00 atau 87,18% yang dilaksanakaan oleh 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni :

2.1 DINAS KESEHATAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp784.451.969.000,00 realisasi sebesar Rp689.690.677.882,00 atau 87,92% yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**207.681.408.000,00**	**204.797.590.338,00**	**98,61**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	376.907.000,00	361.252.500,00	95,85	100
	Administrasi Keuangan	86.446.580.000,00	85.835.133.641,00	99,29	100
	Administrasi Umum	120.511.306.000,00	118.267.688.703,00	98,14	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	346.615.000,00	333.515.494,00	96,22	100
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**548.286.860.000,00**	**457.795.357.968,00**	**83.50**	**99,99**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	10.791.923.000,00	10.292.033.740,00	95,37	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	536.807.311.000,00	446.875.026.658,00	83,25	99,95
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	677.586.000,00	621.747.570,00	91,76	100
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	10.040.000,00	6.550.000,00	65,24	100
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya**	**4.725.237.000,00**	**4.513.566.317,00**	**95,52**	**100**

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Manusia Kesehatan				
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	4.725.237.000,00	4.513.566.317,00	95,52	100
4	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	**14.347.892.000.00**	**13.698.172.586,00**	**95,47**	**100**
	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	14.330.764.000,00	13.681.678.586,00	95,47	100
	Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	17.128.000,00	16.494.000,00	96,30	100
5	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**9.410.572.000,00**	**8.885.990.673,00**	**94,43**	**100**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	234.225.000,00	233.459.094,00	99,67	100
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	7.340.450.000,00	6.847.799.184,00	93,29	100
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	1.835.897.000,00	1.804.732.395,00	98,30	100
	JUMLAH	**784.451.969.000,00**	**689.690.677.882,00**	**87,92**	**99,99**

2.2. RSUD DR. MOEWARDI

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsud Dr. Moewardi sebesar Rp1.168.993.897.000,00 realisasi sebesar Rp1.010.812.778.610,00 atau 86,47% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**174.044.844.000,00**	**168.773.873.896,00**	**96,97**	**100**
	Administrasi Keuangan	174.044.844.000,00	168.773.873.896,00	96,97	100
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**994.809.053.000,00**	**841.899.524.864,00**	**84,63**	**99,47**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	36.759.600.000,00	35.356.518.521,00	96,18	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	958.049.453.000,00	806.543.006.343,00	84,19	98,94
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**140.000.000,00**	**139.379.850,00**	**99,56**	**100**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	140.000.000,00	139.379.850,00	99,56	100
	JUMLAH	**1.168.993.897.000,00**	**1.010.812.778.610,00**	**86,47**	**99,82**

2.3. RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebesar Rp614.221.603.000,00 realisasi sebesar Rp529.659.432.439,00 atau 86,23% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**114.176.073.000,00**	**110.028.728.894,00**	**96,37**	**100**
	Administrasi Keuangan	114.176.073.000,00	110,028,728,894,00	96,37	100
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**499.905.530.000,00**	**419.490.979.955,00**	**83,91**	**100**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	10.361.319.000,00	9,945,446,964,00	95,99	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	489.544.211.000,00	409.545.532.991,00	83,66	**100**
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**140.000.000,00**	**139,723,590,00**	**99,80**	100
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	140.000.000,00	139.723.590,00	99,80	**100**
	JUMLAH	**614.221.603.000,00**	**529.659.432.439,00**	**86,23**	**100**

2.4. RSUD TUGUREJO SEMARANG

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada RSUD Tugurejo Semarang sebesar Rp334.306.289.000,00 realisasi sebesar Rp296.318.332.173,00 atau 88,64% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**86.257.266.000,00**	**83.392.699.678,00**	**96,68**	**100**
	Administrasi Keuangan	86.257.266.000,00	83.392.699.678,00	96,68	100
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**247.935.623.000,00**	**212.812.365.889,00**	**85,83**	**99,76**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM	44.136.573.000,00	42.582.108.460,00	96,48	99,50

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	203.061.050.000,00	169.547.164.629,00	83,50	99,78
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	738.000.000,00	683.092.800,00	92,56	100
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**113.400.000,00**	**113.266.606,00**	**99,88**	**100**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	113.400.000,00	113.266.606,00	99,88	100
	JUMLAH	**334.306.289.000,00**	**296.318.332.173,00**	**88,64**	**99,92**

2.5. RSUD KELET DONOREJO

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada RSUD Kelet Donorejo sebesar Rp93.343.102.000,00 realisasi sebesar Rp84.388.254.355,00 atau 90,41% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**32.726.590.000,00**	**31.186.911.060,00**	**95,30**	**100**
	Administrasi Keuangan	32.726.590.000,00	31.186.911.060,00	95,30	100
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**60.406.512.000,00**	**53.026.450.851,00**	**87,78**	**100**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	18.923.525.000,00	18.705.445.066,00	98,85	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	40.793.187.000,00	33.720.960.265,00	82,66	96,58
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	689.800.000,00	600.045.520,00	86,99	89,57
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**210.000.000,00**	**174.892.444,00**	**83,28**	**100**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	210.000.000,00	174.892.444,00	83,28	88,5
	JUMLAH	**93.343.102.000,00**	**84.388.254.355,00**	**90,41**	**98,40**

2.6. RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebesar Rp129.989.799.000,00 realisasi sebesar Rp112.319.166.702,00 atau 86,41% yang terdiri dari 3

program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**53.370.124.000,00**	**52.080.516.789,00**	**97,58**	**100**
	Administrasi Keuangan	53.370.124.000,00	52.080.516.789,00	97,58	100
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**76.256.445.000,00**	**59.875.420.225,00**	**78,52**	**100**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	8.700.000.000,00	7.315.170.728,00	84,08	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	67.225.345.000,00	52.234.506.046,00	77,70	100
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	331.100.000,00	325.743.451,00	98,38	100
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**363.230.000,00**	**363.229.688,00**	**100**	**100**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	363.230.000,00	363.229.688,00	100	100
	JUMLAH	**129.989.799.000,00**	**112.319.166.702,00**	**86,41**	**100**

2.7. RSJD SURAKARTA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada RSJD Surakarta sebesar Rp129.607.715.000,00 realisasi sebesar Rp109.683.219.410,00 atau 84,63% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**61.927.909.000,00**	**58.419.829.685,00**	**94,34**	**100**
	Administrasi Keuangan	61.927.909.000,00	58.419.829.685,00	94,34	100
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**67.539.806.000,00**	**51.131.880.691,00**	**75,71**	**100**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	14.750.000.000,00	12.876.994.736,00	87,30	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	51.964.806.000,00	37.591.129.306,00	72,34	100
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	825.000.000,00	663.756.649,00	80,46	100
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**140.000.000,00**	**131.509.034,00**	**93,94**	**100**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	140.000.000,00	131.509.034,00	93,94	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Daerah Provinsi				
	JUMLAH	129.607.715.000,00	109.683.219.410,00	84,63	100

2.8 RSJD Dr. RM SOEDJARWADI

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada RSJD Dr. Rm Soedjarwadi sebesar Rp96.037.397.000,00 realisasi sebesar Rp88.424.658.642,00 atau 92,07% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**37.872.001.000,00**	**37.684.546.515,00**	**99,51**	**100**
	Administrasi Keuangan	37.872.001.000,00	37.684.546.515,00	99,51	100
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**58.015.260.000,00**	**50.590.061.427,00**	**87,20**	**100**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	7.162.922.000,00	6.703.065.070,00	93,58	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	50.366.818.000,00	43.405.760.357,00	86,18	100
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	485.520.000,00	481.236.000,00	99,12	100
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**150.136.000,00**	**150.050.700,00**	**99,94**	**100**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	150.136.000,00	150.050.700,00	99,94	100
	JUMLAH	**96.037.397.000,00**	**88.424.658.642,00**	**92,07**	**100**

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp927.100.912.000,00 realisasi sebesar Rp894.398.350.105,00 atau 96,47% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni :

3.1. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Dan Cipta Karya sebesar Rp735.394.981.000,00 realisasi sebesar Rp713.738.265.701,00 atau 97,06% yang terdiri dari 7 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**100.191.015.000,00**	**96.008.922.151,00**	**95,83**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	483.138.000,00	442.493.261,00	91,59	100
	Administrasi Keuangan	82.340.871.000,00	79.578.472.832,00	96,65	100
	Administrasi Umum	17.324.506.000,00	15.981.656.058,00	92,25	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	42.500.000,00	6.300.000,00	14,82	100
2	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**50.783.859.000,00**	**50.684.920.318,00**	**99,81**	**100**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	50.783.859.000,00	50.684.920.318,00	99,81	100
3	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**711.740.000,00**	**681.851.208,00**	**95,80**	**100**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	711.740.000,00	681.851.208,00	95,80	100
4	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**130.087.116.000,00**	**128.935.405.258,00**	**99,11**	**100**
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	130.087.116.000,00	128.935.405.258,00	99,11	100
5	**Program Penataan Bangunan Lingkungannya**	**647.216.000,00**	**644.597.750,00**	**99,60**	**100**
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	647.216.000,00	644.597.750,00	99,60	100
6	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**452.089.944.000,00**	**435.967.329.966,00**	**96,43**	**99,91**
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	452.089.944.000,00	435.967.329.966,00	96,43	99,91
7	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**884.091.000,00**	**815.239.050,00**	**92,21**	**100**
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	534.091.000,00	480.383.467,00	89,94	100
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	350.000.000,00	334.855.583,00	95,67	100
	JUMLAH	**735.394.981.000,00**	**713.738.265.701,00**	**97,06**	**99,99**

3.2. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang sebesar Rp191.705.931.000,00 realisasi sebesar Rp180.660.084.404,00 atau 94,24% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**75.917.714.000,00**	**71.744.821.075,00**	**94,50**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	448.898.000,00	398.725.908,00	88,82	100
	Administrasi Keuangan	68.105.612.000,00	64.286.086.295,00	94,39	100
	Administrasi Umum	7.223.165.000,00	6.924.948.882,00	95,87	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	140.039.000,00	135.059.990,00	96,44	100
2	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**114.109.151.000,00**	**107.444.395.395,00**	**94,16**	**99,53**
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	64.447.537.000,00	62.841.928.387,00	97,51	100
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	49.661.614.000,00	44.602.467.008,00	89,81	99,06
3	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**1.679.066.000,00**	**1.470.867.934,00**	**87,60**	**100**
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	171.891.000,00	91.809.400,00	53,41	100
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	452.648.000,00	348.177.111,00	76,92	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	306.213.000,00	301.998.323,00	98,62	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	748.314.000,00	728.883.100,00	97,40	100
	JUMLAH	**191.705.931.000,00**	**180.660.084.404,00**	**94,24**	**99,84**

4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang dialokasikan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp31.157.935.000,00 realisasi sebesar Rp30.808.824.490,00 atau 98,88% yang terdiri dari 7 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**14.518.567.000,00**	**14.298.745.131,00**	98,49	100
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	483.312.000,00	480.109.500,00	99,34	100
	Administrasi Keuangan	10.846.576.000,00	10.706.735.693,00	98,71	100
	Administrasi Umum	3.146.739.000,00	3.070.556.895,00	97,58	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	41.940.000,00	41.343.043,00	98,58	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
2	**Program Pengembangan Perumahan**	**11.474.465.000,00**	**11.347.803.000,00**	**98.90**	100
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	369.626.000,00	368.509.000,00	99,70	100
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	159.890.000,00	157.717.500,00	98,64	100
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	3.164.754.000,00	3.043.646.200,00	96,17	100
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	7.780.195.000,00	7.777.930.300,00	99,97	100
3	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)**	**3.042.381.000,00**	**3.042.140.989,00**	99,99	100
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	3.042.381.000,00	3.042.140.989,00	99,99	100
4	**Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**	**1.253.672.000,00**	**1.251.285.370,00**	99,81	100
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	1.253.672.000,00	1.251.285.370,00	99,81	100
5	**Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**	**343.336.000,00**	**343.336.000,00**	100	100
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	343.336.000,00	343.336.000,00	100	100
6	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**276.154.000,00**	**276.154.000,00**	100	100
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	276.154.000,00	276.154.000,00	100	100
7	**Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee**	**249.360.000,00**	**249.360.000,00**	100	100
	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	249.360.000,00	249.360.000,00	100	100
	JUMLAH	**31.157.935.000,00**	**30.808.824.490,00**	**98,88**	100

5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp36.639.368.000,00 realisasi sebesar Rp35.542.289.576,00 atau 97,01% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni :

5.1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp18.535.991.000,00 realisasi sebesar Rp18.265.728.712,00 atau 98,54% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**14.608.102.000,00**	**14.370.081.352,00**	**98,37**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	156.187.000,00	155,876,105,00	99,80	100
	Administrasi Keuangan	9.998.154.000,00	9.775.335.984,00	97,77	100
	Administrasi Umum	4.167.811.000,00	4.153.994.263,00	99,67	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	285.950.000,00	284.875.000,00	99,62	100
2	**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**	**3.927.889.000,00**	**3.895.647.360,00**	**99,18**	**100**
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.771.951.000,00	2.752.286.950,00	99,29	100
	Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur	1.142.238.000,00	1.129.660.410,00	98,90	100
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	13.700.000,00	13.700.000,00	100	100
	JUMLAH	**18.535.991.000,00**	**18.265.728.712,00**	**98,54**	**100**

5.2. SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dialokasikan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp18.103.377.000,00 realisasi sebesar Rp17.276.560.864,00 atau 95,43% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**10.737.812.000,00**	**10.287.921.265,00**	**95,81**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	165.000.000,00	147.901.890,00	89,64	100
	Administrasi Keuangan	7.320.069.000,00	7.042.296.616,00	96,21	100
	Administrasi Umum	3.229.343.000,00	3.079.124.759,00	95,35	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23.400.000,00	18.598.000,00	79,48	100
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**7.365.565.000,00**	**6.988.639.599,00**	**94,88**	**100**
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.248.939.000,00	1.196.907.07300	95,83	100
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4.095.101.000,00	4.036.521.585,00	98,57	100
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.929.060.000,00	1.663.271.441,00	86,22	100
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	92.465.000,00	91.939.500,00	99,43	100
	JUMLAH	**18.103.377.000,00**	**17.276.560.864,00**	**95,43**	**100**

6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

6.1. DINAS SOSIAL

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dialokasikan pada Dinas Sosial sebesar Rp217.396.082.000,00 realisasi sebesar Rp207.293.980.750,00 atau 95,35% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**123.419.407.000,00**	**118.301.580.724,00**	**95,85**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	443.540.000,00	441.421.500,00	99,52	100
	Administrasi Keuangan	99.561.504.000,00	94.744.168.258,00	95,16	100
	Administrasi Umum	23.414.363.000,00	23.115.990.966,00	98,73	100
2	**Program Pemberdayaan Sosial**	**5.786.747.000,00**	**5.744.447.081,00**	**99,27**	**100**
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	283.355.000,00	273.344.600,00	96,47	100
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	5.503.392.000,00	5.471.102.481,00	99,41	100
3	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**16.760.000,00**	**16.737.225,00**	**99,86**	**100**
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	16.760.000,00	16.737.225,00	99,86	100
4	**Program Rehabilitasi Sosial**	**51.047.063.000,00**	**49.946.958.121,00**	**97,84**	**100**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	17.837.116.000,00	17.444.709.500,00	97,80	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	14.597.706.000,00	14.352.808.675,00	98,32	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	13.007.947.000,00	12.841.202.946,00	98,72	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	2.275.336.000,00	2.271.319.000,00	99,82	100
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	3.328.958.000,00	3.036.918.000,00	91,23	100
5	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	**35.742.462.000,00**	**31.906.410.000,00**	**89,27**	**100**
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	97.950.000,00	97.945.000,00	99,99	100
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	35.644.512.000,00	31.808.465.000,00	89,24	100
6	**Program Penanganan Bencana**	**1.189.972.000,00**	**1.184.526.799,00**	**99,54**	**100**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.189.972.000,00	1.184.526.799,00	99,54	100
7	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**193.671.000,00**	**193.320.800,00**	**99,82**	**100**
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	193.671.000,00	193.320.800,00	99,82	100
	JUMLAH	**217.396.082.000,00**	**207.293.980.750,00**	**95,35**	**100**

7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

7.1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang dialokasikan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp100.753.877.000,00 realisasi sebesar Rp96.399.253.357,00 atau 95,68% yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**85.319.959.000,00**	**81.573.501.312,00**	**95,61**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	755.473.000,00	750.428.945,00	99,33	100
	Administrasi Keuangan	66.132.283.000,00	62.970.483.053,00	95,22	100
	Administrasi Umum	18.408.415.000,00	17.828.801.314,00	96,85	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23.788.000,00	23.788.000,00	100,00	100
2	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**5.200.672.000,00**	**4.928.134.750,00**	**94,76**	**100**
	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	4.165.704.000,00	3.944.709.750,00	94,69	100
	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	124.290.000,00	104.300.000,00	83,92	100
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	909.278.000,00	879.125.000,00	96,68	100
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	1.400.000,00	0,00	-	-
3	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**3.554.365.000,00**	**3.444.715.374,00**	**96,92**	**100**
	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.297.000.000,00	3.189.370.774,00	96,74	100
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	122.500.000,00	122.500.000,00	100	100
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	98.897.000,00	97.277.000,00	98,36	100
	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	35.968.000,00	35.567.600,00	98,89	100
4	**Program Hubungan Industrial**	**2.332.716.000,00**	**2.195.025.400,00**	**94,10**	**100**
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	372.282.000,00	360.796.900,00	96,91	100
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.242.197.000,00	1.164.137.000,00	93,72	100
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	718.237.000,00	670.091.500,00	93,30	100
5	**Program Pengawasan Ketenagakerjaan**	**4.046.165.000,00**	**3.977.061.721,00**	**98,29**	**100**
	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	4.046.165.000,00	3.977.061.721,00	98,29	100
6	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**300.000.000,00**	**280.814.800,00**	**93,60**	**100**
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	300.000.000,00	280.814.800,00	93,60	100
	JUMLAH	**100.753.877.000,00**	**96.399.253.357,00**	**95,68**	**100**

8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

8.1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp20.601.602.000,00 realisasi sebesar Rp19.888.357.988,00 atau 96,54% yang terdiri dari 10 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**10.957.164.000,00**	**10.656.492.421,00**	**97,26**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	308.566.000,00	306.565.200,00	99,35	100
	Administrasi Keuangan	8.036.613.000,00	7.792.839.929,00	96,97	100
	Administrasi Umum	2.582.976.000,00	2.533.071.492,00	98,07	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	29.009.000,00	24.015.800,00	82,79	100
2	**Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	**4.719.405.000,00**	**4.581.706.257,00**	**97,08**	**100**
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	136.940.000,00	130.351.628,00	95,19	100
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	4.315.919.000,00	4.189.561.129,00	97,07	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	266.546.000,00	261.793.500,00	98,22	100
3	**Program Perlindungan Perempuan**	**940.884.000,00**	**674.130.470,00**	**71,65**	**100**
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	225.299.000,00	223.653.422,00	99,27	100
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	599.690.000,00	334.602.548,00	55,80	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	115.895.000,00	115.874.500,00	99,98	100
4	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**451.471.000,00**	**447.212.340,00**	**99,06**	**100**
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	147.315.000,00	145.491.340,00	98,76	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	304.156.000,00	301.721.000,00	99,20	100
5	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	**307.656.000,00**	**306.187.500,00**	**99,52**	**100**
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat	307.656.000,00	306.187.500,00	99,52	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Daerah Provinsi				
6	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**219.014.000,00**	**219.014.000,00**	**100,00**	**100**
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	188.484.000,00	188.484.000,00	100	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	30.530.000,00	30.530.000,00	100	100
7	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**418.479.000,00**	**417.261.000,00**	**99,71**	**100**
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	171.900.000,00	171.251.000,00	99,62	100
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	196.579.000,00	196.010.000,00	99,71	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	100	100
8	**Program Pengendalian Penduduk**	**194.972.000,00**	**194.528.000,00**	**99,77**	**100**
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	140.784.000,00	140.427.000,00	99,75	100
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	54.188.000,00	54.101.000,00	99,84	100
9	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**2.091.877.000,00**	**2.091.392.500,00**	**99,98**	**100**
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.065.745.000,00	2.065.395.500,00	99,98	100
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	26.132.000,00	25.997.000,00	99,48	100
10	**Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**300.680.000,00**	**300.433.500,00**	**99,92**	**100**
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	191.187.00000	190.995.500,00	99,90	100
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	109.493.000.00	109.438.000,00	99,95	100
	JUMLAH	**20.601.602.000.00**	**19.888.357.988,00**	**96,54**	**100**

9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

9.1. DINAS KETAHANAN PANGAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang dialokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp35.465.015.000,00 realisasi sebesar Rp32.720.123.798,00 atau 92,26% yang terdiri dari 4 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17.966.676.000,00**	**16.831.161.618.00**	**93,68**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	298.000.000,00	296.417.914,00	99,47	100
	Administrasi Keuangan	13.735.530.000,00	12.698.791.857,00	92,45	100
	Administrasi Umum	3.903.146.000,00	3.805.951.847,00	97,51	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00	30.000.000,00	100	100
2	**Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**9.619.589.000,00**	**9.134.412.080,00**	**94,96**	**99,99**
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.268.270.000,00	3.177.166.000,00	97,21	100
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	3.150.069.000,00	3.129.780.000,00	99,36	100
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	3.201.250.000,00	2.827.466.080,00	88,32	99,97
3	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**5.633.584.000,00**	**4.538.061.000,00**	**80,55**	**100**
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	5.633.584.000,00	4.538.061.000,00	80,55	100
4	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**2.245.166.000,00**	**2.216.489.100,00**	**98,72**	**100**
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.245.166.000,00	2.216.489.100,00	98,72	100
	JUMLAH	**35.465.015.000,00**	**32.720.123.798,00**	**92,26**	**99,99**

10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

10.1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang dialokasikan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebesar Rp180.039.387.000,00 realisasi sebesar Rp177.422.266.320,00 atau 98,55% yang terdiri dari 12 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**122.749.820.000,00**	**121.034.921.785,00**	**98,60**	**99,99**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	367.144.000,00	365.898.000,00	99,66	100
	Administrasi Keuangan	112.727.348.000,00	111.339.058.453,00	98,77	100
	Administrasi Umum	9.647.328.000,00	9.321.965.332,00	96,63	99,97
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.000.000,00	8.000.000,00	100	100
2	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**463.575.000,00**	**463.170.407,00**	**99,91**	**99,95**
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	463.575.000,00	463.170.407,00	99,91	99,95
3	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**2.727.365.000,00**	**2.722.001.555,00**	**99,80**	**100**

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	2.727.365.000,00	**2.722.001.555,00**	99,80	100
4	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**999.554.000,00**	**985.012.500,00**	**98,55**	**100**
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	999.554.000,00	985.012.500,00	98,55	100
5	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**379.727.000,00**	**378.269.190,00**	**99,62**	**100**
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	379.727.000,00	378.269.190,00	99,62	100
6	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**819.608.000,00**	**762.001.909,00**	**92,97**	**100**
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	819.608.000,00	762.001.909,00	92,97	100
7	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**147.375.00000**	**142.368.500,00**	**96,60**	**100**
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	147.375.000,00	142.368.500,00	96,60	100
8	**Program Pengelolaan Persampahan**	**644.186.000,00**	**643.378.574,00**	**99,87**	**100**
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	644.186.000,00	643.378.574,00	99,87	100
9	**Program Pengelolaan Hutan**	**40.143.071.000,00**	**38.915.174.533,00**	**98.34**	**100**
	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	232.574.000,00	226.706.300,00	97,48	100
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	38.990.616.000,00	38.337.521.594,00	98,32	100
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	155.825.000,00	155.757.000,00	99,96	100
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	604.431.000,00	598.960.139,00	99,09	100
	Perbenihan Tanaman Hutan	159.625.000,00	159.360.500,00	99,83	100
10	**Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya**	**1.458.413.000,00**	**1.415.929.538,00**	**97,09**	**100**
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	877.970.000,00	849.848.488,00	96,80	100
	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi	287.564.000,00	286.740.500,00	99,71	100
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	292.879.000,00	279.340.550,00	95,38	100
11	**Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan**	**8.988.373.000,00**	**8.880.240.154,00**	**98.80**	**100**
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	8.988.373.000,00	8.880.240.154,00	98,80	100
12	**Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)**	**518.320.000,00**	**516.666.675,00**	**99,68**	**100**
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	518.320.000,00	516.666.675,00	99,68	100
	JUMLAH	**180.039.387.000,00**	**177.422.266.320,00**	**98,55**	**99,99**

11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

11.1. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil sebesar Rp25.687.184.000,00 realisasi sebesar Rp24.351.814.385,00 atau 94,8% yang terdiri dari 7 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**17.267.329.000,00**	**16.420.978.982,00**	**95,10**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	256.020.000,00	237.502.417,00	92,77	100
	Administrasi Keuangan	12.470.458.000,00	11.812.059.373,00	94,72	100
	Administrasi Umum	4.540.851.000,00	4.371.417.192,00	96,27	100
2	**Program Pendaftaran Penduduk**	**760.000.000,00**	**681.400.086,00**	**89,66**	**100**
	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	760.000.000,00	681.400.086,00	89,66	100
3	**Program Pencatatan Sipil**	**681.355.000,00**	**600.735.506,00**	**88,17**	**100**
	Pelayanan Pencatatan Sipil	681.355.000,00	600.735.506,00	88,17	100
4	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**770.000.000,00**	**689.505.254,00**	**89,55**	**100**
	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	770.000.000,00	689.505.254,00	89,55	100
5	**Program Penataan Desa**	**1.972.500.000,00**	**1.964.284.479,00**	**99,58**	**100**
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	1.972.500.000,00	1.964.284.479,00	99,58	100
6	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**820.000.000,00**	**812.600.402,00**	**99,10**	**100**
	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	820.000.000,00	812.600.402,00	99,10	100
7	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**3.416.000.000,00**	**3.182.309.676,00**	**93,16**	**100**
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.416.000.000,00	3.182.309.676,00	93,16	100
	JUMLAH	**25.687.184.000,00**	**24.351.814.385,00**	**94,80**	**100**

12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

12.1. DINAS PERHUBUNGAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang dialokasikan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp204.112.865.000,00 realisasi sebesar Rp194.619.417.057,00 atau 95,35% yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**58.864.258.000,00**	**56.103.323.622,00**	**95,31**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	396.412.000,00	373.223.500,00	94,15	100
	Administrasi Keuangan	40.448.362.000,00	39.851.229.449,00	98,52	100
	Administrasi Umum	17.970.844.000,00	15.871.040.173,00	88,32	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	48.640.000,00	7.830.500,00	16,10	100
2	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**118.288.387.000,00**	**112.159.211.016,00**	**94,82**	**100**
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	391.644.000,00	373.521.600,00	95,37	100
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	15.789.528.000,00	15.041.281.059,00	95,26	100
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	11.581.008.000,00	11.370.714.235,00	98,18	100
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	176.207.000,00	119.096.000,00	67,59	100
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	134.376.000,00	116.145.000,00	86,43	100
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	214.002.000,00	193.833.000,00	90,58	100
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	89.325.115.000,00	84.316.910.522,00	94,39	100
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	228.956.000,00	210.282.100,00	91,84	100
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	32.800.000,00	13.911.500,00	42,41	100
	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	51.276.000,00	51.233.000,00	99,92	100
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	335.252.000,00	324.077.000,00	96,67	100
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	28.223.000,00	28.206.000,00	99,94	100
3	**Program Pengelolaan Pelayaran**	**1.537.733.000,00**	**1.306.923.431,00**	**84,99**	**100**
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.126.828.000,00	930.647.931,00	82,59	100
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	64.087.000,00	64.086.500,00	100	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	236.628.000,00	221.337.000,00	93,54	100
	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	110.190.000,00	90.852.000,00	82,45	100
4	**Program Pengelolaan Penerbangan**	**23.580.487.000,00**	**23.247.911.350,00**	**98,59**	**100**
	Penyelengaraan Kebandarudaraan	23.580.487.000,00	23.247.911.350,00	98,59	100
5	**Program Pengelolaan Perkeretaapian**	**1.842.000.000,00**	**1.802.047.638,00**	**97,83**	**100**
	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1.842.000.000,00	1.802.047.638,00	97,83	100
	JUMLAH	**204.112.865.000,00**	**194.619.417.057,00**	**95,35**	**100**

13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

13.1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika yang dialokasikan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika sebesar Rp106.994.593.000,00 realisasi sebesar Rp99.617.639.354,00 atau 93,11% yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**25.167.000.000,00**	**23.799.856.880,00**	**94,57**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	733.250.000,00	710.378.925,00	96,88	100
	Administrasi Keuangan	15.869.372.000,00	15.341.554.289,00	96,67	100
	Administrasi Umum	8.325.878.000,00	7.530.702.166,00	90,45	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	238.500.000,00	217.221.500,00	91,08	100
2	**Program Pengelolaan Komunikasi Publik**	**46.395.722.000,00**	**41.046.399.274,00**	**88,47**	**100**
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	46.395.722.000,00	41.046.399.274,00	88,47	100
3	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**28.006.283.000,00**	**27.639.155.213,00**	**98,69**	**100**
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	10.013.234.000,00	10.006.667.772,00	99,93	100
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	17.993.049.000,00	17.632.487.441,00	98,00	100
4	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**1.390.583.000,00**	**1.380.859.142,00**	**99,30**	**100**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	1.390.583.000,00	1.380.859.142,00	99,30	100
5	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**6.035.005.000,00**	**5.751.368.845,00**	**95,30**	**100**
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2.819.992.000,00	2.733.839.055,00	96,94	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	3.215.013.000,00	3.017.529.790,00	93,86	100
	JUMLAH	**106.994.593.000,00**	**99.617.639.354,00**	**93,11**	**100**

14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

14.1. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang dialokasikan pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp50.116.411.000,00 realisasi sebesar Rp44.329.196.104,00 atau 88,45% yang terdiri dari 7 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**22.507.238.000,00**	**22.011.937.903,00**	**97,80**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.224.235.000,00	1.184.814.476,00	96,78	100
	Administrasi Keuangan	14.452.442.000,00	14.126.924.018,00	97,75	100
	Administrasi Umum	6.823.461.000,00	6.693.099.409,00	98,09	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.100.000,00	7.100.000,00	100	100
2	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	**1.046.352.000,00**	**1.042.917.400,00**	**99,67**	**100**
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	164.705.000,00	163.811.000,00	99,46	100
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	881.647.000,00	879.106.400,00	99,71	100
3	**Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi**	**959.800.000,00**	**928.633.450,00**	**96,75**	**100**
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	959.800.000,00	928.633.450,00	96,75	100
4	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	**4.758.400.000,00**	**4.683.521.960,00**	**98,43**	**100**
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4.758.400.000,00	4.683.521.960,00	98,43	100
5	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	**7.198.562.000,00**	**3.257.502.739,00**	**45.25**	**100**
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	7.198.562.000,00	3.257.502.739,00	45.25	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
6	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**	**5.721.777.000,00**	**5.649.765.140,00**	**98,74**	**100**
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	5.721.777.000,00	5.649.765.140,00	98,74	100
7	**Program Pengembangan UMKM**	**7.924.282.000,00**	**6.754.917.512,00**	**85,24**	**100**
	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	7.924.282.000,00	6.754.917.512,00	85,24	100
	JUMLAH	**50.116.411.000,00**	**44.329.196.104,00**	**88,45**	**100**

15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

15.1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp17.920.515.000,00 realisasi sebesar Rp17.552.390.315,00 atau 97,95% yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**14.077.545.000,00**	**13.766.001.485,00**	**97,79**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.436.000,00	77.103.603,00	99,57	100
	Administrasi Keuangan	10.169.452.000,00	9.903.790.680,00	97,39	100
	Administrasi Umum	3.808.887.000,00	3.763.897.202,00	98,82	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21.770.000,00	21.210.000,00	97,43	100
2	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**306.911.000,00**	**306.611.000,00**	**99,90**	**100**
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	77.121.000,00	77.121.000,00	100,00	100
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	229.790.000,00	229.490.000,00	99,87	100
3	**Program Promosi Penanaman Modal**	**994.837.000,00**	**984.824.230,00**	**98,99**	**100**
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	994.837.000,00	984.824.230,00	98,99	100
4	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**1.175.795.000,00**	**1.175.778.600,00**	**100,00**	**100**
	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	191.155.000,00	191.139.100,00	99,99	100
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	984.640.000,00	984.639.500,00	100,00	100
5	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**895.743.000,00**	**852.768.500,00**	**95,20**	**100**
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang	895.743.000,00	852.768.500,00	95,20	100

	Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				
6	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**469.684.000,00**	**466.406.500,00**	**99,30**	**100**
	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	469.684.000,00	466.406.500,00	99,30	100
	JUMLAH	**17.920.515.000,00**	**17.552.390.315,00**	**97,95**	**100**

16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN BIDANG PARIWISATA

16.1. DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Dan Bidang Pariwisata yang dialokasikan pada Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata sebesar Rp262.910.421.000,00 realisasi sebesar Rp254.357.580.554,00 atau 96,75% yang terdiri dari 7 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**41.473.927.000,00**	**38.423.984.664,00**	**92,65**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	733.520.000,00	654.144.400,00	89,18	100
	Administrasi Keuangan	24.884.688.000,00	24.570.931.575,00	98,74	100
	Administrasi Umum	15.804.219.000,00	13.179.708.689,00	83,39	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	51.500.000,00	19.200.000,00	37,28	100
2	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**23.621.330.000,00**	**22.544.838.500,00**	**95,44**	**99,89**
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	10.632.317.000,00	9.711.437.000,00	91,34	100
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	12.989.013.000,00	12.833.401.500,00	98,80	99,77
3	**Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**	**174.672.846.000,00**	**173.038.740.939,00**	**99,06**	**100**
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	64.173.000.000,00	64.157.353.684,00	99,98	100
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	5.947.243.000,00	5.557.448.500,00	93,45	100
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	101.471.178.000,00	100.549.422.755,00	99,09	100
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.081.425.000,00	2.774.516.000,00	90,04	100
4	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**12.354.469.000,00**	**10.551.077.821,00**	**85,40**	**99,46**
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1.977.198.000,00	1.788.231.800,00	90,44	100
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	9.627.387.000,00	8.105.791.071,00	84,20	98,38
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	749.884.000,00	657.054.950,00	87,62	100
5	**Program Pemasaran Pariwisata**	**6.538.653.000,00**	**5.817.303.926,00**	**88,97**	**100**
	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	6.538.653.000,00	5.817.303.926,00	88,97	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
6	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**113.400.000,00**	**99.291.500,00**	**87,56**	**100**
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	113.400.000,00	99.291.500,00	87,56	100
7	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**4.135.796.000,00**	**3.882.343.204,00**	**93.87**	**100**
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	4.135.796.000,00	3.882.343.204,00	93.87	100
	JUMLAH	**262.910.421.000,00**	**254.357.580.554,00**	**96,75**	**99,91**

17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN BIDANG KEARSIPAN

17.1. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan yang dialokasikan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sebesar Rp31.735.978.000,00 realisasi sebesar Rp30.903.127.749,00 atau 97,38% yang terdiri dari 4 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**28.816.805.000,00**	**28.013.794.904,00**	**97,21**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.500.000,00	150.500.000,00	98,69	100
	Administrasi Keuangan	23.739.240.000,00	23.044.783.037,00	97,07	100
	Administrasi Umum	4.915.195.000,00	4.808.641.867,00	97,83	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.870.000,00	9.870.000,00	100,00	100
2	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**2.005.916.000,00**	**1.982.706.120,00**	**98,84**	**100**
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	1.838.801.000,00	1.815.606.120,00	98,74	100
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	167.115.000,00	167.100.000,00	99,99	100
3	**Program Pengelolaan Arsip**	**727.857.000,00**	**721.227.225,00**	**99,09**	**100**
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	391.105.000,00	385.155.925,00	98,48	100
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	336.752.000,00	336.071.300,00	99,80	100
4	**Program Perizinan Penggunaan Arsip**	**185.400.000,00**	**185.399.500,00**	**100**	**100**
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	185.400.000,00	185.399.500,00	100	100
	JUMLAH	**31.735.978.000,00**	**30.903.127.749,00**	**97,38**	**100**

18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

18.1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Kelautan Dan Perikanan yang dialokasikan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp142.242.398.000,00 realisasi sebesar Rp118.166.526.235,00 atau 83,07% yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**43.295.299.000,00**	**40.403.688.839,00**	**93,32**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.620.000,00	464.358.900,00	92,76	100
	Administrasi Keuangan	35.349.758.000,00	32.981.103.912,00	93,30	100
	Administrasi Umum	7.434.921.000,00	6.957.668.726,00	93,58	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00	557.301,00	5,57	100
2	**Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**	**7.382.821.000,00**	**6.602.341.138,00**	**89,43**	**98,20**
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.704.321.000,00	1.658.582.581,00	97,32	96,40
	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil	5.678.500.000,00	4.943.758.557,00	87,06	100
3	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**55.655.172.000,00**	**38.153.578.830,00**	**82.98**	**98,5**
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	45.739.829.000,00	37.693.359.924,00	82,41	100
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	9.915.343.000,00	8.490.319.350,00	85,63	95,58
4	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**26.035.758.000,00**	**16.465.680.300,00**	**63,24**	**100**
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	211.549.000,00	200.779.000,00	94,91	100
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	25.824.209.000,00	16.264.901.300,00	62,98	99,94
5	**Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan**	**2.771.464.000,00**	**2.652.173.534,00**	**95,70**	**100**
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	2.538.553.000,00	2.432.776.034,00	95,83	100
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	232.911.000,00	219.397.500,00	94,20	100
6	**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**7.101.884.000,00**	**5.858.963.150,00**	**82,50**	**100**
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	95.660.000,00	94.460.000,00	98,75	100
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	7.006.224.000,00	5.764.503.150,00	82,28	100
	JUMLAH	**142.242.398.000,00**	**118.166.526.235,00**	**83,07**	**99,45**

19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sebesar Rp302.257.616.000,00 realisasi sebesar Rp275.725.003.680,00 atau 91,22% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni :

19.1. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang dialokasikan pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan sebesar Rp211.044.631.000,00 realisasi sebesar Rp194.076.538.371,00 atau 91,96% yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**106.531.484.000,00**	**98.453.391.265,00**	**92,42**	**96,86**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	557.867.000,00	361.108.042,00	64,73	91,54
	Administrasi Keuangan	94.589.710.000,00	87.408.272.692,00	92,41	100
	Administrasi Umum	11.383.907.000,00	10.684.010.531,00	93,85	99,03
2	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**52.033.770.000,00**	**46.353.743.823,00**	**89,08**	**99,86**
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	29.405.467.000,00	24.660.531.769,00	83,86	100
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	22.628.303.000,00	21.693.212.054,00	95,87	99,72
3	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**44.320.075.000,00**	**41.206.855.264,00**	**92,98**	**98,94**
	Penataan Prasarana Pertanian	44.320.075.000,00	41.206.855.264,00	92.98	98,94
4	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**4.010.461.000,00**	**3.929.433.139,00**	**97,98**	**100**
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	4.010.461.000,00	3.929.433.139,00	97,98	100
5	**Program Penyuluhan Pertanian**	**4.148.841.000,00**	**4.133.114.880,00**	**99,62**	**99,96**
	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	914.190.000,00	909.129.580,00	99,45	99,87
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	2.800.000.000,00	2.799.494.800,00	99,98	100
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	434.651.000,00	424.490.500,00	97,66	100
	JUMLAH	**211.044.631.000,00**	**194.076.538.371,00**	**91,96**	**99,12**

19.2. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang dialokasikan pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar

Rp91.212.985.000,00 realisasi sebesar Rp81.648.465.309,00 atau 89,51% yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**43.820.100.000,00**	**42.645.196.589,00**	**97,32**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.071.866.000,00	1.032.592.735,00	96,34	100
	Administrasi Keuangan	27.864.816.000,00	27.492.239.548,00	98,66	100
	Administrasi Umum	14.783.418.000,00	14.036.364.306,00	94,95	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	84.000.000,00	84	100
2	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**25.202.918.000,00**	**21.711.136.284,00**	**86,15**	**100**
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	6.276.333.000,00	4.166.463.921,00	66,38	100
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	17.827.354.000,00	16.466.240.000,00	92,37	100
	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	1.099.231.000,00	1.078.432.363,00	98,11	100
3	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**2.403.770.000,00**	**1.818.748.838,00**	**75,66**	**100**
	Penataan Prasarana Pertanian	2.403.770.000,00	1.818.748.838,00	75,66	100
4	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**16.892.767.000,00**	**12.713.152.315,00**	**75,26**	**100**
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11.923.975.000,00	7.850.636.265,00	65,84	100
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	4.179.872.000,00	4.115.465.050,00	98,46	100
	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	788.920.000,00	747.051.000,00	94,69	100
5	**Program Penyuluhan Pertanian**	**2.893.430.000,00**	**2.760.231.283,00**	**95,4**	**100**
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	2.893.430.000,00	2.760.231.283,00	95,4	100
	JUMLAH	**91.212.985.000,00**	**81.648.465.309,00**	**89,51**	**100**

20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

20.1. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral yang dialokasikan pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp75.708.687.000,00 realisasi sebesar Rp71.157.392.379,00 atau 93,99% yang terdiri dari 5 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**40.745.755.000,00**	**39.381.027.660,00**	**96,65**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	309.345.000,00	309.325.700,00	99,99	100
	Administrasi Keuangan	27.992.542.000,00	26.847.214.988,00	95,91	100
	Administrasi Umum	12.370.734.000,00	12.151.649.352,00	98,23	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	73.134.000,00	72.837.620,00	99,59	100
2	**Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**	**4.032.659.000,00**	**3.982.337.000,00**	**98,75**	**99,47**
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	2.024.150.000,00	2.021.339.000,00	99,86	100
	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1.110.105.000,00	1.067.298.400,00	96,14	98,41
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	898.404.000,00	893.699.600,00	99,48	100
3	**Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara**	**4.701.296.000,00**	**4.507.285.385,00**	**95,87**	**80,29**
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	3.119.124.000,00	2.947.850.250,00	94,51	60,59
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.582.172.000,00	1.559.435.135,00	98,56	100
4	**Program Pengelolaan Energi Terbarukan**	**11.836.094.000,00**	**11.491.892.014,00**	**97,09**	**100**
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	11.836.094.000,00	11.491.892.014,00	97,09	100
5	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**	**14.392.883.000,00**	**11.794.850.320,00**	**81,95**	**100**
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1.154.013.000,00	1.148.167.000,00	99,49	100
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	13.238.870.000,00	10.646.683.320,00	80,42	100
	JUMLAH	**75.708.687.000,00**	**71.157.392.379,00**	**93,99**	**95,95**

21. URUSAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGAN DAN BIDANG PERINDUSTRIAN

21.1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Bidang Perindustrian yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp129.894.173.000,00 realisasi sebesar Rp76.450.346.455,00 atau 58,86% yang terdiri dari 9 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**43.112.611.000,00**	**41.172.504.770,00**	**95,5**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	211.796.000,00	202.358.742,00	95,54	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Administrasi Keuangan	27.448.008.000,00	26.133.627.398,00	95,21	100
	Administrasi Umum	15.427.807.000,00	14.811.753.630,00	96,01	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000,00	24.765.000,00	99,06	100
2	**Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**	**128.000.000,00**	**113.162.648,00**	**88,41**	**100**
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	128.000.000,00	113.162.648,00	88,41	100
3	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**1.332.655.000,00**	**1.225.181.543,00**	**91,94**	**100**
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	1.332.655.000,00	1.225.181.543,00	91,94	100
4	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**17.793.775.000,00**	**17.737.275.522,00**	**99,68**	**100**
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	17.623.596.000,00	17.571.901.522,00	99,71	100
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	170.179.000,00	165.374.000,00	97,18	100
5	**Program Pengembangan Ekspor**	**1.907.584.000,00**	**1.734.040.307,00**	**90,90**	**100**
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1.907.584.000,00	1.734.040.307,00	90,90	100
6	**Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**	**3.829.772.000,00**	**3.445.650.360,00**	**89,97**	**100**
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	197.945.000,00	36.605.000,00	18,49	100
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.299.147.000,00	3.082.260.360,00	93,43	100
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	332.680.000,00	326.785.000,00	98,23	100
7	**Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**93.455.000,00**	**455.000,00**	**0,49**	**100**
	Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri	93.455.000,00	455.000,00	0,49	100
8	**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**	**60.468.635.000,00**	**9.880.872.295,00**	**16.34**	**81,22**
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	60.468.635.000,00	9.880.872.295,00	16,34	81,22
9	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**1.227.686.000,00**	**1.141.204.010,00**	**92,96**	**100**
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1.227.686.000,00	1.141.204.010,00	92,96	100
	JUMLAH	**129.894.173.000,00**	**76.450.346.455,00**	**58,86**	**97,91**

22. SEKRETARIAT DAERAH

22.1. SEKRETARIAT DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Sekretariat Daerah yang dialokasikan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp644.790.076.000,00 realisasi sebesar Rp588.580.305.652,00 atau 91,28% yang terdiri dari 4 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**116.344.793.000,00**	**114.467.888.177,00**	**98,39**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.000.000,00	122.241.000,00	92,61	100
	Administrasi Keuangan	80.258.160.000,00	79.107.391.453,00	98,57	100
	Administrasi Umum	35.681.185.000,00	34.967.859.039,00	98,00	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	273.448.000,00	270.396.685,00	98,88	100
2	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**393.023.509.000,00**	**381.049.963.433,00**	**96,95**	**100**
	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.169.672.000,00	3.148.719.829,00	99,34	100
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	387.450.252.000,00	375.499.971.004,00	96,92	100
	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	2.403.585.000,00	2.401.272.600,00	99,90	100
3	**Program Perekonomian Pembangunan**	**87.619.131.000,00**	**46.000.292.345,00**	**52,50**	**92,38**
	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	83.225.031.000,00	41.785.207.414,00	50,21	77,13
	Pengadaan Barang dan Jasa	2.171.092.000,00	2.024.900.519,00	93,27	100
	Evaluasi Administrasi Pembangunan	2.223.008.000,00	2.190.184.412,00	98,52	100
4	**Program Penataan Administrasi Umum**	**47.802.643.000,00**	**47.062.161.697,00**	**98,45**	**100**
	Penataan Organisasi	2.068.150.000,00	1.732.038.967,00	83,75	100
	Pelaksanaan Administrasi Umum	26.717.751.000,00	26.637.612.828,00	99,70	100
	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	19.016.742.000,00	18.692.509.902,00	98,30	100
	JUMLAH	**644.790.076.000,00**	**588.580.305.652,00**	**91,28**	**98,1**

23. SEKRETARIAT DPRD

23.1. SEKRETARIAT DPRD

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Sekretariat DPRD yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp260.775.013.000,00 realisasi sebesar Rp236.523.090.077,00 atau 90,7% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**46.937.314.000,00**	**44.330.770.153,00**	**94,45**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	588.081.000,00	572.913.850,00	97,42	100
	Administrasi Keuangan	17.452.645.000,00	17.310.309.965,00	99,18	100
	Administrasi Umum	25.979.053.000,00	23.654.708.214,00	91,05	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	2.917.535.000,00	2.792.838.124,00	95,73	100
2	**Program Layanan Dan Administrasi Keuangan**	**113.562.993.000,00**	**113.152.392.654,00**	**99,64**	**100**
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	113.562.993.000,00	113.152.392.654,00	99,64	100
3	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	**100.274.706.000,00**	**79.039.927.270,00**	**78,82**	**100**

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Pembentukan Perda Dan Peraturan DPRD	20.182.275.000,00	8.116.809.580,00	40,22	100
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	468.908.000,00	422.759.850,00	90,16	100
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	8.907.148.000,00	7.616.452.469,00	85,51	100
	Peningkatan Kapasitas DPRD	17.917.790.000,00	14.534.279.808,00	81,12	100
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	33.385.732.000,00	31.809.889.276,00	95,28	100
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	744.293.000,00	401.439.663,00	53,94	100
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	7.643.994.000,00	7.380.779.680,00	96,56	100
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	11.024.566.000,00	8.757.516.944,00	79,44	100
	JUMLAH	**260.775.013.000,00**	**236.523.090.077,00**	**90,70**	**100**

24. PERENCANAAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

24.1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Perencanaan Bidang Penelitian Dan Pengembangan yang dialokasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar Rp39.177.194.000,00 realisasi sebesar Rp38.223.036.018,00 atau 97,56% yang terdiri dari 6 program program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**27.981.161.000,00**	**27.490.856.244,00**	**98,25**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	261.104.000,00	260.419.965,00	99,74	100
	Administrasi Keuangan	21.795.629.000,00	21.423.873.267,00	98,29	100
	Administrasi Umum	5.364.725.000,00	5.249.053.950,00	97,84	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	559.703.000,00	557.509.062,00	99,61	100
2	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**3.604.687.000,00**	**3.572.597.242,00**	**99,11**	**100**
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.747.187.000,00	2.721.375.842,00	99,06	100
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	857.500.000,00	851.221.400,00	99,27	100
3	**Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia**	**1.356.185.000,00**	**1.341.820.737,00**	**98,94**	**100**
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	464.978.000,00	455.810.737,00	98,03	100
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	408.696.000,00	404.016.000,00	98,85	100
	Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	482.511.000,00	481.994.000,00	99,89	100
4	**Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam**	**1.468.272.000,00**	**1.448.822.619,00**	**98,68**	**100**
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	649.900.000,00	636.754.617,00	97,98	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	488.500.000,00	485.176.000,00	99,32	100
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	329.872.000,00	326.892.002,00	99,10	100
5	**Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan**	**1.066.750.000,00**	**1.062.055.340,00**	**99,56**	**100**
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	314.750.000,00	314.199.938,00	99,83	100
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	498.000.000,00	494.705.020,00	99,34	100
	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	254.000.000,00	253.150.382,00	99,67	100
6	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**	**3.700.139.000,00**	**3.306.883.836,00**	**89,37**	**100**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	621.528.000,00	519.797.000,00	83,63	100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	624.250.000,00	498.258.160,00	79,82	100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	624.250.000,00	593.320.400,00	95,05	100
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.830.111.000,00	1.695.508.276,00	92,65	100
	JUMLAH	**39.177.194.000,00**	**38.223.036.018,00**	**97,56**	**100**

25. KEUANGAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Keuangan sebesar Rp286.793.801.000,00 realisasi sebesar Rp263.245.299.929,00 atau 91,79% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni :

25.1. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Keuangan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp243.452.000.000,00 realisasi sebesar Rp221.956.907.813,00 atau 91,17% yang terdiri dari 2 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**217.281.236.000,00**	**196.532.680.169,00**	**90,45**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	686.059.000,00	661.066.750,00	96,36	100
	Administrasi Keuangan	136.436.910.000,00	117.111.816.490,00	85,84	100
	Administrasi Umum	80.148.267.000,00	78.750.096.929,00	98,26	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00	9.700.000,00	97,00	100
2	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**26.170.764.000,00**	**25.424.227.644,00**	**97,15**	**100**

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	26.170.764.000,00	25.424.227.644,00	97,15	100
	JUMLAH	**243.452.000.000,00**	**221.956.907.813,00**	**91,17**	**100**

25.2. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Keuangan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp43.341.801.000,00 realisasi sebesar Rp41.288.392.116,00 atau 95,26% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**29.339.334.000,00**	**27.553.368.994,00**	**93,91**	**99,87**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.325.000,00	86.397.500,00	94,60	100
	Administrasi Keuangan	23.094.506.000,00	21.532.916.330,00	93,24	100
	Administrasi Umum	6.133.503.000,00	5.931.655.164,00	96,71	99,47
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	2.400.000,00	12	100
2	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**10.455.330.000,00**	**10.209.584.005,00**	**97,65**	**100**
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.711.188.000,00	5.623.740.200,00	98,47	100
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	450.626.000,00	440.324.866,00	97,71	100
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.172.873.000,00	1.094.551.339,00	93,32	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3.120.643.000,00	3.050.967.600,00	97,77	100
3	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**3.547.137.000,00**	**3.525.439.117,00**	**99,39**	**99,91**
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.547.137.000,00	3.525.439.117,00	99,39	99,91
	JUMLAH	**43.341.801.000,00**	**41.288.392.116,00**	**95,26**	**99,93**

26. KEPEGAWAIAN

26.1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Kepegawaian yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp86.341.207.000,00 realisasi sebesar Rp84.120.845.732,00 atau 97,43% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**77.463.971.000,00**	**75.450.017.528,00**	**97,40**	**99,58**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	197.839.000,00	194.024.245,00	98,07	100
	Administrasi Keuangan	69.975.916.000,00	68.620.403.010,00	98,06	99,94
	Administrasi Umum	7.104.730.000,00	6.450.805.273,00	90,80	98,36
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	185.486.000,00	184.785.000,00	99,62	100
2	**Program Kepegawaian Daerah**	**8.877.236.000,00**	**8.670.828.204,00**	**97,67**	**99,95**
	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	719.392.000,00	700.988.028,00	97,44	100
	Administrasi Kepegawaian	3.432.098.000,00	3.363.633.969,00	98,01	99,79
	Peningkatan Kapastitas ASN	3.368.478.000,00	3.270.710.379,00	97,10	99,96
	Pengembangan Karir ASN	706.327.000,00	701.959.334,00	99,38	100
	Pembinaan ASN	650.941.000,00	633.536.494,00	97,33	100
	JUMLAH	**86.341.207.000,00**	**84.120.845.732,00**	**97,43**	**99,77**

27. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

27.1 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Pendidikan Dan Pelatihan yang dialokasikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp59.488.773.000,00 realisasi sebesar Rp52.428.138.452,00 atau 88,13% yang terdiri dari 2 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**45.840.162.000,00**	**41.591.019.926,00**	**90,73**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	335.761.000,00	293.765.141,00	87,49	100
	Administrasi Keuangan	26.506.000.000,00	25.723.962.667,00	97,05	100
	Administrasi Umum	18.919.991.000,00	15.517.222.098,00	82,01	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	78.410.000,00	56.070.020,00	71,51	100
2	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**13.648.611.000,00**	**10.837.118.526,00**	**79,40**	**98,80**
	Pengembangan Kompetensi Teknis	2.305.637.000,00	1.811.785.349,00	78,58	100
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	11.342.974.000,00	9.025.333.177,00	79,57	96,80
	JUMLAH	**59.488.773.000,00**	**52.428.138.452,00**	**88,13**	**99,40**

28. PENGHUBUNG

28.1. BADAN PENGHUBUNG

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Penghubung yang dialokasikan pada Badan Penghubung sebesar Rp19.109.643.000,00 realisasi sebesar Rp17.997.515.368,00 atau 94,18% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**18.100.752.000,00**	**17.081.202.675,00**	**94,37**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.880.000,00	32.628.180,00	96,31	100
	Administrasi Keuangan	8.605.155.000,00	8.183.020.275,00	95,09	100
	Administrasi Umum	9.438.881.000,00	8.842.718.220,00	93,68	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	22.836.000,00	22.836.000,00	100,00	100
2	**Program Pelayanan Penghubung**	**1.008.891.000,00**	**916.312.693,00**	**90,82**	**100**
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.008.891.000,00	916.312.693,00	90,82	100
	JUMLAH	**19.109.643.000,00**	**17.997.515.368,00**	**94,18**	**100**

29. INSPEKTORAT DAERAH

29.1. INSPEKTORAT

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Inspektorat Daerah yang dialokasikan pada Inspektorat sebesar Rp30.627.046.000,00 realisasi sebesar Rp29.792.275.993,00 atau 97,27% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**22.842.068.000,00**	**22.350.248.889,00**	**97,85**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.815.000,00	44.615.750,00	82,91	100
	Administrasi Keuangan	17.596.000.000,00	17.275.812.067,00	98,18	100
	Administrasi Umum	5.006.727.000,00	4.846.124.980,00	96,79	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	185.526.000,00	183.696.092,00	99,01	100
2	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**4.714.126.000,00**	**4.650.618.511,00**	**98,65**	**100**
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.701.647.000,00	2.665.344.552,00	98,66	100
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.012.479.000,00	1.985.273.959,00	98,65	100
3	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**3.070.852.000,00**	**2.791.408.593,00**	**90,90**	**100**

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	589.821.000,00	504.757.944,00	85,58	100
	Asistensi dan Pendampingan	2.481.031.000,00	2.286.650.649,00	92,17	100
	JUMLAH	**30.627.046.000,00**	**29.792.275.993,00**	**97,27**	**100**

30. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

30.1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Kesatuan Bangsa Dan Politik yang dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp83.939.364.000,00 realisasi sebesar Rp82.092.395.536,00 atau 97,8% yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.736.041.000,00**	**14.167.925.559,00**	**96,14**	**100**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.045.465.000,00	1.937.624.165,00	94,73	100
	Administrasi Keuangan	8.280.854.000,00	7.946.278.227,00	95,96	100
	Administrasi Umum	4.344.682.000,00	4.232.583.167,00	97,42	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	65.040.000,00	51.440.000,00	79,09	100
2	**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**	**3.637.455.000,00**	**3.479.007.274,00**	**95,64**	**100**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.637.455.000,00	3.479.007.274,00	95,64	100
3	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**26.744.004.000,00**	**26.580.487.941,00**	**99.39**	**100**
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	26.744.004.000,00	26.580.487.941,00	99,39	100
4	**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**20.559.735.000,00**	**20.059.531.381,00**	**97.57**	**100**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20.559.735.000,00	20.059.531.381,00	97,57	100
5	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**	**3.816.296.000,00**	**3.518.823.139,00**	**92,21**	**100**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3.816.296.000,00	3.518.823.139,00	92,21	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
6	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**14.445.833.000,00**	**14.286.620.242,00**	**98.90**	**100**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	14.445.833.000,00	14.286.620.242,00	98,90	100
	JUMLAH	**83.939.364.000,00**	**82.092.395.536,00**	**97,80**	**100**

BAB 4
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sejak Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis Akrual. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 serta perkembangan keadaan khususnya yang berkaitan dengan peraturan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1 Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
2. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
4. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
5. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
6. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

4.2.1 Pendapatan – LO

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.2.2 Pendapatan - LRA

a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

c. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

4.3 Kebijakan Akuntansi Beban

4.3.1 Beban Operasi

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

b. Beban Barang dan Jasa

1) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

3) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah, seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi. Beban bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.

4) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

5) Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

6) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

7) Beban Penyusutan

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.

8) Beban Amortisasi

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan.

9) Beban Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu:

a) Metode Penyisihan Piutang

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.

b) Metode Penghapusan Langsung.

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Beban piutang tak tertagih diukur dengan:

(1) Metode Penyisihan Piutang

Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.

(2) Metode Penghapusan Langsung.

Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali.

4.3.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.
3. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.
4. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah.
5. Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya Surat pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD.
6. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
7. Belanja disajikan pada LRA dan LAK dalam mata uang rupiah.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari SilPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, penjualan investasi permanen lainnya dan penerimaan pembiayaan daerah lainnya.
2. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.
3. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
4. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1. Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya yang dikelola oleh SKPD.
2. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca dan uang kas yang masih berada di bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang bersumber dari Pendapatan-LO.
3. Saldo Simpanan di Bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
4. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Setara kas meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali.
5. Berdasarkan unit pengelolaannya kas pemerintah dibagi menjadi dua :
   a. Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD)
      1) Kas di Kas Daerah merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
      2) Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid.
   b. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD

      Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD), Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah dan Kas di Bendahara Sekolah yang merupakan sisa Dana BOS, BOP, Peran Serta Masyarakat, Bantuan Pemerintah dan Usaha Mandiri sampai dengan akhir tahun anggaran.
6. Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
7. Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilai yang disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
8. Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan Laporan Arus Kas dijelaskan, diperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Antara lain mengungkapkan penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki pemerintah daerah.

4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Piutang diklasifikasikan ke dalam piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan dan piutang lainnya.
3. Piutang pungutan pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi dan piutang PAD yang sah.
4. Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang pajak terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Air Permukaan dan Piutang Pajak Rokok.
5. Piutang retribusi adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
6. Piutang PAD yang Sah meliputi Piutang Penjualan Aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, Piutang Badan Layanan Umum Daerah dan Piutang Bunga Deposito. Piutang Penjualan Aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui bila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut, telah ditetapkan surat ketetapan dan/atau telah diterbitkan surat penagihan. Piutang Bunga Deposito diakui sebesar nilai bunga deposito yang akan diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.
7. Piutang perikatan perjanjian adalah hak yang timbul akibat perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, terdiri dari piutang pemberian pinjaman, piutang penjualan kredit dan piutang kemitraan dengan pihak lain.
8. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini antara lain Piutang Transfer Pemerintah Pusat yang diakui ketika terbit pernyataan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk surat pemberitahuan atau

Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan dan Piutang Transfer Antar Daerah yang berupa Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya yang diakui sesuai dengan hak yang masih harus diterima sampai dengan periode pelaporan keuangan.

9. Piutang lainnya diklasifikasikan dalam piutang tuntutan ganti rugi daerah dan piutang berdasarkan peristiwa lainnya.
10. Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah Piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Piutang TP/TGR diakui sebesar nilai tagihan TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
11. Kriteria pengakuan piutang pajak :
    a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
    b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
    c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
12. Secara spesifik pengakuan jenis pendapatan terdiri dari piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer pemerintah dan piutang lainnya.
13. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
14. Piutang pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan / atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daearah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Terhadap Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pengakuan hak dilakukan pada saat berakhirnya masa pajak atau jatuh tempo. Penerbitan SKPD dilakukan secara Sistem Informasi Manajemen. Apabila hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan piutang pajak tidak terpenuhi seperti kendaraan hilang, kendaraan dicabut registrasinya, alamat wajibpajak tidak diketahui kedudukan, kendaraan beralih kepemilikan atau dijual, maka atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDKB dapat dibatalkan untuk dilakukan koreksi sejak tanggal diketahui berdasarkan laporan hasil verifikasi.
15. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Mekanisme penarikan Retribusi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu menggunakan surat ketetapan dan dokumen yang persamakan dengan surat ketetapan.
16. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD/BUMN/Badan Usaha Lainnya berdasarkan keputusan RUPS belum dibayarkan.

17. Piutang Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad jual beli.
18. Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan diakui berdasarkan selisih lebih tukar menukar BMD yang belum diterima pembayarannya.
19. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui dengan kriteria telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; telah ditetapkan surat ketetapan dan / atau; telah diterbitkan surat penagihan. Untuk piutang pasien rumah sakit dengan jaminan, dicatat sebesar pengakuan klaim pada pihak penjamin. Apabila hasil verifikasi dari pihak penjamin berbeda dengan pengajuan klaim maka dilakukan koreksi sesuai hasil verifikasi.
20. Piutang Jasa Giro dan Piutang pendapatan Bunga diakui sebesar nilai bunga yang akan diterima sampai dengan akhir periode.
21. Penyisihan piutang tidak tertagih

    Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO. Piutang terhadap Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan Piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penyesuaian piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/ umur piutang sebagai berikut :

Lama menunggak	**Kategori**	**% diragukan Tertagih**
- 0 tahun sampai dengan 1 tahun	Lancar	0,5%
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Kurang Lancar	10%
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Diragukan	50%
- Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

22. Penghentian pengakuan piutang

    Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas dan penghapusbukuan (*write off*). Mekanisme penghapusan piutang diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang. Untuk piutang pajak dan retribusi dapat dilakukan penghapusan piutang langsung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

23. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan

    Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

24. Piutang dan penyisihan piutang disajikan sebagai aset lancar dalam Neraca, dan diungkapkan dalam CaLK meliputi, antara lain rincian jenis piutang dan saldo umur dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu

4.8 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

1. Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah. Contoh beban dibayar dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa.
2. Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis terkonsumsi pada periode pelaporan.
3. Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban.
4. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka.
5. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.
6. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK.

4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

1. Investasi Jangka Pendek :
    a. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
    b. Harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah.
    c. Investasi jangka pendek terdiri dari Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) dan

Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

d. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai surplus atau defisit pada LO.

e. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan.

f. Investasi dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

g. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

h. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

i. Investasi jangka pendek disajikan pada pos asset lancer di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

2. Investasi Jangka Panjang :

a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.

b. Investasi jangka panjang diklasifikasikan ke dalam investasi permanen dan investasi non permanen

c. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.

d. Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi. surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO

3. Metode penilaian investasi pemerintah :

a. Metode Biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

b. Metode Ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode ekuitas diterapkan untuk :

1) Kepemilikan sampai 50%, dan memiliki pengaruh yang signifikan; dan

2) Kepemilikan lebih dari 50%.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Barang persediaan terdiri dari :
   a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor, suku cadang, obat-obatan/bahan laboratorium; barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
   b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat/pemerintah daerah (pemda) lain;
   c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda;
   d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contoh:
      1. hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda; dan
      2. tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
   e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti minyak dan beras.
3. Persediaan barang-barang operasional kegiatan, persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal (*intention*) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA-nya, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak menjadi persediaan.
4. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pencatatan persediaan untuk operasional kegiatan SKPD adalah materialitas; pencerminan dari tugas dan fungsi utama SKPD; dan pengendalian internal.
5. Jenis-jenis persediaan :
   a. Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas:
      1. Barang habis pakai;
      2. Barang tak habis pakai; dan
      3. Barang bekas pakai.

b. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan terdiri atas:
   1. Barang konsumsi;
   2. Amunisi;
   3. Bahan untuk pemeliharaan;
   4. Suku cadang;
   5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
   6. Bahan baku;
   7. Barang dalam proses/ setengah jadi;
   8. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   9. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   10. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   11. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   12. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
   13. Persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

6. Persediaan diakui pada saat :
   a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).
   b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

      Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.

      Pada akhir periode pelaporan jumlah persediaan diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*). *Stock opname* dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.
7. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
8. Pemakaian persediaan diakui sebagai beban barang pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurang atau bertambahnya jumlah persediaan.
9. Pengukuran persediaan melalui :
   a. Biaya perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan persediaan tersebut sampai di gudang. Biaya perolehan persediaan meliputi :
      1) harga pembelian;
      2) biaya pengangkutan;
      3) biaya penanganan; dan
      4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
1) potongan harga; dan
2) rabat, dan lainnya yang serupa.

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan.

c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya seperti proses pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya. Khusus persediaan pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, nilai wajar adalah nilai tarif retribusi atau nilai jual.

10. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.
11. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan :
    a. metode penilaian Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP). Nilai barang-barang yang pertama kali dibeli merupakan nilai barang yang dipakai/dijual/diserahkan pertama kali. Dengan demikian nilai persediaan akhir dihitung mulai dari harga pembelian terakhir;
    b. persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaannya dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
12. Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dikecualikan dari Beban Persediaan adalah pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan yang dicatat sebagai Beban Pemeliharaan dan Penyerahan Barang Persediaan untuk dijual diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah lain yang dicatat sebagai Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat/Pemda lain.
13. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP).
14. Dalam hal SKPD karena tugas dan fungsinya menerima hibah seperti penerimaan Hadiah Tidak Tertebak atau Hadiah Yang Tidak Diambil Oleh Pemenang, persediaan tersebut dicatat sebesar harga wajar pada saat perolehan.
15. Penghapusbukuan aset persediaan dilaksanakan oleh Kepala SKPD dengan persetujuan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah berdasarkan berita acara yang menjadi dasar penghapusbukuan antara lain berita acara pemusnahan untuk barang persediaan yang dimusnahkan, berita acara serah terima untuk barang yang dihibahkan.

16. Persediaan sumber daya alam diklasifikasikan berdasarkan cadangan potensi, cadangan yang dapat dieksplorasi dan sumber daya alam hasil eksplorasi yang tersisa per periode laporan. Harga satuan persediaan dicatat berdasarkan harga pasar/harga standar tarif retribusi.
17. Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar.
18. Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:
    a. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
    b. Nilai Persediaan yang kadaluarsa dan rusak atau usang serta persediaan yang dimusnahkan pada periode pelaporan.

4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
3. Klasifikasi Aset Tetap adalah : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan; Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
4. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap menggunakan azas *subtance over form* dan akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap :
    a. Berwujud
    b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
    d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
    e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
6. Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.
7. Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, terdiri dari :
    a. perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan;
    b. pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;
    c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume nilai Aset Tetap tersebut; dan
    d. penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

8. Pengakuan spesifik atas aset tetap dijelaskan sebagai berikut :
   a. Dalam hal terdapat Tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, diungkapkan dalam CaLK.
   b. Pengadaan aset tetap tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan. Penyerahan atas aset tetap tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
   c. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan.
   d. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan.
9. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
10. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
11. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
12. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).
13. Atas aset hasil dari bonus maka biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.
14. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap maka perlu memperhatikan biaya perolehan aset yang terdiri dari harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat, dan seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
15. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, maka biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas).
16. Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
17. Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula

biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

18. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
19. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap.
20. Aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset ekstrakomtable dan berlaku sejak ditetapkan. Aset ekstrakomtable tidak disajikan pada neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.
21. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan *(carrying amount)*.
22. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran *(expenses)* pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.
23. Pengeluaran setelah perolehan Saldo awal suatu Aset tetap hanya dapat dikapitalisasi menambah nilai aset dengan persyaratan sebagai berikut :
    a. Pengeluaran tersebut menambah volume/kapasitas aset; atau
    b. Semua aset tersebut rusak berat dan tidak dapat dipergunakan menjadi siap digunanan.

    Dengan ketentuan pengeluaran tersebut memenuhi Batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap.
24. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadinya.
25. Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama.
26. Biaya perolehan aset pertukaran diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.
27. Biaya perolehan dari masing-masing aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
28. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
29. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
30. Aset tetap renovasi merupakan renovasi atas Aset Tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi Aset Tetap

dan dikategorikan sebagai Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap Lainnya berupa alat musik modern dan Aset Tetap Renovasi dilakukan penyusutan secara periodik.

31. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset tidak digunakan operasional pemerintah, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
32. Aset Tetap yang dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, direklasifikasi ke Aset Lainnya (Barang Rusak Berat). Apabila Keputusan Penghapusan mengenai Aset Tetap yang rusak berat dan/atau usang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari Aset Lainnya (Barang Rusak Berat).

    Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.

    Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

a. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).
b. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagaimana tercantum pada tabel masa manfaat aset tetap dibawah ini :

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	**3**	**02**				**Peralatan dan Mesin**			
1	**3**	**02**	**01**			**Alat Besar**			
1	3	02	01	01		Alat Besar Darat	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	5

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	02	01	02		Alat Besar Apung	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	01	03		Alat Bantu	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	**3**	**02**	**02**			**Alat Angkutan**			
1	3	02	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	02	02		Alat Angkutan Tak Bermotor	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	02	03		Alat Angkut Apung Bermotor	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	02	04		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	02	05		Alat Angkut Bermotor Udara	20	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								50%≤ sd <75%	6
								≥75%	9
1	**3**	**02**	**03**			**Alat Bengkel dan Ukur**			
1	3	02	03	01		Alat Bengkel Bermesin	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5
1	3	02	03	02		Alat Bengkel Tak Bermesin	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	03	03		Alat Ukur	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	**3**	**02**	**04**			**Alat Bengkel dan Ukur**			
1	3	02	04	01		Alat Pengolahan	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	**3**	**02**	**05**			**Alat Kantor dan Rumah Tangga**			
1	3	02	05	01		Alat Kantor	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	05	02		Alat Rumah Tangga	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	05	03		Meja Dan Kursi	5	<25%	0

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
						Kerja/Rapat Pejabat			
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	**3**	**02**	**06**			**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**			
1	3	02	06	01		Alat Studio	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	06	02		Alat Komunikasi	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	06	03		Peralatan Pemancar	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5
1	3	02	06	04		Peralatan Komunikasi Navigasi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5
1	**3**	**02**	**07**			**Alat Kedokteran dan Kesehatan**			
1	3	02	07	01		Alat Kedokteran	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	07	02		Alat Kesehatan Umum	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	**3**	**02**	**08**			**Alat Kedokteran dan Kesehatan**			
1	3	02	08	01		Unit Alat Laboratorium	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	5
								≥75%	8
1	3	02	08	03		Alat Praktek Sekolah	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	5
								≥75%	8
1	3	02	08	05		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	08	06		Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								≥75%	5
1	3	02	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	3
1	3	02	08	08		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	5
								≥75%	7
1	3	02	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	**3**	**02**	**09**			**Alat Persenjataan**			
1	3	02	09	01		Senjata Api	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	09	02		Persenjataan Non Senjata Api	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	0
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	1
1	3	02	09	03		Senjata Sinar	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	0
								50%≤ sd <75%	0
								≥75%	2
1	3	02	09	04		Alat Khusus Kepolisian	4	<25%	0

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								25%≤ sd <50%	0
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	1
1	**3**	**02**	**10**			**Komputer**			
1	3	02	10	01		Komputer Unit	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	10	02		Peralatan Komputer	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	**3**	**02**	**11**			**Alat Eksplorasi**			
1	3	02	11	01		Alat Eksplorasi Topografi	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	3
1	**3**	**02**	**12**			**Alat Pengeboran**			
1	3	02	12	01		Alat Pengeboran Mesin	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	**3**	**02**	**13**			**Alat Produksi, Pengolahn dan Pemurnian**			
1	3	02	13	01		Sumur	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	13	02		Produksi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	13	03		Pengolahan dan Pemurnian	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	5
								≥75%	6
1	**3**	**02**	**14**			**Alat Bantu Eksplorasi**			
1	3	02	14	01		Alat Bantu Eksplorasi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	14	02		Alat Bantu Produksi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	**3**	**02**	**15**			**Alat Keselamatan Kerja**			
1	3	02	15	01		Alat Deteksi	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	3
1	3	02	15	02		Alat Pelindung	5	<25%	0

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								25%≤ sd <50%	0
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	15	03		Alat SAR	2	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	1
1	3	02	15	04		Alat kerja Penerbangan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	**3**	**02**	**16**			**Alat Peraga**			
1	3	02	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	3
1	**3**	**02**	**17**			**Peralatan Proses/Produksi**			
1	3	02	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	2
1	**3**	**02**	**18**			**Rambu-Rambu**			
1	3	02	18	01		Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	18	02		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	18	03		Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	7
1	**3**	**02**	**19**			**Peralatan Olahraga**			
1	3	02	19	01		Peralatan Olahraga	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	2
1	**3**	**03**				**Gedung dan Bangunan**			
1	3	03	01			**Bangunan Gedung**			
1	3	03	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja			
						Permanen	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
						Semi Permanen	25	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	7
						Darurat	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5
1	3	03	01	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal			
						Permanen	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								≥75%	15
						Semi Permanen	25	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	7
						Darurat	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5
1	**3**	**03**	**02**			**Monumen**			
1	3	03	02	01		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	**3**	**03**	**03**			**Menara**			
1	3	03	03	01		Bangunan Menara Perambuan	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	**3**	**03**	**04**			**Tugu Titik Kontrol/Pasti**			
1	3	03	04	01		Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	**3**	**04**				**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**			
1	**3**	**04**	**01**			**Jalan dan Jembatan**			
1	3	04	01	01		Jalan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								≥75%	5
1	3	04	01	02		Jembatan	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	**3**	**04**	**02**			**Bangunan Air**			
1	3	04	02	01		Bangunan Air Irigasi	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	02	02		Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	02	03		Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	5
1	3	04	02	04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	3
1	3	04	02	05		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								≥75%	3
1	3	04	02	06		Bangunan Air Bersih/Baku	40	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	02	07		Bangunan Air Kotor	40	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	**3**	**04**	**03**			**Instalasi**			
1	3	04	03	01		Instalasi Air Bersih/Baku	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	7
								≥75%	10
1	3	04	03	02		Instalasi Air Kotor	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	7
								≥75%	10
1	3	04	03	03		Instalasi Pengolahan Sampah	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	5
1	3	04	03	04		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	5
1	3	04	03	05		Instalasi Pembangkit Listrik	40	<25%	0

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	03	06		Instalasi Gardu Listrik	40	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	03	07		Instalasi Pertahanan	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	5
1	3	04	03	08		Instalasi Gas	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	03	09		Instalasi Pengaman	20	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	3
1	3	04	03	10		Instalasi Lainnya	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	3
1	**3**	**04**	**04**			**Jaringan**			
1	3	04	04	01		Jaringan Air Minum	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	7
								≥75%	10
1	3	04	04	02		Jaringan Listrik dan Komputer	40	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								≥75%	15
1	3	04	04	03		Jaringan Telepon	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	5
								≥75%	10
1	3	04	04	04		Jaringan Gas	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	7
								≥75%	10
1	**3**	**04**	**05**			**Alat Bercorak kebudayaan dan Kesenian**			
1	3	04	05	01		Alat Musik Modern/Band	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2

33. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan dan pengadaan/perolehan pada bulan tertentu mulai dihitung penyusutannya. Khusus perhitungan penyusutan secara bulanan akan mulai diterapkan Tahun Anggaran 2021. Perhitungan penyusutan dalam penyusunan Laporan Keuangan 2020 dilakukan secara tahunan.
34. Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
35. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
36. Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya). Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

37. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
38. Penyajian aset bersejarah (heritage assets) tidak harus di neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK. Beberapa Aset Tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.
39. Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
40. Aset *ekstrakomtable* terdiri dari :
    a. Aset tetap peralatan dan mesin yang nilainya kurang dari/sama dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    b. Aset tetap gedung dan bangunan yang kurang dari/sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
    c. Aset tetap lainnya berupa buku yang dipinjamkan, hewan, biota perairan dan tanaman.
19. Aset ekstrakomtable dalam kondisi rusak berat/usang/mati; hilang dan telah selesai proses penggantian/TPTGR; aset yang fisiknya sulit ditemukan dan masa manfaat sudah habis dapat dihapus bukukan.
20. Prosedur pemusnahan aset ekstrakomtable dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan aset ektrakomtable yang akan dimusnahkan. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan aset ektrakomtable belum/tidak diatur, SKPD teknis menyusun prosedur pemusnahan dimaksud.

4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan diakui pada saat pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan.
3. Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga pada SKPKD.
4. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Sedangkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari tagihan jangka panjang, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud (ATB), dan aset lain-lain.
2. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan

angsuran diakui pada saat kontrak penjualan pemerintah daerah secara angsuran kepada pemerintah telah ditandatangani.

3. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.
4. Tagihan penjualan angsuran disajikan dalam neraca disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
6. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Non Bendahara terdiri dari :
    1. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah
       Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
    2. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi Daerah.
       Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau tuntutan piutang ganti rugi pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan. Piutang ini sebagai *contrapost* atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara.
    3. Pengakuan Beban
       Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara atau non bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
7. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya" dan informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Aset Kemitraan merupakan aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
9. Bangun, Kelola, Serah – BKS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pola kerjasama aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya aset pemerintah beserta bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsensi).
10. Jenis-jenis aset kemitraan dengan pihak tiga antara lain :
    a. Tanah
    b. Gedung dan bangunan dan/atau sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan

c. BMD selain tanah dan bangunan
d. Aset tak berwujud

11. Aset Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kemitraan.
12. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kemitraan harus dicatat sebagai aset kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam kemitraan dicatat sebagai penyertaan kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
13. Aset kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK.
14. Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria : dapat diidentifikasi, dikuasai/dimiliki, dikendalikan oleh entitas pemerintah, mempunyai potensi manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh pemerintah, dan biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
15. Jenis-jenis aset tak berwujud dapat dibedakan jenis sumber daya, cara perolehan serta masa manfaatnya. Menurut jenis sumber dayanya, ATB dapat dibedakan menjadi :
    a. Perangkat lunak *Software* computer
    b. Hak paten, Hak cipta
    c. Lisensi dan Waralaba *(Franchise)*
    d. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
    e. *Goodwill*
    f. Royalti
    g. Aset tak berwujud lainnya
    h. Aset tak berwujud dalam pengerjaan
16. Menurut cara perolehannya, ATB dapat dibedakan menjadi :
    a. Pembelian
    b. Pengembangan internal
    c. Pertukaran
    d. Kerjasama
    e. Donasi/hibah; dan
    f. Warisan budaya/sejarah
17. Berdasarkan masa manfaatnya, ATB dapat dibedakan menjadi :
    a. ATB dengan masa manfaat terbatas; dan
    b. ATB dengan masa manfaat tak terbatas

18. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.
19. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Amortisasi dibagi menjadi Amortisasi atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi.
20. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :

$$\text{amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasikan}}{\text{Masa manfaat}}$$

    a. Nilai yang dapat diamortisasikan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu).
    b. Masa manfaat aset tak berwujud terbatas.
21. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya dengan keadaan dan alasan antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujud sehingga perlu digantikan dengan yang baru. Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan Aset Tak Berwujud dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan.
22. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasikan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas dari penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan kas dari penjualan ATB dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.
23. *Software* komputer sebagai ATB yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat diakui sebagai berikut :
    a. *Software* yang dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah (swakelola) tidak diakui sebagai ATB
    b. *Software* komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya.

c. *Software* yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum;

d. *Software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan;

e. Apabila *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian *integral* dari suatu *hardware*, maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai bagian dari *hardware* yang bersangkutan.

24. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya".
25. Aset tak berwujud diungkapkan dalam Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :
    a. masa manfaat dan metode amortisasi;
    b. nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
    c. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
26. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.
27. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain, meliputi :
    a. aset tetap yang rusak berat/usang;
    b. aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah;
    c. aset lain-lain lainnya antara lain:
        - kas/setara kas yang diblokir, disita atau kepemilikannya belum dapat teridentifikasi;
        - aset tetap yang sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal, tukar menukar);
        - aset hilang karena akibat bencana atau kelalaian;
        - aset yang masih dalam proses kepastian status hukum.
28. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
29. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
2. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan fihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang transfer dan utang jangka pendek lainnya.
6. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Termasuk pendapatan diterima dimuka adalah deposit/uang titipan pihak ketiga dalam transaksi *financial technology.*
7. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
8. Kewajiban pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK.

4.15 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.
2. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :
   a. Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
   b. Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD.
3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca
4. Ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi trasnsaksi resiprokal antara SKPKD dan SKPD.
5. Pada akhir periode pelaporan, ekuitas dikonsolidasikan akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian.
6. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.16 Kebijakan Akuntansi Koreksi

1. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya
2. Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan faktor lainnya.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a. Kesalahan tidak berulang
      1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan ini yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

a) Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Koreksi saat laporan keuangan telah terbit (Perda Pertanggungjawaban)

(1) Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

(a) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;

(b) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;

(2) Belanja dan Beban

(a) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih;

(b) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.

(3) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

(4) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun

mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

(5) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan,

(6) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

b. Kesalahan berulang dan sistematis

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

BAB 5
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah TA 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD TA 2021. Struktur penyajian Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan 2020 mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Ringkasan realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan	26.798.308.421.000,00	26.633.000.085.963,00	99,38	25.393.735.934.148,00	1.239.254.151.815,00
2	Belanja dan transfer	27.444.652.233.000,00	25.843.800.193.834,00	94,17	25.651.740.349.991,00	192.059.843.843,00
	Surplus/(Defisit)	**(646.343.812.000,00)**	**789.199.892.129,00**	**(122,10)**	**(258.004.415.843,00)**	**1.047.194.307.972,00**
3	Penerimaan Pembiayaan	861.343.812.000,00	861.492.992.625,00	100,02	1.119.348.228.370,00	(257.855.235.745,00)
4	Pengeluaran Pembiayaan	215.000.000.000,00	215.000.000.000,00	100,00	-	215.000.000.000,00
	Pembiayaan netto	**646.343.812.000,00**	**646.492.992.625,00**	**100,02**	**1.119.348.228.370,00**	**(472.855.235.745,00)**
5	**SiLPA**	-	**1.435.692.884.754,00**	-	**861.343.812.527,00**	**574.339.072.227,00**

Penjelasan terinci realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH — Rp26.633.000.085.963,00

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp26.798.308.421.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.633.000.085.963,00 atau 99,38%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp25.393.735.934.148,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.239.254.151.815,00 atau 4,88% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	15.017.805.787.000,00	14.695.474.898.162,00	97,85	13.668.282.278.855,00	1.027.182.619.307,00
2	Pendapatan Transfer	11.713.752.634.000,00	11.871.796.336.054,00	101,35	11.702.101.655.293,00	169.694.680.761,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	66.750.000.000,00	65.728.851.747,00	98,47	23.352.000.000,00	42.376.851.747,00
	Jumlah	**26.798.308.421.000,00**	**26.633.000.085.963,00**	**99,38**	**25.393.735.934.148,00**	**1.239.254.151.815,00**

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp14.695.474.898.162,00

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 15.017.805.787.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.695.474.898.162,00 atau 97,85%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp13.668.282.278.855,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.027.182.619.307,00 atau 7,52% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	12.656.260.599.000,00	11.718.378.320.505,00	92,59	11.139.173.309.780,00	579.205.010.725,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	90.105.999.000,00	91.634.269.205,00	101,70	98.297.991.699,00	(6.673.722.494,00)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	521.612.161.000,00	508.263.876.971,00	97,44	530.091.029.137,00	(21.827.152.166,00)
4	Lain-Lain PAD yang Sah	1.749.827.028.000,00	2.377.198.431.481,00	135,85	1.900.719.948.239,00	476.478.483.242,00
	Jumlah	**15.017.805.787.000,00**	**14.695.474.898.162,00**	**97,85**	**13.668.282.278.855,00**	**1.027.182.619.307,00**

Dampak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka penyajian akun Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 audited semula sebesar Rp93.279.121.699,00 menjadi sebesar Rp98.297.991.699,00 naik sebesar Rp5.018.870.000,00, sedangkan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2020 audited semula sebesar Rp1.905.738.818.239,00 menjadi sebesar Rp1.900.719.948.239,00 turun sebesar Rp5.018.870.000,00 hal ini dikarenakan penerimaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2020 termasuk bagian dari akun lain-lain PAD yang Sah, Tahun Anggaran 2021 termasuk bagian dari Pendapatan Retribusi Daerah

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp11.718.378.320.505,00

Pendapatan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp12.656.260.599.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.718.378.320.505,00 atau 92,59%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp11.139.173.309.780,00 mengalami kenaikan sebesar Rp579.205.010.725,00 atau 5,20%. Pelaksanaan pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.154.952.796.000,00	4.758.837.101.600,00	92,32	4.579.535.646.300,00	179.301.455.300,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.150.000.000.000,00	2.775.978.070.000,00	88,13	2.228.465.305.800,00	547.512.764.200,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.996.504.717.000,00	1.826.681.450.277,00	91,49	1.719.403.821.612,00	107.277.628.665,00
4	Pajak Air Permukaan	15.224.117.000,00	17.243.160.079,00	113,26	16.056.164.261,00	1.186.995.818,00
5	Pajak Rokok	2.339.578.969.000,00	2.339.638.538.549,00	100,00	2.595.712.371.807,00	(256.073.833.258,00)
	Jumlah	**12.656.260.599.000,00**	**11.718.378.320.505,00**	**92,59**	**11.139.173.309.780,00**	**579.205.010.725,00**

Pendapatan Pajak Daerah **tidak mencapai target** dikarenakan:

- Pemberlakukan PPKM berdampak pada pembatasan jam pelayanan pada SAMSAT *Car Free Day*, SAMSAT malam dan SAMSAT keliling pada kecamatan-kecamatan.
- belum pulihnya daya beli masyarakat dan ketersediaan kendaraan baru yang masih terbatas.
- konsumsi BBM oleh masyarakat berkurang akibat adanya kebijakan pemerintah untuk pengurangan aktivitas di luar rumah dan bepergian ke luar kota.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah — Rp91.634.269.205,00

Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp90.105.999.000,00 dengan realisasi sebesar Rp91.634.269.205,00 atau 101,70%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp98.297.991.699,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.673.722.494,00 atau 6,79%. Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	20.087.185.000,00	17.612.618.195,00	87,68	24.748.734.367,00	(7.136.116.172,00)
2	Retribusi Jasa Usaha	65.355.064.000,00	67.852.456.270,00	103,82	66.292.537.932,00	1.549.918.338,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	4.663.750.000,00	6.169.194.740,00	132,28	7.256.719.400,00	(1.087.524.660,00)
	Jumlah	**90.105.999.000,00**	**91.634.269.205,00**	**101,70**	**98.297.991.699,00**	**(6.673.722.494,00)**

Dampak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka penyajian akun Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 audited semula sebesar Rp93.279.121.699,00 menjadi sebesar Rp98.297.991.699,00 naik sebesar Rp5.018.870.000,00. kenaikan terdapat pada akun Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp19.729.864.367,00 menjadi Rp24.748.734.367,00 naik sebesar Rp5.018.870.000,00, hal ini dikarenakan penerimaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2020 termasuk bagian dari akun lain-lain PAD yang Sah, Tahun Anggaran 2021 termasuk bagian dari Pendapatan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum — Rp17.612.618.195,00

Pendapatan Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp20.087.185.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.612.618.195,00 atau 87,68%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp24.748.734.367,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.136.116.172,00 atau 28,83% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	19.738.400.000,00	17.015.718.195,00	86,21	19.119.314.367,00	(2.103.596.172,00)
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	52.400.000,00	63.400.000,00	120,99	296.950.000,00	(233.550.000,00)
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan	296.385.000,00	533.500.000,00	180,00	5.332.470.000,00	(4.798.970.000,00)
	Jumlah	**20.087.185.000,00**	**17.612.618.195,00**	**87,68**	**24.748.734.367,00**	**(7.136.116.172,00)**

5.1.1.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp17.015.718.195,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan ditargetkan sebesar Rp19.738.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.015.718.195,00 atau 86,21%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp19.119.314.367,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.103.596.172,00 atau 11% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	19.738.400.000,00	17.015.718.195,00	86,21	19.119.314.367,00	(2.103.596.172,00)
	Jumlah	**19.738.400.000,00**	**17.015.718.195,00**	**86,21**	**19.119.314.367,00**	**(2.103.596.172,00)**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan **tidak mencapai target** dikarenakan:

- berkurangnya tingkat kunjungan pasien selama pandemi *covid*-19, kecuali dalam keadaan darurat; dan
- adanya peraturan BPJS yang mengatur sistem rujukan berjenjang secara online mengakibatkan penurunan jumlah pasien pada balai kesehatan provinsi.

5.1.1.1.2.1.2 Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp63.400.000,00

Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditargetkan sebesar Rp52.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp63.400.000,00 atau 120,99%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp296.950.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp233.550.000,00 atau 78,65% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	2.500.000,00	3.300.000,00	132,00	4.750.000,00	(1.450.000,00)
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	49.900.000,00	60.100.000,00	120,44	292.200.000,00	(232.100.000,00)
	Jumlah	**52.400.000,00**	**63.400.000,00**	**120,99**	**296.950.000,00**	**(233.550.000,00)**

5.1.1.1.2.1.3 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp533.500.000,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan ditargetkan sebesar 296.385.000,00 dengan realisasi sebesar Rp533.500.000,00 atau 180,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.332.470.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.798.970.000,00 atau 90% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	296.385.000,00	533.500.000,00	180,00	299.100.000,00	234.400.000,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		-	-	14.500.000,00	(14.500.000,00)
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		-	-	4.608.070.000,00	(4.608.070.000,00)
4	Badan Kepegawaian Daerah		-	-	410.800.000,00	(410.800.000,00)
	Jumlah	**296.385.000,00**	**533.500.000,00**	**180,00**	**5.332.470.000,00**	**(4.798.970.000,00)**

5.1.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha — Rp67.852.456.270,00

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp65.355.064.000,00 dengan realisasi sebesar Rp67.852.456.270,00 atau 103,82%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp66.292.537.932,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.549.918.338,00 atau 2,34% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	33.642.683.000,00	38.307.608.734,00	113,87	36.956.100.234,00	1.341.508.500,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	415.000.000,00	458.284.775,00	110,43	479.788.100,00	(21.503.325,00)
3	Retribusi Terminal	1.633.356.000,00	1.296.264.750,00	79,36	731.126.000,00	565.138.750,00
4	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila"	5.905.650.000,00	694.235.000,00	11,76	1.679.542.500,00	(985.307.500,00)
5	Retribusi Kepelabuhan	3.695.000.000,00	5.532.632.500,00	149,73	5.827.626.900,00	(294.994.400,00)
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	483.005.000,00	269.133.000,00	55,72	-	269.133.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	19.580.370.000,00	21.294.297.511,00	108,75	20.618.354.198,00	675.943.313,00
	Jumlah	**65.355.064.000,00**	**67.852.456.270,00**	**103,82**	**66.292.537.932,00**	**1.549.918.338,00**

5.1.1.1.2.2.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah — Rp38.307.608.734,00

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp33.642.683.000,00 dengan realisasi sebesar Rp38.307.608.734,00 atau 113,87%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp36.956.100.234,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.341.508.500,00 atau 3,63% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	266.250.000,00	384.100.000,00	144,26	1.693.859.500,00	(1.309.759.500,00)
2	Dinas Kesehatan	261.600.000,00	227.436.500,00	86,94	201.581.000,00	25.855.500,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	6.000.000.000,00	7.052.041.238,00	117,53	5.383.581.330,00	1.668.459.908,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	3.202.890.000,00	3.687.879.541,00	115,14	3.147.018.360,00	540.861.181,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	412.727.000,00	412.747.200,00	100,00	465.853.554,00	(53.106.354,00)
6	Dinas Sosial	79.097.000,00	96.005.900,00	121,38	90.260.000,00	5.745.900,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.100.965.000,00	2.239.177.500,00	106,58	2.002.570.000,00	236.607.500,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.821.250.000,00	4.287.836.770,00	112,21	4.048.056.755,00	239.780.015,00
9	Dinas Perhubungan	15.514.000,00	25.035.000,00	161,37	1.465.444.340,00	(1.440.409.340,00)
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	445.285.000,00	457.460.030,00	102,73	504.673.750,00	(47.213.720,00)
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	24.750.000,00	5.250.000,00
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	194.955.000,00	261.172.650,00	133,97	559.553.565,00	(298.380.915,00)
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	40.000.000,00	12.977.500,00	32,44	17.042.600,00	(4.065.100,00)
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.048.550.000,00	4.277.056.448,00	140,30	2.899.228.949,00	1.377.827.499,00
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan	902.653.000,00	1.204.972.877,00	133,49	1.225.068.867,00	(20.095.990,00)
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.133.253.000,00	1.392.727.850,00	122,90	1.188.139.375,00	204.588.475,00
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	448.600.000,00	512.947.000,00	114,34	1.789.019.000,00	(1.276.072.000,00)
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.725.000.000,00	2.977.834.969,00	109,28	2.452.439.539,00	525.395.430,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	26.460.000,00	26.460.000,00	100,00	25.200.000,00	1.260.000,00
20	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.361.074.000,00	4.363.246.121,00	100,05	3.903.556.472,00	459.689.649,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.530.645.000,00	1.903.488.640,00	124,36	1.835.427.278,00	68.061.362,00
22	Badan Kepegawaian Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-	-
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.256.115.000,00	1.351.805.000,00	107,62	902.770.000,00	449.035.000,00
24	Sekretariat Daerah	622.200.000,00	452.600.000,00	72,74	413.906.000,00	38.694.000,00
25	Sekretariat DPRD	552.600.000,00	550.600.000,00	99,64	552.600.000,00	(2.000.000,00)
26	Badan Penghubung	155.000.000,00	110.000.000,00	70,97	164.500.000,00	(54.500.000,00)
	Jumlah	**33.642.683.000,00**	**38.307.608.734,00**	**113,87**	**36.956.100.234,00**	**1.341.508.500,00**

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah **tidak mencapai target** antara lain :

- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dikarenakan selama pandemi *covid*-19 kantin tutup dan pelayanan perpustakaan daerah tidak melayani pengunjung sehingga lahan parkir tidak digunakan.
- Badan Penghubung dikarenakan adanya kebijakan PPKM sehingga membatasi mobilitas masyarakat serta tidak beroperasinya tempat wisata TMII.

5.1.1.1.2.2.2 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan Rp458.284.775,00

Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan ditargetkan sebesar Rp415.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp458.284.775,00 atau 110,43%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp479.788.100,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.503.325,00 atau 4,48% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	415.000.000,00	458.284.775,00	110,43	-	458.284.775,00
2	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	479.788.100,00	(479.788.100,00)
	Jumlah	**415.000.000,00**	**458.284.775,00**	**110,43**	**479.788.100,00**	**(21.503.325,00)**

5.1.1.1.2.2.3 Pendapatan Retribusi Terminal — Rp1.296.264.750,00

Pendapatan Retribusi Terminal ditargetkan sebesar Rp1.633.356.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.296.264.750,00 atau 79,36%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp731.126.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp565.138.750,00 atau 77,30% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Perhubungan	1.633.356.000,00	1.296.264.750,00	79,36	731.126.000,00	565.138.750,00
	Jumlah	**1.633.356.000,00**	**1.296.264.750,00**	**79,36**	**731.126.000,00**	**565.138.750,00**

Pendapatan Retribusi Terminal **tidak mencapai target** dikarenakan selama pandemi *covid*-19 banyak kios terminal tutup.

5.1.1.1.2.2.4 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa — Rp694.235.000,00

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditargetkan sebesar Rp5.905.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp694.235.000,00 atau 11,76%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.679.542.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp985.307.500,00 atau 58,67% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Sosial	13.000.000,00	13.335.000,00	102,58	13.000.000,00	335.000,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	128.000.000,00	139.450.000,00	108,95	146.200.000,00	(6.750.000,00)
3	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	2.880.000,00	(2.880.000,00)
4	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	50.125.000,00	107.775.000,00	215,01	413.387.500,00	(305.612.500,00)
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	13.350.000,00	15.400.000,00	115,36	14.200.000,00	1.200.000,00
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.016.375.000,00	-	-	680.110.000,00	(680.110.000,00)
7	Sekretariat Daerah	190.400.000,00	33.000.000,00	17,33	26.200.000,00	6.800.000,00
8	Sekretariat DPRD	149.400.000,00	158.680.000,00	106,21	131.150.000,00	27.530.000,00
9	Badan Penghubung	345.000.000,00	226.595.000,00	65,68	252.415.000,00	(25.820.000,00)
	Jumlah	**5.905.650.000,00**	**694.235.000,00**	**11,76**	**1.679.542.500,00**	**(985.307.500,00)**

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa **tidak mencapai target** antara lain :

- Sekretariat Daerah dan Badan Penghubung dikarenakan selama masa pandemi *covid*-19 adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi wisatawan yang menginap dan kunjungan ke objek wisata.

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dikarenakan adanya kebijakan perpanjangan penundaan pelaksanaan haji Tahun 2021 oleh Pemerintah dan alih fungsi Asrama Haji Donohudan untuk rumah sakit darurat *covid*-19.

5.1.1.1.2.2.5 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Rp5.532.632.500,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ditargetkan sebesar Rp3.695.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.532.632.500,00 atau 149,73%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.827.626.900,00 mengalami penurunan sebesar Rp294.994.400,00 atau 5,06% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.695.000.000,00	5.532.632.500,00	149,73	5.827.626.900,00	(294.994.400,00)
	Jumlah	**3.695.000.000,00**	**5.532.632.500,00**	**149,73**	**5.827.626.900,00**	**(294.994.400,00)**

5.1.1.1.2.2.6 Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp269.133.000,00

Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditargetkan sebesar Rp483.005.000,00 dengan realisasi sebesar Rp269.133.000,00 atau 55,72%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami kenaikan sebesar Rp269.133.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	477.200.000,00	256.788.000,00	53,81	-	256.788.000,00
2	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.805.000,00	12.345.000,00	212,66	-	12.345.000,00
	Jumlah	**483.005.000,00**	**269.133.000,00**	**55,72**	-	**269.133.000,00**

Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga **tidak mencapai target** pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikarenakan selama masa pandemi *covid*-19 adanya kebijakan pemerintah kabupaten untuk penerapan PPKM dan membatasi pengunjung ke objek wisata Kebun Raya Baturaden dan Taman Hutan Rakyat (Tahura).

5.1.1.1.2.2.7 Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp21.294.297.511,00

Pendapatan Retribusi Produksi Usaha Daerah ditargetkan sebesar Rp19.580.370.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.294.297.511,00 atau 108,75%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp20.618.354.198,00 mengalami kenaikan sebesar Rp675.943.313,00 atau 3,28% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.640.000.000,00	1.688.769.844,00	102,97	1.286.995.290,00	401.774.554,00
2	Dinas Pertanian dan Perkebunan	10.395.997.000,00	11.039.412.404,00	106,19	12.088.607.108,00	(1.049.194.704,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.039.312.000,00	7.061.053.263,00	116,92	7.242.751.800,00	(181.698.537,00)
4	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.505.061.000,00	1.505.062.000,00	100,00	-	1.505.062.000,00
	Jumlah	**19.580.370.000,00**	**21.294.297.511,00**	**108,75**	**20.618.354.198,00**	**675.943.313,00**

5.1.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu — Rp6.169.194.740,00

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp4.663.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.169.194.740,00 atau 132,28%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7.256.719.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.087.524.660,00 atau 14,99% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	659.750.000,00	673.827.500,00	102,13	-	673.827.500,00
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	2.300.000.000,00	2.816.377.700,00	122,45	4.467.909.900,00	(1.651.532.200,00)
3	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	-	-	-	900.425.000,00	(900.425.000,00)
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.704.000.000,00	2.678.989.540,00	157,22	1.888.384.500,00	790.605.040,00
	Jumlah	**4.663.750.000,00**	**6.169.194.740,00**	**132,28**	**7.256.719.400,00**	**(1.087.524.660,00)**

5.1.1.1.2.3.1 Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum — Rp673.827.500,00

Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum ditargetkan sebesar Rp659.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp673.827.500,00 atau 102,13%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp900.425.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp226.597.500,00 atau 25,17% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Perhubungan	659.750.000,00	673.827.500,00	102,13	900.425.000,00	(226.597.500,00)
	Jumlah	**659.750.000,00**	**673.827.500,00**	**102,13**	**900.425.000,00**	**(226.597.500,00)**

5.1.1.1.2.3.2 Pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan — Rp2.816.377.700,00

Pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan ditargetkan sebesar Rp2.300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.816.377.700,00 atau 122,45%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.467.909.900,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.651.532.200,00 atau 36,96% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.300.000.000,00	2.816.377.700,00	122,45	4.467.909.900,00	(1.651.532.200,00)
	Jumlah	**2.300.000.000,00**	**2.816.377.700,00**	**122,45**	**4.467.909.900,00**	**(1.651.532.200,00)**

5.1.1.1.2.3.3 Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp2.678.989.540,00

Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ditargetkan sebesar Rp1.704.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.678.989.540,00 atau 157,22%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.888.384.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp790.605.040,00 atau 41,87% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.704.000.000,00	2.678.989.540,00	157,22	1.888.384.500,00	790.605.040,00
	Jumlah	**1.704.000.000,00**	**2.678.989.540,00**	**157,22**	**1.888.384.500,00**	**790.605.040,00**

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp508.263.876.971,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp521.612.161.000,00 dengan realisasi sebesar Rp508.263.876.971,00 atau 97,44%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp530.091.029.137,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.827.152.166,00 atau 4,12% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	6.314.250.000,00	6.314.626.659,00	100,01	3.003.617.427,00	3.311.009.232,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	515.297.911.000,00	501.949.250.312,00	97,41	527.087.411.710,00	(25.138.161.398,00)
	Jumlah	**521.612.161.000,00**	**508.263.876.971,00**	**97,44**	**530.091.029.137,00**	**(21.827.152.166,00)**

5.1.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Rp6.314.626.659,00

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN ditargetkan sebesar Rp6.314.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.314.626.659,00 atau 100,01%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.003.617.427,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.311.009.232,00 atau 110,23% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Deviden PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	3.325.000.000,00	3.325.376.041,00	100,01	-	3.325.376.041,00
2	Deviden PT. Asuransi Bangun Askrida	2.989.250.000,00	2.989.250.618,00	100,00	3.003.617.427,00	(14.366.809,00)
	Jumlah	**6.314.250.000,00**	**6.314.626.659,00**	**100,01**	**3.003.617.427,00**	**3.311.009.232,00**

5.1.1.1.3.2 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD — Rp501.949.250.312,00

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD ditargetkan sebesar Rp515.297.911.000,00 dengan realisasi sebesar Rp501.949.250.312,00 atau 97,41%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp527.087.411.710,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.138.161.398,00 atau 4,77% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah	316.959.000,00	316.959.000,00	100,00	6.300.000.000,00	(5.983.041.000,00)
2	Bagian Laba PT. Bank Jateng	375.956.828.000,00	375.956.828.408,00	100,00	375.777.399.480,00	179.428.928,00
3	Bagian Laba BPR-BKK	63.975.590.000,00	63.975.590.182,00	100,00	70.890.351.223,00	(6.914.761.041,00)
4	Bagian Laba PDAB Slawi (Tirta Utama)	6.812.844.000,00	6.812.844.537,00	100,00	5.450.000.000,00	1.362.844.537,00
5	Deviden PT. PRPP	-	-	-	380.000.000,00	(380.000.000,00)
6	Deviden PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	29.000.000.000,00	15.651.337.104,00	53,97	30.069.580.225,00	(14.418.243.121,00)
7	Deviden PT. Sarana Patra Hulu Cepu	32.002.416.000,00	32.002.416.626,00	100,00	31.658.604.782,00	343.811.844,00
8	Deviden PT. Jamkrida	7.233.274.000,00	7.233.274.455,00	100,00	6.561.476.000,00	671.798.455,00
	Jumlah	**515.297.911.000,00**	**501.949.250.312,00**	**97,41**	**527.087.411.710,00**	**(25.138.161.398,00)**

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD **tidak mencapai target** dikarenakan adanya koreksi perhitungan piutang tahun sebelumnya pada Laporan Keuangan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah sehingga mempengaruhi penerimaan deviden yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah — Rp2.377.198.431.481,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp1.749.827.028.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.377.198.431.481,00 atau 135,85%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.900.719.948.239,00 mengalami kenaikan sebesar Rp476.478.483.242,00 atau 25,07% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	21.263.038.000,00	22.089.947.250,00	103,89	1.005.694.120,00	21.084.253.130,00
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-
5	Jasa Giro	40.000.000.000,00	33.421.665.370,00	83,55	43.049.831.808,00	(9.628.166.438,00)
6	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-
7	Pendapatan Bunga	125.000.000.000,00	52.487.671.175,00	41,99	76.236.609.714,00	(23.748.938.539,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
8	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	8.612.000,00	-	221.582.000,00	(212.970.000,00)
9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	33.486.690.000,00	34.263.799.325,00	102,32	-	34.263.799.325,00
10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	-
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	2.779.750.191,00	-	1.453.371.334,00	1.326.378.857,00
12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	106.786.000.000,00	115.195.838.121,00	107,88	58.794.221.327,00	56.401.616.794,00
13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	181.042.060,00	-	257.926.732,00	(76.884.672,00)
14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan			-	-	
15	Pendapatan dari Pengembalian	-	1.809.013.300,00	-	7.070.704.654,00	(5.261.691.354,00)
16	Pendapatan BLUD	1.423.291.300.000,00	2.106.839.090.275,00	148,03	1.696.912.608.091,00	409.926.482.184,00
17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-
18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	-	-
19	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	-	-	-	-
20	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	-	-
21	Pendapatan Zakat	-	-	-	-	-
22	Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa	-	1.739.312.072,00	-	-	1.739.312.072,00
23	Pendapatan Lain-Lain SKPKD	-	6.382.690.342,00	-	15.717.398.459,00	(9.334.708.117,00)
	Jumlah	**1.749.827.028.000,00**	**2.377.198.431.481,00**	**135,85**	**1.900.719.948.239,00**	**476.478.483.242,00**

Dampak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka penyajian akun Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2020 audited semula sebesar Rp1.905.738.818.239,00 menjadi sebesar Rp1.900.719.948.239,00 turun sebesar Rp5.018.870.000,00. penurunan terdapat pada akun Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp5.018.870.000,00 menjadi Rp0,00 dikarenakan Tahun Anggaran 2021 termasuk bagian dari Pendapatan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan — Rp22.089.947.250,00

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp21.263.038.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.089.947.250,00 atau 103,89%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.005.694.120,00 mengalami kenaikan sebesar Rp21.084.253.130,00 atau 2.096,49% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	-	324.962.000,00	-	381.206.600,00	(56.244.600,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	20.676.888.000,00	20.826.561.000,00	100,72	-	20.826.561.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.650.000,00	23.750.000,00	115,01	10.010.000,00	13.740.000,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	565.500.000,00	914.674.250,00	161,75	614.477.520,00	300.196.730,00
	Jumlah	**21.263.038.000,00**	**22.089.947.250,00**	**103,89**	**1.005.694.120,00**	**21.084.253.130,00**

5.1.1.1.4.2 Jasa Giro — Rp33.421.665.370,00

Jasa Giro ditargetkan sebesar Rp40.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp33.421.665.370,00 atau 83,55%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp43.049.831.808,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.628.166.438,00 atau 22,37% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	40.000.000.000,00	33.421.665.370,00	83,55	43.049.831.808,00	(9.628.166.438,00)
	Jumlah	**40.000.000.000,00**	**33.421.665.370,00**	**83,55**	**43.049.831.808,00**	**(9.628.166.438,00)**

5.1.1.1.4.3 Pendapatan Bunga — Rp52.487.671.175,00

Pendapatan Bunga ditargetkan sebesar Rp125.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp52.487.671.175,00 atau 41,99%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp76.236.609.714,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.748.938.539,00 atau 31,15% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	125.000.000.000,00	52.487.671.175,00	41,99	76.236.609.714,00	(23.748.938.539,00)
	Jumlah	**125.000.000.000,00**	**52.487.671.175,00**	**41,99**	**76.236.609.714,00**	**(23.748.938.539,00)**

5.1.1.1.4.4 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah — Rp8.612.000,00

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp8.612.000,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp221.582.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp212.970.000,00 atau 96,11% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	SKPKD	-	8.612.000,00	-	-	8.612.000,00
2	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan	-	-	-	221.582.000,00	(221.582.000,00)
	Jumlah	**-**	**8.612.000,00**	**-**	**221.582.000,00**	**(212.970.000,00)**

5.1.1.1.4.5 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp34.263.799.325,00

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain ditargetkan sebesar Rp33.486.690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.263.799.325,00 atau 102,32%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp34.263.799.325,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Perhubungan	11.522.544.000,00	12.549.852.000,00	108,92	-	12.549.852.000,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.225.000.000,00	1.224.768.425,00	99,98	-	1.224.768.425,00
3	Badan Kepegawaian Daerah	682.000.000,00	643.900.000,00	94,41	-	643.900.000,00
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.057.146.000,00	19.845.278.900,00	98,94	-	19.845.278.900,00
	Jumlah	**33.486.690.000,00**	**34.263.799.325,00**	**102,32**	**-**	**34.263.799.325,00**

5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp2.779.750.191,00

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp2.779.750.191,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.453.371.334,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.326.378.857,00 atau 91,26% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	SKPKD	-	2.779.750.191,00	-	1.453.371.334,00	1.326.378.857,00
	Jumlah	**-**	**2.779.750.191,00**	**-**	**1.453.371.334,00**	**1.326.378.857,00**

5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda Pajak Rp115.195.838.121,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp106.786.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp115.195.838.121,00 atau 107,88%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp58.794.221.327,00 mengalami kenaikan sebesar Rp56.401.616.794,00 atau 95,93% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	106.786.000.000,00	115.195.838.121,00	107,88	58.794.221.327,00	56.401.616.794,00
	Jumlah	**106.786.000.000,00**	**115.195.838.121,00**	**107,88**	**58.794.221.327,00**	**56.401.616.794,00**

5.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda Retribusi — Rp181.042.060,00

Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp181.042.060,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp257.926.732,00 mengalami penurunan sebesar Rp76.884.672,00 atau 29,81% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	100.756.131,00	(100.756.131,00)
2	Satuan Polisi Pamong Praja	-	90.618,00	-	859.069,00	(768.451,00)
3	Dinas Perhubungan	-	62.112.570,00	-	42.448.140,00	19.664.430,00
4	Dinas Kelautan dan perikanan	-	117.265.756,00	-	110.088.342,00	7.177.414,00
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	1.573.116,00	-	3.775.050,00	(2.201.934,00)
	Jumlah	**-**	**181.042.060,00**	**-**	**257.926.732,00**	**(76.884.672,00)**

5.1.1.1.4.9 Pendapatan dari Pengembalian — Rp1.809.013.300,00

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp1.809.013.300,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7.070.704.654,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.261.691.354,00 atau 74,42% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	SKPKD	-	1.809.013.300,00	-	7.070.704.654,00	(5.261.691.354,00)
	Jumlah	**-**	**1.809.013.300,00**	**-**	**7.070.704.654,00**	**(5.261.691.354,00)**

5.1.1.1.4.10 Pendapatan BLUD — Rp2.106.839.090.275,00

Pendapatan BLUD ditargetkan sebesar Rp1.423.291.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.106.839.090.275,00 atau 148,03%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.696.912.608.091,00 mengalami kenaikan sebesar Rp409.926.482.184,00 atau 24,16% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	710.000.000.000,00	1.096.083.274.297,00	154,38	932.632.010.637,00	163.451.263.660,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	375.000.000.000,00	555.980.036.192,00	148,26	428.494.231.557,00	127.485.804.635,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	167.188.000.000,00	221.383.394.575,00	132,42	170.706.555.450,00	50.676.839.125,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	53.000.000.000,00	51.102.616.824,00	96,42	53.363.009.574,00	(2.260.392.750,00)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	37.000.000.000,00	49.509.558.788,00	133,81	34.802.451.480,00	14.707.107.308,00
6	RSJD Surakarta	41.103.300.000,00	76.247.667.943,00	185,50	34.540.247.747,00	41.707.420.196,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	40.000.000.000,00	56.532.541.656,00	141,33	42.374.101.646,00	14.158.440.010,00
	Jumlah	**1.423.291.300.000,00**	**2.106.839.090.275,00**	**148,03**	**1.696.912.608.091,00**	**409.926.482.184,00**

5.1.1.1.4.11 Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa — Rp1.739.312.072,00

Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp1.739.312.072,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.739.312.072,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	SKPKD	-	1.739.312.072,00	-	-	1.739.312.072,00
	Jumlah	-	**1.739.312.072,00**	-	-	**1.739.312.072,00**

5.1.1.1.4.12 Pendapatan Lain-Lain SKPD — Rp6.382.690.342,00

Pendapatan Lain-Lain SKPD ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp6.382.690.342,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp15.717.398.459,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.334.708.117,00 atau 59,39% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	30.456.464,00	(30.456.464,00)
2	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	-	-	-	162.732.000,00	(162.732.000,00)
3	Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air	-		-	-	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	1.000,00	(1.000,00)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	62.686,00	-	-	62.686,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	17.322.000,00	-	32.328.002,00	(15.006.002,00)
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	393.958.540,00	(393.958.540,00)
8	Dinas Perhubungan	-	5.200.000,00	-	8.724.363.720,00	(8.719.163.720,00)
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	63.450.000,00	(63.450.000,00)
10	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	-	6.759.000,00	-	1.011.000,00	5.748.000,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	785.632.415,00	(785.632.415,00)
12	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	-	53.722.000,00	-	46.732.000,00	6.990.000,00
13	SKPKD	-	6.299.151.156,00	-	5.404.182.073,00	895.031.769,00
14	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	473.500,00	-	2.351.245,00	(1.877.745,00)
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	70.200.000,00	(70.200.000,00)
	Jumlah	-	**6.382.690.342,00**	-	**15.717.398.459,00**	**(9.334.708.117,00)**

5.1.1.2 Pendapatan Transfer — Rp11.871.796.336.054,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp11.713.752.634.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.871.796.336.054,00 atau 101,35% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp11.702.101.655.293,00 mengalami kenaikan sebesar Rp169.694.680.761,00 atau 1,45%

dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemrintah Pusat	11.713.752.634.000,00	11.871.796.336.054,00	101,35	11.700.999.496.293,00	170.796.839.761,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	1.102.159.000,00	(1.102.159.000,00)
	Jumlah	**11.713.752.634.000,00**	**11.871.796.336.054,00**	**101,35**	**11.702.101.655.293,00**	**169.694.680.761,00**

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat — Rp11.871.796.336.054,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp11.713.752.634.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.871.796.336.054,00 atau 101,35%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp11.700.999.496.293,00 mengalami kenaikan sebesar Rp170.796.839.761,00 atau 1,46% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dana Perimbangan	11.645.042.029.000,00	11.803.085.731.054,00	101,36	11.632.787.041.293,00	170.298.689.761,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	68.710.605.000,00	68.710.605.000,00	100,00	68.212.455.000,00	498.150.000,00
	Jumlah	**11.713.752.634.000,00**	**11.871.796.336.054,00**	**101,35**	**11.700.999.496.293,00**	**170.796.839.761,00**

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan — Rp11.803.085.731.054,00

Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp11.645.042.029.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.803.085.731.054,00 atau 101,36%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp11.632.787.041.293,00 mengalami kenaikan sebesar Rp170.298.689.761,00 atau 1,46% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	752.644.255.000,00	1.035.845.630.434,00	137,63	860.280.136.541,00	175.565.493.893,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	3.432.978.859.000,00	3.432.978.859.000,00	100,00	3.438.709.973.000,00	(5.731.114.000,00)
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	463.241.553.000,00	401.885.567.398,00	86,76	350.564.240.958,00	51.321.326.440,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	6.996.177.362.000,00	6.932.375.674.222,00	99,09	6.983.232.690.794,00	(50.857.016.572,00)
	Jumlah	**11.645.042.029.000,00**	**11.803.085.731.054,00**	**101,36**	**11.632.787.041.293,00**	**170.298.689.761,00**

5.1.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) — Rp1.035.845.630.434,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) ditargetkan sebesar Rp752.644.255.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.035.845.630.434,00 atau 137,63%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp860.280.136.541,00 mengalami kenaikan sebesar Rp175.565.493.893,00 atau 20,41% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	49.189.113.000,00	78.170.445.518,00	158,92	50.209.290.661,00	27.961.154.857,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	473.983.925.000,00	690.318.309.644,00	145,64	589.959.276.398,00	100.359.033.246,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	223.038.100.000,00	254.770.117.163,00	114,23	203.223.552.895,00	51.546.564.268,00
4	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	4.271.143.000,00	9.386.722.285,00	219,77	3.171.078.354,00	6.215.643.931,00
5	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	1.196.872.000,00	204.832.300,00	17,11	953.548.771,00	(748.716.471,00)
6	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	-	1.020.387.900,00	-	12.093.116.943,00	(11.072.729.043,00)
7	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	912.016.000,00	1.851.513.250,00	203,01	648.100.727,00	1.203.412.523,00
8	Bagi Hasil Dari Minerba	53.086.000,00	123.302.374,00	232,27	22.171.792,00	101.130.582,00
	Jumlah	**752.644.255.000,00**	**1.035.845.630.434,00**	**137,63**	**860.280.136.541,00**	**175.565.493.893,00**

5.1.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp3.432.978.859.000,00

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp3.432.978.859.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.432.978.859.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.438.709.973.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.731.114.000,00 atau 0,17% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	3.432.978.859.000,00	3.432.978.859.000,00	100,00	3.438.709.973.000,00	(5.731.114.000,00)
	Jumlah	**3.432.978.859.000,00**	**3.432.978.859.000,00**	**100,00**	**3.438.709.973.000,00**	**(5.731.114.000,00)**

5.1.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp401.885.567.398,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ditargetkan sebesar Rp463.241.553.000,00 dengan realisasi sebesar Rp401.885.567.398,00 atau 86,76%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp350.564.240.958,00 mengalami kenaikan sebesar Rp51.321.326.440,00 atau 14,64% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	DAK Bidang Pendidikan	233.200.767.000,00	204.019.889.120,00	87,49	238.525.644.192,00	(34.505.755.072,00)
2	DAK Bidang Kesehatan	114.746.737.000,00	99.424.571.254,00	86,65	53.547.136.929,00	45.877.434.325,00
3	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	45.441.644.000,00	39.801.657.780,00	87,59	47.924.844.000,00	(8.123.186.220,00)
4	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	14.168.369.000,00	9.301.772.343,00	65,65	-	9.301.772.343,00
5	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	17.231.549.000,00	13.409.579.190,00	77,82	2.374.367.000,00	11.035.212.190,00
6	DAK Bidang Pertanian	4.658.099.000,00	4.217.308.288,00	90,54	1.180.833.087,00	3.036.475.201,00
7	DAK Bidang Kehutanan	27.770.086.000,00	26.823.374.450,00	96,59	1.202.707.750,00	25.620.666.700,00
8	DAK Bidang Pariwisata	6.024.302.000,00	4.887.414.973,00	81,13	-	4.887.414.973,00
9	DAK Bidang Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	5.808.708.000,00	(5.808.708.000,00)
	Jumlah	**463.241.553.000,00**	**401.885.567.398,00**	**86,76**	**350.564.240.958,00**	**51.321.326.440,00**

5.1.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik — Rp6.932.375.674.222,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik ditargetkan sebesar Rp6.996.177.362.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.932.375.674.222,00 atau 99,09%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.983.232.690.794,00 mengalami penurunan sebesar Rp50.857.016.572,00 atau 0,73% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.101.018.112.000,00	1.101.018.112.000,00	100,00	1.016.605.974.000,00	84.412.138.000,00
2	Bantuan Operasional Sekolah	5.885.023.060.000,00	5.821.222.770.000,00	98,92	5.918.126.510.000,00	(96.903.740.000,00)
3	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB)	233.096.000,00	233.096.459,00	100,00	42.095.670.378,00	(41.862.573.919,00)
4	Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	3.281.743.000,00	3.281.743.678,00	100,00	2.294.735.812,00	987.007.866,00
5	Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil	2.271.473.000,00	2.271.473.316,00	100,00	363.705.104,00	1.907.768.212,00
6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya	3.487.300.000,00	3.487.300.769,00	100,00	3.746.095.500,00	(258.794.731,00)
7	Dana Penyelenggaraan Kepariwisataan	862.578.000,00	861.178.000,00	99,84	-	861.178.000,00
	Jumlah	**6.996.177.362.000,00**	**6.932.375.674.222,00**	**99,09**	**6.983.232.690.794,00**	**(50.857.016.572,00)**

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID) — Rp68.710.605.000,00

Dana Insentif Daerah (DID) ditargetkan sebesar Rp68.710.605.000,00 dengan realisasi sebesar Rp68.710.605.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp68.212.455.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp498.150.000,00 atau 0,73% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	68.710.605.000,00	68.710.605.000,00	100,00	68.212.455.000,00	498.150.000,00
	Jumlah	**68.710.605.000,00**	**68.710.605.000,00**	**100,00**	**68.212.455.000,00**	**498.150.000,00**

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah — Rp0,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.102.159.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.102.159.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
2	Bantuan Keuangan	-	-	-	1.102.159.000,00	(1.102.159.000,00)
	Jumlah	-	-	-	**1.102.159.000,00**	**(1.102.159.000,00)**

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah — Rp65.728.851.747,00

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah ditargetkan sebesar Rp66.750.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp65.728.851.747,00 atau 98,47%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp23.352.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp42.376.851.747,00 atau 181,47% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Hibah	66.750.000.000,00	64.882.003.502,00	97,20	23.352.000.000,00	41.530.003.502,00
2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	846.848.245,00	-	-	846.848.245,00
	Jumlah	**66.750.000.000,00**	**65.728.851.747,00**	**98,47**	**23.352.000.000,00**	**42.376.851.747,00**

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah — Rp64.882.003.502,00

Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp66.750.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp64.882.003.502,00 atau 97,20%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp23.352.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp41.530.003.502,00 atau 177,84% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	44.000.000.000,00	42.132.003.502,00	95,75	-	42.132.003.502,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-	-
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	22.750.000.000,00	22.750.000.000,00	100,00	-	22.750.000.000,00
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	-	-	23.352.000.000,00	(23.352.000.000,00)
	Jumlah	**66.750.000.000,00**	**64.882.003.502,00**	**97,20**	**23.352.000.000,00**	**41.530.003.502,00**

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan — Rp846.848.245,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp846.848.245,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp846.848.245,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	846.848.245,00	-	-	846.848.245,00
	Jumlah	**-**	**846.848.245,00**	**-**	**-**	**846.848.245,00**

5.1.2 PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp27.444.652.233.000,00 dengan realisasi sebesar Rp25.843.800.193.834,00 atau 94,17%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp25.651.740.349.991,00 mengalami kenaikan sebesar Rp192.059.843.843,00 atau 0,75% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Operasional	17.767.668.233.000,00	16.826.577.831.470,00	94,70	16.223.988.285.131,00	602.589.546.339,00
2	Belanja Modal	1.543.430.155.000,00	1.447.620.411.245,00	93,79	996.994.505.160,00	450.625.906.085,00
3	Belanja Tidak Terduga	92.820.000.000,00	72.303.305.000,00	77,90	1.783.884.978.571,00	(1.711.581.673.571,00)
4	Belanja Transfer	8.040.733.845.000,00	7.497.298.646.119,00	93,24	6.646.872.581.129,00	850.426.064.990,00
	Jumlah	**27.444.652.233.000,00**	**25.843.800.193.834,00**	**94,17**	**25.651.740.349.991,00**	**192.059.843.843,00**

5.1.2.1 Belanja Operasional — Rp16.826.577.831.470,00

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp17.767.668.233.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.826.577.831.470,00 atau 94,70%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp16.223.988.285.131,00 mengalami kenaikan sebesar Rp602.589.546.339,00 atau 3,71% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Pegawai	5.901.460.292.000,00	5.685.925.255.020,00	96,35	6.483.761.623.794,00	(797.836.368.774,00)
2	Belanja Barang dan Jasa	5.941.112.304.000,00	5.345.399.454.776,00	89,97	4.104.637.788.228,00	1.240.761.666.548,00
3	Belanja Bunga	-	-	-!	-	-
4	Belanja Subsidi	4.000.000.000,00	90.482.166,00	2,26	-	90.482.166,00
5	Belanja Hibah	5.845.121.847.000,00	5.728.982.384.318,00	98,01	5.593.181.623.109,00	135.800.761.209,00
6	Belanja Bantuan Sosial	75.973.790.000,00	66.180.255.190,00	87,11	42.407.250.000,00	23.773.005.190,00
	Jumlah	**17.767.668.233.000,00**	**16.826.577.831.470,00**	**94,70**	**16.223.988.285.131,00**	**602.589.546.339,00**

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai — Rp5.685.925.255.020,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp5.901.460.292.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.685.925.255.020,00 atau 96,35%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.483.761.623.794,00 mengalami penurunan sebesar Rp797.836.368.774,00 atau 12,31% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.916.999.990.000,00	2.800.732.640.726,00	96,01	2.853.014.979.157,00	(52.282.338.431,00)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.507.109.562.000,00	1.478.733.117.392,00	98,12	2.510.167.192.539,00	(1.031.434.075.147,00)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.178.773.846.000,00	1.122.788.184.117,00	95,25	812.397.855.398,00	310.390.328.719,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	112.886.193.000,00	112.475.592.654,00	99,64	67.564.954.647,00	44.910.638.007,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	256.329.000,00	241.290.440,00	94,13	206.675.590,00	34.614.850,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	23.793.042.000,00	23.793.042.000,00	100,00	51.502.500.000,00	(27.709.458.000,00)
7	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	52.991.593.553,00	(52.991.593.553,00)
8	Belanja Pegawai BLUD	161.641.330.000,00	147.161.387.691,00	91,04	135.915.872.910,00	11.245.514.781,00
	Jumlah	**5.901.460.292.000,00**	**5.685.925.255.020,00**	**96,35**	**6.483.761.623.794,00**	**(797.836.368.774,00)**

Belanja Pegawai **tidak terealisasi** antara lain dikarenakan adanya kekosongan jabatan struktural dan ASN yang memasuki purna tugas, meninggal dunia serta *accres* gaji.

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN — Rp2.800.732.640.726,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp2.916.999.990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.800.732.640.726,00 atau 96,01%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.853.014.979.157,00 mengalami penurunan sebesar Rp52.282.338.431,00 atau 1,83% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.962.782.338.000,00	1.884.214.635.258,00	96,00	1.953.773.843.818,00	(69.559.208.560,00)
2	Dinas Kesehatan	44.064.766.000,00	43.587.800.574,00	98,92	44.392.248.486,00	(804.447.912,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	91.621.351.000,00	86.883.449.175,00	94,83	85.594.787.905,00	1.288.661.270,00
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	57.519.270.000,00	56.000.903.161,00	97,36	55.622.990.363,00	377.912.798,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	44.144.642.000,00	42.044.917.111,00	95,24	40.999.151.307,00	1.045.765.804,00
6	RSUD Kelet Donorejo	15.489.405.000,00	14.606.571.173,00	94,30	14.245.980.108,00	360.591.065,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	26.277.618.000,00	25.273.660.120,00	96,18	25.005.464.370,00	268.195.750,00
8	RSJD Surakarta	30.059.319.000,00	28.301.829.484,00	94,15	28.998.952.448,00	(697.122.964,00)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	18.376.998.000,00	18.195.186.987,00	99,01	17.650.075.532,00	545.111.455,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	43.136.294.000,00	41.258.508.362,00	95,65	45.878.726.137,00	(4.620.217.775,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	36.181.611.000,00	33.746.803.484,00	93,27	35.163.921.282,00	(1.417.117.798,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.397.916.000,00	5.291.684.096,00	98,03	5.777.505.320,00	(485.821.224,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	5.007.370.000,00	4.920.377.760,00	98,26	5.478.723.969,00	(558.346.209,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.182.307.000,00	3.905.648.268,00	93,39	4.408.013.558,00	(502.365.290,00)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.563.069.000,00	2.477.321.451,00	96,65	2.751.286.313,00	(273.964.862,00)
16	Dinas Sosial	47.245.783.000,00	45.003.482.798,00	95,25	47.520.005.664,00	(2.516.522.866,00)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.342.013.000,00	31.700.917.601,00	92,31	33.332.748.069,00	(1.631.830.468,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.909.254.000,00	3.665.527.516,00	93,77	3.740.592.931,00	(75.065.415,00)
19	Dinas Ketahanan Pangan	6.530.581.000,00	6.084.682.618,00	93,17	6.597.780.135,00	(513.097.517,00)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	59.007.021.000,00	58.307.510.694,00	98,81	61.697.527.765,00	(3.390.017.071,00)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	5.775.708.000,00	5.533.280.297,00	95,80	6.425.835.528,00	(892.555.231,00)
22	Dinas Perhubungan	20.956.729.000,00	20.361.925.859,00	97,16	21.550.809.614,00	(1.188.883.755,00)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.715.479.000,00	7.553.329.231,00	97,90	7.953.149.798,00	(399.820.567,00)
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.163.677.000,00	6.964.193.642,00	97,22	7.282.145.451,00	(317.951.809,00)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.869.452.000,00	4.753.681.697,00	97,62	5.262.117.592,00	(508.435.895,00)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	12.630.411.000,00	12.478.658.116,00	98,80	12.863.521.003,00	(384.862.887,00)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.318.669.000,00	11.971.886.644,00	97,18	12.084.104.480,00	(112.217.836,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.733.718.000,00	16.268.521.515,00	97,22	17.369.045.689,00	(1.100.524.174,00)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	52.090.046.000,00	47.969.601.140,00	92,09	51.870.079.450,00	(3.900.478.310,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	14.438.183.000,00	14.081.620.658,00	97,53	14.186.684.785,00	(105.064.127,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	13.154.050.000,00	12.630.802.888,00	96,02	13.219.079.024,00	(588.276.136,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.215.378.000,00	13.058.868.122,00	91,86	14.354.147.990,00	(1.295.279.868,00)
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.948.198.000,00	10.823.019.013,00	98,86	11.171.323.845,00	(348.304.832,00)
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	42.341.100.000,00	41.126.703.302,00	97,13	44.168.896.902,00	(3.042.193.600,00)
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.183.606.000,00	8.851.536.467,00	86,92	9.231.803.106,00	(380.266.639,00)
36	Badan Kepegawaian Daerah	59.580.017.000,00	58.370.109.953,00	97,97	10.180.649.013,00	48.189.460.940,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	14.189.150.000,00	13.634.382.919,00	96,09	13.655.743.462,00	(21.360.543,00)
38	Inspektorat	9.116.000.000,00	8.884.177.699,00	97,46	9.171.319.766,00	(287.142.067,00)
39	Sekretariat Daerah	38.492.842.000,00	37.925.978.538,00	98,53	39.363.162.927,00	(1.437.184.389,00)
40	Sekretariat DPRD	8.600.430.000,00	8.481.754.895,00	98,62	9.394.777.284,00	(913.022.389,00)
41	Badan Penghubung	3.648.221.000,00	3.537.190.440,00	96,96	3.626.256.968,00	(89.066.528,00)
	Jumlah	**2.916.999.990.000,00**	**2.800.732.640.726,00**	**96,01**	**2.853.014.979.157,00**	**(52.282.338.431,00)**

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN — Rp1.478.733.117.392,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp1.507.109.562.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.478.733.117.392,00 atau 98,12%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar

Rp2.510.167.192.539,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.031.434.075.147,00 atau 41,09% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	634.964.243.000,00	630.488.227.464,00	99,30	1.645.625.993.977,00	(1.015.137.766.513,00)
2	Dinas Kesehatan	42.040.900.000,00	41.919.953.907,00	99,71	42.996.957.459,00	(1.077.003.552,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	82.423.493.000,00	81.890.424.721,00	99,35	75.853.566.790,00	6.036.857.931,00
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	56.656.803.000,00	54.027.825.733,00	95,36	48.856.073.657,00	5.171.752.076,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	42.112.624.000,00	41.347.782.567,00	98,18	37.888.914.141,00	3.458.868.426,00
6	RSUD Kelet Donorejo	17.237.185.000,00	16.580.339.887,00	96,19	14.820.078.776,00	1.760.261.111,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	27.092.506.000,00	26.806.856.669,00	98,95	26.129.912.849,00	676.943.820,00
8	RSJD Surakarta	31.868.590.000,00	30.118.000.201,00	94,51	29.763.193.737,00	354.806.464,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	19.495.003.000,00	19.489.359.528,00	99,97	17.534.805.250,00	1.954.554.278,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	39.033.675.000,00	38.155.967.798,00	97,75	41.856.944.496,00	(3.700.976.698,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	30.744.676.000,00	29.417.297.711,00	95,68	31.042.015.646,00	(1.624.717.935,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.412.145.000,00	5.378.938.097,00	99,39	5.855.393.307,00	(476.455.210,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	4.972.619.000,00	4.836.804.224,00	97,27	5.422.841.894,00	(586.037.670,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.096.047.000,00	4.038.129.959,00	98,59	4.582.299.690,00	(544.169.731,00)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.797.000.000,00	2.686.023.445,00	96,03	2.978.304.687,00	(292.281.242,00)
16	Dinas Sosial	50.773.021.000,00	48.206.698.274,00	94,95	45.839.704.469,00	2.366.993.805,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31.307.500.000,00	30.789.753.598,00	98,35	32.659.505.603,00	(1.869.752.005,00)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.127.359.000,00	4.127.312.413,00	100,00	4.244.850.881,00	(117.538.468,00)
19	Dinas Ketahanan Pangan	6.854.649.000,00	6.295.131.947,00	91,84	6.856.611.829,00	(561.479.882,00)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	53.649.467.000,00	52.961.393.759,00	98,72	57.219.613.358,00	(4.258.219.599,00)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	6.343.750.000,00	5.930.779.076,00	93,49	6.880.798.591,00	(950.019.515,00)
22	Dinas Perhubungan	19.353.111.000,00	19.350.859.590,00	99,99	20.535.892.594,00	(1.185.033.004,00)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.963.893.000,00	7.686.707.033,00	96,52	8.184.457.590,00	(497.750.557,00)
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.040.945.000,00	6.916.788.566,00	98,24	7.405.968.978,00	(489.180.412,00)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.300.000.000,00	5.150.108.983,00	97,17	5.487.529.307,00	(337.420.324,00)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	12.254.277.000,00	12.092.273.459,00	98,68	12.712.423.537,00	(620.150.078,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.420.571.000,00	11.072.896.393,00	96,96	11.369.856.251,00	(296.959.858,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.555.820.000,00	16.652.362.397,00	89,74	17.921.337.173,00	(1.268.974.776,00)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	42.499.664.000,00	39.438.671.552,00	92,80	45.923.476.849,00	(6.484.805.297,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13.197.783.000,00	13.187.035.593,00	99,92	13.759.341.401,00	(572.305.808,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	14.714.272.000,00	14.092.215.100,00	95,77	14.293.779.235,00	(201.564.135,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.200.000.000,00	13.042.881.026,00	98,81	14.373.369.384,00	(1.330.488.358,00)
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.485.431.000,00	10.240.779.454,00	97,67	10.863.197.766,00	(622.418.312,00)
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	42.500.000.000,00	41.050.717.417,00	96,59	44.622.798.071,00	(3.572.080.654,00)
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.950.000.000,00	8.950.000.000,00	100,00	9.536.648.347,00	(586.648.347,00)
36	Badan Kepegawaian Daerah	10.345.452.000,00	10.200.374.357,00	98,60	10.824.764.498,00	(624.390.141,00)
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.210.850.000,00	11.984.159.121,00	98,14	12.602.917.535,00	(618.758.414,00)
38	Inspektorat	8.480.000.000,00	8.391.634.368,00	98,96	8.653.903.152,00	(262.268.784,00)
39	Sekretariat Daerah	41.765.318.000,00	41.181.412.915,00	98,60	43.147.204.212,00	(1.965.791.297,00)
40	Sekretariat DPRD	8.009.515.000,00	8.009.094.170,00	99,99	8.291.720.945,00	(282.626.775,00)
41	Badan Penghubung	4.859.405.000,00	4.549.144.920,00	93,62	4.748.224.627,00	(199.079.707,00)
	Jumlah	**1.507.109.562.000,00**	**1.478.733.117.392,00**	**98,12**	**2.510.167.192.539,00**	**(1.031.434.075.147,00)**

5.1.2.1.1.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN — Rp1.122.788.184.117,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp1.178.773.846.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.122.788.184.117,00 atau 95,25%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp812.397.855.398,00 mengalami kenaikan sebesar Rp310.390.328.719,00 atau 38,21% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.154.859.933.000,00	1.105.307.357.882,00	95,71	544.744.922.550,00	560.562.435.332,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	5.665.525.757,00	(5.665.525.757,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	-	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	732.000.000,00	(732.000.000,00)
6	RSUD Kelet Donorejo	-	-	-	836.200.000,00	(836.200.000,00)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	310.200.000,00	(310.200.000,00)
8	RSJD Surakarta	-	-	-	144.600.000,00	(144.600.000,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	428.400.000,00	(428.400.000,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-	-	4.765.410.000,00	(4.765.410.000,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	27.188.854.000,00	(27.188.854.000,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	3.394.824.604,00	(3.394.824.604,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	2.833.800.000,00	(2.833.800.000,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	6.205.796.400,00	(6.205.796.400,00)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	2.840.845.000,00	(2.840.845.000,00)
16	Dinas Sosial	-	-	-	24.834.042.500,00	(24.834.042.500,00)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	3.883.859.125,00	(3.883.859.125,00)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	4.834.481.884,00	(4.834.481.884,00)
19	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	2.580.825.000,00	(2.580.825.000,00)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	6.749.993.000,00	(6.749.993.000,00)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	2.172.300.000,00	(2.172.300.000,00)
22	Dinas Perhubungan	-	-	-	2.466.100.000,00	(2.466.100.000,00)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	2.470.830.000,00	(2.470.830.000,00)
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	6.249.381.400,00	(6.249.381.400,00)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	2.093.500.000,00	(2.093.500.000,00)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	10.570.001.800,00	(10.570.001.800,00)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	1.185.542.555,00	(1.185.542.555,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	10.640.850.000,00	(10.640.850.000,00)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	19.704.358.592,00	(19.704.358.592,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	7.507.090.000,00	(7.507.090.000,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	2.182.442.700,00	(2.182.442.700,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	9.233.212.000,00	(9.233.212.000,00)
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	5.816.400.000,00	(5.816.400.000,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	23.913.913.000,00	17.480.826.235,00	73,10	54.544.491.905,00	(37.063.665.670,00)
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	12.326.569.372,00	(12.326.569.372,00)
36	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	2.318.371.000,00	(2.318.371.000,00)
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	3.782.595.000,00	(3.782.595.000,00)
38	Inspektorat	-	-	-	2.324.399.254,00	(2.324.399.254,00)
39	Sekretariat Daerah	-	-	-	7.200.500.000,00	(7.200.500.000,00)
40	Sekretariat DPRD	-	-	-	4.066.140.000,00	(4.066.140.000,00)
41	Badan Penghubung	-	-	-	568.200.000,00	(568.200.000,00)
	Jumlah	**1.178.773.846.000,00**	**1.122.788.184.117,00**	**95,25**	**812.397.855.398,00**	**310.390.328.719,00**

5.1.2.1.1.2 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD — Rp112.475.592.654,00

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dianggarkan sebesar Rp112.886.193.000,00 dengan realisasi sebesar Rp112.475.592.654,00 atau 99,64%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp67.564.954.647,00 mengalami kenaikan sebesar Rp44.910.638.007,00 atau 66,47% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Sekretariat DPRD	112.886.193.000,00	112.475.592.654,00	99,64	-	112.475.592.654,00
2	DPRD	-	-	-	67.564.954.647,00	(67.564.954.647,00)
	Jumlah	**112.886.193.000,00**	**112.475.592.654,00**	**99,64**	**67.564.954.647,00**	**44.910.638.007,00**

5.1.2.1.1.3 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH — Rp241.290.440,00

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp256.329.000,00 dengan realisasi sebesar Rp241.290.440,00 atau 94,13%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp206.675.590,00 mengalami kenaikan sebesar Rp34.614.850,00 atau 16,75% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Sekretariat Daerah	256.329.000,00	241.290.440,00	94,13	-	241.290.440,00
2	KDH/WKDH	-	-	-	206.675.590,00	(206.675.590,00)
	Jumlah	**256.329.000,00**	**241.290.440,00**	**94,13**	**206.675.590,00**	**34.614.850,00**

5.1.2.1.1.4 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH — Rp23.793.042.000,00

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp23.793.042.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.793.042.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp51.502.500.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp27.709.458.000,00 atau 53,80% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Sekretariat Daerah	23.116.242.000,00	23.116.242.000,00	100,00	-	23.116.242.000,00
2	Sekretariat DPRD	676.800.000,00	676.800.000,00	100,00	-	676.800.000,00
3	DPRD	-	-	-	30.156.000.000,00	(30.156.000.000,00)
4	KDH/WKDH	-	-	-	21.346.500.000,00	(21.346.500.000,00)
	Jumlah	**23.793.042.000,00**	**23.793.042.000,00**	**100,00**	**51.502.500.000,00**	**(27.709.458.000,00)**

5.1.2.1.1.5 Belanja Pegawai BOS — Rp0,00

Belanja Pegawai BOS terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp52.991.593.553,00 mengalami penurunan sebesar Rp52.991.593.553,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	52.991.593.553,00	(52.991.593.553,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**52.991.593.553,00**	**(52.991.593.553,00)**

5.1.2.1.1.6 Belanja Pegawai BLUD — Rp147.161.387.691,00

Belanja Pegawai BLUD dianggarkan sebesar Rp161.641.330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp147.161.387.691,00 atau 91,04%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp135.915.872.910,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.245.514.781,00 atau 8,27% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	44.136.300.000,00	42.668.783.000,00	96,68	37.305.642.500,00	5.363.140.500,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	47.750.000.000,00	43.101.259.010,00	90,26	40.378.331.664,00	2.722.927.346,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	27.000.000.000,00	26.165.725.000,00	96,91	24.253.557.000,00	1.912.168.000,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	12.500.000.000,00	9.863.592.000,00	78,91	9.866.768.000,00	(3.176.000,00)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	12.420.030.000,00	10.617.395.681,00	85,49	11.169.643.746,00	(552.248.065,00)
6	RSJD Surakarta	9.835.000.000,00	7.239.460.000,00	73,61	5.308.630.000,00	1.930.830.000,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	8.000.000.000,00	7.505.173.000,00	93,81	7.633.300.000,00	(128.127.000,00)
	Jumlah	**161.641.330.000,00**	**147.161.387.691,00**	**91,04**	**135.915.872.910,00**	**11.245.514.781,00**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa — Rp5.345.399.454.776,00

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp5.941.112.304.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.345.399.454.776,00 atau 89,97%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.104.637.788.228,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.240.761.666.548,00 atau 30,23 % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Barang	523.434.632.000,00	445.161.857.098,00	85,05	357.234.071.525,00	87.927.785.573,00
2	Belanja Jasa	1.145.217.146.000,00	1.077.148.718.265,00	94,06	702.118.679.463,00	375.030.038.802,00
3	Belanja Pemeliharaan	230.907.180.000,00	220.320.486.981,00	95,42	170.086.187.777,00	50.234.299.204,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	246.868.234.000,00	214.445.251.953,00	86,87	261.109.220.167,00	(46.663.968.214,00)
5	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	279.144.831.000,00	175.458.434.362,00	62,86	251.531.552.573,00	(76.073.118.211,00)
6	Belanja Barang dan Jasa BOP	1.304.238.308.000,00	1.280.507.243.690,00	98,18	490.700.070.078,00	789.807.173.612,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOS	698.059.703.000,00	678.727.084.263,00	97,23	698.958.957.751,00	(20.231.873.488,00)
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.513.242.270.000,00	1.253.630.378.164,00	82,84	1.172.899.048.894,00	80.731.329.270,00
	Jumlah	**5.941.112.304.000,00**	**5.345.399.454.776,00**	**89,97**	**4.104.637.788.228,00**	**1.240.761.666.548,00**

Belanja Barang dan Jasa **tidak mencapai target** antara lain dikarenakan :

- Realisasi sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi;
- Pengadaan barang/jasa dibawah pagu anggaran dan adanya negosiasi harga;
- Pembatasan perjalanan dinas sebagai langkah tindaklanjut penerapan PPKM;
- Kegiatan-kegiatan rapat di luar daerah bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan selama pandemi *covid*-19 dilaksanakan secara daring dan dibatasi jumlah pesertanya;
- Belanja obat-obatan tidak sepenuhnya terealisasi dikarenakan kebutuhan obat telah tercukupi dari bantuan pemerintah maupun swasta.

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang — Rp445.161.857.098,00

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp523.434.632.000,00 dengan realisasi sebesar Rp445.161.857.098,00 atau 85,05%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp357.234.071.525,00 mengalami kenaikan sebesar Rp87.927.785.573,00 atau 24,61% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.141.749.000,00	20.977.105.018,00	74,54	21.985.456.254,00	(1.008.351.236,00)
2	Dinas Kesehatan	158.746.361.000,00	99.297.672.205,00	62,55	53.616.577.242,00	45.681.094.963,00
3	RSUD Dr. Moewardi	140.000.000,00	139.379.850,00	99,56	-	139.379.850,00
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	890.000.000,00	875.801.619,00	98,40	999.747.598,00	(123.945.979,00)
5	RSUD Tugurejo Semarang	1.813.400.000,00	1.813.224.814,00	99,99	3.019.650.802,00	(1.206.425.988,00)
6	RSUD Kelet Donorejo	13.759.651.000,00	13.644.289.337,00	99,16	7.448.683.562,00	6.195.605.775,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	563.230.000,00	563.132.436,00	99,98	2.999.845.096,00	(2.436.712.660,00)
8	RSJD Surakarta	7.390.000.000,00	6.972.509.970,00	94,35	5.542.410.219,00	1.430.099.751,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	2.150.136.000,00	2.149.925.557,00	99,99	1.727.511.195,00	422.414.362,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	14.667.678.000,00	14.346.782.695,00	97,81	9.134.023.018,00	5.212.759.677,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	9.621.780.000,00	9.379.239.680,00	97,48	8.408.388.702,00	970.850.978,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.764.711.000,00	3.757.845.116,00	99,82	1.517.255.700,00	2.240.589.416,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	980.812.000,00	966.047.545,00	98,49	1.356.932.000,00	(390.884.455,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.710.276.000,00	4.645.978.720,00	98,63	2.109.898.100,00	2.536.080.620,00
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.500.817.000,00	4.230.102.575,00	93,99	4.397.317.574,00	(167.214.999,00)
16	Dinas Sosial	51.100.341.000,00	50.068.585.475,00	97,98	62.884.180.654,00	(12.815.595.179,00)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.647.853.000,00	6.467.857.996,00	97,29	6.171.025.932,00	296.832.064,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	2.144.604.000,00	2.093.821.408,00	97,63	1.607.239.200,00	486.582.208,00
19	Dinas Ketahanan Pangan	3.905.744.000,00	3.838.273.080,00	98,27	5.301.195.962,00	(1.462.922.882,00)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.870.786.000,00	8.608.412.406,00	97,04	6.958.427.646,00	1.649.984.760,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	1.748.621.000,00	1.723.618.090,00	98,57	1.702.830.337,00	20.787.753,00
22	Dinas Perhubungan	10.092.307.000,00	9.193.690.949,00	91,10	7.066.177.865,00	2.127.513.084,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	24.818.822.000,00	22.683.134.827,00	91,39	2.798.735.900,00	19.884.398.927,00
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.215.074.000,00	3.165.224.348,00	98,45	5.789.674.600,00	(2.624.450.252,00)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.225.768.000,00	1.219.539.130,00	99,49	1.220.019.897,00	(480.767,00)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	13.273.950.000,00	12.389.938.333,00	93,34	10.271.601.600,00	2.118.336.733,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.247.355.000,00	1.241.393.675,00	99,52	1.765.361.514,00	(523.967.839,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.047.042.000,00	5.846.523.599,00	96,68	6.691.678.302,00	(845.154.703,00)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	10.681.532.000,00	10.197.407.684,00	95,47	13.143.720.112,00	(2.946.312.428,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13.074.890.000,00	12.582.513.235,00	96,23	12.883.835.703,00	(301.322.468,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.550.389.000,00	2.512.316.447,00	98,51	2.596.905.720,00	(84.589.273,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.379.790.000,00	21.176.235.041,00	99,05	11.919.370.512,00	9.256.864.529,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.680.301.000,00	3.659.715.065,00	99,44	4.713.332.605,00	(1.053.617.540,00)
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	23.331.283.000,00	23.007.723.679,00	98,61	22.449.827.482,00	557.896.197,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.920.562.000,00	4.792.990.962,00	97,41	4.992.029.940,00	(199.038.978,00)
36	Badan Kepegawaian Daerah	2.853.323.000,00	2.734.579.488,00	95,84	4.628.096.538,00	(1.893.517.050,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.480.615.000,00	5.026.556.548,00	77,56	5.114.395.785,00	(87.839.237,00)
38	Inspektorat	976.456.000,00	932.760.905,00	95,53	861.493.230,00	71.267.675,00
39	Sekretariat Daerah	22.010.971.000,00	21.336.002.878,00	96,93	12.622.944.958,00	8.713.057.920,00
40	Sekretariat DPRD	24.280.747.000,00	23.893.818.029,00	98,41	15.497.332.020,00	8.396.486.009,00
41	Badan Penghubung	1.034.905.000,00	1.010.186.684,00	97,61	1.318.940.449,00	(308.753.765,00)
	Jumlah	**523.434.632.000,00**	**445.161.857.098,00**	**85,05**	**357.234.071.525,00**	**87.927.785.573,00**

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa — Rp1.077.148.718.265,00

Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp1.145.217.146.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.077.148.718.265,00 atau 94,06%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp702.118.679.463,00 mengalami kenaikan sebesar Rp375.030.038.802,00 atau 53,41% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.986.153.000,00	46.207.730.483,00	92,44	22.798.376.466,00	23.409.354.017,00
2	Dinas Kesehatan	427.229.878.000,00	410.966.069.027,00	96,19	289.250.476.634,00	121.715.592.393,00
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	#DIV/0!	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	#DIV/0!	-	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	738.000.000,00	683.092.800,00	92,56	280.673.246,00	402.419.554,00
6	RSUD Kelet Donorejo	689.800.000,00	600.045.520,00	86,99	19.046.400,00	580.999.120,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	331.100.000,00	325.743.451,00	98,38	578.020.416,00	(252.276.965,00)
8	RSJD Surakarta	1.125.000.000,00	876.901.449,00	77,95	965.192.251,00	(88.290.802,00)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	485.520.000,00	481.236.000,00	99,12	17.136.000,00	464.100.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	20.340.480.000,00	18.909.569.165,00	92,97	8.099.925.465,00	10.809.643.700,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	39.532.277.000,00	38.749.273.754,00	98,02	6.607.145.477,00	32.142.128.277,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.931.471.000,00	4.863.330.615,00	98,62	2.898.952.060,00	1.964.378.555,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	3.997.538.000,00	3.980.727.585,00	99,58	3.906.865.368,00	73.862.217,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.172.995.000,00	16.286.377.314,00	94,84	3.312.826.472,00	12.973.550.842,00
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.190.150.000,00	4.931.018.779,00	95,01	2.324.460.382,00	2.606.558.397,00
16	Dinas Sosial	21.487.413.000,00	21.141.301.809,00	98,39	8.109.157.054,00	13.032.144.755,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.788.387.000,00	13.128.675.251,00	95,22	8.415.574.464,00	4.713.100.787,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.972.181.000,00	7.791.053.934,00	97,73	3.629.251.757,00	4.161.802.177,00
19	Dinas Ketahanan Pangan	5.512.335.000,00	5.385.890.853,00	97,71	4.699.733.330,00	686.157.523,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.765.167.000,00	13.378.687.096,00	97,19	5.983.629.491,00	7.395.057.605,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	6.234.250.000,00	5.832.932.050,00	93,56	4.034.845.575,00	1.798.086.475,00
22	Dinas Perhubungan	101.017.948.000,00	94.238.981.769,00	93,29	69.947.466.200,00	24.291.515.569,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	38.209.920.000,00	34.893.614.777,00	91,32	29.737.970.234,00	5.155.644.543,00
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	18.585.411.000,00	18.117.295.627,00	97,48	19.706.839.083,00	(1.589.543.456,00)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.831.922.000,00	4.749.906.817,00	98,30	2.376.566.846,00	2.373.339.971,00
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	35.865.038.000,00	31.642.435.694,00	88,23	25.804.503.317,00	5.837.932.377,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.849.753.000,00	4.739.987.101,00	97,74	3.846.680.789,00	893.306.312,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	22.879.905.000,00	21.188.631.222,00	92,61	4.615.747.832,00	16.572.883.390,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	24.483.924.000,00	23.660.955.907,00	96,64	13.529.418.365,00	10.131.537.542,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13.384.522.000,00	12.453.397.197,00	93,04	5.163.848.700,00	7.289.548.497,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.277.417.000,00	10.044.500.560,00	97,73	6.251.210.661,00	3.793.289.899,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.683.490.000,00	18.886.821.806,00	95,95	9.702.257.563,00	9.184.564.243,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.959.410.000,00	8.808.736.407,00	98,32	5.547.987.297,00	3.260.749.110,00
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	88.805.607.000,00	77.184.654.561,00	86,91	44.688.339.510,00	32.496.315.051,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.580.187.000,00	13.169.924.593,00	96,98	4.549.087.377,00	8.620.837.216,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	8.019.056.000,00	7.435.785.293,00	92,73	7.776.672.434,00	(340.887.141,00)
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	20.861.978.000,00	16.681.177.376,00	79,96	7.641.016.852,00	9.040.160.524,00
38	Inspektorat	4.358.413.000,00	3.969.806.331,00	91,08	1.840.132.728,00	2.129.673.603,00
39	Sekretariat Daerah	32.994.232.000,00	31.874.479.437,00	96,61	33.951.574.797,00	(2.077.095.360,00)
40	Sekretariat DPRD	28.316.073.000,00	24.377.835.917,00	86,09	25.776.225.553,00	(1.398.389.636,00)
41	Badan Penghubung	4.742.845.000,00	4.510.132.938,00	95,09	3.733.845.017,00	776.287.921,00
	Jumlah	**1.145.217.146.000,00**	**1.077.148.718.265,00**	**94,06**	**702.118.679.463,00**	**375.030.038.802,00**

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan — Rp220.320.486.981,00

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp230.907.180.000,00 dengan realisasi sebesar Rp220.320.486.981,00 atau 95,42%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp170.086.187.777,00 mengalami kenaikan sebesar Rp50.234.299.204,00 atau 29,53% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36.603.421.000,00	29.973.113.861,00	81,89	14.699.937.289,00	15.273.176.572,00
2	Dinas Kesehatan	8.914.436.000,00	8.382.757.146,00	94,04	4.723.758.066,00	3.658.999.080,00
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	-	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	-	-
6	RSUD Kelet Donorejo	-	-	-	-	-
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	-	-
8	RSJD Surakarta	-	-	-	-	-
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	111.985.419.000,00	110.414.195.066,00	98,60	64.766.333.900,00	45.647.861.166,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	13.834.683.000,00	13.637.871.201,00	98,58	13.850.625.325,00	(212.754.124,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	444.906.000,00	435.491.900,00	97,88	402.656.450,00	32.835.450,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	426.579.000,00	418.483.347,00	98,10	505.734.148,00	(87.250.801,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	439.919.000,00	410.745.927,00	93,37	776.855.399,00	(366.109.472,00)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	386.400.000,00	357.575.536,00	92,54	934.423.164,00	(576.847.628,00)
16	Dinas Sosial	3.268.186.000,00	3.253.071.160,00	99,54	4.992.119.163,00	(1.739.048.003,00)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.810.380.000,00	3.790.968.159,00	99,49	2.079.961.965,00	1.711.006.194,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	231.884.000,00	225.283.800,00	97,15	428.844.138,00	(203.560.338,00)
19	Dinas Ketahanan Pangan	825.297.000,00	2.585.440.904,00	313,27	845.152.457,00	1.740.288.447,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.638.279.000,00	810.389.400,00	30,72	3.198.778.054,00	(2.388.388.654,00)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	634.710.000,00	622.422.812,00	98,06	498.305.941,00	124.116.871,00
22	Dinas Perhubungan	2.933.576.000,00	2.788.348.530,00	95,05	1.550.157.617,00	1.238.190.913,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.268.339.000,00	3.097.798.064,00	94,78	2.068.419.325,00	1.029.378.739,00
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	925.480.000,00	910.722.193,00	98,41	924.317.097,00	(13.594.904,00)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	428.315.000,00	425.135.931,00	99,26	407.636.264,00	17.499.667,00
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.694.880.000,00	1.600.893.312,00	94,45	1.037.813.119,00	563.080.193,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	705.034.000,00	699.176.966,00	99,17	923.235.675,00	(224.058.709,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.778.229.000,00	1.749.520.578,00	98,39	1.231.342.030,00	518.178.548,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.319.410.000,00	2.138.823.862,00	92,21	1.577.287.068,00	561.536.794,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.627.410.000,00	1.615.470.282,00	99,27	642.213.094,00	973.257.188,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.352.228.000,00	1.330.824.329,00	98,42	1.359.294.375,00	(28.470.046,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.275.303.000,00	2.248.309.085,00	98,81	1.325.160.884,00	923.148.201,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	838.452.000,00	828.467.193,00	98,81	1.103.178.021,00	(274.710.828,00)
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	9.130.032.000,00	8.886.712.746,00	97,33	19.582.029.711,00	(10.695.316.965,00)
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	844.573.000,00	833.663.757,00	98,71	2.950.694.841,00	(2.117.031.084,00)
36	Badan Kepegawaian Daerah	1.107.718.000,00	1.026.188.779,00	92,64	1.871.122.405,00	(844.933.626,00)
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.219.127.000,00	2.189.946.386,00	98,69	2.881.669.747,00	(691.723.361,00)
38	Inspektorat	1.014.223.000,00	990.346.684,00	97,65	1.238.294.759,00	(247.948.075,00)
39	Sekretariat Daerah	4.407.556.000,00	4.282.916.091,00	97,17	6.356.814.032,00	(2.073.897.941,00)
40	Sekretariat DPRD	5.880.387.000,00	5.683.518.211,00	96,65	7.014.263.658,00	(1.330.745.447,00)
41	Badan Penghubung	1.712.409.000,00	1.675.893.783,00	97,87	1.337.758.596,00	338.135.187,00
	Jumlah	**230.907.180.000,00**	**220.320.486.981,00**	**95,42**	**170.086.187.777,00**	**50.234.299.204,00**

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas — Rp214.445.251.953,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp246.868.234.000,00 dengan realisasi sebesar Rp214.445.251.953,00 atau 86,87%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp261.109.220.167,00 mengalami penurunan sebesar Rp46.663.968.214,00 atau 17,87% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.135.595.000,00	7.282.685.804,00	89,52	8.800.935.025,00	(1.518.249.221,00)
2	Dinas Kesehatan	14.611.092.000,00	11.075.908.152,00	75,80	5.364.802.842,00	5.711.105.310,00
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	-	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	-	-
6	RSUD Kelet Donorejo	-	-	-	-	-
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	-	-
8	RSJD Surakarta	-	-	-	-	-
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	4.166.327.000,00	3.897.498.222,00	93,55	2.660.809.411,00	1.236.688.811,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	8.210.996.000,00	7.309.871.347,00	89,03	4.634.075.484,00	2.675.795.863,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.052.186.000,00	2.047.258.166,00	99,76	2.221.372.536,00	(174.114.370,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	2.994.573.000,00	2.989.888.251,00	99,84	4.311.013.064,00	(1.321.124.813,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.193.670.000,00	6.012.619.367,00	97,08	3.545.360.168,00	2.467.259.199,00
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.424.541.000,00	2.369.434.078,00	97,73	2.791.838.301,00	(422.404.223,00)
16	Dinas Sosial	2.908.903.000,00	2.854.887.793,00	98,14	3.819.653.831,00	(964.766.038,00)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.570.914.000,00	7.304.152.652,00	96,48	4.567.781.513,00	2.736.371.139,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1.900.948.000,00	1.677.347.467,00	88,24	1.295.414.840,00	381.932.627,00
19	Dinas Ketahanan Pangan	1.997.877.000,00	1.995.039.820,00	99,86	2.332.129.318,00	(337.089.498,00)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.104.714.000,00	5.086.625.645,00	99,65	6.056.979.463,00	(970.353.818,00)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	4.314.964.000,00	4.092.585.380,00	94,85	2.465.009.163,00	1.627.576.217,00
22	Dinas Perhubungan	5.121.165.000,00	4.818.676.525,00	94,09	3.104.113.041,00	1.714.563.484,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.509.967.000,00	6.635.479.171,00	88,36	3.419.332.514,00	3.216.146.657,00
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.231.024.000,00	7.109.133.562,00	98,31	8.152.141.019,00	(1.043.007.457,00)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.171.088.000,00	1.160.367.757,00	99,08	1.182.246.180,00	(21.878.423,00)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	8.145.776.000,00	7.080.395.533,00	86,92	4.494.409.265,00	2.585.986.268,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	767.396.000,00	764.007.850,00	99,56	904.290.060,00	(140.282.210,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.573.726.000,00	4.290.178.875,00	93,80	2.918.703.733,00	1.371.475.142,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	8.986.781.000,00	8.480.435.929,00	94,37	9.942.027.254,00	(1.461.591.325,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.913.403.000,00	3.776.669.951,00	96,51	2.391.672.036,00	1.384.997.915,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5.474.333.000,00	5.283.773.930,00	96,52	4.972.202.342,00	311.571.588,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.283.511.000,00	3.777.939.535,00	88,20	3.322.761.339,00	455.178.196,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.122.760.000,00	3.110.509.962,00	99,61	3.997.103.507,00	(886.593.545,00)
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	12.007.165.000,00	11.841.957.873,00	98,62	9.995.632.062,00	1.846.325.811,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.021.567.000,00	3.907.964.280,00	97,18	3.866.681.253,00	41.283.027,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	3.707.641.000,00	3.646.809.162,00	98,36	4.337.678.760,00	(690.869.598,00)
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.988.541.000,00	1.458.477.712,00	73,34	848.296.322,00	610.181.390,00
38	Inspektorat	6.428.906.000,00	6.370.710.106,00	99,09	4.580.372.919,00	1.790.337.187,00
39	Sekretariat Daerah	16.451.973.000,00	14.176.179.153,00	86,17	11.526.666.711,00	2.649.512.442,00
40	Sekretariat DPRD	67.949.353.000,00	49.422.296.201,00	72,73	121.425.204.971,00	(72.002.908.770,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
41	Badan Penghubung	1.424.858.000,00	1.337.486.742,00	93,87	860.509.920,00	476.976.822,00
	Jumlah	**246.868.234.000,00**	**214.445.251.953,00**	**86,87**	**261.109.220.167,00**	**(46.663.968.214,00)**

5.1.2.1.2.5 Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat — Rp175.458.434.362,00

Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dianggarkan sebesar Rp279.144.831.000,00 dengan realisasi sebesar Rp175.458.434.362,00 atau 62,86%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp251.531.552.573,00 mengalami penurunan sebesar Rp76.073.118.211,00 atau 30,24% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.110.500.000,00	4.463.900.000,00	87,35	127.353.134.534,00	(122.889.234.534,00)
2	Dinas Kesehatan	138.565.000,00	67.995.000,00	49,07	6.927.204.330,00	(6.859.209.330,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	15.158.151.000,00	15.137.752.700,00	99,87	5.975.856.300,00	9.161.896.400,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	161.960.000,00	129.960.000,00	80,24	167.400.000,00	(37.440.000,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	7.482.286.000,00	(7.482.286.000,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	156.500.000,00	153.400.000,00	98,02	120.500.000,00	32.900.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	131.370.000,00	131.370.000,00	100,00	76.300.000,00	55.070.000,00
8	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.000.000,00	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	6.153.685.000,00	6.104.295.000,00	99,20	238.164.600,00	5.866.130.400,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	783.900.000,00	728.700.000,00	92,96	-	728.700.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97.905.000,00	97.905.000,00	100,00	330.365.000,00	(232.460.000,00)
12	Dinas Ketahanan Pangan	9.098.010.000,00	7.576.199.000,00	83,27	2.978.485.900,00	4.597.713.100,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30.223.154.000,00	29.759.396.585,00	98,47	2.822.947.180,00	26.936.449.405,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	172.950.000,00	172.950.000,00	100,00	203.700.000,00	(30.750.000,00)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	153.524.000,00	(153.524.000,00)
16	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	977.500.000,00	99.000.000,00	10,13	20.000.000,00	79.000.000,00
17	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	6.269.560.000,00	5.519.733.000,00	88,04	4.138.611.936,00	1.381.121.064,00
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	56.500.000,00	(56.500.000,00)
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.391.588.000,00	10.146.493.664,00	81,88	8.983.400.976,00	1.163.092.688,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	60.711.000.000,00	54.013.544.100,00	88,97	59.138.579.465,00	(5.125.035.365,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.215.632.000,00	843.032.500,00	69,35	8.086.875.150,00	(7.243.842.650,00)
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.755.001.000,00	1.714.285.713,00	97,68	15.343.618.202,00	(13.629.332.489,00)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	51.102.400.000,00	971.854.100,00	1,90	535.600.000,00	436.254.100,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	643.500.000,00	281.500.000,00	43,75	266.500.000,00	15.000.000,00
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	2.424.000,00	(2.424.000,00)
26	Sekretariat Daerah	76.616.000.000,00	37.277.168.000,00	48,65	111.025.000,00	37.166.143.000,00
27	Sekretariat DPRD	-	-	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)
28	Badan Penghubung	68.000.000,00	68.000.000,00	100,00	8.550.000,00	59.450.000,00
	Jumlah	**279.144.831.000,00**	**175.458.434.362,00**	**62,86**	**251.531.552.573,00**	**(76.073.118.211,00)**

5.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa BOP — Rp1.280.507.243.690,00

Belanja Barang dan Jasa BOP dianggarkan sebesar Rp1.304.238.308.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.280.507.243.690,00 atau 98,18%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp490.700.070.078,00 mengalami kenaikan sebesar Rp789.807.173.612,00 atau 160,96% kenaikan barang dan jasa BOP Tahun Anggaran 2021 dibandingkan Tahun Anggaran 2020 dikarenakan BOP digunakan untuk pembayaran honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satuan Pendidikan Menengah Negeri dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.304.238.308.000,00	1.280.507.243.690,00	98,18	490.700.070.078,00	789.807.173.612,00
	Jumlah	**1.304.238.308.000,00**	**1.280.507.243.690,00**	**98,18**	**490.700.070.078,00**	**789.807.173.612,00**

Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa BOP, adalah sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Barang	319.580.803.306,00
Belanja Jasa	660.307.873.259,00
Beban Pemeliharaan	276.679.770.421,00
Beban Perjalanan Dinas	21.569.333.083,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.369.463.621,00
Total	**1.280.507.243.690,00**

5.1.2.1.2.7 Belanja Barang dan Jasa BOS — Rp678.727.084.263,00

Belanja Barang dan Jasa BOS dianggarkan sebesar Rp698.059.703.000,00 dengan realisasi sebesar Rp678.727.084.263,00 atau 97,23%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp698.958.957.751,00 mengalami penurunan sebesar Rp20.231.873.488,00 atau 2,89% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	698.059.703.000,00	678.727.084.263,00	97,23	698.958.957.751,00	(20.231.873.488,00)
	Jumlah	**698.059.703.000,00**	**678.727.084.263,00**	**97,23**	**698.958.957.751,00**	**(20.231.873.488,00)**

5.1.2.1.2.8 Belanja Barang dan Jasa BLUD — Rp1.253.630.378.164,00

Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp1.513.242.270.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.253.630.378.164,00 atau 82,84%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.172.899.048.894,00 mengalami kenaikan sebesar Rp80.731.329.270,00 atau 6,88% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	822.708.883.000,00	695.157.378.679,00	84,50	619.164.339.553,00	75.993.039.126,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	372.162.211.000,00	304.272.022.828,00	81,76	330.145.170.005,00	(25.873.147.177,00)
3	RSUD Tugurejo Semarang	168.361.050.000,00	136.668.778.090,00	81,18	109.963.210.550,00	26.705.567.540,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	50.525.345.000,00	39.214.567.649,00	77,61	38.637.276.625,00	577.291.024,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	25.373.157.000,00	21.729.820.198,00	85,64	23.310.071.259,00	(1.580.251.061,00)
6	RSJD Surakarta	38.084.806.000,00	26.447.125.317,00	69,44	22.563.586.778,00	3.883.538.539,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	36.026.818.000,00	30.140.685.403,00	83,66	29.115.394.124,00	1.025.291.279,00
	Jumlah	**1.513.242.270.000,00**	**1.253.630.378.164,00**	**82,84**	**1.172.899.048.894,00**	**80.731.329.270,00**

Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD, adalah sebagai berikut :

a. Belanja Barang — Rp562.006.009.214,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	411.377.835.905,00	325.915.020.183,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	186.871.721.000,00	146.682.194.941,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	67.732.945.000,00	55.864.382.577,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	17.374.920.950,00	15.589.977.526,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	4.154.980.000,00	3.463.734.305,00
6	RSJD Surakarta	7.568.000.000,00	4.853.360.725,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	13.771.615.500,00	9.637.338.957,00
	TOTAL	**708.852.018.355,00**	**562.006.009.214,00**

b. Belanja Jasa — Rp620.692.782.549,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	380.470.129.695,00	345.630.978.720,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	148.613.480.000,00	125.886.211.930,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	92.286.460.000,00	73.506.635.681,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	30.563.144.050,00	21.330.900.133,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	19.428.177.000,00	16.730.321.595,00
6	RSJD Surakarta	25.984.506.000,00	18.565.005.485,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	20.422.102.500,00	19.042.729.005,00
	TOTAL	**717.767.999.245,00**	**620.692.782.549,00**

c. Belanja Pemeliharaan **Rp68.076.611.869,00**

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	30.352.542.400,00	23.235.897.946,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	35.077.010.000,00	30.798.198.644,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	8.052.645.000,00	7.012.441.073,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	2.387.030.000,00	2.124.466.390,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	1.790.000.000,00	1.535.764.298,00
6	RSJD Surakarta	4.102.300.000,00	2.603.791.371,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	953.500.000,00	766.052.147,00
	TOTAL	**82.715.027.400,00**	**68.076.611.869,00**

d. Belanja Perjalanan Dinas **Rp2.854.974.532,00**

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	508.375.000,00	375.481.830,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	1.600.000.000,00	905.417.313,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	289.000.000,00	285.318.759,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	200.250.000,00	169.223.600,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-
6	RSJD Surakarta	430.000.000,00	424.967.736,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	879.600.000,00	694.565.294,00
	TOTAL	**3.907.225.000,00**	**2.854.974.532,00**

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi **Rp90.482.166,00**

Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp90.482.166,00 atau 2,26%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp90.482.166,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Subsidi kepada BUMD	4.000.000.000,00	90.482.166,00	2,26	-	90.482.166,00
	Jumlah	**4.000.000.000,00**	**90.482.166,00**	**2,26**	-	**90.482.166,00**

5.1.2.1.3.1 Belanja Subsidi kepada BUMD **Rp90.482.166,00**

Belanja Subsidi kepada BUMD dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp90.482.166,00 atau 2,26%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp90.482.166,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Koperasi dan UKM	4.000.000.000,00	90.482.166,00	2,26	-	90.482.166,00
	Jumlah	**4.000.000.000,00**	**90.482.166,00**	**2,26**	**-**	**90.482.166,00**

5.1.2.1.4 Belanja Hibah Rp5.728.982.384.318,00

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp5.845.121.847.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.728.982.384.318,00 atau 98,01%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.593.181.623.109,00 mengalami kenaikan sebesar Rp135.800.761.209,00 atau 2,43%. Belanja hibah berupa uang tahun sebelumnya dianggarkan pada SKPKD, Tahun Anggaran 2021 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan pada SKPD. Rincian Belanja Hibah sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	290.553.110.000,00	290.115.066.141,00	99,85	292.795.420.000,00	(2.680.353.859,00)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.534.198.847.000,00	5.418.497.433.377,00	97,91	300.572.788.309,00	5.117.924.645.068,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	-	-	-	4.979.443.530.000,00	(4.979.443.530.000,00)
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	20.369.890.000,00	20.369.884.800,00	100,00	20.369.884.800,00	-
	Jumlah	**5.845.121.847.000,00**	**5.728.982.384.318,00**	**98,01**	**5.593.181.623.109,00**	**135.800.761.209,00**

Belanja Hibah **tidak mencapai target** dikarenakan pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi pencairan sampai akhir tahun anggaran.

5.1.2.1.4.1 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Rp290.115.066.141,00

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp290.553.110.000,00 dengan realisasi sebesar Rp290.115.066.141,00 atau 99,85%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp292.795.420.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.680.353.859,00 atau 0,92% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.440.000.000,00	9.436.432.141,00	99,96	-	9.436.432.141,00
2	Sekretariat Daerah	281.113.110.000,00	280.678.634.000,00	99,85	-	280.678.634.000,00
3	SKPKD	-	-	-	292.795.420.000,00	(292.795.420.000,00)
	Jumlah	**290.553.110.000,00**	**290.115.066.141,00**	**99,85**	**292.795.420.000,00**	**(2.680.353.859,00)**

Adapun rincian belanja hibah dari pemerintah pusat adalah sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Komando Daerah Militer (KODAM) IV/Diponegoro	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00	(700.000.000,00)
2	Kepolisian Daerah (Polda) Jateng	3.664.900.000,00	3.664.900.000,00	100,00	2.456.876.000,00	1.208.024.000,00
3	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah	343.600.000,00	340.032.141,00	98,96	364.244.000,00	(24.211.859,00)
4	Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo	437.500.000,00	437.500.000,00	100,00	500.000.000,00	(62.500.000,00)
5	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Semarang	280.000.000,00	280.000.000,00	100,00	280.000.000,00	-
6	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Cilacap	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	200.000.000,00	(50.000.000,00)
7	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Tegal	264.000.000,00	264.000.000,00	100,00	264.000.000,00	-
8	Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Jend. Soedirman	-	-	-	535.000.000,00	(535.000.000,00)
9	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	3.500.000.000,00	(3.500.000.000,00)
10	KANWIL KEMENAG PROV. JATENG	281.113.110.000,00	280.678.634.000,00	99,85	279.695.300.000,00	983.334.000,00
	Jumlah	**290.553.110.000,00**	**290.115.066.141,00**	**99,85**	**292.795.420.000,00**	**(2.680.353.859,00)**

5.1.2.1.4.2 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia — Rp5.418.497.433.377,00

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp5.534.198.847.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.418.497.433.377,00 atau 97,91%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp300.572.788.309,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.117.924.645.068,00 atau 1.702,72%. Kenaikan yang sangat signifikan dikarenakan Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Menengah Tahun 2020 dianggarkan dan direalisasikan di akun belanja hibah dan BOS, sedangkan di Tahun 2021 dianggarkan dan direalisasikan di akun belanja Hibah kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.228.636.330.000,00	5.144.908.503.073,00	98,40	-	5.144.908.503.073,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.670.000.000,00	16.335.000.000,00	97,99	-	16.335.000.000,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.284.390.000,00	6.238.409.731,00	99,27	-	6.238.409.731,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	-	3.500.000.000,00
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	102.805.000.000,00	102.775.000.000,00	99,97	-	102.775.000.000,00
6	Dinas kelautan dan Perikanan	35.878.820.000,00	23.846.242.732,00	66,46	-	23.846.242.732,00
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.318.240.000,00	1.675.000.000,00	72,25	-	1.675.000.000,00
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	24.042.050.000,00	16.940.101.000,00	70,46	-	16.940.101.000,00
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.653.017.000,00	9.360.676.841,00	96,97	-	9.360.676.841,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	870.000.000,00	405.000.000,00	46,55	-	405.000.000,00
11	Sekretariat Daerah	103.541.000.000,00	92.513.500.000,00	89,35	-	92.513.500.000,00
12	SKPKD	-	-	-	300.572.788.309,00	(300.572.788.309,00)
	Jumlah	**5.534.198.847.000,00**	**5.418.497.433.377,00**	**97,91**	**300.572.788.309,00**	**5.117.924.645.068,00**

Adapun rincian belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia adalah sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Hibah Bidang Perekonomian	67.075.260.000,00	47.429.753.463,00	70,71	2.760.000.000,00	44.669.753.463,00
2	Hibah Bidang Pendidikan	5.301.009.330.000,00	5.209.694.003.073,00	98,28	222.182.810.000,00	4.987.511.193.073,00
3	Hibah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Non Profesional	102.805.000.000,00	102.775.000.000,00	99,97	55.139.944.000,00	47.635.056.000,00
4	Hibah Bidang Kesenian dan Kebudayaan	11.675.000.000,00	9.605.000.000,00	82,27	2.500.000.000,00	7.105.000.000,00
5	Hibah Bidang Keagamaan	19.493.000.000,00	18.123.000.000,00	92,97	11.565.034.309,00	6.557.965.691,00
6	Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan	16.670.000.000,00	16.335.000.000,00	97,99	6.350.000.000,00	9.985.000.000,00
7	Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	-	-	-	75.000.000,00	(75.000.000,00)
8	Hibah Bidang Energi	9.653.017.000,00	9.360.676.841,00	96,97	-	9.360.676.841,00
9	Hibah Bidang Pertanian	2.318.240.000,00	1.675.000.000,00	72,25	-	1.675.000.000,00
10	Hibah Bidang Penyiaran	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	-	3.500.000.000,00
	Jumlah	**5.534.198.847.000,00**	**5.418.497.433.377,00**	**97,91**	**300.572.788.309,00**	**5.117.924.645.068,00**

5.1.2.1.4.3 Belanja Hibah Dana BOS — Rp0,00

Belanja Hibah Dana BOS terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.979.443.530.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.979.443.530.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-
2	SKPKD	-	-	-	4.979.443.530.000,00	(4.979.443.530.000,00)
	Jumlah	-	-	-	**4.979.443.530.000,00**	**(4.979.443.530.000,00)**

5.1.2.1.4.4 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp20.369.884.800,00

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp20.369.890.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.369.884.800,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp20.369.884.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.369.890.000,00	20.369.884.800,00	100,00	-	-
2	SKPKD	-	-	-	20.369.884.800,00	-
	Jumlah	**20.369.890.000,00**	**20.369.884.800,00**	**100,00**	**20.369.884.800,00**	**-**

Adapun rincian belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7.131.087.000,00	7.131.086.400,00	100,00	7.131.086.400,00	-
2	Partai Kebangkitan Bangsa	3.244.256.000,00	3.244.255.200,00	100,00	3.244.255.200,00	-
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.947.298.000,00	1.947.297.600,00	100,00	1.947.297.600,00	-
4	Partai Keadilan Sejahtera	1.484.352.000,00	1.484.352.000,00	100,00	1.484.352.000,00	-
5	Partai Golongan Karya	2.046.065.000,00	2.046.064.800,00	100,00	2.046.064.800,00	-
6	Partai Demokrat	1.145.102.000,00	1.145.101.200,00	100,00	1.145.101.200,00	-
7	Partai Amanat Nasional	1.037.600.000,00	1.037.599.200,00	100,00	1.037.599.200,00	-
8	Partai Persatuan Pembangunan	1.329.836.000,00	1.329.835.200,00	100,00	1.329.835.200,00	-
9	Partai Nasional Demokrat	1.004.294.000,00	1.004.293.200,00	100,00	1.004.293.200,00	-
	Jumlah	**20.369.890.000,00**	**20.369.884.800,00**	**100,00**	**20.369.884.800,00**	**-**

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial Rp66.180.255.190,00

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp75.973.790.000,00 dengan realisasi sebesar Rp66.180.255.190,00 atau 87,11%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp42.407.250.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.773.005.190,00 atau 56,06% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	65.973.790.000,00	58.867.565.270,00	89,23	-	58.867.565.270,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	10.000.000.000,00	7.312.689.920,00	73,13	-	7.312.689.920,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	42.407.250.000,00	(42.407.250.000,00)
	Jumlah	**75.973.790.000,00**	**66.180.255.190,00**	**87,11**	**42.407.250.000,00**	**23.773.005.190,00**

Belanja Bantuan Sosial **tidak mencapai target** dikarenakan penerima bantuan sosial yang telah diusulkan setelah diverifikasi lapangan batal menerima bantuan dikarenakan meninggal, pindah domisili dan telah menerima bantuan yang sejenis dari program CSR.

5.1.2.1.5.1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu — Rp58.867.565.270,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dianggarkan sebesar Rp65.973.790.000,00 dengan realisasi sebesar Rp58.867.565.270,00 atau 89,23%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp58.867.565.270,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000.000,00	9.526.000.000,00	95,26	-	9.526.000.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.076.000.000,00	8.956.000.000,00	98,68	-	8.956.000.000,00
3	Dinas Sosial	33.753.750.000,00	29.961.000.000,00	88,76	-	29.961.000.000,00
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	718.330.000,00	577.900.500,00	80,45	-	577.900.500,00
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.425.710.000,00	9.846.664.770,00	79,24	-	9.846.664.770,00
	Jumlah	**65.973.790.000,00**	**58.867.565.270,00**	**89,23**	**-**	**58.867.565.270,00**

5.1.2.1.5.2 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga — Rp7.312.689.920,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.312.689.920,00 atau 73,13%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.312.689.920,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	10.000.000.000,00	7.312.689.920,00	73,13	-	7.312.689.920,00
	Jumlah	**10.000.000.000,00**	**7.312.689.920,00**	**73,13**	**-**	**7.312.689.920,00**

5.1.2.1.5.3 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat — Rp0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp42.407.250.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp42.407.250.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	SKPKD	-	-	-	42.407.250.000,00	(42.407.250.000,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**42.407.250.000,00**	**(42.407.250.000,00)**

5.1.2.2 BELANJA MODAL — Rp1.447.620.411.245,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.543.430.155.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.447.620.411.245,00 atau 93,79%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar

Rp996.994.505.160,00 mengalami kenaikan sebesar Rp450.625.906.085,00 atau 45,20% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	80.927.672.000,00	79.135.275.975,00	97,79	14.338.900.293,00	64.796.375.682,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	609.841.523.000,00	578.353.949.251,00	94,84	494.933.371.196,00	83.420.578.055,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	373.053.994.000,00	330.679.148.402,00	88,64	195.773.603.473,00	134.905.544.929,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	370.616.404.000,00	351.328.654.582,00	94,80	177.713.123.124,00	173.615.531.458,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	108.990.562.000,00	108.123.383.035,00	99,20	113.376.388.074,00	(5.253.005.039,00)
6	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	-	-	-	859.119.000,00	(859.119.000,00)
	Jumlah	**1.543.430.155.000,00**	**1.447.620.411.245,00**	**93,79**	**996.994.505.160,00**	**450.625.906.085,00**

Belanja Modal **tidak mencapai target** antara lain dikarenakan :

- sisa lelang; dan
- pembelian tenda darurat yang digunakan untuk tempat isolasi mandiri tidak sepenuhnya terealisasi dikarenakan penurunan pandemi *covid*-19 semester II Tahun 2021.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah — Rp79.135.275.975,00

Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp80.927.672.000,00 dengan realisasi sebesar Rp79.135.275.975,00 atau 97,79%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp14.338.900.293,00 mengalami kenaikan sebesar Rp64.796.375.682,00 atau 451,89%. Kenaikan yang sangat signifikan antara lain dikarenakan pembebasan tanah untuk jembatan Ganefo Mranggen Kabupaten Demak dan Pembangunan Masjid Agung di Kota Magelang oleh Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	57.142.877.000,00	55.703.798.625,00	97,48	13.927.268.363,00	41.776.530.262,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	306.923.000,00	282.051.400,00	91,90	87.705.000,00	194.346.400,00
3	Dinas Perhubungan	23.477.872.000,00	23.149.425.950,00	98,60	323.926.930,00	22.825.499.020,00
	Jumlah	**80.927.672.000,00**	**79.135.275.975,00**	**97,79**	**14.338.900.293,00**	**64.796.375.682,00**

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin — Rp578.353.949.251,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp609.841.523.000,00 dengan realisasi sebesar Rp578.353.949.251,00 atau 94,84%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp494.933.371.196,00 mengalami kenaikan sebesar Rp83.420.578.055,00 atau 16,85% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	3.472.247.000,00	3.296.197.650,00	249.042.671.559,00	(245.746.473.909,00)
2	Belanja Modal Alat Angkutan	19.505.095.000,00	18.222.725.250,00	26.237.144.490,00	(8.014.419.240,00)
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	170.500.000,00	169.799.600,00	24.518.009.758,00	(24.348.210.158,00)
4	Belanja Modal Alat Pertanian	2.637.910.000,00	2.556.595.764,00	3.335.448.922,00	(778.853.158,00)
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.402.138.000,00	15.352.929.499,00	29.430.612.954,00	(14.077.683.455,00)
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.588.164.000,00	9.075.408.825,00	7.398.865.500,00	1.676.543.325,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	121.548.162.000,00	111.799.761.868,00	110.404.849.738,00	1.394.912.130,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	169.372.366.000,00	153.738.146.388,00	8.031.608.371,00	145.706.538.017,00
9	Belanja Modal Alat Persenjataan	-	-	67.720.000,00	(67.720.000,00)
10	Belanja Modal Komputer	26.665.732.000,00	25.881.479.760,00	35.963.139.904,00	(10.081.660.144,00)
11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	48.750.000,00	48.750.000,00	-	48.750.000,00
12	Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-	-	-
13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.813.614.000,00	1.810.803.000,00	-	1.810.803.000,00
14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-
16	Belanja Modal Alat Peraga	211.220.000,00	211.210.000,00	500.000.000,00	(288.790.000,00)
17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-
18	Belanja Modal Rambu-rambu	4.923.415.000,00	4.761.120.000,00	-	4.761.120.000,00
19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	14.000.000,00	13.750.000,00	3.300.000,00	10.450.000,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	233.468.210.000,00	231.415.271.647,00	-	231.415.271.647,00
	Jumlah	**609.841.523.000,00**	**578.353.949.251,00**	**494.933.371.196,00**	**83.420.578.055,00**

5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Alat Besar — Rp3.296.197.650,00

Belanja Modal Alat Besar dianggarkan sebesar Rp3.472.247.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.296.197.650,00 atau 94,93%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp249.042.671.559,00 mengalami penurunan sebesar Rp245.746.473.909,00 atau 98,68% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	198.502.000,00	197.750.000,00	99,62	248.589.046.439,00	(248.391.296.439,00)
2	Dinas Kesehatan	157.650.000,00	7.650.000,00	4,85	20.700.000,00	(13.050.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	255.420.000,00	251.707.500,00	98,55	-	251.707.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.750.000.000,00	1.749.000.000,00	99,94	-	1.749.000.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.125.000,00	10.125.000,00	100,00	-	10.125.000,00
6	Dinas Sosial	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-	25.000.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	223.550.000,00	223.450.000,00	99,96	-	223.450.000,00
8	Dinas Perhubungan	552.050.000,00	532.516.100,00	96,46	266.513.000,00	266.003.100,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	102.000.000,00	101.890.000,00	99,89	-	101.890.000,00
10	Dinas Pertanian dan Perkebunan	6.750.000,00	6.000.000,00	88,89	-	6.000.000,00
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	7.700.000,00	(7.700.000,00)
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	154.100.000,00	154.020.790,00	99,95	-	154.020.790,00
13	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	125.437.670,00	(125.437.670,00)
14	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	37.100.000,00	37.088.260,00	99,97	33.274.450,00	3.813.810,00
	Jumlah	**3.472.247.000,00**	**3.296.197.650,00**	**94,93**	**249.042.671.559,00**	**(245.746.473.909,00)**

5.1.2.2.2.2 Belanja Modal Alat Angkutan — Rp18.222.725.250,00

Belanja Modal Alat Angkutan dianggarkan sebesar Rp19.505.095.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.222.725.250,00 atau 93,43%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp26.237.144.490,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.014.419.240,00 atau 30,55% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
2	Dinas Kesehatan	17.031.155.000,00	15.754.137.250,00	92,50	1.429.989.000,00	14.324.148.250,00
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	388.960.000,00	(388.960.000,00)
4	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	44.101.750,00	(44.101.750,00)
5	RSUD Kelet Donorejo	-	-	-	8.918.600,00	(8.918.600,00)
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	1.077.596.740,00	(1.077.596.740,00)
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.887.888.000,00	1.887.888.000,00	100,00	163.500.000,00	1.724.388.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	556.052.000,00	551.000.000,00	99,09	-	551.000.000,00
9	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	1.398.650.000,00	(1.398.650.000,00)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	68.740.000,00	(68.740.000,00)
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	368.600.000,00	(368.600.000,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	1.402.250.000,00	(1.402.250.000,00)
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	29.700.000,00	99,00	594.600.000,00	(564.900.000,00)
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	54.000.000,00	(54.000.000,00)
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	3.218.250.000,00	(3.218.250.000,00)
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	1.487.000.000,00	(1.487.000.000,00)
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	507.226.000,00	(507.226.000,00)
19	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	2.056.000.000,00	(2.056.000.000,00)
20	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	4.850.000,00	(4.850.000,00)
21	Inspektorat	-	-	-	1.400.000.000,00	(1.400.000.000,00)
22	Sekretariat Daerah	-	-	-	2.921.912.400,00	(2.921.912.400,00)
23	Sekretariat DPRD	-	-	-	7.592.000.000,00	(7.592.000.000,00)
	Jumlah	**19.505.095.000,00**	**18.222.725.250,00**	**93,43**	**26.237.144.490,00**	**(8.014.419.240,00)**

5.1.2.2.2.3 Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur — Rp169.799.600,00

Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur dianggarkan sebesar Rp170.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp169.799.600,00 atau 99,59%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp24.518.009.758,00 mengalami penurunan sebesar Rp24.348.210.158,00 atau 99,31% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	21.284.978.783,00	(21.284.978.783,00)
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	1.670.027.500,00	(1.670.027.500,00)
3	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	197.946.000,00	(197.946.000,00)
4	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	9.500.000,00	(9.500.000,00)
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	682.566.375,00	(682.566.375,00)
6	Dinas Sosial	-	-	-	7.615.000,00	(7.615.000,00)
7	Dinas Perhubungan	-	-	-	10.600.000,00	(10.600.000,00)
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-	1.200.000,00
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan	100.000.000,00	99.699.600,00	99,70	169.812.500,00	(70.112.900,00)
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	20.586.500,00	(20.586.500,00)
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	364.746.100,00	(364.746.100,00)
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	69.300.000,00	68.900.000,00	99,42	63.644.000,00	5.256.000,00
13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	35.987.000,00	(35.987.000,00)
	Jumlah	**170.500.000,00**	**169.799.600,00**	**99,59**	**24.518.009.758,00**	**(24.348.210.158,00)**

5.1.2.2.2.4 Belanja Modal Alat Pertanian — Rp2.556.595.764,00

Belanja Modal Alat Pertanian dianggarkan sebesar Rp2.637.910.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.556.595.764,00 atau 96,92%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar

Rp3.335.448.922,00 mengalami penurunan sebesar Rp778.853.158,00 atau 23,35% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Kelet Donorejo	-	-	-	715.000,00	(715.000,00)
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	37.000.000,00	(37.000.000,00)
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	65.000.000,00	64.800.000,00	99,69	-	64.800.000,00
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.355.700.000,00	2.275.745.764,00	96,61	1.416.376.292,00	859.369.472,00
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	117.660.000,00	116.500.000,00	99,01	695.383.500,00	(578.883.500,00)
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	99.550.000,00	99.550.000,00	100,00	1.185.974.130,00	(1.086.424.130,00)
	Jumlah	**2.637.910.000,00**	**2.556.595.764,00**	**96,92**	**3.335.448.922,00**	**(778.853.158,00)**

5.1.2.2.5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga — Rp15.352.929.499,00

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp16.402.138.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.352.929.499,00 atau 93,60%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp29.430.612.954,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.077.683.455,00 atau 47,83% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.977.942.000,00	1.864.465.104,00	94,26	1.458.714.800,00	405.750.304,00
2	Dinas Kesehatan	2.841.340.000,00	2.747.978.304,00	96,71	1.310.197.964,00	1.437.780.340,00
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	2.351.356.000,00	(2.351.356.000,00)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	3.571.889.578,00	(3.571.889.578,00)
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	606.426.923,00	(606.426.923,00)
6	RSUD Kelet Donorejo	-	-	-	309.169.020,00	(309.169.020,00)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	1.558.738.050,00	(1.558.738.050,00)
8	RSJD Surakarta	-	-	-	191.179.604,00	(191.179.604,00)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	1.534.105.596,00	(1.534.105.596,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	556.210.000,00	544.270.000,00	97,85	413.367.500,00	130.902.500,00
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	24.100.000,00	24.100.000,00	100,00	144.015.000,00	(119.915.000,00)
12	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	110.660.000,00	(110.660.000,00)
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	184.765.000,00	184.353.940,00	99,78	145.545.000,00	38.808.940,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89.400.000,00	89.400.000,00	100,00	-	89.400.000,00
15	Dinas Sosial	330.000.000,00	327.930.441,00	99,37	674.904.000,00	(346.973.559,00)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	558.822.000,00	549.337.000,00	98,30	428.855.300,00	120.481.700,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	88.440.000,00	82.683.900,00	93,49	3.964.000,00	78.719.900,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	78.434.000,00	74.827.000,00	95,40	111.345.000,00	(36.518.000,00)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	107.553.000,00	107.552.000,00	100,00	571.061.200,00	(463.509.200,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	196.146.000,00	187.364.680,00	95,52	64.800.000,00	122.564.680,00
21	Dinas Perhubungan	678.891.000,00	676.626.750,00	99,67	1.215.839.000,00	(539.212.250,00)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	141.567.000,00	135.070.000,00	95,41	36.560.000,00	98.510.000,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	357.000.000,00	349.360.000,00	97,86	688.934.000,00	(339.574.000,00)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	122.600.000,00	(122.600.000,00)
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	593.307.000,00	(583.307.000,00)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	62.700.000,00	62.700.000,00	100,00	304.616.000,00	(241.916.000,00)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	157.190.000,00	156.328.000,00	99,45	246.052.000,00	(89.724.000,00)
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan	120.335.000,00	120.276.750,00	99,95	1.576.706.540,00	(1.456.429.790,00)
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	618.930.000,00	618.586.000,00	99,94	190.200.000,00	428.386.000,00
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	240.808.000,00	240.703.430,00	99,96	476.320.750,00	(235.617.320,00)
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	105.500.000,00	103.576.000,00	98,18	872.486.000,00	(768.910.000,00)
32	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.422.900.000,00	1.377.612.000,00	96,82	1.146.195.000,00	231.417.000,00
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-	12.000.000,00
34	Badan Kepegawaian Daerah	76.253.000,00	69.655.300,00	91,35	263.264.900,00	(193.609.600,00)
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	45.000.000,00	44.000.000,00	97,78	270.988.649,00	(226.988.649,00)
36	Inspektorat	40.000.000,00	39.800.000,00	99,50	347.125.000,00	(307.325.000,00)
37	Sekretariat Daerah	1.540.607.000,00	1.536.695.000,00	99,75	347.976.000,00	1.188.719.000,00
38	Sekretariat DPRD	3.370.305.000,00	2.698.978.000,00	80,08	4.834.147.580,00	(2.135.169.580,00)
39	Badan Penghubung	369.000.000,00	316.699.900,00	85,83	337.000.000,00	(20.300.100,00)
	Jumlah	**16.402.138.000,00**	**15.352.929.499,00**	**93,60**	**29.430.612.954,00**	**(14.077.683.455,00)**

5.1.2.2.2.6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp9.075.408.825,00

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp9.588.164.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.075.408.825,00 atau 94,65%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7.398.865.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.676.543.325,00 atau 22,66% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	238.320.000,00	238.180.000,00	99,94	248.769.100,00	(10.589.100,00)
2	Dinas Kesehatan	1.300.865.000,00	1.206.780.715,00	92,77	285.371.800,00	921.408.915,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	473.407.050,00	(473.407.050,00)
4	RSUD Kelet Donorejo	-	-	-	3.800.000,00	(3.800.000,00)
5	RSJD Surakarta	-	-	-	19.609.500,00	(19.609.500,00)
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	16.294.000,00	(16.294.000,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	18.225.000,00	18.000.000,00	98,77	-	18.000.000,00
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	140.309.000,00	(115.309.000,00)
9	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	135.200.000,00	(135.200.000,00)
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29.500.000,00	29.500.000,00	100,00	103.500.000,00	(74.000.000,00)
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	169.483.000,00	168.585.000,00	99,47	15.600.000,00	152.985.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.500.000,00	21.319.850,00	99,16	38.631.000,00	(17.311.150,00)
13	Dinas Ketahanan Pangan	54.848.000,00	53.837.580,00	98,16	20.870.000,00	32.967.580,00
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	175.834.200,00	(175.834.200,00)
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	167.794.000,00	159.798.000,00	95,23	59.599.000,00	100.199.000,00
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	26.822.550,00	(26.822.550,00)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.165.017.000,00	4.813.588.950,00	93,20	3.117.984.500,00	1.695.604.450,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	130.500.000,00	129.140.000,00	98,96	92.851.000,00	36.289.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54.100.000,00	54.100.000,00	100,00	-	54.100.000,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	207.978.000,00	(204.178.000,00)
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	109.794.000,00	(109.794.000,00)
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	96.855.000,00	96.855.000,00	100,00	24.000.000,00	72.855.000,00
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	1.042.888.000,00	(1.042.888.000,00)
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	29.865.000,00	(29.865.000,00)
25	Badan Kepegawaian Daerah	15.090.000,00	13.879.000,00	91,97	44.516.000,00	(30.637.000,00)
26	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.097.112.000,00	1.053.415.730,00	96,02	523.169.800,00	530.245.930,00
27	Inspektorat	138.933.000,00	138.925.000,00	99,99	-	138.925.000,00
28	Sekretariat Daerah	674.242.000,00	664.204.000,00	98,51	189.050.000,00	475.154.000,00
29	Sekretariat DPRD	186.980.000,00	186.500.000,00	99,74	253.152.000,00	(66.652.000,00)
	Jumlah	**9.588.164.000,00**	**9.075.408.825,00**	**94,65**	**7.398.865.500,00**	**1.676.543.325,00**

5.1.2.2.2.7 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp111.799.761.868,00

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp121.548.162.000,00 dengan realisasi sebesar Rp111.799.761.868,00 atau 91,98%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp110.404.849.738,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.394.912.130,00 atau 1,26% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	35.538.449.000,00	29.542.771.734,00	83,13	3.541.853.439,00	26.000.918.295,00
2	RSUD Dr. Moewardi	36.759.600.000,00	35.356.518.521,00	96,18	38.387.444.252,00	(3.030.925.731,00)
3	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	9.611.319.000,00	9.209.368.935,00	95,82	28.473.421.797,00	(19.264.052.862,00)
4	RSUD Tugurejo Semarang	24.236.573.000,00	23.357.254.292,00	96,37	24.255.301.376,00	(898.047.084,00)
5	RSUD Kelet Donorejo	5.373.874.000,00	5.236.048.173,00	97,44	4.560.971.657,00	675.076.516,00
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	4.700.000.000,00	4.229.860.000,00	90,00	8.728.861.888,00	(4.499.001.888,00)
7	RSJD Surakarta	-	-	-	1.136.079.719,00	(1.136.079.719,00)
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	5.162.922.000,00	4.703.190.213,00	91,10	1.155.078.610,00	3.548.111.603,00
9	Dinas Sosial	-	-	-	11.800.000,00	(11.800.000,00)
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	4.000.000,00	(4.000.000,00)
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	75.000.000,00	74.800.000,00	99,73	98.175.000,00	(23.375.000,00)
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	51.862.000,00	(51.862.000,00)
13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.800.000,00	4.675.000,00	97,40	-	4.675.000,00
14	Inspektorat	-	-	-	-	-
15	Sekretariat Daerah	85.625.000,00	85.275.000,00	99,59	-	85.275.000,00
	Jumlah	**121.548.162.000,00**	**111.799.761.868,00**	**91,98**	**110.404.849.738,00**	**1.394.912.130,00**

5.1.2.2.8 Belanja Modal Alat Laboratorium — Rp153.738.146.388,00

Belanja Modal Alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp169.372.366.000,00 dengan realisasi sebesar Rp153.738.146.388,00 atau 90,77%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.031.608.371,00 mengalami kenaikan sebesar Rp145.706.538.017,00 atau 1.814,16% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.764.657.000,00	30.509.162.715,00	96,05	-	30.509.162.715,00
2	Dinas Kesehatan	17.413.523.000,00	13.865.370.516,00	79,62	2.422.669.997,00	11.442.700.519,00
3	RSUD Dr. Moewardi	35.710.000.000,00	33.201.533.326,00	92,98	-	33.201.533.326,00
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	64.154.000.000,00	58.364.242.641,00	90,98	375.000.000,00	57.989.242.641,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	4.000.000.000,00	3.362.023.199,00	84,05	-	3.362.023.199,00
6	RSUD Kelet Donorejo	2.000.000.000,00	1.296.928.386,00	64,85	39.875.000,00	1.257.053.386,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	3.000.000.000,00	2.102.060.397,00	70,07	257.174.800,00	1.844.885.597,00
8	RSJD Surakarta	2.845.000.000,00	2.787.032.989,00	97,96	-	2.787.032.989,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	4.000.000.000,00	3.783.538.154,00	94,59	3.750.000,00	3.779.788.154,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.515.250.000,00	1.515.250.000,00	100,00	-	1.515.250.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	250.750.000,00	246.716.000,00	98,39	-	246.716.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	428.235.000,00	426.472.500,00	99,59	429.165.000,00	(2.692.500,00)
13	Dinas Ketahanan Pangan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	196.122.324,00	(181.122.324,00)
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	-	9.500.000,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	39.451.000,00	39.435.000,00	99,96	-	39.435.000,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	325.300.000,00	320.853.500,00	98,63	-	320.853.500,00
17	Dinas Pertanian dan Perkebunan	12.000.000,00	8.338.000,00	69,48	74.250.000,00	(65.912.000,00)
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	210.249.000,00	209.721.500,00	99,75	515.652.500,00	(305.931.000,00)
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.615.701.000,00	1.611.287.190,00	99,73	218.539.500,00	1.392.747.690,00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	63.750.000,00	63.680.375,00	99,89	3.459.809.250,00	(3.396.128.875,00)
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	39.600.000,00	(39.600.000,00)
	Jumlah	**169.372.366.000,00**	**153.738.146.388,00**	**90,77**	**8.031.608.371,00**	**145.706.538.017,00**

5.1.2.2.2.9 Belanja Modal Alat Persenjataan — Rp0,00

Belanja Modal Alat Persenjataan dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp67.720.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp67.720.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	14.000.000,00	(14.000.000,00)
2	Dinas Perhubungan	-	-	-	38.770.000,00	(38.770.000,00)
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	4.950.000,00	(4.950.000,00)
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**67.720.000,00**	**(67.720.000,00)**

5.1.2.2.2.10 Belanja Modal Komputer — Rp25.881.479.760,00

Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp26.665.732.000,00 dengan realisasi sebesar Rp25.881.479.760,00 atau 97,06%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp35.963.139.904,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.081.660.144,00 atau 28,03% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.379.264.000,00	7.280.256.300,00	98,66	2.929.863.300,00	4.350.393.000,00
2	Dinas Kesehatan	2.296.424.000,00	1.958.688.905,00	85,29	1.236.110.840,00	722.578.065,00
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	1.159.008.000,00	(1.159.008.000,00)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	200.000.000,00	188.975.930,00	94,49	2.190.643.700,00	(2.001.667.770,00)
5	RSUD Tugurejo Semarang	350.000.000,00	320.000.000,00	91,43	271.935.000,00	48.065.000,00
6	RSUD Kelet Donorejo	-	-	-	13.078.560,00	(13.078.560,00)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	434.200.000,00	(434.200.000,00)
8	RSJD Surakarta	-	-	-	121.416.764,00	(121.416.764,00)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	115.612.820,00	(115.612.820,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	336.080.000,00	323.420.000,00	96,23	487.030.000,00	(163.610.000,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	105.790.000,00	97.779.000,00	92,43	-	97.779.000,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00	166.738.000,00	(137.738.000,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	308.500.000,00	296.230.100,00	96,02	98.000.000,00	198.230.100,00
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	144.000.000,00	135.685.000,00	94,23	-	135.685.000,00
16	Dinas Sosial	165.000.000,00	163.375.000,00	99,02	130.130.000,00	33.245.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.018.480.000,00	1.015.933.600,00	99,75	106.150.000,00	909.783.600,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	104.027.000,00	102.602.700,00	98,63	-	102.602.700,00
19	Dinas Ketahanan Pangan	218.690.000,00	218.602.500,00	99,96	624.642.700,00	(406.040.200,00)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	42.240.000,00	42.240.000,00	100,00	450.641.700,00	(408.401.700,00)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	58.840.000,00	56.649.000,00	96,28	225.799.000,00	(169.150.000,00)
22	Dinas Perhubungan	-	-	-	71.930.000,00	(71.930.000,00)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.701.589.000,00	8.618.917.301,00	99,05	17.684.767.600,00	(9.065.850.299,00)
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	355.800.000,00	344.905.000,00	96,94	160.470.000,00	184.435.000,00
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.870.000,00	39.550.000,00	99,20	-	39.550.000,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	300.000.000,00	286.579.120,00	95,53	-	286.579.120,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	329.717.000,00	329.557.000,00	99,95	7.000.000,00	322.557.000,00
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan	145.000.000,00	144.525.500,00	99,67	799.838.000,00	(655.312.500,00)
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	229.241.000,00	229.193.000,00	99,98	491.885.000,00	(262.692.000,00)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	37.883.000,00	37.000.000,00	97,67	1.006.471.120,00	(969.471.120,00)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	240.000.000,00	239.695.880,00	99,87	250.842.000,00	(11.146.120,00)
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	393.642.000,00	366.732.924,00	93,16	492.345.800,00	(125.612.876,00)
33	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	379.550.000,00	(379.550.000,00)
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	378.800.000,00	335.045.000,00	88,45	587.705.500,00	(252.660.500,00)
35	Badan Kepegawaian Daerah	636.657.000,00	623.464.400,00	97,93	806.959.280,00	(183.494.880,00)
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	354.500.000,00	314.259.400,00	88,65	82.782.000,00	231.477.400,00
37	Inspektorat	71.775.000,00	71.775.000,00	100,00	150.425.000,00	(78.650.000,00)
38	Sekretariat Daerah	1.076.693.000,00	1.053.940.200,00	97,89	1.804.681.220,00	(750.741.020,00)
39	Sekretariat DPRD	618.230.000,00	616.902.000,00	99,79	424.487.000,00	192.415.000,00
	Jumlah	**26.665.732.000,00**	**25.881.479.760,00**	**97,06**	**35.963.139.904,00**	**(10.081.660.144,00)**

5.1.2.2.2.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi **Rp48.750.000,00**

Belanja Modal Alat Eksplorasi dianggarkan sebesar Rp48.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp48.750.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp48.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	48.750.000,00	48.750.000,00	100,00	-	48.750.000,00
	Jumlah	**48.750.000,00**	**48.750.000,00**	**100,00**	-	**48.750.000,00**

5.1.2.2.2.12 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian **Rp1.810.803.000,00**

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian dianggarkan sebesar Rp1.813.614.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.810.803.000,00 atau 99,85%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.810.803.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.813.614.000,00	1.810.803.000,00	99,85	-	1.810.803.000,00
	Jumlah	**1.813.614.000,00**	**1.810.803.000,00**	**99,85**	-	**1.810.803.000,00**

5.1.2.2.2.13 Belanja Modal Alat Peraga **Rp211.210.000,00**

Belanja Modal Alat Peraga dianggarkan sebesar Rp211.220.000,00 dengan realisasi sebesar Rp211.210.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp500.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp288.790.000,00 atau 57,76% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	500.000.000,00	(500.000.000,00)
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	211.220.000,00	211.210.000,00	100,00	-	211.210.000,00
	Jumlah	**211.220.000,00**	**211.210.000,00**	**100,00**	**500.000.000,00**	**(288.790.000,00)**

5.1.2.2.2.14 Belanja Modal Rambu-Rambu **Rp4.761.120.000,00**

Belanja Modal Rambu-Rambu dianggarkan sebesar Rp4.923.415.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.761.120.000,00 atau 96,70%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.761.120.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Perhubungan	4.923.415.000,00	4.761.120.000,00	96,70	-	4.761.120.000,00
	Jumlah	**4.923.415.000,00**	**4.761.120.000,00**	**96,70**	-	**4.761.120.000,00**

5.1.2.2.2.15 Belanja Modal Alat Olahraga **Rp13.750.000,00**

Belanja Modal Alat Olahraga dianggarkan sebesar Rp14.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.750.000,00 atau 98,21%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.300.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.450.000,00 atau 316,67% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	3.300.000,00	(3.300.000,00)
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-	5.000.000,00
3	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9.000.000,00	8.750.000,00	97,22	-	8.750.000,00
	Jumlah	**14.000.000,00**	**13.750.000,00**	**98,21**	**3.300.000,00**	**10.450.000,00**

5.1.2.2.2.16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS **Rp231.415.271.647,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dianggarkan sebesar Rp233.468.210.000,00 dengan realisasi sebesar Rp231.415.271.647,00 atau 99,12%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp231.415.271.647,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	233.468.210.000,00	231.415.271.647,00	99,12	-	231.415.271.647,00
	Jumlah	**233.468.210.000,00**	**231.415.271.647,00**	**99,12**	**-**	**231.415.271.647,00**

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan **Rp330.679.148.402,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp373.053.994.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.679.148.402,00 atau 88,64%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp195.773.603.473,00 mengalami kenaikan sebesar Rp134.905.544.929,00 atau 68,91% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	372.698.488.000,00	330.327.506.402,00	88,63	195.647.613.473,00	134.679.892.929,00
2	Belanja Modal Monumen	-	-	-	-	-
3	Belanja Modal Bangunan Menara	-	-	-	-	-
4	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	355.506.000,00	351.642.000,00	98,91	125.990.000,00	225.652.000,00
	Jumlah	**373.053.994.000,00**	**330.679.148.402,00**	**88,64**	**195.773.603.473,00**	**134.905.544.929,00**

5.1.2.2.3.1 Belanja Modal Bangunan Gedung **Rp330.327.506.402,00**

Belanja Modal Bangunan Gedung dianggarkan sebesar Rp372.698.488.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.327.506.402,00 atau 88,63%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp195.647.613.473,00 mengalami kenaikan sebesar Rp134.679.892.929,00 atau 68,84% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	46.650.856.000,00	37.609.390.443,00	80,62	57.881.343.156,00	(20.271.952.713,00)
2	Dinas Kesehatan	1.994.000.000,00	1.864.298.882,00	93,50	2.176.521.212,00	(312.222.330,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	55.494.270.000,00	35.515.311.338,00	64,00	70.765.420.754,00	(35.250.109.416,00)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	5.078.000.000,00	3.437.299.922,00	67,69	34.316.996.000,00	(30.879.696.078,00)
5	RSUD Tugurejo Semarang	16.200.000.000,00	15.838.165.800,00	97,77	389.605.000,00	15.448.560.800,00
6	RSUD Kelet Donorejo	1.000.000.000,00	76.816.000,00	7,68	775.430.000,00	(698.614.000,00)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	5.000.000.000,00	3.939.693.980,00	78,79	494.784.000,00	3.444.909.980,00
8	RSJD Surakarta	4.820.000.000,00	3.952.333.000,00	82,00	-	3.952.333.000,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	1.000.000.000,00	970.480.000,00	97,05	1.341.604.500,00	(497.114.500,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	116.177.161.000,00	115.013.974.017,00	99,00	8.491.434.487,00	106.522.539.530,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	184.049.000,00	(184.049.000,00)
12	Dinas Sosial	185.000.000,00	184.353.000,00	99,65	-	184.353.000,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	150.000.000,00	148.800.000,00	99,20	-	148.800.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	62.592.000,00	62.585.000,00	99,99	483.968.400,00	(421.383.400,00)
15	Dinas Perhubungan	14.815.801.000,00	14.557.722.035,00	98,26	1.910.707.750,00	12.647.014.285,00
16	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	125.000.000,00	124.201.000,00	99,36	1.131.325.264,00	(1.007.124.264,00)
17	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	69.961.529.000,00	68.768.253.107,00	98,29	6.684.778.000,00	62.083.475.107,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	22.164.343.000,00	16.945.509.153,00	76,45	816.419.800,00	16.129.089.353,00
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.301.199.000,00	3.080.002.938,00	93,30	1.148.189.532,00	1.931.813.406,00
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.201.872.000,00	4.194.093.893,00	99,81	4.357.945.775,00	(163.851.882,00)
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	775.522.000,00	772.691.611,00	99,64	293.757.415,00	478.934.196,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.116.343.000,00	2.115.437.265,00	99,96	343.482.228,00	1.771.955.037,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	23.925.000,00	(23.925.000,00)
24	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	229.451.200,00	(229.451.200,00)
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	175.000.000,00	163.314.057,00	93,32	85.745.000,00	77.569.057,00
26	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	96.305.000,00	(96.305.000,00)
27	Inspektorat	-	-	-	197.010.000,00	(197.010.000,00)
28	Sekretariat DPRD	-	-	-	1.007.855.000,00	(1.007.855.000,00)
29	Badan Penghubung	1.250.000.000,00	992.779.961,00	79,42	19.560.000,00	973.219.961,00
	Jumlah	**372.698.488.000,00**	**330.327.506.402,00**	**88,63**	**195.647.613.473,00**	**134.679.892.929,00**

5.1.2.2.3.2 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti — Rp351.642.000,00

Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti dianggarkan sebesar Rp355.506.000,00 dengan realisasi sebesar Rp351.642.000,00 atau 98,91%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp125.990.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp225.652.000,00 atau 179,10% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80.000.000,00	79.689.000,00	99,61	-	79.689.000,00
2	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	125.990.000,00	(125.990.000,00)
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	275.506.000,00	271.953.000,00	98,71	-	271.953.000,00
	Jumlah	**355.506.000,00**	**351.642.000,00**	**98,91**	**125.990.000,00**	**225.652.000,00**

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan — Rp351.328.654.582,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp370.616.404.000,00 dengan realisasi sebesar Rp351.328.654.582,00 atau 94,80%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp177.713.123.124,00 mengalami kenaikan sebesar Rp173.615.531.458,00 atau 97,69% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	261.579.281.000,00	248.942.142.910,00	95,17	156.056.067.646,00	92.886.075.264,00
2	Bangunan Air	51.552.433.000,00	46.321.405.827,00	89,85	4.586.358.828,00	41.735.046.999,00
3	Instalasi	4.201.482.000,00	3.442.016.000,00	81,92	14.934.394.250,00	(11.492.378.250,00)
4	Jaringan	53.283.208.000,00	52.623.089.845,00	98,76	2.136.302.400,00	50.486.787.445,00
	Jumlah	**370.616.404.000,00**	**351.328.654.582,00**	**94,80**	**177.713.123.124,00**	**173.615.531.458,00**

5.1.2.2.4.1 Belanja Modal Jalan dan Jembatan — Rp248.942.142.910,00

Belanja Modal Jalan dan Jembatan dianggarkan sebesar Rp261.579.281.000,00 dengan realisasi sebesar Rp248.942.142.910,00 atau 95,17%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp156.056.067.646,00 mengalami kenaikan sebesar Rp92.886.075.264,00 atau 59,52% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	261.446.738.000,00	248.809.611.265,00	95,17	153.809.996.646,00	94.999.614.619,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	123.493.000,00	123.493.000,00	100,00	-	123.493.000,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	2.246.071.000,00	(2.246.071.000,00)
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	9.050.000,00	9.038.645,00	99,87	-	9.038.645,00
	Jumlah	**261.579.281.000,00**	**248.942.142.910,00**	**95,17**	**156.056.067.646,00**	**92.886.075.264,00**

5.1.2.2.4.2 Belanja Modal Bangunan Air — Rp46.321.405.827,00

Belanja Modal Bangunan Air dianggarkan sebesar Rp51.552.433.000,00 dengan realisasi sebesar Rp46.321.405.827,00 atau 89,85%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.586.358.828,00 mengalami kenaikan sebesar Rp41.735.046.999,00 atau 909,98%. Kenaikan yang sangat signifikan antara lain dikarenakan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi, sungai dan embung oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	50.448.433.000,00	45.363.220.827,00	89,92	3.174.244.803,00	42.188.976.024,00
2	Dinas Perhubungan	-	-	-	45.680.000,00	(45.680.000,00)
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	200.000.000,00	199.714.000,00	99,86	107.717.200,00	91.996.800,00
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	904.000.000,00	758.471.000,00	83,90	266.494.375,00	491.976.625,00
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	14.979.250,00	(14.979.250,00)
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	977.243.200,00	(977.243.200,00)
	Jumlah	**51.552.433.000,00**	**46.321.405.827,00**	**89,85**	**4.586.358.828,00**	**41.735.046.999,00**

5.1.2.2.4.3 Belanja Modal Instalasi — Rp3.442.016.000,00

Belanja Modal Instalasi dianggarkan sebesar Rp4.201.482.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.442.016.000,00 atau 81,92%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp14.934.394.250,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.492.378.250,00 atau 76,95% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	56.735.000,00	(56.735.000,00)
2	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	695.486.000,00	(695.486.000,00)
3	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	38.500.000,00	(38.500.000,00)
4	RSJD Surakarta	3.350.000.000,00	2.767.777.000,00	82,62	-	2.767.777.000,00
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	750.000.000,00	573.066.000,00	76,41	-	573.066.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-	-	10.909.557.400,00	(10.909.557.400,00)
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	76.482.000,00	76.473.000,00	99,99	-	76.473.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	48.621.100,00	(48.621.100,00)
9	Dinas Perhubungan	-	-	-	2.823.487.000,00	(2.823.487.000,00)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	12.000.000,00	(12.000.000,00)
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	72.915.700,00	(72.915.700,00)
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	25.000.000,00	24.700.000,00	98,80	-	24.700.000,00
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	277.092.050,00	(277.092.050,00)
	Jumlah	**4.201.482.000,00**	**3.442.016.000,00**	**81,92**	**14.934.394.250,00**	**(11.492.378.250,00)**

5.1.2.2.4.4 Belanja Modal Jaringan — Rp52.623.089.845,00

Belanja Modal Jaringan dianggarkan sebesar Rp53.283.208.000,00 dengan realisasi sebesar Rp52.623.089.845,00 atau 98,76%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.136.302.400,00 mengalami kenaikan sebesar Rp50.486.787.445,00 dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	2.136.302.400,00	(2.136.302.400,00)
2	RSUD Tugurejo Semarang	5.350.000.000,00	4.717.368.500,00	88,18	-	4.717.368.500,00
3	RSJD Surakarta	230.000.000,00	220.250.000,00	95,76	-	220.250.000,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	47.509.858.000,00	47.494.418.345,00	99,97	-	47.494.418.345,00
5	Sekretariat Daerah	193.350.000,00	191.053.000,00	98,81	-	191.053.000,00
	Jumlah	**53.283.208.000,00**	**52.623.089.845,00**	**98,76**	**2.136.302.400,00**	**50.486.787.445,00**

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya — Rp108.123.383.035,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp108.990.562.000,00 dengan realisasi sebesar Rp108.123.383.035,00 atau 99,20%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp113.376.388.074,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.253.005.039,00 atau 4,63% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.002.560.000,00	972.986.486,00	97,05	112.305.997.964,00	(111.333.011.478,00)
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	604.975.000,00	461.892.800,00	76,35	514.303.200,00	(52.410.400,00)
3	Belanja Modal Hewan	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	24.800.000,00	(17.800.000,00)
4	Belanja Modal Biota Perairan	-	-	-	-	-
5	Belanja Modal Tanaman	-	-	-	-	-
6	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-	-
7	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	284.970.000,00	266.702.660,00	93,59	531.286.910,00	(264.584.250,00)
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	107.091.057.000,00	106.414.801.089,00	99,37	-	106.414.801.089,00
	Jumlah	**108.990.562.000,00**	**108.123.383.035,00**	**99,20**	**113.376.388.074,00**	**(5.253.005.039,00)**

5.1.2.2.5.1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan — Rp972.986.486,00

Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp1.002.560.000,00 dengan realisasi sebesar Rp972.986.486,00 atau 97,05%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp112.305.997.964,00 mengalami penurunan sebesar Rp111.333.011.478,00 atau 99,13% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.400.000,00	2.386.000,00	99,42	112.162.032.314,00	(112.159.646.314,00)
2	Dinas Kesehatan	76.815.000,00	76.405.645,00	99,47	-	76.405.645,00
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	9.884.000,00	(9.884.000,00)
4	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	2.575.000,00	(2.575.000,00)
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	15.000.000,00	900.000,00	6,00	-	900.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	61.250.000,00	55.653.941,00	90,86	-	55.653.941,00
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	500.000,00	176.500,00	35,30	22.754.500,00	(22.578.000,00)
8	Dinas Sosial	-	-	-	33.700.000,00	(33.700.000,00)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31.720.000,00	31.720.000,00	100,00	5.551.000,00	26.169.000,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-	3.500.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	69.549.000,00	69.546.500,00	100,00	5.429.000,00	64.117.500,00
12	Dinas Perhubungan	190.000.000,00	189.523.000,00	99,75	-	189.523.000,00
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	64.500.000,00	64.500.000,00	100,00	-	64.500.000,00
14	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	11.743.450,00	(11.743.450,00)
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	-	21.000.000,00
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	4.000.000,00	6.000.000,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	29.500.000,00	(29.500.000,00)
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	6.985.000,00	(6.985.000,00)
19	Inspektorat	2.340.000,00	2.339.900,00	100,00	1.940.700,00	399.200,00
20	Sekretariat Daerah	453.986.000,00	445.335.000,00	98,09	9.903.000,00	435.432.000,00
	Jumlah	**1.002.560.000,00**	**972.986.486,00**	**97,05**	**112.305.997.964,00**	**(111.333.011.478,00)**

5.1.2.2.5.2 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga Rp461.892.800,00

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga dianggarkan sebesar Rp604.975.000,00 dengan realisasi sebesar Rp461.892.800,00 atau 76,35%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp514.303.200,00 mengalami penurunan sebesar Rp52.410.400,00 atau 10,19% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	460.803.200,00	(460.803.200,00)
2	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	575.000.000,00	431.917.800,00	75,12	28.000.000,00	403.917.800,00
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	25.500.000,00	(25.500.000,00)
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	29.975.000,00	29.975.000,00	100,00	-	29.975.000,00
	Jumlah	**604.975.000,00**	**461.892.800,00**	**76,35**	**514.303.200,00**	**(52.410.400,00)**

5.1.2.2.5.3 Belanja Modal Hewan Rp7.000.000,00

Belanja Modal Hewan dianggarkan sebesar Rp7.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.000.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp24.800.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.800.000,00 atau 71,77% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	-	7.000.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	24.800.000,00	(24.800.000,00)
	Jumlah	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**	**24.800.000,00**	**(17.800.000,00)**

5.1.2.2.5.4 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi — Rp266.702.660,00

Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi dianggarkan sebesar Rp284.970.000,00 dengan realisasi sebesar Rp266.702.660,00 atau 93,59%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp531.286.910,00 mengalami penurunan sebesar Rp264.584.250,00 atau 49,80% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	200.000.000,00	181.732.660,00	90,87	-	181.732.660,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	482.226.910,00	(482.226.910,00)
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	84.970.000,00	84.970.000,00	100,00	-	84.970.000,00
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	49.060.000,00	(49.060.000,00)
	Jumlah	**284.970.000,00**	**266.702.660,00**	**93,59**	**531.286.910,00**	**(264.584.250,00)**

5.1.2.2.5.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS — Rp106.414.801.089,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dianggarkan sebesar Rp107.091.057.000,00 dengan realisasi sebesar Rp106.414.801.089,00 atau 99,37%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp106.414.801.089,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	107.091.057.000,00	106.414.801.089,00	99,37	-	106.414.801.089,00
	Jumlah	**107.091.057.000,00**	**106.414.801.089,00**	**99,37**	**-**	**106.414.801.089,00**

5.1.2.2.5.6 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud — Rp0,00

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp859.119.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp859.119.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	288.690.000,00	(288.690.000,00)
2	RSUD Kelet Donorejo	-	-	-	49.500.000,00	(49.500.000,00)
3	Dinas Sosial	-	-	-	24.880.000,00	(24.880.000,00)
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	52.645.000,00	(52.645.000,00)
5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	95.559.000,00	(95.559.000,00)
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	347.845.000,00	(347.845.000,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**859.119.000,00**	**(859.119.000,00)**

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga — Rp72.303.305.000,00

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp92.820.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp72.303.305.000,00 atau 77,90%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.783.884.978.571,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.711.581.673.571,00 atau 95,95% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	92.820.000.000,00	72.303.305.000,00	77,90	1.783.884.978.571,00	(1.711.581.673.571,00)
	Jumlah	**92.820.000.000,00**	**72.303.305.000,00**	**77,90**	**1.783.884.978.571,00**	**(1.711.581.673.571,00)**

Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 digunakan untuk :

a. Penanganan bencana di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Brebes, Purbalingga, Banjarnegara, Demak dan banyumas berupa perbaikan rumah rusak akibat bencana banjir, tanah longsor, tanah bergerak dan angin kencang serta kebakaran dianggarkan sejumlah Rp18.987.900.000,00 terealisasi sejumlah Rp4.329.429.000,00 atau 22,80%
b. Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional dianggarkan sejumlah Rp73.832.100.000,00 terealisasi sejumlah Rp67.973.876.000,00 atau 92,07 meliputi :
   - Bantuan bahan baku industri kepada Industri Kecil Menengah (IKM) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dianggarkan sejumlah Rp1.307.500.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.297.040.000,00 atau 99,20%
   - Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan jenis jaring pengaman sosial yang diberikan dalam bentuk uang tunai per penerima dengan kriteria :
     1) Pelaku pariwisata terdampak PPKM level 3 dan 4 pada 35 Kabupatan/Kota dilaksanakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dianggarkan sejumlah Rp2.251.708.000,00 terealisasi sejumlah Rp2.151.556.000,00 atau 95,55%
     2) pelaku UMKM di objek wisata, fasilitas umum, pedagang tradisional dan pasar tiban terdampak level 3 dan 4 pada 35 Kabupaten/Kota dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM dianggarkan sejumlah Rp11.303.480.000,00 terealisasi sejumlah Rp6.535.560.000,00 atau 57,82%
     3) Supir, kondektur dan pekerja perusahaan bus angkutan umum sesuai kewenangan provinsi dan bus angkutan pariwisata domisili Jawa Tengah terdampak PPKM level 3 dan 4 pada 35 Kabupaten/Kota dilaksanakan Dinas Perhubungan dianggarkan sejumlah Rp1.807.872.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.310.536.000,00 atau 72,49%
     4) Masyarakat non DTKS dan masyarakat/keluarga/organisasi yang belum tertampung dalam usaulan Tahun 2020; pekerja dan pedagang informal yang kesulitan bekerja; buruh/karyawan yang di PHK; masyarakat/kelompok rentan lainnya yang mengalami

kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat covid-19 Dilaksanakan Dinas Sosial dianggarkan sejumlah Rp57.161.540.000,00 terealisasi sejumlah Rp56.679.184.000,00 atau 99,16%

5.1.2.4 Belanja Transfer — Rp7.497.298.646.119,00

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp8.040.733.845.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.497.298.646.119,00 atau 93,24%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.646.872.581.129,00 mengalami kenaikan sebesar Rp850.426.064.990,00 atau 12,79% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	6.120.476.085.000,00	5.735.553.033.353,00	93,71	4.633.245.749.888,00	1.102.307.283.465,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	1.920.257.760.000,00	1.761.745.612.766,00	91,75	2.013.626.831.241,00	(251.881.218.475,00)
	Jumlah	**8.040.733.845.000,00**	**7.497.298.646.119,00**	**93,24**	**6.646.872.581.129,00**	**850.426.064.990,00**

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil — Rp5.735.553.033.353,00

Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp6.120.476.085.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.735.553.033.353,00 atau 93,71%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.633.245.749.888,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.102.307.283.465,00 atau 23,79% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.120.476.085.000,00	5.735.553.033.353,00	93,71	4.633.245.749.888,00	1.102.307.283.465,00
	Jumlah	**6.120.476.085.000,00**	**5.735.553.033.353,00**	**93,71**	**4.633.245.749.888,00**	**1.102.307.283.465,00**

Adapun rincian belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa adalah sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Kabupaten Semarang	202.503.277.000,00	191.675.079.511,00	94,65	155.665.817.452,00	36.009.262.059,00
2	Kabupaten Kendal	173.189.879.000,00	162.850.087.805,00	94,03	128.496.428.284,00	34.353.659.521,00
3	Kabupaten Demak	186.573.622.000,00	184.791.228.586,00	99,04	151.902.441.690,00	32.888.786.896,00
4	Kabupaten Grobogan	193.585.797.000,00	187.464.515.183,00	96,84	157.263.613.516,00	30.200.901.667,00
5	Kabupaten Pati	220.458.684.000,00	217.909.242.516,00	98,84	173.865.155.267,00	44.044.087.249,00
6	Kabupaten Kudus	174.980.662.000,00	166.347.501.424,00	95,07	133.004.610.484,00	33.342.890.940,00
7	Kabupaten Jepara	191.409.555.000,00	183.729.807.909,00	95,99	150.643.645.949,00	33.086.161.960,00
8	Kabupaten Rembang	123.349.910.000,00	120.762.316.716,00	97,90	97.043.873.316,00	23.718.443.400,00
9	Kabupaten Blora	132.189.711.000,00	126.260.266.417,00	95,51	104.884.482.965,00	21.375.783.452,00
10	Kabupaten Pekalongan	124.295.020.000,00	124.294.980.355,00	100,00	100.595.200.323,00	23.699.780.032,00
11	Kabupaten Batang	126.511.276.000,00	120.623.411.961,00	95,35	92.013.098.882,00	28.610.313.079,00
12	Kabupaten Pemalang	173.352.196.000,00	170.393.852.397,00	98,29	131.194.217.715,00	39.199.634.682,00
13	Kabupaten Tegal	200.449.570.000,00	186.620.461.851,00	93,10	151.186.151.494,00	35.434.310.357,00
14	Kabupaten Brebes	226.802.138.000,00	206.205.264.636,00	90,92	181.020.663.531,00	25.184.601.105,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
15	Kabupaten Banyumas	254.506.140.000,00	233.070.254.488,00	91,58	189.208.586.743,00	43.861.667.745,00
16	Kabupaten Cilacap	257.945.467.000,00	247.068.593.170,00	95,78	197.463.851.578,00	49.604.741.592,00
17	Kabupaten Purbalingga	131.283.850.000,00	124.624.802.130,00	94,93	104.798.564.062,00	19.826.238.068,00
18	Kabupaten Banjarnegara	123.876.039.000,00	122.694.193.588,00	99,05	102.461.046.023,00	20.233.147.565,00
19	Kabupaten Magelang	197.505.107.000,00	169.742.571.852,00	85,94	147.910.429.045,00	21.832.142.807,00
20	Kabupaten Temanggung	118.785.529.000,00	114.087.366.818,00	96,04	94.165.118.971,00	19.922.247.847,00
21	Kabupaten Wonosobo	115.123.639.000,00	112.685.340.755,00	97,88	92.912.871.083,00	19.772.469.672,00
22	Kabupaten Purworejo	119.616.055.000,00	108.924.659.904,00	91,06	91.978.353.408,00	16.946.306.496,00
23	Kabupaten Kebumen	160.534.135.000,00	157.491.424.803,00	98,10	130.966.524.602,00	26.524.900.201,00
24	Kabupaten Klaten	215.127.695.000,00	206.950.349.108,00	96,20	163.789.663.880,00	43.160.685.228,00
25	Kabupaten Boyolali	152.362.267.000,00	152.016.347.750,00	99,77	122.992.708.962,00	29.023.638.788,00
26	Kabupaten Sragen	177.136.567.000,00	174.684.467.479,00	98,62	134.344.347.567,00	40.340.119.912,00
27	Kabupaten Sukoharjo	186.533.960.000,00	172.597.941.561,00	92,53	133.988.064.440,00	38.609.877.121,00
28	Kabupaten Karanganyar	169.634.661.000,00	165.757.129.864,00	97,71	129.054.883.131,00	36.702.246.733,00
29	Kabupaten Wonogiri	149.447.975.000,00	145.525.380.454,00	97,38	115.279.390.999,00	30.245.989.455,00
30	Kota Semarang	639.002.014.000,00	532.561.552.641,00	83,34	419.569.268.392,00	112.992.284.249,00
31	Kota Pekalongan	86.446.822.000,00	76.876.982.891,00	88,93	63.377.912.445,00	13.499.070.446,00
32	Kota Surakarta	197.248.662.000,00	167.475.868.180,00	84,91	132.073.766.816,00	35.402.101.364,00
33	Kota Salatiga	73.558.417.000,00	64.918.523.115,00	88,25	53.450.784.252,00	11.467.738.863,00
34	Kota Tegal	76.799.694.000,00	73.489.943.717,00	95,69	56.691.156.951,00	16.798.786.766,00
35	Kota Magelang	68.350.093.000,00	62.381.321.818,00	91,27	47.989.055.670,00	14.392.266.148,00
	Jumlah	**6.120.476.085.000,00**	**5.735.553.033.353,00**	**93,71**	**4.633.245.749.888,00**	**1.102.307.283.465,00**

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan — Rp1.761.745.612.766,00

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp1.920.257.760.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.761.745.612.766,00 atau 91,75%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.013.626.831.241,00 mengalami penurunan sebesar Rp251.881.218.475,00 atau 12,51% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	640.439.975.000,00	493.309.827.766,00	77,03	845.543.195.241,00	(352.233.367.475,00)
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.279.817.785.000,00	1.268.435.785.000,00	99,11	1.168.083.636.000,00	100.352.149.000,00
	Jumlah	**1.920.257.760.000,00**	**1.761.745.612.766,00**	**91,75**	**2.013.626.831.241,00**	**(251.881.218.475,00)**

5.1.2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota — Rp493.309.827.766,00

Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp640.439.975.000,00 dengan realisasi sebesar Rp493.309.827.766,00 atau 77,03%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp845.543.195.241,00 mengalami penurunan sebesar Rp352.233.367.475,00 atau 41,66% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Kabupaten Semarang	57.323.000.000,00	49.527.249.000,00	86,40	39.687.577.274,00	9.839.671.726,00
2	Kabupaten Kendal	9.573.000.000,00	8.937.061.883,00	93,36	18.389.680.226,00	(9.452.618.343,00)
3	Kabupaten Demak	38.678.000.000,00	38.408.240.000,00	99,30	65.766.933.900,00	(27.358.693.900,00)
4	Kabupaten Grobogan	29.263.275.000,00	24.991.851.000,00	85,40	50.916.105.131,00	(25.924.254.131,00)
5	Kabupaten Pati	14.767.000.000,00	11.006.114.000,00	74,53	28.783.114.000,00	(17.777.000.000,00)
6	Kabupaten Kudus	4.398.000.000,00	4.319.018.000,00	98,20	8.673.235.000,00	(4.354.217.000,00)
7	Kabupaten Jepara	37.653.000.000,00	34.387.744.409,00	91,33	61.135.817.829,00	(26.748.073.420,00)
8	Kabupaten Rembang	18.147.000.000,00	15.987.548.639,00	88,10	14.285.856.288,00	1.701.692.351,00
9	Kabupaten Blora	16.643.000.000,00	14.680.004.000,00	88,21	54.343.529.000,00	(39.663.525.000,00)
10	Kabupaten Pekalongan	7.208.000.000,00	6.632.264.000,00	92,01	10.107.366.681,00	(3.475.102.681,00)
11	Kabupaten Batang	9.087.000.000,00	8.696.575.000,00	95,70	14.226.398.000,00	(5.529.823.000,00)
12	Kabupaten Pemalang	6.873.000.000,00	873.000.000,00	12,70	10.360.575.818,00	(9.487.575.818,00)
13	Kabupaten Tegal	19.603.000.000,00	18.959.286.000,00	96,72	4.563.209.000,00	14.396.077.000,00
14	Kabupaten Brebes	12.343.000.000,00	11.917.734.000,00	96,55	39.252.138.336,00	(27.334.404.336,00)
15	Kabupaten Banyumas	24.352.700.000,00	20.129.335.915,00	82,66	18.221.591.230,00	1.907.744.685,00
16	Kabupaten Cilacap	19.263.000.000,00	18.714.874.507,00	97,15	25.350.873.000,00	(6.635.998.493,00)
17	Kabupaten Purbalingga	13.687.000.000,00	687.000.000,00	5,02	13.572.473.000,00	(12.885.473.000,00)
18	Kabupaten Banjarnegara	7.257.000.000,00	6.549.582.000,00	90,25	16.193.248.000,00	(9.643.666.000,00)
19	Kabupaten Magelang	16.387.000.000,00	15.430.420.000,00	94,16	10.689.403.000,00	4.741.017.000,00
20	Kabupaten Temanggung	38.403.000.000,00	37.830.591.261,00	98,51	6.655.760.238,00	31.174.831.023,00
21	Kabupaten Wonosobo	29.280.000.000,00	17.540.253.154,00	59,91	46.025.605.000,00	(28.485.351.846,00)
22	Kabupaten Purworejo	14.618.000.000,00	9.269.759.900,00	63,41	33.355.013.808,00	(24.085.253.908,00)
23	Kabupaten Kebumen	12.043.000.000,00	5.848.070.000,00	48,56	17.991.610.589,00	(12.143.540.589,00)
24	Kabupaten Klaten	17.243.000.000,00	753.000.000,00	4,37	14.804.313.000,00	(14.051.313.000,00)
25	Kabupaten Boyolali	21.753.000.000,00	21.282.605.000,00	97,84	33.294.381.000,00	(12.011.776.000,00)
26	Kabupaten Sragen	9.163.000.000,00	8.295.179.000,00	90,53	27.090.585.441,00	(18.795.406.441,00)
27	Kabupaten Sukoharjo	13.967.000.000,00	2.319.045.000,00	16,60	1.154.709.000,00	1.164.336.000,00
28	Kabupaten Karanganyar	8.798.000.000,00	7.097.592.000,00	80,67	6.676.848.000,00	420.744.000,00
29	Kabupaten Wonogiri	27.237.000.000,00	26.144.456.000,00	95,99	56.811.970.000,00	(30.667.514.000,00)
30	Kota Semarang	35.508.000.000,00	23.539.789.384,00	66,29	26.781.465.445,00	(3.241.676.061,00)
31	Kota Pekalongan	8.453.000.000,00	1.952.969.600,00	23,10	11.794.000.000,00	(9.841.030.400,00)
32	Kota Surakarta	25.687.000.000,00	18.620.615.114,00	72,49	30.761.773.579,00	(12.141.158.465,00)
33	Kota Salatiga	8.886.000.000,00	586.000.000,00	6,59	7.576.755.000,00	(6.990.755.000,00)
34	Kota Tegal	6.253.000.000,00	753.000.000,00	12,04	15.936.712.428,00	(15.183.712.428,00)
35	Kota Magelang	642.000.000,00	642.000.000,00	100,00	4.312.568.000,00	(3.670.568.000,00)
	Jumlah	**640.439.975.000,00**	**493.309.827.766,00**	**77,03**	**845.543.195.241,00**	**(352.233.367.475,00)**

5.1.2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa — Rp1.268.435.785.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Desa dianggarkan sebesar Rp1.279.817.785.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.268.435.785.000,00 atau 99,11%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.168.083.636.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp100.352.149.000,00 atau 8,59% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Kabupaten Semarang	60.599.000.000,00	60.499.000.000,00	99,83	61.924.683.000,00	(1.425.683.000,00)
2	Kabupaten Kendal	29.254.000.000,00	29.054.000.000,00	99,32	38.910.000.000,00	(9.856.000.000,00)
3	Kabupaten Demak	29.120.000.000,00	29.020.000.000,00	99,66	27.896.000.000,00	1.124.000.000,00
4	Kabupaten Grobogan	58.623.200.000,00	58.623.200.000,00	100,00	64.995.000.000,00	(6.371.800.000,00)
5	Kabupaten Pati	107.765.664.000,00	107.514.664.000,00	99,77	152.645.000.000,00	(45.130.336.000,00)
6	Kabupaten Kudus	24.017.000.000,00	23.041.000.000,00	95,94	12.310.000.000,00	10.731.000.000,00
7	Kabupaten Jepara	40.087.207.000,00	39.189.207.000,00	97,76	50.870.000.000,00	(11.680.793.000,00)
8	Kabupaten Rembang	31.209.400.000,00	30.848.400.000,00	98,84	34.705.000.000,00	(3.856.600.000,00)
9	Kabupaten Blora	36.419.700.000,00	36.419.700.000,00	100,00	47.270.000.000,00	(10.850.300.000,00)
10	Kabupaten Pekalongan	21.274.200.000,00	20.581.200.000,00	96,74	20.428.884.000,00	152.316.000,00
11	Kabupaten Batang	51.804.428.000,00	51.193.428.000,00	98,82	28.665.886.000,00	22.527.542.000,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
12	Kabupaten Pemalang	43.712.000.000,00	48.188.000.000,00	110,24	44.489.000.000,00	3.699.000.000,00
13	Kabupaten Tegal	30.541.900.000,00	29.490.900.000,00	96,56	12.255.000.000,00	17.235.900.000,00
14	Kabupaten Brebes	65.993.000.000,00	65.573.000.000,00	99,36	59.960.000.000,00	5.613.000.000,00
15	Kabupaten Banyumas	38.656.000.000,00	37.761.000.000,00	97,68	47.895.000.000,00	(10.134.000.000,00)
16	Kabupaten Cilacap	43.096.350.000,00	42.636.350.000,00	98,93	31.438.183.000,00	11.198.167.000,00
17	Kabupaten Purbalingga	31.181.000.000,00	31.121.000.000,00	99,81	31.995.000.000,00	(874.000.000,00)
18	Kabupaten Banjarnegara	23.658.000.000,00	24.194.000.000,00	102,27	19.330.000.000,00	4.864.000.000,00
19	Kabupaten Magelang	80.160.059.000,00	78.200.059.000,00	97,55	35.425.000.000,00	42.775.059.000,00
20	Kabupaten Temanggung	33.836.500.000,00	32.720.500.000,00	96,70	22.031.000.000,00	10.689.500.000,00
21	Kabupaten Wonosobo	58.501.000.000,00	57.563.000.000,00	98,40	60.180.000.000,00	(2.617.000.000,00)
22	Kabupaten Purworejo	21.798.950.000,00	21.613.950.000,00	99,15	27.045.000.000,00	(5.431.050.000,00)
23	Kabupaten Kebumen	24.815.370.000,00	23.927.370.000,00	96,42	37.375.000.000,00	(13.447.630.000,00)
24	Kabupaten Klaten	75.822.000.000,00	73.842.000.000,00	97,39	60.445.000.000,00	13.397.000.000,00
25	Kabupaten Boyolali	58.684.051.000,00	58.384.051.000,00	99,49	23.665.000.000,00	34.719.051.000,00
26	Kabupaten Sragen	40.144.500.000,00	39.275.500.000,00	97,84	25.025.000.000,00	14.250.500.000,00
27	Kabupaten Sukoharjo	31.492.000.000,00	31.026.000.000,00	98,52	25.310.000.000,00	5.716.000.000,00
28	Kabupaten Karanganyar	42.474.506.000,00	41.906.506.000,00	98,66	34.135.000.000,00	7.771.506.000,00
29	Kabupaten Wonogiri	45.076.800.000,00	45.028.800.000,00	99,89	29.465.000.000,00	15.563.800.000,00
	Jumlah	**1.279.817.785.000,00**	**1.268.435.785.000,00**	**99,11**	**1.168.083.636.000,00**	**100.352.149.000,00**

5.1.3 PEMBIAYAAN DAERAH **Rp1.076.492.992.625,00**

Pembiayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp1.076.343.812.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.076.492.992.625,00 atau 100,01%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.119.348.228.370,00 mengalami penurunan sebesar Rp42.855.235.745,00 atau 3,83% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	861.343.812.000,00	861.492.992.625,00	100,02	1.119.348.228.370,00	(257.855.235.745,00)
2	Pengeluaran Pembiayaan	215.000.000.000,00	215.000.000.000,00	100,00	-	215.000.000.000,00
	Jumlah	**1.076.343.812.000,00**	**1.076.492.992.625,00**	**100,01**	**1.119.348.228.370,00**	**(42.855.235.745,00)**

5.1.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN **Rp861.492.992.625,00**

Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp861.343.812.000,00 dengan realisasi sebesar Rp861.492.992.625,00 atau 100,02%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.119.348.228.370,00 mengalami penurunan sebesar Rp257.855.235.745,00 atau 23,04% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	861.343.812.000,00	861.376.784.856,00	100,00	1.119.095.687.470,00	(257.718.902.614,00)
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	116.207.769,00	-	252.540.900,00	(136.333.131,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-	-
	Jumlah	**861.343.812.000,00**	**861.492.992.625,00**	**100,02**	**1.119.348.228.370,00**	**(257.855.235.745,00)**

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya **Rp861.376.784.856,00**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya ditargetkan sebesar Rp861.343.812.000,00 dengan realisasi sebesar Rp861.376.784.856,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.119.095.687.470,00 mengalami penurunan sebesar Rp257.718.902.614,00 atau 23,03% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan PAD	(598.802.543.000,00)	(598.802.543.145,00)	100,00	(50.419.308.000,00)	(548.383.235.145,00)
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	(262.713.425.000,00)	(263.515.584.707,00)	100,31	(430.440.042.000,00)	166.924.457.293,00
3	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	802.159.000,00	-	-	802.159.000,00
4	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	190.781.000,00	190.781.370,00	100,00	-	190.781.370,00
5	Penghematan Belanja	1.722.668.999.000,00	1.722.701.972.338,00	100,00	1.599.955.037.470,00	122.746.934.868,00
	Jumlah	**861.343.812.000,00**	**861.376.784.856,00**	**100,00**	**1.119.095.687.470,00**	**(257.718.902.614,00)**

5.1.3.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah **Rp116.207.769,00**

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp116.207.769,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp252.540.900,00 mengalami penurunan sebesar Rp136.333.131,00 atau 53,98% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	-	116.207.769,00	-	252.540.900,00	(136.333.131,00)
	Jumlah	**-**	**116.207.769,00**	**-**	**252.540.900,00**	**(136.333.131,00)**

Adapun rincian penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM)	-	116.207.769,00	-	74.375.000,00	41.832.769,00
2	Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir UKM dan IKM (Biro Perkenomian)	-	-	-	13.000.000,00	(13.000.000,00)
3	Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir untuk Peralatan/Bahan Baku bagi IKM (Disperindag)	-	-	-	15.165.900,00	(15.165.900,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
4	Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir Ternak Kereman (Dinas Peternakan & Keswan)	-	-	-	150.000.000,00	(150.000.000,00)
	Jumlah	**-**	**116.207.769,00**	**-**	**252.540.900,00**	**(136.333.131,00)**

5.1.3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN **Rp215.000.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp215.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp215.000.000.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp215.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00	-	200.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	-	15.000.000.000,00
3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**215.000.000.000,00**	**215.000.000.000,00**	**100,00**	**-**	**215.000.000.000,00**

5.1.3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan **Rp200.000.000.000,00**

Pembentukan Dana Cadangan ditargetkan sebesar Rp200.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp200.000.000.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp200.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00	-	200.000.000.000,00
	Jumlah	**200.000.000.000,00**	**200.000.000.000,00**	**100,00**	**-**	**200.000.000.000,00**

5.1.3.2.2 Penyertaan Modal Daerah **Rp15.000.000.000,00**

Penyertaan Modal Daerah ditargetkan sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	-	15.000.000.000,00
	Jumlah	**15.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**	**100,00**	**-**	**15.000.000.000,00**

5.1.4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.437.121.228.479,00 SiLPA tersebut dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan PAD	(322.330.888.838,00)	(598.802.543.145,00)
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	158.043.702.054,00	(262.413.425.707,00)
3	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(1.021.148.253,00)	(300.000.000,00)
4	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	149.180.625,00	190.781.370,00
5	Penghematan Belanja	1.600.852.039.166,00	1.722.669.000.009,00
6	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	-	-
7	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	-	-
8	Sisa Belanja Lainnya	-	-
	Jumlah	**1.435.692.884.754,00**	**861.343.812.527,00**

Penjelasan SiLPA Tahun Anggaran 2021 dimaksud termasuk di dalamnya :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	398.435.833.644,00	362.643.956.586,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	-	18.040.000,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	314.414.803,00	102.386.000,00
4	Kas di Bendahara BLUD	991.964.597.859,00	437.713.567.521,00
5	Kas di Bendahara Sekolah	44.978.038.448,00	60.865.862.420,00
6	Setara Kas (Deposito RKUD)	-	-
	Jumlah	**1.435.692.884.754,00**	**861.343.812.527,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	-	18.040.000,00
	Jumlah	**-**	**18.040.000,00**

Kas di Bendahara Penerimaan SKPD

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Bina Marga dan Ciptakarya	-	13.530.000,00
2	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	-	17.710.000,00
3	Dinas Perhubungan	50.594.000,00	55.828.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	1.900.000,00
5	Dinas LH & Kehutanan	-	1.108.000,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	12.310.000,00
7	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	263.820.803,00	-
	Jumlah	**314.414.803,00**	**102.386.000,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi	537.589.720.807,00	248.049.452.853,00
2	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	260.978.713.560,00	114.544.210.359,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	87.709.279.625,00	35.873.049.679,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
4	RSUD Kelet Donorejo	19.581.785.302,00	3.793.186.779,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	13.093.455.058,00	14.225.344.280,00
6	RSJD Surakarta	49.518.044.392,00	10.861.505.755,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	23.493.599.115,00	10.366.817.816,00
	Jumlah	**991.964.597.859,00**	**437.713.567.521,00**

Kas di Bendahara Sekolah

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44.978.038.448,00	60.865.862.420,00
	Jumlah	**44.978.038.448,00**	**60.865.862.420,00**

- SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.437.121.228.479,00 terdapat SiLPA Terikat dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan rincian sebagai berikut :

Jenis DAK	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Penyaluran Dana dr Pusat	Realisasi	Saldo Akhir
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM	26.378.322,00	-	2.758.421.678,00	2.763.776.040,00	21.023.960,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	11.419.684,00	-	1.714.935.316,00	1.499.615.446,00	226.739.554,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	556.538.000,00	299.281.290,00	257.256.710,00
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	-	-	523.322.000,00	480.555.000,00	42.767.000,00
Bantuan Operasional Sekolah	45.565.372.670,00	33.019.528,00	5.821.222.770.000,00	5.845.558.920.999,00	21.262.241.199,00
Bantuan Operasional Kesehatan	7.215.878.541,00	-	233.096.459,00	5.104.606.559,00	2.344.368.441,00
Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	1.451.219.212,00	-	-	1.447.678.617,00	3.540.595,00
Tunjangan Profesi Guru	52.985.652.696,00	-	1.098.687.112.000,00	1.103.359.626.904,00	48.313.137.792,00
Tambahan Penghasilan Guru	245.580.000,00	-	2.331.000.000,00	1.931.590.000,00	644.990.000,00
Tunjangan Khusus Guru	610.588.000,00	-	-	-	610.588.000,00
Bantuan Operasional Penyelengaraan Taman Budaya	22.298.379,00	-	1.727.701.621,00	1.615.509.400,00	134.490.600,00
Bantuan Operasional Penyelengaraan Museum	40.400.852,00	-	1.759.599.148,00	1.774.367.500,00	25.632.500,00
Dana Pelayanan Pariwisata	1.400.000,00	-	861.178.000,00	785.698.000,00	76.880.000,00
Grand Total DAK Non Fisik	**108.176.188.356,00**	**33.019.528,00**	**6.932.375.674.222,00**	**6.966.621.225.755,00**	**73.963.656.351,00**

- SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.437.121.228.479,00 tidak termasuk kas lainnya sebesar Rp555.600.000,00 yang berasal dari sumbangan masyarakat/donatur dan berada di rekening satgas *Covid-19* Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kas tersebut, pada Tahun 2021 telah direalisasikan untuk memberi bantuan anak yatim, piatu, dan/atau yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena *Covid 19* dengan mekanisme swakelola.

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal **Rp861.343.812.527,00**

Saldo anggaran lebih awal tahun 2021 sebesar Rp861.343.812.527,00 merupakan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020.

Saldo Anggaran Lebih Awal terdiri dari:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	362.643.956.586,00	837.445.123.013,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	18.040.000,00	-
3	Kas di Bendahara Penerimaan	102.386.400,00	113.306.841,00
4	Kas di BLUD	437.713.567.521,00	171.762.980.362,34
5	Kas di Bendahara Sekolah	60.865.862.020,00	109.836.036.484,20
	Jumlah	**861.343.812.527,00**	**1.119.157.446.700,54**

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan **Rp861.376.784.856,00**

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan sebesar Rp861.376.784.856,00 merupakan penggunaan atas bagian dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan **Rp1.435.692.884.754,00**

Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp1.435.692.884.754,00 terdiri dari:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pendapatan Asli daerah	14.695.474.898.162,00	13.668.282.278.855,00
2	Pendapatan Transfer	11.871.796.336.054,00	11.702.101.655.293,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	65.728.851.747,00	23.352.000.000,00
	Jumlah	**26.633.000.085.963,00**	**25.393.735.934.148,00**
1	Belanja Operasi	16.826.577.831.470,00	16.223.988.285.131,00

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
2	Belanja Modal	1.447.620.411.245,00	996.994.505.160,00
3	Belanja Tidak Terduga	72.303.305.000,00	1.783.884.978.571,00
4	Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendptan ke Kab/Kota	7.497.298.646.119,00	6.646.872.581.129,00
	Jumlah	**25.843.800.193.834,00**	**25.651.740.349.991,00**
1	Penerimaan Pembiayaan	861.492.992.625,00	1.119.348.228.370,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	215.000.000.000,00	-
	Jumlah	**646.492.992.625,00**	**1.119.348.228.370,00**
	SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	**1.435.692.884.754,00**	**861.343.812.527,00**

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya **Rp32.972.329,00**

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp32.972.329,00 merupakan koreksi atas Sisa Dana BOS dan BOP tahun sebelumnya.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir **Rp1.435.692.884.754,00**

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2021 sebesar Rp1.435.692.884.754,00 berasal dari:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan	26.633.000.085.963,00	25.393.735.934.148,00
2	Realisasi Belanja	25.843.800.193.834,00	25.651.740.349.991,00
3	Penerimaan Pembiayaan	861.492.992.625,00	1.119.348.228.370,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	215.000.000.000,00	-
	SiLPA	**1.435.692.884.754,00**	**861.343.812.527,00**

Saldo ini terdiri dari:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah		
	- Giro di bank Jateng	398.435.833.644,00	362.643.956.586,00
	Setara Kas BUD		
	- Bank Jateng	-	-
	- Bank BNI	-	-
	- Bank BRI	-	-
2	Kas di Bendahara Penerimaan (Pendapatan yg Blm disetor ke RKUD)		
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-
	- Dinas Kesehatan	-	-
	- Dinas Perhubungan	50.594.000,00	55.828.000,00
	- Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-	1.900.000,00
	- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta karya	-	13.530.000,00
	- Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air	-	17.710.000,00
	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	1.108.000,00

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	- Dinas Perikanan dan kelautan	-	12.310.400,00
	- Badan Pengelola Pendapatan Daerah	263.820.803,00	-
3	Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP)		
	- Dinas Kesehatan	-	18.040.000,00
4	Kas di BLUD	991.964.597.859,00	437.713.567.521,00
	Rekening Giro Kas Bendahara BLUD	**382.644.482.172,00**	**232.732.426.100,00**
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta	132.412.316.321,00	152.850.834.929,00
	- RSUD Dr Margono Sukarjo Purwokerto	149.170.498.570,00	12.911.179.211,00
	- RSJD Dr Amino Gondohutomo	12.545.705.989,00	13.684.316.348,00
	- RSUD Tugurejo	1.000.000,00	35.829.271.229,00
	- RSUD Kelet Donorejo	19.561.430.312,00	3.771.238.010,00
	- RSJD Surakarta	49.463.561.019,00	10.828.524.041,00
	- RSJD RM Soedjarwadi Klaten	19.489.969.961,00	2.857.062.332,00
	Setara Kas BLUD		
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (BRI)	125.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (BTN Syariah)	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (Bank Jateng)	100.000.000.000,00	30.000.000.000,00
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (Muamalat)	55.000.000.000,00	35.000.000.000,00
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (Mandiri)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (BNI)	65.000.000.000,00	-
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (Bank DKI)	20.000.000.000,00	-
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (BSI)	10.000.000.000,00	-
	- RSUD Dr Margono Sukardjo (BNI)	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00
	- RSUD Dr Margono Sukardjo (Bank Jateng)	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00
	- RSUD Dr Margono Sukardjo (BRI)	25.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	- RSJD Dr Amino Gondohutomo (BTN)	500.000.000,00	500.000.000,00
	- RSJD RM Soedjarwadi Klaten (Bank Jateng)	4.000.000.000,00	7.500.000.000,00
	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD		
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta	177.404.486,00	198.617.924,00
	- RSUD Dr Margono Sukardjo	308.214.990,00	133.031.148,00
	- RSJD Dr Amino Gondohutomo	47.749.069,00	41.027.932,00
	- RSJD Tugurejo	87.708.279.625,00	43.778.450,00
	- RSUD Kelet Donorejo	20.354.990,00	21.948.769,00
	- RSJD Surakarta	54.483.373,00	32.981.714,00
	- RSJD RM Soedjarwadi Klaten	3.629.154,00	9.755.484,00
6	Kas di Bendahara Sekolah	44.978.038.448,00	60.865.862.020,00
	Jumlah	**1.435.692.884.754,00**	**861.343.812.527,00**

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Struktur penyajian Neraca Tahun Anggaran 2021 dan 2020 mendasari Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Ringkasan Neraca dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 ASET — Rp39.291.945.337.213,10

Total Aset sebesar **Rp39.291.945.337.213,10** apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp37.222.304.291.653,23 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.069.641.045.559,90 atau 5,56%. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Aset Lancar	3.791.840.781.045,50	3.316.755.368.542,49
2	Investasi Jangka Panjang	7.454.908.269.377,92	6.424.346.793.977,35
3	Aset Tetap	26.362.173.533.902,41	25.972.626.841.373,76
4	Dana Cadangan	200.000.000.000,00	-
5	Aset Lainnya	1.483.022.752.887,27	1.508.575.287.759,63
	Jumlah	**39.291.945.337.213,10**	**37.222.304.291.653,23**

5.3.1.1 ASET LANCAR — Rp3.791.840.781.045,50

Aset Lancar sebesar Rp3.791.840.781.045,50 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.316.755.368.542,47 mengalami **kenaikan** sebesar Rp475.085.412.503,04 atau 14,32% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	1.436.740.557.457,00	864.937.343.735,87
2	Investasi Jangka Pendek	-	-
3	Piutang Pajak Daerah	2.116.395.701.783,00	2.050.129.305.282,38
4	Piutang Retribusi Daerah	1.188.953.671,00	977.885.351,00
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	344.393.176.499,09	157.475.313.164,83
7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	128.148.979.363,00
8	Piutang Transfer Antar Daerah	-	12.269.762,00
9	Piutang Lainnya	15.717.526.838,00	16.019.421.662,00
10	Penyisihan Piutang	(642.081.528.398,58)	(418.683.863.540,78)
11	Belanja Dibayar Dimuka	5.756.838.225,90	6.144.929.018,16
12	Persediaan	513.729.554.970,09	511.593.784.744,03
	Jumlah	**3.791.840.781.045,50**	**3.316.755.368.542,47**

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas **Rp1.436.740.557.457,00**

Kas dan Setara Kas sebesar Rp1.436.740.557.457,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp864.937.343.735,87 mengalami **kenaikan** sebesar Rp571.803.213.721,13 atau 66,11% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	398.435.833.644,00	362.643.956.586,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	314.414.803,00	120.536.400,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	18.040.000,00
4	Kas di BLUD	992.730.293.369,00	438.382.355.570,87
5	Kas Dana BOS	45.260.015.641,00	61.115.855.179,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	-
7	Kas Lainnya	-	2.656.600.000,00
8	Setara Kas	-	-
	Jumlah	**1.436.740.557.457,00**	**864.937.343.735,87**

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah **Rp398.435.833.644,00**

Kas di Kas Daerah sebesar Rp398.435.833.644,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 362.643.956.586,00,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp35.791.877.058,00 atau 9,87% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas di BUD No rek 1.034.01504.7	398.435.833.644,00	362.643.956.586,00
	Jumlah	**398.435.833.644,00**	**362.643.956.586,00**

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan **Rp314.414.803,00**

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp314.414.803,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp120.536.400,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp193.878.403,00 atau 160,85% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas Bendahara Penerimaan SiLPA	314.414.803,00	102.386.400,00
2	Kas Bendahara Penerimaan Non SiLPA	-	18.150.000,00
	Jumlah	**314.414.803,00**	**120.536.400,00**

5.3.1.1.1.2.1 Kas di Bendahara Penerimaan SiLPA **Rp314.414.803,00**

Kas di Bendahara Penerimaan SiLPA sebesar Rp314.414.803,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp102.386.400,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp212.028.403,00 atau 207,09% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	13.530.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	17.710.000,00
3	Dinas Perhubungan	50.594.000,00	55.828.000,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	1.108.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	1.900.000,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	12.310.400,00
7	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	263.820.803,00	-
		314.414.803,00	**102.386.400,00**

Saldo Kas tersebut tahun 2021 telah disetor ke rekening kas daerah pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dengan rincian :

No.	Uraian	No. STS	Tgl Penyetoran	Nilai
1	**Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**			**50.594.000**
a	BRT trans jateng koridor i (Purwokerto - Purbalingga) kawasan Barlingmascakeb	3310947000190300	03/01/2022	9.116.000
b	BRT trans jateng koridor i (Magelang- Purworejo) kawasan Purwomanggung	3310947000190000	03/01/2022	8.154.000
c	BRT trans jateng koridor i (Semarang - Bawen) kawasan Kedungsepur	3310947000190400	03/01/2022	13.466.000
d	BRT trans jateng koridor i (Semarang - Gubug) kawasan Kedungsepur	3310947000189200	03/01/2022	7.104.000
e	BRT trans jateng koridor ii (Semarang - Kendal) kawasan Kedungsepur	3310947000190100	03/01/2022	7.904.000
f	BRT trans jateng koridor i (Surakarta - Sragen) kawasan Subosukawonosraten	3310947000190200	03/01/2022	4.850.000
2	**PAP Umum - Pokok PAP**	3311029290102250	28/12/2021	**263.820.803**
	Jumlah			**314.414.803**

5.3.1.1.1.2.2 Kas di Bendahara Penerimaan Non SiLPA — Rp00,00

Kas di Bendahara Penerimaan Non SiLPA sebesar Rp00,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18.150.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp18.150.000,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	18.150.000,00
		-	**18.150.000,00**

5.3.1.1.1.2.3 Kas di Bendahara Pengeluaran — Rp00,00

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp00,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18.040.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp18.040.000,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas Bendahara Pengeluaran SiLPA	-	18.040.000,00
2	Kas Bendahara Pengeluaran Non SiLPA	-	-
	Jumlah	-	**18.040.000,00**

5.3.1.1.1.2.4 Kas di Bendahara Pengeluaran SiLPA — Rp00,00

Kas di Bendahara Pengeluaran SiLPA sebesar Rp00,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18.040.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp18.040.000,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	-	18.040.000,00
	Jumlah	-	**18.040.000,00**

5.3.1.1.1.3 Kas BLUD — Rp992.730.293.369,00

Kas BLUD sebesar Rp992.730.293.369,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp438.382.355.570,87,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 554.347.937.798,13,00 atau 126,45% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas Di Rekening BLUD	470.547.333.370,00	232.732.426.099,87
2	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD-SiLPA	417.264.489,00	481.141.421,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD (Uang Titipan Pasien)-Non SiLPA	765.695.510,00	668.788.050,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD (Bunga Jamkesmas)-Non SiLPA	-	-
5	Deposito BLUD	521.000.000.000,00	204.500.000.000,00
	Jumlah	**992.730.293.369,00**	**438.382.355.570,87**

Saldo ini merupakan kas BLUD yang berada di bank dan tunai, merupakan bagian dari SiLPA dengan rincian sebagai berikut :

No.	BLUD	EDC	Tunai	Bank	Jumlah
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	48.649,00	183.356.926,00	537.933.361.258,00	538.116.766.833,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	1.587.239,00	145.164.312,00	260.977.251.493,00	261.124.003.044,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	1.000.000,00	125.958.750,00	87.675.680.875,00	87.802.639.625,00
4	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	20.354.990,00	19.561.430.312,00	19.581.785.302,00
5	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	764.475,00	47.749.069,00	13.044.941.514,00	13.093.455.058,00
6	RSJD Surakarta	-	62.929.513,00	49.455.114.879,00	49.518.044.392,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	132.053.302,00	23.361.545.813,00	23.493.599.115,00
Jumlah					992.730.293.369,00

5.3.1.1.1.3.1 Kas di Rekening BLUD — Rp470.547.333.370,00

Kas di Rekening BLUD sebesar Rp470.547.333.370,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp232.732.426.099,87 mengalami **kenaikan** sebesar Rp237.814.907.270,13 atau 102,18% dengan rincian sebagai berikut :

Berikut bagian dari SiLPA yang akan digunakan untuk operasional RSUD/RSJD dan tidak disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	132.412.316.321,00	152.850.834.929,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	149.344.615.153,00	12.911.179.210,87
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	12.545.705.989,00	13.684.316.348,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	87.709.279.625,00	35.829.271.229,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	19.581.785.302,00	3.771.238.010,00
6	RSJD Surakarta	49.463.561.019,00	10.828.524.041,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	19.490.069.961,00	2.857.062.332,00
		470.547.333.370,00	**232.732.426.099,87**

5.3.1.1.1.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan BLUD SiLPA — Rp417.264.489,00

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD SiLPA sebesar Rp417.264.489,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 481.141.421,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 63.876.932,00 atau 13,28% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	177.404.486,00	198.617.924,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	134.098.407,00	133.031.148,00
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	47.749.069,00	41.027.932,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	-	43.778.450,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	21.948.769,00
6	RSJD Surakarta	54.483.373,00	32.981.714,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	3.529.154,00	9.755.484,00
		417.264.489,00	**481.141.421,00**

5.3.1.1.1.3.3 Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Non SiLPA — Rp765.695.510,00

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Non SiLPA sebesar Rp765.695.510,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp668.788.050,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp96.907.460,00 atau 14,49% dengan rincian sebagai berikut :

a. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD (Uang Titipan Pasien)-Non SiLPA

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Non SiLPA yang merupakan Uang Titipan Pasien sampai dengan 31 Desember 2021.

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	527.046.026,00	552.784.400,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	145.289.484,00	60.530.750,00
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang		-
4	RSUD Tugurejo Semarang	93.360.000,00	55.472.900,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara		-
6	RSJD Surakarta		-
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten		-
		765.695.510,00	**668.788.050,00**

5.3.1.1.1.3.4 Deposito BLUD — Rp521.000.000.000,00

Deposito BLUD sebesar Rp521.000.000.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp204.500.000.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp316.500.000.000,00 atau 154,77% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	405.000.000.000,00	95.000.000.000,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	111.500.000.000,00	101.500.000.000,00
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	500.000.000,00	500.000.000,00
4	RSUD Tugurejo Semarang		-
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara		-
6	RSJD Surakarta		-
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	4.000.000.000,00	7.500.000.000,00
		521.000.000.000,00	**204.500.000.000,00**

	SKPD	BANK	Nomor Bilyet	Tgl Pembukaan Deposito	Bunga Deposito	Nilai
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	Bank Muamalat	4186434	20/05/2020	30.136.986	25.000.000.000
		Bank Muamalat	4188232	15/02/2021	35.068.493	20.000.000.000
		Bank Muamalat	4188383	28/12/2021	3.287.671	10.000.000.000
		Bank Jateng	A288744	22/07/2020	18.493.151	30.000.000.000
		Bank Jateng	A289579	27/09/2021	5.479.452	20.000.000.000
		Bank Jateng	A289932	28/12/2021	13.356.164	50.000.000.000
		Bank BTN Syariah	SY101796	15/02/2021	13.589.041	10.000.000.000
		Bank BTN Syariah	SY101965	28/12/2021	2.465.753	10.000.000.000
		Bank BRI	12901007521406	29/06/2021	12.328.767	75.000.000.000
		Bank BRI	129701001191400	27/09/2021	16.438.356	50.000.000.000
		Bank BNI	PAB 1619120	29/06/2021	9.794.521	55.000.000.000
		Bank BNI	PAB 1619096	28/12/2021	2.671.233	10.000.000.000
		Bank Mandiri	1380204799824	29/06/2021	1.232.877	10.000.000.000
		Bank DKI	64025004449	29/06/2021	1.917.808	10.000.000.000
		Bank DKI	64025004783	27/09/2021	3.835.616	10.000.000.000
		Bank BSI	7177297008	27/09/2021	3.298.630	10.000.000.000
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	BNI		01/07/2016	30.821.918	15.000.000.000
		BNI		01/07/2016	13.356.164	6.500.000.000
		Bank Jateng		06/08/2018	34.246.575	20.000.000.000
		Bank Jateng		06/08/2018	34.246.575	20.000.000.000
		Bank Jateng		08/04/2020	39.383.562	25.000.000.000
		BRI		12/04/2019	7.808.219	5.000.000.000
		BRI		08/04/2020	18.904.110	10.000.000.000
		BRI		30/08/2021	821.918	10.000.000.000
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	Bank BTN	0032501400003248	10/04/2015	2.013.699	500.000.000
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	Bank BPD Jateng	A281070	26/10/2021	1.369.863	4.000.000.000
		Jumlah			356.367.123	521.000.000.000

5.3.1.1.1.4 Kas Dana BOS **Rp45.260.015.641,00**

Kas Dana BOS sebesar Rp45.260.015.641,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp61.115.855.179,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp15.855.839.538,00) atau (25,94%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas Dana BOS-SiLPA	21.262.240.651,00	45.565.372.670,00
2	Kas Dana BOS (Bunga Bank)-SiLPA	110.549,00	16.223.371,00
3	Kas Dana BOS (Utang Pajak)-Non SiLPA	127.000.283,00	148.434.456,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
4	Kas Dana BOSDA/BOP-SILPA	23.712.528.871,00	15.270.032.886,00
5	Kas Dana BOSDA (Bunga Bank)-SiLPA	3.158.377,00	14.233.093,00
6	Kas Dana BOSDA/BOP (Utang Pajak)-Non SiLPA	137.004.621,00	101.558.703,00
7	Kas Dana Bantuan Pemerintah Pusat-Non SiLPA	17.696.989,00	-
8	Kas Dana Bantuan Pemerintah Pusat (Utang Pajak)-Non SiLPA	275.300,00	-
	Jumlah	**45.260.015.641,00**	**61.115.855.179,00**

5.3.1.1.1.4.1 Kas Dana BOS-SiLPA — Rp21.262.240.651,00

Kas Dana BOS-SiLPA sebesar Rp21.262.240.651,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp45.565.372.670,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp24.303.132.019,00) atau (53,34%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	SMA Negeri	6.727.517.827,00	12.794.322.599,00
2	SMK Negeri	13.962.104.871,00	32.547.529.294,00
3	SLB Negeri	572.617.953,00	223.520.777,00
		21.262.240.651,00	**45.565.372.670,00**

5.3.1.1.1.4.2 Kas Dana BOS (Bunga Bank)-SiLPA — Rp110.549,00

Kas Dana BOS (Bunga Bank)-SiLPA sebesar Rp110.549,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16.223.371,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp16.112.822,00) atau (99,32%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	SMA Negeri	-	6.007.132,00
2	SMK Negeri	110.549,00	10.015.898,00
3	SLB Negeri	-	200.341,00
		110.549,00	**16.223.371,00**

5.3.1.1.1.4.3 Kas Dana BOS (Utang Pajak)-Non SiLPA — Rp127.000.283,00

Kas Dana BOS (Utang Pajak)-Non SiLPA sebesar Rp127.000.283,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp148.434.456,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp21.434.173,00) atau (14,44%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	SMA Negeri	76.360.219,00	50.177.542,00
2	SMK Negeri	50.640.064,00	98.256.914,00
3	SLB Negeri	-	-
		127.000.283,00	**148.434.456,00**

5.3.1.1.1.4.4 Kas Dana BOSDA/BOP-SiLPA — Rp23.712.528.871,00

Kas Dana BOSDA/BOP-SiLPA sebesar Rp23.712.528.871,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.270.032.886,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp8.442.495.985,00 atau 55,29% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	SMA Negeri	5.255.458.404,00	4.119.239.484,00
2	SMK Negeri	18.388.807.184,00	11.118.822.219,00
3	SLB Negeri	68.263.283,00	31.971.183,00
		23.712.528.871,00	**15.270.032.886,00**

5.3.1.1.1.4.5 Kas Dana BOSDA/BOP (Bunga Bank)-SiLPA — Rp3.158.377,00

Kas Dana BOSDA/BOP (Bunga Bank)-SiLPA sebesar Rp3.158.377,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.233.093,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp11.074.716,00) atau (77,81%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	SMA Negeri	3.158.377,00	9.263.158,00
2	SMK Negeri	-	4.079.076,00
3	SLB Negeri	-	890.859,00
		3.158.377,00	**14.233.093,00**

5.3.1.1.1.4.6 Kas Dana BOSDA/BOP (Utang Pajak)-Non SiLPA — Rp137.004.621,00

Kas Dana BOSDA/BOP (Utang Pajak)-Non SiLPA sebesar Rp137.004.621,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp101.558.703,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp35.445.918,00 atau 34,90% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	SMA Negeri	38.567.818,00	10.790.991,00
2	SMK Negeri	98.386.018,00	89.575.411,00
3	SLB Negeri	50.785,00	1.192.301,00
		137.004.621,00	**101.558.703,00**

5.3.1.1.1.4.7 Kas Dana Bantuan Pemerintah Pusat-Non SiLPA — Rp17.696.989,00

Kas Dana Bantuan Pemerintah sebesar Rp17.696.989,00 merupakan sisa Dana Bantuan Pemerintah per 31 Desember 2021 pada SMKN 2 Surakarta sebesar Rp17.696.989,00, sisa kas tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 17 Maret 2022. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp00,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp17.696.989,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.696.989,00	-
		17.696.989,00	-

5.3.1.1.1.4.8 Kas Dana Bantuan Pemerintah Pusat (Utang Pajak)-Non SiLPA — Rp275.300,00

Kas Dana Bantuan Pemerintah sebesar Rp275.300,00 merupakan Pajak bantuan pemerintah per 31 Desember 2021 pada SMK Negeri 1 Sragen. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp275.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	275.300,00	-
		275.300,00	-

Saldo kas pada sekolah sebesar Rp46.705.635.566,51 tidak termasuk di dalamnya:

a. Saldo kas unit swadaya SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Jawa Tengah per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal	:	3.208.078.951,00
Pendapatan	:	9.312.457.846,00
Belanja	:	8.778.231.142,00
Saldo akhir	:	3.742.303.655,00

b. Bantuan Pemerintah Pusat berupa uang pada Tahun Anggaran 2021 di 224 SMA, SMK, dan SLB Negeri di Jawa Tengah yang menerima dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Bantuan Pemerintah Pusat		82.790.198.246,00
Realisasi		82.253.617.645,00
Belanja Operasi	24.636.886.699,00	
Belanja Modal	57.616.730.946,00	
Sisa Saldo		536.580.601,00

5.3.1.1.1.5 Kas Lainnya **Rp00,00**

Kas Lainnya sebesar Rp00,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.656.600.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.656.600.000,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	555.600.000,00
2	SKPKD	-	2.101.000.000,00
		-	**2.656.600.000,00**

- Kas lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan dana Satgas *Covid-19* pada Bank Jateng dengan nomor rekening 1.057.00945.9 yang berasal dari sumbangan masyarakat/donatur sebesar Rp555.600.000,00 pada Tahun 2021 telah direalisasikan untuk memberi bantuan anak yatim, piatu, dan/atau yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena Covid 19 dengan mekanisme swakelola.
- Kas lainnya pada SKPKD merupakan Sisa dana Bantuan Sosial Siswa Miskin (BSM) SMA/SMK/SLB tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp2.101.000.000,00. Pada tanggal 5 Januari 2021 dana BSM Tahun 2020 telah disalurkan ke rekening siswa sebesar Rp273.000.000,00. Sedangkan sisanya sebesar Rp1.828.000.000,00 telah disetorkan ke rekening Bank Jateng pada tanggal 26 Februari 2021.

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah **Rp2.116.395.701.783,00**

Piutang Pajak Daerah sebesar Rp2.116.395.701.783,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.050.129.305.282,38 mengalami **kenaikan** sebesar Rp66.266.396.500,62 atau 3,23% dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.116.302.921.544,00	2.049.759.279.013,38
2	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-
3	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	-
4	Piutang Pajak Air Permukaan (PAP)	92.780.239,00	370.026.269,00
5	Piutang Pajak Rokok	-	-
	Jumlah	**2.116.395.701.783,00**	**2.050.129.305.282,38**

NO	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2021				Saldo Akhir
			Tambah		Kurang		
			Piutang	Koreksi	Pembayaran	Koreksi	
	Piutang Pajak	**2.050.129.305.282,38**	**1.037.060.914.314,00**	**11.296.943.130,62**	**982.091.460.944,00**	-	**2.116.395.701.783,00**
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.049.759.279.013,38	1.036.968.134.075,00	11.296.943.130,62	981.721.434.675,00	-	2.116.302.921.544,00
2	Pajak Air Permukaan	370.026.269,00	92.780.239,00	-	370.026.269,00	-	92.780.239,00
	Jumlah	**2.050.129.305.282,38**	**1.037.060.914.314,00**	**11.296.943.130,62**	**982.091.460.944,00**	-	**2.116.395.701.783,00**

PENJELASAN MUTASI PIUTANG PKB DIATAS SEBAGAI BERIKUT :

				5.439.018.093.887,00
1	**MUTASI PENAMBAHAN :**			**5.413.451.674.175,00**
	A. PENETAPAN PKB			
	Berdasarkan potensi obyek 2021		**4.894.204.425.425,00**	
	Penetapan atas potensi tahun berjalan 2021	3.857.236.291.350,00		
	Penetapan atas Piutang timbul 2021	1.036.968.134.075,00		
	ATAS PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN		**47.787.440.500,00**	
	s.d TH 2016	2.188.420.500,00		
	TH 2017	2.826.582.000,00		
	TH 2018	3.924.511.500,00		
	TH 2019	9.788.596.500,00		
	TH 2020	29.059.330.000,00		
	ATAS TRANSAKSI MUTASI DARI LUAR PROVINSI		**107.750.795.500,00**	
	ATAS PKB KENDARAAN BARU		**326.360.312.750,00**	
	ATAS OBYEK JATUH TEMPO 2022 DIBAYAR DI 2021		**37.348.700.000,00**	
				25.566.419.712,00
	B. KOREKSI TAMBAH			
	ATAS TAMBAH KEDALUARSA		28.706.200,00	
	ATAS HAPUS KEDALUARSA		1.918.165.050,00	
	ATAS PENETAPAN		23.619.548.462,00	
				5.372.474.636.356,00
2	**MUTASI PENGURANGAN :**			**4.758.837.286.600,00**
	A. PEMBAYARAN PKB			
	ATAS PIUTANG TAHUN LALU		**382.353.561.500,00**	
	2016	2.278.458.500,00		
	2017	6.249.952.000,00		

2018	14.936.129.500,00		
2019	39.434.574.000,00		
2020	319.454.447.500,00		
ATAS OBYEK JATUH TEMPO 2021		**3.857.236.476.350,00**	
ATAS OBYEK JATUH TEMPO 2022 DIBAYAR DI 2021		**37.348.700.000,00**	
ATAS PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN		**47.787.440.500,00**	
s.d TH 2016	2.188.420.500,00		
TH 2017	2.826.582.000,00		
TH 2018	3.924.511.500,00		
TH 2019	9.788.596.500,00		
TH 2020	29.059.330.000,00		
ATAS TRANSAKSI MUTASI MASUK DARI LUAR PROVINSI		**107.750.795.500,00**	
ATAS PKB KENDARAAN BARU		**326.360.312.750,00**	
B. KOREKSI KURANG			**14.269.476.581,00**
ATAS PENETAPAN		4.031.161.925,00	
ATAS PIUTANG TIDAK TERTAGIH		10.238.314.656,00	
C. PENGHAPUSAN (SK GUB NO. 973.1/191/2021 TGL. 30 DESEMBER 2021)			**599.367.873.175,00**
ATAS PIUTANG YANG KADALUARSA		599.367.873.175,00	
SALDO AKHIR PIUTANG PER 31 DESEMBER 2021			**2.116.302.736.544,00**

- Saldo Piutang PKB sebesar Rp2.116.302.921.544,00 menurut umur piutang sebagai berikut :

TAHUN JATUH TEMPO PIUTANG (UMUR PIUTANG)	PIUTANG (Rp.)
2017 (4 S.D 5 Tahun)	354.920.652.450,00
2018 (3 S.D 4 Tahun)	359.355.783.400,00
2019 (2 S.D 3 Tahun)	397.143.798.469,00
2020 (1 S.D 2 Tahun)	520.895.672.650,00
2021 (0 S.D 1 Tahun)	483.987.014.575,00
JUMLAH PIUTANG	**2.116.302.921.544,00**

- Penyelesaian Piutang PKB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). atas piutang Pajak Daerah tersebut dilakukan langkah-langkah penagihan secara *door to door* kepada wajib pajak; bekerjasama dengan BUMDES dan perangkat pemerintah di daerah maupun organisasi kemasyarakatan untuk memudahkan pembayaran Pajak Daerah, penambahan titik layanan dan pengembangan aplikasi pembayaran (Sakpole).
- Atas piutang yang tidak tertagih dilakukan penghapusbukuan oleh Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah, penghapusbukuan piutang tak tertagih yang dilakukan Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Piutang PKB status kadaluarsa sebesar Rp599.367.873.175,00
b. Koreksi pencatatan piutang tertagih sebesar Rp10.238.314.656,00 terdiri dari :
   - ✓ Piutang PKB yang telah dilakukan klarifikasi berstatus rusak berat melalui *door to door* kepada wajib pajak sebesar Rp1.735.628.450,00
   - ✓ Piutang PKB yang telah dilakukan klarifikasi berstatus hilang melalui *door to door* kepada wajib pajak sebesar Rp272.976.750,00
   - ✓ Piutang PKB yang telah dilakukan klarifikasi berstatus cabut registrasi sebesar Rp1.815.000,00
   - ✓ Piutang PKB dengan status kendaraan pindah ke provinsi lain dan koreksi nilai piutang lainnya sebesar Rp8.007.894.456,00
c. Koreksi Piutang yang telah terbayar namun masih tercatat sebagai piutang PKB sebesar Rp755.873.575,00

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah — Rp1.188.953.671,00

Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp1.188.953.671,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp977.885.351,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp211.068.320,00 atau 21,58% dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	1.156.912.071,00	928.658.751,00
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	32.041.600,00	49.226.600,00
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-
	Jumlah	**1.188.953.671,00**	**977.885.351,00**

No	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2021				Saldo Akhir
			Tambah		Kurang		
			Piutang	Koreksi	Pembayaran	Koreksi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)+(4)+(5)-(6)-(7)
1	Dinas Perhubungan	17.185.000,00			17.185.000,00		
2	Dinas Kesehatan	928.658,751,00	1.156.912.071,00		928.658,751,00		1.156.912.071,00
4	BPKAD	32.041.600,00					32.041.600,00
	Jumlah	**977.885.351,00**	**1.156.912.071,00**		**945.843.751,00**		**1.188.953.671,00**

5.3.1.1.3.1 Piutang Retribusi Jasa Umum — Rp1.156.912.071,00

Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.156.912.071,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp928.658.751,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp228.253.320,00 atau 24,58% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.156.912.071,00	928.658.751,00
2	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	-	-
3	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-
	Jumlah	**1.156.912.071,00**	**928.658.751,00**

5.3.1.1.3.1.1 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan — Rp1.156.912.071,00

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp1.156.912.071,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp928.658.751,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp228.253.320,00 atau 24,58% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.156.912.071,00	928.658.751,00
	Jumlah	**1.156.912.071,00**	**928.658.751,00**

5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi Jasa Usaha — Rp32.041.600,00

Piutang Retribusi Jasa Uasha sebesar Rp32.041.600,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp49.226.600,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp17.185.000,00) atau (34,91%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32.041.600,00	49.226.600,00
	Jumlah	**32.041.600,00**	**49.226.600,00**

5.3.1.1.3.2.1 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah — Rp32.041.600,00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp32.041.600,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp49.226.600,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp17.185.000,00) atau (34,91%) dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	-	17.185.000,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.041.600,00	32.041.600,00
	Jumlah	**32.041.600,00**	**49.226.600,00**

5.3.1.1.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah — Rp344.393.176.499,09

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp344.393.176.499,09, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp157.475.313.164,83 mengalami **kenaikan** sebesar Rp186.917.863.334,26 atau 118,70% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	758.763.959,00	1.043.382.630,70
2	Piutang Pendapatan Bunga	356.367.123,66	293.688.356,53
3	Piutang Pendapatan BLUD	343.278.045.416,43	156.138.242.177,60
	Jumlah	**344.393.176.499,09**	**157.475.313.164,83**

5.3.1.1.4.1 Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan — Rp758.763.959,00

Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp758.763.669,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.043.382.630,70 mengalami **penurunan** sebesar (Rp284.618.671,70) atau (27,28%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Moewardi (Parkir dan Ruangan)		222.550.171,70
2	RSUD Tugurejo	388.712.290,00	450.780.790,00
3	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	370.051.669,00	370.051.669,00
	Jumlah	**758.763.959,00**	**1.043.382.630,70**

5.3.1.1.4.2 Piutang Pendapatan Bunga — Rp356.367.123,66

Piutang Pendapatan Bunga sebesar Rp356.367.123,66 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp293.688.356,53 mengalami **kenaikan** sebesar Rp62.678.767,13 atau 21,34% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	179.589.041,10	272.260.273,97
2	RSUD Dr Moewardi Surakarta	173.394.520,55	
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	2.013.699,00	2.013.699,00
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.369.863,01	19.414.383,56
	Jumlah	**356.367.123,66**	**293.688.356,53**

5.3.1.1.4.3 Piutang Pendapatan BLUD — Rp343.278.045.416,43

Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp343.278.045.416,43 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp156.138.242.177,60 mengalami **kenaikan** sebesar Rp187.139.803.238,83 atau 119,86% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	88.821.840.729,00	44.319.905.478,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	124.563.586.617,65	69.775.101.310,66
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	32.731.003.566,00	6.565.234.618,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	69.974.157.920,60	19.756.012.599,60
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	16.030.292.462,18	3.769.255.255,34
6	RSJD Surakarta	657.683.460,00	6.676.358.648,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	10.499.480.661,00	5.276.374.268,00
	Jumlah	**343.278.045.416,43**	**156.138.242.177,60**

Piutang Pasien BLUD

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	5.772.884.757,00	5.491.871.454,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	8.695.466.494,90	8.017.314.833,91
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	1.078.519.887,00	962.029.927,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	2.920.413.349,60	2.705.448.471,60
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	92.154.544,18	137.053.155,34
6	RSJD Surakarta	655.623.460,00	714.604.092,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	203.399.051,00	207.141.855,00
	Jumlah	**19.418.461.543,68**	**18.235.463.788,85**

Piutang Jasa Pelayanan

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	83.048.955.972,00	38.828.034.024,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	115.868.120.122,75	61.757.786.476,75

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	31.652.483.679,00	5.603.204.691,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	67.053.744.571,00	17.050.564.128,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	15.868.650.438,00	3.632.202.100,00
6	RSJD Surakarta	380.000,00	5.961.754.556,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	10.296.081.610,00	5.069.232.413,00
	Jumlah	**323.788.416.392,75**	**137.902.778.388,75**

Piutang Lain-Lain BLUD

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	-
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	-	-
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	-	-
4	RSUD Tugurejo Semarang	-	-
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	69.487.480,00	-
6	RSJD Surakarta	1.680.000,00	-
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten		
	Jumlah	**71.167.480,00**	-

5.3.1.1.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat — Rp00,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp00,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp128.149.979.363,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp128.148.979.363,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Dana Perimbangan	-	128.148.979.363,00
	Jumlah	-	**128.148.979.363,00**

5.3.1.1.5.1 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan — Rp00,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp00,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp128.148.979.363,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp128.148.979.363,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH	-	128.148.979.363,00
	Jumlah	-	**128.148.979.363,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK/2021tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021.

5.3.1.1.5.1.1 Piutang Transfer Umum-DBH — Rp00,00

Piutang Transfer Umum-DBH sebesar Rp00,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp128.148.979.363,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp128.148.979.363,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Dana Transfer Umum-PBB	-	14.396.191.074,00
2	Piutang Dana Transfer Umum-PPh 21	-	96.677.581.630,00
4	Piutang Dana Transfer Umum-Cukai dan Tembakau	-	17.075.206.659,00
	Jumlah	**-**	**128.148.979.363,00**

5.3.1.1.6 Piutang Transfer Antar Daerah — Rp00,00

Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp00,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.269.762,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp12.269.762,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Bagi Hasil	-	-
2	Piutang Bantuan Keuangan	-	12.269.762,00
	Jumlah	**-**	**12.269.762,00**

5.3.1.1.7 Piutang Lainnya — Rp15.717.526.838,00

Piutang Lainnya sebesar Rp15.717.526.838,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16.019.421.662,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp301.894.824,00) atau (1,88%) dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	11.246.587.755,00	11.548.482.579,00
2	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	4.470.939.083,00	4.470.939.083,00
	Jumlah	**15.717.526.838,00**	**16.019.421.662,00**

Piutang Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut, belum termasuk di dalamnya piutang atas sisa pengembalian uang muka penghentian dan pemutusan kontrak PT Sinar Intan Papua Permai (berdasarkan SPK Nomor 027.2/GDG0,00IBS/IV/2015 tanggal 23 April 2015) atas pekerjaan perluasan dan rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodialisa, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar dan Penataan Taman pada RSUD Tugurejo Semarang sebesar Rp1.962.929.100,00. Penghentian pekerjaan tersebut dilakukan karena hingga tanggal 23 Desember 2015 PT Sinar Intan Papua Permai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan progres yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dan Pejabat Teknis Lapangan bersama Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tanggal 23 Desember 2015.

Atas permasalahan tersebut, RSUD Tugurejo sudah menindaklanjuti perintah Gubernur Jawa Tengah untuk mengupayakan pengembalian sisa jaminan uang muka ke Kas Daerah dengan tindakan sebagai berikut:

a. Surat Tagihan kepada PT Asuransi Recapital sebanyak 7 (tujuh) kali
b. Surat Pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 6 (lienam) kali

c. Pertemuan mediasi di OJK Perwakilan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 5 Desember 2018 dan 2 Februari 2018.
d. Surat permohonan penjelasan lebih lanjut kepada Deputi Komisioner Pengawasan IKNB II-OJK dan Kepada Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Ri tentang penghapusan PT Asuransi Recapital dari daftar perusahaan Asuransi Umum yang dapat memasukkan produk *Surety Bond* Non Konstruksi

Gugatan atas putus kontrak yang diajukan oleh PT Sinar Intan Papua Permai (SIPP) telah ditolak oleh Mahkamah Agung, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65.PK/TUN/2018 tanggal 8 Juni 2018, Nomor 159.PK/TUN/2018 tanggal 2 November 2018, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor putusan 281 K/KPDT/2020 dan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Sinar Intan Papua Permai Nomor 281.K/Pdt/2020 tanggal 18 Februari 2020. Implikasi dari penolakan gugatan atas putus kontrak ini mengharuskan PT Asuransi Recapital selaku penjamin uang muka pekerjaan untuk mengembalikan uang muka.Namun, sampai saat ini PT Asuransi Recapital belum mencairkan sisa jaminan uang muka dimaksud.

Terhadap hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan langkah lebih lanjut antara lain:

a. 21 Januari 2019 Surat dari RSUD Tugurejo Kepada DEPUTI Komisioner Pengawasan IKNB II-OJK dan kepada Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI perihal: Permohonan penjelasan lebih lanjut tentang penghapusan PT Asuransi Recapital dari daftar perusahaan Asuransi Umum yang dapat memasukan produk Surety Bond Non Kontrusksi
b. 11 Februari 2019 Surat Kementrian Keuangan RI No.S-184/PB/2019 tentang Penjelasan PT Asuransi Recapital dari Daftar Perusahaan Asuransi Umum yg dapat memasarkan Produk Surety Bond Non Kontruksi
c. 15 Februari 2019 Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-226/NB.21/2019 Kepada Direktur RSUD Tugurejo tentang Penyampaian Informasi Terkini Terkait PT Asuransi Recapital
d. 06 Maret 2019 Surat Tembusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.W.12.U/686/Pdt. 04/03/2019 Kepada Direktur RSUD Tugurejo tentang Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding.
e. 25 September 2020 Surat Permohonan Pendampingan Kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
f. 26 Oktober 2021 Pencairan Jaminan Uang Muka No. SMG/APB/05/2015/0122138-1 Jawaban Surat 181.3/4489 : PT Asuransi Recapital terkena Cabut Ijin Usaha Proses Likuidasi PT Asuransi

Recapital sedang berjalan dan belum masuk tahap pembayaran. PT Asuransi Recapital telah meminta konfirmasi ke PT SIPP, namun belum ada jawaban.

5.3.1.1.7.1 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang — Rp11.246.587.755,00

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp11.246.587.755,00 apablia dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.548.482.579,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp301.894.824,00) atau (2,61%) dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	11.246.587.755,00	11.548.482.579,00
		11.246.587.755,00	**11.548.482.579,00**

Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Biro Perekonomian-UMKM	1.710.392.264,00	1.710.392.264,00
2	Dinas Koperasi dan UKM	1.781.627.705,00	1.788.027.705,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.403.855.800,00	1.403.855.800,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	38.700.000,00	48.700.000,00
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.065.633.401,00	2.084.833.401,00
6	Dinas Kehutanan	2.882.500.000,00	2.882.500.000,00
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.363.878.585,00	1.630.173.409,00
	Jumlah	**11.246.587.755,00**	**11.548.482.579,00**

5.3.1.1.7.2 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang — Rp4.470.939.083,00

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang sebesar Rp4.470.939.083,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.470.939.083,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah	365.636.365,00	365.636.365,00
2	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat	4.105.302.718,00	4.105.302.718,00
		4.470.939.083,00	**4.470.939.083,00**

5.3.1.1.7.3 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah — Rp365.636.365,00

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp365.636.365,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp365.636.365,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Pendapatan dari Pengembalian (Dana Talangan Kab Cilacap)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	SKPKD	365.636.365,00	365.636.365,00
	Jumlah	**365.636.365,00**	**365.636.365,00**

5.3.1.1.7.4 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat — Rp4.105.302.718,00

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat sebesar Rp4.105.302.718,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.105.302.718,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat
Piutang Tempat Pelelangan Ikan

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.105.302.718,00	4.105.302.718,00
		4.105.302.718,00	**4.105.302.718,00**

5.3.1.1.8 Penyisihan Piutang — (Rp642.081.528.398,58)

Penyisihan Piutang sebesar (Rp642.081.528.398,58) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp418.683.863.540,78) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp223.397.664.857,80) atau 53,36% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(641.715.892.033,58)	(418.318.227.175,78)
2	Penyisihan Piutang Lainnya	(365.636.365,00)	(365.636.365,00)
	Jumlah	**(642.081.528.398,58)**	**(418.683.863.540,78)**

5.3.1.1.8.1 Penyisihan Piutang Pendapatan — (Rp641.715.892.033,58)

Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar (Rp641.715.892.033,58) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp418.318.227.175,78) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp223.397.664.857,80) atau 53,40% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(610.220.083.398,57)	(388.631.417.415,03)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(37.826.160,36)	(20.750.018,76)
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(16.106.092.001,65)	(14.012.274.444,60)
5	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
6	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
7	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(15.351.890.473,00)	(15.653.785.297,00)
	Jumlah	**(641.715.892.033,58)**	**(418.318.227.175,78)**

5.3.1.1.8.1.1 Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah — (Rp610.220.083.398,57)

Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah sebesar (Rp610.220.083.398,57 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp388.631.417.415,03) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp221.588.665.983,55) atau (57,02%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	(610.219.619.497,37)	(388.629.567.283,68)
2	Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
3	Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	-
4	Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	(463.901,20)	(1.850.131,35)
5	Penyisihan Piutang Pajak Rokok	-	-
	Jumlah	**(610.220.083.398,57)**	**(388.631.417.415,03)**

Rincian penyisihan piutang pajak Tahun 2021 berdasarkan umur piutang pada tabel berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	Keterangan	Saldo Awal Penyisihan Piutang	Kategori Penyisihan Piutang				Saldo Akhir
			0,50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Pajak	**610.220.083.398,57**	**2.420.398.974,07**	**52.089.567.265,00**	**555.710.117.159,50**	-	**610.220.083.398,57**
1	Pajak Kendaraan Bermotor	610.219.619.497,38	2.419.935.072,88	52.089.567.265,00	555.710.117.159,50		610.219.619.497,37
2	Pajak Air Permukaan	463.901,20	463.901,20				463.901,20

5.3.1.1.8.1.2 Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi (Rp37.826.160,36)

Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi sebesar (Rp37.826.160,36), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp20.750.018,76) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp17.076.141,60) atau (82,29%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	(5.784.560,36)	(4.643.293,76)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(32.041.600,00)	(16.106.725,00)
	Jumlah	**(37.826.160,36)**	**(20.750.018,76)**

Perhitungan penyisihan piutang retribusi daerah berdasarkan umur piutang per SKPD sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	Keterangan	Penyisihan Piutang	Kategori Penyisihan Piutang				Saldo Akhir
			0,50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Retribusi	**37.826.160,36**	**5.784.560,36**	-	-	**32.041.600,00**	**37.826.160,36**
1	**Dinas Kesehatan**	**5.784.560,36**	**5.784.560,36**	-	-	-	**5.784.560,36**
2	**BPKAD**	**32.041.600,00**	-	-	-	**32.041.600,00**	**32.041.600,00**

5.3.1.1.8.1.2.1 Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Rp5.784.560,36)

Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar (Rp5.784.560,36), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp4.643.293,76) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp1.141.266,60) atau 24,58% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	(5.784.560,36)	(4.643.293,76)
	Jumlah	**(5.784.560,36)**	**(4.643.293,76)**

5.3.1.1.8.1.2.2 Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah **(Rp32.041.600,00)**

Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar (Rp32.041.600,00), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp16.106.725,00) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp15.934.875,00) atau 98,93% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	-	(85.925,00)
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(32.041.600,00)	(16.020.800,00)
	Jumlah	**(32.041.600,00)**	**(16.106.725,00)**

5.3.1.1.8.1.3 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah **(Rp16.106.092.001,65)**

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar (Rp16.106.092.001,65), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp14.012.274.445,00) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp2.093.817.556,65) atau 14,94% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	(370.051.669,00)	(370.051.669,00)
2	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(15.736.040.332,65)	(13.642.222.776,00)
	Jumlah	**(16.106.092.001,65)**	**(14.012.274.445,00)**

Perhitungan penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah berdasarkan umur piutang per SKPD sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	Keterangan	Penyisihan Piutang	Kategori Penyisihan Piutang				Saldo Akhir
			0,50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**16.106.092.001,64**	**1.628.827.142,67**	**283.115.415,80**	**1.602.444.343,24**	**12.591.705.099,94**	**16.106.092.001,64**
1	Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata	370.051.669,00	-	-	-	370.051.669,00	370.051.669,00
2	RSUD Moewardi	4.489.579.744,13	419.547.772,63	59.342.202,50	481.568.929,00	3.529.120.840,00	4.489.579.744,13
3	RSUD Margono	6.473.663.370,56	585.389.710,45	127.365.936,20	630.666.483,00	5.130.241.240,91	6.473.663.370,56
4	RSUD Tugurejo	2.448.688.792,42	335.701.902,22	85.392.936,10	340.966.452,50	1.686.627.501,60	2.448.688.792,42
5	RSUD Kelet	166.469.831,71	79.692.533,05	309.128,00	2.226.402,24	84.241.768,43	166.469.831,71
6	RSJD Amino	1.314.988.118,50	156.925.457,50	9.133.997,00	107.657.192,00	1.041.271.472,00	1.314.988.118,50
7	RSJD Solo	614.836.775,04	65.796,84	1.063.614,20	20.180.586,00	593.526.778,00	614.836.775,04
8	RSJD Soedjarwadi	227.813.700,29	51.503.969,99	507.601,80	19.178.298,50	156.623.830,00	227.813.700,29

5.3.1.1.8.1.3.1 Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD **(Rp370.051.669,00)**

Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar (Rp370.051.669,00), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp370.051.669,00) tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	(370.051.669,00)	(370.051.669,00)
	Jumlah	**(370.051.669,00)**	**(370.051.669,00)**

5.3.1.1.8.1.3.2 Penyisihan Piutang BLUD (Rp15.736.040.332,65)

Penyisihan Piutang BLUD sebesar (Rp15.736.040.332,65), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp13.642.222.776,00) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp2.093.817.556,65) atau 15,35% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(4.489.579.744,14)	(3.731.204.083,82)
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(6.473.663.370,56)	(5.745.274.072,97)
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(1.314.988.118,50)	(1.074.555.587,50)
4	RSUD Tugurejo Semarang	(2.448.688.792,42)	(2.105.729.518,07)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(166.469.831,71)	(101.640.240,78)
6	RSJD Surakarta	(614.836.775,04)	(680.979.663,39)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(227.813.700,29)	(202.839.609,48)
	Jumlah	**(15.736.040.332,65)**	**(13.642.222.776,00)**

Penyisihan Piutang Pasien

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(4.069.367.147,04)	(3.533.801.388,15)
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(5.458.164.226,74)	(5.043.897.900,08)
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(771.903.458,00)	(668.812.796,00)
4	RSUD Tugurejo Semarang	(1.510.029.486,42)	(1.404.214.761,18)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(85.129.170,52)	(82.491.286,88)
6	RSJD Surakarta	(614.826.475,04)	(651.101.590,61)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(176.326.443,33)	(177.396.375,91)
	Jumlah	**(12.685.746.407,08)**	**(11.561.716.098,79)**

Penyisihan Piutang Jasa Pelayanan

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(419.345.624,50)	(196.289.944,82)
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(1.014.601.198,61)	(700.014.871,52)
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(543.074.592,00)	(405.732.723,00)
4	RSUD Tugurejo Semarang	(920.101.804,55)	(682.646.912,95)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(79.343.252,19)	(18.161.010,50)
6	RSJD Surakarta	(1.900,00)	(29.808.772,78)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(51.480.408,05)	(25.346.162,06)
	Jumlah	**(3.027.948.779,90)**	**(2.058.000.397,62)**

Penyisihan Piutang BLUD Lainnya

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(866.972,60)	(1.112.750,86)
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(897.945,21)	(1.361.301,37)
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(10.068,50)	(10.068,50)
4	RSUD Tugurejo Semarang	(18.557.501,45)	(18.867.843,95)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(1.997.409,00)	(987.943,40)
6	RSJD Surakarta	(8.400,00)	(69.300,00)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(6.848,91)	(97.071,52)
	Jumlah	**(22.345.145,67)**	**(22.506.279,59)**

5.3.1.1.8.1.4 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya (Rp15.351.890.473,00)

Penyisihan Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya sebesar (Rp15.351.890.473,00), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp15.653.785.297,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp301.894.824,00 atau (1,93%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain	(15.351.890.473,00)	(15.653.785.297,00)
	Jumlah	**(15.351.890.473,00)**	**(15.653.785.297,00)**

Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	SKPKD	(11.246.587.755,00)	(11.548.482.579,00)
	Jumlah	**(11.246.587.755,00)**	**(11.548.482.579,00)**

Penyisihan Piutang Pelelangan

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	(4.105.302.718,00)	(4.105.302.718,00)
	Jumlah	**(4.105.302.718,00)**	**(4.105.302.718,00)**

Rincian penyisihan piutang pendapatan lainnya 2021 berdasarkan umur piutang pada tabel berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	Keterangan	Penyisihan Piutang UnAudited	Kategori Penyisihan Piutang				Saldo Akhir
			0,50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	**15.351.890.473,00**	-	-	-	**15.351.890.473,00**	**15.351.890.473,00**
1	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	11.246.587.755				11.246.587.755	11.246.587.755
2	Piutang Tempat Pelelangan Ikan	4.105.302.718,00				4.105.302.718,00	4.105.302.718,00

5.3.1.1.8.2 Penyisihan Piutang Lainnya (Rp365.636.365,00)

Penyisihan Piutang Lainnya sebesar (Rp365.636.365,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp365.636.365,00) tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		
2	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain	(365.636.365,00)	(365.636.365,00)
3	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank		
		(365.636.365,00)	**(365.636.365,00)**

Rincian penyisihan piutang lainnya 2021 berdasarkan umur piutang pada tabel berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	Keterangan	Penyisihan Piutang Audited	Kategori Penyisihan Piutang				Saldo Akhir
			0,50%	10%	50%	100%	
	Piutang Pendapatan Lainnya	**11.612.224.120**	-	-	-	**11.612.224.120**	**11.612.224.120**
1	Piutang Dana Talangan kpd Kab Cilacap	365.636.365				365.636.365	365.636.365

5.2.1.1.8.2.1 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain (Rp365.636.365,00)

Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain sebesar (Rp365.636.365,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp365.636.365,00) tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian (Dana Talangan Kab Cilacap)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	SKPKD	(365.636.365,00)	(365.636.365,00)
	Jumlah	**(365.636.365,00)**	**(365.636.365,00)**

5.3.1.1.9 Beban Dibayar Dimuka Rp5.756.838.225,90

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp5.756.838.225,90 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.144.929.018,16 mengalami **penurunan** sebesar (Rp388.090.792,26) atau (6,32%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	643.042.480,01	186.066.314,46
2	Dinas Kesehatan	681.771.316,00	437.400.035,82
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	562.081.720,16	517.491.080,02
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	406.891.692,81	396.681.451,71
5	RSUD Tugurejo Semarang	71.514.067,77	69.999.886,83
6	RSJD Surakarta	13.143.131,86	14.216.542,38
7	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	198.662.476,32	55.984.051,47
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya	3.743.419,18	-
9	Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	150.017.783,85	180.743.994,41
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	99.822.372,06	87.650.507,38
11	Satuan Polisi Pamong Praja	109.630.920,97	93.611.902,58
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.386.995,44	17.745.476,61
13	Dinas Sosial	127.328.359,32	135.866.286,36
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	74.639.572,34	148.749.155,48
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	98.833.042,32	101.225.768,71
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	25.275.352,84	25.798.767,13
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	140.051.072,05	138.901.110,29
18	Dinas Ketahanan Pangan	82.830.994,00	83.207.715,73
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72.438.793,18	70.404.731,49

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
20	Dinas Perhubungan	213.172.400,00	217.174.808,22
21	Dinas Koperasi dan UKM	78.571.627,21	664.923.712,75
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		-
23	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	163.731.356,00	269.861.998,00
24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	31.309.135,80	32.807.453,64
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	114.357.138,10	91.543.111,34
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	91.938.783,58	235.011.059,00
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	43.989.333,33
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	14.415.599,19	12.549.021,79
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	142.664.824,32	167.089.135,99
30	Sekretariat Daerah	106.474.839,78	366.418.698,56
31	Sekretariat DPRD	276.357.357,09	262.388.737,64
32	Inspektorat	125.580.046,51	112.813.216,33
33	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	611.067.805,14	610.143.573,86
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	91.605.143,58	185.356.625,08
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	10.304.819,39	16.025.562,83
36	Badan Penghubung	106.181.787,74	95.088.190,93
	Jumlah	**5.756.838.225,90**	**6.144.929.018,16**

5.3.1.1.10 Persediaan — Rp513.729.554.970,09

Persediaan sebesar Rp513.729.554.970,09 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp511.593.784.744,03 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.135.770.226,06 atau 0,42% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Barang Pakai Habis	513.673.181.320,09	511.593.784.744,03
2	Barang Tak Habis Pakai	55.317.650,00	-
3	Barang Bekas Pakai	1.056.000,00	-
	Jumlah	**513.729.554.970,09**	**511.593.784.744,03**

5.3.1.1.10.1 Barang Pakai Habis — Rp513.673.181.320,09

Barang Pakai Habis sebesar Rp513.673.181.320,09 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp511.593.784.744,03 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.079.396.576,06 atau 0,41% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bahan	158.643.062.505,56	24.799.024.935,62
2	Suku Cadang	19.812.924.154,41	31.831.000,00
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	246.987.359.102,41	314.524.795.640,66
4	Obat-obatan	78.243.063.518,00	164.484.619.880,25
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	3.237.124.148,00	738.350.000,00
6	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	1.939.300,00	68.206.700,00
7	Natura dan Pakan	5.777.922.828,21	6.946.956.587,50
8	Persediaan Penelitian	969.785.763,50	-
9	Persediaan dalam Proses	-	-
	Jumlah	**513.673.181.320,09**	**511.593.784.744,03**

5.3.1.1.10.1.1 Bahan — Rp158.643.062.505,56

Bahan sebesar Rp158.643.062.505,56 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp24.799.024.935,62 mengalami **kenaikan** sebesar Rp133.844.037.569,94 atau 539,71% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	746.547.808,75	34.279.200,00
2	Dinas Kesehatan	135.029.494.022,05	1.526.606.576,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	10.994.191.102,00	6.316.697.924,48
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	1.388.562.842,02	1.836.699.615,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	41.909.116,00	1.294.998.905,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	2.793.000,00	125.951.130,86
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	101.231.030,00	243.166.398,28
8	RSJD Surakarta	255.100,00	-
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	43.335.440,00	191.478.825,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.155.368.656,16	1.878.183.833,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	166.506.160,00	411.732.525,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	60.000,00	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	-	-
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	312.120.500,00	369.023.550,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	690.801.630,08	560.319.855,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	45.000,00	-
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	322.179.818,50	1.136.331.507,00
22	Dinas Pertanian dan Perkebunan	427.438.007,00	1.559.955.257,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.203.396.255,00	7.304.230.834,00
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.587.000,00	-
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.012.000,00	-
26	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.228.018,00	9.369.000,00
28	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**158.643.062.505,56**	**24.799.024.935,62**

5.3.1.1.10.1.2 Suku Cadang — Rp19.812.924.154,41

Suku Cadang sebesar Rp19.812.924.154,41 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp31.831.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp19.781.093.154,41 atau 62.144,11% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.522.335.119,00	-
2	Dinas Kesehatan	2.212.787.296,17	-
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	12.680.875.017,24	-
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	601.000,00	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	-	-
6	RSUD Tugurejo Semarang	-	-
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	158.991.673,00	-
8	RSJD Surakarta	13.411.629,50	-
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	749.279.110,50	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	67.913.004,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.569.000,00	-
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
13	Dinas Ketahanan Pangan	-	6.150.000,00
14	Dinas Perhubungan	210.275.307,00	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	547.800,00	-
16	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	178.040.095,00	-
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	17.676.000,00
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	9.298.103,00	8.005.000,00
20	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**19.812.924.154,41**	**31.831.000,00**

5.3.1.1.10.1.3 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor — Rp246.987.359.102,41

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp246.987.359.102,41 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp314.524.795.640,66 mengalami **penurunan** sebesar (Rp67.537.436.538,25) atau (21,47%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	23.337.849.651,18	18.302.420.498,43
2	Dinas Kesehatan	187.921.988.346,07	188.449.606.741,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	3.378.956.861,60	17.850.815.704,05
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	6.118.144.678,37	7.915.972.056,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	5.918.351.689,16	1.449.012.797,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	3.305.975.764,90	4.903.806.319,18
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	1.413.742.517,30	2.387.221.901,63
8	RSJD Surakarta	421.530.438,20	319.958.977,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.590.679.677,61	3.524.152.221,37
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	187.808.975,00	98.817.625,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	776.500,00	750.000,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	53.619.000,00	17.717.476,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.892.200,00	27.066.500,00
15	Dinas Sosial	20.893.149,00	13.970.000,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.480.405.029,40	6.337.598.672,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.393.850,00	29.208.650,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	5.348.500,00	3.976.500,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.503.200,00	52.098.200,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.001.928,00	3.496.500,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
21	Dinas Ketahanan Pangan	5.390.000,00	20.025.113,00
22	Dinas Perhubungan	381.282.800,00	492.561.745,00
23	Dinas Koperasi dan UKM	1.610.000,00	5.387.200,00
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8.321.045,00	1.825.000,00
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	1.571.900,00	631.000,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	170.847.850,00	381.967.550,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	108.968.935,00	76.923.441,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	123.880.526,72	-
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	163.564.485,00	202.522.700,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	210.944.416,00	378.540.790,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	17.935.700,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	120.780.190,00	117.104.483,00
33	SKPKD	-	55.883.894.441,00
34	Sekretariat Daerah	1.377.000,00	15.356.000,00
35	Sekretariat DPRD	3.824.600,00	14.305.000,00
36	Inspektorat	1.170.100,00	3.411.100,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.588.925,00	14.586.625,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.906.899.791,90	4.578.495.604,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	51.329.900,00	85.376.500,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	302.171.892,00	347.419.810,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	148.308.290,00	176.784.000,00
42	Badan Penghubung	38.664.500,00	22.074.500,00
	Jumlah	**246.987.359.102,41**	**314.524.795.640,66**

5.3.1.1.10.1.4 Obat-Obatan — Rp78.243.063.518,00

Obat-Obatan sebesar Rp78.243.063.518,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp164.484.619.880,25 mengalami **penurunan** sebesar (Rp86.241.556.362,25) atau (52,43%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	467.951.170,00	
2	Dinas Kesehatan	18.262.674.005,16	87.243.583.400,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	22.652.000.916,73	26.414.178.975,99
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	25.075.538.242,76	38.255.421.152,95
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	3.199.052.456,95	1.459.823.365,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	3.156.754.034,80	3.844.938.774,65
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	1.180.779.086,10	3.599.775.533,87
8	RSJD Surakarta	2.022.246.677,66	2.326.856.122,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.212.711.181,84	1.152.630.895,79
10	Dinas Sosial	6.915.391,00	7.362.494,00
11	Dinas Pertanian dan Perkebunan	717.340.700,00	94.490.471,00
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	250.442.930,00	79.580.844,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	80.340,00	1.887.561,00
14	Sekretariat Daerah	4.403.730,00	442.290,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.978.000,00	-
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16.872.000,00	-
17	Satuan Polisi Pamong Praja	75.000,00	-
18	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	10.247.655,00	3.648.000,00
	Jumlah	**78.243.063.518,00**	**164.484.619.880,25**

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi terdapat persediaan yang kadaluarsa diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan kadaluarsa per 31 Desember 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa obat-obatan dan alat kesehatan sebesar Rp1.040.187.837 terdiri dari:

Persediaan Kadaluarsa/Rusak
Obat, Bahan Medis dan Alat Kesehatan Habis Pakai
di Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah
per 31 desember 2021

No	Rumah Sakit Daerah	Obat/Reagen	Alkes Habis Pakai
1	RSUD Moewardi	209.128.256	93.249.329
2	RSUD Margono Sukarjo	45.834.427	27.232.592
3	RSUD Tugurejo	140.406.359	253.666.484
4	RSUD Kelet	50.375.500	-
5	RSJD Amino Gondohutomo	-	-
6	RSJD Surakarta	33.257.445	-
7	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	17.138.575	-
Total		**496.140.561**	**374.148.405**

Persediaan Kadaluarsa/Rusak
Obat, Bahan Medis dan Alat Kesehatan Habis Pakai
di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
per 31 desember 2021

No	Balai Kesehatan	Obat/Reagen	Alkes Habis Pakai
1	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	23.341.872.793	
2	Balai Kesehatan Masyarakat Pati	76.234.964	
3	Balai Kesehatan Masyarakat Magelang	342.444.315	
4	Balai Kesehatan Masyarakat Ambarawa	35.378.435	3.128.645
5	Balai Kesehatan Indera Masyarakat	198.565.477	
6	Balai Kesehatan Masyarakat Semarang	238.091.329	58.433.900
7	Balai Kesehatan Masyarakat Klaten	13.386.975	8.555.976
Total		**24.245.974.288**	**70.118.521**

Selain itu, dalam persediaan obat juga ada persediaan reagen PCR yang terdapat pada Balabkes dan PAK dengan rincian:

No	NAMA BARANG	TGL EXP	JUMLAH
1	Reagen PCR ALLPLEX	14-Jun-21	46 box @ 100 Test
2	Reagen PCR ALLPLEX	19-Jun-21	72 box @ 100 Test
3	Reagen PCR Mbiocov	Sep-21	30 box @ 100 Test
4	Reagen PCR Mbiocov	Nov 2021	60 box @100 Test
5	VTM SORFA	01-Sep-21	12 box @ 50 Test

No	NAMA BARANG	TGL EXP	JUMLAH
6	Uni Medica	24-Jul-21	13 box @ 50 Test
7	Rapid Test Device Covid-19 Ag (Merk Abbott)	09-Mar-22	27 box @ 25 Test

Selain itu, dalam persediaan obat juga ada persediaan Vaksin Covid 19 yang tidak termasuk dalam rincian persedian obat, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Vaksin	Satuan	Jumlaah	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Coronavac	Vial	77.464	Dosis	201.344	
2	Astrazeneca	Vial	59.748	Dosis	585.964	
3	Sinopharm	Vial	70	Dosis	70	Perhitungan 1 Vial ke dosis sesuai dengan standar Kemenkes per jenis vaksin
4	Moderna	Vial	22.134	Dosis	221.340	
5	Pfizer	Vial	164.562	Dosis	987.372	
6	Johnson & Johnson	Vial	7.380	Dosis	36.900	
JUMLAH		Vial	331.358	Dosis	2.032.990	

5.3.1.1.10.1.5 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan — Rp3.237.124.148,00

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp3.237.124.148,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp738.350.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.498.774.148,00 atau 338,43% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	441.125.848	-
2	Dinas Kesehatan	27.720.100,00	-
3	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	738.350.000,00	738.350.000,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.210.000,00	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja	90.000,00	-
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.027.628.200,00	-
	Jumlah	**3.237.124.148,00**	**738.350.000,00**

5.3.1.1.10.1.6 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga — Rp1.939.300,00

Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga sebesar Rp1.939.300,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp68.206.700,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp66.267.400,00) atau (97,16%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.939.300,00	36.846.700,00
2	SKPKD	-	31.360.000,00
	Jumlah	**1.939.300,00**	**68.206.700,00**

5.3.1.1.10.1.7 Natura dan Pakan — Rp5.777.922.828,21

Natura dan Pakan sebesar Rp5.777.922.828,21 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.946.956.587,50 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.169.033.759,29) atau (16,83%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	149.191.055,00	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
2	Dinas Kesehatan	194.216.937,00	1.159.096.977,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	78.225.293,10	59.299.190,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	126.571.123,68	185.389.691,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	83.194.065,43	210.838.985,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	37.690.170,00	58.884.758,50
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	119.878.290,00	38.888.368,00
8	RSJD Surakarta	28.541.010,00	19.507.850,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	23.396.739,00	51.785.118,00
10	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	265.468.505,00	730.653.900,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	2.322.912.500,00	2.262.932.950,00
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.151.164.625,00	2.100.595.800,00
13	SKPKD	-	69.083.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Khutanan	7.643.090,00	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	189.829.425,00	-
	Jumlah	**5.777.922.828,21**	**6.946.956.587,50**

5.3.1.1.10.1.8 Persediaan Penelitian — Rp969.785.763,50

Persediaan Penelitian sebesar Rp969.785.763,50 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp00,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp969.785.763,50 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	45.302.050	-
2	Dinas Kesehatan	6.517.500	-
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	442.976.137,50	-
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	335.238.086,00	-
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.071.990,00	-
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	127.680.000,00	-
	Jumlah	**969.785.763,50**	-

5.3.1.1.10.2 Barang Tak Pakai Habis — Rp55.317.650,00

Persediaan Barang Tak Pakai Habis sebesar Rp55.317.650,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp00,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp55.317.650,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Komponen	11.735.000,00	-
2	Pipa	43.582.650,00	-
	Jumlah	**55.317.650,00**	-

5.3.1.1.10.2.1 Komponen — Rp11.735.000,00

Persediaan Komponen sebesar Rp11.735.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp00,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp11.735.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	11.735.000,00	-
	Jumlah	**11.735.000,00**	-

5.3.1.1.10.2.2 Pipa — Rp43.582.650,00

Persediaan Pipa sebesar Rp43.582.650,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp00,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp43.582.650,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	28.117.650,00	-
2	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	94.000,00	-
3	RSJD Surakarta	14.981.000,00	-
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	390.000,00	-
	Jumlah	**43.582.650,00**	-

5.3.1.1.10.3 Barang Bekas Pakai — Rp1.056.000,00

Persediaan Barang Bekas Pakai sebesar Rp1.056.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp00,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.056.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	1.056.000,00	-
	Jumlah	**1.056.000,00**	-

5.3.1.1.10.3.1 Komponen Bekas dan Pipa Bekas — Rp1.056.000,00

Persediaan Komponen Bekas dan Pipa Bekas sebesar Rp1.056.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp00,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.056.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	756.000,00	-
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	300.000,00	-
		1.056.000,00	-

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG — Rp7.454.908.269.377,92

Investasi Jangka Panjang sebesar Rp7.454.908.269.377,92 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.424.346.793.977,35 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.030.561.475.400,57 atau 16,04% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	7.454.908.269.377,92	6.424.346.793.977,35
	Jumlah	**7.454.908.269.377,92**	**6.424.346.793.977,35**

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen — Rp7.454.908.269.377,92

Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp7.454.908.269.377,92 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.424.346.793.977,35 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.030.561.475.400,57 atau 16,04% dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penyertaan Modal	7.454.908.269.377,92	6.424.346.793.977,35
2	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
	Jumlah	**7.454.908.269.377,92**	**6.424.346.793.977,35**

5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal — Rp7.454.908.269.377,92

Penyertaan Modal sebesar Rp7.454.908.269.377,92 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.424.346.793.977,35 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.030.561.475.400,57 atau 16,04% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bank Jateng	4.181.024.376.961,98	3.845.413.022.086,73
2	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BPR & BKK	721.793.377.015,16	689.741.731.327,01
3	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BKK Jateng	158.095.685.200,87	133.099.314.466,05
4	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Asuransi Bangun Askrida	19.960.000.000,00	19.960.000.000,00
5	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT PRPP	26.813.471.851,16	37.626.731.922,01
6	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAB Tirta Utama	126.431.424.812,00	122.485.985.699,00
7	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Citra Mandiri Jawa Tengah	178.359.282.602,00	181.033.786.183,00
8	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	1.029.653.382.679,22	1.033.878.142.182,56
9	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jawa Tengah Petrolium Energy	171.673.110.100,00	81.877.387.235,00
10	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jamkrida	164.318.755.476,86	161.647.785.218,92
11	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma	676.785.402.678,67	117.582.907.657,07
	Jumlah	**7.454.908.269.377,92**	**6.424.346.793.977,35**

Metode penilaian investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 6 Paragraf 36 dan 37. Seluruh Investasi Permanen disajikan dengan menggunakan metode ekuitas kecuali penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida yang menggunakan metode biaya. Berikut di bawah ini perhitungan nilai dengan menggunakan metode ekuitas:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bank Jateng	4.181.024.376.961,98	3.845.413.022.086,73
2	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BPR & BKK	721.793.377.015,16	689.741.731.327,01
3	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BKK Jateng	158.095.685.200,87	133.099.314.466,05
4	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Asuransi Bangun Askrida	19.960.000.000,00	19.960.000.000,00
5	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT PRPP	26.813.471.851,16	37.626.731.922,01
6	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAB Tirta Utama	126.431.424.812,00	122.485.985.699,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
7	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Citra Mandiri Jawa Tengah	178.359.282.602,00	181.033.786.183,00
8	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	1.029.653.382.679,22	1.033.878.142.182,56
9	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jawa Tengah Petrolium Energy	171.673.110.100,00	81.877.387.235,00
10	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jamkrida	164.318.755.476,86	161.647.785.218,92
11	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma	676.785.402.678,67	117.582.907.657,07
	Jumlah	**7.454.908.269.377,92**	**6.424.346.793.977,35**

Dengan menggunakan metode biaya (Cost Method) penyertaan modal kepada BUMD maupun non BUMD disajikan sebagai berikut:

Cost Method :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bank Jateng	1.155.721.000.000,00	1.155.721.000.000,00
2	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BPR & BKK	570.707.718.716,00	570.707.718.716,00
3	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BKK Jateng	-	-
4	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Asuransi Bangun Askrida	19.960.000.000,00	19.960.000.000,00
5	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT PRPP	39.252.200.004,00	39.252.200.004,00
6	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAB Tirta Utama	87.085.000.000,00	87.085.000.000,00
7	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Citra Mandiri Jawa Tengah	31.861.846.791,00	31.861.846.791,00
8	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	689.442.000.000,00	689.442.000.000,00
9	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jawa Tengah Petrolium Energy	15.000.000.000,00	-
10	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jamkrida	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00
11	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma	-	-
	Jumlah	**2.749.029.765.511,00**	**2.734.029.765.511,00**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi dan Akta Pendirian PT Jateng Petro Energi (Perseroda) Nomor 29 tanggal 8 Oktober 2020 (Notaris Dewi Wikaningsih, SH, M.Kn) dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000.000,00 terbagi atas 100.000 lembar saham masing-masing bernilai Rp1.000.000,00. Dari modal dasar dimaksud telah disetorkan atau ditempatkan sebesar 25% atau sejumlah 25.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00.

Sumber modal disetor Pemerintah Provinsi Jateng sebesar Rp25.000.000.000,00 berasal dari pengalihan saham Pemerintah Provinsi Jateng pada PT SPHC sebesar Rp10.223.766.000,00 atau setara sebanyak 10.200 lembar saham dan sebesar Rp14.776.234.000,00 atas pengalihan ekuitas dari PT Sarana Patra Hulu Cepu yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai amanat RUPS LB PT SPHC Nomor 68 dan RUPS LB PT Jateng Petro Energi (Perseroda) Nomor 69 tanggal 12 November 2020 (Notaris Dewi Wikaningsih, SH, M.Kn).

Cadangan PT. SPHC posisi sebelum menjadi anak perusahaan PT. JPEN (sebelum 12 November 2020) adalah hak pemegang saham pada saat itu, yaitu Pemprov. Jateng dan Yakekar (proporsional sesuai proporsi saham). Cadangan PT. SPHC posisi tanggal 11 November 2020 adalah sebesar Rp 57.626.168.482,-, yang merupakan hak Pemprov. Jateng sebesar Rp 55.038.753.517,- dan hak Yakekar sebesar Rp 2.587.414.965,-. Cadangan yang menjadi hak Pemprov. Jateng telah dialihkan sebagai penyertaan modal Pemprov. Jateng di PT. JPEN sebesar Rp 14.776.234.000,-, sehingga sisa cadangan yang menjadi hak Pemprov. Jateng adalah sebesar Rp 40.262.519.517,-. Sisa cadangan ini masih tersimpan di PT. SPHC dan menjadi kewajiban PT. SPHC kepada Pemprov. Jateng.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dalam Pasal 2 disebutkan bahwa PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang merupakan penggabungan 29 (dua puluh sembilan) PD BKK di Jawa Tengah diantaranya adalah PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dan pada RUPS-LB tanggal 2 Juli 2019, salah satu amanatnya menyebutkan bahwa RUPS menyetujui Penggabungan 27 PD BKK (tanpa PD BKK PRINGSURAT dan PD BKK KLATEN) menjadi PT BKK JAWA TENGAH.

Terhitung sejak tidak diikutkannya konsolidasi, maka PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam proses untuk likuidasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. PD BKK PRINGSURAT
   - ✓ Berhenti Operasional dikarenakan tidak mempunyai likuiditas
   - ✓ Performa keuangan berhenti per 29 Juni 2019 (audited)
   - ✓ Nilai investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan laporan keuangan per 29 Juni 2019 sebesar (Rp119.703.975.952,00)

b. PD BKK KLATEN
   - ✓ Beroperasional secara terbatas dan fokus untuk proses likuidasi serta menjaga kepercayaan nasabah;
   - ✓ Secara bertahap mengurangi jumlah pegawai dan beroreintasi pada efisiensi biaya dan menjaga posisi likuiditas.
   - ✓ Performa keuangan masih tercatat periodik dan tiap tahun dilakukan audit.

- ✓ Nilai investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp31.063.731.395,34)

Sampai dengan tanggal pemeriksaan, pada tanggal 16 Maret 2021 telah diundangkan Perda No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, namun belum diundangkan Pergub untuk petunjuk pelaksanaannya. Klausul pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dituangkan dalam pasal 76A.

Sebagai tindak lanjut telah dibuat draft Pergub tentang Pembubaran Dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten serta draft Tim Pembubaran dan Likuidasi serta penyusunan SOP.

5.3.1.3 Aset Tetap — Rp26.362.173.533.902,41

Aset Tetap sebesar Rp26.362.173.533.902,41 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp25.972.626.841.373,76 mengalami **kenaikan** sebesar Rp389.546.692.528,65 atau 1,50% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Tanah	13.583.627.731.544,00	13.483.227.890.359,00
2	Peralatan dan Mesin	7.529.773.129.665,00	6.808.241.676.514,00
3	Gedung dan Bangunan	7.920.921.189.200,00	7.563.815.353.072,00
4	Jalan,Irigasi, dan Jaringan	10.585.831.733.218,00	10.192.168.636.636,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.472.453.852.706,00	1.365.494.887.464,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	788.310.129.085,00	737.058.609.225,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(15.518.744.231.515,59)	(14.177.380.211.896,24)
	Jumlah	**26.362.173.533.902,41**	**25.972.626.841.373,76**

Nilai Aset tetap setelah dilakukan penyusutan sebesar (Rp15.518.744.231.515,60) dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.837.047.301.241,31)	(5.209.658.138.204,90)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.145.263.849.523,92)	(1.994.887.391.629,88)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(7.534.456.813.217,39)	(6.971.333.399.289,46)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.976.267.532,97)	(1.501.282.772,00)
	Jumlah	**(15.518.744.231.515,59)**	**(14.177.380.211.896,24)**

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	40.150.007.053.270
Penambahan	-
Belanja Modal	1.447.620.411.245
Belanja Hutang	2.668.401.804
Belanja Barang/Jasa	33.932.930.017
Hibah	171.119.928.507

Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	5.899.988.824
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	134.286.378.555
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	74.040.000
Koreksi	466.521.895.388
Jumlah	**2.948.527.348.051**
Berkurang	
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	32.978.239.357
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	762.978.423.176
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	65.477.871.990
Koreksi Belanja Modal	14.746.083.927
Koreksi Belanja Hutang	14.023.081.493
Koreksi Tahun Lalu	14.023.081.493
Jumlah	**1.217.616.635.903**
Grand Total	**41.880.917.765.418**

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2021.
b. Belanja Hutang adalah aset tetap yang diterima dari pengadaan aset tahun 2021 akan tetapi pelunasan pembayannya dilaksanakan tahun depan.
c. Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2021 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
d. Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
e. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
f. Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
g. Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel adalah aset ekstrakomtabel yang dicatatkan dalam Kartu Inventaris Barang atau aset tetap dikarenakan pemeliharaan sehingga meningkatkan nilai aset.
h. Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

a. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
b. Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.

c. Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
d. Koreksi Belanja Modal pengurangan nilai aset tetap dikarenakan perolehannya berasal dari jenis belanja lainnya.
e. Koreksi Belanja Hutang pengurangan nilai aset tetap dikarenakan perolehannya berasal dari tahun sebelumnya dan baru dibayarkan pada tahun selanjutnya.
f. Koreksi Tahun Lalu adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

Aset Tetap senilai Rp26.362.173.533.902,41 didalamnya terdapat aset yang dipinjam pakai sebesar Rp40.423.366.477,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang	2.046.600.000,00
2	SKPKD	30.564.078.389,00
3	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata .Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	211.648.338,00
4	Dinas Kelautan Dan Perikanan .Dinas Kelautan Dan Perikanan	758.166.000,00
5	Sekretariat Daerah	3.950.216.750,00
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.892.657.000,00
Jumlah		40.423.366.477,00

5.3.1.3.1 Tanah — Rp13.583.627.731.544,00

Tanah sebesar Rp13.583.627.731.544,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.483.227.890.359,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp100.399.841.185,00 atau 0,74% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Tanah Persil	6.387.934.879.397,00	6.322.129.337.764,00
2	Tanah Non Persil	1.502.784.828.568,00	1.504.326.888.118,00
3	Lapangan	5.692.908.023.579,00	5.656.771.664.477,00
	Jumlah	**13.583.627.731.544,00**	**13.483.227.890.359,00**

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Pembukuan Barang Milik Daerah atas Pemanfaatan disajikan pada aset tetap salah satunya dalam bentuk pinjam pakai. Rincian Aset Tanah yang dilakukan pemanfaatan secara Pinjam Pakai adalah:

		2021 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.046.600.000,00
2	SKPKD	20.476.511.989,00
	Jumlah	**22.523.111.989,00**

Rincian mutasi tanah terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	13.483.227.890.359
Penambahan	
Belanja Modal	79.135.275.975
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	15.346.913.000
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	400.000.000
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	22.692.909.645
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi	17.350.728.421
Jumlah	**134.925.827.041**
Berkurang	
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	1.089.394.400
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	12.396.541.456
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Belanja Hutang	-
Koreksi Tahun Lalu	-
Jumlah	**34.525.985.856**
Grand Total	**13.583.627.731.544**

5.3.1.3.1.1 Tanah Persil — Rp6.387.934.879.397,00

Tanah Persil sebesar Rp6.387.934.879.397,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.322.129.337.764,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp65.805.541.633,00 atau 1,04% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	1.866.272.554.798,00	1.856.109.839.677,00
2	Dinas Kesehatan	60.325.940.000,00	60.325.940.000,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	110.237.763.000,00	96.528.500.000,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	104.730.000.000,00	104.730.000.000,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	41.950.458.143,00	41.950.458.143,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	656.775.000.000,00	656.775.000.000,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	90.572.000.000,00	90.572.000.000,00
8	RSJD Surakarta	50.269.000.000,00	50.269.000.000,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	14.192.500.000,00	14.192.500.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	110.494.217.813,00	70.510.912.890,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.480.636.355.836,00	1.478.845.521.236,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.513.941.740,00	1.513.941.740,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	3.076.000.000,00	3.076.000.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.786.143.000,00	11.786.143.000,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
15	Dinas Sosial	131.305.435.440,00	131.305.435.440,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	89.336.053.000,00	89.336.053.000,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	834.078.750,00	834.078.750,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	57.793.550.000,00	57.793.550.000,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	599.040.000,00	599.040.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.849.500.000,00	7.849.500.000,00
22	Dinas Perhubungan	88.816.801.625,00	88.816.801.625,00
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	6.977.000.000,00	6.977.000.000,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	12.286.500.000,00	12.286.500.000,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	56.262.234.500,00	56.262.234.500,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.546.500.000,00	4.546.500.000,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	113.499.696.160,00	113.499.696.160,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	178.780.147.130,00	178.780.147.130,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	361.218.773.504,00	374.838.773.504,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.493.720.000,00	3.493.720.000,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.444.664.587,00	22.444.664.587,00
33	SKPKD	24.600.447.789,00	10.821.023.800,00
34	Sekretariat Daerah	162.295.740.000,00	162.295.740.000,00
35	Sekretariat DPRD	12.678.250.000,00	12.678.250.000,00
36	Inspektorat	120.185.000.000,00	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	71.532.500.000,00	120.185.000.000,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	108.850.722.582,00	108.850.722.582,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.427.650.000,00	71.532.500.000,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	124.074.000.000,00	6.427.650.000,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.015.000.000,00	124.074.000.000,00
42	Badan Penghubung	-	7.015.000.000,00
	Jumlah	**6.387.934.879.397,00**	**6.322.129.337.764,00**

5.3.1.3.1.2 Tanah Non Persil — Rp1.502.784.828.568,00

Tanah Non Persil sebesar Rp1.502.784.828.568,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.504.326.888.118,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.542.059.550,00) atau (0,10%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	36.819.904.059,00	36.819.904.059,00
2	Dinas Kesehatan	998.800.000,00	998.800.000,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	509.250.000,00	509.250.000,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	-
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	-	-
8	RSJD Surakarta	-	-
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	-	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	56.867.647.350,00	56.867.647.350,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	633.495.634.258,00	635.190.193.808,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.900.000.000,00	15.900.000.000,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	
15	Dinas Sosial	2.839.565.000,00	2.839.565.000,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.016.700.000,00	1.016.700.000,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.045.100.000,00	11.045.100.000,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	-	
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	
22	Dinas Perhubungan	1.848.750.000,00	1.848.750.000,00
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	
24	Dinas Koperasi dan UKM	-	
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	4.050.622.500,00	4.050.622.500,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	55.652.295.000,00	55.652.295.000,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	654.910.140.401,00	654.910.140.401,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	22.376.100.000,00	22.376.100.000,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	
33	SKPKD	152.500.000,00	
34	Sekretariat Daerah	4.301.820.000,00	4.301.820.000,00
35	Sekretariat DPRD	-	
36	Inspektorat	-	
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	
42	Badan Penghubung	-	
	Jumlah	**1.502.784.828.568,00**	**1.504.326.888.118,00**

5.3.1.3.1.3 Lapangan — Rp5.692.908.023.579,00

Tanah Persil sebesar Rp5.692.908.023.579,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.656.771.664.477,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp36.136.359.102,00 atau 0,64% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	29.917.938.500,00	30.910.338.500,00
2	Dinas Kesehatan	-	

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	-	
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	
5	RSUD Tugurejo Semarang	3.998.392.532,00	3.998.392.532,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	-	
8	RSJD Surakarta	-	
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	-	
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.359.845.030.072,00	2.344.287.935.370,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	3.180.063.715.397,00	3.181.723.350.247,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	
15	Dinas Sosial	1.058.297.500,00	1.058.297.500,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.560.000.000,00	2.560.000.000,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	-	
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	
22	Dinas Perhubungan	103.778.997.078,00	80.547.697.828,00
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	
24	Dinas Koperasi dan UKM	-	
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	11.464.344.000,00	11.464.344.000,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.500.000,00	7.500.000,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	213.808.500,00	213.808.500,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	
33	SKPKD	-	
34	Sekretariat Daerah	-	
35	Sekretariat DPRD	-	
36	Inspektorat	-	
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	
42	Badan Penghubung	-	
	Jumlah	**5.692.908.023.579,00**	**5.656.771.664.477,00**

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin — Rp7.529.773.129.665,00

Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.529.773.129.665,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.808.241.676.514,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp721.531.453.151,00 atau 10,60% dengan

rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Alat Besar	338.211.070.551,00	323.846.905.640,00
2	Alat Angkutan	615.586.090.634,00	555.236.609.862,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	391.953.867.089,00	366.973.371.934,00
4	Alat Pertanian	66.577.755.181,00	62.160.877.024,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.620.620.204.759,00	1.489.628.149.044,00
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	277.124.071.195,00	250.033.985.129,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.996.861.602.216,00	1.800.226.364.205,00
8	Alat Laboratorium	623.224.673.104,00	539.720.358.425,00
9	Alat Persenjataan	7.449.588.365,00	6.609.303.107,00
10	Komputer	1.409.197.679.158,00	1.274.266.988.203,00
11	Alat Eksplorasi	468.093.022,00	291.935.822,00
12	Alat Pengeboran	156.971.298,00	131.415.000,00
13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	644.457.150,00	554.207.150,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	21.180.000,00	21.180.000,00
15	Alat Keselamatan Kerja	4.521.693.912,00	3.180.438.119,00
16	Alat Peraga	107.782.725.419,00	94.752.358.690,00
17	Peralatan Proses/Produksi	2.641.915.987,00	1.769.402.087,00
18	Rambu-rambu	22.268.797.932,00	20.412.740.032,00
19	Peralatan Olahraga	44.460.692.693,00	18.425.087.041,00
	Jumlah	**7.529.773.129.665,00**	**6.808.241.676.514,00**

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Pembukuan Barang Milik Daerah atas Pemanfaatan disajikan pada aset tetap salah satunya dalam bentuk pinjam pakai. Rincian Aset Peralatan dan Mesin yang dilakukan pemanfaatan secara Pinjam Pakai adalah:

		2021 (Rp)
1	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	211.648.338,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	758.166.000,00
3	Sekretariat Daerah	3.950.216.750,00
4	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.892.657.000,00
	Jumlah	**7.812.688.088,00**

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	6.808.241.676.514
Penambahan	
Belanja Modal	578.353.949.251
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	5.216.286.872
Hibah	82.753.176.371
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	314.119.871.317
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	7.892.323.072

Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	500.000
Koreksi	56.610.901.327
Jumlah	**1.072.665.961.577**
Berkurang	
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	27.718.953.367
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	275.702.843.632
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	26.913.955.012
Koreksi Belanja Modal	6.259.951.478
Koreksi Belanja Hutang	12.771.106.679
Koreksi Tahun Lalu	12.771.106.679
Jumlah	**351.134.508.426**
Grand Total	**7.529.773.129.665**

5.3.1.3.2.1 Alat Besar — Rp338.211.070.551,00

Alat Besar sebesar Rp338.211.070.551,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp323.846.905.640,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp14.364.164.911,00 atau 4,44% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	21.231.869.193,00	18.837.471.218,00
2	Dinas Kesehatan	7.122.522.799,00	7.088.657.774,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	19.284.739.070,00	18.992.339.070,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	26.043.127.104,00	26.043.127.104,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	10.203.146.989,00	8.855.784.989,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	3.366.243.889,00	3.366.243.889,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	6.504.376.000,00	6.504.376.000,00
8	RSJD Surakarta	2.779.445.000,00	2.773.025.000,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.676.342.715,00	1.542.120.715,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	123.745.211.306,00	120.385.493.186,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	25.549.291.615,00	24.374.491.615,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	526.280.900,00	526.280.900,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	640.150.000,00	640.150.000,00
15	Dinas Sosial	1.451.251.798,00	1.451.251.798,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.709.819.750,00	2.979.907.500,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	316.916.998,00	316.916.998,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	637.400.000,00	637.400.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	573.197.768,00	550.297.768,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	331.895.000,00	-
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.258.167.018,00	1.258.167.018,00
22	Dinas Perhubungan	2.004.191.741,00	1.954.691.741,00
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	2.134.235.500,00	1.709.449.500,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	1.355.770.000,00	1.355.770.000,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	635.867.250,00	630.867.250,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.111.581.219,00	2.817.568.000,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.065.823.260,00	4.065.823.260,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.879.292.090,00	3.802.402.090,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.427.341.026,00	7.407.341.026,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	671.120.762,00	671.120.762,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.450.563.000,00	3.450.563.000,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.605.974.083,00	6.402.022.918,00
33	SKPKD	665.315.500,00	665.315.500,00
34	Sekretariat Daerah	12.663.522.251,00	13.011.083.251,00
35	Sekretariat DPRD	1.410.045.100,00	1.410.045.100,00
36	Inspektorat	208.302.000,00	169.042.000,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.141.937.500,00	2.934.650.500,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	16.331.627.517,00	16.969.681.260,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.632.655.360,00	3.729.455.360,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	810.245.000,00	810.245.000,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.567.467.580,00	2.567.467.580,00
42	Badan Penghubung	486.797.900,00	188.798.000,00
	Jumlah	**338.211.070.551,00**	**323.846.905.640,00**

5.3.1.3.2.2 Alat Angkutan — Rp615.586.090.634,00

Alat Angkutan sebesar Rp615.586.090.634,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp555.236.609.862,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp60.349.480.772,00 atau 10,87% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	127.358.836.906,00	106.786.582.467,00
2	Dinas Kesehatan	33.952.288.818,00	16.130.717.418,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	8.270.908.756,00	8.039.598.756,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	8.736.721.263,00	8.724.911.263,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	5.166.630.303,00	4.839.030.303,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	6.730.623.544,00	6.730.623.544,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	4.973.089.750,00	4.968.989.750,00
8	RSJD Surakarta	8.153.576.559,00	6.777.396.823,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	5.334.986.742,00	4.743.360.132,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	18.577.338.497,00	15.180.450.497,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	9.564.086.951,00	8.035.860.616,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.156.418.720,00	4.156.418.720,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	5.699.203.947,00	5.133.303.947,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.084.658.400,00	3.084.658.400,00
15	Dinas Sosial	16.817.098.411,00	16.188.168.048,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.907.651.101,00	15.839.511.543,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.005.626.292,00	10.847.576.292,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	2.744.674.268,00	2.744.674.268,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20.607.507.585,00	20.238.676.585,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	2.912.707.514,00	2.905.937.514,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.922.028.223,00	2.922.028.223,00
22	Dinas Perhubungan	30.533.434.421,00	30.533.434.421,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	8.274.440.673,00	6.773.334.673,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	2.731.000.626,00	2.731.000.626,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.924.162.144,00	3.924.162.144,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	5.223.477.489,00	5.011.829.151,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.383.636.345,00	5.383.636.345,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	21.291.549.383,00	19.274.581.783,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	14.309.556.092,00	13.585.730.692,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.791.435.643,00	7.163.080.643,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.210.849.278,00	8.206.766.478,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.698.961.245,00	6.698.961.245,00
33	SKPKD	15.900.859.014,00	14.652.772.242,00
34	Sekretariat Daerah	59.797.998.638,00	61.350.162.558,00
35	Sekretariat DPRD	24.190.561.513,00	26.317.108.257,00
36	Inspektorat	4.782.892.291,00	4.205.343.456,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.934.008.793,00	5.821.063.793,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	37.512.474.616,00	35.254.848.366,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.734.170.918,00	7.646.358.918,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	3.660.554.721,00	3.660.554.721,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.633.029.838,00	2.633.029.838,00
42	Badan Penghubung	9.390.374.403,00	9.390.374.403,00
	Jumlah	**615.586.090.634,00**	**555.236.609.862,00**

5.3.1.3.2.3 Alat Bengkel dan Ukur — Rp391.953.867.089,00

Alat Bengkel dan Ukur sebesar Rp391.953.867.089,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp366.973.371.934,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp24.980.495.155,00 atau 6,81% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	334.615.985.773,00	314.594.989.563,00
2	Dinas Kesehatan	1.834.513.400,00	1.806.013.400,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	1.865.977.493,00	1.844.927.493,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	1.822.857.208,00	1.704.329.559,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	575.942.044,00	557.012.044,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	594.299.250,00	564.889.750,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	47.923.000,00	47.923.000,00
8	RSJD Surakarta	1.236.066.140,00	541.986.140,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.504.009.275,00	800.530.875,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	556.025.000,00	87.205.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.438.923.002,00	2.438.923.002,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	397.683.300,00	442.299.050,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.008.316.900,00	386.822.400,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.892.906.730,00	3.597.089.890,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.223.679.377,00	4.212.256.377,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
20	Dinas Ketahanan Pangan	46.700.000,00	46.700.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	5.095.533.200,00	4.999.033.200,00
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	26.242.000,00	21.050.000,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	45.300.000,00	45.300.000,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.056.129.956,00	2.056.129.956,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.113.103.295,00	1.113.103.295,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.140.357.900,00	3.032.320.300,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	746.936.106,00	746.936.106,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.299.023.150,00	7.299.023.150,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.069.726.090,00	13.627.870.884,00
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	131.476.000,00	131.476.000,00
35	Sekretariat DPRD	-	-
36	Inspektorat	71.400.000,00	71.400.000,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	474.850.000,00	133.850.000,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.331.500,00	12.331.500,00
42	Badan Penghubung	9.650.000,00	9.650.000,00
	Jumlah	**391.953.867.089,00**	**366.973.371.934,00**

5.3.1.3.2.4 Alat Pertanian — Rp66.577.755.181,00

Alat Pertanian sebesar Rp66.577.755.181,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp62.160.877.024,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.416.878.157,00 atau 7,11% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	17.291.219.053,00	15.370.571.660,00
2	Dinas Kesehatan	11.600.000,00	-
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	-	-
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	43.982.500,00	38.207.500,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	292.492.795,00	292.492.795,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	126.640.630,00	126.640.630,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	-	-
8	RSJD Surakarta	-	-
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	7.330.060,00	7.330.060,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	38.000.000,00	38.000.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	15.485.000,00	38.485.000,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.148.239.925,00	2.103.239.925,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	540.589.500,00	540.589.500,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	1.322.669.070,00	1.307.669.070,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	-	-
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.221.068.500,00	1.221.068.500,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	34.496.546.094,00	32.179.152.330,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.940.047.054,00	8.813.600.054,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	39.750.000,00	39.750.000,00
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	-	-
35	Sekretariat DPRD	-	-
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	26.295.000,00	28.280.000,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.800.000,00	15.800.000,00
42	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**66.577.755.181,00**	**62.160.877.024,00**

5.3.1.3.2.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga — Rp1.620.620.204.759,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp1.620.620.204.759 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.489.628.149.044,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp130.992.055.751,00 atau 8,79% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	909.645.074.285,00	813.031.911.549,00
2	Dinas Kesehatan	37.555.894.848,00	34.660.401.994,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	47.432.484.413,00	45.110.693.463,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	56.179.119.877,00	50.164.532.648,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	43.015.795.371,00	32.966.873.235,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	14.165.822.376,00	13.891.366.520,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	17.811.929.533,00	17.119.041.533,00
8	RSJD Surakarta	27.301.277.854,00	26.010.900.574,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	14.518.450.265,00	14.090.517.422,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	6.393.007.760,00	3.101.766.300,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	8.646.029.711,00	8.493.029.711,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.126.866.512,00	3.077.766.512,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	2.517.109.774,00	2.517.109.774,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.024.120.542,00	2.829.841.602,00
15	Dinas Sosial	21.988.982.873,00	22.801.200.669,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.022.761.639,00	5.008.318.558,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.589.209.603,00	13.614.106.603,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	2.056.519.063,00	1.973.835.163,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.248.615.626,00	14.896.984.526,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	4.133.830.769,00	4.241.815.449,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.626.127.627,00	5.341.253.947,00
22	Dinas Perhubungan	8.393.566.797,00	7.632.213.047,00
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	6.719.825.529,00	5.913.455.629,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	8.736.274.002,00	8.701.124.002,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.050.188.500,00	3.001.888.500,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	21.569.323.718,00	20.211.041.185,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.458.208.198,00	13.296.552.198,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.797.660.601,00	9.475.852.601,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	18.013.322.425,00	17.795.430.175,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.232.896.753,00	7.489.418.753,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	13.075.789.534,00	13.035.573.344,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.276.424.711,00	19.191.271.503,00
33	SKPKD	4.932.394.010,00	4.910.394.010,00
34	Sekretariat Daerah	44.414.186.281,00	46.703.773.028,00
35	Sekretariat DPRD	43.582.864.107,00	41.252.286.107,00
36	Inspektorat	4.789.236.400,00	4.668.798.900,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.826.098.331,00	8.731.342.331,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	63.295.146.178,00	64.538.031.236,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.913.728.829,00	26.749.992.299,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	6.766.869.691,00	6.658.804.591,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	19.411.301.536,00	18.381.469.546,00
42	Badan Penghubung	6.365.868.307,00	6.346.168.307,00
	Jumlah	**1.620.620.204.759,00**	**1.489.628.149.044,00**

5.3.1.3.2.6 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar **Rp277.124.071.195,00**

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp277.124.071.195,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp250.033.985.129,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp27.090.086.066,00 atau 10,83% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	160.400.715.633,00	140.645.026.447,00
2	Dinas Kesehatan	6.010.506.948,00	4.987.294.001,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	4.456.920.223,00	4.221.231.223,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	4.122.997.736,00	3.734.587.686,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	3.920.907.775,00	3.735.808.695,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	1.646.717.688,00	1.626.350.188,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	1.194.690.455,00	1.170.140.455,00
8	RSJD Surakarta	1.245.209.622,00	1.000.657.637,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	610.161.500,00	382.223.700,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	534.251.000,00	451.586.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.859.604.650,00	1.859.604.650,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	600.255.496,00	600.255.496,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	641.190.000,00	641.190.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	719.325.000,00	681.425.000,00
15	Dinas Sosial	469.037.784,00	556.077.784,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.315.047.449,00	1.677.272.949,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.114.108.085,00	1.834.305.085,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	335.349.850,00	314.030.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.402.973.416,00	3.345.474.416,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	816.960.000,00	701.860.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.777.674.383,00	1.675.950.383,00
22	Dinas Perhubungan	2.451.729.176,00	2.262.206.176,00
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	10.556.303.951,00	7.526.486.361,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	1.351.961.500,00	1.213.607.500,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	756.813.320,00	751.013.320,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.352.827.678,00	2.352.827.678,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.687.166.256,00	4.687.166.256,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.732.084.064,00	1.711.664.550,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	4.141.264.710,00	4.141.264.710,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	658.135.700,00	561.280.700,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.179.091.128,00	4.171.591.128,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.342.619.035,00	1.350.194.035,00
33	SKPKD	108.911.000,00	108.911.000,00
34	Sekretariat Daerah	23.132.250.746,00	22.857.545.263,00
35	Sekretariat DPRD	4.238.137.402,00	3.910.037.402,00
36	Inspektorat	940.908.165,00	883.495.665,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.355.914.806,00	1.355.914.806,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	6.118.148.739,00	6.236.405.458,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.303.054.757,00	2.705.132.757,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	384.059.656,00	371.475.856,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.746.253.848,00	3.641.581.848,00
42	Badan Penghubung	1.391.830.865,00	1.391.830.865,00
	Jumlah	**277.124.071.195,00**	**250.033.985.129,00**

5.3.1.3.2.7 Alat Kedokteran dan Kesehatan — Rp1.996.861.602.216,00

Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp1.996.861.602.216,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.800.226.364.205,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp196.635.238.011,00 atau 10,92% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	11.047.570.674,00	9.586.936.663,00
2	Dinas Kesehatan	64.713.018.276,00	47.753.520.931,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	660.309.496.493,00	593.812.270.802,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	571.464.416.490,00	519.811.027.291,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	331.152.864.736,00	307.122.207.525,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	147.089.319.141,00	140.548.251.780,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	73.041.609.618,00	66.668.010.102,00
8	RSJD Surakarta	57.973.650.153,00	51.002.170.549,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	76.320.081.074,00	60.898.355.101,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	950.557.321,00	932.702.321,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	190.779.600,00	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	541.292.525,00	541.292.525,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-
21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	-	-
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.875.000,00	5.875.000,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	20.100.000,00	20.100.000,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.277.500,00	-
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.100.000,00	7.100.000,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	799.111.000,00	425.587.000,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.500.000,00	2.500.000,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	109.460.000,00	119.460.000,00
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	204.665.000,00	103.690.000,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
35	Sekretariat DPRD	294.215.000,00	294.215.000,00
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	150.065.000,00	150.065.000,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	216.001.615,00	216.001.615,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	249.576.000,00	205.025.000,00
42	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**1.996.861.602.216,00**	**1.800.226.364.205,00**

5.3.1.3.2.8 Alat Laboratorium **Rp623.224.673.104,00**

Alat Laboratorium sebesar Rp623.224.673.104,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp539.720.358.425,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp83.504.314.679,00 atau 15,47% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	389.879.033.453,00	336.867.142.094,00
2	Dinas Kesehatan	45.939.357.291,00	33.384.776.135,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	23.537.996.839,00	21.272.539.181,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	12.690.095.504,00	8.392.384.624,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	25.632.948.022,00	21.921.657.564,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	2.584.797.503,00	1.878.900.888,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	3.554.708.075,00	3.554.708.075,00
8	RSJD Surakarta	3.370.785.576,00	2.289.290.076,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	4.598.077.097,00	3.058.577.144,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.474.071.395,00	7.958.821.395,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.671.294.155,00	2.431.618.155,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	95.285.000,00	100.035.000,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	65.446.700,00	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.111.382.743,00	8.876.396.543,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.263.644.395,00	15.269.067.395,00
21	Dinas Ketahanan Pangan	5.893.509.922,00	5.889.615.922,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44.715.000,00	-
22	Dinas Perhubungan	163.343.000,00	163.343.000,00
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	198.650.000,00	198.650.000,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	90.230.000,00	90.230.000,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.648.905.084,00	8.353.321.584,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	9.065.629.415,00	9.062.629.415,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.873.383.213,00	15.596.916.713,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6.632.420.000,00	5.073.131.800,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.421.894.122,00	27.246.036.122,00
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00
35	Sekretariat DPRD	-	-
36	Inspektorat	122.022.000,00	122.022.000,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	23.750.000,00	91.250.000,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	527.297.600,00	527.297.600,00
42	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**623.224.673.104,00**	**539.720.358.425,00**

5.3.1.3.2.9 Alat Persenjataan — Rp7.449.588.365,00

Alat Persenjataan sebesar Rp7.449.588.365,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.609.303.107,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp840.285.258,00 atau 12,71% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	3.649.689.360,00	2.967.793.274,00
2	Dinas Kesehatan	-	-
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	-	-
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-
6	RSUD Tugurejo Semarang	-	-
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	187.829.055,00	187.829.055,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	-	-
8	RSJD Surakarta	-	-
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	6.175.000,00	6.175.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	5.953.500,00	5.953.500,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	179.710.000,00	179.710.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	-	-
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.659.729.175,00	1.546.222.003,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	144.900.000,00	144.900.000,00
21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	31.204.725,00	31.204.725,00
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	25.000.000,00	-
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	175.600.000,00	175.600.000,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	52.000.000,00	52.000.000,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	34.616.000,00	14.734.000,00
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	1.265.031.550,00	1.265.031.550,00
35	Sekretariat DPRD	-	-
36	Inspektorat	8.500.000,00	8.500.000,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	23.650.000,00	23.650.000,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-
42	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**7.449.588.365,00**	**6.609.303.107,00**

5.3.1.3.2.10 Komputer — Rp1.409.197.679.158,00

Komputer sebesar Rp1.409.197.679.158,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.274.266.988.203,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp134.930.690.955,00 atau 10,59% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	1.046.451.880.482,00	942.581.737.740,00
2	Dinas Kesehatan	15.491.209.905,00	13.268.215.382,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	20.562.937.196,00	17.142.141.196,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	32.163.433.246,00	21.059.395.983,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	6.581.872.416,00	5.221.811.146,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	3.442.946.723,00	3.219.711.993,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	4.258.351.150,00	3.984.851.250,00
8	RSJD Surakarta	5.377.749.036,00	5.114.238.286,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	3.226.796.571,00	3.058.219.752,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	4.297.802.665,00	3.635.497.715,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	5.607.476.173,00	5.532.422.840,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.571.857.489,00	1.542.857.489,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	1.729.901.470,00	1.729.901.470,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.577.698.790,00	1.281.468.690,00
15	Dinas Sosial	5.948.075.221,00	6.295.573.650,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.334.356.484,00	2.194.535.738,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.919.482.945,00	5.673.278.145,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	976.359.000,00	873.756.300,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.155.002.433,00	9.099.762.433,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	2.690.972.500,00	2.361.264.500,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.251.971.347,00	3.240.037.347,00
22	Dinas Perhubungan	5.485.479.131,00	5.429.639.131,00
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	69.912.260.941,00	60.209.994.180,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	1.878.999.386,00	4.322.882.714,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.608.373.511,00	3.487.555.011,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	4.484.630.706,00	4.468.240.706,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.531.799.446,00	5.344.176.326,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.825.728.999,00	3.492.371.999,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	6.164.133.276,00	6.000.489.176,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.094.272.275,00	1.965.030.275,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6.509.296.029,00	6.472.296.029,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.427.086.587,00	7.330.891.007,00
33	SKPKD	344.055.995,00	344.055.995,00
34	Sekretariat Daerah	16.338.750.531,00	16.991.520.881,00
35	Sekretariat DPRD	9.755.912.999,00	8.884.910.999,00
36	Inspektorat	2.217.523.418,00	2.145.748.418,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.228.298.745,00	4.856.655.821,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	51.370.114.852,00	52.153.017.801,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.323.485.838,00	9.111.410.838,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	7.499.492.397,00	6.880.480.397,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.128.719.787,00	4.814.460.387,00
42	Badan Penghubung	1.451.131.067,00	1.450.481.067,00
	Jumlah	**1.409.197.679.158,00**	**1.274.266.988.203,00**

5.3.1.3.2.11 Alat Eksplorasi — Rp468.093.022,00,00

Alat Eksplorasi sebesar Rp468.093.022,00,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp291.935.822,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp176.157.200,00 atau 60,34% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	445.923.022,00	271.565.822,00
2	Dinas Kesehatan	1.800.000,00	-
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	20.370.000,00	20.370.000,00
	Jumlah	**468.093.022,00**	**291.935.822,00**

5.3.1.3.2.12 Alat Pengeboran — Rp156.971.298,00

Alat Pengeboran sebesar Rp156.971.298,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp131.415.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp25.556.298,00 atau 19,45% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	156.971.298,00	131.415.000,00
	Jumlah	**156.971.298,00**	**131.415.000,00**

5.3.1.3.2.13 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian **Rp644.457.150,00**

Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp644.457.150,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp554.207.150,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp90.250.000,00 atau 16,28% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	566.083.950,00	475.833.950,00
2	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	78.373.200,00	78.373.200,00
	Jumlah	**644.457.150,00**	**554.207.150,00**

5.3.1.3.2.14 Alat Bantu Eksplorasi **Rp21.180.000,00,00**

Alat Bantu Eksplorasi sebesar Rp21.180.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp21.180.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	21.180.000,00	21.180.000,00
	Jumlah	**21.180.000,00**	**21.180.000,00**

5.3.1.3.2.15 Alat Keselamatan Kerja **Rp4.521.693.912,00**

Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp4.521.693.912,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.180.438.119,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.341.255.793,00 atau 42,17% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	3.786.719.712,00	3.100.468.119,00
2	Dinas Kesehatan	29.125.000,00	-
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	-	-
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-
6	RSUD Tugurejo Semarang	-	-
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	-	-
8	RSJD Surakarta	48.576.000,00	48.576.000,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	-	-
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	445.500.000,00	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	42.033.200,00	31.394.000,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-
21	Dinas Ketahanan Pangan	14.740.000,00	-
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	-	-
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-
33	SKPKD	135.000.000,00	-
34	Sekretariat Daerah	-	-
35	Sekretariat DPRD	-	-
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.000.000,00	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-
42	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**4.521.693.912,00**	**3.180.438.119,00**

5.3.1.3.2.16 Alat Peraga **Rp107.782.725.419,00**

Alat Peraga sebesar Rp107.782.725.419,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp94.752.358.690,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp13.030.366.729,00 atau 13,75% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	105.631.969.525,00	94.591.358.290,00
2	Dinas Kesehatan	-	-
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	1.335.877.692,00	109.000.000,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	235.505.882,00	-
6	RSUD Tugurejo Semarang	-	-
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	26.664.000,00	26.664.000,00
8	RSJD Surakarta	-	-
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	-	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	99.825.000,00	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	241.165.000,00	23.000.000,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	211.718.320,00	2.336.400,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-
21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	-	-
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	-	-
35	Sekretariat DPRD	-	-
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-
42	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**107.782.725.419,00**	**94.752.358.690,00**

5.3.1.3.2.17 Peralatan Proses/Produksi — Rp2.641.915.987,00

Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp2.641.915.987,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.769.402.087,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp872.513.900,00 atau 49,31% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	1.890.747.987,00	1.469.954.087,00
2	Dinas Kesehatan	22.500.000,00	-
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	-	-
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	95.000.000,00	95.000.000,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
5	RSUD Tugurejo Semarang	66.500.000,00	66.500.000,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	-	-
8	RSJD Surakarta	-	-
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	422.670.000,00	93.000.000,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	44.948.000,00	44.948.000,00
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	99.550.000,00	-
	Jumlah	**2.641.915.987,00**	**1.769.402.087,00**

5.3.1.3.2.18 Rambu-Rambu — Rp22.268.797.932,00

Rambu-Rambu sebesar Rp22.268.797.932,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp20.412.740.032,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.856.057.900,00 atau 9,09% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	231.203.050,00	170.397.250,00
2	Dinas Perhubungan	21.928.639.882,00	20.138.387.782,00
3	Dinas Komunikasi dan Informasi	55.937.000,00	55.937.000,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.000.000,00	6.000.000,00
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6.708.000,00	6.708.000,00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	35.310.000,00	35.310.000,00
	Jumlah	**22.268.797.932,00**	**20.412.740.032,00**

5.3.1.3.2.19 Alat Olahraga — Rp44.460.692.693,00

Alat Olahraga sebesar Rp44.460.692.693,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18.425.087.041,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp26.035.605.652,00 atau 141,31% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	15.642.234.759,00	13.907.064.612,00
2	Dinas Kesehatan	81.729.600,00	81.729.600,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	25.800.000,00	-
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	20.079.600,00	20.079.600,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	10.625.000,00	10.625.000,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	227.588.719,00	227.588.719,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	86.900.000,00	86.900.000,00
8	RSJD Surakarta	20.880.000,00	20.880.000,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	28.600.000,00	8.800.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.000.000,00	2.000.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.100.000,00	10.100.000,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	27.550.000,00	27.550.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	53.095.000,00	71.050.000,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.000.000,00	1.000.000,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.300.000,00	9.300.000,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	3.006.000,00	3.006.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	8.601.440,00	8.601.440,00
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
24	Dinas Koperasi dan UKM	89.725.000,00	80.975.000,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	26.165.861.505,00	1.935.671.000,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	200.484.000,00	200.484.000,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	25.263.350,00	25.263.350,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	23.750.000,00	23.750.000,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	72.210.000,00	72.210.000,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	203.656.250,00	203.656.250,00
33	SKPKD	13.985.000,00	13.985.000,00
34	Sekretariat Daerah	223.903.000,00	195.053.000,00
35	Sekretariat DPRD	20.000.000,00	20.000.000,00
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	694.752.000,00	694.752.000,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	166.152.750,00	166.152.750,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	273.959.720,00	273.959.720,00
42	Badan Penghubung	22.900.000,00	22.900.000,00
	Jumlah	**44.460.692.693,00**	**18.425.087.041,00**

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan — Rp7.920.921.189.200,00

Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.920.921.189.200,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.563.815.353.072,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp357.105.836.128,00 atau 4,72% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bangunan Gedung	7.765.611.327.601,00	7.431.299.168.047,00
2	Monumen	23.095.492.782,00	22.325.125.450,00
3	Bangunan Menara	5.276.623.117,00	6.567.537.617,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	126.937.745.700,00	103.623.521.958,00
	Jumlah	**7.920.921.189.200,00**	**7.563.815.353.072,00**

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Pembukuan Barang Milik Daerah atas Pemanfaatan disajikan pada aset tetap salah satunya dalam bentuk

pinjam pakai. Rincian Aset Gedung dan Bangunan yang dilakukan pemanfaatan secara Pinjam Pakai adalah:

		2021 (Rp)
1	SKPKD	10.087.566.400,00
	Jumlah	**10.087.566.400,00**

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	7.563.815.353.072
Penambahan	-
Belanja Modal	330.679.148.402
Belanja Hutang	2.668.401.804
Belanja Barang/Jasa	25.849.623.934
Hibah	68.500.462.815
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	184.419.458.546
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	47.845.840
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	73.540.000
Koreksi	322.359.976.588
Jumlah	**939.768.534.029**
Berkurang	
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	5.170.076.100
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	302.246.973.388
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	24.779.710.557
Koreksi Belanja Modal	8.482.311.546
Koreksi Belanja Hutang	1.045.674.894
Koreksi Tahun Lalu	1.045.674.894
Jumlah	**582.662.697.901**
Grand Total	**7.920.921.189.200**

5.3.1.3.3.1 Bangunan Gedung — Rp7.765.611.327.601,00

Bangunan Gedung sebesar Rp7.765.611.327.601,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.431.299.168.047 mengalami **kenaikan** sebesar Rp334.312.159.554,00 atau 4,50% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	4.497.430.203.277,00	4.344.425.747.106,00
2	Dinas Kesehatan	103.701.230.594,00	102.309.052.712,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	311.970.327.973,00	314.856.487.162,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	273.475.092.976,00	270.037.793.054,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	160.840.883.162,00	136.882.267.564,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	90.499.917.873,00	90.423.101.873,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	79.407.748.861,00	79.559.852.643,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
8	RSJD Surakarta	43.091.709.152,00	39.139.376.152,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	49.693.966.688,00	48.156.968.426,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	135.560.232.609,00	21.788.515.366,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	20.554.497.000,00	20.628.425.000,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.620.119.060,00	10.620.119.060,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	18.452.315.000,00	18.452.315.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.030.845.708,00	6.060.845.708,00
15	Dinas Sosial	189.524.520.931,00	189.549.650.431,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.523.869.968,00	8.615.569.968,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	57.510.532.130,00	56.660.544.130,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	19.597.811.575,00	19.634.804.145,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	57.770.528.034,00	40.446.948.762,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	13.045.267.519,00	12.896.467.519,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.642.534.037,00	10.652.534.037,00
22	Dinas Perhubungan	116.197.000.730,00	106.870.484.367,00
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	5.442.697.874,00	5.442.697.874,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	38.139.551.473,00	35.991.381.473,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.491.574.985,00	7.462.600.585,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	235.391.292.498,00	225.274.749.104,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	22.719.853.147,00	22.719.853.147,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.632.287.616,00	90.311.112.761,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	135.301.142.478,00	132.221.139.540,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	87.904.205.956,00	85.233.867.063,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	40.967.739.283,00	40.337.470.672,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	82.972.998.341,00	81.986.602.368,00
33	SKPKD	178.609.636.818,00	185.173.755.018,00
34	Sekretariat Daerah	96.818.509.879,00	101.552.275.379,00
35	Sekretariat DPRD	31.773.112.999,00	31.837.965.999,00
36	Inspektorat	13.125.575.450,00	13.125.575.450,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.069.377.002,00	20.069.377.002,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	239.380.152.167,00	240.129.715.167,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	90.908.355.606,00	86.320.950.049,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	8.701.526.902,00	8.701.526.902,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	55.056.289.385,00	55.686.729.385,00
42	Badan Penghubung	14.064.292.885,00	13.051.952.924,00
	Jumlah	**7.765.611.327.601,00**	**7.431.299.168.047,00**

5.3.1.3.3.2 Monumen **Rp23.095.492.782,00**

Monumen sebesar Rp23.095.492.782,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp22.325.125.450,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp770.367.332,00 atau 3,45% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	11.433.465.706,00	10.650.314.394,00
2	Dinas Kesehatan	144.162.000,00	144.162.000,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	-	-
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
6	RSUD Tugurejo Semarang	-	-
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	223.611.000,00	223.611.000,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	-	-
8	RSJD Surakarta	814.052.600,00	814.052.600,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.500.000,00	1.500.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	286.009.000,00	286.009.000,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	32.619.000,00	32.619.000,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	106.992.570,00	70.000.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	322.003.450,00	371.780.000,00
21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	-	-
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.653.127.820,00	3.653.127.820,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.800.000,00	7.800.000,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	-	-
35	Sekretariat DPRD	3.167.456.996,00	3.167.456.996,00
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	846.935.000,00	846.935.000,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-
42	Badan Penghubung	2.055.757.640,00	2.055.757.640,00
	Jumlah	**23.095.492.782,00**	**22.325.125.450,00**

5.3.1.3.3.3 Bangunan Menara — Rp5.276.623.117,00

Bangunan Menara sebesar Rp5.276.623.117,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.567.537.617,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.290.914.500,00) atau (19,66%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	917.962.130,00	1.608.546.630,00
2	Dinas Kesehatan	-	-
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	-	-
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-
6	RSUD Tugurejo Semarang	-	-
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	-	-
8	RSJD Surakarta	-	-
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	153.000.000,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	-	-
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	14.889.000,00
21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	535.357.815,00	535.357.815,00
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	57.678.000,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	301.130.315,00	675.893.315,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.486.502.857,00	3.486.502.857,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-
33	SKPKD	1.170.000,00	1.170.000,00
34	Sekretariat Daerah	-	-
35	Sekretariat DPRD	-	-
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	34.500.000,00	34.500.000,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-
42	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**5.276.623.117,00**	**6.567.537.617,00**

5.3.1.3.3.4 Tugu Titik Kontrol/Pasti — Rp126.937.745.700,00

Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp126.937.745.700,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp103.623.521.958,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp23.314.223.742,00 atau 22,50% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	60.145.216.499,00	42.979.998.898,00
2	Dinas Kesehatan	4.970.666.040,00	4.970.666.040,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	709.981.000,00	709.981.000,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	508.200.000,00	508.200.000,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	423.613.269,00	423.613.269,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	4.467.220.000,00	4.467.220.000,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	175.858.000,00	175.858.000,00
8	RSJD Surakarta	-	-
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.814.210.081,00	1.283.020.081,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	139.508.000,00	139.508.000,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	131.650.000,00	101.650.000,00
15	Dinas Sosial	2.690.008.500,00	1.561.874.500,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	558.577.300,00	558.577.300,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.694.531.000,00	587.222.000,00
21	Dinas Ketahanan Pangan	367.060.000,00	367.060.000,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	482.260.000,00	238.316.000,00
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	90.006.000,00	90.006.000,00
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	110.020.000,00	110.020.000,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.316.168.141,00	1.989.540.591,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	342.880.670,00	342.880.670,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.364.747.087,00	3.370.727.496,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	12.654.062.112,00	12.654.062.112,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.483.593.957,00	4.483.593.957,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	443.665.500,00	443.665.500,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-
33	SKPKD	1.375.642.800,00	1.921.069.800,00
34	Sekretariat Daerah	-	-
35	Sekretariat DPRD	374.062.000,00	244.463.000,00
36	Inspektorat	14.310.000,00	14.310.000,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	94.220.000,00	94.220.000,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.792.711.410,00	1.792.711.410,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.491.626.184,00	15.288.016.184,00
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.711.470.150,00	1.711.470.150,00
	Jumlah	**126.937.745.700,00**	**103.623.521.958,00**

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan **Rp10.585.831.733.218,00**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp10.585.831.733.218,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.192.168.636.636,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp393.663.096.582,00 atau 3,86% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	8.957.928.287.830,00	8.721.649.098.601,00
2	Bangunan Air	1.316.097.404.887,00	1.238.923.417.375,00
3	Instalasi	141.302.864.131,00	131.765.309.535,00
4	Jaringan	170.503.176.370,00	99.830.811.125,00
	Jumlah	**10.585.831.733.218,00**	**10.192.168.636.636,00**

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	10.192.168.636.636
Penambahan	-
Belanja Modal	351.328.654.582
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	2.837.773.811
Hibah	3.398.825.400
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	158.829.097.911
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi	65.332.948.969
Jumlah	**581.739.700.673**
Berkurang	
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	12.400.000
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	130.555.830.241
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	85.002.000
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Belanja Hutang	-
Koreksi Tahun Lalu	-
Jumlah	**188.076.604.091**
Grand Total	**10.585.831.733.218**

5.3.1.3.4.1 Jalan dan Jembatan **Rp8.957.928.287.830,00**

Jalan dan Jembatan sebesar Rp8.957.928.287.830,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.721.649.098.601,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp236.279.189.229,00 atau 2,71% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	18.751.768.226,00	16.986.070.226,00
2	Dinas Kesehatan	117.825.000,00	117.825.000,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	952.451.000,00	952.451.000,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-
6	RSUD Tugurejo Semarang	121.968.158,00	121.968.158,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	3.792.813.625,00	3.792.813.625,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	2.895.101.000,00	2.895.101.000,00
8	RSJD Surakarta	2.053.018.611,00	2.053.018.611,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	96.997.000,00	96.997.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	8.803.298.028.942,00	8.580.703.558.763,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	52.859.000,00	52.859.000,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.580.140.166,00	6.806.199.500,00
21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	31.447.084.707,00	26.490.311.880,00
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1.141.159.418,00	1.141.159.418,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	41.617.041.757,00	41.428.915.200,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	5.125.486.500,00	5.125.486.500,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.293.436.250,00	3.293.436.250,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-
33	SKPKD	26.900.626.970,00	26.900.626.970,00
34	Sekretariat Daerah	181.000,00	-
35	Sekretariat DPRD	387.415.000,00	387.415.000,00
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.302.885.500,00	2.302.885.500,00
42	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**8.957.928.287.830,00**	**8.721.649.098.601,00**

5.3.1.3.4.2 Bangunan Air — Rp1.316.097.404.887,00

Bangunan Air sebesar Rp1.316.097.404.887,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.238.923.417.375,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp77.173.987.512,00 atau 6,23% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	18.677.033.136,00	15.109.108.389,00
2	Dinas Kesehatan	746.910.500,00	746.910.500,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	2.821.073.315,00	2.341.903.415,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	175.000.000,00	175.000.000,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	1.493.250.625,00	1.346.355.625,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	4.019.596.500,00	4.019.596.500,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	98.529.000,00	98.529.000,00
8	RSJD Surakarta	100.621.000,00	100.621.000,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.180.539.500,00	1.180.539.500,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	150.503.705.467,00	145.607.147.933,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	943.555.862.679,00	898.192.641.852,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	159.200.000,00	159.200.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	3.267.301.569,00	2.686.311.069,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89.000.000,00	89.000.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.317.600,00	4.317.600,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.960.164.654,00	3.960.164.654,00
21	Dinas Ketahanan Pangan	164.387.000,00	164.387.000,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	15.158.134.030,00	15.158.134.030,00
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	223.370.000,00	223.370.000,00
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	85.794.000,00	85.794.000,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1.655.931.026,00	1.042.601.091,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	190.275.000,00	190.275.000,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	121.729.147.372,00	103.918.743.414,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	18.426.934.230,00	16.834.170.119,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.214.320.900,00	1.902.392.900,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	23.936.135.784,00	22.125.332.784,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	-	-
35	Sekretariat DPRD	1.173.201.000,00	1.173.201.000,00
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	184.250.000,00	184.250.000,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.150.000,00	10.150.000,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	93.269.000,00	93.269.000,00
42	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**1.316.097.404.887,00**	**1.238.923.417.375,00**

5.3.1.3.4.3 Instalasi — Rp141.302.864.131,00

Instalasi sebesar Rp141.302.864.131,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp131.765.309.535,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp9.537.554.596,00 atau 7,24% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	14.517.354.286,00	14.010.180.995,00
2	Dinas Kesehatan	3.868.562.664,00	3.868.562.664,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	7.726.772.813,00	3.623.543.200,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	15.810.341.535,00	15.810.341.535,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	23.498.906.495,00	23.498.906.495,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	3.263.622.965,00	3.263.622.965,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	2.819.860.000,00	2.065.260.000,00
8	RSJD Surakarta	6.333.245.391,00	3.345.218.391,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	4.894.119.749,00	4.395.161.749,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	137.554.120,00	137.554.120,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	664.938.567,00	664.938.567,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	111.870.000,00	111.870.000,00
15	Dinas Sosial	25.000.000,00	25.000.000,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	91.433.000,00	91.433.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	763.895.492,00	743.895.492,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.434.465.013,00	1.253.926.013,00
21	Dinas Ketahanan Pangan	25.900.000,00	25.900.000,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	17.898.252.585,00	17.898.252.585,00
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	361.662.000,00	361.662.000,00
23	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	225.454.455,00	225.454.455,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.916.649.692,00	1.859.951.000,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	334.957.086,00	319.957.086,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.126.715.225,00	2.904.439.225,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	26.192.202.457,00	26.192.202.457,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.751.450,00	50.751.450,00
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	2.170.591.600,00	1.979.538.600,00
35	Sekretariat DPRD	-	-
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	780.444.500,00	780.444.500,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	233.186.880,00	233.186.880,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	416.219.083,00	416.219.083,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	799.998.000,00	799.998.000,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	762.275.550,00	762.275.550,00
42	Badan Penghubung	45.661.478,00	45.661.478,00
	Jumlah	**141.302.864.131,00**	**131.765.309.535,00**

5.3.1.3.4.4 Jaringan — Rp170.503.176.370,00

Jaringan sebesar Rp170.503.176.370,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp99.830.811.125,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp70.672.365.245,00 atau 70,79% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	21.282.491.192,00	21.013.091.192,00
2	Dinas Kesehatan	1.135.375.128,00	1.135.375.128,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	447.980.000,00	279.000.000,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	4.211.762.949,00	4.211.762.949,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	-	-
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	2.633.664.219,00	2.633.664.219,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	1.567.161.390,00	1.369.161.390,00
8	RSJD Surakarta	-	-
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	70.066.159.909,00	17.774.664,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	82.834.000,00	82.834.000,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	107.706.800,00	107.706.800,00
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.547.760.100,00	1.547.760.100,00
19	Dinas Ketahanan Pangan	98.208.800,00	98.208.800,00
20	Dinas Perhubungan	30.700.485.076,00	30.700.485.076,00
21	Dinas Komunikasi dan Informasi	113.983.400,00	113.983.400,00
22	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
23	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.744.873,00	5.744.873,00
24	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	613.286.177,00	613.286.177,00
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.700.000,00	16.700.000,00
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	846.162.987,00	846.162.987,00
27	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.238.625.000,00	1.238.625.000,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.144.341.400,00	1.144.341.400,00
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	31.407.235.400,00	31.407.235.400,00
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	242.056.700,00	242.056.700,00
31	SKPKD	179.871.120,00	179.871.120,00
32	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	617.647.750,00	617.647.750,00
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	12.400.000,00
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	195.932.000,00	195.932.000,00
34	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**170.503.176.370,00**	**99.830.811.125,00**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya — Rp1.472.453.852.706,00

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.472.453.852.706,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.365.494.887.464,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp106.958.965.242,00 atau 7,83% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	1.430.483.249.340,00	1.324.257.505.688,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	37.214.873.513,00	36.650.353.623,00

3	Hewan	3.101.144.480,00	3.271.704.480,00
4	Biota Perairan	1.109.200,00	1.109.200,00
5	Tanaman	1.275.095.773,00	1.214.207.973,00
6	Barang Koleksi Non Budaya	24.702.500,00	16.500.000,00
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	353.677.900,00	83.506.500,00
	Jumlah	**1.472.453.852.706,00**	**1.365.494.887.464,00**

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	1.365.494.887.464
Penambahan	-
Belanja Modal	108.123.383.035
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	29.245.400
Hibah	1.120.550.921
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	1.556.695.404
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi	30.895.000
Jumlah	**110.937.579.650**
Berkurang	
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	76.809.890
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	2.377.140.730
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	1.302.662.965
Koreksi Belanja Modal	3.820.903
Koreksi Belanja Hutang	206.299.920
Koreksi Tahun Lalu	206.299.920
Jumlah	**3.978.614.408**
Grand Total	**1.472.453.852.706**

5.3.1.3.5.1 Bahan Perpustakaan — Rp1.430.483.249.340,00

Bahan Perpustakaan sebesar Rp1.430.483.249.340,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.324.257.505.688,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp106.225.743.652,00 atau 8,02% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	1.408.805.433.479,00	1.302.690.551.523
2	Dinas Kesehatan	161.796.145,00	157.110.500
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	418.373.990,00	408.382.790
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	195.908.140,00	195.908.140
6	RSUD Tugurejo Semarang	337.975.331,00	293.244.831
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	337.390.600,00	337.390.600
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	38.858.950,00	37.495.350

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
8	RSJD Surakarta	15.632.230,00	15.632.230
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	74.619.830,00	65.827.830
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	334.921.241,00	279.267.300
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	86.412.066,00	86.412.066
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	147.060.400,00	146.883.900
13	Satuan Polisi Pamong Praja	25.500.000,00	25.500.000
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80.619.400,00	80.619.400
15	Dinas Sosial	418.871.600,00	482.999.800
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55.083.955,00	55.083.955
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	193.742.092,00	162.022.092
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	56.430.000,00	52.930.000
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	885.396.665,00	884.799.165
21	Dinas Ketahanan Pangan	103.501.200,00	103.501.200
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	108.800.000,00	108.800.000
22	Dinas Perhubungan	26.090.000,00	26.090.000
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	268.112.525,00	268.112.525
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	135.443.600,00	135.443.600
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	237.639.500,00	237.609.500
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.764.133.079,00	12.699.633.079
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	512.347.698,00	512.347.698
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	217.562.081,00	217.562.081
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	129.624.250,00	129.624.250
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	330.956.000,00	320.956.000
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	234.252.390,00	234.252.390
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	1.410.691.620,00	1.394.872.620
35	Sekretariat DPRD	348.689.983,00	348.689.983
36	Inspektorat	21.412.900,00	19.073.000
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	379.089.950,00	379.089.950
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	53.884.000,00	55.984.000
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.078.000,00	85.887.890
40	Badan Kepegawaian Daerah	35.073.100,00	35.073.100
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	486.841.350,00	486.841.350
42	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**1.430.483.249.340**	**1.324.257.505.688**

5.3.1.3.5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp37.214.873.513,00

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp37.214.873.513,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp36.650.353.623,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp564.519.890,00 atau 1,54% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	28.513.586.512,00	28.095.823.622,00
2	Dinas Kesehatan	105.951.000,00	105.951.000,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	38.409.000,00	38.409.000,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	236.978.500,00	236.978.500,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	55.000.000,00	99.730.500,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	501.733.666,00	501.733.666,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	423.235.750,00	423.235.750,00
8	RSJD Surakarta	67.630.000,00	67.630.000,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	378.588.000,00	139.795.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	150.635,00	150.635,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	170.000,00	170.000,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	500.219.500,00	500.219.500,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	635.099.300,00	680.504.300,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	750.000,00	750.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	78.258.500,00	78.258.500,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	22.215.000,00	22.215.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	497.841.500,00	499.086.000,00
21	Dinas Ketahanan Pangan	-	450.000,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	171.000,00
21	Dinas Perhubungan	387.710.000,00	387.710.000,00
22	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	96.188.000,00	96.218.000,00
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.038.571,00	10.038.571,00
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-
25	Dinas Pertanian dan Perkebunan	58.667.000,00	58.667.000,00
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	80.581.000,00	80.581.000,00
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	102.258.236,00	102.258.236,00
29	SKPKD	-	-
30	Sekretariat Daerah	211.606.342,00	211.606.342,00
31	Sekretariat DPRD	498.273.000,00	498.273.000,00
32	Inspektorat	2.000.000,00	2.000.000,00
33	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	24.600.000,00	24.600.000,00
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	418.390.000,00	418.395.000,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	94.237.290,00	94.237.290,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	4.390.000,00	4.390.000,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	164.956.250,00	164.956.250,00
42	Badan Penghubung	3.005.160.961,00	3.005.160.961,00
	Jumlah	**37.214.873.513,00**	**36.650.353.623,00**

5.3.1.3.5.3 Hewan **Rp3.101.144.480,00**

Hewan sebesar Rp3.101.144.480,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.271.704.480,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp170.560.000,00) atau (5,21%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	168.207.560,00	168.207.560,00
2	Dinas Kesehatan	10.300.000,00	3.300.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.500.000,00	9.500.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	164.572.000,00	164.572.000,00
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.748.564.920,00	2.926.124.920,00
	Jumlah	**3.101.144.480,00**	**3.271.704.480,00**

5.3.1.3.5.4 Biota Perairan — Rp1.109.200,00

Biota Perairan sebesar Rp1.109.200,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.109.200,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	1.109.200,00	1.109.200,00
	Jumlah	**1.109.200,00**	**1.109.200,00**

5.3.1.3.5.5 Tanaman — Rp1.275.095.773,00

Tanaman sebesar Rp1.275.095.773,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.214.207.973,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp60.887.800,00 atau 5,01% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	863.575.940,00	802.688.140,00
2	Dinas Kesehatan	34.650.000,00	34.650.000,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	295.101.633,00	295.101.633,00
4	Dinas Perhubungan	39.465.000,00	39.465.000,00
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	42.303.200,00	42.303.200,00
6	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**1.275.095.773,00**	**1.214.207.973,00**

5.3.1.3.5.6 Barang Koleksi Non Budaya — Rp24.702.500,00

Barang Koleksi Non Budaya sebesar Rp24.702.500,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16.500.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp8.202.500,00 atau 49,71% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	24.702.500,00	16.500.000,00
	Jumlah	**24.702.500,00**	**16.500.000,00**

5.3.1.3.5.7 Aset Tetap Dalam Renovasi — Rp353.677.900,00

Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp353.677.900,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp83.506.500,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp270.171.400,00 atau 323,53% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	-	11.880.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	353.677.900,00	71.626.500,00
	Jumlah	**353.677.900,00**	**83.506.500,00**

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan **Rp788.310.129.085,00**

Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp788.310.129.085,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp737.058.609.225,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp51.251.519.860,00 atau 6,95% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	27.763.475.659,00	28.397.526.659,00
2	Dinas Kesehatan	2.346.105.183,00	2.346.105.183,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	128.712.228.848,00	99.496.182.548,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-
6	RSUD Tugurejo Semarang	-	12.960.553.620,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	2.606.628.367,00	195.870.000,00
8	RSJD Surakarta	23.565.614.903,00	23.565.614.903,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	54.149.602.953,00	59.140.123.607,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	9.253.254.048,00	9.253.254.048,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	749.565.400,00	749.565.400,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	-	-
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	67.534.000,00	67.534.000,00
21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48.621.100,00	48.621.100,00
22	Dinas Perhubungan	3.079.601.218,00	2.354.373.747,00
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	89.551.000,00	-
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	72.915.700,00	72.915.700,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	532.158.596.816,00	495.612.957.245,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	133.276.000,00	133.276.000,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.207.451.350,00	567.849.200,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	73.344.245,00	64.305.600,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	329.850.550,00	329.850.550,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	80.624.415,00	178.646.915,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	759.399.130,00	-
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	-	-
35	Sekretariat DPRD	942.658.200,00	1.122.658.200,00
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	23.925.000,00	23.925.000,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	31.262.000,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	96.305.000,00	96.305.000,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	229.773.000,00
42	Badan Penghubung	-	19.560.000,00
	Jumlah	**788.310.129.085,00**	**737.058.609.225,00**

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	737.058.609.225
Penambahan	-
Belanja Modal	-
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	34.612.661.823
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	103.653.299.998
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi	4.836.445.083
Jumlah	**108.489.745.081**
Berkurang	
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	51.006.240.785
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Belanja Hutang	-
Koreksi Tahun Lalu	-
Jumlah	**57.238.225.221**
Grand Total	**788.310.129.085**

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan (Rp15.518.744.231.515,59)

Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp15.518.744.231.515,59) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp14.177.380.211.896,24) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp1.341.364.019.619,39) atau 9,46% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.837.047.301.241,31)	(5.209.658.138.204,90)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.145.263.849.523,92)	(1.994.887.391.629,88)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(7.534.456.813.217,39)	(6.971.333.399.289,46)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.976.267.532,97)	(1.501.282.772,00)
	Jumlah	**(15.518.744.231.515,59)**	**(14.177.380.211.896,20)**

5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Rp5.837.047.301.241,31)

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp5.837.047.301.241,31) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp5.209.658.138.204,90) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp627.389.163.036,41) atau 12,04% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(253.007.791.172,67)	(226.286.023.782,49)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(471.567.006.787,11)	(419.277.163.137,15)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(273.645.436.822,77)	(241.416.830.278,50)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(58.724.439.276,85)	(54.246.517.015,75)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.277.277.423.648,09)	(1.145.916.875.293,67)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(222.681.879.012,70)	(201.666.700.209,30)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(1.663.836.712.794,19)	(1.512.433.054.262,80)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(401.356.159.843,71)	(360.964.005.782,39)
9	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(6.731.866.504,07)	(6.064.254.909,50)
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.132.062.918.592,94)	(983.214.833.561,75)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	(166.088.939,87)	(116.174.531,00)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	(29.906.845,78)	(15.989.500,00)
13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	(123.415.808,87)	(67.140.465,01)
14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	(6.354.000,00)	(4.236.000,00)
15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(3.017.476.258,67)	(1.991.362.494,20)
16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	(38.014.966.866,31)	(26.216.518.484,80)
17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(1.063.464.137,20)	(489.823.084,63)
18	Akumulasi Penyusutan Rambu-rambu	(16.473.664.476,60)	(14.206.765.959,21)
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(17.260.329.452,91)	(15.063.869.452,75)
	Jumlah	**(5.837.047.301.241,31)**	**(5.209.658.138.204,90)**

5.3.1.3.7.1.1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar (Rp253.007.791.172,67)

Akumulasi Penyusutan Alat Besar sebesar (Rp253.007.791.172,67) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp226.286.023.782,49) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp26.721.767.390,18) atau 11,81% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(13.483.181.186,09)	(11.726.017.750,64)
2	Dinas Kesehatan	(5.827.438.383,79)	(5.145.556.378,00)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	(13.856.742.661,42)	(11.902.487.016,71)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(21.019.966.010,26)	(19.171.573.678,00)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(7.818.751.468,18)	(7.126.693.315,25)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(3.160.272.795,25)	(2.954.301.701,50)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(4.091.007.250,00)	(3.346.906.625,00)
8	RSJD Surakarta	(1.934.562.708,34)	(1.724.765.625,00)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(1.064.903.167,83)	(928.688.590,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(89.317.916.912,02)	(80.175.774.558,88)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(18.755.676.819,00)	(17.289.908.657,50)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(197.355.337,50)	(131.570.225,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(560.131.250,00)	(480.112.500,00)
15	Dinas Sosial	(1.313.702.236,75)	(1.170.308.199,50)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(5.278.136.921,65)	(2.653.815.175,00)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(295.099.498,00)	(273.281.998,00)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(636.650.000,00)	(636.275.000,00)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(469.397.079,67)	(440.151.317,00)
21	Dinas Ketahanan Pangan	(331.895.000,00)	-
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(1.258.167.018,00)	(1.170.569.393,00)
22	Dinas Perhubungan	(1.662.672.865,38)	(1.614.664.910,25)
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	(1.224.415.750,00)	(716.302.062,50)
23	Dinas Koperasi dan UKM	(906.197.500,00)	(736.726.250,00)
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(239.352.302,08)	(159.973.062,50)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(2.600.358.137,70)	(2.245.474.500,00)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(3.969.398.260,00)	(3.872.973.260,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(2.537.448.577,50)	(2.224.835.027,50)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(5.515.622.419,33)	(5.065.165.654,13)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(402.614.537,00)	(355.489.499,50)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(2.936.924.625,00)	(2.621.972.800,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(6.149.715.875,29)	(6.020.085.418,00)
33	SKPKD	(665.315.500,00)	(665.315.500,00)
34	Sekretariat Daerah	(8.801.956.828,71)	(8.114.333.354,38)
35	Sekretariat DPRD	(1.223.807.600,00)	(1.155.320.100,00)
36	Inspektorat	(170.268.875,00)	(169.042.000,00)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(3.141.937.500,00)	(2.865.683.250,00)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(14.515.443.753,42)	(13.970.922.102,25)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(2.717.496.110,01)	(2.566.776.985,00)
40	Badan Kepegawaian Daerah	(691.669.000,00)	(591.318.500,00)
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(2.063.006.790,00)	(1.920.978.217,50)
42	Badan Penghubung	(201.214.662,50)	(183.913.625,00)
	Jumlah	**(253.007.791.172,67)**	**(226.286.023.782,49)**

5.3.1.3.7.1.2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan **(Rp471.567.006.787,11)**

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan sebesar (Rp471.567.006.787,11) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp419.277.163.137,15) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp52.289.843.649,96) atau 12,47% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(93.255.685.431,88)	(79.578.215.806,64)
2	Dinas Kesehatan	(12.258.367.913,13)	(8.969.449.420,25)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	(5.869.658.547,67)	(6.523.609.631,00)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(7.141.523.054,41)	(6.416.502.862,50)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(4.651.740.594,67)	(3.986.289.928,00)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(5.838.330.319,63)	(5.388.474.849,75)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(4.346.575.166,67)	(4.039.113.750,00)
8	RSJD Surakarta	(5.570.723.664,02)	(4.652.320.798,00)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(3.096.458.045,34)	(2.788.201.180,75)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(11.181.323.747,00)	(9.467.599.047,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(7.050.977.430,25)	(6.004.844.790,13)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(4.052.749.220,00)	(3.940.729.470,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(4.983.216.197,00)	(4.096.273.634,26)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.639.798.775,00)	(2.393.546.525,00)
15	Dinas Sosial	(14.648.461.386,00)	(13.624.431.423,00)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(18.400.523.746,03)	(13.140.511.105,50)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(6.655.478.817,83)	(5.474.891.624,50)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(2.532.134.393,00)	(2.335.858.505,50)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(19.256.623.129,75)	(18.142.270.367,88)
21	Dinas Ketahanan Pangan	(2.858.893.784,84)	(2.726.366.139,00)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(2.818.358.723,00)	(2.646.127.660,50)
22	Dinas Perhubungan	(29.164.938.396,00)	(28.457.965.202,25)
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	(7.482.676.048,00)	(5.862.539.110,50)
23	Dinas Koperasi dan UKM	(2.631.654.147,75)	(2.516.585.169,50)
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(3.226.063.246,52)	(2.953.055.705,25)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(3.923.863.614,00)	(3.294.796.632,13)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(4.875.170.407,50)	(4.547.254.657,50)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(15.388.585.645,49)	(11.818.617.370,50)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(11.637.304.120,38)	(9.746.385.278,38)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(4.108.857.811,83)	(3.915.697.299,88)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(5.776.841.548,83)	(5.053.963.853,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(5.822.800.149,17)	(5.213.523.897,08)
33	SKPKD	(15.062.727.889,01)	(14.578.021.190,00)
34	Sekretariat Daerah	(49.508.223.715,25)	(49.172.289.644,01)
35	Sekretariat DPRD	(15.263.858.794,25)	(15.243.843.757,00)
36	Inspektorat	(3.578.538.666,01)	(2.656.544.956,00)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(4.508.249.674,25)	(3.827.635.963,38)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(28.877.209.818,25)	(25.312.663.492,88)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(7.357.684.983,00)	(5.680.733.848,00)
40	Badan Kepegawaian Daerah	(3.509.015.096,00)	(3.296.965.193,50)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(2.464.328.588,00)	(2.230.441.025,50)
42	Badan Penghubung	(8.290.812.340,50)	(7.562.011.371,75)
	Jumlah	**(471.567.006.787,11)**	**(419.277.163.137,15)**

5.3.1.3.7.1.3 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur (Rp273.645.436.822,77)

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur sebesar (Rp273.645.436.822,77) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp241.416.830.278,50) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp32.228.606.544,27) atau 13,35% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(223.944.753.482,91)	(197.835.237.574,20)
2	Dinas Kesehatan	(763.430.540,00)	(404.212.860,00)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	(1.323.575.651,34)	(1.147.206.693,00)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(1.515.296.363,73)	(1.475.735.951,00)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(526.268.895,66)	(506.257.506,00)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(470.384.233,33)	(384.423.400,00)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(28.734.000,00)	(21.824.000,00)
8	RSJD Surakarta	(1.004.436.067,33)	(235.340.156,00)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(1.056.501.681,66)	(202.178.587,50)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(69.705.916,73)	(46.789.500,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(2.091.124.000,20)	(1.875.130.499,80)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	(364.541.300,00)	(392.305.550,00)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(763.038.629,98)	(349.747.240,00)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(3.782.190.930,00)	(3.374.473.290,00)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(4.203.563.877,00)	(4.187.981.377,00)
21	Dinas Ketahanan Pangan	(45.200.000,00)	(44.700.000,00)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	(4.847.179.866,60)	(4.746.892.200,00)
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	(21.569.200,00)	(21.050.000,00)
23	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(27.180.000,00)	(22.650.000,00)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(1.220.271.542,00)	(956.718.606,50)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(919.200.755,00)	(840.428.932,50)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(2.876.636.946,67)	(2.790.166.300,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(606.263.666,00)	(525.851.226,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(6.833.732.770,00)	(6.486.482.880,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(14.000.061.689,96)	(12.239.083.149,00)
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	(107.742.400,00)	(103.320.200,00)
35	Sekretariat DPRD	-	-
36	Inspektorat	(71.400.000,00)	(71.400.000,00)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(147.811.666,67)	(117.330.000,00)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(5.775.750,00)	(4.542.600,00)
42	Badan Penghubung	(7.865.000,00)	(7.370.000,00)
	Jumlah	**(273.645.436.822,77)**	**(241.416.830.278,50)**

5.3.1.3.7.1.4 Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian (Rp58.724.439.276,85)

Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian sebesar (Rp58.724.439.276,85) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp54.246.517.015,75) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp4.477.922.261,10) atau 8,25% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(14.086.272.468,80)	(13.007.046.593,25)
2	Dinas Kesehatan	(1.450.000,00)	-
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	-	-
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(35.510.562,50)	(31.959.750,00)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(292.492.795,00)	(292.492.795,00)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(126.283.130,00)	(126.104.380,00)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	-	-
8	RSJD Surakarta	-	-
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(6.609.545,00)	(5.889.030,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(38.000.000,00)	(38.000.000,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	(14.235.000,00)	(36.610.000,00)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(2.113.552.425,00)	(2.103.239.925,00)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(524.152.000,00)	(421.042.000,00)
21	Dinas Ketahanan Pangan	(1.308.919.070,00)	(1.057.758.052,50)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	-	-
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.213.641.000,00)	(1.109.776.375,00)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(31.284.524.572,34)	(29.640.910.486,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(7.601.326.708,21)	(6.298.420.129,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(35.375.000,00)	(33.187.500,00)
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	-	-
35	Sekretariat DPRD	-	-
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(26.295.000,00)	(28.280.000,00)
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(15.800.000,00)	(15.800.000,00)
42	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(58.724.439.276,85)**	**(54.246.517.015,75)**

5.3.1.3.7.1.5 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga — (Rp1.277.277.423.648,09)

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar (Rp1.277.277.423.648,09) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.145.916.875.293,67) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp131.360.548.354,42) atau 11,46% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(665.557.618.348,25)	(572.444.354.876,87)
2	Dinas Kesehatan	(32.716.029.485,57)	(31.052.106.771,40)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	(42.287.356.133,58)	(39.782.795.562,60)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(42.497.427.265,33)	(37.869.677.816,80)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(32.003.022.518,43)	(30.688.260.083,80)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(12.845.865.492,87)	(12.130.726.702,40)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(14.721.070.036,24)	(12.844.393.782,60)
8	RSJD Surakarta	(22.729.854.772,41)	(19.688.713.674,60)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(12.713.188.064,81)	(11.920.547.192,60)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(2.727.026.513,61)	(2.338.417.600,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(8.371.980.511,40)	(7.649.114.551,80)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(2.842.853.978,65)	(2.694.134.912,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(2.246.393.974,00)	(2.082.879.574,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.715.125.981,75)	(2.617.644.602,00)
15	Dinas Sosial	(19.024.000.793,68)	(18.335.253.549,00)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(6.602.002.977,40)	(4.438.548.665,60)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(13.035.673.150,79)	(12.322.263.309,60)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(1.838.296.359,67)	(1.755.648.963,00)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(13.833.369.410,66)	(12.752.750.850,80)
21	Dinas Ketahanan Pangan	(3.877.369.244,30)	(4.066.825.329,00)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5.201.271.854,34)	(5.040.585.147,00)
22	Dinas Perhubungan	(6.562.759.872,12)	(5.748.102.960,80)
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	(5.492.157.810,62)	(4.990.477.556,20)
23	Dinas Koperasi dan UKM	(7.209.375.251,79)	(6.992.823.470,40)
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(2.680.422.080,00)	(2.447.114.620,00)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(15.216.960.642,78)	(12.637.361.612,80)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(12.879.824.491,39)	(12.616.838.036,60)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(8.441.012.417,86)	(7.595.371.601,00)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(16.649.367.931,80)	(15.953.840.983,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(6.434.408.626,32)	(5.549.991.242,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(11.000.377.591,49)	(9.751.548.174,20)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(18.551.285.109,20)	(18.306.841.367,80)
33	SKPKD	(4.910.760.676,66)	(4.910.394.010,00)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
34	Sekretariat Daerah	(39.443.338.652,09)	(39.610.163.609,00)
35	Sekretariat DPRD	(36.644.505.092,27)	(33.815.182.043,00)
36	Inspektorat	(4.247.931.025,03)	(3.929.937.400,00)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(7.623.547.464,38)	(7.066.336.206,60)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(58.741.169.485,74)	(57.043.024.930,40)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(24.922.863.829,01)	(24.990.533.739,00)
40	Badan Kepegawaian Daerah	(5.877.486.829,48)	(5.105.236.816,40)
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(17.461.684.876,66)	(16.722.092.796,60)
42	Badan Penghubung	(5.899.387.023,66)	(5.618.018.600,40)
	Jumlah	**(1.277.277.423.648,09)**	**(1.145.916.875.293,67)**

5.3.1.3.7.1.6 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar — (Rp222.681.879.012,70)

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar (Rp222.681.879.012,70) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp201.666.700.209,30) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp21.015.178.803,40) atau 10,42% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(124.647.797.978,53)	(110.432.670.309,00)
2	Dinas Kesehatan	(4.481.448.374,17)	(4.138.515.949,00)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	(4.003.166.122,98)	(3.867.423.723,00)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(2.445.392.695,19)	(1.732.686.937,20)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(3.411.797.078,71)	(3.256.742.700,10)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(1.591.740.804,68)	(1.571.398.878,00)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(1.037.993.755,07)	(955.975.655,00)
8	RSJD Surakarta	(1.116.956.720,10)	(972.983.237,00)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(398.009.679,99)	(346.899.250,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(392.176.250,00)	(361.151.000,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(1.665.645.250,00)	(1.569.811.150,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(559.475.296,00)	(525.861.896,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(536.050.000,00)	(493.370.000,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(557.015.000,00)	(498.625.000,00)
15	Dinas Sosial	(450.732.784,00)	(533.757.784,00)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.172.533.115,66)	(1.569.469.749,00)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(1.780.924.101,66)	(1.567.553.085,00)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(306.400.661,67)	(302.910.000,00)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(3.102.320.589,33)	(2.948.791.296,00)
21	Dinas Ketahanan Pangan	(680.887.600,00)	(654.825.200,00)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(1.589.859.903,00)	(1.503.528.663,00)
22	Dinas Perhubungan	(2.155.344.379,33)	(2.005.645.536,00)
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	(5.431.174.287,62)	(4.048.019.031,00)
23	Dinas Koperasi dan UKM	(1.122.950.166,65)	(1.026.649.900,00)
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(687.111.196,67)	(619.627.270,00)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(2.150.885.678,00)	(2.028.868.178,00)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(4.513.134.687,20)	(4.353.545.098,40)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.507.524.808,54)	(1.322.898.230,00)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(3.931.883.110,00)	(3.818.420.710,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(505.921.650,00)	(461.866.100,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(3.848.355.208,00)	(3.537.596.048,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(1.220.039.117,60)	(1.083.702.724,60)
33	SKPKD	(108.911.000,00)	(108.911.000,00)
34	Sekretariat Daerah	(20.117.545.112,69)	(19.625.916.703,00)
35	Sekretariat DPRD	(3.385.554.535,32)	(3.030.825.802,00)
36	Inspektorat	(829.011.290,00)	(734.205.665,00)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(1.338.724.806,00)	(1.332.994.806,00)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(5.637.244.939,00)	(5.485.448.478,00)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(2.127.974.957,00)	(2.402.270.157,00)
40	Badan Kepegawaian Daerah	(333.190.525,99)	(316.120.776,00)
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(3.432.174.491,35)	(3.169.735.010,00)
42	Badan Penghubung	(1.368.899.305,00)	(1.348.481.525,00)
	Jumlah	**(222.681.879.012,70)**	**(201.666.700.209,30)**

5.3.1.3.7.1.7 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan — (1.663.836.712.794,19)

Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar (1.663.836.712.794,19) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.512.433.054.262,80) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp151.403.658.531,39) atau 10,01% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(7.677.090.870,97)	(6.810.966.100,20)
2	Dinas Kesehatan	(42.739.310.280,73)	(38.205.015.899,60)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	(550.630.151.881,67)	(514.850.641.141,60)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(481.886.280.456,29)	(438.180.017.908,80)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(280.399.391.227,36)	(254.184.635.084,40)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(125.059.433.458,27)	(111.975.114.239,00)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(55.278.165.316,79)	(48.406.075.673,00)
8	RSJD Surakarta	(48.493.063.371,90)	(39.861.221.267,00)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(68.860.693.548,69)	(57.568.452.245,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	(842.664.654,37)	(793.138.321,00)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(190.779.600,00)	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(540.992.525,00)	(540.692.525,00)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-
21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	-	-
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
23	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(3.100.000,00)	(1.925.000,00)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(9.960.000,00)	(5.940.000,00)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(965.708,34)	-
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(7.100.000,00)	(7.100.000,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(315.255.333,34)	(211.371.800,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(1.000.000,00)	(500.000,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(89.780.000,00)	(85.220.000,00)
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	(96.241.666,67)	(103.690.000,00)
35	Sekretariat DPRD	(294.215.000,00)	(289.595.000,00)
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(73.718.000,00)	(45.289.000,00)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	(149.523.243,80)	(116.284.058,20)
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(197.836.650,00)	(190.169.000,00)
42	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(1.663.836.712.794,19)**	**(1.512.433.054.262,80)**

5.3.1.3.7.1.8 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium (Rp401.356.159.843,71)

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium sebesar (Rp401.356.159.843,71) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp360.964.005.782,39) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp40.392.154.061,32) atau 11,19% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(249.834.972.883,62)	(226.196.227.016,85)
2	Dinas Kesehatan	(22.275.572.829,29)	(19.098.850.022,65)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	(13.824.967.981,02)	(12.806.783.492,77)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(2.948.987.371,31)	(1.817.516.473,68)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(17.379.016.583,24)	(16.880.339.103,48)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(1.844.803.245,53)	(1.754.116.071,75)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(2.931.801.193,95)	(2.759.918.505,38)
8	RSJD Surakarta	(2.700.016.937,44)	(1.450.073.610,13)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(3.322.510.966,68)	(1.734.114.993,50)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(7.039.737.686,69)	(6.535.357.645,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(1.987.783.202,47)	(1.733.255.215,21)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	(77.211.000,00)	(72.311.500,00)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(42.267.660,42)	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(7.724.943.397,79)	(7.209.603.996,69)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(12.202.850.047,97)	(11.012.991.275,79)
21	Dinas Ketahanan Pangan	(5.585.003.149,83)	(5.509.997.705,16)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(1.490.500,00)	-
22	Dinas Perhubungan	(163.343.000,00)	(163.343.000,00)
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(49.662.500,00)	(24.831.250,00)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(90.230.000,00)	(90.230.000,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(7.367.733.355,67)	(6.682.534.592,51)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(8.962.698.865,00)	(8.647.102.513,13)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(10.595.287.579,14)	(9.174.377.443,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(4.020.480.135,45)	(3.637.352.387,50)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(17.711.408.421,20)	(15.305.330.326,51)
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	(50.000.000,00)	(50.000.000,00)
35	Sekretariat DPRD	-	-
36	Inspektorat	(104.322.000,00)	(95.472.000,00)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(4.750.000,00)	(12.166.666,70)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(512.307.350,00)	(509.808.975,00)
42	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(401.356.159.843,71)**	**(360.964.005.782,39)**

5.3.1.3.7.1.9 Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan (Rp6.731.866.504,07)

Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan sebesar (Rp6.731.866.504,07) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp6.064.254.909,50) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp667.611.594,57) atau 11,01% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(3.063.784.665,74)	(2.631.074.576,50)
2	Dinas Kesehatan	-	-
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	-	-
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-
6	RSUD Tugurejo Semarang	-	-
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(187.829.055,00)	(187.829.055,00)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	-	-
8	RSJD Surakarta	-	-
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(6.175.000,00)	(6.175.000,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(5.953.500,00)	(5.953.500,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(146.670.000,00)	(138.410.000,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	-	-
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.585.431.175,00)	(1.453.225.003,00)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(144.900.000,00)	(125.392.500,00)
21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	(31.204.725,00)	(31.204.725,00)
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(520.833,33)	-
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(175.600.000,00)	(131.700.000,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(52.000.000,00)	(43.500.000,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(34.616.000,00)	(14.734.000,00)
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	(1.265.031.550,00)	(1.265.031.550,00)
35	Sekretariat DPRD	-	-
36	Inspektorat	(8.500.000,00)	(6.375.000,00)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(23.650.000,00)	(23.650.000,00)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-
42	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(6.731.866.504,07)**	**(6.064.254.909,50)**

5.3.1.3.7.1.10 Akumulasi Penyusutan Komputer (Rp1.132.062.918.592,94)

Akumulasi Penyusutan Komputer sebesar (Rp1.132.062.918.592,94) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp983.214.833.561,75) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp148.848.085.031,19) atau 15,14% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(836.718.929.407,25)	(717.133.851.606,75)
2	Dinas Kesehatan	(12.610.422.011,88)	(11.701.288.673,25)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	(16.575.285.487,70)	(14.771.270.446,00)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(19.375.247.052,76)	(16.710.130.257,50)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(5.081.369.266,27)	(4.741.036.721,00)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(3.224.398.649,19)	(2.905.642.160,50)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(3.765.906.454,19)	(3.490.991.250,00)
8	RSJD Surakarta	(4.631.943.369,83)	(4.076.887.867,50)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(2.579.191.270,88)	(2.548.673.677,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(3.224.927.727,56)	(2.756.392.040,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(5.408.470.610,49)	(5.132.587.090,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(1.422.846.822,33)	(1.287.897.739,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(1.657.159.977,50)	(1.562.060.985,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.214.829.108,75)	(1.085.608.690,00)
15	Dinas Sosial	(5.212.145.418,79)	(5.087.894.980,00)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.138.435.543,39)	(1.998.511.315,00)

17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(5.867.195.319,93)	(5.337.647.895,00)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(848.472.495,87)	(797.789.800,00)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(8.689.472.045,52)	(8.156.391.075,75)
21	Dinas Ketahanan Pangan	(2.087.996.545,76)	(1.843.746.225,00)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(3.045.736.847,00)	(2.820.662.347,00)
22	Dinas Perhubungan	(5.314.607.297,83)	(5.142.663.310,50)
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	(47.331.240.330,87)	(34.751.777.255,00)
23	Dinas Koperasi dan UKM	(1.598.578.055,19)	(4.035.746.594,00)
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(3.398.294.979,73)	(3.191.848.768,00)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(4.159.509.634,33)	(3.678.366.911,00)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(5.224.067.563,57)	(4.923.537.151,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(3.473.220.724,44)	(3.172.355.491,50)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(5.771.810.984,33)	(5.435.973.776,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(1.678.174.818,75)	(1.351.586.675,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(5.795.932.369,00)	(5.090.685.714,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(6.951.264.611,18)	(6.801.212.157,00)
33	SKPKD	(344.055.995,00)	(344.055.995,00)
34	Sekretariat Daerah	(13.400.073.157,72)	(13.009.699.956,00)
35	Sekretariat DPRD	(8.213.009.498,97)	(7.313.643.999,00)
36	Inspektorat	(2.043.567.167,99)	(1.900.949.668,00)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(4.553.553.952,84)	(4.255.230.016,00)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(46.724.148.911,00)	(43.807.606.154,50)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(8.138.016.483,81)	(7.331.277.588,00)
40	Badan Kepegawaian Daerah	(6.468.766.640,39)	(5.914.547.387,00)
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(4.683.844.607,83)	(4.445.586.387,00)
42	Badan Penghubung	(1.416.799.375,33)	(1.369.519.767,00)
	Jumlah	**(1.132.062.918.592,94)**	**(983.214.833.561,75)**

5.3.1.3.7.1.11 Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi (Rp166.088.939,87)

Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi sebesar (Rp166.088.939,87) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp116.174.531,00) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp49.914.408,87) atau 42,97% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(154.760.939,87)	(108.950.531,00)
2	Dinas Kesehatan	(30.000,00)	-
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(11.298.000,00)	(7.224.000,00)
	Jumlah	**(166.088.939,87)**	**(116.174.531,00)**

5.3.1.3.7.1.12 Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran (Rp29.906.845,78)

Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran sebesar (Rp29.906.845,78) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp15.989.500,00) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp13.917.345,78) atau 87,04% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(29.906.845,78)	(15.989.500,00)
	Jumlah	**(29.906.845,78)**	**(15.989.500,00)**

5.3.1.3.7.1.13 Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (Rp123.415.808,87)

Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebesar (Rp123.415.808,87) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp67.140.465,01) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp56.275.343,86) atau 83,82% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(107.741.168,87)	(59.303.145,01)
2	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(15.674.640,00)	(7.837.320,00)
	Jumlah	**(123.415.808,87)**	**(67.140.465,01)**

5.3.1.3.7.1.14 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi (Rp6.354.000,00)

Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi sebesar (Rp6.354.000,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp4.236.000,00) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp2.118.000,00) atau 50,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(6.354.000,00)	(4.236.000,00)
	Jumlah	**(6.354.000,00)**	**(4.236.000,00)**

5.3.1.3.7.1.15 Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja (Rp3.017.476.258,67)

Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja sebesar (Rp3.017.476.258,67) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.991.362.494,20) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp1.026.113.764,47) atau 51,53% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(2.510.535.341,99)	(1.965.653.294,20)
2	Dinas Kesehatan	(3.322.916,67)	-
3	RSJD Surakarta	(29.145.600,00)	(19.430.400,00)
4	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(445.500.000,00)	-
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(20.057.400,00)	(6.278.800,00)
6	Dinas Ketahanan Pangan	(2.456.666,68)	-
7	SKPKD	(5.625.000,00)	-
8	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(833.333,33)	-
	Jumlah	**(3.017.476.258,67)**	**(1.991.362.494,20)**

5.3.1.3.7.1.16 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga (Rp38.014.966.866,31)

Akumulasi Penyusutan Alat Peraga sebesar (Rp38.014.966.866,31) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp26.216.518.484,80) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp11.798.448.381,51) atau 45,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(37.520.885.906,55)	(26.166.124.764,80)
2	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	(42.923.980,76)	(21.800.000,00)
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(1.962.549,02)	-
4	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(7.559.200,00)	(4.892.800,00)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(1.663.749,96)	-
6	Dinas Sosial	(239.940.000,00)	(23.000.000,00)
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(200.031.480,02)	(700.920,00)
	Jumlah	**(38.014.966.866,31)**	**(26.216.518.484,80)**

5.3.1.3.7.1.17 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi (Rp1.063.464.137,20)

Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi sebesar (Rp1.063.464.137,20) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp489.823.084,63) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp573.641.052,57) atau 117,11% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(622.065.449,70)	(425.842.584,63)
2	Dinas Kesehatan	(1.171.875,00)	-
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	-	-
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(35.625.000,00)	(23.750.000,00)
5	RSUD Tugurejo Semarang	(19.875.000,00)	(11.750.000,00)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	-	-
8	RSJD Surakarta	-	-
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(352.920.000,00)	(11.625.000,00)
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(22.474.000,00)	(16.855.500,00)
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(9.332.812,50)	-
	Jumlah	**(1.063.464.137,20)**	**(489.823.084,63)**

5.3.1.3.7.1.18 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu (Rp16.473.664.476,60)

Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu sebesar (Rp16.473.664.476,60) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp14.206.765.959,21) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp2.266.898.517,39) atau 15,96% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(65.278.197,89)	(40.201.337,50)
2	Dinas Perhubungan	(16.356.434.487,04)	(14.128.180.121,71)
3	Dinas Komunikasi dan Informasi	(34.960.625,00)	(27.968.500,00)
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	(2.072.916,67)	(750.000,00)
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(1.677.000,00)	(838.500,00)
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(13.241.250,00)	(8.827.500,00)
	Jumlah	**(16.473.664.476,60)**	**(14.206.765.959,21)**

5.3.1.3.7.1.19 Akumulasi Penyusutan Alat Olahraga (Rp17.260.329.452,91)

Akumulasi Penyusutan Alat Olahraga sebesar (Rp17.260.329.452,91) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp15.063.869.452,75) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp2.196.460.000,16) atau 14,58% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(12.415.457.683,22)	(11.067.865.448,75)
2	Dinas Kesehatan	(81.729.600,00)	(81.729.600,00)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	(25.800.000,00)	-
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(16.109.700,00)	(12.139.800,00)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(10.375.000,00)	(10.125.000,00)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(227.588.719,00)	(227.588.719,00)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(43.450.000,00)	(21.725.000,00)
8	RSJD Surakarta	(20.880.000,00)	(20.880.000,00)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(7.562.500,00)	(6.325.000,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(7.575.000,00)	(5.050.000,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(20.662.500,00)	(13.775.000,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	(53.095.000,00)	(71.050.000,00)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(10.445.833,33)	(9.300.000,00)
21	Dinas Ketahanan Pangan	(3.006.000,00)	(3.006.000,00)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	(8.601.440,00)	(8.601.440,00)
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	(62.736.458,33)	(40.487.500,00)
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(2.386.471.219,86)	(1.803.014.750,00)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(200.484.000,00)	(200.484.000,00)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(25.263.350,00)	(25.263.350,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(23.750.000,00)	(23.750.000,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(72.210.000,00)	(72.210.000,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(203.656.250,00)	(203.656.250,00)
33	SKPKD	(13.985.000,00)	(13.985.000,00)
34	Sekretariat Daerah	(216.025.916,67)	(195.053.000,00)
35	Sekretariat DPRD	(20.000.000,00)	(20.000.000,00)
36	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(620.311.500,00)	(446.623.500,00)
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
38	Badan Kepegawaian Daerah	(163.237.062,50)	(160.321.375,00)
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(273.959.720,00)	(273.959.720,00)
40	Badan Penghubung	(22.900.000,00)	(22.900.000,00)
	Jumlah	**(17.260.329.452,91)**	**(15.063.869.452,75)**

5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp2.145.263.849.523,92)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp2.145.263.849.523,92) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.994.887.391.629,88) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp150.376.457.894,04) atau 7,54% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(2.118.586.602.089,20)	(1.974.733.025.456,77)
2	Akumulasi Penyusutan Monumen	(4.118.038.725,71)	(3.265.590.242,12)
3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	(1.000.010.502,31)	(1.057.910.809,20)
4	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	(21.559.198.206,70)	(15.830.865.121,79)
	Jumlah	**(2.145.263.849.523,92)**	**(1.994.887.391.629,88)**

5.3.1.3.7.2.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (Rp2.118.586.602.089,20)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung sebesar (Rp2.118.586.602.089,20) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.974.733.025.456,77) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp143.853.576.632,43) atau 7,28% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(1.171.506.784.619,99)	(1.089.875.791.326,24)
2	Dinas Kesehatan	(22.734.628.494,54)	(20.930.301.417,56)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	(63.262.386.086,56)	(57.247.046.363,61)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(61.208.021.815,00)	(55.681.031.308,04)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(31.561.758.831,75)	(28.782.824.113,26)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(17.492.532.479,55)	(15.704.126.453,74)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(13.472.492.503,79)	(12.648.100.350,36)
8	RSJD Surakarta	(13.765.416.153,62)	(12.958.373.455,49)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(14.586.839.430,44)	(13.622.673.693,74)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(12.189.303.715,73)	(11.475.568.768,31)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(9.584.897.225,03)	(9.178.564.655,05)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(3.114.915.534,20)	(2.903.085.617,82)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(4.312.921.532,67)	(3.940.832.230,86)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.119.610.919,08)	(2.001.019.906,05)
15	Dinas Sosial	(85.567.909.076,29)	(81.786.253.997,68)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.682.605.665,64)	(1.513.344.821,91)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(20.110.340.609,32)	(18.274.316.118,15)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(9.014.285.989,30)	(8.638.606.488,60)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(12.846.425.457,43)	(9.942.979.005,00)
21	Dinas Ketahanan Pangan	(2.997.153.664,41)	(2.734.669.448,82)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(3.439.236.598,97)	(3.229.989.488,29)
22	Dinas Perhubungan	(33.078.184.377,97)	(30.766.226.596,64)
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	(3.038.061.011,20)	(2.926.099.314,36)
23	Dinas Koperasi dan UKM	(12.464.803.132,40)	(11.473.274.211,40)
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(3.415.224.074,01)	(3.206.453.433,92)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(29.641.872.030,15)	(23.655.030.905,29)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(11.173.141.151,71)	(10.678.372.356,16)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(25.761.544.246,55)	(24.469.754.202,47)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(49.270.110.573,89)	(46.501.043.605,98)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(22.224.530.754,67)	(20.260.183.189,16)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(8.926.210.763,62)	(7.773.638.282,92)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(24.828.782.087,73)	(23.146.356.937,34)
33	SKPKD	(74.035.464.951,02)	(73.577.233.974,18)
34	Sekretariat Daerah	(50.332.574.255,24)	(50.737.285.122,81)
35	Sekretariat DPRD	(17.350.988.561,04)	(16.661.260.733,41)
36	Inspektorat	(6.117.765.468,49)	(5.769.985.269,38)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(12.822.209.631,58)	(12.257.955.352,00)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(67.712.514.364,92)	(63.416.342.876,76)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(47.030.029.624,08)	(42.859.622.368,00)
40	Badan Kepegawaian Daerah	(4.173.025.550,70)	(3.992.587.537,16)
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(31.404.466.425,36)	(30.665.405.647,82)
42	Badan Penghubung	(7.214.632.649,56)	(6.869.414.511,03)
	Jumlah	**(2.118.586.602.089,32)**	**(1.974.733.025.456,77)**

5.3.1.3.7.2.2 Akumulasi Penyusutan Monumen (Rp4.118.038.725,71)

Akumulasi Penyusutan Monumen sebesar (Rp4.118.038.725,71) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp3.265.590.242,12) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp852.448.483,59) atau 26,10% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(2.102.537.043,35)	(1.553.688.273,80)
2	Dinas Kesehatan	(20.182.680,00)	(17.299.440,00)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	-	-
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-
6	RSUD Tugurejo Semarang	-	-
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(28.525.320,00)	(23.207.100,00)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	-	-
8	RSJD Surakarta	(130.248.416,00)	(113.967.364,00)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(570.000,00)	(540.000,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(64.752.200,00)	(59.032.020,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	(14.352.360,00)	(13.699.980,00)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(57.833.164,40)	(21.000.000,00)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(47.513.828,60)	(73.523.000,00)
21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	-	-
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(357.000.802,00)	(280.018.285,60)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(2.808.000,00)	(2.652.000,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	-	-
35	Sekretariat DPRD	(556.416.719,36)	(429.718.439,52)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(118.570.900,00)	(101.632.200,00)
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-
42	Badan Penghubung	(616.727.292,00)	(575.612.139,20)
	Jumlah	**(4.118.038.725,71)**	**(3.265.590.242,12)**

5.3.1.3.7.2.3 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara (Rp1.000.010.502,31)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara sebesar (Rp1.000.010.502,31) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.057.910.809,20) mengalami **penurunan** sebesar Rp57.900.306,89 atau (5,47%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(161.327.317,00)	(246.818.882,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	(12.240.000,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	(1.786.680,00)
4	Dinas Ketahanan Pangan	-	-
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
6	Dinas Perhubungan	(55.925.628,90)	(45.218.472,60)
7	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	(5.767.800,00)
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	(82.589.519,70)	(116.361.953,40)
10	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(696.998.236,71)	(627.260.621,20)
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-
14	SKPKD	(1.099.800,00)	(1.076.400,00)
15	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(2.070.000,00)	(1.380.000,00)
16	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(1.000.010.502,31)**	**(1.057.910.809,20)**

5.3.1.3.7.2.4 Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti (Rp21.559.198.206,70)

Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar (Rp21.559.198.206,70) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp15.830.865.121,79) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp5.728.333.084,91) atau 36,18% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(9.895.919.260,77)	(6.178.609.619,20)
2	Dinas Kesehatan	(797.785.566,40)	(698.372.245,60)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	(182.472.700,00)	(168.273.080,00)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(162.624.000,00)	(152.460.000,00)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(78.323.783,04)	(69.851.517,66)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(825.034.086,00)	(736.812.168,00)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(31.654.440,00)	(28.137.280,00)
8	RSJD Surakarta	-	-
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(445.490.113,24)	(408.519.582,18)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(22.321.280,00)	(19.531.120,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(37.794.000,00)	(34.561.000,00)
15	Dinas Sosial	(226.328.952,96)	(179.083.110,61)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(112.114.319,00)	(101.224.978,00)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(218.492.380,00)	(91.253.960,00)
21	Dinas Ketahanan Pangan	(65.960.400,00)	(58.619.200,00)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	(35.637.713,33)	(24.469.222,22)
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	(3.600.240,00)	(1.800.120,00)
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(15.402.800,00)	(13.202.400,00)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(379.760.949,70)	(126.254.790,19)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(85.033.567,83)	(77.901.832,17)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(964.747.051,97)	(410.367.184,64)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(2.673.182.038,26)	(2.420.436.742,83)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(757.279.468,62)	(668.019.360,23)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(26.619.930,00)	(17.746.620,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-
33	SKPKD	(181.281.040,00)	(215.312.744,00)
34	Sekretariat Daerah	-	-
35	Sekretariat DPRD	(70.122.544,00)	(49.706.948,00)
36	Inspektorat	(2.862.000,00)	(2.575.800,00)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(24.497.200,00)	(22.612.800,00)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(201.270.458,24)	(165.455.807,60)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(2.463.392.873,34)	(2.154.239.049,66)
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(572.193.050,00)	(535.454.839,00)
42	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(21.559.198.206,70)**	**(15.830.865.121,79)**

5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan — (Rp7.534.456.813.217,39)

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp7.534.456.813.217,39) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp6.971.333.399.289,46) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp563.123.413.927,93) atau 8,08% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	(7.101.438.215.456,08)	(6.595.572.105.821,28)
2	Bangunan Air	(380.357.076.753,09)	(330.819.996.803,25)

3	Instalasi	(33.751.447.030,09)	(28.811.683.244,82)
4	Jaringan	(18.910.073.978,13)	(16.129.613.420,11)
	Jumlah	**(7.534.456.813.217,39)**	**(6.971.333.399.289,46)**

5.3.1.3.7.3.1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan (Rp7.101.438.215.456,08)

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan sebesar (Rp7.101.438.215.456,08) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp6.595.572.105.821,28) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp505.866.109.634,80) atau 7,67% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(12.532.804.433,08)	(11.079.796.901,00)
2	Dinas Kesehatan	(117.825.000,00)	(117.825.000,00)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	(57.147.060,00)	(38.098.040,00)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-
6	RSUD Tugurejo Semarang	(61.472.905,28)	(60.032.542,12)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(2.999.172.375,00)	(2.732.198.625,00)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(2.369.138.700,00)	(2.106.782.600,00)
8	RSJD Surakarta	(1.569.267.311,00)	(1.376.730.761,00)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(96.997.000,00)	(87.297.300,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(7.001.974.503.234,36)	(6.504.161.720.693,88)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	(52.859.000,00)	(52.859.000,00)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(5.869.213.519,09)	(3.879.705.646,00)
21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	(17.556.068.441,86)	(16.004.689.580,28)
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(407.458.550,80)	(316.280.769,00)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(20.889.285.488,94)	(19.418.912.018,00)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(3.462.523.000,00)	(3.070.180.900,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(1.879.823.650,00)	(1.550.480.025,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-
33	SKPKD	(26.900.626.970,00)	(26.900.626.970,00)
34	Sekretariat Daerah	(3.016,67)	-
35	Sekretariat DPRD	(387.415.000,00)	(387.415.000,00)
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(2.254.610.800,00)	(2.230.473.450,00)
42	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(7.101.438.215.456,08)**	**(6.595.572.105.821,28)**

5.3.1.3.7.3.2 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Rp380.357.076.753,09)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air sebesar (Rp380.357.076.753,09) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp330.819.996.803,25) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp49.537.079.949,84) atau 14,97% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(4.619.906.859,62)	(3.771.165.226,74)
2	Dinas Kesehatan	(171.412.046,67)	(153.257.090,00)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	(386.345.151,92)	(334.572.280,83)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(175.000.000,00)	(175.000.000,00)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(257.932.180,47)	(225.964.002,50)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(1.103.080.096,67)	(995.891.990,01)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(36.127.300,00)	(32.843.000,00)
8	RSJD Surakarta	(41.958.900,00)	(38.768.375,00)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(273.778.108,33)	(238.345.937,50)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(43.027.303.280,84)	(40.106.332.185,85)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(285.594.180.252,29)	(247.914.921.405,42)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(15.920.000,00)	(10.613.333,33)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	(1.298.442.793,85)	(1.189.733.839,44)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(37.825.000,00)	(35.600.000,00)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(4.173.680,00)	(4.029.760,00)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(1.165.320.201,72)	(902.146.735,24)
21	Dinas Ketahanan Pangan	(102.167.500,00)	(100.022.000,00)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	(3.835.126.793,39)	(3.463.930.149,60)
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	(55.028.185,00)	(49.884.930,00)
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(22.878.400,00)	(20.018.600,00)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(198.761.353,05)	(92.153.819,72)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(84.488.709,68)	(78.657.258,06)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(28.741.398.773,66)	(22.973.499.061,70)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(3.667.782.785,10)	(3.262.127.383,34)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(299.633.174,26)	(239.153.030,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(4.458.042.418,23)	(3.796.581.300,65)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	-	-
35	Sekretariat DPRD	(638.529.308,34)	(578.977.749,99)
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(18.425.000,00)	(12.283.333,33)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(2.791.250,00)	(2.537.500,00)
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(23.317.250,00)	(20.985.525,00)
42	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(380.357.076.753,09)**	**(330.819.996.803,25)**

5.3.1.3.7.3.3 Akumulasi Penyusutan Instalasi (Rp33.751.447.030,09)

Akumulasi Penyusutan Instalasi sebesar (Rp33.751.447.030,09) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp28.811.683.244,82) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp4.939.763.785,27) atau 17,15% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(3.979.012.512,86)	(3.267.491.167,02)
2	Dinas Kesehatan	(1.057.522.359,87)	(931.184.261,60)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	(1.750.026.814,61)	(1.151.058.350,00)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(4.361.725.064,79)	(3.977.686.599,57)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(5.563.603.768,00)	(4.907.015.097,39)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(1.057.279.638,08)	(940.716.064,95)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(1.159.861.277,79)	(773.027.000,00)
8	RSJD Surakarta	(1.146.514.607,46)	(1.012.587.048,38)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(1.161.824.852,52)	(1.028.812.619,30)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(30.949.677,00)	(27.510.824,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(157.654.413,00)	(140.765.667,14)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(54.622.000,00)	(51.726.333,33)
15	Dinas Sosial	(21.333.333,33)	(21.000.000,00)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(25.144.075,00)	(22.858.250,00)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(178.993.937,33)	(156.480.247,90)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(610.377.658,16)	(440.230.967,85)
21	Dinas Ketahanan Pangan	(9.496.666,67)	(8.633.333,33)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	(3.459.697.161,12)	(3.010.276.171,28)
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	(84.223.850,00)	(74.630.633,34)
23	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(46.310.291,00)	(38.795.142,50)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(684.251.679,82)	(621.912.491,67)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(91.599.265,58)	(82.071.271,78)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(547.211.431,67)	(438.236.835,22)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(4.803.987.356,78)	(4.109.965.210,97)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(14.979.450,00)	(13.131.757,50)
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	(632.658.825,84)	(582.617.315,00)
35	Sekretariat DPRD	-	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(207.453.976,88)	(186.486.271,25)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(80.507.426,53)	(74.109.086,67)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(157.378.370,55)	(145.620.313,73)
40	Badan Kepegawaian Daerah	(359.892.450,00)	(339.892.500,00)
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(211.974.433,75)	(192.917.545,00)
42	Badan Penghubung	(43.378.404,10)	(42.236.867,15)
	Jumlah	**(33.751.447.030,09)**	**(28.811.683.244,82)**

5.3.1.3.7.3.4 Akumulasi Penyusutan Jaringan (Rp18.910.073.978,13)

Akumulasi Penyusutan Jaringan sebesar (Rp18.910.073.978,13) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp16.129.613.420,11) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp2.780.460.558,02) atau 17,24% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(4.989.054.379,97)	(4.416.560.362,41)
2	Dinas Kesehatan	(233.372.872,29)	(203.649.970,94)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	(28.331.503,27)	(19.755.958,33)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(742.145.891,16)	(617.582.422,65)
6	RSUD Tugurejo Semarang	-	-
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(588.462.841,26)	(531.212.721,05)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(351.647.153,00)	(309.909.877,50)
8	RSJD Surakarta	-	-
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(196.800.680,91)	(1.777.466,40)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
15	Dinas Sosial	(32.292.100,00)	(29.530.966,67)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(39.243.013,33)	(36.132.260,00)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(323.596.750,00)	(276.941.589,16)
21	Dinas Ketahanan Pangan	(36.452.501,67)	(33.976.448,33)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
22	Dinas Perhubungan	(3.401.053.704,33)	(2.626.455.227,36)
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	(17.972.925,00)	(15.123.340,00)
23	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(2.728.814,68)	(2.585.192,85)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(105.776.664,95)	(90.424.129,13)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(11.272.500,00)	(10.855.000,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(199.076.673,27)	(177.642.573,72)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(200.771.249,98)	(169.603.541,68)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(262.181.899,16)	(226.168.947,50)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(6.802.840.637,73)	(6.017.200.133,12)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(88.388.804,17)	(81.974.886,67)
33	SKPKD	(26.980.668,00)	(22.483.890,00)
34	Sekretariat Daerah	-	-
35	Sekretariat DPRD	-	-
36	Inspektorat	-	-
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(203.673.050,00)	(186.997.156,25)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	(4.133.333,39)
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(25.956.700,00)	(20.936.025,00)
42	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(18.910.073.978,13)**	**(16.129.613.420,11)**

5.3.1.3.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (Rp1.976.267.532,97)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp1.976.267.532,97) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.501.282.772,00) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp474.984.760,97) atau 31,64% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	(1.976.267.532,97)	(1.501.282.772,00)
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
	Jumlah	**(1.976.267.532,97)**	**(1.501.282.772,00)**

5.3.1.3.7.4.1 Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (Rp1.976.267.532,97)

Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar (Rp1.976.267.532,97) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.501.282.772,00) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp474.984.760,97) atau 31,64% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(1.627.870.232,97)	(1.272.310.172,00)
2	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(7.200.000,00)	(8.352.000,00)
3	Satuan Polisi Pamong Praja	(300.131.700,00)	(200.087.800,00)
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(30.865.600,00)	(15.432.800,00)
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(10.200.000,00)	(5.100.000,00)
	Jumlah	**(1.976.267.532,97)**	**(1.501.282.772,00)**

5.3.1.4 Dana Cadangan Rp200.000.000.000,00

Dana Cadangan sebesar Rp200.000.000.000,00 yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp200.000.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	SKPKD	200.000.000.000,00	
	Jumlah	**200.000.000.000,00**	-

5.3.1.5 Aset Lainnya — Rp1.483.022.752.887,27

Aset Lainnya sebesar Rp1.483.022.752.887,27 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.508.575.287.759,63 mengalami **penurunan** sebesar (Rp25.552.534.872,36) atau (1,69%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	-	-
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	74.906.991.293,00	103.005.806.256,00
3	Aset Tak Berwujud	28.936.052.970,00	29.639.574.573,00
4	Aset Lain-lain	1.756.554.545.840,00	1.739.648.408.125,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(21.190.441.634,27)	(21.983.069.404,75)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(356.184.395.581,46)	(341.735.431.789,62)
	Jumlah	**1.483.022.752.887,27**	**1.508.575.287.759,63**

5.3.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga — Rp74.906.991.293,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp74.906.991.293,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp103.005.806.256,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp28.098.814.963,00) atau (27,28%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Sewa	66.415.293.293,00	64.416.799.324,00
2	Kerja Sama Pemanfaatan	8.491.698.000,00	8.523.543.840,00
3	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	-	-
4	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	-	-
5	Pinjam Pakai	-	30.065.463.092,00
	Jumlah	**74.906.991.293,00**	**103.005.806.256,00**

5.3.1.5.1.1 Sewa — Rp66.415.293.293,00

Sewa sebesar Rp66.415.293.293,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp64.416.799.324,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.998.493.969,00 atau 3,10% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air	4.479.874.000,00	4.479.874.000,00
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.395.000.000,00	1.395.000.000,00
3	SKPKD	60.287.057.425,00	58.288.563.456,00
4	Badan Perencaaan Pembangunan Daerah	214.421.868,00	214.421.868,00
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	38.940.000,00	38.940.000,00
	Jumlah	**66.415.293.293,00**	**64.416.799.324,00**

5.3.1.5.1.2 Kerjasama Pemanfaatan — Rp8.491.698.000,00

Kerjasama Pemanfatan sebesar Rp8.491.698.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.523.543.840,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp31.845.840,00 atau 0,37% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.944.850.000,00	2.944.850.000,00
2	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.841.848.000,00	1.841.848.000,00
3	SKPKD	3.705.000.000,00	3.736.845.840,00
	Jumlah	**8.491.698.000,00**	**8.523.543.840,00**

5.3.1.5.1.3 Pinjam Pakai — Rp,00

Pinjam Pakai sebesar Rp,00 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah bahwa Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai disajikan dalam aset tetap. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp30.065.463.092,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp30.065.463.092,00) atau (100%), dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	2.046.600.000,00
2	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	-	211.648.338,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	758.166.000,00
4	SKPKD	-	20.206.175.004,00
5	Sekretariat Daerah	-	3.950.216.750,00
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	2.892.657.000,00
	Jumlah	-	**30.065.463.092,00**

5.3.1.5.2 Aset Tak Berwujud — Rp28.936.052.970,00

Aset Tak Berwujud sebesar Rp28.936.052.970,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp29.639.574.573,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp703.521.603,00) atau (2,37%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Goodwill	-	-
2	Lisensi dan Franchise	5.000.000,00	18.700.000,00
3	Hak Cipta	-	-
4	Hak Paten	-	-
5	Software	28.666.735.313,00	29.430.776.916,00
6	Kajian	84.397.000,00	84.397.000,00
7	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	-	-
8	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-
9	Aset Tidak Berwujud Lainnya	179.920.657,00	105.700.657,00
	Jumlah	**28.936.052.970,00**	**29.639.574.573,00**

5.3.1.5.2.1 Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise **Rp5.000.000,00**

Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise sebesar Rp5.000.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,18.700.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp13.700.000,00) atau (73,26%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika		13.700.000,00
	Jumlah	**5.000.000,00**	**18.700.000,00**

5.3.1.5.2.2 Aset Tidak Berwujud-Software **Rp28.666.735.313,00**

Aset Tidak Berwujud-Software sebesar Rp28.666.735.313,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp29.430.776.916,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp764.041.603,00) atau (2,60%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	2.930.474.367,00	2.478.181.042,00
2	Dinas Kesehatan	1.752.277.800,00	2.100.277.200,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	4.058.890.378,00	3.520.631.378,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	746.032.740,00	1.291.554.233,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	1.340.090.000,00	1.320.090.000,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	2.322.001.000,00	2.114.121.000,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	1.532.250.000,00	1.497.000.000,00
8	RSJD Surakarta	2.168.846.409,00	2.665.081.409,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.423.192.169,00	1.439.542.169,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	315.557.000,00	128.805.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang		-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	578.387.600,00	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	189.500.000,00	189.500.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	176.500.000,00	39.700.000,00
15	Dinas Sosial	112.650.500,00	519.580.500,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah		-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	611.580.000,00	597.840.000,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	166.820.000,00	191.445.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		29.500.000,00
21	Dinas Ketahanan Pangan	414.385.000,00	195.580.000,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	273.248.500,00	124.949.000,00
22	Dinas Perhubungan	66.000.000,00	-
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	1.785.036.000,00	1.731.466.000,00
23	Dinas Koperasi dan UKM	216.709.000,00	201.661.000,00
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	522.633.000,00	849.478.000,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1.043.147.950,00	774.688.000,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	140.950.000,00	140.950.000,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan		1.081.344.220,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	119.500.000,00	39.500.000,00

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	615.240.900,00	556.500.900,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	488.733.000,00	488.733.000,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.544.750,00	72.284.750,00
33	SKPKD		-
34	Sekretariat Daerah		-
35	Sekretariat DPRD	386.301.000,00	304.804.000,00
36	Inspektorat	311.165.000,00	393.850.865,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	24.560.000,00	479.757.000,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	501.362.000,00	501.362.000,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	809.745.000,00	926.045.000,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	151.539.500,00	151.539.500,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	293.434.750,00	293.434.750,00
42	Badan Penghubung	53.450.000,00	-
	Jumlah	**28.666.735.313,00**	**29.430.776.916,00**

5.3.1.5.2.3 Aset Tidak Berwujud-Kajian — Rp84.397.000,00

Aset Tidak Berwujud-Kajian sebesar Rp84.397.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp84.397.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	84.397.000,00	84.397.000,00
	Jumlah	**84.397.000,00**	**84.397.000,00**

5.3.1.5.2.4 Aset Tidak Berwujud-Lainnya — Rp179.920.657,00

Aset Tidak Berwujud-Lainnya sebesar Rp179.920.657,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp105.700.657,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp74.220.000,00 atau 70,22% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38.393.157,00	36.743.157,00
2	Dinas Perhubungan	43.457.500,00	43.457.500,00
3	Dinas Koperasi dan UMKM		25.500.000,00
4	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	98.070.000,00	
	Jumlah	**179.920.657,00**	**105.700.657,00**

5.3.1.5.3 Aset Lain-Lain — Rp1.756.554.545.840,00

Aset Lain-Lain sebesar Rp1.756.545.840,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.739.648.408.125,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp16.906.137.715,00 atau 0,97% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	347.363.773.925,00	1.739.514.391.952,00
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.409.154.825.553,00	-
3	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	35.946.362,00	134.016.173,00
	Jumlah	**1.756.554.545.840,00**	**1.739.648.408.125,00**

5.3.1.5.3.1 Aset Rusak Berat/Usang — Rp347.363.773.925,00

Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp347.363.773.925,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.739.514.391.952,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.392.150.618.027,00) atau (80,03%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	53.433.288.721,00	49.027.299.451,00
2	Dinas Kesehatan	8.690.021.322,00	15.496.924.393,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	3.593.538.375,00	11.396.538.375,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	97.490.800.343,00	97.559.890.327,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	5.761.281.546,00	12.111.290.657,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	1.514.779.299,00	1.474.679.299,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	3.007.704.424,00	5.718.860.052,00
8	RSJD Surakarta	4.953.063.101,00	4.456.828.101,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	4.919.814.727,00	1.684.124.410,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	23.745.733.386,00	1.046.545.068.117,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	8.784.997.337,00	36.656.805.678,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	619.423.794,00	619.423.794,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.673.917.484,00	3.636.490.316,00
15	Dinas Sosial	3.079.307.382,00	3.987.248.160,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.488.452.544,00	8.066.162.544,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	34.359.000,00	9.734.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.232.214.041,00	3.202.714.041,00
21	Dinas Ketahanan Pangan	196.030.000,00	3.611.294.000,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.941.000,00	-
22	Dinas Perhubungan	10.618.045.913,00	11.095.596.502,00
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	2.642.879.674,00	2.642.879.674,00
23	Dinas Koperasi dan UKM	3.791.256.377,00	658.081.049,00
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	432.290.000,00	853.380.847,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	10.676.186.324,00	11.218.646.884,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.498.028.824,00	1.498.028.824,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.973.653.323,00	10.758.615.353,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.916.440.127,00	8.117.053.707,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	31.299.950.727,00	32.280.907.102,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.747.413.588,00	3.747.413.588,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.149.158.012,00	13.013.321.626,00
33	SKPKD	536.891.001,00	321.686.828.241,00
34	Sekretariat Daerah	5.948.380.814,00	-
35	Sekretariat DPRD	14.500.000,00	975.548.033,00
36	Inspektorat	111.319.915,00	538.523.024,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.335.890.183,00	1.880.693.183,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.600.365.726,00	6.553.631.591,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.706.921.406,00	1.616.910.726,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	587.862.118,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.447.572.305,00	3.882.132.305,00
42	Badan Penghubung	646.961.860,00	646.961.860,00
	Jumlah	**347.363.773.925,00**	**1.739.514.391.952,00**

5.3.1.5.3.2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah **Rp1.409.154.825.553,00**

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp1.409.154.825.553,00, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah bahwa Barang Milik Daerah berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan daerah direklasifikasi ke aset lainnya. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp00,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.409.154.825.553,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	2.523.218.373,00	
2	Dinas Kesehatan	7.966.468.071,00	
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.022.997.195.781,00	
4	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	28.233.129.508,00	
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
6	Dinas Ketahanan Pangan	3.611.294.000,00	
7	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	501.030.560,00	
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
9	Dinas Kelautan dan Perikanan		
10	Dinas Pertanian dan Perkebunan	5.200.613.580,00	
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	429.920.000,00	
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.125.022.700,00	
14	SKPKD	334.262.661.326,00	
15	Sekretariat Daerah		
16	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	304.271.654,00	
17	Badan Penghubung		
	Jumlah	**1.409.154.825.553,00**	-

5.3.1.5.3.3 Kas Yang Dibatasi Penggunaannya **Rp35.946.362,00**

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan sisa titipan uang muka pasien yang sampai akhir periode 31 Desember 2021 belum diambil oleh pasien sebesar Rp35.946.362,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp134.016.173,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp98.069.811,00) atau (73,18%) :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	35.946.362,00	134.016.173,00
	Jumlah	**35.946.362,00**	**134.016.173,00**

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud **(Rp21.190.441.634,27)**

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp21.190.441.634,27) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp21.983.069.404,75) mengalami **penurunan** sebesar Rp792.627.770,48 atau (3,61%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise	(5.000.000,00)	(6.740.000,00)
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(21.151.682.834,27)	(21.882.840.847,75)
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	(33.758.800,00)	(16.879.400,00)
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Aset Tak Berwujud Lainnya	-	(76.609.157,00)
	Jumlah	**(21.190.441.634,27)**	**(21.983.069.404,75)**

5.3.1.5.4.1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise (Rp5.000.000,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise sebesar (Rp5.000.000,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp6.740.000,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp1.740.000,00 atau (25,82%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(5.000.000,00)	(4.000.000,00)
2	Dinas Komunikasi dan Informatika		(2.740.000,00)
	Jumlah	**(5.000.000,00)**	**(6.740.000,00)**

5.3.1.5.4.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software (Rp21.151.682.834,27)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software sebesar (Rp21.151.682.834,27) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp21.882.840.847,75) mengalami **penurunan** sebesar Rp807.767.170,48 atau (3,68%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(2.192.657.846,70)	(1.789.149.932,60)
2	Dinas Kesehatan	(1.209.926.809,01)	(1.638.845.200,00)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	(3.415.262.011,34)	(3.340.627.378,00)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(536.722.411,00)	(735.402.539,80)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(1.323.756.666,67)	(1.280.890.000,00)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(2.005.764.000,00)	(1.872.857.666,67)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(1.181.760.833,33)	(928.560.000,00)
8	RSJD Surakarta	(1.209.770.245,40)	(1.308.653.563,60)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(1.407.792.169,00)	(1.182.975.720,75)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(68.677.866,67)	(25.761.000,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang		-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(231.474.840,00)	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(113.700.000,00)	(75.800.000,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(67.666.666,67)	(39.700.000,00)
15	Dinas Sosial	(90.521.100,00)	(475.321.700,00)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah		-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(200.768.971,83)	(309.854.000,00)

18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(166.820.000,00)	(191.445.000,00)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		(11.800.000,00)
21	Dinas Ketahanan Pangan	(178.630.000,00)	(195.580.000,00)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(78.324.125,00)	(80.544.200,00)
22	Dinas Perhubungan	(109.457.500,00)	(34.766.000,00)
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	(1.491.966.433,34)	(1.149.015.400,00)
23	Dinas Koperasi dan UKM	(106.036.600,00)	(76.790.600,00)
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(393.300.933,33)	(737.072.400,00)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(368.761.731,38)	(260.582.100,00)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(140.950.000,00)	(112.760.000,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan		(1.081.344.220,00)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(45.833.333,33)	(31.600.000,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(413.925.111,43)	(307.186.360,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(370.266.466,67)	(301.796.533,33)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(12.726.850,00)	(55.557.900,00)
33	SKPKD		-
34	Sekretariat Daerah		-
35	Sekretariat DPRD	(156.676.749,67)	(102.180.800,00)
36	Inspektorat	(133.343.000,00)	(156.754.865,00)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(19.648.000,00)	(444.456.175,00)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(599.432.000,00)	(461.662.000,00)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(779.865.000,00)	(717.182.500,00)
40	Badan Kepegawaian Daerah	(151.539.500,00)	(151.539.500,00)
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(135.197.062,50)	(293.434.750,00)
42	Badan Penghubung	(42.760.000,00)	-
	Jumlah	**(21.151.682.834,27)**	**(21.959.450.004,75)**

5.3.1.5.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian (Rp33.758.800,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian sebesar (Rp33.758.800,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp16.879.400,00) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp16.879.400,00) atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(33.758.800,00)	(16.879.400,00)
	Jumlah	**(33.758.800,00)**	**(16.879.400,00)**

5.3.1.5.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Rp356.184.395.581,46)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp356.184.395.581,46) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp341.735.431.789,62) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp14.448.963.791,84) atau 4,23% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	(356.184.395.581,46)	(337.788.668.180,87)
2	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	-	(9.553.752,00)
3	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	-	-

5	Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai	-	(3.937.209.856,75)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
	Jumlah	**(356.184.395.581,46)**	**(341.735.431.789,62)**

5.3.1.5.5.1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa (Rp356.184.395.581,46)

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa sebesar (Rp356.184.395.581,46) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp337.788.668.180,87) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp18.395.727.400,59) atau 5,45% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(41.645.781.989,99)	(36.708.394.756,55)
2	Dinas Kesehatan	(7.697.769.788,92)	(5.898.202.946,72)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	(3.200.106.815,00)	(2.373.106.815,00)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(97.357.574.533,00)	(97.426.664.517,00)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(5.755.957.546,00)	(12.105.966.657,00)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(1.479.486.715,67)	(1.449.935.049,00)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(2.566.725.390,09)	(5.718.860.052,00)
8	RSJD Surakarta	(3.603.500.036,17)	(3.111.858.369,50)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(4.742.211.106,44)	(1.684.124.410,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(54.074.864.157,23)	(51.947.398.879,77)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(5.146.706.639,50)	(4.784.317.162,50)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(604.369.794,00)	(604.369.794,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.669.331.484,00)	(3.631.904.316,00)
15	Dinas Sosial	(2.954.103.281,99)	(3.843.840.759,00)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah		-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(8.318.505.343,99)	(8.001.451.510,66)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(34.359.000,00)	(9.734.000,00)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(3.204.737.374,33)	(3.187.529.041,00)
21	Dinas Ketahanan Pangan	(3.806.874.000,00)	(3.611.294.000,00)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(50.941.000,00)	-
22	Dinas Perhubungan	(8.557.053.180,03)	(8.917.249.002,64)
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	(2.641.402.774,00)	(2.641.402.774,00)
23	Dinas Koperasi dan UKM	(3.767.363.877,00)	(658.081.049,00)
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(432.290.000,00)	(853.380.847,00)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(10.343.034.406,93)	(10.292.083.962,40)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(1.498.028.824,00)	(1.498.028.824,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(7.561.670.868,30)	(7.389.977.715,69)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(7.624.823.415,33)	(7.624.823.415,33)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(17.391.351.056,76)	(17.291.691.533,29)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(3.730.673.588,00)	(3.730.673.588,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(12.389.499.554,58)	(11.097.578.304,83)
33	SKPKD	(6.822.738.406,06)	(3.359.000.692,70)
34	Sekretariat Daerah	(5.947.821.514,00)	-
35	Sekretariat DPRD	(8.458.333,33)	(943.396.783,00)
36	Inspektorat	(82.685.865,00)	(509.888.974,00)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(2.290.131.175,77)	(1.832.768.807,16)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(11.020.181.329,92)	(6.547.335.538,00)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(1.559.754.619,13)	(1.593.799.619,13)

40	Badan Kepegawaian Daerah	-	(587.862.118,00)
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(4.162.967.505,00)	(3.882.132.305,00)
42	Badan Penghubung	(438.559.292,00)	(438.559.292,00)
	Jumlah	**(356.184.395.581,46)**	**(337.788.668.180,87)**

5.3.1.5.5.2 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan — Rp00,00

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp00,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp9.553.752,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp9.553.752,00 atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	SKPKD	-	(9.553.752,00)
	Jumlah	-	**(9.553.752,00)**

5.3.1.5.5.3 Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai — Rp,00

Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai sebesar Rp,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp3.937.209.865,75) mengalami **penurunan** sebesar Rp3.937.209.856,75,00 atau (100%). Penurunan ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah bahwa Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai disajikan dalam aset tetap dengan rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		(211.648.338,00)
2	Dinas Kelautan dan Perikanan		(414.990.300,00)
3	Sekretariat Daerah		(2.012.905.218,75)
4	Badan Pengelola Pendapatan Daerah		(1.297.666.000,00)
	Jumlah	-	**(3.937.209.856,75)**

5.3.2 KEWAJIBAN — Rp383.270.068.724,08

Kewajiban sebesar Rp383.270.068.724,08 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp824.663.799.218,45 mengalami **penurunan** sebesar (Rp441.393.730.494,37) atau (53,52%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	383.270.068.724,08	824.663.799.218,45
2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	Jumlah	**383.270.068.724,08**	**824.663.799.218,45**

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek — Rp383.270.068.724,08

Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp383.270.068.724,08 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp824.663.799.218,45 mengalami **penurunan** sebesar (Rp441.393.730.494,37) atau (53,52%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	281.977.193,00	249.993.159,00
2	Utang Bunga	-	-
3	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
5	Pendapatan Dibayar Dimuka	39.251.892.013,58	37.083.532.402,45
6	Utang Belanja	245.563.172.024,50	199.503.881.707,00
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	98.173.027.493,00	587.826.391.950,00
	Jumlah	**383.270.068.724,08**	**824.663.799.218,45**

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga — Rp281.977.193,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp281.977.193,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp249.993.159,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp31.984.034,00 atau 12,79% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Utang Taspen		
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan		
3	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		
4	Utang Iuran Jaminan Kematian		
5	Utang PPh Pusat	45.666.889,00	
6	Utang PPN Pusat	218.613.315,00	249.993.159,00
7	Utang Taperum		
8	Utang Iuran Wajib Pegawai		
9	Utang Pihak Ketiga Lainnya	17.696.989,00	
	Jumlah	**281.977.193,00**	**249.993.159,00**

5.3.2.1.1.1 Utang PPh Pusat — Rp45.666.889,00

Utang PPh Pusat sebesar Rp45.666.889,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp00,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp45.666.889,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.666.889,00	-
	Jumlah	**45.666.889,00**	-

5.3.2.1.1.2 Utang PPN Pusat — Rp218.613.315,00

Utang PPN Pusat sebesar Rp218.613.315,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp249.993.159,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp31.379.844,00) atau (12,55%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	218.613.315,00	249.993.159,00
	Jumlah	**218.613.315,00**	**249.993.159,00**

5.3.2.1.1.3 Utang Pihak Ketiga Lainnya — Rp17.696.989,00

Utang PPN Pusat sebesar Rp17.696.989,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp00,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp17.696.989,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.696.989,00	-
	Jumlah	**17.696.989,00**	-

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka — Rp39.251.892.013,58

Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp39.251.892.013,58 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp37.083.532.402,45 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.168.359.611,13 atau 5,85% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	39.251.892.013,58	37.083.532.402,45
2	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		
3	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		
	Jumlah	**39.251.892.013,58**	**37.083.532.402,45**

5.3.2.1.2.1 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III — Rp39.251.892.013,58

Setoran kelebihan pembayaran dari pihak iii sebesar Rp39.251.892.013,58 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp37.083.532.402,45 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.168.359.611,13 atau 5,85% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	903.462.692,67	658.701.066,67
2	RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto	256.092.445,54	240.620.985,21
3	RSUD Tugurejo Semarang	120.860.000,00	66.472.900,00
4	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	36.880.136,99	6.077.625,57
5	Dinas Kelautan dan Perikanan		18.150.000,00
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	37.348.700.000,00	36.066.667.825,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	585.896.738,38	26.842.000,00
	Jumlah	**39.251.892.013,58**	**37.083.532.402,45**

5.3.2.1.3 Utang Belanja — Rp245.563.172.024,50

Utang Belanja sebesar Rp245.563.172.024,50 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp199.503.881.707,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp46.059.290.317,50 atau 23,09% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	4.287.414.859,00	90.554.531.168,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	238.607.355.361,50	108.945.656.531,00
3	Utang Belanja Bunga	-	-
4	Utang Belanja Subsidi	-	-
5	Utang Belanja Hibah	-	-
6	Utang Belanja Modal Tanah	-	-
7	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	3.694.008,00
8	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.668.401.804,00	-
9	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-
10	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-
11	Utang Belanja Tidak Terduga	-	-
12	Utang Belanja Bagi Hasil	-	-
13	Utang Belanja Bantuan Keuangan	-	-
	Jumlah	**245.563.172.024,50**	**199.503.881.707,00**

5.3.2.1.3.1 Utang Belanja Pegawai — Rp4.287.414.859,00

Utang Belanja Pegawai sebesar Rp4.287.414.859,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp90.554.531.168,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp86.267.116.309,00) atau (95,27%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	86.902.909.220,00
2	Dinas Kesehatan	1.325.679.102,00	-
3	RSUD Moewardi Surakarta	111.600.000,00	625.600.000,00
4	RSUD Margono Soekarjo	2.840.510.757,00	2.888.991.948,00
5	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	-	91.180.000,00
6	RSJD Amino Gondohutomo	9.625.000,00	45.850.000,00
	Jumlah	**4.287.414.859,00**	**90.554.531.168,00**

5.3.2.1.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa — Rp238.607.355.361,50

Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp238.607.355.361,50 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp108.945.656.531,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp129.661.698.830,50 atau 119,02% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	113.537.000,00	-
2	Dinas Kesehatan	61.529.289.587,00	844.297.334,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	93.705.709.059,00	45.836.348.001,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	55.356.220.308,00	45.176.348.916,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	2.287.228.312,00	1.993.130.087,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	6.098.366.919,00	7.823.615.654,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	6.736.189.180,00	2.253.505.243,00
8	RSJD Surakarta	8.944.373.425,00	1.892.485.084,00
9	RSJD RM Soedjarwadi Klaten	3.836.441.571,50	2.852.926.212,00
10	SKPKD	-	273.000.000,00
	Jumlah	**238.607.355.361,50**	**108.945.656.531,00**

5.3.2.1.3.3 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin — Rp00,00

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp00,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.694.008,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.694.008,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSJ Surakarta	-	3.694.008,00
	Jumlah	**-**	**3.694.008,00**

5.3.2.1.3.4 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan — Rp2.668.401.804,00

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.668.401.804,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp00,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.668.401.804,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Moewardi	2.668.401.804,00	-
	Jumlah	**2.668.401.804,00**	**-**

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya — Rp98.173.027.493,00

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp98.173.027.493,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp587.826.391.950,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp489.653.364.457,00) atau (83,30%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	-	-
2	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	4.387.972.846,00	1.516.449.200,00
3	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	35.946.362,00	134.016.173,00
4	Utang Transfer	93.749.108.285,00	586.175.926.577,00
	Jumlah	**98.173.027.493,00**	**587.826.391.950,00**

5.3.2.1.4.1 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer — Rp4.387.972.846,00

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer sebesar Rp4.387.972.846,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.516.449.200,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.871.523.646,00 atau 189,36% dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	SKPKD	4.387.972.846,00	1.516.449.200,00
	Jumlah	**4.387.972.846,00**	**1.516.449.200,00**

5.3.2.1.4.2 Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah — Rp35.946.362,00

Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp35.946.362,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp134.016.173,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp98.069.811,00 atau 73,18% dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	35.946.362,00	134.016.173,00
	Jumlah	**35.946.362,00**	**134.016.173,00**

5.3.2.1.4.3 Utang Transfer — Rp93.749.108.285,00

Utang Transfer sebesar Rp93.749.108.285,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp586.175.926.577,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp492.426.818.292,00 atau 84,01% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	44.695.539.958,00	263.333.831.828,00
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.727.262.071,00	111.395.751.306,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.400.932.017,00	210.080.276.724,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah	925.374.239,00	1.366.066.719,00
5	Pajak Rokok	-	-
	Jumlah	93.749.108.285,00	586.175.926.577,00

Utang transfer bagi sebesar Rp93.749.108.285,00 merupakan utang bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Pajak Kendaraan Bermotor

		2021	2020
1	Kabupaten Semarang	1.451.646.197,00	9.052.117.247,00
2	Kabupaten Kendal	1.059.206.393,00	6.175.347.901,00
3	Kabupaten Demak	1.229.751.938,00	7.063.090.687,00
4	Kabupaten Grobogan	1.325.891.185,00	7.626.843.380,00
5	Kabupaten Pati	1.665.979.640,00	9.688.738.641,00
6	Kabupaten Kudus	1.271.459.939,00	7.661.084.446,00
7	Kabupaten Jepara	1.386.069.095,00	7.767.690.942,00
8	Kabupaten Rembang	779.265.661,00	4.575.106.769,00
9	Kabupaten Blora	948.555.341,00	5.338.259.690,00
10	Kabupaten Pekalongan	813.685.797,00	4.600.112.928,00
11	Kabupaten Batang	753.918.131,00	4.252.457.141,00
12	Kabupaten Pemalang	1.228.179.490,00	6.879.926.591,00
13	Kabupaten Tegal	1.144.621.233,00	6.361.468.598,00
14	Kabupaten Brebes	1.364.043.705,00	7.895.618.139,00
15	Kabupaten Banyumas	1.894.803.328,00	10.863.870.636,00
16	Kabupaten Cilacap	1.908.547.480,00	10.929.619.893,00
17	Kabupaten Purbalingga	961.784.007,00	5.619.499.486,00
18	Kabupaten Banjarnegara	863.592.180,00	4.786.401.013,00
19	Kabupaten Magelang	1.210.119.787,00	7.357.620.768,00
20	Kabupaten Temanggung	773.600.548,00	4.652.969.119,00
21	Kabupaten Wonosobo	865.323.551,00	4.809.966.754,00
22	Kabupaten Purworejo	921.166.481,00	5.100.072.496,00
23	Kabupaten Kebumen	1.199.523.388,00	6.719.464.495,00
24	Kabupaten Klaten	1.704.214.652,00	9.855.517.072,00
25	Kabupaten Boyolali	1.194.472.907,00	6.895.722.350,00
26	Kabupaten Sragen	1.350.109.644,00	7.797.884.350,00
27	Kabupaten Sukoharjo	1.351.316.348,00	7.820.348.978,00
28	Kabupaten Karanganyar	1.219.304.601,00	7.375.579.960,00
29	Kabupaten Wonogiri	1.147.500.876,00	6.735.212.586,00
30	Kota Semarang	5.450.905.197,00	35.235.198.694,00
31	Kota Pekalongan	656.733.277,00	3.860.753.223,00
32	Kota Surakarta	1.741.504.170,00	10.683.011.675,00
33	Kota Salatiga	500.378.528,00	3.200.448.193,00
34	Kota Tegal	678.728.713,00	3.786.829.067,00
35	Kota Magelang	679.636.550,00	4.309.977.920,00
	Jumlah	**44.695.539.958,00**	**263.333.831.828,00**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

		2021	2020
1	Kabupaten Semarang	862.002.293,00	3.401.703.857,00
2	Kabupaten Kendal	789.231.946,00	3.168.411.246,00
3	Kabupaten Demak	981.567.947,00	4.006.435.159,00
4	Kabupaten Grobogan	910.734.385,00	3.561.120.762,00
5	Kabupaten Pati	1.104.923.023,00	4.491.259.992,00
6	Kabupaten Kudus	879.934.977,00	3.182.756.277,00
7	Kabupaten Jepara	1.033.133.944,00	4.220.458.929,00
8	Kabupaten Rembang	564.324.243,00	1.972.858.031,00
9	Kabupaten Blora	571.591.209,00	2.227.271.542,00

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

		2021	2020
10	Kabupaten Pekalongan	619.652.320,00	2.416.600.579,00
11	Kabupaten Batang	699.449.907,00	2.419.723.663,00
12	Kabupaten Pemalang	850.792.344,00	3.382.278.735,00
13	Kabupaten Tegal	905.820.813,00	3.471.920.767,00
14	Kabupaten Brebes	998.953.755,00	4.121.496.489,00
15	Kabupaten Banyumas	1.131.191.568,00	4.285.545.405,00
16	Kabupaten Cilacap	1.146.618.823,00	4.876.392.437,00
17	Kabupaten Purbalingga	555.918.174,00	2.181.779.156,00
18	Kabupaten Banjarnegara	540.424.969,00	2.112.313.755,00
19	Kabupaten Magelang	803.348.697,00	3.388.440.269,00
20	Kabupaten Temanggung	443.099.148,00	1.881.752.310,00
21	Kabupaten Wonosobo	530.972.376,00	1.847.078.078,00
22	Kabupaten Purworejo	494.280.622,00	1.824.380.966,00
23	Kabupaten Kebumen	697.432.275,00	2.677.503.177,00
24	Kabupaten Klaten	1.056.142.989,00	3.868.031.291,00
25	Kabupaten Boyolali	712.043.803,00	2.954.909.484,00
26	Kabupaten Sragen	739.497.073,00	3.066.859.044,00
27	Kabupaten Sukoharjo	815.004.453,00	3.424.831.464,00
28	Kabupaten Karanganyar	684.570.624,00	3.222.423.028,00
29	Kabupaten Wonogiri	174.447.686,00	2.243.562.346,00
30	Kota Semarang	3.490.233.845,00	13.803.089.615,00
31	Kota Pekalongan	296.957.174,00	1.144.248.203,00
32	Kota Surakarta	846.040.274,00	3.695.618.982,00
33	Kota Salatiga	227.406.821,00	1.033.248.589,00
34	Kota Tegal	363.739.915,00	1.098.355.910,00
35	Kota Magelang	205.777.656,00	721.091.769,00
	Jumlah	**27.727.262.071,00**	**111.395.751.306,00**

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

		2021	2020
1	Kabupaten Semarang	409.021,00	7.783.085.182,00
2	Kabupaten Kendal	400.089,00	6.739.193.938,00
3	Kabupaten Demak	2.476.809.664,00	7.121.400.653,00
4	Kabupaten Grobogan	1.184.941.095,00	6.741.505.454,00
5	Kabupaten Pati	3.182.197.005,00	8.497.010.442,00
6	Kabupaten Kudus	376.255,00	6.254.737.566,00
7	Kabupaten Jepara	1.779.731.870,00	7.053.914.206,00
8	Kabupaten Rembang	87.528.223,00	5.621.983.335,00
9	Kabupaten Blora	366.214,00	4.127.882.491,00
10	Kabupaten Pekalongan	1.282.038.057,00	3.750.067.934,00
11	Kabupaten Batang	358.612,00	5.360.648.107,00
12	Kabupaten Pemalang	3.148.947.299,00	5.817.573.775,00
13	Kabupaten Tegal	420.477,00	7.675.789.563,00
14	Kabupaten Brebes	19.684.780,00	8.230.895.447,00
15	Kabupaten Banyumas	451.270,00	8.994.509.679,00
16	Kabupaten Cilacap	452.724,00	8.480.915.807,00
17	Kabupaten Purbalingga	353.267,00	3.853.695.486,00
18	Kabupaten Banjarnegara	1.414.176.897,00	3.867.640.311,00
19	Kabupaten Magelang	397.472,00	6.910.010.779,00
20	Kabupaten Temanggung	356.784,00	4.443.024.136,00
21	Kabupaten Wonosobo	341.989,00	3.151.794.476,00
22	Kabupaten Purworejo	352.987,00	3.824.161.535,00
23	Kabupaten Kebumen	2.826.374.186,00	5.272.163.593,00
24	Kabupaten Klaten	421.085,00	8.035.789.240,00

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

		2021	2020
25	Kabupaten Boyolali	2.989.288.635,00	5.165.894.290,00
26	Kabupaten Sragen	406.847,00	7.218.341.688,00
27	Kabupaten Sukoharjo	400.120,00	6.979.525.486,00
28	Kabupaten Karanganyar	390.579,00	6.491.673.177,00
29	Kabupaten Wonogiri	366.401,00	4.908.181.468,00
30	Kota Semarang	590.903,00	18.659.739.490,00
31	Kota Pekalongan	320.263,00	2.570.745.450,00
32	Kota Surakarta	381.366,00	5.216.749.260,00
33	Kota Salatiga	315.570,00	2.271.150.389,00
34	Kota Tegal	332.316,00	1.652.182.365,00
35	Kota Magelang	251.695,00	1.336.700.526,00
	Jumlah	**20.400.932.017,00**	**210.080.276.724,00**

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah

		2021	2020
1	Kabupaten Semarang	109.576.906,00	92.921.086,00
2	Kabupaten Kendal	2.703.266,00	6.739.471,00
3	Kabupaten Demak	18.551.364,00	19.942.138,00
4	Kabupaten Grobogan	81.304.831,00	77.124.870,00
5	Kabupaten Pati	1.675.632,00	8.121.242,00
6	Kabupaten Kudus	663.037,00	2.283.995,00
7	Kabupaten Jepara	2.668.072,00	3.742.278,00
8	Kabupaten Rembang	8.325.393,00	7.773.035,00
9	Kabupaten Blora	10.874.872,00	9.669.652,00
10	Kabupaten Pekalongan	22.280.940,00	18.712.914,00
11	Kabupaten Batang	67.621.351,00	27.513.247,00
12	Kabupaten Pemalang	9.952.090,00	19.976.759,00
13	Kabupaten Tegal	10.884.990,00	28.595.794,00
14	Kabupaten Brebes	9.040.367,00	20.269.030,00
15	Kabupaten Banyumas	31.749.188,00	73.414.969,00
16	Kabupaten Cilacap	59.444.250,00	248.551.559,00
17	Kabupaten Purbalingga	32.414.168,00	21.155.668,00
18	Kabupaten Banjarnegara	154.514.533,00	235.863.792,00
19	Kabupaten Magelang	47.838.273,00	54.220.737,00
20	Kabupaten Temanggung	4.287.791,00	24.267.894,00
21	Kabupaten Wonosobo	22.606.030,00	51.054.045,00
22	Kabupaten Purworejo	4.988.231,00	11.740.457,00
23	Kabupaten Kebumen	47.611.816,00	45.876.231,00
24	Kabupaten Klaten	15.397.163,00	46.640.872,00
25	Kabupaten Boyolali	22.731.124,00	20.654.991,00
26	Kabupaten Sragen	963.172,00	3.313.516,00
27	Kabupaten Sukoharjo	13.150.646,00	28.711.764,00
28	Kabupaten Karanganyar	28.888.144,00	40.529.055,00
29	Kabupaten Wonogiri	26.685.637,00	29.427.272,00
30	Kota Semarang	41.574.132,00	65.690.448,00
31	Kota Pekalongan	426.456,00	631.185,00
32	Kota Surakarta	2.266.981,00	5.070.006,00
33	Kota Salatiga	2.800.516,00	7.501.123,00
34	Kota Tegal	344.734,00	685.763,00
35	Kota Magelang	8.568.143,00	7.679.861,00
	Jumlah	**925.374.239,00**	**1.366.066.719,00**

5.3.2.2 Kewajiban Kontijensi

Kewajiban Kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:

a. Barang Milik Daerah berupa bangunan dan tanah seluas 5.450 m^2 senilai Rp2.725.000.000,- di Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang terdaftar Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Mangkang Kulon atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah c.q. Dinas Pekerjaan Umum (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) digugat oleh Sdr. Puanah dengan alas hak Letter C Tahun 1963. Gugatan didaftarkan di PTUN Semarang dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.Smg tanggal 3 Nopember 2016 yang intinya mengabulkan gugatan Sdr. Puanah untuk menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Mangkang Kulon dan memerintahkan Pemerintah Provinsi JawaTengah untuk mencoret dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan upaya Banding dan telah diputus berdasarkan Putusan PTTUN Surabaya Nomor 40/B/2016/PT.TUN.Sby tanggal 8 Mei 2017 yang intinya menguatkan Putusan PTUN Semarang. Berdasarkan Putusan PT TUN Surabaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 427 K/TUN/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang intinya menolak permohonan Kasasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap Putusan dimaksud Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2018 dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 PK/TUN/2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Atas proses hukum selanjutnya tentang kepemilikan Hak, Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Register Perkara 542/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 22 Juli 2021 yang amar putusannya:

   a. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dan;
   b. Menyatakan secara hukum tindakan dan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan penghapusan aset bekas sertifikat Hak Pakai 12 merupakan perbuatan melawan hukum;
   c. Menghukum tergugat untuk melakukan penghapusan aset bekas sertifikat Hak Pakai 12;
   d. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan;
   e. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya

Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0001022 Tanggal 18 Januari 2021 mengajukan upaya banding dengan Nomor Register Perkara 57/Pdt.U/2021/PN.Smg Jo

495/Pdt/2021/PN.Smg dengan amar putusan banding mengabulkam putusan PN. Smg. Tanggal 19 Januari 2022 Gubernur melalui Kuasa Hukum Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa tengah mengajukan upaya hukum kasasi dengan Nomor Register Perkara 03/Pdt.K/2022/PN.Smg.

b. Barang Milik Daerah berupa bangunan SMA Negeri 1 Tegal dan tanah seluas 6.890 m^2 senilai Rp 2.219.562.000,- di Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal yang terdaftar sebagai Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Slerok atas nama Perwakilan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) digugat oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Gugatan didaftarkan di PTUN Semarang dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.Smg tanggal 18 Oktober 2017 yang intinya mengabulkan gugatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Slerok dan memerintahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencoret dari Daftar Barang Milik Daerah ProvinsiJawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan upaya Banding dan telah diputus berdasarkan Putusan PT TUN Surabaya Nomor 24/B/2018/PT.TUN.Sby tanggal 12 Pebruari 2018 yang intinya menguatkan Putusan PTUN Semarang. Berdasarkan Putusan PT TUN Surabaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 414 K/TUN/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang intinya menolak permohonan Kasasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap Putusan dimaksud Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2019 dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 PK/TUN/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang intinya menolakpermohonan Peninjauan Kembali Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meskipun perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum dapat melaksanakan putusan dimaksud untuk mencoret dari daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan sebagai berikut: Pemerintah Kota Tegal sebagai pihak lain dalam perkara ini masih dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sehingga masih terdapat kemungkinan sertifikat tersebut dinyatakan sah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pemegang hak lama, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan hak terhadap tanah yang telah dibatalkan sertifikatnya.

5.3.3 EKUITAS **Rp38.908.675.268.489,02**

Ekuitas sebesar Rp38.908.675.268.489,02, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp36.397.640.492.434,77 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.511.034.776.054,30 atau 6,90% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	7.784.477.991.917,73	7.472.423.283.601,55
2	Dinas Kesehatan	524.676.286.848,16	483.551.327.661,49
3	RSUD Dr. Moewardi Surakrta	1.214.138.050.969,73	868.310.767.705,71
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	821.791.313.198,54	631.528.523.911,36
6	RSUD Tugurejo Semarang	429.351.355.755,76	306.917.688.922,99

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	803.533.757.395,20	789.181.364.835,76
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	234.412.760.840,99	212.395.521.123,66
8	RSJD Surakarta	174.372.017.095,16	147.088.884.048,79
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	104.483.630.784,64	82.590.566.813,49
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	5.727.793.991.588,99	5.769.379.221.456,91
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	6.021.338.925.963,22	6.018.830.273.125,86
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.270.537.410,42	27.444.429.864,56
13	Satuan Polisi Pamong Praja	19.043.102.730,80	20.143.780.512,13
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.439.852.334,19	17.545.225.220,23
15	Dinas Sosial	251.208.351.757,31	256.190.436.140,46
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.289.894.517,57	22.587.268.266,47
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	138.708.180.795,50	139.817.728.039,21
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	12.164.380.864,93	12.699.410.136,03
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	139.866.085.922,57	123.275.089.915,82
21	Dinas Ketahanan Pangan	15.238.492.921,84	15.242.053.671,59
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.448.770.458,87	16.803.906.387,70
22	Dinas Perhubungan	361.719.250.466,77	330.046.158.417,09
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	40.712.293.496,35	42.266.582.314,10
23	Dinas Koperasi dan UKM	41.407.355.947,10	41.211.433.007,45
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	14.623.098.955,98	15.472.306.530,48
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	858.747.991.199,37	795.674.996.615,24
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	32.010.895.117,92	33.513.908.446,25
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	365.280.247.673,77	363.097.541.882,54
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	962.964.122.978,55	964.471.443.261,22
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	502.484.198.788,84	517.199.890.933,55
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	113.172.415.923,89	116.522.370.941,10
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	97.494.420.803,24	100.955.944.674,66
33	SKPKD	8.478.839.474.763,17	6.910.177.353.228,70
34	Sekretariat Daerah	241.572.324.210,23	254.145.316.537,61
35	Sekretariat DPRD	51.302.280.519,54	55.082.954.658,72
36	Inspektorat	9.463.122.327,99	10.480.775.496,95
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	132.530.563.587,97	134.184.233.325,36
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.777.263.487.691,78	1.950.360.342.884,18
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	133.808.538.896,27	136.854.116.118,17
40	Badan Kepegawaian Daerah	14.144.684.325,14	15.342.803.598,74
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	154.501.020.433,94	155.913.885.703,41
42	Badan Penghubung	20.585.748.309,09	20.719.382.497,40
	Jumlah	**38.908.675.268.489,02**	**36.397.640.492.434,77**

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Struktur penyajian LO Tahun 2021 dan 2020 mendasari Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Ringkasan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan	26.633.000.085.963,00	4.012.409.179.930,89	2.630.905.053.123,32	28.014.504.212.770,56	22.857.781.266.070,60	5.156.722.946.699,90	22,56
2	Beban	24.323.876.477.589,00	20.941.045.924.903,00	18.929.369.153.592,10	26.335.553.248.899,89	23.411.329.516.736,86	2.924.223.732.163,00	12,49
	Surplus/(Defisit)	**2.309.123.608.374,00**	**(16.928.636.744.972,10)**	**(16.298.464.100.468,70)**	**1.678.950.963.870,67**	**(553.548.250.666,26)**	**2.232.499.214.536,93**	**(403,31)**
3	**Operasional** Kegiatan Non Operasional	-	324.852.321.985,87	-	324.852.321.985,87	137.206.357.330,46	187.645.964.655,41	136,76
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	**2.309.123.608.374,00**	**(16.603.784.422.986,20)**	**(16.298.464.100.468,70)**	**2.003.803.285.856,54**	**(416.341.893.335,80)**	**2.420.145.179.192,34**	**(581,29)**
4	Pos Luar Biasa	(72.303.305.000,00)	-	(67.973.876.000,00)	(4.329.429.000,00)	(1.080.000.000,00)	(3.249.429.000,00)	300,87
	Jumlah	**2.236.820.303.374,00**	**(16.603.784.422.986,20)**	**(16.366.437.976.468,70)**	**1.999.473.856.856,54**	**(417.421.893.335,80)**	**2.416.895.750.192,34**	**(579,01)**

5.4.1 PENDAPATAN DAERAH-LO **Rp28.014.504.212.770,56**

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah-LO terealisasi sebesar Rp28.014.504.212.770,56 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp22.857.781.266.070,60 mengalami kenaikan sebesar Rp5.156.722.946.699,96 atau 22,56% dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	14.695.474.898.162,00	2.956.608.137.074,01	2.334.935.910.439,51	15.317.147.124.796,49	13.662.942.506.730,10	1.654.204.618.066,39	12,11
2	Pendapatan Transfer - LO	11.871.796.336.054,00	13.297.360.471,00	274.360.145.420,00	11.610.733.551.105,00	8.093.350.514.256,00	3.517.383.036.849,00	43,46
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO	65.728.851.747,00	1.042.503.682.385,88	21.608.997.263,81	1.086.623.536.869,07	1.101.488.245.084,50	(14.864.708.215,43)	(1,35)
	Jumlah	**26.633.000.085.963,00**	**4.012.409.179.930,89**	**2.630.905.053.123,32**	**28.014.504.212.770,56**	**22.857.781.266.070,60**	**5.156.722.946.699,96**	22,56

Realisasi Pendapatan Daerah-LO sebesar Rp28.014.504.212.770,56 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Pendapatan-LRA : **26.633.000.085.963,00**

Penambahan

- Saldo Akhir Piutang : 2.461.945.790.353,09

➢ Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka	:	546.244.909.092,33	
➢ Hibah Barang Menjadi Aset	:	171.140.996.207,00	
➢ Hibah Barang Menjadi Bahan Habis Pakai	:	374.865.881.910,00	
➢ Koreksi Perhitungan ke Metode Ekuitas	:	457.532.762.119,46	
➢ Koreksi atas pencatatan piutang tahun Sebelumnya	:	678.840.249,00	
Total Penambahan			: 4.012.409.179.930,88
Pengurangan			
➢ Saldo Awal Piutang	:	2.336.711.711.323,21	
➢ Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka	:	38.540.346.503,58	
➢ Penyusutan atas Hibah Barang menjadi Aset	:	21.608.997.263,81	
➢ Pelunasan Pendapatan Pengembalian Tahun Lalu	:	1.828.062.686,00	
➢ Koreksi Perhitungan ke Metode Ekuitas	:	8.155.248.497,10	
➢ Koreksi atas pencatatan piutang tahun sebelumnya	:	224.060.686.849,62	
Total Pengurangan			: 2.630.905.053.123,32
Total Pendapatan-LO			: **28.014.504.212.770,56**

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO — Rp15.317.147.124.796,49

PAD-LO terealisasi sebesar Rp15.317.147.124.796,49 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.662.942.506.730,10 mengalami kenaikan sebesar Rp1.654.204.618.066,39 atau 12,11% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	11.718.378.320.505,00	2.152.462.369.608,00	2.098.774.948.413,00	11.772.065.741.700,00	11.152.098.389.593,00	619.967.352.107,00	5,56
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	91.634.269.205,00	1.183.754.071,00	1.531.740.489,38	91.286.282.786,62	95.123.995.790,00	(3.837.713.003,38)	(4,03)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO	508.263.876.971,00	457.532.762.119,46	8.155.248.497,10	957.641.390.593,36	879.855.728.151,59	77.785.662.441,77	8,84
4	Lain-Lain PAD yang Sah - LO	2.377.198.431.481,00	345.429.251.275,55	226.473.973.040,03	2.496.153.709.716,51	1.535.864.393.195,51	960.289.316.521,00	62,52
	Jumlah	**14.695.474.898.162,00**	**2.956.608.137.074,01**	**2.334.935.910.439,51**	**15.317.147.124.796,49**	**13.662.942.506.730,10**	**1.654.204.618.066,39**	**12,11**

Dampak Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka penyajian akun Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 audited semula sebesar Rp90.105.125.790,00 menjadi sebesar Rp95.123.995.790,00 naik sebesar Rp5.018.870.000,00, sedangkan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2020 audited semula sebesar Rp1.540.883.263.195,51 menjadi sebesar Rp1.535.864.393.195,51 turun sebesar Rp5.018.870.000,00 hal ini dikarenakan penerimaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2020 termasuk bagian dari akun lain-lain PAD yang Sah, Tahun Anggaran 2021 termasuk bagian dari Pendapatan Retribusi Daerah.

Realisasi PAD-LO terealisasi sebesar Rp15.317.147.124.796,49, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Pendapatan-LRA			**: 14.695.474.898.162,00**
Penambahan			
➢ Saldo Akhir Piutang	:	2.461.945.790.353,09	
➢ Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka	:	36.450.744.352,45	
➢ Koreksi Perhitungan ke Metode Ekuitas	:	457.532.762.119,46	
➢ Koreksi atas pencatatan piutang tahun Sebelumnya	:	678.840.249,00	
Total Penambahan			: 2.956.608.137.074,00
Pengurangan			
➢ Saldo Awal Piutang	:	2.208.562.731.960,21	
➢ Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka	:	38.540.346.503,58	
➢ Penyusutan atas Hibah Barang menjadi Aset	:	-	
➢ Pelunasan Pendapatan Pengembalian Tahun Lalu	:	1.828.062.686,00	
➢ Koreksi Perhitungan ke Metode Ekuitas	:	8.155.248.497,10	
➢ Koreksi atas pencatatan piutang tahun sebelumnya	:	77.849.520.792,62	
Total Pengurangan			: 2.334.935.910.439,51
Total Pendapatan-LO			**: 15.317.147.124.796,49**

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO — Rp11.772.065.741.700,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO terealisasi sebesar Rp11.772.065.741.700,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.152.098.389.593,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp619.967.352.107,00 atau 5,56%, dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	4.758.837.101.600,00	2.152.369.589.369,00	2.098.404.922.144,00	4.812.801.768.825,00	4.592.226.935.421,00	220.574.833.404,00	4,80
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	2.775.978.070.000,00	-	-	2.775.978.070.000,00	2.228.465.305.800,00	547.512.764.200,00	24,57
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - LO	1.826.681.450.277,00	-	-	1.826.681.450.277,00	1.719.403.821.612,00	107.277.628.665,00	6,24
4	Pajak Air Permukaan - LO	17.243.160.079,00	92.780.239,00	370.026.269,00	16.965.914.049,00	16.289.954.953,00	675.959.096,00	4,15
5	Pajak Rokok - LO	2.339.638.538.549,00	-	-	2.339.638.538.549,00	2.595.712.371.807,00	(256.073.833.258,00)	(9,87)
	Jumlah	**11.718.378.320.505,00**	**2.152.462.369.608,00**	**2.098.774.948.413,00**	**11.772.065.741.700,00**	**11.152.098.389.593,00**	**619.967.352.107,00**	**5,56**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp11.772.065.741.700,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Pendapatan-LRA			: **11.718.378.320.505,00**
Penambahan			
➢ Saldo Akhir Piutang	:	2.116.395.701.783,00	
➢ Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka	:	36.066.667.825,00	
Total Penambahan			: 2.152.462.369.608,00
Pengurangan			
➢ Saldo Awal Piutang	:	2.050.129.305.282,38	
➢ Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka	:	37.348.700.000,00	
➢ Koreksi atas pencatatan piutang tahun sebelumnya	:	11.296.943.131	
Total Pengurangan			: 2.098.774.948.413,00
Total Pendapatan-LO			: **11.772.065.741.700,00**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO — Rp91.286.282.786,62

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terealisasi sebesar Rp91.286.282.786,62, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp95.123.995.790,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.837.713.003,38) atau (4,03%), dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Jasa Umum - LO	17.612.618.195,00	1.156.912.071,00	928.658.751,00	17.840.871.515,00	21.638.514.458,00	(3.797.642.943,00)	(17,55)
2	Retribusi Jasa Usaha - LO	67.852.456.270,00	26.842.000,00	603.081.738,38	67.276.216.531,62	66.228.941.932,00	1.047.274.599,62	1,58
3	Retribusi Perizinan Tertentu - LO	6.169.194.740,00	-	-	6.169.194.740,00	7.256.539.400,00	(1.087.344.660,00)	(14,98)
	Jumlah	**91.634.269.205,00**	**1.183.754.071,00**	**1.531.740.489,38**	**91.286.282.786,62**	**95.123.995.790,00**	**(3.837.713.003,38)**	**(4,03)**

Dampak Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka penyajian akun Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 audited semula sebesar Rp90.105.125.790,00 menjadi sebesar Rp95.123.995.790,00 naik sebesar Rp5.018.870.000,00. kenaikan terdapat pada akun Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp16.619.644.458,00 menjadi Rp21.638.514.458,00 naik sebesar Rp5.018.870.000,00, hal ini dikarenakan penerimaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2020 termasuk bagian dari akun lain-lain PAD yang Sah, Tahun Anggaran 2021 termasuk bagian dari Pendapatan Retribusi Daerah.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp91.286.282.786,62 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Pendapatan-LRA		:	**91.634.269.205,00**
Penambahan			
➢ Saldo Akhir Piutang	: 1.156.912.071,00		
➢ Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka	: 26.842.000,00		
Total Penambahan		:	1.183.754.071,00
Pengurangan			
➢ Saldo Awal Piutang	: 945.843.751,00		
➢ Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka	: 585.896.738,38		
Total Pengurangan		:	1.531.740.489,38
Total Pendapatan-LO		:	**91.286.282.786,62**

5.4.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO **Rp17.840.871.515,00**

Pendapatan Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp17.840.871.515,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp21.638.514.458,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.797.642.943,00) atau (17,55%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	17.015.718.195,00	1.156.912.071,00	928.658.751,00	17.243.971.515,00	16.009.094.458,00	1.234.877.057,00	7,71
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	-	-	-	-	-	-	-
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	63.400.000,00	-	-	63.400.000,00	296.950.000,00	(233.550.000,00)	(78,65)
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	533.500.000,00	-	-	533.500.000,00	5.332.470.000,00	(4.798.970.000,00)	(90,00)
	Jumlah	**17.612.618.195,00**	**1.156.912.071,00**	**928.658.751,00**	**17.840.871.515,00**	**21.638.514.458,00**	**(3.797.642.943,00)**	**(17,55)**

Realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp17.840.871.515,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Pendapatan-LRA		:	**17.612.618.195,00**
Penambahan			
➢ Saldo Akhir Piutang	: 1.156.912.071,00		
Total Penambahan		:	1.156.912.071,00
Pengurangan			
➢ Saldo Awal Piutang	: 928.658.751,00		
Total Pengurangan		:	928.658.751,00
Total Pendapatan-LO		:	**17.840.871.515,00**

5.4.1.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO — Rp17.243.971.515,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp17.243.971.515,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16.009.094.458,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.234.877.057,00 atau 7,71% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kesehatan	17.015.718.195,00	1.156.912.071,00	928.658.751,00	17.243.971.515,00	16.009.094.458,00	1.234.877.057,00	7,71
	Jumlah	**17.015.718.195,00**	**1.156.912.071,00**	**928.658.751,00**	**17.243.971.515,00**	**16.009.094.458,00**	**1.234.877.057,00**	**7,71**

5.4.1.1.2.1.2 Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO — Rp63.400.000,00

Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta terealisasi sebesar Rp63.400.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp296.950.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp233.550.000,00) atau (78,65%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.300.000,00	-	-	3.300.000,00	4.750.000,00	(1.450.000,00)	(30,53)
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	60.100.000,00	-	-	60.100.000,00	292.200.000,00	(232.100.000,00)	(79,43)
	Jumlah	**63.400.000,00**	-	-	**63.400.000,00**	**296.950.000,00**	**(233.550.000,00)**	**(78,65)**

5.4.1.1.2.1.3 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO Rp533.500.000,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan terealisasi sebesar Rp533.500.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.332.470.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp4.798.970.000,00) atau (90%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	533.500.000,00	-	-	533.500.000,00	299.100.000,00	234.400.000,00	78,37
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	14.500.000,00	(14.500.000,00)	(100,00)
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	4.608.070.000,00	(4.608.070.000,00)	(100,00)
4	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	410.800.000,00	(410.800.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**533.500.000,00**	-	-	**533.500.000,00**	**5.332.470.000,00**	**(4.798.970.000,00)**	**(90,00)**

5.4.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Rp67.276.216.531,62

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp67.276.216.531,62, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp66.228.941.932,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.047.274.599,62 atau 1,58% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	38.307.608.734,00	26.842.000,00	585.896.738,38	37.748.553.995,62	38.179.499.524,00	(430.945.528,38)	(1,13)
2	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	458.284.775,00	-	-	458.284.775,00	479.788.100,00	(21.503.325,00)	(4,48)
3	Retribusi Terminal-LO	1.296.264.750,00	-	17.185.000,00	1.279.079.750,00	731.126.000,00	547.953.750,00	74,95
4	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila-LO	694.235.000,00	-	-	694.235.000,00	1.679.542.500,00	(985.307.500,00)	(58,67)
5	Retribusi Kepelabuhan-LO	5.532.632.500,00	-	-	5.532.632.500,00	5.827.626.900,00	(294.994.400,00)	(5,06)
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	269.133.000,00	-	-	269.133.000,00	-	269.133.000,00	100,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	21.294.297.511,00	-	-	21.294.297.511,00	19.331.358.908,00	1.962.938.603,00	10,15
	Jumlah	**67.852.456.270,00**	**26.842.000,00**	**603.081.738,38**	**67.276.216.531,62**	**66.228.941.932,00**	**1.047.274.599,62**	**1,58**

Realisasi Retribusi Jasa Usaha-LO sebesar Rp67.276.216.531,62 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Pendapatan-LRA		:	**67.852.456.270,00**
Penambahan			
➢ Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka	: 26.842.000,00		
Total Penambahan		:	26.842.000,00

Pengurangan

➢ Saldo Awal Piutang	:	17.185.000,00	
➢ Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka	:	585.896.738,38	
Total Pengurangan			: 603.081.738,38
Total Pendapatan-LO			**: 67.276.216.531,62**

5.4.1.1.2.2.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kayada-LO — Rp37.748.553.995,62

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp37.748.553.995,62, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp38.179.499.524,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp430.945.528,38) atau (1,13%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	384.100.000,00	-	-	384.100.000,00	1.693.859.500,00	(1.309.759.500,00)	(77,32)
2	Dinas Kesehatan	227.436.500,00	-	-	227.436.500,00	201.581.000,00	25.855.500,00	12,83
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	7.052.041.238,00	-	-	7.052.041.238,00	5.383.581.330,00	1.668.459.908,00	30,99
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	3.687.879.541,00	-	-	3.687.879.541,00	3.147.018.360,00	540.861.181,00	17,19
5	Satuan Polisi Pamong Praja	412.747.200,00	-	-	412.747.200,00	465.853.554,00	(53.106.354,00)	(11,40)
6	Dinas Sosial	96.005.900,00	-	-	96.005.900,00	90.260.000,00	5.745.900,00	6,37
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.239.177.500,00	-	-	2.239.177.500,00	2.002.570.000,00	236.607.500,00	11,82
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.287.836.770,00	-	-	4.287.836.770,00	4.048.056.755,00	239.780.015,00	5,92
9	Dinas Perhubungan	25.035.000,00	-	-	25.035.000,00	1.455.610.340,00	(1.430.575.340,00)	(98,28)
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	457.460.030,00	-	-	457.460.030,00	477.573.750,00	(20.113.720,00)	(4,21)
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	24.750.000,00	5.250.000,00	21,21
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	261.172.650,00	-	-	261.172.650,00	559.553.565,00	(298.380.915,00)	(53,32)
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.977.500,00	-	-	12.977.500,00	17.042.600,00	(4.065.100,00)	(23,85)
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.277.056.448,00	-	-	4.277.056.448,00	4.186.404.239,00	90.652.209,00	2,17
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.204.972.877,00	-	-	1.204.972.877,00	1.225.068.867,00	(20.095.990,00)	(1,64)
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.392.727.850,00	-	-	1.392.727.850,00	1.188.139.375,00	204.588.475,00	17,22
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	512.947.000,00	-	-	512.947.000,00	1.789.019.000,00	(1.276.072.000,00)	(71,33)
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.977.834.969,00	-	-	2.977.834.969,00	2.452.439.539,00	525.395.430,00	21,42
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	26.460.000,00	-	-	26.460.000,00	25.200.000,00	1.260.000,00	5,00
20	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.363.246.121,00	-	-	4.363.246.121,00	3.903.556.472,00	459.689.649,00	11,78
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.903.488.640,00	26.842.000,00	585.896.738,38	1.344.433.901,62	1.808.585.278,00	(464.151.376,38)	(25,66)

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	Daerah							
22	Badan Kepegawaian Daerah	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.351.805.000,00	-		1.351.805.000,00	902.770.000,00	449.035.000,00	49,74
24	Sekretariat Daerah	452.600.000,00	-	-	452.600.000,00	413.906.000,00	38.694.000,00	9,35
25	Sekretariat DPRD	550.600.000,00	-	-	550.600.000,00	552.600.000,00	(2.000.000,00)	(0,36)
26	Badan Penghubung	110.000.000,00	-	-	110.000.000,00	164.500.000,00	(54.500.000,00)	(33,13)
	Jumlah	**38.307.608.734,00**	**26.842.000,00**	**585.896.738,38**	**37.748.553.995,62**	**38.179.499.524,00**	**(430.945.528,38)**	**(1,13)**

5.4.1.1.2.2.2 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan-LO — Rp458.284.775,00

Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan terealisasi sebesar Rp458.284.775,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp479.788.100,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp21.503.325,00) atau (4,48%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	458.284.775,00	-	-	458.284.775,00	479.788.100,00	(21.503.325,00)	(4,48)
	Jumlah	**458.284.775,00**	-	-	**458.284.775,00**	**479.788.100,00**	**(21.503.325,00)**	**(4,48)**

5.4.1.1.2.2.3 Pendapatan Retribusi Terminal-LO — Rp1.279.079.750,00

Pendapatan Retribusi Terminal ditargetkan terealisasi sebesar Rp1.279.079.750,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp731.126.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp547.953.750,00 atau 74,95% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Perhubungan	1.296.264.750,00	-	17.185.000,00	1.279.079.750,00	731.126.000,00	547.953.750,00	74,95
	Jumlah	**1.296.264.750,00**	-	**17.185.000,00**	**1.279.079.750,00**	**731.126.000,00**	**547.953.750,00**	**74,95**

5.4.1.1.2.2.4 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO — Rp694.235.000,00

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa terealisasi sebesar Rp694.235.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.679.542.500,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp985.307.500,00) atau 58,67% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Sosial	13.335.000,00	-	-	13.335.000,00	13.000.000,00	335.000,00	2,58
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	139.450.000,00	-	-	139.450.000,00	146.200.000,00	(6.750.000,00)	(4,62)
3	Dinas Koperasi dan UMKM	-	-	-	-	2.880.000,00	(2.880.000,00)	(100,00)
4	Dinas Kepemudaan, Olah Raga	107.775.000,00	-	-	107.775.000,00	413.387.500,00	(305.612.500,00)	(73,93)

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
	dan Pariwisata							
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	15.400.000,00	-	-	15.400.000,00	14.200.000,00	1.200.000,00	8,45
6	Sekretariat Daerah	33.000.000,00	-	-	33.000.000,00	26.200.000,00	6.800.000,00	25,95
7	Sekretariat DPRD	158.680.000,00	-	-	158.680.000,00	131.150.000,00	27.530.000,00	20,99
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	680.110.000,00	(680.110.000,00)	(100,00)
9	Badan Penghubung	226.595.000,00	-	-	226.595.000,00	252.415.000,00	(25.820.000,00)	(10,23)
	Jumlah	**694.235.000,00**	**-**	**-**	**694.235.000,00**	**1.679.542.500,00**	**(985.307.500,00)**	**(58,67)**

5.4.1.1.2.2.5 Pendapatan Retribusi Kepelabuhan-LO Rp5.532.632.500,00

Pendapatan Retribusi Kepelabuhan terealisasi sebesar Rp5.532.632.500,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.827.626.900,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp294.994.400,00) atau (5,06%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.532.632.500,00	-	-	5.532.632.500,00	5.827.626.900,00	(294.994.400,00)	(5,06)
	Jumlah	**5.532.632.500,00**	**-**	**-**	**5.532.632.500,00**	**5.827.626.900,00**	**(294.994.400,00)**	**(5,06)**

5.4.1.1.2.2.6 Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO Rp269.133.000,00

Pendapatan Retribusi Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp269.133.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp269.133.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	256.788.000,00	-	-	256.788.000,00	-	256.788.000,00	100,00
2	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	12.345.000,00	-	-	12.345.000,00	-	12.345.000,00	100,00
	Jumlah	**269.133.000,00**	**-**	**-**	**269.133.000,00**	**-**	**269.133.000,00**	**100,00**

5.4.1.1.2.2.7 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO Rp21.294.297.511,00

Pendapatan Retribusi Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp21.294.297.511,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp19.331.358.908,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.962.938.603,00 atau 10,15% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.688.769.844,00	-	-	1.688.769.844,00	-	1.688.769.844,00	100,00
2	Dinas Pertanian dan Perkebunan	11.039.412.404,00	-	-	11.039.412.404,00	12.088.607.108,00	(1.049.194.704,00)	(8,68)
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.061.053.263,00	-	-	7.061.053.263,00	7.242.751.800,00	(181.698.537,00)	(2,51)
4	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.505.062.000,00	-	-	1.505.062.000,00	-	1.505.062.000,00	100,00
	Jumlah	**21.294.297.511,00**	-	-	**21.294.297.511,00**	**19.331.358.908,00**	**1.962.938.603,00**	**10,15**

5.4.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO **Rp6.169.194.740,00**

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu terealisasi sebesar Rp6.169.194.740,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.256.539.400,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.087.344.660,00) atau (14,98%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	2.816.377.700,00	-	-	2.816.377.700,00	4.467.729.900,00	(1.651.352.200,00)	(36,96)
2	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO	673.827.500,00	-	-	673.827.500,00	900.425.000,00	(226.597.500,00)	(25,17)
3	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	2.678.989.540,00	-	-	2.678.989.540,00	1.888.384.500,00	790.605.040,00	41,87
	Jumlah	**6.169.194.740,00**	-	-	**6.169.194.740,00**	**7.256.539.400,00**	**(1.087.344.660,00)**	**(14,98)**

5.4.1.1.2.3.1 Pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO **Rp2.816.377.700,00**

Pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan terealisasi sebesar Rp2.816.377.700,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.467.729.900,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.651.352.200,00) atau (36,96%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.816.377.700,00	-	-	2.816.377.700,00	4.467.729.900,00	(1.651.352.200,00)	(36,96)
	Jumlah	**2.816.377.700,00**	-	-	**2.816.377.700,00**	**4.467.729.900,00**	**(1.651.352.200,00)**	**(36,96)**

5.4.1.1.2.3.2 Pendapatan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO **Rp673.827.500,00**

Pendapatan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas ditargetkan terealisasi sebesar Rp673.827.500,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp900.425.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp226.597.500,00) atau (25,17%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Perhubungan	673.827.500,00	-	-	673.827.500,00	900.425.000,00	(226.597.500,00)	(25,17)
	Jumlah	**673.827.500,00**	-	-	**673.827.500,00**	**900.425.000,00**	**(226.597.500,00)**	**(25,17)**

5.4.1.1.2.3.3 Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) -LO — Rp2.678.989.540,00

Pendapatan Retribusi IMTA terealisasi sebesar Rp2.678.989.540,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.888.384.500,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp790.605.040,00 atau 41,87% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.678.989.540,00	-	-	2.678.989.540,00	1.888.384.500,00	790.605.040,00	41,87
	Jumlah	**2.678.989.540,00**	-	-	**2.678.989.540,00**	**1.888.384.500,00**	**790.605.040,00**	**41,87**

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO — Rp957.641.390.593,36

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp957.641.390.593,36, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp879.855.728.151,59 mengalami **kenaikan** sebesar Rp77.785.662.441,77 atau 8,84% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO	6.314.626.659,00	24.681.956.593,61	-	30.996.583.252,61	12.380.897.003,92	18.615.686.248,69	150,36
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO	501.949.250.312,00	432.850.805.525,85	8.155.248.497,10	926.644.807.340,75	867.474.831.147,67	59.169.976.193,08	6,82
	Jumlah	**508.263.876.971,00**	**457.532.762.119,46**	**8.155.248.497,10**	957.641.390.593,36	**879.855.728.151,59**	**77.785.662.441,77**	**8,84**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp957.641.390.593,36 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Pendapatan-LRA : **508.263.876.971,00**

Penambahan

- Koreksi Perhitungan ke Metode Ekuitas : 457.532.762.119,46

Total Penambahan : 457.532.762.119,46

Pengurangan

➢ Koreksi Perhitungan ke Metode Ekuitas : 8.155.248.497,10

Total Pengurangan : 8.155.248.497,10

Total Pendapatan-LO : 957.641.390.593,36

5.4.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan pada BUMN-LO Rp30.996.583.252,61

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Penyusutan dan Amortisasi pada BUMN terealisasi sebesar Rp30.996.583.252,61, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.380.897.003,92 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 18.615.686.248,69 atau 150,36% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Bagian Laba PT Wijaya Kusuma (KIW) - LO	3.325.376.041,00	24.667.589.784,61	-	27.992.965.825,61	9.377.279.576,92	18.615.686.248,69	198,52
2	Bagian Laba PT. Asuransi Bangun Askrida - LO	2.989.250.618,00	14.366.809,00	-	3.003.617.427,00	3.003.617.427,00	-	-
	Jumlah	**6.314.626.659,00**	**24.681.956.593,61**	-	**30.996.583.252,61**	**12.380.897.003,92**	**18.615.686.248,69**	**150,36**

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan pada BUMN sebesar Rp30.996.583.252,61 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Pendapatan-LRA : 6.314.626.659,00

Penambahan

➢ Koreksi Perhitungan ke Metode Ekuitas : 24.681.956.593,61

Total Penambahan : 24.681.956.593,61

Pengurangan : -

Total Pengurangan : -

Total Pendapatan-LO : 30.996.583.252,61

5.4.1.1.3.2 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan pada BUMD-LO Rp926.644.807.340,75

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Penyusutan dan Amortisasi pada BUMD terealisasi sebesar Rp926.644.807.340,75, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp867.474.831.147,67 mengalami **kenaikan** sebesar Rp59.169.976.193,08 atau 6,82% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah-LO	316.959.000,00	6.821.752.108,00	-	7.138.711.108,00	535.190.726,00	6.603.520.382,00	1.233,86
2	Bagian Laba PT. Bank Jateng-LO	375.956.828.408,00	299.459.937.860,85	-	675.416.766.268,85	641.802.073.483,23	33.614.692.785,62	5,24

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
3	Bagian Laba BPR-BKK-LO	63.975.590.182,00	86.988.238.533,60		150.963.828.715,60	126.916.191.466,89	24.047.637.248,71	18,95
4	Bagian Laba PDAB Slawi (Tirta Utama)-LO	6.812.844.537,00	7.043.412.990,00	-	13.856.257.527,00	12.386.990.068,00	1.469.267.459,00	11,86
5	Deviden PT. PRPP-LO	-	-		-	-	-	-
6	Deviden PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah-LO	15.651.337.104,00	1.721.022.934,78	8.155.248.497,10	9.217.111.541,68	15.987.793.664,24	(6.770.682.122,56)	(42,35)
7	Deviden PT. Jateng Petro Energi-LO	32.002.416.626,00	21.990.077.447,00	-	53.992.494.073,00	55.113.042.488,00	(1.120.548.415,00)	(2,03)
8	Deviden PT. Jamkrida-LO	7.233.274.455,00	8.826.363.651,62	-	16.059.638.106,62	14.733.549.251,31	1.326.088.855,31	9,00
	Jumlah	**501.949.250.312,00**	432.850.805.525,85	**8.155.248.497,10**	**926.644.807.340,75**	**867.474.831.147,67**	**59.169.976.193,08**	**6,82**

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Penyusutan dan Amortisasi pada BUMD sebesar Rp926.644.807.340,75 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Pendapatan-LRA		:	**501.949.250.312,00**
Penambahan			
➢ Koreksi Perhitungan ke Metode Ekuitas	: 432.850.805.525,85		
Total Penambahan		:	432.850.805.525,85
Pengurangan			
➢ Koreksi Perhitungan ke Metode Ekuitas	: 8.155.248.497,10		
Total Pengurangan		:	8.155.248.497,10
Total Pendapatan-LO		:	**926.644.807.340,75**

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO **Rp2.496.153.709.716,51**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp2.496.153.709.716,51, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.535.864.393.195,51 mengalami **kenaikan** sebesar Rp960.289.316.521,00 atau 62,52% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	22.089.947.250,00	370.051.669,00	370.051.669,00	22.089.947.250,00	1.005.694.120,00	21.084.253.130,00	2.096,49
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	-	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	-	-	-	-	-	-	-
4	Hasil Kerja Sama Daerah - LO	-	-	-	-	-	-	-
5	Jasa Giro - LO	33.421.665.370,00		-	33.421.665.370,00	43.049.831.808,00	(9.628.166.438,00)	(22,37)

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
6	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO	-	9.688.594,00	-	-	-	-	-
7	Pendapatan Bunga - LO	52.487.671.175,00	-	-	52.487.671.175,00	75.019.212.453,73	(22.531.541.278,73)	(30,03)
8	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	8.612.000,00	-	-	8.612.000,00	-	8.612.000,00	-
9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	34.263.799.325,00	-	-	34.263.799.325,00	-	34.263.799.325,00	-
10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing - LO	-	-	-	-	-	-	-
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	2.779.750.191,00	-	-	2.779.750.191,00	1.453.371.334,00	1.326.378.857,00	91,26
12	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	115.195.838.121,00	-	-	115.195.838.121,00	58.794.221.327,00	56.401.616.794,00	95,93
13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	181.042.060,00	18.150.000,00	18.150.000,00	181.042.060,00	257.926.732,00	(76.884.672,00)	(29,81)
14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	-	-	-	-	-	-	
15	Pendapatan dari Pengembalian - LO	1.809.013.300,00	-	62.686,00	1.808.950.614,00	7.070.704.654,00	(5.261.754.040,00)	(74,42)
16	Pendapatan BLUD - LO	2.106.839.090.275,00	345.031.361.012,55	224.245.438.923,03	2.227.625.012.364,51	1.333.274.450.307,78	894.350.562.056,73	67,08
17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan - LO	-	-	-	-	-	-	-
18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LO	-	-	-	-	-	-	-
19	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) - LO	-	-	-	-	-	-	-
20	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO				9.688.594,00	-	9.688.594,00	-
21		-	-	-	-	-	-	-
22	Pendapatan Zakat - LO	-	-	-	-	-	-	-
23	Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa - LO	1.739.312.072,00	-	-	1.739.312.072,00	-	1.739.312.072,00	-
24	Pendapatan Lain-Lain SKPKD - LO	6.382.690.342,00	-	1.840.269.762,00	4.542.420.580,00	15.938.980.459,00	(11.396.559.879,00)	(71,50)
	Jumlah	**2.377.198.431.481,00**	**345.429.251.275,55**	**226.473.973.040,03**	**2.496.153.709.716,51**	**1.535.864.393.195,51**	**960.289.316.521,00**	**62,52**

Dampak Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka penyajian akun Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2020 audited semula sebesar Rp1.540.883.263.195,51 menjadi sebesar Rp1.535.864.393.195,51 turun sebesar Rp5.018.870.000,00. penurunan terdapat pada akun Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp5.018.870.000,00 menjadi Rp0,00 dikarenakan Tahun Anggaran 2021 termasuk bagian dari Pendapatan Retribusi Daerah.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp2.496.153.709.716,51 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Pendapatan-LRA			**: 2.377.198.431.482,00**
Penambahan			
➢ Saldo Akhir Piutang	:	344.393.176.499,09	
➢ Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka	:	357.234.527,45	
➢ Koreksi atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	:	678.840.249,00	
Total Penambahan			: 345.429.251.275,55
Pengurangan			
➢ Saldo Awal Piutang	:	157.487.582.926,83	
➢ Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	:	605.749.765,20	
➢ Pelunasan Pendapatan Pengembalian Tahun Lalu	:	1.828.062.686,00	
➢ Koreksi atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	:	66.552.577.662,00	
Total Pengurangan			: 226.473.973.040,03
Total Pendapatan-LO			**: 2.496.153.709.716,51**

5.4.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO **Rp22.089.947.250,00**

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp22.089.947.250,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.005.694.120,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp21.084.253.130,00 atau 2.096,49% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	324.962.000,00	-	-	324.962.000,00	381.206.600,00	(56.244.600,00)	(14,75)
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	20.826.561.000,00	-	-	20.826.561.000,00	-	20.826.561.000,00	-
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.750.000,00	-	-	23.750.000,00	10.010.000,00	13.740.000,00	137,26
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	914.674.250,00	-	-	914.674.250,00	614.477.520,00	300.196.730,00	48,85
	Jumlah	**22.089.947.250,00**	-	-	**22.089.947.250,00**	**1.005.694.120,00**	**21.084.253.130,00**	**2.096,49**

5.4.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO — Rp0,00

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp 0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 **tidak mengalami kenaikan / penurunan** dengan rincian sebagai berikut

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	370.051.669,00	370.051.669,00	-	-	-	-
	Jumlah	-	**370.051.669,00**	**370.051.669,00**	-	-	-	-

5.4.1.1.4.3 Jasa Giro-LO — Rp33.421.665.370,00

Jasa Giro terealisasi sebesar Rp33.421.665.370,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp43.049.831.808,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp9.628.166.438,00) atau (22,37%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	33.421.665.370,00	-	-	33.421.665.370,00	43.049.831.808,00	(9.628.166.438,00)	(22,37)
	Jumlah	**33.421.665.370,00**	-	-	**33.421.665.370,00**	**43.049.831.808,00**	**(9.628.166.438,00)**	**(22,37)**

5.4.1.1.4.4 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO — Rp9.688.594,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO terealisasi sebesar Rp9.688.594,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp9.688.594,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	SKPKD	-	9.688.594	-	9.688.594,00	-	9.688.594,00	100,00
	Jumlah	-	**9.688.594,00**	-	**9.688.594,00**	-	**9.688.594,00**	**100,00**

5.4.1.1.4.5 Pendapatan Bunga-LO Rp52.487.671.175,00

Pendapatan Bunga terealisasi sebesar Rp52.487.671.175,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp75.019.212.453,73 mengalami **penurunan** sebesar (Rp22.531.541.278,73) atau (30,03%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	52.487.671.175,00	-	-	52.487.671.175,00	75.019.212.453,73	(22.531.541.278,73)	(30,03)
	Jumlah	**52.487.671.175,00**	-	-	**52.487.671.175,00**	**75.019.212.453,73**	**(22.531.541.278,73)**	**(30,03)**

5.4.1.1.4.6 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO Rp8.612.000,00

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp8.612.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp8.612.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	SKPKD	8.612.000,00	-	-	8.612.000,00	-	8.612.000,00	100,00
	Jumlah	**8.612.000,00**	-	-	**8.612.000,00**	-	**8.612.000,00**	**100,00**

5.4.1.1.4.7 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO Rp34.263.799.325,00

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain terealisasi sebesar Rp34.263.799.325,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp34.263.799.325,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Perhubungan	12.549.852.000,00	-	-	12.549.852.000,00	-	12.549.852.000,00	100,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.224.768.425,00	-	-	1.224.768.425,00	-	1.224.768.425,00	100,00
3	Badan Kepegawaian Daerah	643.900.000,00	-	-	643.900.000,00	-	643.900.000,00	100,00
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.845.278.900,00	-	-	19.845.278.900,00	-	19.845.278.900,00	100,00
	Jumlah	**34.263.799.325,00**	-	-	**34.263.799.325,00**	-	**34.263.799.325,00**	**100,00**

5.4.1.1.4.8 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Rp2.779.750.191,00

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp2.779.750.191,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.453.371.334,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.326.378.857,00 atau 91,26% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	SKPKD	2.779.750.191,00	-	-	2.779.750.191,00	1.453.371.334,00	1.326.378.857,00	91,26
	Jumlah	**2.779.750.191,00**	-	-	**2.779.750.191,00**	**1.453.371.334,00**	**1.326.378.857,00**	**91,26**

5.4.1.1.4.9 Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO Rp115.195.838.121,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp115.195.838.121,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp58.794.221.327,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp56.401.616.794,00 atau 95,93% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	115.195.838.121,00	-	-	115.195.838.121,00	58.794.221.327,00	56.401.616.794,00	95,93
	Jumlah	**115.195.838.121,00**	**-**	**-**	**115.195.838.121,00**	**58.794.221.327,00**	**56.401.616.794,00**	**95,93**

5.4.1.1.4.10 Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Rp181.042.060,00

Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp181.042.060,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp257.926.732,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp76.884.672,00) atau (29,81%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	100.756.131,00	(100.756.131,00)	(100,00)
2	Satuan Polisi Pamong Praja	90.618,00	-	-	90.618,00	859.069,00	(768.451,00)	(89,45)
3	Dinas Perhubungan	62.112.570,00	-	-	62.112.570,00	42.448.140,00	19.664.430,00	46,33
4	Dinas Kelautan dan perikanan	117.265.756,00	18.150.000,00	18.150.000,00	117.265.756,00	110.088.342,00	7.177.414,00	6,52
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.573.116,00	-	-	1.573.116,00	3.775.050,00	(2.201.934,00)	(58,33)
	Jumlah	**181.042.060,00**	**18.150.000,00**	**18.150.000,00**	**181.042.060,00**	**257.926.732,00**	**(76.884.672,00)**	**(29,81)**

5.4.1.1.4.11 Pendapatan dari Pengembalian-LO Rp1.808.950.614,00

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp1.808.950.614,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.070.704.654,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp5.261.754.040,00) atau (74,42%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	SKPKD	1.809.013.300,00		62.686,00	1.808.950.614,00	7.070.704.654,00	(5.261.754.040,00)	(74,42)
	Jumlah	**1.809.013.300,00**	**-**	**62.686,00**	**1.808.950.614,00**	**7.070.704.654,00**	**(5.261.754.040,00)**	**(74,42)**

5.4.1.1.4.12 Pendapatan BLUD-LO Rp2.227.625.012.364,51

Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp2.227.625.012.364,51, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.333.274.450.307,78 mengalami **kenaikan** sebesar Rp894.350.562.056,73 atau 67,08% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.096.083.274.297,00	89.123.521.054	110.995.185.799	1.074.211.609.551,85	654.746.164.023,03	419.465.445.528,82	64,07
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	555.980.036.192,00	124.959.265.894	70.194.164.546	610.745.137.539,79	388.757.853.654,30	221.987.283.885,49	57,10
3	RSUD Tugurejo Semarang	221.383.394.575,00	70.941.893.172,60	20.710.557.568,60	271.614.730.179,00	141.153.021.221,00	130.461.708.958,00	92,43
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	51.102.616.824,00	32.733.017.265,00	6.567.248.317,00	77.268.385.772,00	46.019.003.276,40	31.249.382.495,60	67,91
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	49.509.558.788,00	16.037.470.087,75	3.806.135.392,33	61.740.893.483,42	29.118.971.714,09	32.621.921.769,33	112,03
6	RSJD Surakarta	76.247.667.943,00	657.683.460,00	6.676.358.648,00	70.228.992.755,00	33.497.983.090,00	36.731.009.665,00	109,65
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	56.532.541.656,00	10.578.510.079,01	5.295.788.651,56	61.815.263.083,45	39.981.453.328,96	21.833.809.754,49	54,61
	Jumlah	**2.106.839.090.275,00**	**345.031.361.012,55**	**224.245.438.923,03**	**2.227.625.012.364,51**	**1.333.274.450.307,78**	**894.350.562.056,73**	**67,08**

5.4.1.1.4.13 Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa – LO **Rp1.739.312.072,00**

Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa terealisasi sebesar Rp1.739.312.072,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.739.312.072,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	SKPKD	1.739.312.072,00			1.739.312.072,00		1.739.312.072,00	100,00
	Jumlah	**1.739.312.072,00**	-	-	**1.739.312.072,00**	-	**1.739.312.072,00**	**100,00**

5.4.1.1.4.14 Pendapatan Lain-Lain SKPD-LO **Rp4.542.420.580,00**

Pendapatan Lain-Lain SKPD terealisasi sebesar Rp4.542.420.580,00 , apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.938.980.459,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp11.396.559.879,00) atau (71,50%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	30.456.464,00	(30.456.464,00)	(100,00)
2	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	-	-	-	-	162.732.000,00	(162.732.000,00)	(100,00)
3	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	1.000,00	(1.000,00)	(100,00)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62.686,00	-	-	62.686,00		62.686,00	#DIV/0!
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.322.000,00	-	-	17.322.000,00	32.328.002,00	(15.006.002,00)	(46,42)
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	393.958.540,00	(393.958.540,00)	(100,00)
7	Dinas Perhubungan	5.200.000,00	-	-	5.200.000,00	8.724.363.720,00	(8.719.163.720,00)	(99,94)
8	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	-	63.450.000,00	(63.450.000,00)	(100,00)
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	-	221.582.000,00	(221.582.000,00)	(100,00)
10	Dinas Enrgi Sumber Daya Mineral	6.759.000,00	-	-	6.759.000,00	1.011.000,00	5.748.000,00	568,55
11	Dinas Perindustrian	-	-	-	-	785.632.415,00	(785.632.415,00)	(100,00)

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	dan Perdagangan							
12	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	53.722.000,00	-	-	53.722.000,00	46.732.000,00	6.990.000,00	14,96
13	SKPKD	6.299.151.156,00		1.840.269.762,00	4.458.881.394,00	5.404.182.073,00	(945.300.679,00)	(17,49)
14	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	473.500,00	-	-	473.500,00	2.351.245,00	(1.877.745,00)	(79,86)
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	70.200.000,00	(70.200.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**6.382.690.342,00**	**-**	**1.840.269.762,00**	**4.542.420.580,00**	**15.938.980.459,00**	**(11.396.559.879,00)**	**(71,50)**

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO **Rp11.610.733.551.105,00**

Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp11.610.733.551.105,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.093.350.514.256,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.517.383.036.849,00 atau 43,46% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Transfer Pemrintah Pusat-LO	11.871.796.336.054,00	13.297.360.471,00	274.360.145.420,00	11.610.733.551.105,00	8.093.350.514.256,00	3.517.383.036.849,00	43,46
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**11.871.796.336.054,00**	**13.297.360.471,00**	**274.360.145.420,00**	**11.610.733.551.105,00**	**8.093.350.514.256,00**	**3.517.383.036.849,00**	**43,46**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp11.610.733.551.105,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Pendapatan-LRA		:	**11.871.796.336.054,00**
Penambahan			
➢ Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	: 13.297.360.471,00		
Total Penambahan		:	13.297.360.471,00
Pengurangan			
➢ Saldo Awal Piutang	: 128.148.979.363,00		
➢ Koreksi atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	: 146.211.166.057,00		
Total Pengurangan		:	274.360.145.420,00
Total Pendapatan-LO		:	**11.610.733.551.105,00**

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemrintah Pusat-LO **Rp11.610.733.551.105,00**

Pendapatan Transfer Pemrintah Pusat terealisasi sebesar Rp11.610.733.551.105,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.093.350.514.256,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.517.383.036.849,00 atau 43,46% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dana Perimbangan- LO	11.803.085.731.054,00	13.297.360.471,00	274.360.145.420,00	11.542.022.946.105,00	8.025.138.059.256,00	3.516.884.886.849,00	43,82
2	Dana Insentif Daerah (DID)- LO	68.710.605.000,00	-	-	68.710.605.000,00	68.212.455.000,00	498.150.000,00	0,73
	Jumlah	**11.871.796.336.054,00**	**13.297.360.471,00**	**274.360.145.420,00**	**11.610.733.551.105,00**	**8.093.350.514.256,00**	**3.517.383.036.849,00**	**43,46**

Total Pendapatan-LRA : 11.871.796.336.054,00

Penambahan

- Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka : 13.297.360.471,00

Total Penambahan : 13.297.360.471,00

Pengurangan

- Saldo Awal Piutang : 128.148.979.363,00
- Koreksi Kurang Piutang : 146.211.166.057,00

Total Pengurangan : 274.360.145.420,00

Total Pendapatan-LO : 11.610.733.551.105,00

5.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan-LO Rp 11.542.022.946.105,00

Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp11.542.022.946.105,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.025.138.059.256,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.516.884.886.849,00 atau 43,82% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	1.035.845.630.434,00	13.297.360.471,00	274.360.145.420,00	774.782.845.485,00	670.064.794.504,00	104.718.050.981,00	15,63
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	3.432.978.859.000,00	-	-	3.432.978.859.000,00	3.438.709.973.000,00	(5.731.114.000,00)	(0,17)
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	401.885.567.398,00	-	-	401.885.567.398,00	350.564.240.958,00	51.321.326.440,00	14,64
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	6.932.375.674.222,00	-	-	6.932.375.674.222,00	3.565.799.050.794,00	3.366.576.623.428,00	94,41
	Jumlah	**11.803.085.731.054,00**	**13.297.360.471,00**	**274.360.145.420,00**	**11.542.022.946.105,00**	**8.025.138.059.256,00**	**3.516.884.886.849,00**	**43,82**

5.4.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Rp 774.782.845.485,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp 774.782.845.485,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 670.064.794.504,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp104.718.050.981,00 atau 15,63 % dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO	78.170.445.518,00	-	25.939.229.634,00	52.231.215.884,00	52.355.285.674,00	(124.069.790,00)	(0,24)
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi - LO	690.318.309.644,00	13.297.360.471,00	221.733.066.786,00	481.882.603.329,00	399.239.620.230,00	82.642.983.099,00	20,70
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	254.770.117.163,00	-	23.809.415.610,00	230.960.701.553,00	213.874.918.000,00	17.085.783.553,00	7,99
4	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	9.386.722.285,00	-	2.427.708.901,00	6.959.013.384,00	3.007.759.400,00	3.951.253.984,00	131,37
5	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	204.832.300,00	-	-	204.832.300,00	953.548.771,00	(748.716.471,00)	(78,52)
6	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi - LO	1.020.387.900,00	-	-	1.020.387.900,00	36.110.029,00	984.277.871,00	2.725,77
7	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi - LO	1.851.513.250,00	-	381.290.640,00	1.470.222.610,00	572.782.625,00	897.439.985,00	156,68
8	Bagi Hasil Dari Minerba - LO	123.302.374,00		69.433.849,00	53.868.525,00	24.769.775,00	29.098.750,00	117,48
	Jumlah	**1.035.845.630.434,00**	**13.297.360.471,00**	**274.360.145.420,00**	**774.782.845.485,00**	**670.064.794.504,00**	**104.718.050.981,00**	**15,63**

5.4.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Rp 3.432.978.859.000,00

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp 3.432.978.859.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 3.438.709.973.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp 5.731.114.000,00) atau (0,17%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	3.432.978.859.000,00	-	-	3.432.978.859.000,00	3.438.709.973.000,00	(5.731.114.000,00)	(0,17)
	Jumlah	**3.432.978.859.000,00**	**-**	**-**	**3.432.978.859.000,00**	**3.438.709.973.000,00**	**(5.731.114.000,00)**	**(0,17)**

5.4.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Rp 401.885.567.398,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp 401.885.567.398,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 350.564.240.958,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 51.321.326.440,00 atau 14,64 % dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	DAK Bidang Pendidikan - LO	204.019.889.120,00	-	-	204.019.889.120,00	238.525.644.192,00	(34.505.755.072,00)	(14,47)
2	DAK Bidang Kesehatan - LO	99.424.571.254,00	-	-	99.424.571.254,00	53.547.136.929,00	45.877.434.325,00	85,68
3	DAK Bidang Infrastruktur	39.801.657.780,00	-	-	39.801.657.780,00	47.924.844.000,00	(8.123.186.220,00)	(16,95)

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
4	Jalan – LO DAK Bidang Infrastruktur	9.301.772.343,00	-	-	9.301.772.343,00	-	9.301.772.343,00	-
5	Irigasi - LO DAK Bidang Kelautan dan Perikanan -	13.409.579.190,00	-	-	13.409.579.190,00	2.374.367.000,00	11.035.212.190,00	464,76
6	LO DAK Bidang Pertanian -	4.217.308.288,00	-	-	4.217.308.288,00	1.180.833.087,00	3.036.475.201,00	257,15
7	LO DAK Bidang Kehutanan -	26.823.374.450,00	-	-	26.823.374.450,00	1.202.707.750,00	25.620.666.700,00	2.130,25
8	LO DAK Bidang Pariwisata -	4.887.414.973,00	-	-	4.887.414.973,00	-	4.887.414.973,00	-
9	LO DAK Bidang Energi Sumber Daya Mineral - LO	-	-	-	-	5.808.708.000,00	(5.808.708.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**401.885.567.398,00**	-	-	**401.885.567.398,00**	**350.564.240.958,00**	**51.321.326.440,00**	**14,64**

5.4.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO — Rp 6.932.375.674.222,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp6.932.375.674.222,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 3.565.799.050.794,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 3.366.576.623.428,00 atau 94,41 % dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	1.101.018.112.000,00	-	-	1.101.018.112.000,00	1.016.605.974.000,00	84.412.138.000,00	8,30
2	Bantuan Operasional Sekolah - LO	5.821.222.770.000,00	-	-	5.821.222.770.000,00	2.500.692.870.000,00	3.320.529.900.000,00	132,78
3	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB) - LO	233.096.459,00	-	-	233.096.459,00	42.095.670.378,00	(41.862.573.919,00)	(99,45)
4	Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan - LO	3.281.743.678,00	-	-	3.281.743.678,00	2.294.735.812,00	987.007.866,00	43,01
5	Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil - LO	2.271.473.316,00	-	-	2.271.473.316,00	363.705.104,00	1.907.768.212,00	524,54
6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya-LO	3.487.300.769,00	-	-	3.487.300.769,00	3.746.095.500,00	(258.794.731,00)	(6,91)
7	Dana Penyelenggaraan Kepariwisataan - LO	861.178.000,00	-	-	861.178.000,00	-	861.178.000,00	-
	Jumlah	**6.932.375.674.222,00**	-	-	**6.932.375.674.222,00**	**3.565.799.050.794,00**	**3.366.576.623.428,00**	**94,41**

5.4.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)-LO — Rp 68.710.605.000,00

Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sebesar Rp 68.710.605.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 68.212.455.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 498.150.000,00 atau 0,73% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dana Insentif Daerah (DID)- LO	68.710.605.000,00	-	-	68.710.605.000,00	68.212.455.000,00	498.150.000,00	0,73
	Jumlah	**68.710.605.000,00**	-	-	**68.710.605.000,00**	**68.212.455.000,00**	**498.150.000,00**	**0,73**

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO **Rp1.086.623.536.869,07**

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp1.086.623.536.869,07, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.101.488.245.084,50 mengalami **penurunan** sebesar (Rp14.864.708.215,43) atau (1,35%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Hibah-LO	64.882.003.502,00	1.042.503.682.385,88	21.608.997.263,81	1.085.776.688.624,07	1.101.488.245.084,50	(15.711.556.460,43)	(1,43)
2	Dana Darurat- LO	-	-	-	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO	846.848.245,00	-	-	846.848.245,00	-	846.848.245,00	-
	Jumlah	**65.728.851.747,00**	**1.042.503.682.385,88**	**21.608.997.263,81**	**1.086.623.536.869,07**	**1.101.488.245.084,50**	**(14.864.708.215,43)**	**(1,35)**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp1.086.623.536.869,07 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Pendapatan-LRA		:	**65.728.851.747,00**
Penambahan			
➢ Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka	: 496.496.804.268,88		
➢ Hibah Barang Menjadi Aset	: 171.140.996.207,00		
➢ Hibah Barang Menjadi Bahan Habis Pakai	: 374.865.881.910,00		
Total Penambahan		:	1.042.503.682.385,88
Pengurangan			
➢ Penyusutan atas Hibah Barang menjadi Aset	: 21.608.997.263,81		
Total Pengurangan		:	21.608.997.263,81
Total Pendapatan-LO		:	**1.086.623.536.869,07**

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO **Rp1.085.776.688.624,07**

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp1.085.776.688.624,07, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 1.101.488.245.084,50 mengalami **penurunan** sebesar (Rp15.711.556.460,43) atau (1,43%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO	42.132.003.502,00	922.656.381.185,28	21.037.815.531,47	943.750.569.155,81	1.017.537.271.998,14	(73.786.702.842,33)	(7,25)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO	-	65.055.410.052,10	63.908.333,34	64.991.501.718,76	-	64.991.501.718,76	-
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri- LO	-	8.992.324.549,50	13.091.666,67	8.979.232.882,83	60.598.973.086,36	(51.619.740.203,53)	(85,18)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri- LO	22.750.000.000,00	4.803.504.870,00	-	27.553.504.870,00	-	27.553.504.870,00	-
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis - LO	-	40.996.061.729,00	494.181.732,33	40.501.879.996,67	23.352.000.000,00	17.149.879.996,67	73,44
	Jumlah	**64.882.003.502,00**	**1.042.503.682.385,88**	**21.608.997.263,81**	**1.085.776.688.624,07**	**1.101.488.245.084,50**	**(15.711.556.460,43)**	**(1,43)**

5.4.1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO Rp943.750.569.155,81

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp943.750.569.155,81, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.017.537.271.998,14 mengalami **penurunan** sebesar (Rp73.786.702.842,33) atau (7,25%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	62.754.136.486,00	7.588.516,68	62.746.547.969,32	184.122.148.369,88	(121.375.600.400,56)	(65,92)
2	Dinas Kesehatan	-	754.265.855.006,12		754.265.855.006,12	646.649.631.157,75	107.616.223.848,37	16,64
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	21.885.572.269,00	-	21.885.572.269,00	57.194.281.182,26	(35.308.708.913,26)	(61,73)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	41.561.291.886,00	-	41.561.291.886,00	26.327.862.929,00	15.233.428.957,00	57,86
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	332.426.542,00	-	332.426.542,00	3.335.754.651,00	(3.003.328.109,00)	(90,03)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	2.733.967.013,16		2.733.967.013,16	4.534.567.774,00	(1.800.600.760,84)	(39,71)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	771.524.900,00	-	771.524.900,00	381.332.096,00	390.192.804,00	102,32
8	RSJD Surakarta	-	6.913.659.350,00	6.909.739.349,99	3.920.000,01	926.234.700,00	(922.314.699,99)	(99,58)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	14.613.161.933,00	12.760.817.164,80	1.852.344.768,20	55.380.500,00	1.796.964.268,20	3.244,76
10	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	-	3.087.000.000,00	-	3.087.000.000,00	-	3.087.000.000,00	-
11	Dinas Sosial	-		-	-	23.287.500,00	(23.287.500,00)	(100,00)
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	9.077.283.800,00	-	9.077.283.800,00	12.280.134.880,00	(3.202.851.080,00)	(26,08)
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	398.311.000,00	368.831.000,00	29.480.000,00	67.702.250,00	(38.222.250,00)	(56,46)
14	Dinas Perhubungan	-	-		-	4.143.048.003,00	(4.143.048.003,00)	(100,00)
15	Dinas Koperasi dan UKM		2.108.207.000,00	-	2.108.207.000,00	-	2.108.207.000,00	-
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		81.268.500,00	-	81.268.500,00	-	81.268.500,00	-

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	-	-	-	-	74.500.000,00	(74.500.000,00)	(100,00)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	76.388.076.005,25	(76.388.076.005,25)	(100,00)
19	Dinas Pertanian dan Pekebunan		812.439.500,00	812.439.500,00	-	-	-	-
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	42.000.000,00	-	42.000.000,00	22.530.000,00	19.470.000,00	86,42
21	SKPKD	42.132.003.502,00	1.000.000.000,00	-	43.132.003.502,00	-	43.132.003.502,00	-
22	Badan Pembangunan Daerah dan Litbang		178.400.000,00	178.400.000,00		-	-	-
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	1.010.800.000,00	(1.010.800.000,00)	(100,00)
24	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
25	Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	-	39.876.000,00	-	39.876.000,00	-	39.876.000,00	-
	Jumlah	**42.132.003.502,00**	**922.656.381.185,28**	**21.037.815.531,47**	**943.750.569.155,81**	**1.017.537.271.998,14**	**(73.786.702.842,33)**	**(7,25)**

5.4.1.3.1.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO Rp64.991.501.718,76

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp64.991.501.718,76 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 60.598.973.086,36 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.006.217.132,40 atau 6,61% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kesehatan	-	5.668.998.459,00	63.908.333,34	5.605.090.125,66	48.057.908.118,00	(42.452.817.992,34)	(88,34)
2	RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	52.158.338.940,55	-	52.158.338.940,55	4.967.499.867,86	47.190.839.072,69	949,99
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	5.342.736.904,20	-	5.342.736.904,20	1.541.131.488,00	3.801.605.416,20	246,68
4	RSUD Tugurejo Semarang	-	1.253.403.832,35	-	1.253.403.832,35	1.343.792.509,70	(90.388.677,35)	(6,73)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-	-	-	4.321.810.411,00	(4.321.810.411,00)	(100,00)
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	-	-	-	197.819.500,00	(197.819.500,00)	(100,00)
7	RSJD Surakarta	-	41.698.400,00	-	41.698.400,00	61.748.192,00	(20.049.792,00)	(32,47)
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	203.922.016,00	-	203.922.016,00	107.262.999,80	96.659.016,20	90,11
9	SKPKD	-	-	-	-	-	-	-
10	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	386.311.500,00	-	386.311.500,00	-	386.311.500,00	-
	Jumlah	**-**	**65.055.410.052,10**	**63.908.333,34**	**64.991.501.718,76**	**60.598.973.086,36**	**4.006.217.132,40**	**6,61**

5.4.1.3.1.3 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO Rp8.979.232.882,83

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp8.979.232.882,83 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp60.598.973.086,36 mengalami **penurunan** sebesar (Rp51.633.228.889,53) atau (85,20%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	891.893.000,00	13.091.666,67	878.801.333,33	-	878.801.333,33	-
	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	48.057.908.118,00	(48.057.908.118,00)	(100,00)
2	RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	915.463.355,00	-	915.463.355,00	4.967.499.867,86	(4.052.036.512,86)	(81,57)
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-	-	-	1.541.131.488,00	(1.541.131.488,00)	(100,00)
4	RSUD Tugurejo Semarang	-	1.240.714.942,00	-	1.240.714.942,00	1.343.792.509,70	(103.077.567,70)	(7,67)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	287.633.825,00	-	287.633.825,00	4.321.810.411,00	(4.034.176.586,00)	(93,34)
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	5.633.698.741,50	-	5.633.698.741,50	197.819.500,00	5.435.879.241,50	2.747,90
7	RSJD Surakarta	-	-	-	-	61.748.192,00	(61.748.192,00)	(100,00)
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	9.432.000,00	-	9.432.000,00	107.262.999,80	(97.830.999,80)	(91,21)
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	13.488.686,00	-	13.488.686,00	-	13.488.686,00	-
9	SKPKD	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**-**	**8.992.324.549,50**	**13.091.666,67**	**8.979.232.882,83**	**60.598.973.086,36**	**(51.633.228.889,53)**	**(85,20)**

5.4.1.3.1.4 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri- LO — Rp27.553.504.870,00

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri terealisasi sebesar Rp27.553.504.870,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp27.553.504.870,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	3.924.315.500,00	-	3.924.315.500,00	-	3.924.315.500,00	100,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	297.606.370,00	-	297.606.370,00	-	297.606.370,00	100,00
3	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten			-	-		-	-
4	Dinas Sosial	-	231.983.000,00	-	231.983.000,00	-	231.983.000,00	100,00
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	349.600.000,00	-	349.600.000,00	-	349.600.000,00	100,00
6	SKPKD	22.750.000.000,00		-	22.750.000.000,00	-	22.750.000.000,00	100,00
	Jumlah	**22.750.000.000,00**	**4.803.504.870,00**	**-**	**27.553.504.870,00**	**-**	**27.553.504.870,00**	**100,00**

5.4.1.3.1.5 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis- LO — Rp40.501.879.996,67

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis terealisasi sebesar Rp40.501.879.996,67 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp23.352.000.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp23.352.000.000,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	39.821.639.562	494.181.732	39.327.457.829,67	-	39.327.457.829,67	-
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	1.174.422.167	-	1.174.422.167,00	-	1.174.422.167,00	-
3	SKPKD	-		-	-	23.352.000.000,00	(23.352.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**40.996.061.729,00**	**494.181.732,33**	**40.501.879.996,67**	**23.352.000.000,00**	**(23.352.000.000,00)**	**(100,00)**

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO — Rp846.848.245,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp846.848.245,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 846.848.245,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp846.848.245,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	SKPKD	846.848.245,00	-	-	846.848.245,00	-	846.848.245,00	-
	Jumlah	**846.848.245,00**	**-**	**-**	**846.848.245,00**	**-**	**846.848.245,00**	**-**

5.4.2 BEBAN DAERAH — Rp26.335.553.248.899,89

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp26.335.553.248.899,89, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp23.411.329.516.736,86 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.924.223.732.163,02 atau 12,49% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Operasional	16.826.577.831.470,00	4.683.250.383.318,17	3.500.509.744.074,86	18.009.318.470.713,30	14.944.504.459.331,70	3.064.814.011.381,59	20,51
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	16.164.046.433.299,80	14.842.683.482.940,20	1.321.362.950.359,57	1.376.706.006.230,14	(55.343.055.870,57)	(4,02)
3	Beban Transfer	7.497.298.646.119,00	93.749.108.285,00	586.175.926.577,00	7.004.871.827.827,00	7.090.119.051.175,00	(85.247.223.348,00)	(1,20)
	Jumlah	**24.323.876.477.589,00**	**20.941.045.924.903,00**	**18.929.369.153.592,10**	**26.335.553.248.899,89**	**23.411.329.516.736,86**	**2.924.223.732.163,02**	**12,49**

Realisasi Beban Daerah terealisasi sebesar Rp26.335.553.248.899,89 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Belanja Daerah : **24.323.876.477.589,00**

Penambahan

- Saldo Akhir Utang : 336.643.878.505,50
- Koreksi atas Pencatatan Utang Tahun Sebelumnya : 992.109.360,52
- Reklasifikasi Pemberian Hibah Aset Tetap ke Pihak Lain : 12.773.729.150,00

➢	Belanja Non Aset Tetap	:	14.606.476.380,00
➢	Aset Ekstrakomtabel	:	14.859.414.427,00
➢	Beban dari Pendapatan Hibah-LO	:	613.425.210.441,64
➢	Saldo Penyisihan Piutang Tahun Berkenaan	:	637.609.953.379,84
➢	Koreksi atas pencatatan Piutang tahun Sebelumnya	:	261.640.683,04
➢	Saldo Awal Persediaan	:	505.231.447.604,12
➢	Mutasi Masuk Persediaan	:	40.261.198.051,11
➢	Koreksi Pencatatan Persediaan Tahun Sebelumnya	:	902.710.393.937,81
➢	Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	:	6.144.929.018,16
➢	Reklasifikasi Pemberian Hibah Kas Lainnya ke Pihak Lain	:	569.026.000,00
➢	Reklasifikasi dari BTT	:	67.973.876.000,00
➢	Reklasifikasi dari BOP	:	1.280.507.243.690,00
➢	Beban Akibat Penyesuaian Perlakuan Investasi	:	1.754.712.546,00
➢	Suplus Kegiatan Non Operasional	:	340.674.252.428,43
➢	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	:	15.895.292.068.731,30
➢	Mutasi Keluar Aset	:	19.360.943.612,23
➢	Reklas Keluar Aset	:	28.932.295.296,25
➢	Reklas ke Aset Lainnya	:	40.075.404.602,67
➢	Ke Aset Ekstrakomptabel	:	86.393.285.925,76
➢	Koreksi Aset	:	71.220.076.419,01
➢	Reklas ke Aset Aset Tetap	:	2.803.297.258,90
➢	Reklas Pemanfaatan	:	37.436.583,33
➢	Penjualan	:	17.788.868.240,31
➢	Ganti Rugi	:	235.058.750,00
➢	Hibah dan Lain-Lain	:	1.907.697.879,99
	Total Penambahan		: 20.941.045.924.903,00

Pengurangan

➢	Saldo Awal Utang	:	784.278.114.274,78
➢	Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya	:	840.000,00
➢	Koreksi atas pencatatan utang tahun Sebelumnya	:	13.488.686,00
➢	Reklasifikasi Aset ke Beban Lain	:	1.284.464.245.733,86
➢	Kapitalisasi Ke Aset Tetap	:	35.606.984.567,00
➢	Beban Penyusutan Ektrakomtabel	:	1.677.571.775,86

- Penyusutan Aset Tetap yang Dihibahkan : 1.099.787.863,33
- Saldo Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya : 414.208.509.154,19
- Koreksi atas pencatatan Piutang tahun Sebelumnya : 562.582.192.719,84
- Saldo Akhir Persediaan : 454.835.283.167,02
- Koreksi atas pencatatan Persediaan tahun Sebelumnya : 542.161.814.483,51
- Saldo Akhir Beban Dibayar Dimuka : 5.756.838.226,48
- Hibah Aset : 21.608.997.263,81
- Mutasi Masuk : 19.360.943.612,23
- Reklas Masuk : 89.037.566.762,28
- Reklas dari Aset Lainnya : 8.184.708.314,39
- Dari Aset Ekstrakomptabel : 1.308.765.050,00
- Koreksi : 164.096.694.061,62
- Saldo Awal Akumulasi Penyusutan : 14.539.085.807.875,90

Total Pengurangan : 18.929.369.153.592,10

Total Beban Daerah : **26.335.553.248.899,90**

Beban Daerah sebesar Rp**26.335.553.248.899,90** didalamnya termasuk realisasi kas lainnya sebesar Rp555.600.000,00 yang berasal dari sumbangan masyarakat/donatur dan berada di rekening satgas *Covid-19* Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kas tersebut, pada Tahun 2021 telah direalisasikan pada akun Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu berupa bantuan kepada anak yatim, piatu, dan/atau yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena *Covid 19* dengan mekanisme swakelola.

5.4.2.1 BEBAN OPERASIONAL — Rp18.009.318.470.713,32

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp18.009.318.470.713,32, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 14.944.504.459.331,70 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.064.814.011.381,59 atau 20,51% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Pegawai	5.685.925.255.020,00	4.301.339.859,00	90.554.531.168,00	5.599.672.063.711,00	6.595.517.007.629,25	(995.844.943.918,25)	(15,10)
2	Beban Barang dan Jasa	5.345.399.454.776,00	2.709.666.278.682,17	2.430.387.151.393,64	5.624.678.582.064,53	4.478.636.804.325,77	1.146.041.777.738,76	25,59
3	Beban Bunga	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Subsidi	90.482.166,00	-	-	90.482.166,00	-	90.482.166,00	-
5	Beban Hibah	5.728.982.384.318,00	907.027.485.812,69	1.099.787.863,33	6.634.910.082.267,36	2.423.118.678.522,00	4.211.791.403.745,36	173,82
6	Beban Bantuan Sosial	66.180.255.190,00	67.208.636.000,00	-	133.388.891.190,00	1.433.959.432.980,00	(1.300.570.541.790,00)	(90,70)
7	Beban Penyisihan Piutang	-	978.545.846.491,31	976.790.701.874,03	1.755.144.617,29	395.241.353,75	1.359.903.263,53	344,07
8	Beban Lain-Lain		16.500.796.473,00	1.677.571.775,86	14.823.224.697,14	12.877.294.520,95	1.945.930.176,19	15,11
	Jumlah	**16.826.577.831.470,00**	**4.683.250.383.318,17**	**3.500.509.744.074,86**	**18.009.318.470.713,32**	**14.944.504.459.331,70**	**3.064.814.011.381,59**	**20,51**

Dampak Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka penyajian akun Beban Operasional Tahun 2020 Audited semula sebesar Rp16.321.210.465.561,86 menjadi sebesar Rp14.944.504.459.331,70 selisih sebesar Rp1.376.706.006.230,16. Selisih merupakan beban penyusutan dan amortisasi sesuai kodefikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, tidak masuk dalam klasifikasi beban operasional melainkan menjadi akun terpisah dan berdiri sendiri.

5.4.2.1.1 Beban Pegawai — Rp5.599.672.063.711,00

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp5.599.672.063.711,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 6.595.517.007.629,25 mengalami **penurunan** sebesar (Rp995.844.943.918,25) atau (15,10%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.920.837.996.736,00	2.820.410.757,00	89.857.275.286,00	2.833.801.132.207,00	2.853.005.404.157,00	(19.204.271.950,00)	(0,67)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.486.836.984.726,00	-	-	1.486.836.984.726,00	2.597.070.101.759,00	(1.110.233.117.033,00)	(42,75)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.141.740.348.464,00	1.480.929.102,00	697.255.882,00	1.142.524.021.684,00	963.536.886.786,00	178.987.134.898,00	18,58
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	112.475.592.654,00	-	-	112.475.592.654,00	67.564.954.647,00	44.910.638.007,00	66,47
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	241.290.440,00	-	-	241.290.440,00	206.675.590,00	34.614.850,00	16,75
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	23.793.042.000,00	-	-	23.793.042.000,00	51.502.500.000,00	(27.709.458.000,00)	(53,80)
7	Beban Pegawai BOS	-	-	-	-	62.630.484.690,25	(62.630.484.690,25)	(100,00)
	Jumlah	**5.685.925.255.020,00**	**4.301.339.859,00**	**90.554.531.168,00**	**5.599.672.063.711,00**	**6.595.517.007.629,25**	**(995.844.943.918,25)**	**(15,10)**

Realisasi Beban Pegawai sebesar Rp5.599.672.063.711,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Belanja Pegawai : **5.685.925.255.020,00**

Penambahan

- Saldo Akhir Utang : 4.287.414.859,00
- Koreksi Utang Tahun Sebelumnya : 13.925.000,00

Total Penambahan : 4.301.339.859,00

Pengurangan

- Saldo Awal Utang : 90.554.531.168,00

Total Pengurangan : 90.554.531.168,00

Total Beban Pegawai-LO : 5.599.672.063.711,00

5.4.2.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN **Rp2.833.801.132.207,00**

Beban Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp2.833.801.132.207,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.853.005.404.157,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp19.204.271.950,00) atau (0,67%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.884.214.635.258,00	-	86.902.909.220,00	1.797.311.726.038,00	1.953.773.843.818,00	(156.462.117.780,00)	(8,01)
2	Dinas Kesehatan	43.587.800.574,00	-	-	43.587.800.574,00	44.392.248.486,00	(804.447.912,00)	(1,81)
3	RSUD Dr. Moewardi	117.337.649.175,00			117.337.649.175,00	85.594.787.905,00	31.742.861.270,00	37,09
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	97.215.882.171,00	2.820.410.757,00	2.863.186.066,00	97.173.106.862,00	55.622.990.363,00	41.550.116.499,00	74,70
5	RSUD Tugurejo Semarang	65.646.972.111,00			65.646.972.111,00	40.999.151.307,00	24.647.820.804,00	60,12
6	RSUD Kelet	21.700.830.173,00		91.180.000,00	21.609.650.173,00	14.236.405.108,00	7.373.245.065,00	51,79
7	Donorejo RSJD Dr. Amino Gondohutomo	31.110.100.120,00			31.110.100.120,00	25.005.464.370,00	6.104.635.750,00	24,41
8	RSJD Surakarta	34.814.129.484,00	-	-	34.814.129.484,00	28.998.952.448,00	5.815.177.036,00	20,05
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	23.586.309.987,00	-	-	23.586.309.987,00	17.650.075.532,00	5.936.234.455,00	33,63
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	41.258.508.362,00	-	-	41.258.508.362,00	45.878.726.137,00	(4.620.217.775,00)	(10,07)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	33.746.803.484,00	-	-	33.746.803.484,00	35.163.921.282,00	(1.417.117.798,00)	(4,03)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.291.684.096,00	-	-	5.291.684.096,00	5.777.505.320,00	(485.821.224,00)	(8,41)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	4.920.377.760,00	-	-	4.920.377.760,00	5.478.723.969,00	(558.346.209,00)	(10,19)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.905.648.268,00	-	-	3.905.648.268,00	4.408.013.558,00	(502.365.290,00)	(11,40)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.477.321.451,00	-	-	2.477.321.451,00	2.751.286.313,00	(273.964.862,00)	(9,96)
16	Dinas Sosial	45.003.482.798,00	-	-	45.003.482.798,00	47.520.005.664,00	(2.516.522.866,00)	(5,30)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31.700.917.601,00	-	-	31.700.917.601,00	33.332.748.069,00	(1.631.830.468,00)	(4,90)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.665.527.516,00	-	-	3.665.527.516,00	3.740.592.931,00	(75.065.415,00)	(2,01)
19	Dinas Ketahanan Pangan	6.084.682.618,00	-	-	6.084.682.618,00	6.597.780.135,00	(513.097.517,00)	(7,78)
20	Dinas	58.307.510.694,00	-	-	58.307.510.694,00	61.697.527.765,00	(3.390.017.071,00)	(5,49)

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.533.280.297,00	-	-	5.533.280.297,00	6.425.835.528,00	(892.555.231,00)	(13,89)
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	20.361.925.859,00	-	-	20.361.925.859,00	21.550.809.614,00	(1.188.883.755,00)	(5,52)
23	Dinas Perhubungan	7.553.329.231,00	-	-	7.553.329.231,00	7.953.149.798,00	(399.820.567,00)	(5,03)
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.964.193.642,00	-	-	6.964.193.642,00	7.282.145.451,00	(317.951.809,00)	(4,37)
25	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.753.681.697,00	-	-	4.753.681.697,00	5.262.117.592,00	(508.435.895,00)	(9,66)
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.478.658.116,00	-	-	12.478.658.116,00	12.863.521.003,00	(384.862.887,00)	(2,99)
27	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	11.971.886.644,00	-	-	11.971.886.644,00	12.084.104.480,00	(112.217.836,00)	(0,93)
28	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.268.521.515,00	-	-	16.268.521.515,00	17.369.045.689,00	(1.100.524.174,00)	(6,34)
29	Dinas Kelautan dan Perikanan	47.969.601.140,00	-	-	47.969.601.140,00	51.870.079.450,00	(3.900.478.310,00)	(7,52)
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan	14.081.620.658,00	-	-	14.081.620.658,00	14.186.684.785,00	(105.064.127,00)	(0,74)
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12.630.802.888,00	-	-	12.630.802.888,00	13.219.079.024,00	(588.276.136,00)	(4,45)
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	13.058.868.122,00	-	-	13.058.868.122,00	14.354.147.990,00	(1.295.279.868,00)	(9,02)
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.823.019.013,00	-	-	10.823.019.013,00	11.171.323.845,00	(348.304.832,00)	(3,12)
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	41.126.703.302,00	-	-	41.126.703.302,00	44.168.896.902,00	(3.042.193.600,00)	(6,89)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	8.851.536.467,00	-	-	8.851.536.467,00	9.231.803.106,00	(380.266.639,00)	(4,12)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	58.370.109.953,00	-	-	58.370.109.953,00	10.180.649.013,00	48.189.460.940,00	473,34
37	Badan Kepegawaian Daerah	13.634.382.919,00	-	-	13.634.382.919,00	13.655.743.462,00	(21.360.543,00)	(0,16)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	8.884.177.699,00	-	-	8.884.177.699,00	9.171.319.766,00	(287.142.067,00)	(3,13)
39	Inspektorat	37.925.978.538,00	-	-	37.925.978.538,00	39.363.162.927,00	(1.437.184.389,00)	(3,65)
40	Sekretariat Daerah	8.481.754.895,00	-	-	8.481.754.895,00	9.394.777.284,00	(913.022.389,00)	(9,72)
41	Sekretariat DPRD	3.537.190.440,00	-	-	3.537.190.440,00	3.626.256.968,00	(89.066.528,00)	(2,46)
	Badan Penghubung							
	Jumlah	**2.920.837.996.736,00**	**2.820.410.757,00**	**89.857.275.286,00**	**2.833.801.132.207,00**	**2.853.005.404.157,00**	**(19.204.271.950,00)**	**(0,67)**

5.4.2.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN — Rp1.486.836.984.726,00

Beban Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp1.486.836.984.726,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.597.070.101.759,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.110.233.117.033,00) atau (42,75%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	630.488.227.464,00	-	-	630.488.227.464,00	1.732.528.903.197,00	(1.102.040.675.733,00)	(63,61)
2	Dinas Kesehatan	41.919.953.907,00	-	-	41.919.953.907,00	42.996.957.459,00	(1.077.003.552,00)	(2,50)
3	RSUD Dr. Moewardi	84.224.924.721,00	-	-	84.224.924.721,00	75.853.566.790,00	8.371.357.931,00	11,04
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	54.737.055.733,00	-	-	54.737.055.733,00	48.856.073.657,00	5.880.982.076,00	12,04
5	RSUD Tugurejo Semarang	41.863.532.567,00	-	-	41.863.532.567,00	37.888.914.141,00	3.974.618.426,00	10,49
6	RSUD Kelet	17.857.437.221,00	-	-	17.857.437.221,00	14.820.078.776,00	3.037.358.445,00	20,49
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	29.144.446.669,00	-	-	29.144.446.669,00	26.129.912.849,00	3.014.533.820,00	11,54
8	RSJD Surakarta	30.118.000.201,00	-	-	30.118.000.201,00	29.763.193.737,00	354.806.464,00	1,19
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	20.419.059.528,00	-	-	20.419.059.528,00	17.534.805.250,00	2.884.254.278,00	16,45
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	38.155.967.798,00	-	-	38.155.967.798,00	41.856.944.496,00	(3.700.976.698,00)	(8,84)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	29.417.297.711,00	-	-	29.417.297.711,00	31.042.015.646,00	(1.624.717.935,00)	(5,23)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.378.938.097,00	-	-	5.378.938.097,00	5.855.393.307,00	(476.455.210,00)	(8,14)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	4.836.804.224,00	-	-	4.836.804.224,00	5.422.841.894,00	(586.037.670,00)	(10,81)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.038.129.959,00	-	-	4.038.129.959,00	4.582.299.690,00	(544.169.731,00)	(11,88)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.686.023.445,00	-	-	2.686.023.445,00	2.978.304.687,00	(292.281.242,00)	(9,81)
16	Dinas Sosial	48.206.698.274,00	-	-	48.206.698.274,00	45.839.704.469,00	2.366.993.805,00	5,16
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30.789.753.598,00	-	-	30.789.753.598,00	32.659.505.603,00	(1.869.752.005,00)	(5,72)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.127.312.413,00	-	-	4.127.312.413,00	4.244.850.881,00	(117.538.468,00)	(2,77)
19	Dinas Ketahanan Pangan	6.295.131.947,00	-	-	6.295.131.947,00	6.856.611.829,00	(561.479.882,00)	(8,19)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	52.961.393.759,00	-	-	52.961.393.759,00	57.219.613.358,00	(4.258.219.599,00)	(7,44)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	5.930.779.076,00	-	-	5.930.779.076,00	6.880.798.591,00	(950.019.515,00)	(13,81)

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	19.350.859.590,00	-	-	19.350.859.590,00	20.535.892.594,00	(1.185.033.004,00)	(5,77)
23	Dinas Perhubungan	7.686.707.033,00	-	-	7.686.707.033,00	8.184.457.590,00	(497.750.557,00)	(6,08)
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.916.788.566,00	-	-	6.916.788.566,00	7.405.968.978,00	(489.180.412,00)	(6,61)
25	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.150.108.983,00	-	-	5.150.108.983,00	5.487.529.307,00	(337.420.324,00)	(6,15)
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.092.273.459,00	-	-	12.092.273.459,00	12.712.423.537,00	(620.150.078,00)	(4,88)
27	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	11.072.896.393,00	-	-	11.072.896.393,00	11.369.856.251,00	(296.959.858,00)	(2,61)
28	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.652.362.397,00	-	-	16.652.362.397,00	17.921.337.173,00	(1.268.974.776,00)	(7,08)
29	Dinas Kelautan dan Perikanan	39.438.671.552,00	-	-	39.438.671.552,00	45.923.476.849,00	(6.484.805.297,00)	(14,12)
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan	13.187.035.593,00	-	-	13.187.035.593,00	13.759.341.401,00	(572.305.808,00)	(4,16)
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	14.092.215.100,00	-	-	14.092.215.100,00	14.293.779.235,00	(201.564.135,00)	(1,41)
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	13.042.881.026,00	-	-	13.042.881.026,00	14.373.369.384,00	(1.330.488.358,00)	(9,26)
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.240.779.454,00	-	-	10.240.779.454,00	10.863.197.766,00	(622.418.312,00)	(5,73)
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	41.050.717.417,00	-	-	41.050.717.417,00	44.622.798.071,00	(3.572.080.654,00)	(8,01)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	8.950.000.000,00	-	-	8.950.000.000,00	9.536.648.347,00	(586.648.347,00)	(6,15)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.200.374.357,00	-	-	10.200.374.357,00	10.824.764.498,00	(624.390.141,00)	(5,77)
37	Badan Kepegawaian Daerah	11.984.159.121,00	-	-	11.984.159.121,00	12.602.917.535,00	(618.758.414,00)	(4,91)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	8.391.634.368,00	-	-	8.391.634.368,00	8.653.903.152,00	(262.268.784,00)	(3,03)
39	Inspektorat	41.181.412.915,00	-	-	41.181.412.915,00	43.147.204.212,00	(1.965.791.297,00)	(4,56)
40	Sekretariat Daerah	8.009.094.170,00	-	-	8.009.094.170,00	8.291.720.945,00	(282.626.775,00)	(3,41)
41	Sekretariat DPRD	4.549.144.920,00	-	-	4.549.144.920,00	4.748.224.627,00	(199.079.707,00)	(4,19)
	Badan Penghubung							
	Jumlah	**1.486.836.984.726,00**	-	-	**1.486.836.984.726,00**	**2.597.070.101.759,00**	**(1.110.233.117.033,00)**	**(42,75)**

5.4.2.1.1.3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN — Rp1.142.524.021.684,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp1.142.524.021.684,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp963.536.886.786,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp178.987.134.898,00 atau 18,58% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.105.307.357.882,00	-	-	1.105.307.357.882,00	544.744.922.550,00	560.562.435.332,00	102,90
2	Dinas Kesehatan	-	1.325.679.102,00	-	1.325.679.102,00	5.665.525.757,00	(4.339.846.655,00)	(76,60)
3	RSUD Dr. Moewardi	9.880.083.000,00	111.600.000,00	625.600.000,00	9.366.083.000,00	37.891.730.000,00	(28.525.647.000,00)	(75,28)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	1.177.050.000,00	20.100.000,00	25.805.882,00	1.171.344.118,00	40.573.566.812,00	(39.402.222.694,00)	(97,11)
5	RSUD Tugurejo Semarang	2.047.920.000,00	-	-	2.047.920.000,00	24.985.557.000,00	(22.937.637.000,00)	(91,80)
6	RSUD Kelet	2.246.039.347,00	-	-	2.246.039.347,00	12.097.023.746,00	(9.850.984.399,00)	(81,43)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	1.689.562.000,00	23.550.000,00	45.850.000,00	1.667.262.000,00	10.202.968.000,00	(8.535.706.000,00)	(83,66)
8	RSJD Surakarta	727.160.000,00	-	-	727.160.000,00	5.451.230.000,00	(4.724.070.000,00)	(86,66)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	1.184.350.000,00	-	-	1.184.350.000,00	8.061.700.000,00	(6.877.350.000,00)	(85,31)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-	-	-	4.765.410.000,00	(4.765.410.000,00)	(100,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	-	27.188.854.000,00	(27.188.854.000,00)	(100,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	3.394.824.604,00	(3.394.824.604,00)	(100,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	2.833.800.000,00	(2.833.800.000,00)	(100,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	6.205.796.400,00	(6.205.796.400,00)	(100,00)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	2.840.845.000,00	(2.840.845.000,00)	(100,00)
16	Dinas Sosial	-	-	-	-	24.834.042.500,00	(24.834.042.500,00)	(100,00)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	3.883.859.125,00	(3.883.859.125,00)	(100,00)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	4.834.481.884,00	(4.834.481.884,00)	(100,00)
19	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	2.580.825.000,00	(2.580.825.000,00)	(100,00)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	6.749.993.000,00	(6.749.993.000,00)	(100,00)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	2.172.300.000,00	(2.172.300.000,00)	(100,00)

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil							
22	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	2.466.700.000,00	(2.466.700.000,00)	(100,00)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	2.470.830.000,00	(2.470.830.000,00)	(100,00)
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-	6.249.381.400,00	(6.249.381.400,00)	(100,00)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	2.093.500.000,00	(2.093.500.000,00)	(100,00)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	-	10.570.001.800,00	(10.570.001.800,00)	(100,00)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-	1.185.542.555,00	(1.185.542.555,00)	(100,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	10.640.850.000,00	(10.640.850.000,00)	(100,00)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	-	19.704.358.592,00	(19.704.358.592,00)	(100,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	-	7.507.090.000,00	(7.507.090.000,00)	(100,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	2.182.442.700,00	(2.182.442.700,00)	(100,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	9.233.212.000,00	(9.233.212.000,00)	(100,00)
33	SKPKD	-	-	-		14.326.055.830,00	(14.326.055.830,00)	(100,00)
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	5.816.400.000,00	(5.816.400.000,00)	(100,00)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	17.480.826.235,00	-	-	17.480.826.235,00	54.544.491.905,00	(37.063.665.670,00)	(67,95)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	12.326.569.372,00	(12.326.569.372,00)	(100,00)
37	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	2.318.371.000,00	(2.318.371.000,00)	(100,00)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	3.782.595.000,00	(3.782.595.000,00)	(100,00)
39	Inspektorat	-	-	-	-	2.324.399.254,00	(2.324.399.254,00)	(100,00)
40	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	7.200.500.000,00	(7.200.500.000,00)	(100,00)
41	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	4.066.140.000,00	(4.066.140.000,00)	(100,00)
42	Badan Penghubung	-	-	-	-	568.200.000,00	(568.200.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**1.141.740.348.464,00**	**1.480.929.102,00**	**697.255.882,00**	**1.142.524.021.684,00**	**963.536.886.786,00**	**178.987.134.898,00**	**18,58**

5.4.2.1.1.4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD — Rp112.475.592.654,00

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp112.475.592.654,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp67.564.954.647,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp44.910.638.007,00 atau 66,47% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Sekretariat DPRD	112.475.592.654,00	-	-	112.475.592.654,00	-	112.475.592.654,00	-
2	DPRD	-	-	-	-	67.564.954.647,00	(67.564.954.647,00)	(100,00)
	Jumlah	**112.475.592.654,00**	-	-	**112.475.592.654,00**	**67.564.954.647,00**	**44.910.638.007,00**	**66,47**

5.4.2.1.1.5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH — Rp241.290.440,00

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp241.290.440,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp206.675.590,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp34.614.850,00 atau 16,75% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Sekretariat Daerah	241.290.440,00	-	-	241.290.440,00	-	241.290.440,00	-
2	KDH/WKDH	-	-	-	-	206.675.590,00	(206.675.590,00)	(100,00)
	Jumlah	**241.290.440,00**	-	-	**241.290.440,00**	**206.675.590,00**	**34.614.850,00**	**16,75**

5.4.2.1.1.6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH — Rp23.793.042.000,00

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp23.793.042.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp51.502.500.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp27.709.458.000,00) atau 53,80% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Sekretariat Daerah	23.116.242.000,00	-	-	23.116.242.000,00	-	23.116.242.000,00	-
2	Sekretariat DPRD	676.800.000,00	-	-	676.800.000,00	-	676.800.000,00	-
3	DPRD	-	-	-	-	30.156.000.000,00	(30.156.000.000,00)	(100,00)
4	KDH/WKDH	-	-	-	-	21.346.500.000,00	(21.346.500.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**23.793.042.000,00**	-	-	**23.793.042.000,00**	**51.502.500.000,00**	**(27.709.458.000,00)**	**(53,80)**

5.4.2.1.1.7 Beban Pegawai BOS — Rp,00

Beban Pegawai BOS terealisasi sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp62.630.484.690,25 mengalami **penurunan** sebesar (Rp62.630.484.690,25) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	62.630.484.690,25	(62.630.484.690,25)	(100,00)
	Jumlah	-	-	-	-	**62.630.484.690,25**	**(62.630.484.690,25)**	**(100,00)**

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa — Rp5.624.678.582.064,53

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp5.624.678.582.064,53 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 4.478.636.804.325,77 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.146.041.777.738,76 atau 25,59% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Barang	1.008.471.730.495,00	1.506.344.636.770,29	1.001.314.480.964,52	1.513.501.886.300,77	1.697.551.802.838,06	(184.049.916.537,29)	(10,84)
2	Beban Jasa	1.698.683.493.084,00	887.907.945.922,66	98.189.144.102,26	2.488.402.294.904,40	1.192.698.948.716,96	1.295.703.346.187,44	108,64
3	Beban Pemeliharaan	285.845.276.299,00	280.085.383.852,00	28.872.731.381,00	537.057.928.770,00	233.402.309.181,00	303.655.619.589,00	130,10
4	Beban Perjalanan Dinas	217.706.192.583,00	21.572.208.083,00	4.875.000,00	239.273.525.666,00	263.783.489.773,00	(24.509.964.107,00)	(9,29)
5	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	175.458.434.362,00	2.369.463.621,00	90.640.000,00	177.737.257.983,00	8.314.695.725,00	169.422.562.258,00	2.037,63
6	Beban Barang dan Jasa BOP	1.280.507.243.690,00	-	1.280.507.243.690,00	-	477.150.617.703,00	(477.150.617.703,00)	(100,00)
7	Beban Barang dan Jasa BOS	678.727.084.263,00	11.386.640.433,22	21.408.036.255,86	668.705.688.440,36	605.734.940.388,75	62.970.748.051,61	10,40
	Jumlah	**5.345.399.454.776,00**	**2.709.666.278.682,17**	**2.430.387.151.393,64**	**5.624.678.582.064,53**	**4.478.636.804.325,77**	**1.146.041.777.738,76**	**25,59**

Realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp5.624.678.582.064,53 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Belanja Barang dan Jasa-LRA		:	**5.345.399.454.776,00**
Penambahan	:		
➢ Saldo Akhir Utang	: 238.607.355.361,50		
➢ Koreksi atas pencatatan utang tahun sebelumnya	: 978.184.360,52		
➢ Belanja Non Aset Tetap	: 14.606.476.380,00		
➢ Aset Ekstrakomtabel	: 113.330.500,00		
➢ Beban dari Pendapatan Hibah-LO	: 613.425.210.441,64		
➢ Saldo Awal Persediaan	: 505.231.447.604,12		
➢ Mutasi Masuk Persediaan	: 40.261.198.051,11		
➢ Koreksi Pencatatan Persediaan Tahun Sebeblumnya	: 8.456.637.275,12		
➢ Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	: 6.144.929.018,16		
➢ Reklasifikasi Pemberian Hibah Kas Lainnya ke Pihak Lain	: 37.226.000,00		
➢ Reklasifikasi dari BTT	: 1.297.040.000,00		
➢ Reklasifikasi dari BOP	: 1.280.507.243.690,00		
Total Penambahan		:	**2.709.666.278.682,17**
Pengurangan	:		
➢ Saldo Awal Utang	: 107.547.656.529,78		
➢ Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya	: 840.000,00		

➢	Koreksi atas pencatatan utang tahun sebelumnya	:	13.488.686,00	
➢	Reklasifikasi ke beban lain	:	1.284.464.245.733,86	
➢	Kapitalisasi Ke Aset Tetap	:	35.606.984.567,00	
➢	Saldo Akhir Persediaan	:	454.835.283.167,02	
➢	Koreksi atas pencatatan Persediaan tahun sebelumnya	:	542.161.814.483,51	
➢	Saldo Akhir Beban Dibayar Dimuka	:	5.756.838.226,48	
	Total Pengurangan			**: 2.430.387.151.393,64**
	Total Beban Barang dan Jasa-LO			**: 5.624.678.582.064,53**

5.4.2.1.2.1 Beban Barang — Rp1.513.501.886.300,77

Beban Barang terealisasi sebesar Rp1.513.501.886.300,77, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.697.551.802.838,06 mengalami **penurunan** sebesar (Rp184.049.916.537,29) atau (10,84%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Termasuk Beban BOP Satuan Pendidikan Menengah Negeri)	20.977.105.018,00	320.336.815.931,00	4.396.568.233,86	336.917.352.715,14	20.132.696.912,57	316.784.655.802,57	1.573,48
2	Dinas Kesehatan	99.297.672.205,00	787.543.660.335,88	826.964.489.170,97	59.876.843.369,91	537.951.087.676,00	(478.074.244.306,09)	(88,87)
3	RSUD Dr. Moewardi	326.159.464.933,00	130.455.495.863,07	64.979.608.942,67	391.635.351.853,40	320.509.855.923,97	71.125.495.929,43	22,19
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	148.703.146.874,00	103.923.043.132,15	33.107.097.398,72	219.519.092.607,43	175.390.851.596,73	44.128.241.010,70	25,16
5	RSUD Tugurejo Semarang	57.704.276.421,00	18.763.646.614,06	9.675.912.636,25	66.792.010.398,81	55.066.891.312,36	11.725.119.086,45	21,29
6	RSUD Kelet	17.108.023.642,00	10.949.845.007,34	9.349.597.576,12	18.708.271.073,22	27.503.410.709,12	(8.795.139.635,90)	(31,98)
7	Donorejo RSJD Dr. Amino Gondohutomo	15.856.483.911,00	13.714.823.935,84	4.187.912.357,40	25.383.395.489,44	16.705.005.102,00	8.678.390.387,44	51,95
8	RSJD Surakarta	12.137.286.305,00	3.366.225.506,30	2.536.482.401,36	12.967.029.409,94	10.426.563.839,00	2.540.465.570,94	24,37
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	11.799.454.894,00	8.128.034.164,53	5.366.310.117,32	14.561.178.941,21	10.899.066.588,51	3.662.112.352,70	33,60
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	14.346.782.695,00	1.977.001.458,00	1.411.090.635,16	14.912.693.517,84	8.888.238.380,00	6.024.455.137,84	67,78
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	9.379.239.680,00	411.732.525,00	166.506.160,00	9.624.466.045,00	8.465.854.152,00	1.158.611.893,00	13,69
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.757.845.116,00	750.000,00	100.601.500,00	3.657.993.616,00	1.385.849.100,00	2.272.144.516,00	163,95
13	Satuan Polisi Pamong Praja	966.047.545,00	17.717.476,00	53.844.000,00	929.921.021,00	1.175.158.089,00	(245.237.068,00)	(20,87)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.645.978.720,00	27.066.500,00	20.892.200,00	4.652.153.020,00	1.838.313.200,00	2.813.839.820,00	153,07
15	Sekretariat Badan	4.230.102.575,00	22.927.130.715,60	14.435.657.428,00	12.721.575.862,60	14.187.916.748,00	(1.466.340.885,40)	(10,34)

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
16	Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial	50.068.585.475,00	34.315.494,00	27.808.540,00	50.075.092.429,00	62.280.858.700,00	(12.205.766.271,00)	(19,60)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.467.857.996,00	33.250.250,00	26.833.850,00	6.474.274.396,00	5.502.538.682,00	971.735.714,00	17,66
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.093.821.408,00	3.976.500,00	5.348.500,00	2.092.449.408,00	1.320.622.000,00	771.827.408,00	58,44
19	Dinas Ketahanan Pangan	3.838.273.080,00	2.289.108.063,00	2.341.959.428,00	3.785.421.715,00	4.901.474.899,00	(1.116.053.184,00)	(22,77)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.608.412.406,00	1.989.855.785,00	749.460.910,08	9.848.807.280,92	6.588.948.057,00	3.259.859.223,92	49,47
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	1.723.618.090,00	3.496.500,00	5.390.000,00	1.721.724.590,00	1.284.475.080,00	437.249.510,00	34,04
22	Dinas Perhubungan	9.193.690.949,00	492.561.745,00	773.893.107,00	8.912.359.587,00	6.568.191.535,00	2.344.168.052,00	35,69
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.683.134.827,00	631.000,00	1.610.000,00	22.682.155.827,00	1.993.205.350,00	20.688.950.477,00	1.037,97
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.165.224.348,00	5.387.200,00	8.321.045,00	3.162.290.503,00	5.314.460.412,00	(2.152.169.909,00)	(40,50)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.219.539.130,00	1.825.000,00	1.571.900,00	1.219.792.230,00	1.076.610.227,00	143.182.003,00	13,30
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	12.389.938.333,00	1.120.317.550,00	1.154.092.850,00	12.356.163.033,00	9.174.264.940,00	3.181.898.093,00	34,68
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.241.393.675,00	76.923.441,00	108.968.935,00	1.209.348.181,00	1.165.797.403,00	43.550.778,00	3,74
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.846.523.599,00	2.074.108.767,52	1.088.601.707,72	6.832.030.658,80	5.817.324.499,80	1.014.706.159,00	17,44
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	10.197.407.684,00	1.856.968.428,00	1.730.349.278,00	10.324.026.834,00	13.094.052.711,00	(2.770.025.877,00)	(21,15)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12.582.513.235,00	11.103.667.268,00	11.878.146.321,00	11.808.034.182,00	11.024.481.030,00	783.553.152,00	7,11
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.512.316.447,00	35.611.700,00	10.587.000,00	2.537.341.147,00	2.150.038.020,00	387.303.127,00	18,01
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.176.235.041,00	118.992.044,00	120.860.530,00	21.174.366.555,00	11.274.464.931,00	9.899.901.624,00	87,81
33	SKPKD		57.281.377.441,00	-	57.281.377.441,00	278.638.994.272,00	(221.357.616.831,00)	(79,44)
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.659.715.065,00	14.586.625,00	9.588.925,00	3.664.712.765,00	3.608.940.640,00	55.772.125,00	1,55
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	23.007.723.679,00	4.578.495.604,00	3.906.899.791,90	23.679.319.491,10	15.327.227.429,00	8.352.092.062,10	54,49
36	Badan Pengelola Keuangan	4.792.990.962,00	85.376.500,00	52.341.900,00	4.826.025.562,00	3.325.305.715,00	1.500.719.847,00	45,13

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	dan Aset Daerah							
37	Badan Kepegawaian Daerah	2.734.579.488,00	347.419.810,00	336.753.692,00	2.745.245.606,00	4.197.105.948,00	(1.451.860.342,00)	(34,59)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.026.556.548,00	197.806.000,00	173.082.066,00	5.051.280.482,00	4.513.641.125,00	537.639.357,00	11,91
39	Inspektorat	932.760.905,00	3.411.100,00	1.170.100,00	935.001.905,00	709.985.630,00	225.016.275,00	31,69
40	Sekretariat Daerah	21.336.002.878,00	15.798.290,00	5.780.730,00	21.346.020.438,00	11.580.253.654,00	9.765.766.784,00	84,33
41	Sekretariat DPRD	23.893.818.029,00	14.305.000,00	3.824.600,00	23.904.298.429,00	13.339.737.650,00	10.564.560.779,00	79,20
42	Badan Penghubung	1.010.186.684,00	22.074.500,00	38.664.500,00	993.596.684,00	1.252.042.969,00	(258.446.285,00)	(20,64)
	Jumlah	**1.008.471.730.495,00**	**1.506.344.636.770,29**	**1.001.314.480.964,52**	**1.513.501.886.300,77**	**1.697.551.802.838,06**	**(184.049.916.537,29)**	**(10,84)**

Realisasi Beban Barang sebesar Rp1.513.501.886.300,77 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

	Belanja Barang-LRA			:	**1.008.471.730.495,00**
	Penambahan	:			
➢	Saldo Akhir Utang	:	14.489.251.016,00		
➢	Koreksi atas pencatatan utang tahun sebelumnya	:	940.399.060,52		
➢	Belanja Non Aset Tetap (koreksi)	:	13.880.999.949,00		
➢	Beban dari Pendapatan Hibah-LO	:	613.425.210.441,64		
➢	Saldo Awal Persediaan	:	494.013.097.670,90		
➢	Mutasi Masuk Persediaan	:	40.261.198.051,11		
➢	Koreksi Pencatatan Persediaan Tahun Sebelumnya	:	8.456.637.275,12		
➢	Reklasifikasi dari BTT	:	1.297.040.000,00		
➢	Reklasifikasi dari BOP	:	319.580.803.306,00		
	Total Penambahan			:	**1.506.344.636.770,29**
	Pengurangan				
➢	Saldo Awal Utang	:	17.241.570.789,00		
➢	Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya	:	300.000,00		
➢	Koreksi atas pencatatan utang tahun sebelumnya	:	13.488.686,00		
➢	Reklasifikasi ke beban lain	:	3.832.371.543,86		
➢	Kapitalisasi Ke Aset Tetap	:	1.221.658.273,00		
➢	Saldo Akhir Persediaan	:	436.843.277.189,16		
➢	Koreksi atas pencatatan Persediaan tahun sebelumnya	:	542.161.814.483,51		
	Total Pengurangan			:	**1.001.314.480.964,52**
	Beban Barang-LO			:	**1.513.501.886.300,77**

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa

Rp2.488.402.294.904,40

Beban Jasa terealisasi sebesar Rp2.488.402.294.904,40, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.192.698.948.716,96 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.295.703.346.187,44 atau 108,64% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Termasuk Beban BOP Satuan Pendidikan Menengah Negeri)	46.207.730.483,00	660.493.939.573,47	1.343.583.688,01	705.358.086.368,46	24.735.117.245,20	680.622.969.123,26	2.751,65
2	Dinas Kesehatan	410.966.069.027,00	61.966.689.622,82	1.526.068.650,00	471.406.689.999,82	290.059.794.842,68	181.346.895.157,14	62,52
3	RSUD Dr. Moewardi	346.499.056.357,00	77.414.169.196,02	31.131.676.569,16	392.781.548.983,87	214.851.617.788,07	177.929.931.195,80	82,82
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	125.523.810.116,00	55.457.312.586,71	45.185.561.096,81	135.795.561.605,90	119.168.959.298,05	16.626.602.307,85	13,95
5	RSUD Tugurejo Semarang	74.524.948.172,00	6.159.485.405,83	7.641.089.341,77	73.043.344.236,06	59.934.235.619,58	13.109.108.616,48	21,87
6	RSUD Kelet	17.034.755.017,00	6.736.189.180,00	930.237.203,78	22.840.706.993,22	13.079.638.223,60	9.761.068.769,62	74,63
7	Donorejo RSJD Dr. Amino Gondohutomo	22.065.606.155,00	2.311.706.112,00	1.951.997.656,00	22.425.314.611,00	22.880.072.031,00	(454.757.420,00)	(1,99)
8	RSJD Surakarta	19.130.171.324,00	8.944.212.967,38	1.860.101.496,86	26.214.282.794,52	16.337.641.349,24	9.876.641.445,28	60,45
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	19.723.446.898,00	3.892.425.622,97	1.916.318.008,32	21.699.554.512,65	15.798.203.240,75	5.901.351.271,90	37,35
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	18.909.569.165,00	-	105.493.419,18	18.804.075.745,82	8.718.986.873,00	10.085.088.872,82	115,67
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	38.749.273.754,00	180.743.994,41	150.017.783,85	38.779.999.964,56	7.079.185.036,69	31.700.814.927,87	447,80
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.863.330.615,00	87.650.507,38	386.565.972,06	4.564.415.150,32	3.008.817.157,95	1.555.597.992,37	51,70
13	Satuan Polisi Pamong Praja	3.980.727.585,00	93.611.902,58	109.630.920,97	3.964.708.566,61	4.069.021.246,84	(104.312.680,23)	(2,56)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.286.377.314,00	17.745.476,61	79.386.995,44	16.224.735.795,17	3.578.822.556,39	12.645.913.238,78	353,35
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.931.018.779,00	185.975.155,48	74.639.572,34	5.042.354.362,14	2.466.322.300,50	2.576.032.061,64	104,45
16	Dinas Sosial	21.141.301.809,00	135.866.286,36	127.328.359,32	21.149.839.736,04	8.691.602.510,60	12.458.237.225,44	143,34
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.128.675.251,00	101.225.768,71	460.863.042,32	12.769.037.977,39	9.155.653.236,40	3.613.384.740,99	39,47
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.791.053.934,00	25.798.767,13	25.275.352,84	7.791.577.348,29	3.911.545.963,85	3.880.031.384,44	99,19
19	Dinas Ketahanan Pangan	5.385.890.853,00	83.207.715,73	82.830.994,00	5.386.267.574,73	4.930.137.114,18	456.130.460,55	9,25
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.378.687.096,00	138.901.110,29	140.051.072,05	13.377.537.134,24	6.529.849.516,53	6.847.687.617,71	104,87
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	5.832.932.050,00	70.404.731,49	271.679.293,18	5.631.657.488,31	4.465.971.437,03	1.165.686.051,28	26,10

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
22	Dinas Perhubungan	94.238.981.769,00	217.174.808,22	213.172.400,00	94.242.984.177,22	70.458.205.514,70	23.784.778.662,52	33,76
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	34.893.614.777,00	27.500.000,00	-	34.921.114.777,00	30.543.710.784,00	4.377.403.993,00	14,33
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	18.117.295.627,00	664.923.712,75	78.571.627,21	18.703.647.712,54	19.599.894.408,49	(896.246.695,95)	(4,57)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.749.906.817,00	-	97.945.000,00	4.651.961.817,00	2.525.935.916,00	2.126.025.901,00	84,17
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	31.642.435.694,00	269.861.998,00	438.061.306,00	31.474.236.386,00	25.588.073.929,39	5.886.162.456,61	23,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.739.987.101,00	32.807.453,64	31.309.135,80	4.741.485.418,84	4.388.042.297,69	353.443.121,15	8,05
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	21.188.631.222,00	91.543.111,34	114.357.138,10	21.165.817.195,24	5.162.959.076,28	16.002.858.118,96	309,96
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	23.660.955.907,00	235.011.059,00	171.938.784,15	23.724.028.181,85	14.056.125.860,21	9.667.902.321,64	68,78
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12.453.397.197,00	43.989.333,33	58.740.000,00	12.438.646.530,33	5.321.905.610,12	7.116.740.920,21	133,73
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.044.500.560,00	12.549.021,79	14.415.599,19	10.042.633.982,60	6.921.595.860,82	3.121.038.121,78	45,09
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.886.821.806,00	167.089.135,99	142.664.824,32	18.911.246.117,67	10.462.341.092,53	8.448.905.025,14	80,76
33	SKPKD		-	-	-	2.678.155.122,83	(2.678.155.122,83)	(100,00)
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.808.736.407,00	-	-	8.808.736.407,00	6.682.703.527,00	2.126.032.880,00	31,81
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	77.184.654.561,00	610.143.573,86	611.067.805,14	77.183.730.329,72	53.649.981.071,16	23.533.749.258,56	43,87
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.169.924.593,00	185.356.625,08	91.605.143,58	13.263.676.074,50	6.188.640.224,24	7.075.035.850,26	114,32
37	Badan Kepegawaian Daerah	7.435.785.293,00	-	-	7.435.785.293,00	8.239.240.119,00	(803.454.826,00)	(9,75)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	16.681.177.376,00	16.025.562,83	10.304.819,39	16.686.898.119,44	8.386.845.932,22	8.300.052.187,22	98,97
39	Inspektorat	3.969.806.331,00	112.813.216,33	125.580.046,51	3.957.039.500,82	1.679.522.900,12	2.277.516.600,70	135,60
40	Sekretariat	31.874.479.437,00	366.418.698,56	106.474.839,78	32.134.423.295,78	35.078.459.265,86	(2.944.035.970,08)	(8,39)
41	Sekretariat DPRD	24.377.835.917,00	262.388.737,64	276.357.357,09	24.363.867.297,55	27.840.842.103,39	(3.476.974.805,84)	(12,49)
42	Badan Penghubung	4.510.132.938,00	95.088.190,93	106.181.787,74	4.499.039.341,19	3.794.573.512,78	704.465.828,41	18,57
	Jumlah	**1.698.683.493.084,00**	**887.907.945.922,66**	**98.189.144.102,26**	**2.488.402.294.904,40**	**1.192.698.948.716,96**	**1.295.703.346.187,44**	**108,64**

Realisasi Beban Jasa sebesar Rp2.488.402.294.904,40 dapat dirinci dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Jasa-LRA		:	**1.698.683.493.084,00**
➢ Penambahan			
➢ Saldo Akhir Utang	:		221.352.632.345,50
➢ Koreksi Pencatatan Utang	:		37.785.300,00
➢ Belanja Non Aset Tetap	:		27.500.000,00
➢ Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	:		6.144.929.018,16

➢	Reklasifikasi Pemberian Hibah Kas Lainnya ke Pihak Lain	:	37.226.000,00	
➢	Reklasifikasi dari BOP	:	660.307.873.259,00	
	Total Penambahan			**: 887.907.945.922,66**
➢	Pengurangan			
➢	Saldo Awal Utang	:	90.108.686.617,78	
➢	Pembayaran Hutang	:	540.000,00	
➢	Kapitalisasi Ke Aset Tetap	:	2.323.079.258,00	
➢	Saldo Akhir Beban Dibayar Dimuka	:	5.756.838.226,48	
	Total Pengurangan			**: 98.189.144.102,26**
	Beban Jasa-LO			**: 2.488.402.294.904,40**

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan — Rp537.057.928.770,00

Beban Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp537.057.928.770,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp233.402.309.181,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp303.655.619.589,00 atau 130,10% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Termasuk Beban BOP Satuan Pendidikan Menengah Negeri)	29.973.113.861,00	276.763.287.421,00	24.976.781.583,00	281.759.619.699,00	8.678.908.185,00	273.080.711.514,00	3.146,49
2	Dinas Kesehatan	8.382.757.146,00	-	171.879.000,00	8.210.878.146,00	5.093.728.616,00	3.117.149.530,00	61,20
3	RSUD Dr. Moewardi	22.262.755.409,00	2.646.130.000,00	171.152.400,00	24.737.733.009,00	27.256.062.853,00	(2.518.329.844,00)	(9,24)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	30.015.450.144,00	100.349.920,00	-	30.115.800.064,00	33.934.997.767,00	(3.819.197.703,00)	(11,25)
5	RSUD Tugurejo Semarang	6.650.552.352,00	-	-	6.650.552.352,00	4.269.877.840,00	2.380.674.512,00	55,76
6	RSUD Kelet	1.425.210.298,00	-	336.550,00	1.424.873.748,00	1.816.747.328,00	(391.873.580,00)	(21,57)
7	Donorejo RSJD Dr. Amino Gondohutomo	2.012.129.870,00	-	130.471.600,00	1.881.658.270,00	4.876.874.193,00	(2.995.215.923,00)	(61,42)
8	RSJD Surakarta	2.604.311.371,00	2.930.000,00	7.235.173,00	2.600.006.198,00	1.525.771.952,00	1.074.234.246,00	70,41
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	554.379.874,00	-	-	554.379.874,00	2.317.934.916,00	(1.763.555.042,00)	(76,08)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	110.414.195.066,00	-	-	110.414.195.066,00	63.991.004.900,00	46.423.190.166,00	72,55
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	13.637.871.201,00	-	-	13.637.871.201,00	14.415.066.925,00	(777.195.724,00)	(5,39)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	435.491.900,00	-	-	435.491.900,00	402.656.450,00	32.835.450,00	8,15
13	Satuan Polisi Pamong Praja	418.483.347,00	-	-	418.483.347,00	505.734.148,00	(87.250.801,00)	(17,25)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	410.745.927,00	200.000,00	8.400.000,00	402.545.927,00	746.855.399,00	(344.309.472,00)	(46,10)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	357.575.536,00	-	-	357.575.536,00	832.536.664,00	(474.961.128,00)	(57,05)
16	Dinas Sosial	3.253.071.160,00	-	1.605.378.450,00	1.647.692.710,00	4.933.394.163,00	(3.285.701.453,00)	(66,60)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.790.968.159,00	-	-	3.790.968.159,00	1.450.160.815,00	2.340.807.344,00	161,42

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	225.283.800,00	-	-	225.283.800,00	428.844.138,00	(203.560.338,00)	(47,47)
19	Dinas Ketahanan Pangan	810.389.400,00	-	124.630.500,00	685.758.900,00	651.382.925,00	34.375.975,00	5,28
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.585.440.904,00	-	-	2.585.440.904,00	3.198.778.054,00	(613.337.150,00)	(19,17)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	622.422.812,00	-	-	622.422.812,00	458.716.941,00	163.705.871,00	35,69
22	Dinas Perhubungan	2.788.348.530,00	-	-	2.788.348.530,00	1.550.157.617,00	1.238.190.913,00	79,88
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.097.798.064,00	-	50.600.000,00	3.047.198.064,00	1.987.129.325,00	1.060.068.739,00	53,35
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	910.722.193,00	-	39.963.000,00	870.759.193,00	820.972.097,00	49.787.096,00	6,06
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	425.135.931,00	-	33.974.400,00	391.161.531,00	407.636.264,00	(16.474.733,00)	(4,04)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.600.893.312,00	-	-	1.600.893.312,00	1.027.645.283,00	573.248.029,00	55,78
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	699.176.966,00	-	-	699.176.966,00	901.091.475,00	(201.914.509,00)	(22,41)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.749.520.578,00	-	9.238.514,00	1.740.282.064,00	1.050.422.530,00	689.859.534,00	65,67
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.138.823.862,00	-	849.293.111,00	1.289.530.751,00	1.528.587.068,00	(239.056.317,00)	(15,64)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.615.470.282,00	-	-	1.615.470.282,00	630.579.694,00	984.890.588,00	156,19
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.330.824.329,00	167.423.000,00	159.306.600,00	1.338.940.729,00	1.326.519.375,00	12.421.354,00	0,94
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.248.309.085,00	358.093.511,00	-	2.606.402.596,00	1.364.556.795,00	1.241.845.801,00	91,01
33	SKPKD		-	-	-	176.474.500,00	(176.474.500,00)	(100,00)
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	828.467.193,00	-	207.287.000,00	621.180.193,00	956.860.521,00	(335.680.328,00)	(35,08)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	8.886.712.746,00	-	97.850.500,00	8.788.862.246,00	15.096.916.111,00	(6.308.053.865,00)	(41,78)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	833.663.757,00	46.970.000,00	-	880.633.757,00	2.950.694.841,00	(2.070.061.084,00)	(70,16)
37	Badan Kepegawaian Daerah	1.026.188.779,00	-	-	1.026.188.779,00	1.871.122.405,00	(844.933.626,00)	(45,16)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.189.946.386,00	-	-	2.189.946.386,00	2.686.995.747,00	(497.049.361,00)	(18,50)
39	Inspektorat	990.346.684,00	-	39.260.000,00	951.086.684,00	818.059.009,00	133.027.675,00	16,26
40	Sekretariat	4.282.916.091,00	-	-	4.282.916.091,00	6.263.001.432,00	(1.980.085.341,00)	(31,62)
41	Sekretariat DPRD	5.683.518.211,00	-	188.043.000,00	5.495.475.211,00	6.863.093.324,00	(1.367.618.113,00)	(19,93)
42	Badan Penghubung	1.675.893.783,00	-	1.650.000,00	1.674.243.783,00	1.337.758.596,00	336.485.187,00	25,15
	Jumlah	**285.845.276.299,00**	**280.085.383.852,00**	**28.872.731.381,00**	**537.057.928.770,00**	**233.402.309.181,00**	**303.655.619.589,00**	**130,10**

Realisasi Beban Pemeliharaan sebesar Rp537.057.928.770,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Pemeliharaan - LRA		:	**285.845.276.299,00**
Penambahan			
➢ Saldo Akhir Utang	: 2.707.637.000,00		
➢ Belanja Non Aset Tetap	: 697.976.431,00		
➢ Reklasifikasi dari BOP	: 276.679.770.421,00		
Total Penambahan		:	280.085.383.852,00
Pengurangan			
➢ Saldo Awal Utang	: 192.524.123,00		
➢ Reklasifikasi ke beban lain	: 124.630.500,00		
➢ Kapitalisasi Ke Aset Tetap	: 28.555.576.758,00		
Total Pengurangan		:	28.872.731.381,00
Beban Pemeliharan -LO		:	**537.057.928.770,00**

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas — Rp239.273.525.666,00

Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp239.273.525.666,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp263.783.489.773,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp24.509.964.107,00) atau (9,29%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Termasuk Beban BOP Satuan Pendidikan Menengah Negeri)	7.282.685.804,00	21.569.333.083,00	-	28.852.018.887,00	8.800.935.025,00	20.051.083.862,00	227,83
2	Dinas Kesehatan	11.075.908.152,00	-	-	11.075.908.152,00	5.364.802.842,00	5.711.105.310,00	106,46
3	RSUD Dr. Moewardi	375.481.830,00	-	-	375.481.830,00	364.711.275,00	10.770.555,00	2,95
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	905.417.313,00	-	-	905.417.313,00	488.012.968,00	417.404.345,00	85,53
5	RSUD Tugurejo Semarang	285.318.759,00	-	-	285.318.759,00	329.104.779,00	(43.786.020,00)	(13,30)
6	RSUD Kelet Donorejo	406.166.098,00	-	1.100.000,00	405.066.098,00	468.460.073,00	(63.393.975,00)	(13,53)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	169.223.600,00	-	1.000.000,00	168.223.600,00	106.412.800,00	61.810.800,00	58,09
8	RSJD Surakarta	424.767.736,00	2.875.000,00	2.775.000,00	424.867.736,00	368.969.972,00	55.897.764,00	15,15
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	694.565.294,00			694.565.294,00	402.448.739,00	292.116.555,00	72,58
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	3.897.498.222,00	-	-	3.897.498.222,00	2.660.809.411,00	1.236.688.811,00	46,48
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	7.309.871.347,00	-	-	7.309.871.347,00	4.634.075.484,00	2.675.795.863,00	57,74
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.047.258.166,00	-	-	2.047.258.166,00	2.221.372.536,00	(174.114.370,00)	(7,84)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	2.989.888.251,00	-	-	2.989.888.251,00	4.311.013.064,00	(1.321.124.813,00)	(30,65)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.012.619.367,00	-	-	6.012.619.367,00	3.545.360.168,00	2.467.259.199,00	69,59
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.369.434.078,00	-	-	2.369.434.078,00	2.791.838.301,00	(422.404.223,00)	(15,13)
16	Dinas Sosial	2.854.887.793,00	-	-	2.854.887.793,00	3.819.653.831,00	(964.766.038,00)	(25,26)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.304.152.652,00	-	-	7.304.152.652,00	4.567.781.513,00	2.736.371.139,00	59,91

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.677.347.467,00	-	-	1.677.347.467,00	1.295.414.840,00	381.932.627,00	29,48
19	Dinas Ketahanan Pangan	1.995.039.820,00	-	-	1.995.039.820,00	2.332.129.318,00	(337.089.498,00)	(14,45)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.086.625.645,00	-	-	5.086.625.645,00	6.056.979.463,00	(970.353.818,00)	(16,02)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	4.092.585.380,00	-	-	4.092.585.380,00	2.465.009.163,00	1.627.576.217,00	66,03
22	Dinas Perhubungan	4.818.676.525,00	-	-	4.818.676.525,00	3.146.871.041,00	1.671.805.484,00	53,13
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.635.479.171,00	-	-	6.635.479.171,00	3.419.332.514,00	3.216.146.657,00	94,06
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.109.133.562,00	-	-	7.109.133.562,00	8.152.141.019,00	(1.043.007.457,00)	(12,79)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.160.367.757,00	-	-	1.160.367.757,00	1.182.246.180,00	(21.878.423,00)	(1,85)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	7.080.395.533,00	-	-	7.080.395.533,00	4.497.118.265,00	2.583.277.268,00	57,44
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	764.007.850,00	-	-	764.007.850,00	904.290.060,00	(140.282.210,00)	(15,51)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.290.178.875,00	-	-	4.290.178.875,00	2.918.895.733,00	1.371.283.142,00	46,98
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	8.480.435.929,00	-	-	8.480.435.929,00	9.942.027.254,00	(1.461.591.325,00)	(14,70)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.776.669.951,00	-	-	3.776.669.951,00	2.391.672.036,00	1.384.997.915,00	57,91
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5.283.773.930,00	-	-	5.283.773.930,00	4.992.742.342,00	291.031.588,00	5,83
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.777.939.535,00	-	-	3.777.939.535,00	3.322.761.339,00	455.178.196,00	13,70
33	SKPKD		-	-	-	79.950.000,00	(79.950.000,00)	(100,00)
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.110.509.962,00	-	-	3.110.509.962,00	3.997.103.507,00	(886.593.545,00)	(22,18)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.841.957.873,00	-	-	11.841.957.873,00	9.995.632.062,00	1.846.325.811,00	18,47
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.907.964.280,00	-	-	3.907.964.280,00	3.866.681.253,00	41.283.027,00	1,07
37	Badan Kepegawaian Daerah	3.646.809.162,00	-	-	3.646.809.162,00	4.337.678.760,00	(690.869.598,00)	(15,93)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.458.477.712,00	-	-	1.458.477.712,00	848.296.322,00	610.181.390,00	71,93
39	Inspektorat	6.370.710.106,00	-	-	6.370.710.106,00	4.580.372.919,00	1.790.337.187,00	39,09
40	Sekretariat Daerah	14.176.179.153,00	-	-	14.176.179.153,00	11.526.666.711,00	2.649.512.442,00	22,99
41	Sekretariat DPRD	49.422.296.201,00	-	-	49.422.296.201,00	121.425.204.971,00	(72.002.908.770,00)	(59,30)
42	Badan Penghubung	1.337.486.742,00	-	-	1.337.486.742,00	860.509.920,00	476.976.822,00	55,43
	Jumlah	**217.706.192.583,00**	**21.572.208.083,00**	**4.875.000,00**	**239.273.525.666,00**	**263.783.489.773,00**	**(24.509.964.107,00)**	**(9,29)**

5.4.2.1.2.5 Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga — Rp177.737.257.983,00

Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga terealisasi sebesar Rp177.737.257.983,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar

Rp8.314.695.725,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp169.422.562.258,00 atau 2.037,63% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Termasuk Beban BOP Satuan Pendidikan Menengah Negeri)	4.463.900.000,00	2.369.463.621,00		6.833.363.621,00	1.501.684.545,00	5.331.679.076,00	355,05
2	Dinas Kesehatan	67.995.000,00	-	-	67.995.000,00	24.000.000,00	43.995.000,00	183,31
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	-	-	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	-	-	-	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	-	-	-	-
6	RSUD Kelet	-	-	-	-	-	-	-
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	-	-	-	-
8	RSJD Surakarta	-	-	-	-	-	-	-
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	15.137.752.700,00	-	-	15.137.752.700,00	-	15.137.752.700,00	-
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	129.960.000,00	-	-	129.960.000,00	167.400.000,00	(37.440.000,00)	(22,37)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	153.400.000,00	-	-	153.400.000,00	120.500.000,00	32.900.000,00	27,30
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	131.370.000,00	-	-	131.370.000,00	76.300.000,00	55.070.000,00	72,18
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Sosial	6.104.295.000,00	-	-	6.104.295.000,00	82.500.000,00	6.021.795.000,00	7.299,15
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	728.700.000,00	-	-	728.700.000,00	-	728.700.000,00	-
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97.905.000,00	-	-	97.905.000,00	135.440.000,00	(37.535.000,00)	(27,71)
19	Dinas Ketahanan Pangan	7.576.199.000,00	-	90.640.000,00	7.485.559.000,00	31.000.000,00	7.454.559.000,00	24.046,96
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	29.759.396.585,00	-	-	29.759.396.585,00	429.348.180,00	29.330.048.405,00	6.831,30
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	172.950.000,00	-	-	172.950.000,00	203.700.000,00	(30.750.000,00)	(15,10)
22	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	153.524.000,00	(153.524.000,00)	(100,00)
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	99.000.000,00	-	-	99.000.000,00	20.000.000,00	79.000.000,00	395,00
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	-	-	-	-	-	-	-

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
	Pintu							
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.519.733.000,00	-	-	5.519.733.000,00	2.130.950.000,00	3.388.783.000,00	159,03
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-	56.500.000,00	(56.500.000,00)	(100,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.146.493.664,00	-	-	10.146.493.664,00		10.146.493.664,00	-
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	54.013.544.100,00	-	-	54.013.544.100,00	297.750.000,00	53.715.794.100,00	18.040,57
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	843.032.500,00	-	-	843.032.500,00	2.388.800.000,00	(1.545.767.500,00)	(64,71)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.714.285.713,00	-	-	1.714.285.713,00	159.800.000,00	1.554.485.713,00	972,77
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	971.854.100,00	-	-	971.854.100,00	12.000.000,00	959.854.100,00	7.998,78
33	SKPKD	-	-	-	-	-	-	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	281.500.000,00	-	-	281.500.000,00	266.500.000,00	15.000.000,00	5,63
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-
37	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	2.424.000,00	(2.424.000,00)	(100,00)
39	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-
40	Sekretariat Daerah	37.277.168.000,00	-	-	37.277.168.000,00	36.025.000,00	37.241.143.000,00	103.375,83
41	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
42	Badan Penghubung	68.000.000,00	-	-	68.000.000,00	8.550.000,00	59.450.000,00	695,32
	Jumlah	**175.458.434.362,00**	**2.369.463.621,00**	**90.640.000,00**	**177.737.257.983,00**	**8.314.695.725,00**	**169.422.562.258,00**	**2.037,63**

5.4.2.1.2.6 Beban Barang dan Jasa BOP — Rp0,00

Beban Barang dan Jasa BOP terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp477.150.617.703,00 mengalami penurunan sebesar (Rp477.150.617.703,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.280.507.243.690,00	-	1.280.507.243.690,00	-	477.150.617.703,00	(477.150.617.703,00)	(100,00)
	Jumlah	**1.280.507.243.690,00**	**-**	**1.280.507.243.690,00**	**-**	**477.150.617.703,00**	**(477.150.617.703,00)**	**(100,00)**

Beban barang dan jasa BOP tahun 2021 sebesar Rp0,00 dikarenakan belanja di Satuan Pendidikan Menengah Negeri telah dirinci ke masing-masing beban dengan rincian sebagai berikut :

Akun LRA	Nilai	Akun LO	Nilai
Belanja Barang	319.580.803.306,00	Beban Barang	319.580.803.306,00
Belanja Barang Pakai Habis	317.180.561.303,00	Beban Barang Pakai Habis	317.180.561.303,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.400.242.003,00	Beban Barang Tak Habis Pakai	2.400.242.003,00
Belanja Jasa	660.307.873.259,00	BebanJasa	660.307.873.259,00
Belanja Jasa Kantor	644.344.928.516,00	Beban Jasa Kantor	644.344.928.516,00

Akun LRA	Nilai	Akun LO	Nilai
Belanja Jasa Asuransi	167.159.401,00	Beban Jasa Asuransi	167.159.401,00
Belanja Sewa Tanah	389.705.045,00	Beban Sewa Tanah	389.705.045,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.127.712.370,00	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.127.712.370,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.050.235.556,00	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.050.235.556,00
Belanja Sewa Jalan Irigasi dan Jaringan	78.477.500,00	Beban Sewa Jalan Irigasi dan Jaringan	78.477.500,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	177.550.220,00	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	177.550.220,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	35.910.000,00	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	35.910.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	288.035.000,00	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	288.035.000,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	637.424.777,00	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	637.424.777,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	5.263.527.712,00	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	5.263.527.712,00
Belanja Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.850.000,00	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.850.000,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	3.744.357.162,00	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	3.744.357.162,00
Beban Pemeliharaan	276.679.770.421,00	Beban Pemeliharaan	276.679.770.421,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	14.512.954.516,00	Beban Pemeliharaan Tanah	14.512.954.516,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.066.835.422,00	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.066.835.422,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	201.022.184.343,00	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	201.022.184.343,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.325.907.293,00	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.325.907.293,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.751.888.847,00	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.751.888.847,00
Beban Perjalanan Dinas	21.569.333.083,00	Beban Perjalanan Dinas	21.569.333.083,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.519.333.083,00	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.519.333.083,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	50.000.000,00	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	50.000.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.369.463.621,00	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.369.463.621,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.155.060.880,00	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.155.060.880,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.214.402.741,00	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.214.402.741,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOP	**1.280.507.243.690,00**	**Jumlah Beban Operasional**	**1.280.507.243.690,00**

5.4.2.1.2.1 Beban Barang dan Jasa BOS

Rp 668.705.688.440,36

Beban Barang dan Jasa BOS terealisasi sebesar Rp 668.705.688.440,36, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp605.734.940.388,75 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 62.970.748.051,61 atau 10,40% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	678.727.084.263,00	11.386.640.433,22	21.408.036.255,86	668.705.688.440,36	605.734.940.388,75	62.970.748.051,61	10,40
	Jumlah	**678.727.084.263,00**	**11.386.640.433,22**	**21.408.036.255,86**	**668.705.688.440,36**	**605.734.940.388,75**	**62.970.748.051,61**	**10,40**

5.4.2.1.3 Beban Subsidi

Rp90.482.166,00

Beban Subsidi terealisasi sebesar Rp90.482.166,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp90.482.166,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Subsidi kepada BUMN	-	-	-	-	-	-	-
2	Beban Subsidi kepada BUMD	90.482.166,00	-	-	90.482.166,00	-	90.482.166,00	100,00
3	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**90.482.166,00**	-	-	**90.482.166,00**	-	**90.482.166,00**	**100,00**

5.4.2.1.4 Beban Hibah — Rp 6.634.910.082.267,36

Beban Hibah terealisasi sebesar Rp 6.634.910.082.267,36, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.423.118.678.522,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 4.211.791.403.745,36 atau 173,82% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	290.115.066.141,00	8.630.000.000,00	-	298.745.066.141,00	292.795.420.000,00	5.949.646.141,00	2,03
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	898.397.485.812,69	1.099.787.863,33	897.297.697.949,36	-	897.297.697.949,36	-
3	Beban Hibah kepada BUMN	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Hibah kepada BUMD	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.418.497.433.377,00	-	-	5.418.497.433.377,00	547.943.483.722,00	4.870.553.949.655,00	888,88
6	Beban Hibah Dana BOS	-	-	-	-	1.562.009.890.000,00	(1.562.009.890.000,00)	(100,00)
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	20.369.884.800,00	-	-	20.369.884.800,00	20.369.884.800,00	-	-
	Jumlah	**5.728.982.384.318,00**	**907.027.485.812,69**	**1.099.787.863,33**	**6.634.910.082.267,36**	**2.423.118.678.522,00**	**4.211.791.403.745,36**	**173,82**

Realisasi Beban Hibah sebesar Rp 6.634.910.082.267,36, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Hibah - LRA		:	**5.728.982.384.318,00**
Penambahan			
➢ Reklasifikasi Pemberian Hibah Aset Tetap ke Pihak Lain	: 12.773.729.150,00		
➢ Koreksi Pencatatan Persediaan	: 894.253.756.662,69		
Total Penambahan		:	907.027.485.812,69
➢ Penyusutan Aset Tetap yang dihibahkan	: 1.099.787.863,33		
Total Pengurangan		:	1.099.787.863,33
Beban Hibah - LO		:	**6.634.910.082.267,36**

5.4.2.1.4.1 Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat — Rp298.745.066.141,00

Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp298.745.066.141,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp292.795.420.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp9.436.432.141,00 atau 3,22% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi	-	8.630.000.000	-	8.630.000.000,00	-	-	-
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.436.432.141,00	-	-	9.436.432.141,00	-	9.436.432.141,00	-
3	Sekretariat Daerah	280.678.634.000,00	-	-	280.678.634.000,00	-	280.678.634.000,00	-
4	SKPKD	-	-	-	-	292.795.420.000,00	(292.795.420.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**290.115.066.141,00**	**8.630.000.000,00**	**-**	**298.745.066.141,00**	**292.795.420.000,00**	**9.436.432.141,00**	**3,22**

5.4.2.1.4.2 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya — Rp 897.297.697.949,36

Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp897.297.697.949,36 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp897.297.697.949,36 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kesehatan	-	894.253.756.662,69		894.253.756.662,69	-	894.253.756.662,69	100,00
2	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	-	2.050.819.800,00	-	2.050.819.800,00	-	2.050.819.800,00	100,00
3	Dinas Sosial	-	42.640.000,00	-	42.640.000,00	-	42.640.000,00	100,00
4	Dinas Perhubungan	-	816.544.350,00	462.363.280,00	354.181.070,00	-	354.181.070,00	100,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-		-	-	100,00
6	Badan Pengeloaan Pendapatan Daerah	-	1.233.725.000,00	637.424.583,33	596.300.416,67	-	596.300.416,67	100,00
	Jumlah	**-**	**898.397.485.812,69**	**1.099.787.863,33**	**897.297.697.949,36**	**-**	**897.297.697.949,36**	100,00

5.4.2.1.4.3 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia — Rp 5.418.497.433.377,00

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp5.418.497.433.377,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp547.943.483.722,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 4.870.553.949.655,00 atau 888,88% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.144.908.503.073,00	-	-	5.144.908.503.073,00	125.851.449.989,00	5.019.057.053.084,00	3.988,08
2	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakaru	-	-	-	-	5.975.856.300,00	(5.975.856.300,00)	(100,00)
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.335.000.000,00	-	-	16.335.000.000,00		16.335.000.000,00	-
4	Dinas Sosial	-	-	-	-	55.879.600,00	(55.879.600,00)	(100,00)
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	-	-	-	-	194.925.000,00	(194.925.000,00)	(100,00)

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
	Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.238.409.731,00	-	-	6.238.409.731,00	2.393.599.000,00	3.844.810.731,00	160,63
7	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	2.947.485.900,00	(2.947.485.900,00)	(100,00)
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.500.000.000,00	-	-	3.500.000.000,00		3.500.000.000,00	-
9	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	102.775.000.000,00	-	-	102.775.000.000,00	1.089.074.936,00	101.685.925.064,00	9.336,91
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	23.846.242.732,00			23.846.242.732,00	2.420.755.976,00	21.425.486.756,00	885,07
11	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.675.000.000,00	-	-	1.675.000.000,00	58.840.829.465,00	(57.165.829.465,00)	(97,15)
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16.940.101.000,00	-	-	16.940.101.000,00	1.866.510.000,00	15.073.591.000,00	807,58
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.360.676.841,00	-	-	9.360.676.841,00	2.513.184.502,00	6.847.492.339,00	272,46
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	405.000.000,00	-	-	405.000.000,00	523.600.000,00	(118.600.000,00)	(22,65)
15	Sekretariat Daerah	92.513.500.000,00	-	-	92.513.500.000,00	-	92.513.500.000,00	-
16	SKPKD	-	-	-	-	343.270.333.054,00	(343.270.333.054,00)	(100,00)
	Jumlah	**5.418.497.433.377,00**	**-**	**-**	**5.418.497.433.377,00**	**547.943.483.722,00**	**4.870.553.949.655,00**	**888,88**

5.4.2.1.4.4 Beban Hibah Dana BOS — Rp0,00

Beban Hibah Dana BOS terealisasi sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.562.009.890.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.562.009.890.000,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	SKPKD	-	-	-	-	1.562.009.890.000,00	(1.562.009.890.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.562.009.890.000,00**	**(1.562.009.890.000,00)**	**(100,00)**

5.4.2.1.4.5 Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik — Rp20.369.884.800,00

Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp20.369.884.800,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp20.369.884.800,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.369.884.800,00	-	-	20.369.884.800,00	20.369.884.800,00	-	-
2	SKPKD	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**20.369.884.800,00**	**-**	**-**	**20.369.884.800,00**	**20.369.884.800,00**	**-**	**-**

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial — Rp 133.388.891.190,00

Beban Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp133.388.891.190,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.433.959.432.980,00 mengalami **penurunan** sebesar (1.300.570.541.790,00) atau (90,70%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Bantuan Sosial kepada Individu	58.867.565.270,00	67.208.636.000,00	-	126.076.201.270,00	42.407.250.000,00	83.668.951.270,00	197,30
2 Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	7.312.689.920,00	-	-	7.312.689.920,00	-	7.312.689.920,00	-
3 Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	-	1.391.552.182.980,00	(1.391.552.182.980,00)	100,00)
4 Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**66.180.255.190,00**	**67.208.636.000,00**	**-**	**133.388.891.190,00**	**1.433.959.432.980,00**	**(1.300.570.541.790,00)**	**(90,70)**

Realisasi Beban Bantuan Sosial sebesar Rp 133.388.891.190,00, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Bantuan Sosial - LRA		:	**66.180.255.190,00**
Penambahan			
➢ Reklasifikasi Pemberian Hibah Kas Lainnya ke Pihak Lain	: 531.800.000,00		
➢ Reklasifikasi dari BTT	: 66.676.836.000,00		
Total Penambahan		:	67.208.636.000,00
Pengurangan	: -		
Total Pengurangan			-
Beban Bantuan Sosial - LO		:	133.388.891.190,00

5.4.2.1.5.1 Beban Bantuan Sosial kepada Individu — Rp 126.076.201.270,00

Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Individu terealisasi sebesar Rp126.076.201.270,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp42.407.250.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp83.137.151.270,00 atau 196,04% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.526.000.000,00	66.676.836.000,00	-	76.202.836.000,00	-	76.202.836.000,00	100,00
2 Dinas Perumahan	8.956.000.000,00	-	-	8.956.000.000,00	-	8.956.000.000,00	100,00

	Rakyat dan Kawasan Permukiman								
3	Dinas Sosial	29.961.000.000,00		-	-	29.961.000.000,00	-	29.961.000.000,00	100,00
4	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	531.800.000,00	-		531.800.000,00	-	-	100,00
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	577.900.500,00		-	-	577.900.500,00	-	577.900.500,00	100,00
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.846.664.770,00		-	-	9.846.664.770,00	-	9.846.664.770,00	100,00
7	SKPKD	-		-	-	-	42.407.250.000,00	(42.407.250.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**58.867.565.270,00**	**67.208.636.000,00**	**-**		**126.076.201.270,00**	**42.407.250.000,00**	**83.137.151.270,00**	**196,04**

5.4.2.1.5.2 Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga — Rp7.312.689.920,00

Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga terealisasi sebesar Rp7.312.689.920,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.312.689.920,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kesehatan	7.312.689.920,00	-	-	7.312.689.920,00	-	7.312.689.920,00	-
	Jumlah	**7.312.689.920,00**	**-**	**-**	**7.312.689.920,00**	**-**	**7.312.689.920,00**	**-**

5.4.2.1.5.3 Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat — Rp0,00

Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.391.552.182.980,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.391.552.182.980,00 atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	6.903.204.330,00	(6.903.204.330,00)	(100,00)
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	-	-	-	-	7.482.286.000,00	(7.482.286.000,00)	(100,00)
3	Dinas Sosial	-	-	-	-	99.785.000,00	(99.785.000,00)	(100,00)
4	Dinas Pemuda, olahraga dan pariwisata	-	-	-	-	918.587.000,00	(918.587.000,00)	(100,00)
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	6.562.645.000,00	(6.562.645.000,00)	(100,00)
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	-	3.831.565.150,00	(3.831.565.150,00)	(100,00)
7	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	12.670.633.700,00	(12.670.633.700,00)	(100,00)
8	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(100,00)
9	SKPKD	-	-	-	-	1.353.008.476.800,00	(1.353.008.476.800,00)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.391.552.182.980,00**	**(1.391.552.182.980,00)**	**(100,00)**

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang — Rp1.755.144.617,29

Beban Penyisihan Piutang terealisasi sebesar Rp1.755.144.617,29, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp395.241.353,75 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.359.903.263,53 atau 344,07% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-	-	-	-
2	Beban Penyishan Piutang Retribusi Daerah	17.162.066,60	-	17.162.066,60	-
3	Beban Penyisihan Piutang hasil Pengelolaan Kekyaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
4	Beban Penyishan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.737.982.550,69	395.241.353,75	1.342.741.196,94	339,73
5	Beban Penyishan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-
6	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	-	-	-
7	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	**1.755.144.617,29**	**395.241.353,75**	**1.359.903.263,53**	**344,07**

Realisasi Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp1.755.144.617,29 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah - LRA		:	-
Penambahan			
➢ Saldo Penyisihan Piutang Tahun Berkenaan	: 637.609.953.379.84		
➢ Koreksi atas pencatatan Piutang tahun sebelumnya	: 261.640.683.04		
➢ Suplus Kegiatan Non Operasional	: 340.674.252.428.43		
Total Penambahan		:	978.545.846.491.31
Pengurangan			
➢ Saldo Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	: 414.208.509.154.19		
➢ Koreksi atas pencatatan Piutang tahun sebelumnya	: 562.582.192.719,84		
Total Pengurangan		:	976.790.701.874.03
Beban Penyisihan Piutang - LO		:	**1.755.144.617.29**

5.4.2.1.6.1 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah — Rp17.162.066,60

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp17.162.066,60, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp17.162.066,60 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	1.141.266,60	-	1.141.266,60	100,00
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	16.020.800,00	-	16.020.800,00	100,00
3	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	100,00
	Jumlah	**17.162.066,60**	-	**17.162.066,60**	**100,00**

5.4.2.1.6.2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum — Rp1.141.266,60

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp1.141.266,60, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.141.266,60 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kesehatan	1.141.266,60	-	1.141.266,60	100,00
	Jumlah	**1.141.266,60**	-	**1.141.266,60**	**100,00**

5.4.2.1.6.3 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha — Rp16.020.800,00

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp16.020.800,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp16.020.800,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah	16.020.800,00	-	16.020.800,00	100,00
	Jumlah	**16.020.800,00**	-	**16.020.800,00**	**100,00**

5.4.2.1.6.4 Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli — Rp1.737.982.550,69

Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli terealisasi sebesar Rp1.737.982.550,69, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp395.241.353,75 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.342.741.196,94 atau 339,73% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-
2	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-
4	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	-
5	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro	-	-	-	-
6	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-
7	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga	127.971,74	-	127.971,74	-
8	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	-	-	-
9	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	-	-	-
10	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-
11	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-
12	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-	-	-
13	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	-
14	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	-
15	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-
16	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	1.737.854.578,95	395.241.353,75	1.342.613.225,19	-
17	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-
18	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	-
19	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	-	-	-
20	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	-
21	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	-	-	-	-
	Jumlah	**1.737.982.550,69**	**395.241.353,75**	**1.342.741.196,94**	**339,73**

5.4.2.1.6.5 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Rp127.971,74

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga terealisasi sebesar Rp127.971,74, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp127.971,74 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi	127.971,74	-	127.971,74	100,00
	Jumlah	**127.971,74**	-	**127.971,74**	**100,00**

5.4.2.1.6.6 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Rp1.737.854.578,95

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD terealisasi sebesar 1.737.854.578,95, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp395.241.353,75 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.342.613.225,19 atau 339,69 % dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi	336.269.794,27	-	336.269.794,27	-
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	728.389.297,59	133.641.818,19	594.747.479,40	445,03
3	RSUD Tugurejo Semarang	342.959.274,75	219.702.837,46	123.256.437,29	56,10
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	240.432.531,00	21.922.087,21	218.510.443,80	996,76
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	64.829.590,93	11.658.335,00	53.171.255,93	456,08
6	RSJD Surakarta	-	2.482.936,52	(2.482.936,52)	(100,00)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	24.974.090,41	5.833.339,38	19.140.751,03	328,13
	Jumlah	**1.737.854.578,95**	**395.241.353,75**	**1.342.613.225,19**	**339,69**

5.4.2.1.7 Beban Lain-Lain Rp 14.823.224.697,14

Beban Lain-Lain terealisasi sebesar Rp14.823.224.697,14, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.877.294.520,95 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.945.930.176,19 atau 15,11% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.026.913.212,19	8.106.345.490,00	920.567.722,19	11,36
2	Dinas Kesehatan	300.596.400,00	31.275.105,00	269.321.295,00	861,14
3	RSUD Dr. Moewardi	107.370.500,00	31.920.000,00	75.450.500,00	236,37
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	3.297.000,00	-	3.297.000,00	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	13.369.000,00	-	13.369.000,00	-
6	RSUD Kelet Donorejo	18.209.000,00	-	18.209.000,00	-
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	43.464.250,00	54.187.691,00	(10.723.441,00)	(19,79)
8	RSJD Surakarta	59.800.915,00	17.835.001,00	41.965.914,00	235,30
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	40.810.900,00	2.340.000,00	38.470.900,00	1.644,06
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	64.950.000,00	(64.950.000,00)	(100,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	7.040.000,00	-	7.040.000,00	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.243.400,00	-	36.243.400,00	-
16	Dinas Sosial	14.025.000,00	36.300.000,00	(22.275.000,00)	(61,36)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	44.631.440,00	47.800.000,00	(3.168.560,00)	(6,63)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
19	Dinas Ketahanan Pangan	1.225.260,00	-	1.225.260,00	-
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	226.767.424,61	65.060.000,00	161.707.424,61	248,55
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	6.600.000,00	350.000,00	6.250.000,00	1.785,71
22	Dinas Perhubungan	2.784.523.000,00	4.000.000,00	2.780.523.000,00	69.513,08
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.160.000,00	6.000.000,00	1.160.000,00	19,33
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.711.000,00	4.763.000,00	948.000,00	19,90

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	6.000.000,00	61.880.000,00	(55.880.000,00)	(90,30)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	55.034.635,00	22.791.640,00	32.242.995,00	141,47
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	271.312.362,00	(271.312.362,00)	(100,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	1.080.000,00	(1.080.000,00)	(100,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	200.000,00	23.020.440,00	(22.820.440,00)	(99,13)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	39.709.881,00	18.292.000,00	21.417.881,00	117,09
33	SKPKD	1.754.712.546,00	3.865.415.021,95	(2.110.702.475,95)	(54,60)
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	300.000,00	-	300.000,00	-
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	302.000,00	110.376.770,00	(110.074.770,00)	(99,73)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	101.305.000,00	-	101.305.000,00	-
37	Badan Kepegawaian Daerah	1.919.600,00	-	1.919.600,00	-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	31.808.333,34	-	31.808.333,34	-
39	Inspektorat	875.000,00	-	875.000,00	-
40	Sekretariat Daerah	83.300.000,00	-	83.300.000,00	-
41	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
42	Badan Penghubung	-	-	-	-
	Jumlah	**14.823.224.697,14**	**12.877.294.520,95**	**1.945.930.176,19**	**15,11**

Realisasi Beban Lain-Lain sebesar Rp 14.823.224.697,14 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Lain-Lain - LRA		:	-
Penambahan			
➢ Aset Ekstrakomtabel	: 14.746.083.927,00		
➢ Beban Akibat Penyesuaian Perlakuan Investasi	: 1.754.712.546,00		
Total Penambahan		:	16.500.796.473,00
Pengurangan			
➢ Beban Penyusutan Ektrakomtabel	: 1.677.571.775,86		
Total Pengurangan		:	1.677.571.775,86
Beban Lain-Lain - LO		:	**14.823.224.697,14**

5.4.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI — Rp 1.321.362.950.359,57

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp 1.321.362.950.359,57 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.376.706.006.230,14 mengalami **penurunan** sebesar (Rp55.343.055.870,57) atau (4,02%) dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Peralatan dan Mesin	599.923.511.551,53	656.895.587.807,65	(56.972.076.256,12)	(8,67)
2	Beban Gedung dan Bangunan	156.613.203.540,10	155.316.500.124,85	1.296.703.415,25	0,83
3	Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan	557.487.644.088,46	556.450.574.049,89	1.037.070.038,57	0,19
4	Beban Aset Tetap Lainnya	462.120.223,48	581.898.668,00	(119.778.444,52)	(20,58)
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	3.553.804.436,60	3.664.387.180,12	(110.582.743,52)	(3,02)
6	Beban Penyusutan Aset Lainnya	3.322.666.519,40	3.797.058.399,63	(474.391.880,23)	(12,49)
	Jumlah	**1.321.362.950.359,57**	**1.376.706.006.230,14**	**(55.343.055.870,57)**	**(4,02)**

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO sebesar Rp 1.321.362.950.359,58 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan			:	**15.895.292.068.731,30**
Penambahan				
➢ Mutasi Keluar	:	19.360.943.612,23		
➢ Reklas Keluar	:	28.932.295.296,25		
➢ Reklas ke Aset Lainnya	:	40.075.404.602,67		
➢ Ke Aset Ekstrakomptabel	:	86.393.285.925,76		
➢ Koreksi	:	71.220.076.419,01		
➢ Reklas ke Aset Aset Tetap	:	2.803.297.258,90		
➢ Reklas Pemanfaatan	:	37.436.583,33		
➢ Penjualan	:	17.788.868.240,31		
➢ Ganti Rugi	:	235.058.750,00		
➢ Hibah dan Lain-Lain	:	1.907.697.879,99		
Total Penambahan			:	268.754.364.568,45
➢ Hibah	:	21.608.997.263,81		
➢ Mutasi Masuk	:	19.360.943.612,23		
➢ Reklas Masuk	:	89.037.566.762,28		
➢ Reklas dari Aset Lainnya	:	8.184.708.314,39		
➢ Dari Aset Ekstrakomptabel	:	1.308.765.050,00		
➢ Koreksi	:	164.096.694.061,62		
Total Pengurangan			:	303.597.675.064,33
Saldo Akumulasi Penyusutan Awal			:	**14.539.085.807.875,90**
Total Beban-LO			:	**1.321.362.950.359,58**

5.4.2.2.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin Rp 599.923.511.551,53

Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp599.923.511.551,53, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp656.895.587.807,65 mengalami **penurunan** sebesar (Rp56.972.076.256,12) atau (8,67%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Alat Besar	24.630.052.078,83	26.698.046.784,43	(2.067.994.705,60)	(7,75)
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	38.940.671.345,04	41.724.204.947,38	(2.783.533.602,34)	(6,67)
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	29.107.427.427,19	29.927.170.446,50	(819.743.019,31)	(2,74)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	4.463.333.157,00	4.826.091.624,75	(362.758.467,75)	(7,52)
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	132.720.666.950,87	139.002.092.067,94	(6.281.425.117,07)	(4,52)
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	18.178.798.977,38	19.289.248.833,50	(1.110.449.856,12)	(5,76)
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	138.565.896.014,38	163.006.087.908,60	(24.440.191.894,22)	(14,99)
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	41.057.917.543,77	43.039.310.909,60	(1.981.393.365,83)	(4,60)
9	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	319.345.645,51	356.128.076,50	(36.782.430,99)	(10,33)
10	Beban Penyusutan Komputer	156.895.167.961,73	174.777.627.204,50	(17.882.459.242,77)	(10,23)
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	49.914.408,87	42.886.482,20	7.027.926,67	16,39
12	Beban Penyusutan Alat Pengeboran	13.917.345,78	13.141.500,00	775.845,78	5,90
13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	51.196.177,19	46.769.788,35	4.426.388,84	9,46
14	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	2.118.000,00	2.118.000,00	-	-
15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	551.837.009,80	747.061.018,60	(195.224.008,80)	(26,13)
16	Beban Penyusutan Alat Peraga	9.736.020.799,52	9.423.580.869,00	312.439.930,52	3,32
17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	243.971.052,57	220.206.510,88	23.764.541,69	10,79
18	Beban Penyusutan Rambu-rambu	2.266.603.204,87	2.178.630.693,17	87.972.511,70	4,04
19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	2.128.656.451,23	1.575.184.141,75	553.472.309,48	35,14
	Jumlah	**599.923.511.551,53**	**656.895.587.807,65**	**(56.972.076.256,12)**	(8,67)

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin-LO sebesar Rp**599.923.511.551,53** dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan : **5.837.047.301.241,31**

Penambahan

- Mutasi Keluar : 16.281.281.114,06
- Reklas Keluar : 8.439.459.341,64
- Reklas ke Aset Lainnya : 26.148.029.812,81
- Ke Aset Ekstrakomptabel : 821.834.023,72
- Koreksi : 9.508.744.410,28
- Reklas ke Aset Aset Tetap : 101.376.153,34
- Total Penambahan : 61.300.724.855,85
- Hibah : 20.997.254.216,46
- Mutasi Masuk : 16.281.281.114,06
- Reklas Masuk : 17.329.768.989,52
- Reklas dari Aset Lainnya : 4.016.844.840,75
- Dari Aset Ekstrakomptabel : 1.305.843.750,00
- Koreksi : 28.835.383.429,91

➢ Total Pengurangan	:	88.766.376.340,70
Saldo Akumulasi Penyusutan Awal	:	**5.209.658.138.204,93**
Total Beban-LO	:	**599.923.511.551,53**

5.4.2.2.1.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Besar — Rp24.630.052.078,83

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Besar terealisasi sebesar Rp24.630.052.078,83, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26.698.046.784,43 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.067.994.705,60) atau (7,75 %) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.574.671.276,12	1.541.938.244,89	32.733.031,23	2,12
2	Dinas Kesehatan	681.882.005,79	678.714.718,00	3.167.287,79	0,47
3	RSUD Dr. Moewardi	1.833.255.644,71	1.855.563.978,05	(22.308.333,34)	(1,20)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	1.848.392.332,26	2.579.017.332,24	(730.624.999,98)	(28,33)
5	RSUD Tugurejo Semarang	692.058.152,93	792.210.015,62	(100.151.862,69)	(12,64)
6	RSUD Kelet Donorejo	205.971.093,75	205.971.093,75	-	-
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	744.100.625,00	744.100.625,00	-	-
8	RSJD Surakarta	209.797.083,34	225.114.375,00	(15.317.291,66)	(6,80)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	136.214.577,83	123.552.125,00	12.662.452,83	10,25
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.142.142.353,14	9.580.264.800,06	(438.122.446,92)	(4,57)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.465.768.161,50	1.453.530.661,50	12.237.500,00	0,84
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	65.785.112,50	65.785.112,50	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80.033.333,33	80.018.750,00	14.583,33	0,02
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	333.534.330,80	140.413.237,50	193.121.093,30	137,54
16	Dinas Sosial	143.394.037,25	143.394.037,25	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.817.500,00	21.817.500,00	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	375.000,00	375.000,00	-	-
19	Dinas Ketahanan Pangan	59.895.000,00	-	59.895.000,00	-
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	29.245.762,67	34.436.721,00	(5.190.958,33)	(15,07)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	87.597.625,00	87.597.625,00	-	-
22	Dinas Perhubungan	48.007.955,13	47.540.455,12	467.500,01	0,98
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	202.798.750,00	189.524.187,50	13.274.562,50	7,00
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	169.471.250,00	169.471.250,00	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	79.379.239,58	78.858.406,25	520.833,33	0,66
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	354.883.637,70	351.821.000,00	3.062.637,70	0,87
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	96.425.000,00	96.425.000,00	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	312.613.550,00	312.162.612,50	450.937,50	0,14
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	450.456.765,20	526.891.806,88	(76.435.041,68)	(14,51)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	47.125.037,50	50.905.037,50	(3.780.000,00)	(7,43)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	314.951.825,00	336.889.950,00	(21.938.125,00)	(6,51)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	129.630.457,29	595.951.900,00	(466.321.442,71)	(78,25)
33	SKPKD	-	-	-	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	276.254.250,00	68.967.250,00	207.287.000,00	300,56

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.222.271.331,67	1.575.303.700,33	(353.032.368,66)	(22,41)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	247.519.125,01	256.021.624,99	(8.502.499,98)	(3,32)
37	Badan Kepegawaian Daerah	100.350.500,00	100.350.500,00	-	-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	142.028.572,50	243.504.010,00	(101.475.437,50)	(41,67)
39	Inspektorat	1.226.875,00	-	1.226.875,00	-
40	Sekretariat Daerah	992.938.411,83	1.267.945.266,00	(275.006.854,17)	(21,69)
41	Sekretariat DPRD	68.487.500,00	68.487.500,00	-	-
42	Badan Penghubung	17.301.037,50	7.209.375,00	10.091.662,50	139,98
	Jumlah	**24.630.052.078,83**	**26.698.046.784,43**	**(2.067.994.705,60)**	(7,75)

5.4.2.2.1.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Angkutan **Rp38.940.671.345,04**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Angkutan terealisasi sebesar Rp38.940.671.345,04, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp41.724.204.947,38 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.783.533.602,34) atau (6,67%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.843.417.373,48	8.094.834.857,51	(251.417.484,03)	(3,11)
2	Dinas Kesehatan	2.111.880.176,21	1.625.141.989,74	486.738.186,47	29,95
3	RSUD Dr. Moewardi	538.238.916,67	598.767.874,99	(60.528.958,32)	(10,11)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	725.020.191,91	762.887.900,24	(37.867.708,33)	(4,96)
5	RSUD Tugurejo Semarang	398.517.333,34	399.610.359,37	(1.093.026,03)	(0,27)
6	RSUD Kelet Donorejo	449.855.469,88	471.952.344,87	(22.096.874,99)	(4,68)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	307.461.416,67	306.607.250,00	854.166,67	0,28
8	RSJD Surakarta	553.402.866,02	604.656.217,87	(51.253.351,85)	(8,48)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	470.880.254,59	486.075.983,75	(15.195.729,16)	(3,13)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.734.724.700,00	1.571.815.450,00	162.909.250,00	10,36
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	632.175.055,12	640.198.700,98	(8.023.645,86)	(1,25)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	112.019.750,00	135.072.250,00	(23.052.500,00)	(17,07)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	321.042.562,74	372.325.812,76	(51.283.250,02)	(13,77)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	246.252.250,00	269.573.500,00	(23.321.250,00)	(8,65)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.045.733.814,91	837.119.500,00	208.614.314,91	24,92
16	Dinas Sosial	614.099.600,00	641.688.350,00	(27.588.750,00)	(4,30)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.050.525.214,16	1.063.811.110,00	(13.285.895,84)	(1,25)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	196.275.887,50	219.328.387,50	(23.052.500,00)	(10,51)
19	Dinas Ketahanan Pangan	132.527.645,84	188.531.812,50	(56.004.166,66)	(29,71)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	745.521.761,87	1.048.620.940,82	(303.099.178,95)	(28,90)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	172.231.062,50	215.434.562,50	(43.203.500,00)	(20,05)
22	Dinas Perhubungan	706.973.193,75	729.908.943,75	(22.935.750,00)	(3,14)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	358.699.375,00	361.569.812,50	(2.870.437,50)	(0,79)
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	115.068.978,25	138.121.478,25	(23.052.500,00)	(16,69)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	273.007.541,27	296.060.041,23	(23.052.499,96)	(7,79)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	417.418.643,87	440.521.143,88	(23.102.500,01)	(5,24)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	327.915.750,00	427.442.750,00	(99.527.000,00)	(23,28)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.944.887.024,99	1.879.488.300,00	65.398.724,99	3,48
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.167.093.442,00	1.222.734.692,00	(55.641.250,00)	(4,55)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	572.805.511,95	595.395.803,63	(22.590.291,68)	(3,79)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	722.877.695,83	746.069.812,50	(23.192.116,67)	(3,11)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	609.276.252,09	654.908.752,08	(45.632.499,99)	(6,97)
33	SKPKD	79.619.927,01	103.135.677,00	(23.515.749,99)	(22,80)
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	567.668.710,87	614.148.710,88	(46.480.000,01)	(7,57)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.765.979.434,75	3.074.441.064,28	(308.461.629,53)	(10,03)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	589.139.135,00	765.647.322,50	(176.508.187,50)	(23,05)
37	Badan Kepegawaian Daerah	212.049.902,50	277.461.902,50	(65.412.000,00)	(23,58)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	233.887.562,50	263.752.562,50	(29.865.000,00)	(11,32)
39	Inspektorat	344.444.875,01	399.826.749,99	(55.381.874,98)	(13,85)
40	Sekretariat Daerah	3.654.692.334,99	4.638.162.397,51	(983.470.062,52)	(21,20)
41	Sekretariat DPRD	2.146.561.781,25	2.785.317.781,25	(638.756.000,00)	(22,93)
42	Badan Penghubung	728.800.968,75	756.034.093,75	(27.233.125,00)	(3,60)
	Jumlah	**38.940.671.345,04**	**41.724.204.947,38**	**(2.783.533.602,34)**	(6,67)

5.4.2.2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Bengkel dan Ukur Rp29.107.427.427,19

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Bengkel dan Ukur terealisasi sebesar Rp 29.107.427.427,19 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp29.927.170.446,50 mengalami **penurunan** sebesar (Rp819.743.019,31)atau (2,74%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.940.718.337,65	26.337.612.472,90	(396.894.135,25)	(1,51)
2	Dinas Kesehatan	359.217.680,00	357.792.680,00	1.425.000,00	0,40
3	RSUD Dr. Moewardi	176.368.958,34	176.433.125,00	(64.166,66)	(0,04)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	39.560.412,73	97.453.501,00	(57.893.088,27)	(59,41)
5	RSUD Tugurejo Semarang	20.011.389,66	23.805.631,70	(3.794.242,04)	(15,94)
6	RSUD Kelet Donorejo	85.960.833,33	84.448.650,00	1.512.183,33	1,79
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	6.910.000,00	7.209.000,00	(299.000,00)	(4,15)
8	RSJD Surakarta	102.650.911,33	101.830.328,00	820.583,33	0,81
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	156.673.094,16	156.249.937,50	423.156,66	0,27
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	22.916.416,73	12.916.500,00	9.999.916,73	77,42
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	215.993.500,40	437.524.100,40	(221.530.600,00)	(50,63)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43.144.139,96	14.347.240,00	28.796.899,96	200,71
16	Dinas Sosial	16.851.500,00	16.851.500,00	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	111.900.800,00	113.618.560,00	(1.717.760,00)	(1,51)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
19	Dinas Ketahanan Pangan	500.000,00	500.000,00	-	-
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10.159.500,00	13.059.500,00	(2.900.000,00)	(22,21)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-
22	Dinas Perhubungan	100.287.666,6	126.049.140,00	(25.761.473,00)	(20,44)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	519.200,00	-	519.200,00	-
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.530.000,00	4.530.000,00	-	-
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	263.552.935,50	263.620.435,50	(67.500,00)	(0,03)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	78.771.822,50	99.035.629,50	(20.263.807,00)	(20,46)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	86.470.646,67	245.235.500,00	(158.764.853,33)	(64,74)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	80.412.440,00	90.382.440,00	(9.970.000,00)	(11,03)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	347.249.890,00	365.785.890,00	(18.536.000,00)	(5,07)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	799.463.334,96	758.083.335,00	41.379.999,96	5,46
33	SKPKD	-	-	-	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	30.481.666,67	2.065.000,00	28.416.666,67	1.376,11
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-
37	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.233.150,00	1.233.150,00	-	-
39	Inspektorat	-	14.280.000,00	(14.280.000,00)	(100,00)
40	Sekretariat Daerah	4.422.200,00	4.422.200,00	-	-
41	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
42	Badan Penghubung	495.000,00	795.000,00	(300.000,00)	(37,74)
	Jumlah	**29.107.427.427,19**	**29.927.170.446,50**	**(819.743.019,31)**	(2,74)

5.4.2.2.1.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Pertanian — Rp 4.463.333.157,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Pertanian terealisasi sebesar Rp 4.463.333.157,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.826.091.624,75 mengalami **penurunan** sebesar (Rp362.758.467,75) atau (7,52 %) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.039.651.771,45	1.158.526.594,25	(118.874.822,80)	(10,26)
2	Dinas Kesehatan	1.450.000,00	-	1.450.000,00	-
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	3.550.812,50	2.949.250,00	601.562,50	20,40
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	-
6	RSUD Kelet Donorejo	178.750,00	178.750,00	-	-
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	-
8	RSJD Surakarta	-	-	-	-
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	720.515,00	968.015,00	(247.500,00)	(25,57)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-	-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
16	Dinas Sosial	625.000,00	625.000,00	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.312.500,00	-	10.312.500,00	-
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
19	Dinas Ketahanan Pangan	251.161.017,50	249.911.017,50	1.250.000,00	0,50
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	103.110.000,00	107.410.000,00	(4.300.000,00)	(4,00)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-
22	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	-
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	103.864.625,00	239.821.375,00	(135.956.750,00)	(56,69)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.643.614.086,34	1.684.661.073,00	(41.046.986,66)	(2,44)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.302.906.579,21	1.378.853.050,00	(75.946.470,79)	(5,51)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.187.500,00	2.187.500,00	-	-
33	SKPKD	-	-	-	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	-
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-
37	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-
39	Inspektorat	-	-	-	-
40	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
41	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
42	Badan Penghubung	-	-	-	-
	Jumlah	**4.463.333.157,00**	**4.826.091.624,75**	**(362.758.467,75)**	(7,52)

5.4.2.2.1.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Kantor dan Rumah Tangga — Rp 132.720.666.950,87

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Kantor dan Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp132.720.666.950,87, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp139.002.092.067,94 mengalami **penurunan** sebesar (Rp6.281.425.117,07) atau (4,52%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	89.658.512.688,8	90.230.623.440,54	(572.110.751,74)	(0,63)
2	Dinas Kesehatan	1.665.437.714,17	2.239.722.152,40	(574.284.438,23)	(25,64)
3	RSUD Dr. Moewardi	2.504.560.570,98	3.393.525.224,40	(888.964.653,42)	(26,20)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	4.627.749.448,53	4.672.595.363,60	(44.845.915,07)	(0,96)
5	RSUD Tugurejo Semarang	1.313.247.434,63	1.711.488.495,00	(398.241.060,37)	(23,27)
6	RSUD Kelet Donorejo	715.138.790,47	912.955.311,00	(197.816.520,53)	(21,67)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	1.876.676.253,64	1.897.100.990,40	(20.424.736,76)	(1,08)
8	RSJD Surakarta	2.409.913.097,81	2.886.114.479,80	(476.201.381,99)	(16,50)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	868.119.969,86	1.066.145.584,00	(198.025.614,14)	(18,57)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	389.358.913,61	321.555.100,00	67.803.813,61	21,09
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	600.465.959,60	793.399.659,80	(192.933.700,20)	(24,32)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	148.719.066,65	153.401.504,00	(4.682.437,35)	(3,05)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	163.514.400,00	270.744.254,80	(107.229.854,80)	(39,61)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	97.481.379,75	178.202.500,00	(80.721.120,25)	(45,30)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	292.058.916,85	258.688.035,60	33.370.881,25	12,90
16	Dinas Sosial	1.797.697.927,34	1.832.467.164,80	(34.769.237,46)	(1,90)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	693.670.341,19	606.672.023,80	86.998.317,39	14,34

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82.647.396,67	79.789.000,00	2.858.396,67	3,58
19	Dinas Ketahanan Pangan	82.543.915,30	63.343.314,80	19.200.600,50	30,31
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	847.327.219,86	1.141.124.657,40	(293.797.437,54)	(25,75)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	160.686.707,34	187.200.303,20	(26.513.595,86)	(14,16)
22	Dinas Perhubungan	790.119.911,32	807.684.441,60	(17.564.530,28)	(2,17)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	501.680.254,42	503.905.276,00	(2.225.021,58)	(0,44)
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	655.536.781,39	729.628.188,00	(74.091.406,61)	(10,15)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	233.307.460,00	262.395.862,00	(29.088.402,00)	(11,09)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.579.599.029,98	2.680.624.664,00	(101.025.634,02)	(3,77)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	262.986.454,79	297.726.421,60	(34.739.966,81)	(11,67)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	749.888.016,86	872.093.744,80	(122.205.727,94)	(14,01)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	671.026.948,80	892.435.637,20	(221.408.688,40)	(24,81)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	884.417.384,32	852.854.985,80	31.562.398,52	3,70
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.248.829.417,29	1.297.046.012,60	(48.216.595,31)	(3,72)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	438.612.650,07	499.291.783,40	(60.679.133,33)	(12,15)
33	SKPKD	366.666,66	75.597.876,00	(75.231.209,34)	(99,51)
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	557.211.257,78	592.608.318,40	(35.397.060,62)	(5,97)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.968.450.030,01	3.299.152.966,40	(330.702.936,39)	(10,02)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	779.433.560,01	1.162.600.711,60	(383.167.151,59)	(32,96)
37	Badan Kepegawaian Daerah	772.250.013,08	842.572.691,40	(70.322.678,32)	(8,35)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	739.592.080,06	844.687.755,20	(105.095.675,14)	(12,44)
39	Inspektorat	317.993.625,03	402.364.250,00	(84.370.624,97)	(20,97)
40	Sekretariat Daerah	3.463.145.823,42	3.942.702.450,00	(479.556.626,58)	(12,16)
41	Sekretariat DPRD	2.829.323.049,27	2.933.779.916,00	(104.456.866,73)	(3,56)
42	Badan Penghubung	281.368.423,26	313.479.556,60	(32.111.133,34)	(10,24)
	Jumlah	**132.720.666.950,87**	**139.002.092.067,94**	**(6.281.425.117,07)**	(4,52)

5.4.2.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar — Rp18.178.798.977,38

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar terealisasi sebesar Rp18.178.798.977,38, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp19.289.248.833,50 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.110.449.856,12) atau (5,76%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.769.155.524,13	10.949.043.651,40	(179.888.127,27)	(1,64)
2	Dinas Kesehatan	342.932.425,17	352.216.046,00	(9.283.620,83)	(2,64)
3	RSUD Dr. Moewardi	135.742.399,98	351.708.930,00	(215.966.530,02)	(61,40)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	712.705.757,99	701.792.957,20	10.912.800,79	1,55
5	RSUD Tugurejo Semarang	155.054.378,61	143.652.052,30	11.402.326,31	7,94
6	RSUD Kelet Donorejo	20.341.926,68	20.719.810,00	(377.883,32)	(1,82)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	82.018.100,07	83.378.100,00	(1.359.999,93)	(1,63)
8	RSJD Surakarta	10.972.483,10	15.019.900,00	(4.047.416,90)	(26,95)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	22.455.429,99	27.862.450,00	(5.407.020,01)	(19,41)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	31.025.250,00	39.147.500,00	(8.122.250,00)	(20,75)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	95.834.100,00	163.554.100,00	(67.720.000,00)	(41,41)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	33.613.400,00	33.613.400,00	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	42.680.000,00	54.360.000,00	(11.680.000,00)	(21,49)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	58.390.000,00	64.984.000,00	(6.594.000,00)	(10,15)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	69.738.450,04	43.253.200,00	26.485.250,04	61,23
16	Dinas Sosial	7.915.000,00	7.460.000,00	455.000,00	6,10
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	130.981.016,66	128.230.754,00	2.750.262,66	2,14
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.490.661,67	3.980.000,00	(489.338,33)	(12,29)
19	Dinas Ketahanan Pangan	26.062.400,00	14.552.400,00	11.510.000,00	79,09
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	141.229.293,33	243.976.560,00	(102.747.266,67)	(42,11)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	86.331.240,00	74.463.440,00	11.867.800,00	15,94
22	Dinas Perhubungan	149.698.843,33	162.429.110,00	(12.730.266,67)	(7,84)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.383.155.256,62	1.113.026.034,00	270.129.222,62	24,27
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	96.300.266,65	80.459.200,00	15.841.066,65	19,69
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	67.483.926,67	66.517.260,00	966.666,67	1,45
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	122.017.500,00	131.742.300,00	(9.724.800,00)	(7,38)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	159.589.588,80	680.013.478,40	(520.423.889,60)	(76,53)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	184.626.578,54	202.547.810,00	(17.921.231,46)	(8,85)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	113.462.400,00	220.113.460,00	(106.651.060,00)	(48,45)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	44.055.550,00	45.688.700,00	(1.633.150,00)	(3,57)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	310.759.160,00	319.439.160,00	(8.680.000,00)	(2,72)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	145.661.393,00	145.171.393,00	490.000,00	0,34
33	SKPKD	-	-	-	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.730.000,00	8.416.200,00	(2.686.200,00)	(31,92)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	270.053.180,00	308.009.343,20	(37.956.163,20)	(12,32)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	127.782.800,00	162.827.456,00	(35.044.656,00)	(21,52)
37	Badan Kepegawaian Daerah	17.069.749,99	23.890.020,00	(6.820.270,01)	(28,55)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	262.439.481,35	307.097.898,00	(44.658.416,65)	(14,54)
39	Inspektorat	94.805.625,00	100.087.500,00	(5.281.875,00)	(5,28)
40	Sekretariat Daerah	1.270.291.926,69	1.286.137.480,00	(15.845.553,31)	(1,23)
41	Sekretariat DPRD	354.728.733,32	388.248.000,00	(33.519.266,68)	(8,63)
42	Badan Penghubung	20.417.780,00	20.417.780,00	-	-
	Jumlah	**18.178.798.977,38**	**19.289.248.833,50**	**(1.110.449.856,12)**	(5,76)

5.4.2.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Alat Kedokteran dan Kesehatan **Rp 138.565.896.014,38**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Kedokteran dan Kesehatan terealisasi sebesar Rp138.565.896.014,38, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp163.006.087.908,60 mengalami **penurunan** sebesar (Rp24.440.191.894,22) atau (14,99%) dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.085.029.095,50	987.655.671,60	97.373.423,90	9,86
2	Dinas Kesehatan	4.933.998.419,44	3.519.646.326,60	1.414.352.092,84	40,18
3	RSUD Dr. Moewardi	36.674.548.988,54	48.487.230.403,20	(11.812.681.414,66)	(24,36)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	43.390.580.443,61	52.173.970.055,00	(8.783.389.611,39)	(16,83)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
5	RSUD Tugurejo Semarang	24.852.318.266,61	27.459.941.297,40	(2.607.623.030,79)	(9,50)
6	RSUD Kelet Donorejo	12.982.607.977,33	13.474.054.941,80	(491.446.964,47)	(3,65)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	6.724.702.348,77	6.638.582.557,80	86.119.790,97	1,30
8	RSJD Surakarta	4.141.934.990,58	6.679.562.384,60	(2.537.627.394,02)	(37,99)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	3.512.523.920,00	3.378.124.241,00	134.399.679,00	3,98
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-	-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.359.320,00	-	6.359.320,00	-
16	Dinas Sosial	56.647.166,70	53.588.000,00	3.059.166,70	5,71
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	300.000,00	608.044,00	(308.044,00)	(50,66)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
19	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-
22	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.175.000,00	1.175.000,00	-	-
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.020.000,00	4.020.000,00	-	-
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	965.708,34	-	965.708,34	-
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	-
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	103.883.533,34	68.272.800,00	35.610.733,34	52,16
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	500.000,00	500.000,00	-	-
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.393.333,35	8.560.000,00	(166.666,65)	(1,95)
33	SKPKD	-	-	-	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	28.429.000,00	28.429.000,00	-	-
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-
37	Badan Kepegawaian Daerah	33.239.185,60	33.239.185,60	-	-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.667.650,00	4.308.000,00	3.359.650,00	77,99
39	Inspektorat	-	-	-	-
40	Sekretariat Daerah	11.451.666,67	-	11.451.666,67	-
41	Sekretariat DPRD	4.620.000,00	4.620.000,00	-	-
42	Badan Penghubung	-	-	-	-
	Jumlah	**138.565.896.014,38**	**163.006.087.908,60**	**(24.440.191.894,22)**	(14,99)

5.4.2.2.1.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Laboratorium Rp41.057.917.543,77

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Laboratorium terealisasi sebesar Rp 41.057.917.543,77 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp43.039.310.909,60 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.981.393.365,83) atau (4,60%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.940.178.174,35	25.780.538.655,71	(840.360.481,36)	(3,26)
2	Dinas Kesehatan	3.276.519.681,64	2.717.593.802,20	558.925.879,44	20,57
3	RSUD Dr. Moewardi	1.622.284.488,25	1.645.635.503,85	(23.351.015,60)	(1,42)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	1.131.470.897,63	979.266.910,61	152.203.987,02	15,54
5	RSUD Tugurejo Semarang	1.678.460.147,76	1.908.757.464,70	(230.297.316,94)	(12,07)
6	RSUD Kelet Donorejo	90.687.173,78	52.578.191,25	38.108.982,53	72,48
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	171.882.688,57	239.701.438,58	(67.818.750,01)	(28,29)
8	RSJD Surakarta	208.101.049,99	202.933.042,56	5.168.007,43	2,55
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	264.914.746,95	300.644.616,12	(35.729.869,17)	(11,88)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	504.380.041,69	465.928.999,96	38.451.041,73	8,25
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	254.527.987,26	244.849.587,30	9.678.399,96	3,95
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.726.945,84	-	2.726.945,84	-
16	Dinas Sosial	8.337.000,00	8.555.750,00	(218.750,00)	(2,56)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	430.153.201,10	545.311.444,39	(115.158.243,29)	(21,12)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
19	Dinas Ketahanan Pangan	75.005.444,67	204.981.457,15	(129.976.012,48)	(63,41)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.195.281.772,18	1.547.156.374,31	(351.874.602,13)	(22,74)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	1.490.500,00	-	1.490.500,00	-
22	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	24.831.250,00	24.831.250,00	-	-
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	685.198.763,16	714.751.546,43	(29.552.783,27)	(4,13)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	315.596.351,87	960.066.476,64	(644.470.124,77)	(67,13)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.420.910.136,14	1.666.234.830,83	(245.324.694,69)	(14,72)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	383.127.747,95	268.172.220,84	114.955.527,11	42,87
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.355.169.644,69	2.543.389.637,77	(188.219.993,08)	(7,40)
33	SKPKD	-	-	-	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.333.333,30	6.083.333,40	(750.000,10)	(12,33)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-
37	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.498.375,00	2.498.375,00	-	-
39	Inspektorat	8.850.000,00	8.850.000,00	-	-
40	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
41	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
42	Badan Penghubung	-	-	-	-
	Jumlah	**41.057.917.543,77**	**43.039.310.909,60**	**(1.981.393.365,83)**	(4,60)

5.4.2.2.1.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Persenjataan — Rp319.345.645,51

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Laboratorium terealisasi sebesar Rp319.345.645,51, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp356.128.076,50 mengalami **penurunan** sebesar (Rp36.782.430,99) atau (10,33%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	217.833.312,18	224.210.326,50	(6.377.014,32)	(2,84)
2	Satuan Polisi Pamong Praja	8.260.000,00	8.260.000,00	-	-
3	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.699.000,00	42.975.250,00	(24.276.250,00)	(56,49)
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19.507.500,00	20.457.500,00	(950.000,00)	(4,64)
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	520.833,33	-	520.833,33	-
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	43.900.000,00	43.900.000,00	-	-
7	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-
8	Inspektorat	2.125.000,00	2.125.000,00	-	-
9	Sekretariat Daerah	-	5.700.000,00	(5.700.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**319.345.645,51**	**356.128.076,50**	**(36.782.430,99)**	(10,33)

5.4.2.2.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi Komputer — Rp156.895.167.961,73

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Laboratorium terealisasi sebesar Rp156.895.167.961,73, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp174.777.627.204,50 mengalami **penurunan** sebesar (Rp17.882.459.242,77) atau (10,23%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120.251.214.360,37	134.326.405.780,50	(14.075.191.420,13)	(10,48)
2	Dinas Kesehatan	909.689.588,63	840.093.351,25	69.596.237,38	8,28
3	RSUD Dr. Moewardi	1.804.015.041,70	1.972.612.835,00	(168.597.793,30)	(8,55)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	2.663.898.045,26	3.060.746.001,50	(396.847.956,24)	(12,97)
5	RSUD Tugurejo Semarang	339.776.295,27	309.597.115,00	30.179.180,27	9,75
6	RSUD Kelet Donorejo	318.756.488,69	385.701.356,25	(66.944.867,56)	(17,36)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	274.915.204,19	296.368.000,00	(21.452.795,81)	(7,24)
8	RSJD Surakarta	555.055.502,33	560.849.513,75	(5.794.011,42)	(1,03)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	285.190.774,88	309.215.337,50	(24.024.562,62)	(7,77)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	490.381.737,56	482.581.925,00	7.799.812,56	1,62
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	298.609.187,49	453.191.875,00	(154.582.687,51)	(34,11)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	134.949.083,33	150.785.750,00	(15.836.666,67)	(10,50)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	95.098.992,50	127.961.492,50	(32.862.500,00)	(25,68)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	129.220.418,75	119.370.000,00	9.850.418,75	8,25
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	135.788.482,39	132.961.711,50	2.826.770,89	2,13
16	Dinas Sosial	668.801.138,79	672.972.190,00	(4.171.051,21)	(0,62)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	283.743.624,93	239.377.000,00	44.366.624,93	18,53
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50.682.695,87	36.993.750,00	13.688.945,87	37,00
19	Dinas Ketahanan Pangan	244.250.320,76	191.192.425,00	53.057.895,76	27,75
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	533.080.969,77	594.497.434,75	(61.416.464,98)	(10,33)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	225.074.500,00	271.290.625,00	(46.216.125,00)	(17,04)
22	Dinas Perhubungan	171.943.987,33	454.476.729,00	(282.532.741,67)	(62,17)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.579.463.075,87	12.607.547.834,00	(28.084.758,13)	(0,22)
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	211.919.789,19	211.152.846,25	766.942,94	0,36
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	206.446.211,73	489.763.188,00	(283.316.976,27)	(57,85)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	481.142.723,33	546.706.352,50	(65.563.629,17)	(11,99)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	300.530.412,57	323.784.385,75	(23.253.973,18)	(7,18)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	300.865.232,94	261.372.253,75	39.492.979,19	15,11
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	271.723.108,33	314.554.850,00	(42.831.741,67)	(13,62)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	326.588.143,75	344.148.268,75	(17.560.125,00)	(5,10)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	705.246.655,00	740.684.027,75	(35.437.372,75)	(4,78)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	292.952.754,18	902.937.311,50	(609.984.557,32)	(67,56)
33	SKPKD	-	-	-	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	298.323.936,84	304.811.365,00	(6.487.428,16)	(2,13)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.105.346.747,17	6.169.382.017,75	(1.064.035.270,58)	(17,25)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	962.488.895,81	1.009.894.000,00	(47.405.104,19)	(4,69)
37	Badan Kepegawaian Daerah	554.219.253,39	870.029.220,00	(315.809.966,61)	(36,30)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	238.258.220,83	283.918.250,00	(45.660.029,17)	(16,08)
39	Inspektorat	142.617.499,99	186.380.000,00	(43.762.500,01)	(23,48)
40	Sekretariat Daerah	2.106.253.751,72	2.110.815.435,00	(4.561.683,28)	(0,22)
41	Sekretariat DPRD	899.365.499,97	1.044.682.750,00	(145.317.250,03)	(13,91)
42	Badan Penghubung	47.279.608,33	65.820.650,00	(18.541.041,67)	(28,17)
	Jumlah	**156.895.167.961,73**	**174.777.627.204,50**	**(17.882.459.242,77)**	(10,23)

5.4.2.2.1.11 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Eksplorasi **Rp49.914.408,87**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Eksplorasi terealisasi sebesar Rp49.914.408,87, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp42.886.482,20 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.027.926,67 atau 16,39% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.810.408,87	38.812.482,20	6.997.926,67	18,03
2	Dinas Kesehatan	30.000,00	-	30.000,00	100,00
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.074.000,00	4.074.000,00	-	-
	Jumlah	**49.914.408,87**	**42.886.482,20**	**7.027.926,67**	16,39

5.4.2.2.1.12 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Pengeboran **Rp13.917.345,78**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Pengeboran terealisasi sebesar Rp13.917.345,78, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.141.500,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp775.845,78 atau 5,90% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.917.345,78	13.141.500,00	775.845,78	5,90
	Jumlah	**13.917.345,78**	**13.141.500,00**	**775.845,78**	5,90

5.4.2.2.1.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian **Rp51.196.177,19**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian terealisasi sebesar Rp51.196.177,19, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp46.769.788,35 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.426.388,84 atau 9,46% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.358.857,19	38.932.468,35	4.426.388,84	11,37
2	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	7.837.320,00	7.837.320,00	-	-
	Jumlah	**51.196.177,19**	**46.769.788,35**	**4.426.388,84**	9,46

5.4.2.2.1.14 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Bantu Eksplorasi **Rp2.118.000,00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Bantu Eksplorasi terealisasi sebesar Rp2.118.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.118.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.118.000,00	2.118.000,00	-	-
	Jumlah	**2.118.000,00**	**2.118.000,00**	-	-

5.4.2.2.1.15 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Keselamatan Kerja **Rp551.837.009,80**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Keselamatan Kerja terealisasi sebesar Rp551.837.009,80, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp747.061.018,60 mengalami **penurunan** sebesar

(Rp195.224.008,80) atau (26,13%) dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	526.744.493,12	734.206.418,60	(207.461.925,48)	(28,26)
2	Dinas Kesehatan	3.322.916,67	-	3.322.916,67	100,00
3	RSJD Surakarta	9.715.200,00	9.715.200,00	-	-
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.139.400,00	3.139.400,00	-	-
5	Dinas Ketahanan Pangan	2.456.666,68	-	2.456.666,68	100,00
6	SKPKD	5.625.000,00	-	5.625.000,00	100,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	833.333,33	-	833.333,33	100,00
	Jumlah	**551.837.009,80**	**747.061.018,60**	**(195.224.008,80)**	(26,13)

5.4.2.2.1.16 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Peraga — Rp 9.736.020.799,52

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Laboratorium terealisasi sebesar Rp9.736.020.799,52, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.423.580.869,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp312.439.930,52 atau 3,32% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.707.260.479,76	9.409.780.829,00	297.479.650,76	3,16
2	RSUD Dr. Moewardi	21.123.980,76	10.900.000,00	10.223.980,76	93,80
3	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	1.962.549,02	-	1.962.549,02	100,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	2.666.400,00	2.666.400,00	-	-
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.663.749,96	-	1.663.749,96	100,00
6	Dinas Sosial	175.000,00	-	175.000,00	100,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.168.640,02	233.640,00	935.000,02	400,19
	Jumlah	**9.736.020.799,52**	**9.423.580.869,00**	**312.439.930,52**	3,32

5.4.2.2.1.17 Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan Proses/Produksi — Rp243.971.052,57

Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan Proses/Produksi terealisasi sebesar Rp243.971.052,57, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp220.206.510,88 mengalami **kenaikan** sebesar Rp23.764.541,69 atau 10,79% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	196.222.865,07	182.963.010,88	13.259.854,19	7,25
2	Dinas Kesehatan	1.171.875,00	-	1.171.875,00	100,00
3	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	11.875.000,00	11.875.000,00	-	-
4	RSUD Tugurejo Semarang	8.125.000,00	8.125.000,00	-	-
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	11.625.000,00	11.625.000,00	-	-
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.618.500,00	5.618.500,00	-	-
7	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.332.812,50	-	9.332.812,50	100,00
	Jumlah	**243.971.052,57**	**220.206.510,88**	**23.764.541,69**	10,79

5.4.2.2.1.18 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rambu-Rambu — Rp 2.266.603.204,87

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rambu-Rambu terealisasi sebesar Rp 2.266.603.204,87, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.178.630.693,17 mengalami **kenaikan** sebesar Rp87.972.511,70 atau 4,04% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.781.547,87	21.299.656,25	3.481.891,62	16,35
2	Dinas Perhubungan	2.228.254.365,33	2.144.336.661,92	83.917.703,41	3,91
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.992.125,00	6.992.125,00	-	-
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.322.916,67	750.000,00	572.916,67	76,39

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	838.500,00	838.500,00	-	-
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.413.750,00	4.413.750,00	-	-
	Jumlah	**2.266.603.204,87**	**2.178.630.693,17**	**87.972.511,70**	4,04

5.4.2.2.1.19 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Olahraga Rp2.128.656.451,23

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Olahraga terealisasi sebesar Rp2.128.656.451,23, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.575.184.141,75 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp553.472.309,48 atau 35,14% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.306.533.685,54	1.243.460.554,25	63.073.131,29	5,07
2	Dinas Kesehatan	-	1.137.500,00	(1.137.500,00)	(100,00)
3	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	3.969.900,00	3.969.900,00	-	-
4	RSUD Tugurejo Semarang	250.000,00	250.000,00	-	-
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	21.725.000,00	21.725.000,00	-	-
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	1.237.500,00	825.000,00	412.500,00	50,00
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.525.000,00	2.525.000,00	-	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja	6.887.500,00	6.887.500,00	-	-
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.145.833,33	-	1.145.833,33	-
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	22.248.958,33	20.243.750,00	2.005.208,33	9,91
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	583.456.469,86	77.081.250,00	506.375.219,86	656,94
12	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	173.688.000,00	173.688.000,00	-	-
13	Badan Kepegawaian Daerah	2.915.687,50	2.915.687,50	-	-
14	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	20.475.000,00	(20.475.000,00)	(100,00)
15	Sekretariat Daerah	2.072.916,67	-	2.072.916,67	-
	Jumlah	**2.128.656.451,23**	**1.575.184.141,75**	**553.472.309,48**	35,14

5.4.2.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan Rp 156.613.203.540,10

Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp156.613.203.540,10, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp155.316.500.124,85 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 1.296.703.415,25 atau 0,83% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	153.727.169.723,56	152.556.663.405,76	1.170.506.317,80	0,77
2	Beban Penyusutan Monumen	565.592.833,45	558.417.610,13	7.175.223,32	1,28
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	119.529.238,95	131.332.093,11	(11.802.854,16)	(8,99)
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.200.911.744,14	2.070.087.015,85	130.824.728,29	6,32
	Jumlah	**156.613.203.540,10**	**155.316.500.124,85**	1.296.703.415,25	0,83

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp156.613.203.540,10 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan : **2.145.263.849.524,04**

Penambahan

- Mutasi Keluar : 2.953.862.498,11
- Reklas Keluar : 20.438.848.735,86
- Reklas ke Aset Lainnya : 9.522.046.106,95
- Ke Aset Ekstrakomptabel : 24.429.083.359,81

➢ Koreksi	: 60.503.795.688,23		
➢ Reklas ke Aset Aset Tetap	: 906.829.821,56		
Total Penambahan		:	118.754.466.210,52
Pengurangan			
➢ Hibah	: 611.743.047,35		
➢ Mutasi Masuk	: 2.953.862.498,11		
➢ Reklas Masuk	: 32.947.923.871,72		
➢ Reklas dari Aset Lainnya	: 13.120.000,00		
➢ Dari Aset Ekstrakomptabel	: 2.921.300,00		
➢ Koreksi	: 75.988.149.844,64		
Total Pengurangan		:	112.517.720.561,82
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		**:**	**1.994.887.391.632,64**
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		**:**	**156.613.203.540,10**

5.4.2.2.2.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Bangunan Gedung — Rp 153.727.169.723,56

Beban Penyusutan dan Amortisasi Bangunan Gedung terealisasi sebesar Rp153.727.169.723,56, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp152.556.663.405,76 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.170.506.317,80 atau 0,77% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	89.157.949.346,06	88.546.051.264,51	611.898.081,55	0,69
2	Dinas Kesehatan	2.043.680.410,25	2.031.558.210,97	12.122.199,28	0,60
3	RSUD Dr. Moewardi	6.455.258.094,87	5.872.508.846,25	582.749.248,62	9,92
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	5.526.990.506,86	5.495.922.158,94	31.068.347,92	0,57
5	RSUD Tugurejo Semarang	2.753.058.034,99	2.704.568.039,55	48.489.995,44	1,79
6	RSUD Kelet Donorejo	1.784.968.188,13	1.783.112.980,71	1.855.207,42	0,10
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	1.589.802.901,51	1.596.237.673,19	(6.434.771,68)	(0,40)
8	RSJD Surakarta	807.042.698,13	793.049.506,13	13.993.192,00	1,76
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	872.490.268,39	2.131.130.950,83	(1.258.640.682,44)	(59,06)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	722.940.247,42	485.530.888,10	237.409.359,32	48,90
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	480.260.569,92	480.260.569,92	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	211.829.916,37	211.829.916,38	(0,01)	(0,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	372.089.301,77	372.089.301,76	0,01	0,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	119.741.013,03	119.791.013,02	(49.999,99)	(0,04)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	172.776.010,38	172.928.843,71	(152.833,33)	(0,09)
16	Dinas Sosial	3.839.174.148,61	3.868.536.575,34	(29.362.426,73)	(0,76)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.187.213.136,15	1.184.467.679,55	2.745.456,60	0,23
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	392.634.428,62	392.696.082,90	(61.654,28)	(0,02)
19	Dinas Ketahanan Pangan	262.484.215,57	260.996.215,56	1.488.000,01	0,57
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	901.240.057,73	817.469.127,19	83.770.930,54	10,25
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	212.647.110,70	212.847.110,70	(200.000,00)	(0,09)
22	Dinas Perhubungan	2.404.566.362,86	2.169.321.645,05	235.244.717,81	10,84
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	163.603.696,84	157.827.946,85	5.775.749,99	3,66
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	991.528.920,93	987.374.824,65	4.154.096,28	0,42
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	208.770.640,12	207.473.278,92	1.297.361,20	0,63
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.780.492.813,78	4.682.788.448,01	97.704.365,77	2,09
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	475.922.795,59	473.828.795,59	2.094.000,00	0,44
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.922.024.229,25	1.960.636.273,06	(38.612.043,81)	(1,97)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.769.066.967,83	2.795.051.743,67	(25.984.775,84)	(0,93)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.150.052.634,81	1.905.688.046,11	244.364.588,70	12,82
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	917.478.939,80	782.909.184,06	134.569.755,74	17,19
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.675.834.957,84	1.714.172.922,51	(38.337.964,67)	(2,24)
33	SKPKD	3.699.946.778,18	3.710.851.455,39	(10.904.677,21)	(0,29)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	564.254.279,54	564.254.279,57	(0,03)	(0,00)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.919.402.127,47	4.898.831.166,13	20.570.961,34	0,42
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.528.509.237,77	1.413.353.766,73	115.155.471,04	8,15
37	Badan Kepegawaian Daerah	180.438.013,55	180.438.013,55	-	-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.053.087.644,20	1.055.080.777,52	(1.993.133,32)	(0,19)
39	Inspektorat	347.780.199,07	347.780.199,06	0,01	0,00
40	Sekretariat Daerah	2.065.416.137,87	2.014.856.689,00	50.559.448,87	2,51
41	Sekretariat DPRD	697.503.602,19	686.187.311,11	11.316.291,08	1,65
42	Badan Penghubung	345.218.138,61	314.373.684,01	30.844.454,60	9,81
	Jumlah	**153.727.169.723,56**	**152.556.663.405,76**	**1.170.506.317,80**	0,77

5.4.2.2.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi Monumen **Rp 565.592.833,45**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Monumen terealisasi sebesar Rp565.592.833,45, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp558.417.610,13 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 7.175.223,32 atau 1,28% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	256.423.693,47	248.734.889,09	7.688.804,38	3,09
2	Dinas Kesehatan	2.883.240,00	2.883.240,00	-	-
3	RSUD Kelet Donorejo	5.318.220,00	5.318.220,00	-	-
4	RSJD Surakarta	16.281.052,00	16.281.052,00	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	30.000,00	30.000,00	-	-
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	5.720.180,00	5.720.180,00	-	-
7	Dinas Sosial	652.380,00	652.380,00	-	-
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.923.308,57	2.800.000,00	123.308,57	4,40
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.470.110,37	14.107.000,00	(636.889,63)	(4,51)
10	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	76.982.516,40	76.982.516,40	-	-
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	156.000,00	156.000,00	-	-
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.938.700,00	16.938.700,00	-	-
13	Sekretariat DPRD	126.698.279,84	126.698.279,84	-	-
14	Badan Penghubung	41.115.152,80	41.115.152,80	-	-
	Jumlah	**565.592.833,45**	**558.417.610,13**	**7.175.223,32**	1,28

5.4.2.2.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Bangunan Menara **Rp 119.529.238,95**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Bangunan Menara terealisasi sebesar Rp 119.529.238,95, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp131.332.093,11 mengalami **kenaikan** sebesar (Rp11.802.854,16) atau (8,99)% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.018.065,84	32.144.715,00	(1.126.649,16)	(3,50)
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	3.060.000,00	(3.060.000,00)	(100,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	272.965,00	297.780,00	(24.815,00)	(8,33)
4	Dinas Perhubungan	10.707.156,30	10.707.156,30	-	-
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.057.430,00	1.153.560,00	(96.130,00)	(8,33)
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.022.606,30	13.517.866,30	(7.495.260,00)	(55,45)
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan	69.737.615,51	69.737.615,51	-	-
8	SKPKD	23.400,00	23.400,00	-	-
9	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	690.000,00	690.000,00	-	-
	Jumlah	**119.529.238,95**	**131.332.093,11**	**(11.802.854,16)**	(8,99)

5.4.2.2.2.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tugu Titik Kontrol/Pasti **Rp 2.200.911.744,14**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tugu Titik Kontrol/Pasti terealisasi sebesar Rp 2.200.911.744,14,

apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.070.087.015,85 mengalami **kenaikan** sebesar Rp130.824.728,29 atau 6,32% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	926.400.772,50	860.524.441,07	65.876.331,43	7,66
2	Dinas Kesehatan	99.413.320,80	99.413.320,80	-	-
3	RSUD Dr. Moewardi	14.199.620,00	14.199.620,00	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	10.164.000,00	10.164.000,00	-	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	8.472.265,38	8.472.265,38	-	-
6	RSUD Kelet Donorejo	88.221.918,00	88.221.918,00	-	-
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	3.517.160,00	3.517.160,00	-	-
8	RSJD Surakarta	-	-	-	-
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	25.194.571,05	20.759.925,25	4.434.645,80	21,36
10	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.790.160,00	2.790.160,00	-	-
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.083.000,00	2.033.000,00	50.000,00	2,46
12	Dinas Sosial	47.245.842,35	31.144.755,31	16.101.087,04	51,70
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.889.341,00	10.889.341,00	-	-
14	Dinas Ketahanan Pangan	7.341.200,00	7.341.200,00	-	-
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.589.955,00	11.744.440,00	1.845.515,00	15,71
16	Dinas Perhubungan	11.168.491,11	6.289.611,11	4.878.880,00	77,57
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.800.120,00	1.800.120,00	-	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.200.400,00	2.200.400,00	-	-
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	34.898.134,89	39.566.310,02	(4.668.175,13)	(11,80)
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.131.735,66	7.131.735,66	-	-
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	107.683.666,94	67.235.681,12	40.447.985,82	60,16
22	Dinas Pertanian dan Perkebunan	252.745.295,43	252.745.295,43	-	-
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	89.260.108,38	89.260.108,38	-	-
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.873.310,00	8.873.310,00	-	-
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-
26	SKPKD	34.294.374,33	38.421.396,00	(4.127.021,67)	(10,74)
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.884.400,00	1.884.400,00	-	-
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	35.814.650,64	35.814.650,64	-	-
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	309.153.823,68	305.760.323,68	3.393.500,00	1,11
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	36.738.211,00	36.738.211,00	-	-
31	Inspektorat	286.200,00	286.200,00	-	-
32	Sekretariat DPRD	7.455.696,00	4.863.716,00	2.591.980,00	53,29
	Jumlah	**2.200.911.744,14**	**2.070.087.015,85**	**130.824.728,29**	6,32

5.4.2.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan — Rp 557.487.644.088,46

Beban Penyusutan dan Amortisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp557.487.644.088,46, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp556.450.574.049,89 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.037.070.038,57 atau 0,19% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Jalan dan Jembatan	503.713.161.867,75	501.490.267.888,21	2.222.893.979,54	0,44
2	Bangunan Air	46.418.284.346,61	47.871.882.610,84	(1.453.598.264,23)	(3,04)
3	Instalasi	4.583.420.823,02	4.515.531.173,24	67.889.649,78	1,50
4	Jaringan	2.772.777.051,08	2.572.892.377,60	199.884.673,48	7,77
	Jumlah	**557.487.644.088,46**	**556.450.574.049,89**	**1.037.070.038,57**	0,19

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 557.487.644.088,46 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan : **7.534.456.813.217,39**

Penambahan

- Mutasi Keluar : 4.133.333,39

➢ Reklas Keluar	: 53.987.218,75		
➢ Koreksi	: 56.127.975.422,90		
Total Penambahan		:	56.186.095.975,04
Pengurangan			
➢ Mutasi Masuk	: 4.133.333,39		
➢ Reklas Masuk	: 3.589.356.151,19		
➢ Koreksi	: 58.228.376.328,74		
Total Pengurangan		:	61.821.865.813,32
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		:	**6.971.333.399.290,65**
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO		:	**557.487.644.088,46**

5.4.2.2.3.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jalan dan Jembatan Rp503.713.161.867,75

Beban Penyusutan dan Amortisasi Jalan dan Jembatan terealisasi sebesar Rp503.713.161.867,75 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp501.490.267.888,21 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.222.893.979,54 atau 0,44% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.116.326.532,07	1.078.059.927,40	38.266.604,67	3,55
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-
3	RSUD Dr. Moewardi	19.049.020,00	19.049.020,00	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	1.440.363,16	1.440.363,16	-	-
6	RSUD Kelet Donorejo	266.973.750,00	286.096.250,00	(19.122.500,00)	(6,68)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	262.356.100,00	262.356.100,00	-	-
8	RSJD Surakarta	192.536.550,00	192.536.550,00	-	-
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	9.699.700,00	9.699.700,00	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	497.352.837.863,64	495.203.514.165,08	2.149.323.698,56	0,43
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	603.997.942,67	625.372.576,00	(21.374.633,33)	(3,42)
12	Dinas Perhubungan	1.551.378.861,58	1.517.700.384,77	33.678.476,81	2,22
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	91.177.781,80	91.177.781,80	-	-
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.444.140.913,94	1.457.441.995,00	(13.301.081,06)	(0,91)
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan	392.342.100,00	392.342.100,00	-	-
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	329.343.625,00	329.343.625,00	-	-
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	24.137.350,00	24.137.350,00	-	-
18	Sekretariat Daerah	3.016,67	-	3.016,67	-
	Jumlah	**503.713.161.867,75**	**501.490.267.888,21**	**2.222.893.979,54**	0,44

5.4.2.2.3.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi Bangunan Air Rp 46.418.284.346,61

Beban Penyusutan dan Amortisasi Bangunan Air terealisasi sebesar Rp46.418.284.346,61, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp47.871.882.610,84 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.453.598.264,23)atau (3,04%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	458.790.253,91	440.949.529,29	17.840.724,62	4,05
2	Dinas Kesehatan	18.154.956,67	18.154.956,67	-	-
3	RSUD Dr. Moewardi	51.772.871,09	50.857.471,67	915.399,42	1,80
4	RSUD Tugurejo Semarang	31.968.177,97	31.426.202,50	541.975,47	1,72
5	RSUD Kelet Donorejo	107.188.106,66	107.188.106,69	(0,03)	(0,00)
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	3.284.300,00	3.284.300,00	-	-
7	RSJD Surakarta	3.190.525,00	3.190.525,00	-	-
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	35.432.170,83	35.432.170,83	-	-
9	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.920.971.094,99	2.910.936.015,13	10.035.079,86	0,34

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
10	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	37.679.258.846,90	39.361.996.396,84	(1.682.737.549,94)	(4,28)
11	Satuan Polisi Pamong Praja	5.306.666,67	5.306.666,66	0,01	0,00
12	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.225.000,00	2.225.000,00	-	-
13	Dinas Sosial	74.031.416,91	58.370.904,39	15.660.512,52	26,83
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	143.920,00	143.920,00	-	-
15	Dinas Ketahanan Pangan	2.145.500,00	2.145.500,00	-	-
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	263.173.466,48	263.173.466,48	-	-
17	Dinas Perhubungan	371.196.643,79	371.196.643,80	(0,01)	(0,00)
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.143.255,00	5.143.255,00	-	-
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.859.800,00	2.859.800,00	-	-
20	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	40.397.289,16	38.967.877,29	1.429.411,87	3,67
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.831.451,62	5.831.451,61	0,01	0,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.139.943.269,34	3.011.773.154,02	128.170.115,32	4,26
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	405.655.401,76	389.877.817,08	15.777.584,68	4,05
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	60.480.144,26	55.567.976,87	4.912.167,39	8,84
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	661.461.117,58	627.604.803,04	33.856.314,54	5,39
26	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	6.141.666,67	6.141.666,66	0,01	0,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	253.750,00	253.750,00	-	-
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.331.725,00	2.331.725,00	-	-
29	Sekretariat DPRD	59.551.558,35	59.551.558,32	0,03	0,00
	Jumlah	**46.418.284.346,61**	**47.871.882.610,84**	**(1.453.598.264,23)**	(3,04)

5.4.2.2.3.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Instalasi **Rp4.583.420.823,02**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Instalasi terealisasi sebesar Rp4.583.420.823,02, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.515.531.173,24 mengalami **kenaikan** sebesar Rp67.889.649,78 atau 1,50% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	492.350.169,01	509.657.495,85	(17.307.326,84)	(3,40)
2	Dinas Kesehatan	126.338.098,27	126.338.098,28	(0,01)	(0,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	598.968.464,61	544.350.570,00	54.617.894,61	10,03
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	384.038.465,22	397.811.465,24	(13.773.000,02)	(3,46)
5	RSUD Tugurejo Semarang	656.588.670,58	656.588.670,62	(0,04)	(0,00)
6	RSUD Kelet Donorejo	116.563.573,13	116.563.573,15	(0,02)	(0,00)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	386.834.277,79	378.129.000,00	8.705.277,79	2,30
8	RSJD Surakarta	133.927.559,08	110.250.945,20	23.676.613,88	21,48
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	133.012.233,23	131.626.238,79	1.385.994,44	1,05
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	3.438.853,00	3.438.853,00	-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	16.888.745,80	16.888.745,82	(0,02)	(0,00)
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.895.666,67	2.895.666,66	0,01	0,00
13	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.285.825,00	2.285.825,00	-	-
14	Dinas Sosial	333.333,33	333.333,33	-	-
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22.513.689,43	22.069.245,00	444.444,43	2,01
16	Dinas Ketahanan Pangan	863.333,34	863.333,33	0,01	0,00
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	37.213.481,98	35.708.990,33	1.504.491,65	4,21
18	Dinas Perhubungan	449.420.989,84	449.420.989,42	0,42	0,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.593.216,66	9.593.216,68	(0,02)	(0,00)
20	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	7.515.148,50	7.515.148,50	-	-
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	58.100.611,15	57.273.461,11	827.150,04	1,44
22	Dinas Pertanian dan Perkebunan	9.527.993,80	9.486.327,17	41.666,63	0,44
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	108.974.596,45	102.800.263,15	6.174.333,30	6,01
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	694.022.145,80	694.022.144,60	1,20	0,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.847.692,50	1.847.692,50	-	-
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.967.705,63	20.967.705,62	0,01	0,00
27	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	6.398.339,86	6.398.339,87	(0,01)	(0,00)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.758.056,82	11.758.056,83	(0,01)	(0,00)
29	Badan Kepegawaian Daerah	19.999.950,00	19.999.950,00	-	-
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	19.056.888,75	19.056.888,75	-	-
31	Sekretariat Daerah	50.041.510,84	48.449.402,49	1.592.108,35	3,29
32	Badan Penghubung	1.141.536,95	1.141.536,95	-	-
	Jumlah	**4.583.420.823,02**	**4.515.531.173,24**	**67.889.649,78**	1,50

5.4.2.2.3.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jaringan — Rp2.772.777.051,08

Beban Penyusutan dan Amortisasi Jaringan terealisasi sebesar Rp2.772.777.051,08, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.572.892.377,60 mengalami **kenaikan** sebesar Rp199.884.673,48 atau 7,77% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	560.677.177,23	558.689.531,63	1.987.645,60	0,36
2	Dinas Kesehatan	29.722.901,35	29.722.901,37	(0,02)	(0,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	8.575.544,94	8.144.041,66	431.503,28	5,30
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	124.563.468,51	124.563.468,50	0,01	0,00
5	RSUD Kelet Donorejo	57.250.120,21	57.250.120,21	-	-
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	41.737.275,50	38.437.275,50	3.300.000,00	8,59
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	195.023.214,51	444.366,60	194.578.847,91	43.787,91
8	Dinas Sosial	2.761.133,33	2.761.133,34	(0,01)	(0,00)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.110.753,33	3.110.753,33	-	-
10	Dinas Ketahanan Pangan	2.476.053,34	2.476.053,33	0,01	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	46.655.160,84	46.655.160,82	0,02	0,00
12	Dinas Perhubungan	774.598.476,97	774.598.472,69	4,28	0,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.849.585,00	2.849.585,00	-	-
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	143.621,83	143.621,82	0,01	0,00
15	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	15.352.535,82	15.352.535,83	(0,01)	(0,00)
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	417.500,00	417.500,00	-	-
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	21.434.099,55	21.434.099,59	(0,04)	(0,00)
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan	31.167.708,30	31.167.708,34	(0,04)	(0,00)
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	36.012.951,66	36.012.951,66	-	-
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	785.640.504,61	785.640.498,73	5,88	0,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.413.917,50	6.413.917,51	(0,01)	(0,00)
22	SKPKD	4.496.778,00	4.496.778,00	-	-
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	16.675.893,75	16.675.893,75	-	-
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	413.333,39	(413.333,39)	(100,00)
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.020.675,00	5.020.675,00	-	-
	Jumlah	**2.772.777.051,08**	**2.572.892.377,60**	**199.884.673,48**	**7,77**

5.4.2.2.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap Lainnya — Rp462.120.223,48

Beban Penyusutan dan Amortisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp462.120.223,48, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp581.898.668,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp119.778.444,52) atau (20,58%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	462.120.223,48	581.898.668,00	(119.778.444,52)	(20,58)
2	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-
	Jumlah	**462.120.223,48**	**581.898.668,00**	**(119.778.444,52)**	**(20,58)**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp462.120.223,48 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan : **1.976.267.532,97**

Penambahan

- Koreksi : 5.346.000,00

Total Penambahan 5.346.000,00

Pengurangan

➢ Reklas Masuk	:	18.210.537,49	
Total Pengurangan			18.210.537,49
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		**:**	**1.501.282.772,00**
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO		**:**	**462.120.223,48**

5.4.2.2.4.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga **Rp462.120.223,48**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga terealisasi sebesar Rp462.120.223,48, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp581.898.668,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp119.778.444,52) atau (20,58%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	337.349.523,48	455.345.968,00	(117.996.444,52)	(25,91)
2	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	4.194.000,00	5.976.000,00	(1.782.000,00)	(29,82)
3	Satuan Polisi Pamong Praja	100.043.900,00	100.043.900,00	-	-
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.432.800,00	15.432.800,00	-	-
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-
	Jumlah	**462.120.223,48**	**581.898.668,00**	**(119.778.444,52)**	**(20,58)**

5.4.2.2.5 Beban Penyusutan Aset Lainnya **Rp3.322.666.519,40**

Beban Penyusutan Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp3.322.666.519,40, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.797.058.399,63 mengalami **penurunan** sebesar (Rp474.391.880,23) atau (12.49%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	3.317.563.769,27	3.797.058.399,63	(479.494.630,36)	-
2	Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	5.102.750,13	-	5.102.750,13	-
3	Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	-	-	-	-
4	Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	-	-	-	-
5	Beban Penyusutan Pinjam Pakai	-	-	-	-
6	Beban Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-
	Jumlah	**3.322.666.519,40**	**3.797.058.399,63**	**(474.391.880,23)**	(12,49)

Realisasi Beban Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp3.322.666.519,40 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan		**:**	**355.217.145.864,35**
Penambahan			
➢ Koreksi	:	5.009.047.119,33	
➢ Reklas ke Aset Aset Tetap	:	2.016.739.622,00	
➢ Reklas Pemanfaatan	:	37.436.583,33	
➢ Penjualan	:	17.788.868.240,31	
➢ Ganti Rugi	:	235.058.750,00	
➢ Hibah dan Lain-Lain	:	1.907.697.879,99	

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise	25.641.066,66	3.740.000,00	21.901.066,66	585,59
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-	-	-
3	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-	-	-
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	3.393.732.469,93	24.989.800,00	3.368.742.669,93	13.480,47
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	134.430.900,01	3.635.657.380,12	(3.501.226.480,11)	(96,30)
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	**3.553.804.436,60**	**3.664.387.180,12**	**(110.582.743,52)**	(3,02)

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp3.553.776.936,60 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan		:	**21.190.441.634,27**
Penambahan			
➢ Mutasi Keluar	: 121.666.666,67		
➢ Reklas ke Aset Lainnya	: 4.405.328.682,91		
➢ Koreksi	: 985.887.982,50		
Total Penambahan		:	5.512.883.332,08
Pengurangan			
➢ Mutasi Masuk	: 121.666.666,67		
➢ Koreksi	: 1.044.784.458,33		
Total Pengurangan		:	1.166.451.125,00
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		:	**21.983.069.404,75**
Beban Amortisasi - LO		:	**3.553.804.436,60**

5.4.2.2.6.1 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise Rp25.641.066,66

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise terealisasi sebesar Rp25.641.066,66, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.740.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp21.901.066,66 atau 585,59% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
2	Dinas Sosial	22.129.400,00	-	22.129.400,00	100,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.511.666,66	2.740.000,00	(228.333,34)	(8,33)
	Jumlah	**25.641.066,66**	**3.740.000,00**	**21.901.066,66**	**585,59**

5.4.2.2.6.2 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Sofware Rp3.393.732.469,93

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Aset Tak Berwujud Lainnya terealisasi sebesar Rp3.393.732.469,93 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp24.989.800,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.368.742.669,93 atau 13.480,47% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	219.641.239,10	-	219.641.239,10	100,00
2	Dinas Kesehatan	160.646.609,01	-	160.646.609,01	100,00
3	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	260.069.853,71	-	260.069.853,71	100,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	42.866.666,67	-	42.866.666,67	100,00
5	RSUD Kelet Donorejo	162.458.000,00	-	162.458.000,00	100,00
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	253.200.833,33	-	253.200.833,33	100,00
7	RSJD Surakarta	488.110.015,14	-	488.110.015,14	100,00
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	241.166.448,25	-	241.166.448,25	100,00
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	23.976.973,33	-	23.976.973,33	100,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	37.900.000,00	-	37.900.000,00	100,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.275.000,00	-	13.275.000,00	100,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	154.385.471,83	-	154.385.471,83	100,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	6.906.416,67	-	6.906.416,67	100,00
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.408.333,33	-	5.408.333,33	100,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	48.720.925,00	24.989.800,00	23.731.125,00	94,96
16	Dinas Perhubungan	9.791.500,00	-	9.791.500,00	100,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	357.484.783,34	-	357.484.783,34	100,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	50.455.500,00	-	50.455.500,00	100,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81.018.533,33	-	81.018.533,33	100,00
20	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	174.269.464,71	-	174.269.464,71	100,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	28.190.000,00	-	28.190.000,00	100,00
22	Dinas Pertanian dan Perkebunan	14.233.333,33	-	14.233.333,33	100,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	106.738.751,43	-	106.738.751,43	100,00
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	68.469.933,34	-	68.469.933,34	100,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.908.950,00	-	4.908.950,00	100,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	28.265.756,25	-	28.265.756,25	100,00
27	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	41.334.500,00	-	41.334.500,00	100,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	178.982.500,00	-	178.982.500,00	100,00
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.737.062,50	-	7.737.062,50	100,00
30	Inspektorat	59.274.000,00	-	59.274.000,00	100,00
31	Sekretariat DPRD	62.954.283,00	-	62.954.283,00	100,00
32	Badan Penghubung	890.833,33	-	890.833,33	100,00
	Jumlah	**3.393.732.469,93**	**24.989.800,00**	**3.368.742.669,93**	13.480,47

5.4.2.2.6.3 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian — Rp134.430.900,01

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Aset Tak Berwujud Lainnya terealisasi sebesar Rp134.430.900,01, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.635.657.380,12 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.501.226.480,11) atau (96,30%) dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	357.997.881,80	(357.997.881,80)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	-	194.462.000,00	(194.462.000,00)	(100,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	74.634.633,34	45.001.000,00	29.633.633,34	65,85
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	258.310.846,60	(258.310.846,60)	(100,00)
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	39.200.000,00	(39.200.000,00)	(100,00)
6	RSUD Kelet Donorejo	-	212.008.133,34	(212.008.133,34)	(100,00)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	250.280.000,00	(250.280.000,00)	(100,00)
8	RSJD Surakarta	-	523.389.281,80	(523.389.281,80)	(100,00)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	241.166.448,25	(241.166.448,25)	(100,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	42.916.866,67	25.761.000,00	17.155.866,67	66,60
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	37.900.000,00	(37.900.000,00)	(100,00)
12	Dinas Sosial	-	47.520.600,00	(47.520.600,00)	(100,00)
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	119.568.000,00	(119.568.000,00)	(100,00)
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	5.900.000,00	(5.900.000,00)	(100,00)
15	Dinas Perhubungan	-	8.691.500,00	(8.691.500,00)	(100,00)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	344.819.200,00	(344.819.200,00)	(100,00)
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	45.432.200,00	(45.432.200,00)	(100,00)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	86.477.100,00	(86.477.100,00)	(100,00)
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	16.879.400,00	164.739.000,00	(147.859.600,00)	(89,75)
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	28.190.000,00	(28.190.000,00)	(100,00)
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	7.900.000,00	(7.900.000,00)	(100,00)
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	110.700.180,00	(110.700.180,00)	(100,00)
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	96.479.933,33	(96.479.933,33)	(100,00)

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	14.456.950,00	(14.456.950,00)	(100,00)
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	30.388.825,00	(30.388.825,00)	(100,00)
26	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	39.700.000,00	(39.700.000,00)	(100,00)
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	178.982.500,00	(178.982.500,00)	(100,00)
28	Inspektorat	-	59.274.000,00	(59.274.000,00)	(100,00)
29	Sekretariat DPRD	-	60.960.800,00	(60.960.800,00)	(100,00)
	Jumlah	**134.430.900,01**	**3.635.657.380,12**	**(3.501.226.480,11)**	(96,30)

5.4.2.3 BEBAN TRANSFER — Rp7.004.871.827.827,00

Beban Transfer terealisasi sebesar Rp7.004.871.827.827,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.090.119.051.175,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp85.247.223.348,00) atau (1,20%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Bagi Hasil	5.735.553.033.353,00	93.749.108.285,00	586.175.926.577,00	5.243.126.215.061,00	5.076.492.219.934,00	166.633.995.127,00	3,28
2	Beban Bantuan Keuangan	1.761.745.612.766,00	-	-	1.761.745.612.766,00	2.013.626.831.241,00	(251.881.218.475,00)	(12,51)
	Jumlah	**7.497.298.646.119,00**	**93.749.108.285,00**	**586.175.926.577,00**	**7.004.871.827.827,00**	**7.090.119.051.175,00**	**(85.247.223.348,00)**	**(1,20)**

Realisasi Beban Transfer sebesar Rp7.004.871.827.827,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Transfer - LRA : **7.497.298.646.119,00**

Penambahan
- Saldo Akhir Utang : 93.749.108.285,00

Total Penambahan : 93.749.108.285,00

Pengurangan
- Saldo Awal Utang : 586.175.926.577,00

Total Pengurangan : 586.175.926.577,00

Beban Transfer - LO : **7.004.871.827.827,00**

5.4.2.3.1 Beban Bagi Hasil — Rp5.243.126.215.061,00

Beban Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp5.243.126.215.061,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.076.492.219.934,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp166.633.995.127,00 atau 3,28% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.735.553.033.353,00	93.749.108.285,00	586.175.926.577,00	5.243.126.215.061,00	5.076.492.219.934,00	166.633.995.127,00	3,28
	Jumlah	**5.735.553.033.353,00**	**93.749.108.285,00**	**586.175.926.577,00**	**5.243.126.215.061,00**	**5.076.492.219.934,00**	**166.633.995.127,00**	**3,28**

5.4.2.3.1.1 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa — Rp5.243.126.215.061,00

Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa terealisasi sebesar Rp5.243.126.215.061,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.076.492.219.934,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp166.633.995.127,00 atau 3,28% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Kabupaten Semarang	191.675.079.511,00	2.423.634.417,00	20.329.827.372,00	173.768.886.556,00	166.709.020.754,00	7.059.865.802,00	4,23
2	Kabupaten Kendal	162.850.087.805,00	1.851.541.694,00	16.089.692.556,00	148.611.936.943,00	141.189.740.420,00	7.422.196.523,00	5,26
3	Kabupaten Demak	184.791.228.586,00	4.706.680.913,00	18.210.868.637,00	171.287.040.862,00	164.699.738.282,00	6.587.302.580,00	4,00
4	Kabupaten Grobogan	187.464.515.183,00	3.502.871.496,00	18.006.594.466,00	172.960.792.213,00	169.728.522.711,00	3.232.269.502,00	1,90
5	Kabupaten Pati	217.909.242.516,00	5.954.775.300,00	22.685.130.317,00	201.178.887.499,00	191.633.767.134,00	9.545.120.365,00	4,98
6	Kabupaten Kudus	166.347.501.424,00	2.152.434.208,00	17.100.862.284,00	151.399.073.348,00	146.193.581.703,00	5.205.491.645,00	3,56
7	Kabupaten Jepara	183.729.807.909,00	4.201.602.981,00	18.988.068.355,00	168.943.342.535,00	165.035.756.843,00	3.907.585.692,00	2,37
8	Kabupaten Rembang	120.762.316.716,00	1.439.443.520,00	12.177.721.170,00	110.024.039.066,00	106.811.817.885,00	3.212.221.181,00	3,01
9	Kabupaten Blora	126.260.266.417,00	1.531.387.636,00	11.703.083.375,00	116.088.570.678,00	113.795.489.176,00	2.293.081.502,00	2,02
10	Kabupaten Pekalongan	124.294.980.355,00	2.737.657.114,00	10.785.494.355,00	116.247.143.114,00	108.781.248.084,00	7.465.895.030,00	6,86
11	Kabupaten Batang	120.623.411.961,00	1.521.348.001,00	12.060.342.158,00	110.084.417.804,00	101.831.951.492,00	8.252.466.312,00	8,10
12	Kabupaten Pemalang	170.393.852.397,00	5.237.871.223,00	16.099.755.860,00	159.531.967.760,00	143.825.586.633,00	15.706.381.127,00	10,92
13	Kabupaten Tegal	186.620.461.851,00	2.061.747.513,00	17.537.774.722,00	171.144.434.642,00	165.142.863.444,00	6.001.571.198,00	3,63
14	Kabupaten Brebes	206.205.264.636,00	2.391.722.607,00	20.268.279.105,00	188.328.708.138,00	196.620.512.423,00	(8.291.804.285,00)	(4,22)
15	Kabupaten Banyumas	233.070.254.488,00	3.058.195.354,00	24.217.340.689,00	211.911.109.153,00	207.900.285.786,00	4.010.823.367,00	1,93
16	Kabupaten Cilacap	247.068.593.170,00	3.115.063.277,00	24.535.479.696,00	225.648.176.751,00	216.240.449.221,00	9.407.727.530,00	4,35
17	Kabupaten Purbalingga	124.624.802.130,00	1.550.469.616,00	11.676.129.796,00	114.499.141.950,00	113.795.861.540,00	703.280.410,00	0,62
18	Kabupaten Banjarnegara	122.694.193.588,00	2.972.708.579,00	11.002.218.871,00	114.664.683.296,00	110.901.698.047,00	3.762.985.249,00	3,39
19	Kabupaten Magelang	169.742.571.852,00	2.061.704.229,00	17.768.030.553,00	154.036.245.528,00	161.879.276.768,00	(7.843.031.240,00)	(4,84)
20	Kabupaten Temanggung	114.087.366.818,00	1.221.344.271,00	11.002.013.459,00	104.306.697.630,00	102.934.286.773,00	1.372.410.857,00	1,33
21	Kabupaten Wonosobo	112.685.340.755,00	1.419.243.946,00	9.859.893.353,00	104.244.691.348,00	100.340.511.625,00	3.904.179.723,00	3,89
22	Kabupaten Purworejo	108.924.659.904,00	1.420.788.321,00	10.760.355.454,00	99.585.092.771,00	100.296.894.960,00	(711.802.189,00)	(0,71)
23	Kabupaten Kebumen	157.491.424.803,00	4.770.941.665,00	14.715.007.496,00	147.547.358.972,00	142.336.837.332,00	5.210.521.640,00	3,66
24	Kabupaten Klaten	206.950.349.108,00	2.776.175.889,00	21.805.978.475,00	187.920.546.522,00	180.584.457.531,00	7.336.088.991,00	4,06
25	Kabupaten Boyolali	152.016.347.750,00	4.918.536.469,00	15.037.181.115,00	141.897.703.104,00	134.830.107.802,00	7.067.595.302,00	5,24
26	Kabupaten Sragen	174.684.467.479,00	2.090.976.736,00	18.086.398.598,00	158.689.045.617,00	148.715.784.550,00	9.973.261.067,00	6,71
27	Kabupaten Sukoharjo	172.597.941.561,00	2.179.871.567,00	18.253.417.692,00	156.524.395.436,00	148.723.046.885,00	7.801.348.551,00	5,25
28	Kabupaten Karanganyar	165.757.129.864,00	1.933.153.948,00	17.130.205.220,00	150.560.078.592,00	142.628.134.834,00	7.931.943.758,00	5,56
29	Kabupaten Wonogiri	145.525.380.454,00	1.349.000.600,00	13.916.383.672,00	132.957.997.382,00	125.994.261.368,00	6.963.736.014,00	5,53
30	Kota Semarang	532.561.552.641,00	8.983.304.077,00	67.763.718.247,00	473.781.138.471,00	468.423.263.061,00	5.357.875.410,00	1,14
31	Kota Pekalongan	76.876.982.891,00	954.437.170,00	7.576.378.061,00	70.255.042.000,00	69.202.941.100,00	1.052.100.900,00	1,52
32	Kota Surakarta	167.475.868.180,00	2.590.192.791,00	19.600.449.923,00	150.465.611.048,00	146.453.542.780,00	4.012.068.268,00	2,74
33	Kota Salatiga	64.918.523.115,00	730.901.435,00	6.512.348.294,00	59.137.076.256,00	58.272.247.154,00	864.829.102,00	1,48
34	Kota Tegal	73.489.943.717,00	1.043.145.678,00	6.538.053.105,00	67.995.036.290,00	60.820.575.697,00	7.174.460.593,00	11,80
35	Kota Magelang	62.381.321.818,00	894.234.044,00	6.375.450.076,00	56.900.105.786,00	53.218.158.136,00	3.681.947.650,00	6,92
	Jumlah	**5.735.553.033.353,00**	**93.749.108.285,00**	**586.175.926.577,00**	**5.243.126.215.061,00**	**5.076.492.219.934,00**	**166.633.995.127,00**	**3,28**

Realisasi Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp5.243.126.215.061,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota		:	**5.735.553.033.353,00**
Penambahan			
➢ Saldo Akhir Utang	: 93.749.108.285,00		
Total Penambahan		:	**93.749.108.285,00**
Pengurangan			
➢ Saldo Awal Utang	: 586.175.926.577,00		
Total Pengurangan		:	**586.175.926.577,00**
Beban Bagi Hasil Kepada Kab/Kota - LO		:	**5.243.126.215.061,00**

5.4.2.3.2 Beban Bantuan Keuangan — Rp1.761.745.612.766,00

Beban Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp1.761.745.612.766,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.013.626.831.241,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp251.881.218.475,00) atau (12,51%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
2	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	493.309.827.766,00	-	-	493.309.827.766,00	845.543.195.241,00	(352.233.367.475,00)	(41,66)
4	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.268.435.785.000,00	-	-	1.268.435.785.000,00	1.168.083.636.000,00	100.352.149.000,00	8,59
	Jumlah	**1.761.745.612.766,00**	-	-	**1.761.745.612.766,00**	**2.013.626.831.241,00**	**(251.881.218.475,00)**	**(12,51)**

5.4.2.3.2.1 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota — Rp493.309.827.766,00

Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp493.309.827.766,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp845.543.195.241,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp352.233.367.475,00) atau (41,66%) dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Kabupaten Semarang	49.527.249.000,00	-	-	49.527.249.000,00	39.687.577.274,00	9.839.671.726,00	24,79
2	Kabupaten Kendal	8.937.061.883,00	-	-	8.937.061.883,00	18.389.680.226,00	(9.452.618.343,00)	(51,40)
3	Kabupaten Demak	38.408.240.000,00	-	-	38.408.240.000,00	65.766.933.900,00	(27.358.693.900,00)	(41,60)

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
4	Kabupaten Grobogan	24.991.851.000,00	-	-	24.991.851.000,00	50.916.105.131,00	(25.924.254.131,00)	(50,92)
5	Kabupaten Pati	11.006.114.000,00	-	-	11.006.114.000,00	28.783.114.000,00	(17.777.000.000,00)	(61,76)
6	Kabupaten Kudus	4.319.018.000,00	-	-	4.319.018.000,00	8.673.235.000,00	(4.354.217.000,00)	(50,20)
7	Kabupaten Jepara	34.387.744.409,00	-	-	34.387.744.409,00	61.135.817.829,00	(26.748.073.420,00)	(43,75)
8	Kabupaten Rembang	15.987.548.639,00	-	-	15.987.548.639,00	14.285.856.288,00	1.701.692.351,00	11,91
9	Kabupaten Blora	14.680.004.000,00	-	-	14.680.004.000,00	54.343.529.000,00	(39.663.525.000,00)	(72,99)
10	Kabupaten Pekalongan	6.632.264.000,00	-	-	6.632.264.000,00	10.107.366.681,00	(3.475.102.681,00)	(34,38)
11	Kabupaten Batang	8.696.575.000,00	-	-	8.696.575.000,00	14.226.398.000,00	(5.529.823.000,00)	(38,87)
12	Kabupaten Pemalang	873.000.000,00	-	-	873.000.000,00	10.360.575.818,00	(9.487.575.818,00)	(91,57)
13	Kabupaten Tegal	18.959.286.000,00	-	-	18.959.286.000,00	4.563.209.000,00	14.396.077.000,00	315,48
14	Kabupaten Brebes	11.917.734.000,00	-	-	11.917.734.000,00	39.252.138.336,00	(27.334.404.336,00)	(69,64)
15	Kabupaten Banyumas	20.129.335.915,00	-	-	20.129.335.915,00	18.221.591.230,00	1.907.744.685,00	10,47
16	Kabupaten Cilacap	18.714.874.507,00	-	-	18.714.874.507,00	25.350.873.000,00	(6.635.998.493,00)	(26,18)
17	Kabupaten Purbalingga	687.000.000,00	-	-	687.000.000,00	13.572.473.000,00	(12.885.473.000,00)	(94,94)
18	Kabupaten Banjarnegara	6.549.582.000,00	-	-	6.549.582.000,00	16.193.248.000,00	(9.643.666.000,00)	(59,55)
19	Kabupaten Magelang	15.430.420.000,00	-	-	15.430.420.000,00	10.689.403.000,00	4.741.017.000,00	44,35
20	Kabupaten Temanggung	37.830.591.261,00	-	-	37.830.591.261,00	6.655.760.238,00	31.174.831.023,00	468,39
21	Kabupaten Wonosobo	17.540.253.154,00	-	-	17.540.253.154,00	46.025.605.000,00	(28.485.351.846,00)	(61,89)
22	Kabupaten Purworejo	9.269.759.900,00	-	-	9.269.759.900,00	33.355.013.808,00	(24.085.253.908,00)	(72,21)
23	Kabupaten Kebumen	5.848.070.000,00	-	-	5.848.070.000,00	17.991.610.589,00	(12.143.540.589,00)	(67,50)
24	Kabupaten Klaten	753.000.000,00	-	-	753.000.000,00	14.804.313.000,00	(14.051.313.000,00)	(94,91)
25	Kabupaten Boyolali	21.282.605.000,00	-	-	21.282.605.000,00	33.294.381.000,00	(12.011.776.000,00)	(36,08)
26	Kabupaten Sragen	8.295.179.000,00	-	-	8.295.179.000,00	27.090.585.441,00	(18.795.406.441,00)	(69,38)
27	Kabupaten Sukoharjo	2.319.045.000,00	-	-	2.319.045.000,00	1.154.709.000,00	1.164.336.000,00	100,83
28	Kabupaten Karanganyar	7.097.592.000,00	-	-	7.097.592.000,00	6.676.848.000,00	420.744.000,00	6,30
29	Kabupaten Wonogiri	26.144.456.000,00	-	-	26.144.456.000,00	56.811.970.000,00	(30.667.514.000,00)	(53,98)
30	Kota Semarang	23.539.789.384,00	-	-	23.539.789.384,00	26.781.465.445,00	(3.241.676.061,00)	(12,10)
31	Kota Pekalongan	1.952.969.600,00	-	-	1.952.969.600,00	11.794.000.000,00	(9.841.030.400,00)	(83,44)
32	Kota Surakarta	18.620.615.114,00	-	-	18.620.615.114,00	30.761.773.579,00	(12.141.158.465,00)	(39,47)
33	Kota Salatiga	586.000.000,00	-	-	586.000.000,00	7.576.755.000,00	(6.990.755.000,00)	(92,27)
34	Kota Tegal	753.000.000,00	-	-	753.000.000,00	15.936.712.428,00	(15.183.712.428,00)	(95,28)
35	Kota Magelang	642.000.000,00	-	-	642.000.000,00	4.312.568.000,00	(3.670.568.000,00)	(85,11)
	Jumlah	**493.309.827.766,00**	**-**	**-**	**493.309.827.766,00**	**845.543.195.241,00**	**(352.233.367.475,00)**	**(41,66)**

5.4.2.3.2.2 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa — Rp1.268.435.785.000,00

Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp1.268.435.785.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.168.083.636.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp100.352.149.000,00 atau 8,59% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Kabupaten Semarang	60.499.000.000,00	-	-	60.499.000.000,00	61.924.683.000,00	(1.425.683.000,00)	(2,30)
2	Kabupaten Kendal	29.054.000.000,00	-	-	29.054.000.000,00	38.910.000.000,00	(9.856.000.000,00)	(25,33)
3	Kabupaten Demak	29.020.000.000,00	-	-	29.020.000.000,00	27.896.000.000,00	1.124.000.000,00	4,03
4	Kabupaten Grobogan	58.623.200.000,00	-	-	58.623.200.000,00	64.995.000.000,00	(6.371.800.000,00)	(9,80)
5	Kabupaten Pati	107.514.664.000,00	-	-	107.514.664.000,00	152.645.000.000,00	(45.130.336.000,00)	(29,57)
6	Kabupaten Kudus	23.041.000.000,00	-	-	23.041.000.000,00	12.310.000.000,00	10.731.000.000,00	87,17
7	Kabupaten Jepara	39.189.207.000,00	-	-	39.189.207.000,00	50.870.000.000,00	(11.680.793.000,00)	(22,96)
8	Kabupaten Rembang	30.848.400.000,00	-	-	30.848.400.000,00	34.705.000.000,00	(3.856.600.000,00)	(11,11)
9	Kabupaten Blora	36.419.700.000,00	-	-	36.419.700.000,00	47.270.000.000,00	(10.850.300.000,00)	(22,95)
10	Kabupaten Pekalongan	20.581.200.000,00	-	-	20.581.200.000,00	20.428.884.000,00	152.316.000,00	0,75
11	Kabupaten Batang	51.193.428.000,00	-	-	51.193.428.000,00	28.665.886.000,00	22.527.542.000,00	78,59
12	Kabupaten Pemalang	48.188.000.000,00	-	-	48.188.000.000,00	44.489.000.000,00	3.699.000.000,00	8,31
13	Kabupaten Tegal	29.490.900.000,00	-	-	29.490.900.000,00	12.255.000.000,00	17.235.900.000,00	140,64
14	Kabupaten Brebes	65.573.000.000,00	-	-	65.573.000.000,00	59.960.000.000,00	5.613.000.000,00	9,36

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
15	Kabupaten Banyumas	37.761.000.000,00	-	-	37.761.000.000,00	47.895.000.000,00	(10.134.000.000,00)	(21,16)
16	Kabupaten Cilacap	42.636.350.000,00	-	-	42.636.350.000,00	31.438.183.000,00	11.198.167.000,00	35,62
17	Kabupaten Purbalingga	31.121.000.000,00	-	-	31.121.000.000,00	31.995.000.000,00	(874.000.000,00)	(2,73)
18	Kabupaten Banjarnegara	24.194.000.000,00	-	-	24.194.000.000,00	19.330.000.000,00	4.864.000.000,00	25,16
19	Kabupaten Magelang	78.200.059.000,00	-	-	78.200.059.000,00	35.425.000.000,00	42.775.059.000,00	120,75
20	Kabupaten Temanggung	32.720.500.000,00	-	-	32.720.500.000,00	22.031.000.000,00	10.689.500.000,00	48,52
21	Kabupaten Wonosobo	57.563.000.000,00	-	-	57.563.000.000,00	60.180.000.000,00	(2.617.000.000,00)	(4,35)
22	Kabupaten Purworejo	21.613.950.000,00	-	-	21.613.950.000,00	27.045.000.000,00	(5.431.050.000,00)	(20,08)
23	Kabupaten Kebumen	23.927.370.000,00	-	-	23.927.370.000,00	37.375.000.000,00	(13.447.630.000,00)	(35,98)
24	Kabupaten Klaten	73.842.000.000,00	-	-	73.842.000.000,00	60.445.000.000,00	13.397.000.000,00	22,16
25	Kabupaten Boyolali	58.384.051.000,00	-	-	58.384.051.000,00	23.665.000.000,00	34.719.051.000,00	146,71
26	Kabupaten Sragen	39.275.500.000,00	-	-	39.275.500.000,00	25.025.000.000,00	14.250.500.000,00	56,95
27	Kabupaten Sukoharjo	31.026.000.000,00	-	-	31.026.000.000,00	25.310.000.000,00	5.716.000.000,00	22,58
28	Kabupaten Karanganyar	41.906.506.000,00	-	-	41.906.506.000,00	34.135.000.000,00	7.771.506.000,00	22,77
29	Kabupaten Wonogiri	45.028.800.000,00	-	-	45.028.800.000,00	29.465.000.000,00	15.563.800.000,00	52,82
	Jumlah	**1.268.435.785.000,00**	**-**	**-**	**1.268.435.785.000,00**	**1.168.083.636.000,00**	**100.352.149.000,00**	**8,59**

5.4.3.1 SURPLUS NON OPERASIONAL **Rp341.940.608.963,02**

Surplus Non Operasional terealisasi sebesar Rp341.940.608.963,02, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 139.384.387.221.80 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 202.556.221.741,22 atau 145,32 % dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-	-
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	341.940.608.963,02	139.384.387.221,80	202.556.221.741,22	145,32
	Jumlah	**341.940.608.963,02**	**139.384.387.221,80**	**202.556.221.741,22**	**145,32**

Realisasi Surplus Non Operasional sebesar Rp341.940.608.963,02 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan

- Reklas Penyusutan Aset Tetap : 594.256.269,19
- Penyisihan Piutang Awal : 401.226.601.947,43
- Koreksi Penyisihan Piutang : 562.163.872.047,72
- Koreksi Hutang yang telah dibebankan : 1.125.000.000,00
- Aset Dari Ektrakompatabel : 74.040.000,00

Total Penambahan : 965.183.770.264,34

Pengurangan

- Reklas Penyusutan Aset Tetap : 593.940.690,83

➢ Penyisihan Piutang Akhir	: 622.450.923.661,49		
➢ Koreksi Penyisihan Piutang	: 195.375.649,01		
➢ Penyusutan Aset Ekstrakompatabel	: 2.921.300,00		
Total Pengurangan		:	623.243.161.301,33
Surplus Kegiatan Non Operasional - LO		:	**341.940.608.963,02**

5.4.3.1.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya **Rp 341.940.608.963,02**

Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya terealisasi sebesar Rp341.940.608.963,02, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp139.384.387.221,80 mengalami **kenaikan** sebesar Rp202.556.221.741,22 atau 145,32% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71.118.700,00	32.162.145,89	38.956.554,11	121,13
2	Dinas Kesehatan	-	15.551.099,54	(15.551.099,54)	(100,00)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	3.937.820.159,53	(3.937.820.159,53)	(100,00)
4	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	32.037.942,15	(32.037.942,15)	(100,00)
5	RSJD Surakarta	66.142.888,35	-	66.142.888,35	-
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.125.000.000,00	12.113.323,48	1.112.886.676,53	9.187,29
7	Dinas PSDA dan Penataan Ruang	-	363.749.806,31	(363.749.806,31)	(100,00)
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	12.806.740,00	(12.806.740,00)	(100,00)
9	Dinas Perhubungan	85.925,00	726.900,00	(640.975,00)	(88,18)
10	Dinas Koperasi dan UMKM	-	13.550.000,00	(13.550.000,00)	(100,00)
11	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	1.315.867.450,00	(1.315.867.450,00)	(100,00)
12	Dinas Perindutrian dan Perdagangan	315.578,36	-	315.578,36	-
13	SKPKD	106.519.175,00	252.540.900,00	(146.021.725,00)	(57,82)
14	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
15	Sekretariat Dewan	-	-	-	-
16	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	340.571.426.696,31	133.389.373.768,60	207.182.052.927,71	155,32
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	6.086.986,30	(6.086.986,30)	(100,00)
	Jumlah	**341.940.608.963,02**	**139.384.387.221,80**	**202.556.221.741,22**	**145,32**

5.4.3.2 DEFISIT NON OPERASIONAL **(Rp17.088.286.977,15)**

Defisit Non Operasional terealisasi sebesar (Rp17.088.286.977,15) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.178.029.891,34) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp14.910.257.085,81) atau 684,58% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	(10.428.083.662,69)	(2.168.325.266,86)	(8.259.758.395,83)	380,93
2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	(6.660.203.314,46)	(9.704.624,48)	(6.650.498.689,98)	68.529,17
	Jumlah	**(17.088.286.977,15)**	**(2.178.029.891,34)**	**(14.910.257.085,81)**	**684,58**

Defisit Non Operasional sebesar Rp341.940.608.963,02 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan			
➢ Penjualan Aset Tetap	: 26.491.299.785,00		
➢ Reklas Penyusutan Aset Tetap	: 53.017.569.654,02		
➢ Reklas Penyusutan Aset Lainnya	: 1.241.959.183,40		

➢ Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	:	1.869.784.179,67		
Total Penambahan			:	82.620.612.802,09
Pengurangan				
➢ Penyusutan Penjualan Aset Tetap	:	18.174.148.001,45		
➢ Reklas Penyusutan Aset Tetap	:	47.030.445.089,37		
➢ Reklas Penyusutan Aset Lainnya	:	327.732.734,12		
Total Pengurangan			:	65.532.325.824,94
Defisit Kegiatan Non Operasional			**:**	**17.088.286.977,15**

5.4.3.2.1 **Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar** **(Rp 10.428.083.662,69)**

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar terealisasi sebesar (Rp 10.428.083.662,69) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.168.325.266,86) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp8.259.758.395,83) atau 380,93% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(352.092.026)	-	(352.092.026,36)	-
2	RSUD Dr. Moewardi	(4.999.165.035)	-	(4.999.165.035,29)	-
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	(40.700.000,00)	40.700.000,00	(100,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(1.559.140.000,00)	-	(1.559.140.000,00)	-
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	(910.000,00)	910.000,00	(100,00)
6	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	(5.147.904,80)	5.147.904,80	(100,00)
7	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(1.382.266.443,43)	(92.088.500,00)	(1.290.177.943,43)	1.401,02
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	(909.754.782,61)	-	(909.754.782,61)	(100,00)
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(1.221.345.375,00)	-	(1.221.345.375,00)	-
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(4.320.000,00)	-	(4.320.000,00)	-
11	Sekretariat Daerah	-	(572.740,00)	572.740,00	(100,00)
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	(2.028.906.122,06)	2.028.906.122,06	(100,00)
	Jumlah	**(10.428.083.662,69)**	**(2.168.325.266,86)**	**(8.259.758.395,83)**	**380,93**

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar sebesar (Rp 10.428.083.662,69) dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan				
➢ Penjualan Aset Tetap	:	(26.491.299.785,00)		
➢ Reklas Penyusutan Aset Lainnya	:	(1.137.790.000,00)		
Total Penambahan			:	(27.629.089.785,00)
Pengurangan				
➢ Penyusutan Penjualan Aset Tetap	:	16.972.970.904,92		
➢ Reklas Penyusutan Aset Lainnya	:	228.035.217,39		
Total Pengurangan			:	17.201.006.122,31
Defisit Kegiatan Non Operasional			**:**	**(10.428.083.662,69)**

5.4.3.2.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya (Rp6.660.203.314,46)

Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya terealisasi sebesar (Rp6.660.203.314,46) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp9.704.624,48) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp6.650.498.689,98) atau 68.529,17 % dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(1.047.521.958,61)	-	(1.047.521.958,61)	-
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	(7.836.400,00)	7.836.400,00	(100,00)
5	RSUD Tugurejo Semarang	(19.000.000,00)	-	(19.000.000,00)	-
6	RSUD Kelet Donorejo	-	-	-	-
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	(474.649.613,00)	-	(474.649.613,00)	-
8	RSJD Surakarta	-	-	-	-
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	(42.660.245,00)	-	(42.660.245,00)	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	(1.868.224,48)	1.868.224,48	(100,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(110.160.000,00)	-	(110.160.000,00)	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(31.636.500,00)	-	(31.636.500,00)	-
16	Dinas Sosial	(24.537.567,50)	-	(24.537.567,50)	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(16.954.927,91)	-	(16.954.927,91)	-
19	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(367.661.025,05)	-	(367.661.025,05)	-
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	(171.000,00)	-	(171.000,00)	-
22	Dinas Perhubungan	(47.302.698,18)	-	(47.302.698,18)	-
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(436.490.985,80)	-	(436.490.985,80)	-
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(18.846.000,00)	-	(18.846.000,00)	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(3.970.384.733,41)	-	(3.970.384.733,41)	-
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	-
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	-
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-
33	SKPKD	-	-	-	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(11.156.250,00)	-	(11.156.250,00)	-
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-
37	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-
39	Inspektorat	-	-	-	-
40	Sekretariat Daerah	(8.918.560,00)	-	(8.918.560,00)	-
41	Sekretariat DPRD	(32.151.250,00)	-	(32.151.250,00)	-
42	Badan Penghubung	-	-	-	-
		-	-	-	-
	Jumlah	**(6.660.203.314,46)**	**(9.704.624,48)**	**(6.650.498.689,98)**	**68.529,17**

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya sebesar (Rp6.660.203.314,46) dapat dijelaskan dengan perhitungan sebgai berikut :

Penambahan

- Reklas Penyusutan Aset Tetap : (53.017.569.654,02)
- Reklas Penyusutan Aset Lainnya : (104.169.183,40)

➢ Koreksi Belanja Modal	:	(474.649.613,00)	
➢ Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	:	(1.395.134.566,67)	
Total Penambahan			: (54.991.523.017,09)
Pengurangan			
➢ Penyusutan Penjualan Aset Tetap	:	1.201.177.096,53	
➢ Reklas Penyusutan Aset Tetap	:	47.030.445.089,37	
➢ Reklas Penyusutan Aset Lainnya	:	99.697.516,73	
Total Pengurangan			: 48.331.319.702,63
Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya			**: (6.660.203.314,46)**

5.4.4 POS LUAR BIASA **(Rp 4.329.429.000,00)**

Pos Luar Biasa terealisasi sebesar (Rp4.329.429.000,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.080.000.000,00) mengalami **kenaikan** sebesar Rp 3.249.429.000,00 atau (300,87%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendaptan Luar Biasa	-	-	-	-	-	-	-
2	Beban Luar Biasa	-	67.973.876.000,00	4.329.429.000,00	1.080.000.000,00	3.249.429.000,00	300,87	-
	Jumlah	**-**	**(67.973.876.000,00)**	**(4.329.429.000,00)**	**(1.080.000.000,00)**	**3.249.429.000,00**	**(300,87)**	**-**

5.4.4.1 PENDAPATAN LUAR BIASA Rp,00

Pendapatan Luar Biasa tahun 2021 dan 2020 terealisasi sebesar Rp,00.

5.4.4.2 BEBAN LUAR BIASA **Rp 4.329.429.000,00**

Beban Luar Biasa bersumber dari Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp 4.329.429.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.080.000.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.249.429.000,00 atau 300,87 % dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Luar Biasa	72.303.305.000,00	-	67.973.876.000,00	4.329.429.000,00	1.080.000.000,00	3.249.429.000,00	300,87
	Jumlah	**72.303.305.000,00**	**-**	**67.973.876.000,00**	**4.329.429.000,00**	**1.080.000.000,00**	**3.249.429.000,00**	**300,87**

Beban Luar Biasa tahun 2021 sebesar Rp0,00 dikarenakan belanja yang digunakan untuk upaya Pemulihan Ekonomi Nasional sejumlah Rp67.973.876.000,00 telah dirinci ke beban Bahan sejumlah Rp1.297.040.000,00 dan beban Bantuan Sosial sejumlah Rp66.676.836.000,00.

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta saldo kas pada awal maupun akhir periode anggaran. Arus Kas dalam Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan dan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2021 dan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2021.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi — Rp2.214.730.356.124,00

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.214.730.356.124,00, merupakan indikator yang menunjukan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas yang terdiri dari:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	Arus Masuk Kas	26.610.910.138.713,00	25.393.121.456.628,00
	Arus Keluar Kas	24.396.179.782.589,00	24.654.745.844.831,00
	Jumlah	2.214.730.356.124,00	738.375.611.797,00

5.5.1.1. Arus Masuk Kas — Rp26.610.910.138.713,00

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp26.610.910.138.713,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp25.393.121.456.628,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	11.718.378.320.505,00	11.139.173.309.780,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	91.634.269.205,00	98.297.991.699,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	508.263.876.971,00	530.091.029.137,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah	2.355.108.484.231,00	1.905.124.340.719,00
5.	Dana Bagi Hasil Pajak	1.023.258.872.325,00	843.392.119.954,00
6.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	12.586.758.109,00	16.888.016.587,00
7.	Dana Alokasi Umum	3.432.978.859.000,00	3.438.709.973.000,00
8.	Dana Alokasi Khusus	7.334.261.241.620,00	7.333.796.931.752,00
9.	Dana Penyesuaian	68.710.605.000,00	68.212.455.000,00
10.	Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	1.102.159.000,00
11.	Pendapatan Hibah	64.882.003.502,00	23.352.000.000,00
12.	Penerimaan Lainnya	846.848.245,00	0,00
	Jumlah	**26.610.910.138.713,00**	**25.393.121.456.628,00**

Total arus masuk kas dari aktivitas operasi tahun 2021 sebesar Rp26.610.910.138.713,00 sedangkan total pada LRA tahun 2021 (5.1.1) sebesar Rp26.633.000.085.963,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp22.089.947.250,00. Perbedaan tersebut terjadi karena pada total arus masuk kas dari aktivitas operasi tidak termasuk pendapatan yang termasuk dalam arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp22.089.947.250,00 (5.5.2.1).

5.5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah — Rp11.718.378.320.505,00

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp11.718.378.320.505,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp11.139.173.309.780,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	4.758.837.101.600,00	4.579.535.646.300,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.775.978.070.000,00	2.228.465.305.800,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.826.681.450.277,00	1.719.403.821.612,00
4	Pajak Air Permukaan	17.243.160.079,00	16.056.164.261,00
5	Pajak Rokok	2.339.638.538.549,00	2.595.712.371.807,00
	Jumlah	11.718.378.320.505,00	11.139.173.309.780,00

5.5.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah — Rp91.634.269.205,00

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp91.634.269.205,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp98.297.991.699,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	17.015.718.195,00	19.119.314.367,00
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	63.400.000,00	296.950.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan	533.500.000,00	5.332.470.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	38.307.608.734,00	36.956.100.234,00
5	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan terminal	1.296.264.750,00	731.126.000,00
6	Retribusi Tempat Pelelangan	458.284.775,00	479.788.100,00
7	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	694.235.000,00	1.679.542.500,00
8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	5.532.632.500,00	5.827.626.900,00
9	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	269.133.000,00	-
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	21.294.297.511,00	20.618.354.198,00
11	Retribusi Ijin Trayek	673.827.500,00	900.425.000,00
12	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	2.816.377.700,00	4.467.909.900,00
13	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	2.678.989.540,00	1.888.384.500,00
	Jumlah	**91.634.269.205,00**	**98.297.991.699,00**

Dampak Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka penyajian akun Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 audited semula sebesar Rp93.279.121.699,00 menjadi sebesar Rp93.279.121.699,00 naik sebesar Rp5.018.870.000,00, hal ini dikarenakan penerimaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2020 termasuk bagian dari akun lain-lain PAD yang Sah, Tahun Anggaran 2021 termasuk bagian dari Pendapatan Retribusi Daerah.

5.5.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yg Dipisahkan Rp508.263.876.971,00

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp508.263.876.971,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2020 sebesar Rp530.091.029.137,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah	316.959.000,00	6.300.000.000,00
2	Bagian Laba PT. Bank Jateng	375.956.828.408,00	375.777.399.480,00
3	Bagian Laba BPR-BKK	63.975.590.182,00	70.890.351.223,00
4	Bagian Laba PDAB Tirta Utama	6.812.844.537,00	5.450.000.000,00
5	Deviden PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	3.325.376.041,00	-
6	Deviden PT. Asuransi Bangun Askrida	2.989.250.618,00	3.003.617.427,00
7	Deviden PT. PRPP	-	380.000.000,00
8	Deviden PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	15.651.337.104,00	30.069.580.225,00
9	Deviden PT. Sarana Patra Hulu Cepu	-	31.658.604.782,00
10	Deviden PT. Jamkrida	7.233.274.455,00	6.561.476.000,00
11	Deviden PT. Jateng Petro Energi	32.002.416.626,00	-
	Jumlah	**508.263.876.971,00**	**530.091.029.137,00**

5.5.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah Rp2.355.108.484.231,00

Arus Kas Masuk dari Lain-Lain PAD yang Sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.355.108.484.231,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2020 sebesar Rp1.900.105.470.719,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	391.216.600,00
2	Penerimaan Jasa Giro	33.421.665.370,00	43.049.831.808,00
3	Penerimaan Bunga	52.487.671.175,00	76.236.609.714,00
4	Hasil Penerimaan Ganti Rugi Aset Daerah	8.612.000,00	221.582.000,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain	34.263.799.325,00	-
6	Pendapatan Denda keterlambatan	2.779.750.191,00	1.453.371.334,00
7	Pendapatan Denda Pajak	115.195.838.121,00	58.794.221.327,00
8	Pendapatan Denda Retribusi	181.042.060,00	257.926.732,00

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
9	Pendapatan dari Pengembalian	1.809.013.300,00	7.070.704.654,00
13	Penerimaan dari BLUD	2.106.839.090.275,00	1.696.912.608.091,00
14	Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa	1.739.312.072,00	-
15	Penerimaan Lain-Lain	6.382.690.342,00	15.717.398.459,00
	Jumlah	**2.355.108.484.231,00**	**1.900.105.470.719,00**

Dampak Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka penyajian akun Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2020 audited semula sebesar Rp1.905.124.340.719,00 menjadi sebesar Rp1.900.719.948.239,00 turun sebesar Rp5.018.870.000,00. penurunan terdapat pada akun Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp5.018.870.000,00 menjadi Rp0,00 dikarenakan Tahun Anggaran 2021 termasuk bagian dari Pendapatan Retribusi Daerah

5.5.1.1.5. Dana Bagi Hasil Pajak — Rp1.023.258.872.325,00

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.023.258.872.325,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2020 sebesar Rp843.392.119.954,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	78.170.445.518,00	50.209.290.661,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 25 & 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21	690.318.309.644,00	589.959.276.398,00
3	Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	254.770.117.163,00	203.223.552.895,00
	Jumlah	**1.023.258.872.325,00**	**843.392.119.954,00**

5.5.1.1.6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam — Rp12.586.758.109,00

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp12.586.758.109,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp16.888.016.587,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	9.386.722.285,00	3.171.078.354,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Land Rent*)	105.849.449,00	-
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)	17.452.925,00	-
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	204.832.300,00	953.548.771,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.020.387.900,00	12.093.116.943,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	-	-
7	Bagi Hasil dari Panas Bumi	1.851.513.250,00	648.100.727,00
8	Bagi Hasil dari Minerba	-	22.171.792,00
	Jumlah	**12.586.758.109,00**	**16.888.016.587,00**

5.5.1.1.7. Dana Alokasi Umum — Rp3.432.978.859.000,00

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Alokasi Umum periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.432.978.859.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp3.438.709.973.000,00.

5.5.1.1.8. Dana Alokasi Khusus — Rp7.334.261.241.620,00

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Alokasi Khusus periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp7.334.261.241.620,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp7.333.796.931.752,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	**Dana Alokasi Khusus Fisik**	**401.885.567.398,00**	**350.564.240.958,00**
-	DAK Bidang Pendidikan	204.019.889.120,00	238.525.644.192,00
-	DAK Bidang Kesehatan	99.424.571.254,00	53.547.136.929,00
-	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	39.801.657.780,00	47.924.844.000,00
-	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	9.301.772.343,00	-
-	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	13.409.579.190,00	2.374.367.000,00
-	DAK Bidang Pertanian	4.217.308.288,00	1.180.833.087,00
-	DAK Bidang Kehutanan	26.823.374.450,00	1.202.707.750,00
-	DAK Bidang Pariwisata	4.887.414.973,00	5.808.708.000,00
-	DAK Bidang Energi Sumber Daya Mineral		-
-	DAK Bidang Pasar		-
2	**Dana Alokasi Khusus Fisik Non Fisik**	**6.932.375.674.222,00**	**6.983.232.690.794,00**
-	Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru	2.331.000.000,00	21.325.000,00
-	Bantuan Operasional Sekolah	5.821.222.770.000,00	5.918.126.510.000,00
-	Tunjangan Profesi Guru - PNSD	1.098.687.112.000,00	1.016.584.649.000,00
-	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB)	233.096.459,00	42.095.670.378,00
-	Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	3.281.743.678,00	2.294.735.812,00
-	Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil	2.271.473.316,00	363.705.104,00
-	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya	3.487.300.769,00	3.746.095.500,00
-	Dana Penyelenggaraan Kepariwisataan	861.178.000,00	-
	Jumlah	**7.334.261.241.620,00**	**7.333.796.931.752,00**

5.5.1.1.9. Dana Penyesuaian — Rp68.710.605.000,00

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Penyesuaian periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah berupa Dana Insentif Daerah sebesar Rp68.710.605.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp68.212.455.000,00.

5.5.1.1.10. Penerimaan Bagi Hasil Lainnya — Rp0,00

Arus Kas Masuk Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp1.102.159.000,00 merupakan penerimaan kas dari Bagi Hasil Retribusi Ketep Pass dari Kabupaten Magelang.

5.5.1.1.11. Pendapatan Hibah — Rp64.882.003.502,00

Arus Kas Masuk berupa Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp64.882.003.502,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp23.352.000.000,00.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Hibah dari pemerintah	42.132.003.502,00	-
2	Sumbangan pihak ketiga jasa raharja	22.750.000.000,00	23.352.000.000,00
	Jumlah	**64.882.003.502,00**	**23.352.000.000,00**

5.5.1.1.12. Penerimaan Lainnya — Rp846.848.245,00

Arus Kas Masuk berupa Penerimaan Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp846.848.245,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp0,00.

5.5.1.2. Arus Keluar Kas — Rp24.396.179.782.589,00

Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp24.396.179.782.589,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp24.654.745.844.831,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Belanja Pegawai	5.685.925.255.020,00	6.483.761.623.794,00
2	Belanja Barang dan Jasa	5.345.399.454.776,00	4.104.637.788.228,00
3	Belanja Subsidi	90.482.166,00	
4	Belanja Hibah	5.728.982.384.318,00	5.593.181.623.109,00
5	Belanja Bantuan Sosial	66.180.255.190,00	42.407.250.000,00
6	Belanja Tak Terduga	72.303.305.000,00	1.783.884.978.571,00
7	Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota	5.735.553.033.353,00	4.633.245.749.888,00
8	Belanja Bantuan Keuangan	1.761.745.612.766,00	2.013.626.831.241,00
	Jumlah	**24.396.179.782.589,00**	**24.654.745.844.831,00**

5.5.1.2.1. Belanja Pegawai **Rp5.685.925.255.020,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Pegawai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.685.925.255.020,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp6.483.761.623.794,00.

5.5.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa **Rp5.345.399.454.776,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Barang periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.345.399.454.776,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp4.104.637.788.228,00.

5.5.1.2.3. Belanja Subsidi **Rp90.482.166,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp90.482.166,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp0,00.

5.5.1.2.4. Belanja Hibah **Rp5.728.982.384.318,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.728.982.384.318,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp5.593.181.623.109,00.

5.5.1.2.5. Belanja Bantuan Sosial **Rp66.180.255.190,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Bantuan Sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp66.180.255.190,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp42.407.250.000,00.

5.5.1.2.6. Belanja Tidak Terduga **Rp72.303.305.000,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Tidak Terduga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp72.303.305.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp1.783.884.978.571,00.

5.5.1.2.7. Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota **Rp5.735.553.033.353,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.735.553.033.353,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp4.633.245.749.888,00.

5.5.1.2.8. Belanja Bantuan Keuangan **Rp1.761.745.612.766,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Bantuan Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.761.745.612.766,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp2.013.626.831.241,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten /Kota	493.309.827.766,00	845.543.195.241,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	1.268.435.785.000,00	1.168.083.636.000,00
3.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	-	-
4.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda Lainnya	-	-
	Jumlah	**1.761.745.612.766,00**	**2.013.626.831.241,00**

5.5.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan (Rp1.425.530.463.995,00)

Arus kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar. Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.425.530.463.995,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar (Rp996.380.027.640,00) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020 (Rp)	2020 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	22.089.947.250,00	614.477.520,00
2	Arus Keluar Kas	1.447.620.411.245,00	996.994.505.160,00
	Jumlah	(1.425.530.463.995,00)	(996.380.027.640,00)

5.5.2.1. Arus Masuk Kas Rp22.089.947.250,00

Total Arus Masuk dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp22.089.947.250,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp614.477.520,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pendapatan Penjualan atas Tanah	20.826.561.000,00	-
2.	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	130.149.400,00	238.835.520,00
3.	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	375.642.000,00
4	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	675.394.250,00	-
5	Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	457.842.600,00	-
	Jumlah	**22.089.947.250,00**	**614.477.520,00**

5.5.2.1.1. Pendapatan Penjualan atas Tanah Rp20.826.561.000,00

Arus kas masuk dari Penjualan Tanah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp20.826.561.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp0,00.

5.5.2.1.2. Penjualan Peralatan dan Mesin **Rp130.149.400,00**

Arus kas masuk dari Penjualan Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp130.149.400,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp238.835.520,00,00.

5.5.2.1.3. Penjualan Gedung dan Bangunan **Rp0,00**

Arus kas masuk dari Penjualan Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp375.642.000,00.

5.5.2.1.4. Penjualan Aset Tetap Lainnya **Rp675.394.250,00**

Arus kas masuk dari Penjualan Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp675.394.250,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp0,00.

5.5.2.1.5. Penjualan Aset Lainnya **Rp457.842.600,00**

Arus kas masuk dari Penjualan Aset Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp457.842.600,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp0,00.

5.5.2.2. Arus Keluar Kas **Rp1.447.620.411.245,00**

Total Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.447.620.411.245,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp996.994.505.160,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Belanja Tanah	79.135.275.975,00	14.338.900.293,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	578.353.949.251,00	494.933.371.196,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	330.679.148.402,00	195.773.603.473,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	351.328.654.582,00	177.713.123.124,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	108.123.383.035,00	113.376.388.074,00
6	Belanja Aset Tidak Berwujud	-	859.119.000,00
	Jumlah	**1.447.620.411.245,00**	**996.994.505.160,00**

5.5.2.2.1. Belanja Tanah **Rp79.135.275.975,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Tanah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp79.135.275.975,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp14.338.900.293,00.

5.5.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin **Rp578.353.949.251,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp578.353.949.251,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp494.933.371.196,00.

5.5.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan **Rp330.679.148.402,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp330.679.148.402,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp195.773.603.473,00.

5.5.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan **Rp351.328.654.582,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp351.328.654.582,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp177.713.123.124,00.

5.5.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya **Rp108.123.383.035,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp108.123.383.035,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp113.376.388.074,00.

5.5.2.2.6. Belanja Aset Tidak Berwujud **Rp0,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Aset Tidak Berwujud periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 Rp859.119.000,00.

5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan **(Rp214.883.792.231,00)**

Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar (Rp214.883.792.231,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp252.540.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	116.207.769,00	252.540.900,00
2	Arus Keluar Kas	215.000.000.000,00	-
	Jumlah	(214.883.792.231,00)	252.540.900,00

5.5.3.1. Arus Masuk Kas **Rp116.207.769,00**

Total Arus Masuk dari aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp116.207.769,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp252.540.900,00terdiri dari:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Pencairan Dana Cadangan	-	-
2.	Pengembalian Dana Talangan	-	-
3.	Penerimaan Kembali Pokok Piutang	106.519.175,00	252.540.900,00
4.	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	9.688.594,00	-
5.	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	-
	Jumlah	**116.207.769,00**	**252.540.900,00**

5.5.3.1.1. Pencairan Dana Cadangan — Rp0,00

Arus kas masuk dari Pencairan dana cadangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Nihil dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 adalah Nihil.

5.5.3.1.2. Pengembalian Dana Talangan — Rp0,00

Tidak ada arus kas masuk dari Pengembalian dana talangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020.

5.5.3.1.3. Penerimaan Kembali Pokok Piutang — Rp106.519.175,00

Arus kas masuk dari Penerimaan Kembali Pokok Piutang periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp106.519.175,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp252.540.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM)	6.400.000,00	74.375.000,00
2	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Biro Perkenomian)	-	13.000.000,00
3	Penerimaan Dana Bergulir untuk Peralatan/Bahan Baku bagi IKM	-	15.165.900,00
4	Penerimaan Dana Bergulir Ternak Kereman (Dinas Peternakan)	19.200.000,00	150.000.000,00
5	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	77.669.175,00	-
6	Penerimaan Dana Bergulir Gerakan Mapan Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)	3.250.000,00	-
	Jumlah	**106.519.175,00**	**252.540.900,00**

5.5.3.1.4. Pengembalian Dana Bergulir — Rp9.688.594,00

Arus kas masuk dari Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp9.688.594,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	9.688.594,00	-
	Jumlah	**9.688.594,00**	**-**

5.5.3.1.5. Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank **Rp0,00**

Arus kas masuk dari penerimaan Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp0,00.

5.5.3.2. Arus Keluar Kas **Rp215.000.000.000,00**

Total Arus Keluar untuk aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp215.000.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	-
2	Pembentukan Dana Cadangan	200.000.000.000,00	-
	Jumlah	**215.000.000.000,00**	-

5.5.3.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah **Rp15.000.000.000,00**

Arus kas Keluar untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp15.000.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	PT. Jateng Petro Energi	15.000.000.000,00	-
	Jumlah	**15.000.000.000,00**	-

5.5.3.2.2. Pembentukan Dana Cadangan **Rp200.000.000.000,00**

Arus kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Utang periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp200.000.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 adalah Rp0.

5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran **(Rp161.016.074,00)**

Arus kas dari aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas bersih dari aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar (Rp161.016.074,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar (Rp68.878.789,00) dengan perhitungan sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	901.199.806.552,00	647.360.263.730,00
2	Arus Keluar Kas	901.360.822.626,00	647.429.142.519,00
		(161.016.074,00)	(68.878.789,00)

5.5.4.1. Arus Masuk Kas **Rp901.199.806.552,00**

Total arus masuk kas dari aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp901.199.806.552,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp647.360.263.730,00 terdiri dari:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	901.046.407.823,00	647.272.798.276,00
2.	Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	18.040.000,00	-
3.	Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya	102.386.400,00	87.465.454,00
4.	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	32.972.329,00	-
	Jumlah	**901.199.806.552,00**	**647.360.263.730,00**

5.5.4.1.1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga **Rp901.046.407.823,00**

Arus kas masuk dari penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp901.046.407.823,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp647.272.798.276,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Pajak-pajak	381.778.072.902,00	305.896.495.529,00
2.	IWP	345.646.908.164,00	160.332.811.484,00
3.	Taperum	-	94.429.708,00
4.	Askes	173.621.426.757,00	180.949.061.555,00
	Jumlah	**901.046.407.823,00**	**647.272.798.276,00**

5.5.4.1.2. Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Sebelumnya **Rp18.040.000,00**

Arus kas masuk dari Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Sebelumnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp18.040.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	18.040.000,00	-
	Jumlah	**18.040.000,00**	-

5.5.4.1.3. Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran Sebelumnya **Rp102.386.400,00**

Arus kas masuk dari Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran Sebelumnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp102.386.400,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp87.465.454,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pekertjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	17.710.000,00	17.894.128,00
2	Dinas Perhubungan	55.828.000,00	15.402.754,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.900.000,00	
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	13.530.000,00	
5	Dubas Kubgkungan Hidup dan Kehutanan	1.108.000,00	41.957.000,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.310.400,00	12.211.572,00
	Jumlah	**102.386.400,00**	**87.465.454,00**

5.5.4.1.4. Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah — Rp32.972.329,00

Koreksi saldo kas di Bendahara Sekolah pada tahun 2021 sebesar Rp32.972.329,00 dan untuk tahun 2020 sebesar Rp0,00, merupakan koreksi atas SiLPA tahun 2020 pada kas Bendahara Sekolah.

5.5.4.2. Arus Keluar Kas — Rp901.360.822.626,00

Total Arus Keluar dari Aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp901.360.822.626,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp647.429.142.519,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	901.046.407.823,00	647.272.798.276,00
2	Kas di Bend Penerimaan Tahun Berjalan	314.414.803,00	102.386.400,00
3	Kas di Bend Pengeluaran – Sisa UUDP Tahun Berjalan	-	18.040.000,00
4	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	-	35.917.843,00
	Jumlah	**901.360.822.626,00**	**647.429.142.519,00**

5.5.4.2.1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) — Rp901.046.407.823,00

Arus kas keluar untuk Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp901.046.407.823,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp647.272.798.276,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Pajak-pajak	381.778.072.902,00	305.896.495.529,00
2.	IWP	345.646.908.164,00	160.332.811.484,00
3.	Taperum	-	94.429.708,00
4.	Askes	173.621.426.757,00	180.949.061.555,00
	Jumlah	**901.046.407.823,00**	**647.272.798.276,00**

5.5.4.2.2. Kas di Bendahara Penerimaan-Tahun Berjalan **Rp314.414.803,00**

Arus kas keluar berupa kas di Bendahara Penerimaan yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum dipertanggungjawabkan dan disetor ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp314.414.803,00 dan untuk tahun 2020 sebesar Rp102.386.400,00.

5.5.4.2.3. Kas di Bendahara Pengeluaran-Tahun Berjalan **Rp0,00**

Arus kas keluar berupa pengiriman kas ke Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum dipertanggungjawabkan dan disetor kembali ke Rekening Kas Daerah atau ke Kas Negara sebesar Rp0,00 dan untuk tahun 2020 sebesar Rp18.040.000,00.

5.5.4.2.4. Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah **Rp0,00**

Koreksi saldo kas di Bendahara Sekolah pada tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan untuk tahun 2020 sebesar Rp35.917.843,00, merupakan koreksi atas SiLPA tahun 2020 pada kas Bendahara Sekolah.

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Setara Kas **Rp574.155.083.824,00**

Kenaikan kas selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp574.155.083.824,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar (Rp257.820.753.732,00) yang berasal dari:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	2.214.730.356.124,00	738,357,611,797.00
2.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	(1.425.530.463.995,00)	(996,380,027,640.00)
3.	Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	(214.883.792.231,00)	252,540,900.00
4.	Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	(161.016.074,00)	(68,878,789.00)
	Jumlah	**574.155.083.824,00**	**(257,820,753,732.00)**

5.5.6. Saldo Akhir Kas **Rp1.435.378.469.951,00**

Saldo Akhir Kas posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.435.378.469.951,00 sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp861.223.386.127,00 yaitu jumlah dari saldo awal per 1 Januari 2021 ditambah kenaikan/penurunan kas selama periode Tahun Anggaran 2021 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Saldo Awal Kas BUD	362.643.956.586,00	837.445.123.013,00
2.	Saldo Awal Kas BLUD	437.713.567.521,00	171.762.980.362,00
3.	Saldo Awal Kas di Bendahara Sekolah	60.865.862.020,00	109.836.036.484,00
2.	Kenaikan/Penurunan Kas	574.155.083.824,00	(257.820.753.732,00)
	Jumlah	**1.435.378.469.951,00**	**861.223.386.127,00**

5.5.7. Saldo Akhir Kas

Rp1.436.740.557.457,00

Saldo Akhir Kas merupakan gabungan Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Sekolah dan Kas Lainnya pada posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.436.740.557.457,00 dan untuk tahun 2020 sebesar Rp864.937.343.735,87 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas Di Kas Daerah	398.435.833.644,00	362.643.956.586,00
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	18.040.000,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	314.414.803,00	120.536.400,00
4	Kas Di Bendahara BLUD	992.730.293.369,00	438.382.355.570,87
5	Kas Di Bendahara Sekolah	45.260.015.641,00	61.115.855.179,00
6	Kas Lainnya	-	2.656.600.000,00
	Jumlah	**1.436.740.557.457,00**	**864.937.343.735,87**

Dari saldo akhir kas sebesar Rp1.436.740.557.457,00 tersebut, berupa SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp1.435.692.884.754,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.047.672.703,00. Selisih tersebut terdiri uang muka pasien di Rumah Sakit Rp765.695.510,00 dan Kas di Bendahara Sekolah karena pajak yang disetor tahun 2022 sebesar Rp264.280.204,00 serta sisa Dana Bantuan Pemerintah yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp17.696.989,00.

5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1	Ekuitas Awal	36.397.640.492.434,77	37.100.999.040.516,20	(703.358.548.081,54)	(1,90)
2	Surplus/Defisit-LO	1.999.473.856.856,54	(417.421.893.335,80)	2.416.895.750.192,34	(579,01)
3	RK-PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian	511.560.919.197,71	(285.936.654.745,67)	797.497.573.943,38	(278,91)
	Ekuitas Akhir	**38.908.675.268.489,02**	**36,397,640,492,434.77**	**2.511.034.776.054,18**	**(859,81)**

5.6.1 Ekuitas Awal

Rp36.397.640.492.434,77

Saldo Ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp36.397.640.492.434,77 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	6.910.177.353.230,36	8.098.555.752.452,35	(1.188.378.399.221,99)	(14,67)
2	Dinas Pendidikan	7.472.423.283.601,55	7.269.506.135.723,93	202.917.147.877,62	2,79
3	Dinas Kesehatan	483.551.327.661,49	259.997.636.603,04	223.553.691.058,45	85,98
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	868.310.767.705,29	716.785.687.770,27	151.525.079.935,02	21,14
5	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	631.528.523.911,38	641.891.479.065,83	(10.362.955.154,45)	(1,61)
6	RSUD Tugurejo Semarang	306.917.688.922,99	327.415.560.912,99	(20.497.871.990,00)	(6,26)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	212.395.521.123,96	223.426.910.867,24	(11.031.389.743,28)	(4,94)
8	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	789.181.364.835,44	810.757.568.412,83	(21.576.203.577,39)	(2,66)
9	RSJD Surakarta	147.088.884.048,79	151.293.763.684,26	(4.204.879.635,47)	(2,78)
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	82.590.566.813,57	81.947.747.764,71	642.819.048,86	0,78
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	5.716.946.650.456,91	6.085.551.226.706,64	(368.604.576.249,73)	(6,06)
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	6.071.262.844.125,86	6.099.649.625.583,80	(28.386.781.457,94)	(0,47)
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	27.444.429.864,56	26.609.520.885,39	834.908.979,17	3,14
14	Satuan Polisi Pamong Praja	20.143.780.512,13	21.234.181.408,45	(1.090.400.896,32)	(5,14)
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.545.225.220,23	17.999.459.834,30	(454.234.614,07)	(2,52)
16	Dinas Sosial	256.190.436.140,46	262.407.239.816,82	(6.216.803.676,36)	(2,37)
17	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.587.268.266,47	14.558.883.751,28	8.028.384.515,19	55,14
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	139.832.728.039,21	140.456.912.261,18	(624.184.221,97)	(0,44)
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	12.699.410.136,03	13.388.804.363,28	(689.394.227,25)	(5,15)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	123.275.089.914,82	76.304.138.150,45	46.970.951.764,37	61,56
21	Dinas Ketahanan Pangan	15.242.053.671,59	15.112.821.565,94	129.232.105,65	0,86
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	16.803.906.387,70	17.452.092.359,13	(648.185.971,43)	(3,71)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
23	Dinas Perhubungan	330.046.158.417,09	328.807.050.915,93	1.239.107.501,16	0,38
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	42.266.582.314,10	36.514.250.431,63	5.752.331.882,47	15,75
25	Dinas Koperasi dan UMKM	41.211.433.007,21	35.766.399.993,09	5.445.033.014,12	15,22
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.472.306.530,48	16.219.769.393,50	(747.462.863,02)	(4,61)
27	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	795.674.996.615,24	795.145.562.981,06	529.433.634,18	0,07
28	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	33.513.908.446,25	35.690.007.598,05	(2.176.099.151,80)	(6,10)
29	Dinas Kelautan dan Perikanan	363.097.541.882,54	293.484.352.436,55	69.613.189.445,99	23,72
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan	964.471.443.261,22	969.019.688.305,35	(4.548.245.044,13)	(0,47)
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	517.184.890.933,55	407.025.709.813,35	110.159.181.120,20	27,06
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	116.522.370.941,10	116.723.061.413,37	(200.690.472,27)	(0,17)
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.955.944.674,66	103.865.320.273,53	(2.909.375.598,87)	(2,80)
34	Sekretariat Daerah	254.145.316.537,61	259.777.126.433,47	(5.631.809.895,86)	(2,17)
35	Sekretariat DPRD	55.082.954.658,72	48.114.206.497,63	6.968.748.161,09	14,48
36	Inspektorat	10.480.775.496,95	9.173.175.518,12	1.307.599.978,83	14,25
37	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	134.184.233.325,36	134.899.909.675,94	(715.676.350,58)	(0,53)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.950.360.342.884,10	1.801.449.650.284,19	148.910.692.599,91	8,27
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	136.854.116.118,17	140.699.400.158,19	(3.845.284.040,02)	(2,73)
40	Badan Kepegawaian Daerah	15.342.803.598,74	16.447.469.504,29	(1.104.665.905,55)	(6,72)
41	Badan Pengembangan SDM Daerah	155.913.885.703,41	157.996.738.602,60	(2.082.852.899,19)	(1,32)
42	Badan Penghubung	20.719.382.497,40	21.877.040.342,29	(1.157.657.844,89)	(5,29)
	Jumlah	**36.397.640.492.434,77**	**37.100.999.040.516,20**	**(703.358.548.081,54)**	**(1,90)**

5.6.2 Surplus/Defisit – LO **Rp1.999.473.856.856,54**

Surplus/defisit – LO sebesar Rp1.999.473.856.856,54 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	5.507.132.872.351,50	(1.998.147.711.572,37)	7.505.280.583.923,87	(375,61)
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(11.007.814.593.266,10)	(5.792.904.133.517,95)	(5.214.910.459.748,11)	90,02
3	Dinas Kesehatan	(779.761.759.881,18)	(243.278.502.952,54)	(536.483.256.928,64)	220,52
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	62.106.681.003,63	(106.554.975.746,42)	168.661.656.750,05	(158,29)
5	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	57.505.568.180,33	(128.924.078.719,33)	186.429.646.899,66	(144,60)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(15.215.915.780,83)	(114.059.999.427,00)	98.844.083.646,17	(86,66)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(41.619.128.624,98)	(72.154.345.121,27)	30.535.216.496,29	(42,32)
8	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(37.871.029.302,83)	(64.290.354.208,50)	26.419.324.905,67	(41,09)
9	RSJD Surakarta	(47.427.154.278,95)	(71.331.168.554,46)	23.904.014.275,51	(33,51)
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(24.854.626.679,63)	(40.954.277.177,21)	16.099.650.497,58	(39,31)
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	(747.744.439.653,94)	(690.053.804.281,73)	(57.690.635.372,21)	8,36

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	(153.619.281.025,55)	(168.714.568.656,94)	15.095.287.631,39	(8,95)
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	(31.066.863.077,46)	(30.298.910.667,83)	(767.952.409,63)	2,53
14	Satuan Polisi Pamong Praja	(18.953.568.675,29)	(24.805.957.716,32)	5.852.389.041,03	(23,59)
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(82.257.891.338,70)	(25.818.629.401,07)	(56.439.261.937,63)	218,60
16	Dinas Sosial	(212.065.956.832,15)	(205.454.100.611,36)	(6.611.856.220,79)	3,22
17	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(19.266.043.984,91)	(18.216.112.976,81)	(1.049.931.008,10)	5,76
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(92.086.215.333,19)	(90.285.432.956,47)	(1.800.782.376,72)	1,99
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(20.423.387.259,10)	(20.843.029.858,25)	419.642.599,15	(2,01)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(179.305.344.921,45)	(153.001.829.877,63)	(26.303.515.043,82)	17,19
21	Dinas Ketahanan Pangan	(32.875.705.964,40)	(33.015.661.849,35)	139.955.884,95	(0,42)
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	(24.706.950.313,85)	(25.430.630.206,43)	723.679.892,58	(2,85)
23	Dinas Perhubungan	(148.844.082.696,64)	(120.063.431.697,23)	(28.780.650.999,41)	23,97
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	(101.602.495.088,41)	(72.011.734.578,53)	(29.590.760.509,88)	41,09
25	Dinas Koperasi dan UMKM	(43.675.813.134,28)	(56.744.550.127,64)	13.068.736.993,36	(23,03)
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(18.371.597.889,53)	(19.509.897.349,02)	1.138.299.459,49	(5,83)
27	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	(196.644.066.332,56)	(89.007.395.877,82)	(107.636.670.454,74)	120,93
28	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	(32.339.441.577,37)	(34.595.861.875,80)	2.256.420.298,43	(6,52)
29	Dinas Kelautan dan Perikanan	(102.512.341.306,19)	9.807.096.691,99	(112.319.437.998,18)	(1.145,29)
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(183.324.073.371,59)	(210.683.376.289,13)	27.359.302.917,54	(12,99)
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(75.753.846.920,33)	(62.250.446.098,80)	(13.503.400.821,53)	21,69
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(71.955.056.755,30)	(65.454.290.646,27)	(6.500.766.109,03)	9,93
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(76.278.374.669,85)	(69.571.369.544,87)	(6.707.005.124,98)	9,64
34	DPRD	-	(97.720.954.647,00)	97.720.954.647,00	(100,00)
35	KDH dan Wakil KDH	-	(21.553.175.590,00)	21.553.175.590,00	(100,00)
36	Sekretariat Daerah	(598.101.113.128,15)	(169.149.931.261,86)	(428.951.181.866,29)	253,59
37	Sekretariat DPRD	(239.409.300.090,74)	(198.711.163.889,91)	(40.698.136.200,83)	20,48
38	Inspektorat	(30.809.929.161,92)	(29.458.816.529,17)	(1.351.112.632,75)	4,59
39	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(39.866.635.755,35)	(45.565.241.191,58)	5.698.605.436,23	(12,51)
40	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.993.584.758.188,50	11.091.136.750.540,70	902.448.007.647,83	8,14
41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	42.619.323.172,02	67.449.403.520,01	(24.830.080.347,99)	(36,81)
42	Badan Kepegawaian Daerah	(84.665.065.005,61)	(43.909.028.913,55)	(40.756.036.092,06)	92,82
43	Badan Pengembangan SDM Daerah	(32.580.121.571,47)	(44.016.673.501,19)	11.436.551.929,72	(25,98)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
44	Badan Penghubung	(17.806.135.389,72)	(17.299.588.421,89)	(506.546.967,83)	2,93
	Jumlah	**1.999.473.856.856,54**	**(417.421.893.335,80)**	**2.416.895.750.192,34**	**(579,01)**

5.6.2.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar — Rp511.560.919.197,71

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp511.560.919.197,71 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreks/Penyesuaian Kas	32.972.328,65	2.039.240.769,90	(2.006.268.441,25)	(98,38)
2	Koreks/Penyesuaian Piutang	207.027.275.428,62	184.531.390.819,75	22.495.884.608,87	12,19
3	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Piutang	(562.386.694.925,14)	(21.023.913.390,77)	(541.362.781.534,37)	2.574,99
4	Koreks/Penyesuaian Persediaan	193.681.017.147,88	7.679.629.671,00	186.001.387.476,88	2.422,01
5	Koreks/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	(11.548.482.579,00)	11.548.482.579,00	(100,00)
6	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	11.548.482.579,00	(11.548.482.579,00)	(100,00)
7	Koreks/Penyesuaian Investasi Permanen	567.938.674.324,21	(449.774.852.613,76)	1.017.713.526.937,97	(226,27)
8	Koreks/Penyesuaian Aset Tetap	139.112.653.436,00	44.265.036.083,00	94.847.617.353,00	214,27
9	Koreks/Penyesuaian Penyusutan	(33.829.823.867,00)	1.214.748.675,98	(35.044.572.542,98)	(2.884,92)
10	Koreks/Penyesuaian Aset Lainnya	(4.997.267.920,00)	(47.343.787.412,00)	42.346.519.492,00	(89,44)
11	Koreks/Penyesuaian Amortisasi	(80.105.975,83)	(408.019.400,00)	327.913.424,17	(80,37)
12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	5.008.727.119,30	(1.676.151.463,25)	6.684.878.582,55	(398,82)
13	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai	13.925.000,00	2.487.500,00	11.437.500,00	459,80
14	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa	39.567.101,64	(5.442.463.983,84)	5.482.031.085,48	(100,73)
15	Koreks/Penyesuaian Lain-Lain	(0,62)	(1,68)	1,06	(63,15)
	Jumlah	**511.560.919.197,71**	**(285.936.654.745,67)**	**797.497.573.943,37**	**(278,91)**

5.6.2.2 Koreksi/Penyesuaian Kas — Rp32.972.328,65

Koreksi/Penyesuaian Kas sebesar Rp32.972.328,65 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	-	2.101.000.000,00	(2.101.000.000,00)	(100,00)
2	Dinas Pendidikan	32.972.329,00	(61.759.230,00)	94.731.559,00	(153,39)
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(0,35)	(0,10)	(0,25)	250,00
	Jumlah	**32.972.328,65**	**2.039.240.769,90**	**(2.006.268.441,25)**	(98,38)

Koreksi/Penyesuaian Kas disebabkan oleh:

1. Koreksi/Penyesuaian Kas pada Dinas Pendidikan disebabkan oleh koreksi atas kesalahan pengakuan saldo kas di Bendahara Sekolah atas dana BOS dan BOP Tahun 2020 sebesar Rp32.972.329,00
2. Koreksi/Penyesuaian Kas pada RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebesar (Rp0,35) ini

merupakan koreksi saldo Kas di Bendahara BLUD pada rekening Bank Mandiri.

5.6.2.3 Koreksi/Penyesuaian Piutang — Rp207.027.275.428,62

Koreksi/Penyesuaian Piutang sebesar Rp207.027.275.428,62 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	129.846.906.291,00	142.886.704.457,73	(13.039.798.166,73)	(9,13)
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	66.053.944.345,00	13.993.945.697,00	52.059.998.648,00	372,02
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	(166.844.694,25)	166.844.694,25	(100,00)
4	RSUD Tugurejo Semarang	(91.758.783,00)	(374.178.272,00)	282.419.489,00	(75,48)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(1.100.000,00)	-	(1.100.000,00)	-
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(77.659.555,00)	-	(77.659.555,00)	-
7	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	-	98,00	(98,00)	(100,00)
8	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.296.943.130,62	26.974.366.273,00	(15.677.423.142,38)	(58,12)
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	1.217.397.260,27	(1.217.397.260,27)	(100,00)
	Jumlah	**207.027.275.428,62**	**184.531.390.819,75**	**22.495.884.608,87**	12,19

Penyebab Koreksi/Penyesuaian Piutang disebabkan oleh:

1. Koreksi tambah ekuitas di SKPKD sebesar Rp129.846.906.291,00, karena:
   - Koreksi tambah ekuitas atas pengakuan piutang transfer pusat-dana perimbangan Tahun 2020 berdasarkan PMK Nomor 119/PMK.07/2021 sebesar Rp146.211.166.057,00.
   - Koreksi kurang ekuitas atas saldo piutang transfer-dana perimbangan Tahun 2020 sebesar (Rp16.168.884.117,00) berdasarkan PMK Nomor 119/PMK.07/2021.
   - Koreksi kurang ekuitas atas koreksi saldo awal Tahun 2020 atas Dana Bergulir yang sudah tidak digulirkan lagi sebesar (Rp195.375.649,00) yang sudah dibayarkan.
2. Koreksi tambah ekuitas di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebesar Rp66.053.944.345,00 disebabkan oleh koreksi tambah piutang pasien jaminan sebesar Rp66.076.613.483,00 dan koreksi kurang piutang pasien umum sebesar (Rp22.369.138,00).
3. Koreksi kurang ekuitas di RSUD Tugurejo Semarang sebesar (Rp91.758.783,00) karena adanya koreksi piutang perusahaan sebesar (Rp21.821.472,00) dan piutang asuransi sebesar (Rp69.937.311,00).
4. Koreksi kurang ekuitas di RSUD Kelet/Donorejo Jepara sebesar (Rp1.100.000,00) merupakan koreksi kurang atas piutang pemanfaatan aset.
5. Koreksi kurang ekuitas di RSJD Dr. RM Soedjarwadi sebesar (Rp77.659.555,00) merupakan koreksi kurang atas piutang pasien jaminan BPJS.
6. Koreksi tambah ekuitas di Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp11.296.943.130,62 merupakan koreksi tambah pencatatan Piutang PKB tahun sebelumnya sebesar

Rp25.566.419.712,00, koreksi kurang pencatatan Piutang PKB tahun sebelumnya sebesar (Rp4.031.161.925,00), koreksi atas kendaraan rusak berat sebesar (Rp1.735.628.450,00), koreksi atas kendaraan hilang sebesar (Rp272.976.750,00), koreksi atas kendaraan yang dicabut registrasinya Rp1.815.000,00 dan koreksi lainnya sebesar (Rp8.227.894.456,38).

5.6.2.4 Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang (Rp562.386.694.925,14)

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang sebesar (Rp562.386.694.925,14) merupakan koreksi penghitungan Penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	195.375.649,01	(8.745.328.174,37)	8.940.703.823,38	(102,23)
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(421.977.894,30)	(974.898.840,30)	552.920.946,00	(56,72)
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	3.607.394,23	(3.607.394,23)	(100,00)
4	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	-	(98,00)	98,00	(100,00)
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(562.160.092.679,85)	(11.301.206.686,04)	(550.858.885.993,81)	4.874,34
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	(6.086.986,30)	6.086.986,30	(100,00)
	Jumlah	**(562.386.694.925,14)**	**(21.023.913.390,77)**	**(541.362.781.534,37)**	2.574,99

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang disebabkan oleh:

1. Koreksi kurang ekuitas di SKPKD merupakan koreksi dana bergulir yang sudah tidak digulirkan lagi sebesar Rp195.375.649,01 yang sudah dibayarkan.
2. Koreksi tambah ekuitas di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebesar (Rp421.977.894,30) karena penyesuaian pengakuan piutang pasien umum dan pasien jaminan Tahun 2020.
3. Koreksi tambah ekuitas di Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar (Rp562.160.092.679,85) karena koreksi piutang tahun sebelumnya, koreksi atas kendaraan rusak berat, koreksi atas kendaraan hilang, kendaraan yang dicabut registrasinya dan koreksi lain.

5.6.2.5 Koreksi/Penyesuaian Persediaan Rp193.681.017.147,88

Koreksi/Penyesuaian Persediaan sebesar Rp193.681.017.147,88 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	12.105.613.830,00	-	12.105.613.830,00	-
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	10.932.416.200,00	-	10.932.416.200,00	-
3	RSUD Tugurejo Semarang	8.095.160.327,81	-	8.095.160.327,81	-
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	2.464.404.512,34	-	2.464.404.512,34	-
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	1.177.646.119,98	-	1.177.646.119,98	-
6	RSJD Surakarta	649.632.157,30	-	649.632.157,30	-
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.257.995.800,00	-	1.257.995.800,00	-
9	Dinas Kesehatan	153.269.198.009,93	-	153.269.198.009,93	-

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
8	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	5.767.429.671,00	(5.767.429.671,00)	(100,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.347.957.730,00	-	1.347.957.730,00	-
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	937.777.260,52	-	937.777.260,52	-
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.443.215.200,00	1.912.200.000,00	(468.984.800,00)	(24,53)
	Jumlah	**193.681.017.147,88**	**7.679.629.671,00**	**186.001.387.476,88**	**2.422,01**

Koreksi/Penyesuaian Persediaan disebabkan oleh:

1. Koreksi tambah ekuitas di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebesar Rp12.105.613.830,00 atas barang habis pakai Covid-19 tahun 2020 yang belum ada nilainya.
2. Koreksi tambah ekuitas di RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebesar Rp10.932.416.200,00 atas barang habis pakai Covid-19 tahun 2020 yang belum ada nilainya.
3. Koreksi tambah ekuitas di RSUD Tugurejo Semarang sebesar Rp8.095.160.327,81 atas barang habis pakai Covid-19 tahun 2020 yang belum ada nilainya.
4. Koreksi tambah ekuitas di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang sebesar Rp2.464.404.512,34 atas barang habis pakai Covid-19 tahun 2020 yang belum ada nilainya.
5. Koreksi tambah ekuitas di RSUD Kelet/Donorejo Jepara sebesar Rp1.177.646.119,98 atas barang habis pakai Covid-19 tahun 2020 yang belum ada nilainya.
6. Koreksi tambah ekuitas di RSJD Surakarta sebesar Rp649.632.157,30 atas barang habis pakai Covid-19 tahun 2020 yang belum ada nilainya.
7. Koreksi tambah ekuitas di RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten sebesar Rp1.257.995.800,00 atas barang habis pakai Covid-19 tahun 2020 yang belum ada nilainya.
8. Koreksi tambah ekuitas di Dinas Kesehatan sebesar Rp153.269.198.009,93 atas persediaan yang berasal dari hibah Pemerintah Pusat.
9. Koreksi tambah ekuitas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.347.957.730,00 atas persediaan yang berasal dari hibah Pemerintah Pusat.
10. Koreksi tambah ekuitas di Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp937.777.260,52 atas persediaan bahan habis pakai.
11. Koreksi tambah ekuitas di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.443.215.200,00 atas koreksi saldo awal persediaan bibit ternak/bibit ikan.

5.6.2.6 Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen **Rp0,00**

Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen sebesar Rp0,00 merupakan koreksi atas reklasifikasi dana bergulir yang sudah tidak digulirkan lagi pada SKPKD.

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	-	(11.548.482.579,00)	11.548.482.579,00	(100,00)
	Jumlah	**-**	**(11.548.482.579,00)**	**11.548.482.579,00**	(100,00)

5.6.2.7 Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen **Rp0,00**

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen sebesar Rp0,00 merupakan koreksi atas reklasifikasi dana bergulir yang sudah tidak digulirkan lagi pada SKPKD.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	-	11,548,482,579.00	(11,548,482,579.00)	-
	Jumlah	**-**	**11,548,482,579.00**	**(11,548,482,579.00)**	(100.00)

5.6.3.7 Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen **Rp567.938.674.324,21**

Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen sebesar Rp567.938.674.324,21 merupakan koreksi pada SKPKD atas perubahan nilai Investasi pada BUMD berdasarkan perhitungan dengan Metode Ekuitas.

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	567.938.674.324,21	(449.774.852.613,76)	1.017.713.526.937,97	(226,27)
	Jumlah	**567.938.674.324,21**	**(449.774.852.613,76)**	**1.017.713.526.937,97**	(226,27)

5.6.3.8 Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap **Rp139.112.653.436,00**

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar Rp139.112.653.436,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	2.556.662.772,00	(196.144.404.987,00)	198.701.067.759,00	(101,30)
2	Dinas Pendidikan	93.932.180.108,00	24.712.150.705,00	69.220.029.403,00	280,11
3	Dinas Kesehatan	(4.151.564.309,00)	18.858.340.695,00	(23.009.905.004,00)	(122,01)
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.220.584.575,00	5.890.000.866,00	(4.669.416.291,00)	(79,28)
5	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	2.126.870.579,00	7.012.190.699,00	(4.885.320.120,00)	(69,67)
6	RSUD Tugurejo Semarang	3.333.550.000,00	(556.672.965,00)	3.890.222.965,00	(698,83)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	1.181.198.369,00	662.924.729,00	518.273.640,00	78,18
8	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	484.730.732,00	941.627.273,00	(456.896.541,00)	(48,52)
9	RSJD Surakarta	2.305.809.839,00	688.473.485,00	1.617.336.354,00	234,92
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	517.913.627,00	688.917.482,00	(171.003.855,00)	(24,82)
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	271.422.000,00	4.406.249.627,00	(4.134.827.627,00)	(93,84)
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	667.693.835,00	12.622.240.000,00	(11.954.546.165,00)	(94,71)
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	-	640.337.000,00	(640.337.000,00)	(100,00)
14	Satuan Polisi Pamong Praja	565.900.000,00	-	565.900.000,00	-
15	Dinas Sosial	1.143.338.346,00	1.997.564.136,00	(854.225.790,00)	(42,76)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.739.733.107,00	59.942.400,00	15.679.790.707,00	26.158,10
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.952.093.570,00	3.699.079.500,00	(1.746.985.930,00)	(47,23)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	59.034.863,00	(59.034.863,00)	(100,00)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	25.624.543.788,00	52.011.431.000,00	(26.386.887.212,00)	(50,73)
20	Dinas Ketahanan Pangan	(90.640.000,00)	-	(90.640.000,00)	-
21	Dinas Perhubungan	500.976.687,00	359.222.000,00	141.754.687,00	39,46
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.964.507.000,00	(678.020.000,00)	2.642.527.000,00	(389,74)
23	Dinas Koperasi dan UMKM	-	5.210.160.000,00	(5.210.160.000,00)	(100,00)
24	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	(176.550.000,00)	176.550.000,00	(100,00)
25	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	6.993.621.600,00	(191.973.338,00)	7.185.594.938,00	(3.743,02)
26	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	-	57.800.000,00	(57.800.000,00)	(100,00)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.341.000.000,00	(261.560.000,00)	1.602.560.000,00	(612,69)
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	(949.207.600,00)	949.207.600,00	(100,00)
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(13.999.645.000,00)	104.675.000.000,00	(118.674.645.000,00)	(113,37)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(232.329.100,00)	-	(232.329.100,00)	-
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.452.000.000,00	103.472.000,00	2.348.528.000,00	2.269,72
32	Sekretariat Daerah	(10.849.302.170,00)	(4.317.819.011,00)	(6.531.483.159,00)	151,27
33	Sekretariat DPRD	(2.306.546.744,00)	612.668.000,00	(2.919.214.744,00)	(476,48)
34	Inspektorat	577.548.835,00	-	577.548.835,00	-
35	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(49.065.000,00)	-	(49.065.000,00)	-
36	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(415.082.750,00)	418.941.362,00	(834.024.112,00)	(199,08)
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.982.722.140,00	1.302.582.500,00	2.680.139.640,00	205,76
38	Badan Kepegawaian Daerah	-	653.971.453,00	(653.971.453,00)	(100,00)
39	Badan Pengembangan SDM Daerah	(229.773.000,00)	-	(229.773.000,00)	-
40	Badan Penghubung	-	(803.077.791,00)	803.077.791,00	(100,00)
	Jumlah	**139.112.653.436,00**	**44.265.036.083,00**	**94.847.617.353,00**	**214,27**

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap ini dikarenakan beberapa alasan dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Koreksi Tambah karena					Total
		belum tercatat	kapitalisasi	belum penyusutan	penggabungan/ pemisahan	koreksi volume	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	123.654.726.006					123.654.726.006
2	Dinas Kesehatan	8.606.760.828					8.606.760.828
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta		37.999.922		127.895.337.921		127.933.337.843
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	138.011.725	610.404.233				748.415.958
5	RSUD Tugurejo Semarang		109.824.000	4.509.509.125			4.619.333.125
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara			4.296.619.080			4.296.619.080
7	RSJD Surakarta			4.736.894.083			4.736.894.083
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten		11.880.000	1.664.929.482			1.676.809.482
9	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	375.662.000	204.828.853	57.423.371.850			58.003.862.703
10	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.037.703.107					16.037.703.107

No.	SKPD	Koreksi Tambah karena					Total
		belum tercatat	kapitalisasi	belum penyusutan	penggabungan/ pemisahan	koreksi volume	
11	Dinas Sosial				5.477.500.000		5.477.500.000
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.952.093.570					1.952.093.570
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	25.442.153.788					25.442.153.788
14	Dinas Perhubungan	462.296.687				30.450.000	492.746.687
15	Dinas Komunikasi dan Informatika		174.515.000				174.515.000
16	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	15.457.008.665	1.018.671.000				16.475.679.665
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.341.000.000	40.480.000				1.381.480.000
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			696.425.390			696.425.390
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			20.439.094.163			20.439.094.163
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.452.000.000					2.452.000.000
21	Sekretariat Daerah			32.016.689.110			32.016.689.110
22	Sekretariat DPRD			1.722.235.500			1.722.235.500
23	SKPKD	2.151.576.000					2.151.576.000
24	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	118.965.000					118.965.000
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah			5.194.719.300			5.194.719.300
26	Badan Penghubung					19.560.000	19.560.000
	JUMLAH	**198.189.957.376**	**2.208.603.008**	**132.700.487.083**	**133.372.837.921**	**50.010.000**	**466.521.895.388**

No.	SKPD	Koreksi Kurang Tahun Lalu Karena							Total
		Kapitalisasi	penggabungan/ pemisahan	belum penyusutan	kurang volume gedung	DED tidak digunakan	kurang nilai	salah pencatatan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							35.355.288.258	35.355.288.258
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	37.999.922	127.895.337.921				1.171.000.000		129.104.337.843
3	RSUD Tugurejo Semarang	109.824.000		4.509.509.125					4.619.333.125
4	RSUD Kelet/Donorejo Jepara			4.296.619.080					4.296.619.080
5	RSJD Surakarta			4.736.894.083					4.736.894.083
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	11.880.000		1.664.929.482					1.676.809.482
7	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	204.828.853		57.423.371.850					57.628.200.703
8	Dinas Sosial		5.477.500.000						5.477.500.000
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan							15.980.000	15.980.000
10	Dinas Perhubungan				30.450.000				30.450.000
11	Dinas Komunikasi dan Informatika		135.900.000						135.900.000
12	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata		8.639.083.665			1.018.671.000			9.657.754.665
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	40.480.000							40.480.000
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			696.425.390			13.620.000.000		14.316.425.390
15	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			20.512.116.663					20.512.116.663

No.	SKPD	Koreksi Kurang Tahun Lalu Karena							Total
		Kapitalisasi	penggabungan/ pemisahan	belum penyusutan	kurang volume gedung	DED tidak digunakan	kurang nilai	salah pencatatan	
16	Sekretariat Daerah			32.016.689.110					32.016.689.110
17	Sekretariat DPRD			1.722.235.500		180.000.000			1.902.235.500
18	Badan Pengelola Pendapatan Daerah					5.636.895.050			5.636.895.050
19	Badan Pengembangan SDM Daerah					229.773.000			229.773.000
20	Badan Penghubung				19.560.000				19.560.000
	Jumlah	**405.012.775**	**142.147.821.586**	**127.578.790.283**	**50.010.000**	**7.065.339.050**	**14.791.000.000**	**35.371.268.258**	**327.409.241.952**

5.6.3.9 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan (Rp33.829.823.867,00)

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan sebesar (Rp33.829.823.867,00) merupakan dampak dari adanya koreksi/penyesuaian aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	(405.086.772,01)	(2.373.589.323,00)	1.968.502.550,99	(82,93)
2	Dinas Pendidikan	(16.125.517.872,76)	(6.165.415.753,41)	(9.960.102.119,35)	161,55
3	Dinas Kesehatan	(611.557.820,09)	-	(611.557.820,09)	-
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	492.665.137,68	304.200.000,00	188.465.137,68	61,95
5	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(247.810.869,88)	504.739.000,00	(752.549.869,88)	(149,10)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(458.536.475,21)	556.672.965,00	(1.015.209.440,21)	(182,37)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(147.387.295,03)	-	(147.387.295,03)	-
8	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(105.149.079,62)	-	(105.149.079,62)	-
9	RSJD Surakarta	(432.596.441,65)	-	(432.596.441,65)	-
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	30.542.493,78	264.393.231,00	(233.850.737,22)	(88,45)
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	(459.944.676,96)	4.049.356.212,00	(4.509.300.888,96)	(111,36)
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	(667.693.835,09)	326.430.840,00	(994.124.675,09)	(304,54)
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	(0,01)	(12.806.740,00)	12.806.739,99	(100,00)
14	Satuan Polisi Pamong Praja	(565.900.000,04)	-	(565.900.000,04)	-
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.583,33	-	14.583,33	-
16	Dinas Sosial	(1.143.338.346,00)	(1.781.064.136,00)	637.725.790,00	(35,81)
17	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(10.047.561.048,99)	-	(10.047.561.048,99)	-
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(1.761.006.464,19)	(1.759.704.662,50)	(1.301.801,69)	0,07
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	(59.034.863,00)	59.034.863,00	(100,00)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(3.491.109.364,80)	(53.222.520,00)	(3.437.886.844,80)	6.459,46
21	Dinas Ketahanan Pangan	(0,02)	-	(0,02)	-
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	0,02	-	0,02	-
23	Dinas Perhubungan	13.206.822,32	(161.739.762,61)	174.946.584,93	(108,17)
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.515.110.500,00)	678.020.000,00	(2.193.130.500,00)	(323,46)
25	Dinas Koperasi dan UMKM	(0,07)	(212.630.000,00)	212.629.999,93	(100,00)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,03	178.620.000,00	(178.619.999,97)	(100,00)
27	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	(1.154.514.920,64)	191.973.338,00	(1.346.488.258,64)	(701,39)
28	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	0,04	(14.450.000,00)	14.450.000,04	(100,00)
29	Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.305.843.750,10)	49.248.000,00	(1.355.091.750,10)	(2.751,57)
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(0,08)	103.084.976,00	(103.084.976,08)	(100,00)
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	399.900.379,62	-	399.900.379,62	-
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(235.093.540,91)	-	(235.093.540,91)	-
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(1.882.892.262,56)	(103.472.000,00)	(1.779.420.262,56)	1.719,71
34	Sekretariat Daerah	8.282.717.318,77	6.341.917.495,25	1.940.799.823,52	30,60
35	Sekretariat DPRD	2.121.362.618,68	(1.191.960,00)	2.122.554.578,68	(178.072,63)
36	Inspektorat	(577.548.835,04)	-	(577.548.835,04)	-
37	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	65.454.999,96	-	65.454.999,96	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	313.707.165,36	50.193.571,25	263.513.594,11	524,99
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(2.208.195.214,92)	103.201.250,00	(2.311.396.464,92)	(2.239,70)
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	(592.058.273,00)	592.058.273,00	(100,00)
41	Badan Penghubung	0,08	803.077.791,00	(803.077.790,92)	(100,00)
	Jumlah	**(33.829.823.867,00)**	**1.214.748.675,98**	**(35.044.572.542,98)**	(2.884,92)

5.6.3.10 Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya **(Rp4.997.267.920,00)**

Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya sebesar (Rp4.997.267.920,00) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	(455.999.999,95)	-	(455.999.999,95)	-
2	Dinas Pendidikan	(281.196.110,00)	-	(281.196.110,00)	-
3	Dinas Kesehatan	(74.000.000,00)	140.850.000,00	(214.850.000,00)	(152,54)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(626.904.233,00)	-	(626.904.233,00)	-
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(697.940.750,00)	-	(697.940.750,00)	-
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	62.000.000,00	-	62.000.000,00	-
7	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	-	-	-	-
8	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	-	(52.432.571.000,00)	52.432.571.000,00	(100,00)
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	291.644.000,00	-	291.644.000,00	-
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	114.500.000,00	-	114.500.000,00	-
11	Dinas Sosial	(3.754.560.827,00)	-	(3.754.560.827,00)	-
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	74.000.000,00	-	74.000.000,00	-
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	29.500.000,00	(29.500.000,00)	(100,00)
14	Dinas Ketahanan Pangan	414.385.000,00	-	414.385.000,00	-
15	Dinas Perhubungan	66.000.000,00	-	66.000.000,00	-
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	(38.615.000,00)	-	(38.615.000,00)	-

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	374.885.500,00	(374.885.500,00)	(100,00)
18	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	(125.800.000,00)	211.648.338,00	(337.448.338,00)	(159,44)
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	299.583.000,00	(299.583.000,00)	(100,00)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	(50.000.000,00)	50.000.000,00	(100,00)
22	Sekretariat Daerah	-	3.861.216.750,00	(3.861.216.750,00)	(100,00)
23	Sekretariat DPRD	-	206.100.000,00	(206.100.000,00)	(100,00)
24	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	98.069.999,95	-	98.069.999,95	-
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(116.300.000,00)	-	(116.300.000,00)	-
26	Badan Penghubung	53.450.000,00	-	53.450.000,00	-
	Jumlah	**(4.997.267.920,00)**	**(47.343.787.412,00)**	**42.346.519.492,00**	**(89,44)**

Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya ini dikarenakan beberapa alasan dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Koreksi Tambah Karena		Total
		belum tercatat	penggabungan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	207.190.500	-	207.190.500
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	385.400.000	-	385.400.000
3	RSJD Surakarta	-	163.460.000	163.460.000
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	62.000.000	-	62.000.000
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	291.644.000	-	291.644.000
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	114.500.000	-	114.500.000
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	74.000.000	-	74.000.000
8	Dinas Ketahanan Pangan	414.385.000	-	414.385.000
9	Dinas Perhubungan	66.000.000	-	66.000.000
10	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	98.070.000	-	98.070.000
11	Badan Pengembangan SDM Daerah	-	165.974.750	165.974.750
12	Badan Penghubung	53.450.000	-	53.450.000
Jumlah		**1.766.639.500**	**329.434.750**	**2.096.074.250**

No.	SKPD	Koreksi Kurang Karena						Total
		penghapusan	dihibahkan	pencatatan ganda	tidak memenuhi standar	dikapitalisasi	penggabungan nilai	
1	SKPKD	-	-	456.000.000	-	-	-	456.000.000
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	604.686.610	-	-	-	-	-	604.686.610
3	Dinas Kesehatan	74.000.000	-	-	-	-	-	74.000.000
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-	-	16.500.000	995.804.233	-	1.012.304.233
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	697.940.750	-	-	-	-	-	697.940.750
6	RSJD Surakarta	-	-	-	-	163.460.000	-	163.460.000

No.	SKPD	Koreksi Kurang Karena						Total
		penghapusan	dihibahkan	pencatatan ganda	tidak memenuhi standar	dikapitalisasi	penggabungan nilai	
7	Dinas Sosial	3.754.560.827	-	-	-	-	-	3.754.560.827
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	38.615.000	-	38.615.000
9	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	-	125.800.000	-	-	-	-	125.800.000
10	Badan Pengembangan SDM Daerah	-	-	-	-	-	165.974.750	165.974.750
Jumlah		**5.131.188.187**	**125.800.000**	**456.000.000**	**16.500.000**	**1.197.879.233**	**165.974.750**	**7.093.342.170**

5.6.3.11 Koreksi/Penyesuaian Amortisasi (Rp80.105.975,83)

Koreksi/Penyesuaian Amortisasi sebesar (Rp80.105.975,83) merupakan dampak dari adanya koreksi/penyesuaian aset tak berwujud dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan	(183.866.675,00)	-	(183.866.675,00)	-
2	Dinas Kesehatan	-	(124.400.000,00)	124.400.000,00	(100,00)
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	458.749.982,51	-	458.749.982,51	-
4	RSJD Surakarta	95.351.666,67	-	95.351.666,67	-
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(62.000.000,00)	-	(62.000.000,00)	-
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	(207.497.866,67)	-	(207.497.866,67)	-
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(54.391.666,67)	-	(54.391.666,67)	-
8	Dinas Sosial	-	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(53.583.333,33)	-	(53.583.333,33)	-
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	(5.900.000,00)	5.900.000,00	(100,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan	(171.723.583,33)	-	(171.723.583,33)	-
12	Dinas Perhubungan	(64.900.000,00)	-	(64.900.000,00)	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.785.416,66	-	19.785.416,66	-
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	(187.502.800,00)	187.502.800,00	(100,00)
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	(3.000.000,00)	3.000.000,00	(100,00)
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	(49.996.600,00)	49.996.600,00	(100,00)
17	Sekretariat DPRD	-	(41.220.000,00)	41.220.000,00	(100,00)
18	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(96.435.500,00)	-	(96.435.500,00)	-
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	116.300.000,00	-	116.300.000,00	-
20	Badan Pengembangan SDM Daerah	165.974.750,00	-	165.974.750,00	-
21	Badan Penghubung	(41.869.166,67)	-	(41.869.166,67)	-
	Jumlah	**(80.105.975,83)**	**(408.019.400,00)**	**327.913.424,17**	**(80,37)**

5.6.3.12 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya Rp5.008.727.119,30

Koreksi/Penyesuaian penyusutan aset lainnya sebesar Rp5.008.727.119,30 merupakan dampak dari adanya koreksi/penyesuaian aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %

1	Dinas Pendidikan	604.686.610,00	-	(604.686.610,00)	-
2	Dinas Kesehatan	25.160.000,00	-	(25.160.000,00)	-
3	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	697.940.750,00	-	(697.940.750,00)	-
	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	(0,02)			
4	Dinas Sosial	3.653.793.426,00	-	(3.653.793.426,00)	-
5	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	27.466.333,33	(211.648.338,00)	(239.114.671,33)	112,98
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(0,01)	16.000.000,00	16.000.000,01	100,00
7	Sekretariat Daerah	-	(1.480.503.125,25)	(1.480.503.125,25)	100,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(320.000,00)	-	320.000,00	-
	Jumlah	**5.008.727.119,30**	**(1.676.151.463,25)**	**(6.684.878.582,57)**	**312,98**

5.6.3.13 Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai — Rp13.925.000,00

Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai sebesar Rp13.925.000,00 merupakan koreksi atas utang belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	2.487.500,00	(2.487.500,00)	(100,00)
2	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	13.925.000,00	-	13.925.000,00	-
	Jumlah	**13.925.000,00**	**2.487.500,00**	11.437.500,00	**459,80**

5.6.3.14 Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa — Rp39.567.101,64

Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp39.567.101,64 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	(5.442.463.983,84)	5.442.463.983,84	(100,00)
2	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	39.567.100,00	-	39.567.100,00	-
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1,64	-	1,64	-
	Jumlah	**39.567.101,64**	**(5.442.463.983,84)**	**5.482.031.085,48**	**(100,00)**

5.6.3.15 Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain — (Rp0,62)

Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain sebesar (Rp0,62) merupakan koreksi atas selisih koma karena pembulatan antar akun di neraca dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	(0,50)	(0,21)	(0,29)	138,10
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	0,43	(0,42)	0,85	(202,38)
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	0,58	-	0,58	-
4	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	(0,89)	0,89	(100,00)

BAB 6
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM

Provinsi Jawa Tengah secara geografis terletak pada 5°40′-8°30′ Lintang Selatan dan antara 108°30′-111°30′ Bujur Timur, Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 Km dan dari Utara ke Selatan 226 Km (tidak termasuk pulau Karimunjawa). Garis pantai yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah sepanjang 791,76 Km, terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km.

Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota, terdiri dari 576 kecamatan, 753 kelurahan dan 7.809 desa. Luas Wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa (1,70 persen luas Indonesia). Luas yang ada terdiri dari 1,00 juta hektar (30,80 persen) lahan sawah dan 2,25 juta hektar (69,20 persen) bukan lahan sawah. Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, kawasan Budidaya meliputi Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Peternakan dan Permukiman seluas 2.693.008 Ha dan Kawasan Lindung meliputi Hutan Lindung, Kawasan Sempadan, Suaka Alam dan Pelestarian Alam, serta Kawasan Lindung Karst seluas 561.404 Ha.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 berdasarkan Sensus Penduduk BPS tahun 2020 sebanyak 36.516.035 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Brebes sebanyak 1.978.759 jiwa, diikuti Kabupaten Cilacap sebanyak 1.944.857 jiwa, diikuti Kabupaten Banyumas sebanyak 1.776.918 jiwa dan Kota Semarang sebanyak 1.653.524 jiwa, keempat Kabupaten/Kota ini menyumbang sekitar seperlima penduduk di Jawa Tengah. Jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kota Magelang sebanyak 121.526 jiwa selanjutnya diikuti Kota Salatiga sebanyak 192.322 jiwa dan Kota Tegal sebanyak 273.825 jiwa, kelima kota tersebut hanya memilikia andil sekitar 4 pesen dari total penduduk di Jawa Tengah. Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah mencapai 1.113 jiwa per kilometer persegi.

Struktur penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukan bahwa mayoritas penduduk Jawa Tengah didominasi oleh generasi Z, Milenial, dan generasi X. Proporsi generasi Z sebanyak 25,31 persen, generasi Melenial sebanyak 24,93 persen dan generasi X sebanyak 22,53 persen dari total populasi penduduk Jawa Tengah. Generasi-generasi ini sebagian besar termasuk dalam usia produktif yang menjadi peluang untuk mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi.

Struktur penduduk Jawa Tengah yang bekerja menurut lapangan usaha berdasarkan hasil sensus BPS tahun 2020 paling banyak bekerja di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 4,69 juta orang (26,06 persen); industri pengolahan sebanyak 3,90 juta orang (21,71 persen); perdagangan besar dan eceran sebanyak 3,33 juta orang (18,54 persen) dan lapangan usaha konstruksi sebesar 1,32 juta (7,36 persen). Sedangkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha sesuai dengan Data BPS Triwulan VI 2021, lapangan usaha yang mencatat pertumbuhan positif diantaranya lapangan usaha konstruksi sebesar 7,37 persen; informasi dan komunikasi sebesar 6,04 persen; pengadaan listrik dan gas sebesar 5,95 persen; dan lapangan usaha industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang memiliki peran dominan juga tumbuh positif masing-masing sebesar 2,32 persen, 0,81 persen, dan 5,80

persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif di antaranya penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 5,92 persen; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,87 persen; serta pertambangan dan penggalian sebesar 4,40 persen. Lapangan usaha yang mencatatkan pertumbuhan negatif pada tahun 2021 hanya administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar -0,64 persen.

6.2 SEJARAH PERKEMBANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Provinsi Jawa Tengah sudah dikenal sejak jaman sebelum merdeka didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu.

1. **Jaman Penjajahan Belanda**

   Berdasarkan *Wet houdende decentralisatie van het Bestuur in Nederland - Indie* (*Decentralisatie Wet* 1903), maka pemerintahan di Jawa dan Madura terbagi atas *Gewest* (Karesidenan), *Afdeeling/Regentschap* (Kabupaten), *District / Standgeemente* (Kota praja), dan *Oderdistrict* (Kecamatan).

2. **Jaman Pendudukan Jepang**

   Pada masa pendudukannya, Jepang mengadakan perubahan Tata Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 (Tahun Jepang 2062) yang menetapkan bahwa seluruh *Jawa kecuali Vorstenkendeh* (Kerajaan-kerajaan) terbagi dalam wilayah *Syuu* (Karesidenan), *Si* (Kotapraja), *Ken* (Kabupaten), *Gun* (Distrik), *Son Conder Distrik dan Ku* (Kelurahan).

3. **Setelah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945**

   Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, diterbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 yang menetapkan Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 ditetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1950.

6.3 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

Provinsi Jawa Tengah sejak merdeka sampai dengan sekarang telah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu :

1. R. Pandji Soeroso, pada Tahun 1945;
2. KRT Mr Wongsonegoro, Tahun 1945 s/d 1949;
3. R. Boedijono, Tahun 1949 s/d 1954;
4. RMT. Mangunnegoro, Tahun 1954 s/d 1958;
5. R. Soekardji Mangoen Koesoemo, Tahun 1958 s/d 1960;
6. Mochtar, Tahun 1960 s/d 1966;
7. Moenadi, Tahun 1966 s/d 1974;
8. Soepardjo Rustam, Tahun 1974 s/d 1983;
9. H.M. Ismail, Tahun 1983 s/d 1993;
10. H. Soewardi, Tahun 1993 s/d 1998;
11. H. Mardiyanto, Tahun 1998 s/d Agustus 2007;
12. H. Ali Mufiz, Agustus 2007 s/d 22 Agustus 2008;

13. H. Bibit Waluyo, Agustus 2008 s/d Agustus 2013;
14. H. Ganjar Pranowo, Agustus 2013 s/d 2018; dan
15. H. Ganjar Pranowo, Agustus 2018 s/d 2023.

DPRD Provinsi Jawa Tengah mulai Tahun 1955 sampai sekarang dipimpin 10 (sepuluh) orang, yaitu:

1. H. Imam Sofwan, Tahun 1955 s/d 1971;
2. Parwoto, Tahun 1971 s/d 1977;
3. H. Widarto, Tahun 1977 s/d 1982;
4. Ir. H. Soekorahardjo, Tahun 1982 s/d 1992;
5. Drs. H. Soeparto Tjitrodihardjo, Tahun 1992 s/d 1997;
6. Alip Pandoyo, Tahun 1997 s/d 1999;
7. Mardijo, Tahun 1999 s/d 2004;
8. H. Murdoko SH, Tahun 2004 s/d 2012;
9. Drs. Rukma Setya Budi MM, Tahun 2012 s/d 2019; dan
10. H. Bambang Kusriyanto. B.Sc, Tahun 2019 s/d sekarang.

6.4 VISI, MISI & PROGRAM UNGGULAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
"MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI"
"TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI"

Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Program Unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1. Sekolah tanpa sekat: pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkataan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tetang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

BAB 7
PENUTUP

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut disampaikan Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksasanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kami berharap penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO